



WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029;
 - b. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan Daerah, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Daerah; dan
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 3

- (1) Sistematika penulisan RKPD disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Isi dan uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) RKPD menjadi pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, disusun berita acara kesepakatan antara Wali Kota dengan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2027.
- (3) Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terjadi kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

BAB III

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD 2025-2029.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, mempedomani RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk diverifikasi dan diselaraskan dengan RKPD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027.

- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan;
 - b. pengendalian pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi hasil.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan menghimpun dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari setiap Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 JULI 2026
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 JULI 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 10



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat dengan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 merupakan tahun ketiga perencanaan dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode Tahun 2025-2030. Selain itu RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, RKP Tahun 2027 dan program strategis nasional serta pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027.

Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Bagi Perangkat Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). RKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dengan mempertimbangkan renstra perangkat daerah, program pembangunan daerah dan dinamika permasalahan yang berkembang.

Maka berdasarkan hal tersebut, dokumen RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab untuk dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;



2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 dilakukan melalui beberapa alur proses penyusunan substansi sebagaimana dituangkan pada Gambar berikut.

Gambar 1.1.
Proses Penyusunan RKPD Tahun 2027



Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

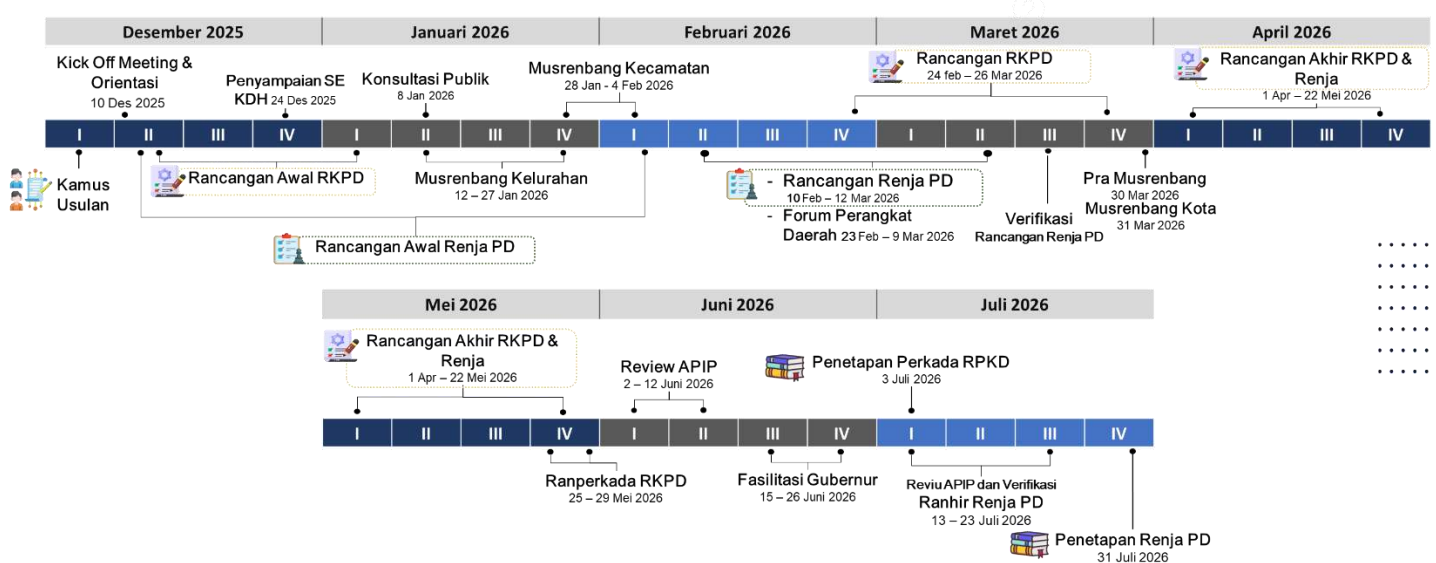
Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 diawali dengan *Kick Off Meeting* dan Orientasi Penyusunan RKPD tahun 2027 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025, dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 yang bertujuan untuk menjaring masukan dan saran penyempurnaan yang berasal dari berbagai *stakeholder* pembangunan di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya Musrenbang

Tingkat Kelurahan dan Kecamatan sebagai forum penjangkaran aspirasi masyarakat dan penyelarasan Usulan Prioritas dari Tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Forum Perangkat Daerah/Musrenbang Sektoral yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta rencana anggaran dengan tetap dapat menjangkarkan masukan dan saran penyempurnaan untuk rancangan RKPD Tahun 2027. Kemudian pelaksanaan Pra-Musrenbang Tingkat Kota, yang dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kota sebagai forum pertemuan antar pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan Kota Tasikmalaya dalam rangka membahas rancangan RKPD Tahun 2027.

Setelah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2027 untuk penajaman dan penetapan daftar program dan kegiatan prioritas Kota Tasikmalaya, yang telah mengacu pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Rancangan akhir RKPD Tahun 2027 yang telah disusun dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2027 melalui Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 pada bulan Juli 2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, *top-down* dan *bottom-up*, holistik, tematik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendorong pencapaian kinerja yang akan didanai dan bukan sekedar untuk melaksanakan tugas fungsi perangkat daerah bersifat rutinitas semata. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Gambar 1.2.
Rencana Jadwal Pelaksanaan
Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027



Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026.



Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan dalam penyusunan RKPD dimulai dari tahap persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);



27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 5);
30. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48).

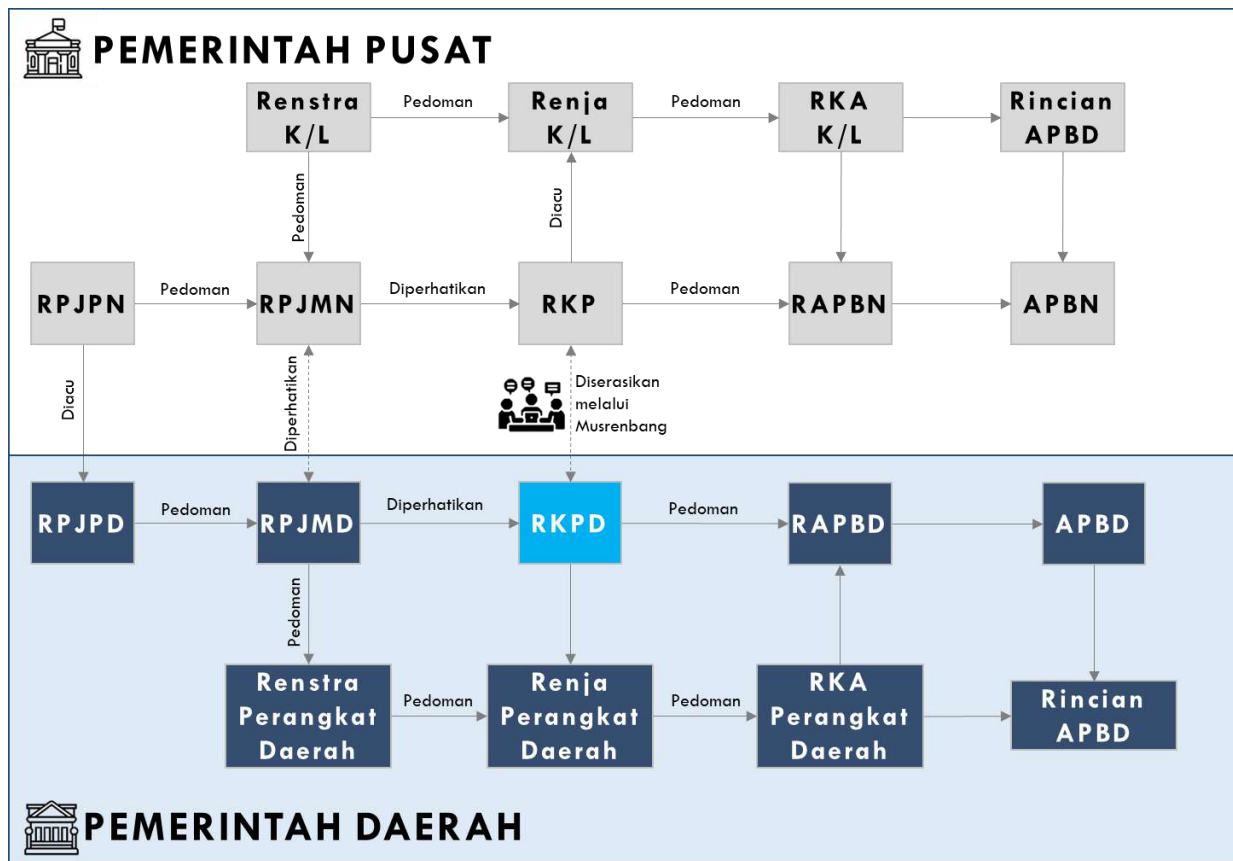
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Adapun hubungan antara RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2027 mengacu dan mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Startegis Nasional Tahun 2027;
2. RKPD Tahun 2027 mengacu dan mendukung RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027;
3. RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029;
4. RKPD Tahun 2027 mempertimbangkan hasil Evaluasi RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025;
5. RKPD Tahun 2027 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
6. RKPD Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027. Adapun, proses penyusunan RKPD dengan Renja PD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling melengkapi; dan
7. RKPD Tahun 2027 menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2027.

Hubungan keterkaitan antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.3.
Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 disusun dengan maksud sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029 serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2027 dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. Adapun tujuan RKPD Tahun 2027 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah Kota Tasikmalaya;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2027;
3. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kota.
4. Mewujudkan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 disusun sesuai dengan sistematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan mengenai latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027, telaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran, Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025, proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027, kinerja keuangan tahun 2023-2025, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis serta Pendanaan non-APBD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menyajikan tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 beserta targetnya, tema dan fokus pembangunan, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan serta Program prioritas RKPD Tahun 2027.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menyajikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan RKPD.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menyajikan gambaran umum Kota Tasikmalaya sebagai dasar untuk memberikan pemahaman awal mengenai kondisi dan potensi daerah secara menyeluruh. Uraian mencakup empat aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek ini memberikan kerangka awal dalam menilai kinerja pembangunan dan merumuskan arah kebijakan yang tepat bagi Kota Tasikmalaya ke depan.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada aspek geografi dan demografi, dijelaskan gambaran awal mengenai karakteristik wilayah Kota Tasikmalaya yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Analisis pada aspek geografi di Kota Tasikmalaya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Adapun gambaran kondisi demografi memberikan gambaran terkait struktur, komposisi, persebaran penduduk di Kota Tasikmalaya dalam periode tahun tertentu.

2.1.1.1. Karakteristik Wilayah

A. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada 108°08'33" – 108°24'02" Bujur Timur dan 7°10' – 7° 26'32" Lintang. Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalaya dari ibukota provinsi Jawa Barat yaitu ± 105 kilometer dan dari Kota Jakarta ± 255 kilometer.

Kota Tasikmalaya merupakan pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya, yang dibentuk pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Batas Daerah Kota Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Berikut batas Kota Tasikmalaya :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah Kota Tasikmalaya berdasarkan Kepmendagri nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau seluas 182,964 km². Rincian luas wilayah tiap kelurahan dan kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.1.
Luas Wilayah Administrasi Kelurahan dan Kecamatan
di Wilayah Kota Tasikmalaya

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
Bungursari	Bantarsari	2,042
	Bungursari	2,770
	Cibunigeulis	3,631
	Sukajaya	2,361
	Sukalaksana	3,232
	Sukamulya	1,364
	Sukarindik	2,150
Total Luas Kecamatan Bungursari		17,551
Cibeureum	Awipari	1,654
	Ciakar	2,628
	Ciherang	1,890
	Kersanagara	2,541
	Kota Baru	2,873
	Margabakti	1,616
	Setiajaya	2,715
	Setianagara	1,435
	Setiaratu	1,231
Total Luas Kecamatan Cibeureum		18,582
Cihideung	Argasari	0,716
	Cilembang	0,784
	Nagarawangi	0,554
	Tugujaya	1,580
	Tuguraja	1,383
	Yudanagara	0,422
Total Luas Kecamatan Cihideung		5,438
Cipedes	Cipedes	1,267
	Nagarasari	2,630
	Panglayungan	1,705
	Sukamanah	3,412
Total Luas Kecamatan Cipedes		9,014
Indihiang	Indihiang	1,577
	Panyingkiran	0,908
	Parakannyasag	2,037
	Sirnagalih	1,096
	Sukamaju Kaler	2,699
	Sukamaju Kidul	2,517
Total Luas Kecamatan Indihiang		10,834
Kawalu	Cibeuti	2,961
	Cilamajang	1,785
	Gunung Gede	3,985
	Gunung Tandala	4,605
	Karanganyar	3,600
	Karsamenak	3,140
	Leuwiliang	4,164
	Talagasari	2,711
	Tanjung	3,134
	Urug	11,474
Total Luas Kecamatan Kawalu		41,560
Mangkubumi	Cigantang	3,080
	Cipari	2,896

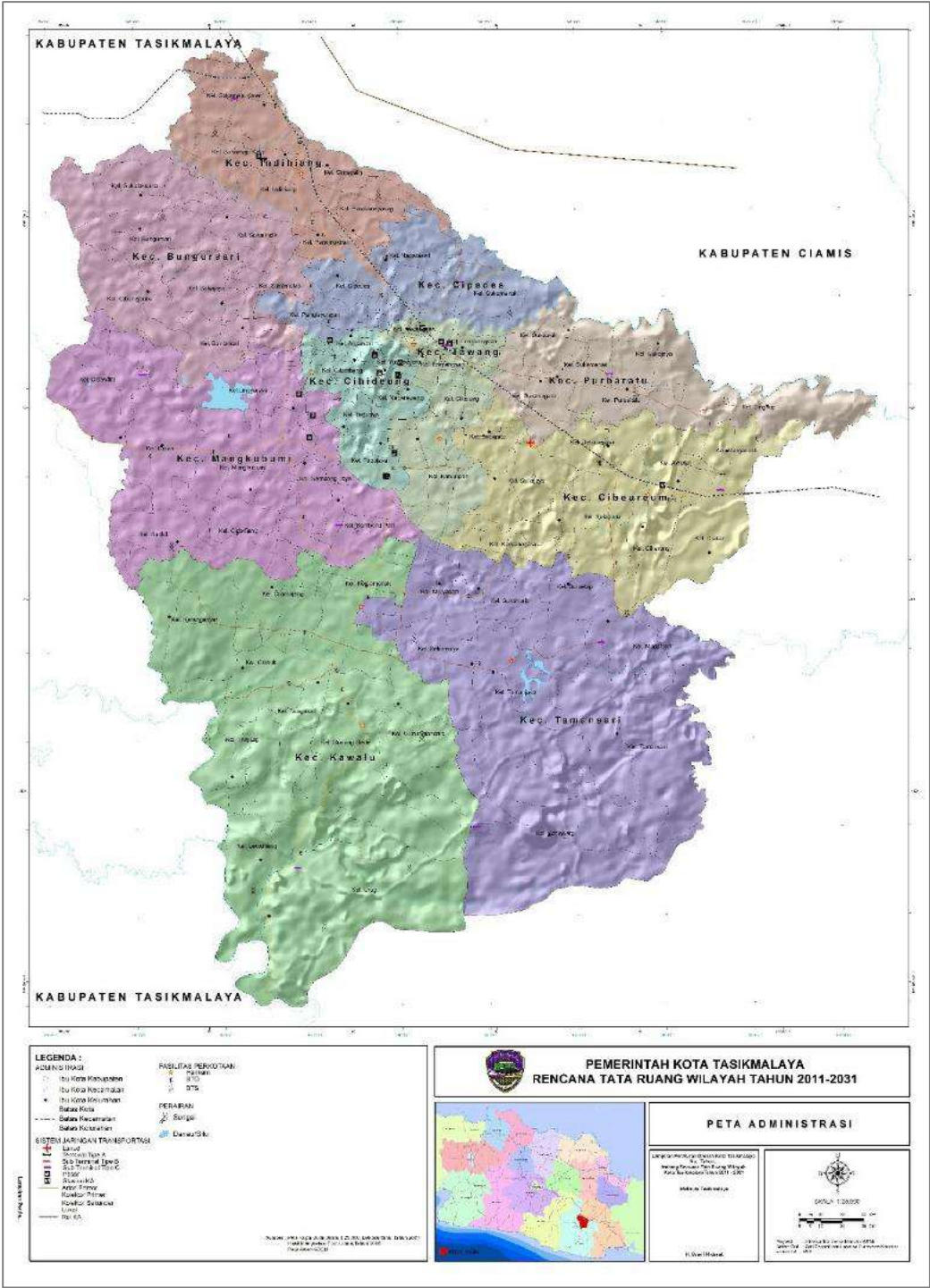


Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
	Cipawitra	3,230
	Karikil	2,766
	Linggajaya	4,641
	Mangkubumi	3,350
	Sambongjaya	2,322
	Sambongpari	1,827
Total Luas Kecamatan Mangkubumi		24,113
Purbaratu	Purbaratu	1,775
	Singkup	3,742
	Sukaasih	1,614
	Sukajaya	2,029
	Sukamenak	1,460
	Sukanagara	1,640
Total Luas Kecamatan Purbaratu		12,260
Tamansari	Mugarsari	2,920
	Mulyasari	2,835
	Setiamulya	2,689
	Setiawargi	9,483
	Sukahurip	2,035
	Sumelap	2,188
	Tamanjaya	4,547
	Tamansari	10,018
Total Luas Kecamatan Tamansari		36,715
Tawang	Cikalang	1,452
	Empangsari	0,570
	Kahuripan	3,248
	Lengkongsari	1,169
	Tawangsari	0,459
Total Luas Kecamatan Tawang		6,898
Total Luas Kota Tasikmalaya		182,964

Sumber: Kepmendagri nomor 300.2.2 -2138 Tahun 2025, diolah Bappelitbangda, 2026

Kota Tasikmalaya terbagi menjadi 10 kecamatan dan 69 kelurahan, untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan pembagian wilayah administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1. dan terperinci dalam tabel 2.1.

Gambar 2.1.
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Tasikmalaya



Sumber: Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Di Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur-Pangandaran, Kota Tasikmalaya menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa. Posisi geografis yang strategis sebagai penghubung antar daerah di Jawa Barat bagian selatan, dengan jalur transportasi yang menghubungkan kota-kota besar di sekitar Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Tengah, serta didukung oleh infrastruktur jalan yang cukup baik menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan jasa bagi daerah sekitarnya. Selain itu, Kota Tasikmalaya berperan dalam pengembangan sektor pendidikan di Jawa Barat bagian selatan. Terdapat sejumlah perguruan tinggi dan sekolah yang menarik mahasiswa dari luar daerah. Sebagai kota yang berkembang,



Kota Tasikmalaya juga berperan dalam memberikan kontribusi sosial dan budaya bagi daerah-daerah sekitar.

B. Topografi

Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl, sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl.

Gambar 2.2.

Peta Topografi Kota Tasikmalaya



Sumber: Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran.

Gambar 2.3.
Peta Kemiringan Kota Tasikmalaya



Sumber: Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031



Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota Tasikmalaya (lihat Gambar 2.3). Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.2 memperlihatkan kondisi kemiringan lahan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.2.
Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

Kelas Lereng	Luas (Km ²)	% Luas
< 8 %	147,787	80,773974
8 % - 15 %	29,8046	16,289904
16 % - 25 %	5,35193	2,9251332
26 % - 40 %	0,020107	0,0109896
Total	182,9636	100

Sumber: Data BIG dan Hasil Pengolahan, 2017.

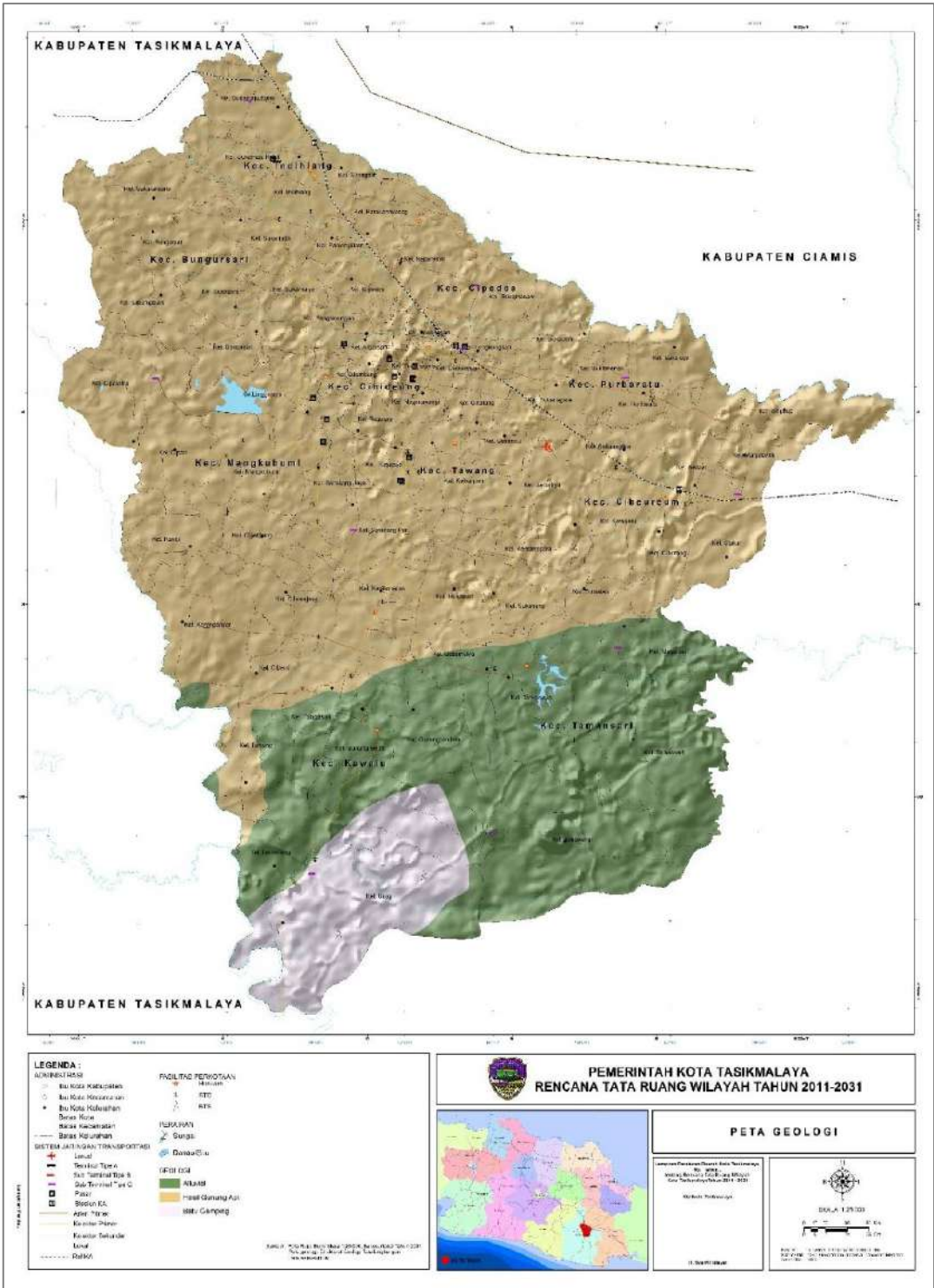
Kondisi kemiringan di Kota Tasikmalaya di dominasi dengan kemiringan kurang dari 8%. Secara keseluruhan, lebih dari 97% luas wilayah di Kota Tasikmalaya berada di bawah kemiringan 15%. Dengan kondisi wilayah datar yang cukup luas, sehingga sangat bergantung pada sistem aliran air yang baik untuk menghindari adanya genangan.

C. Geologi

Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisna, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin.

Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlipatan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan.

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kota Tasikmalaya



Sumber: Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW
Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

D. Hidrologi dan Hidrogeologi

Potensi sumber daya air dari air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ). Di wilayah Kota Tasikmalaya mengalir 51 Daerah Irigasi yang termasuk dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar 17 m³/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m³/detik, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m³/detik. Jumlah kedua limpasan adalah 1.658.880 m³/hari.



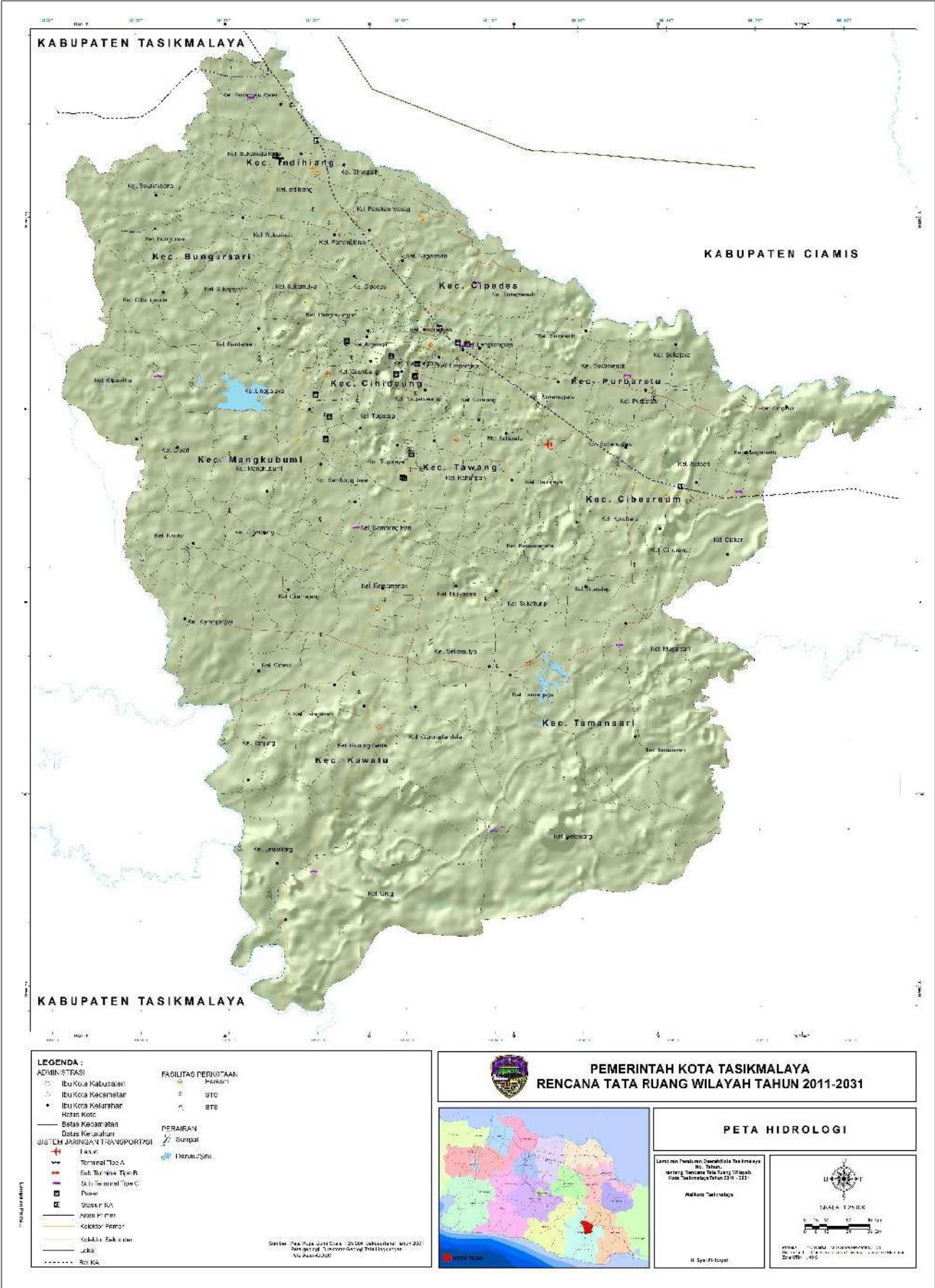
Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar 1.646.750 m³. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi (6.000 m³/detik), Situ Cibeureum, Situ Cibanjuran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari (6.000 m³/detik).

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00-10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50-7,00 m. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, Kawalu dan Tamansari.

Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik, sistem akuifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping.



Gambar 2.5.
Peta Hidrologi Kota Tasikmalaya



Sumber: Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031



E. Klimatologi

Sepanjang tahun 2025, Kota Tasikmalaya menunjukkan karakteristik iklim tropis yang stabil dengan rata-rata suhu harian rata-rata 25,3°C dan rata-rata kelembaban udara 83,4%. Rata-rata suhu dan kelembaban udara pada tahun 2025 setiap bulannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara
Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	22,4	25,5	31,3	58,0	79,0	95,0
Februari	22,3	26,0	31,6	58,0	78,0	94,0
Maret	22,4	26,4	31,7	60,0	79,0	95,0
April	22,2	24,7	31,3	60,0	83,0	95,0
Mei	22,5	25,6	31,1	62,0	86,0	97,0
Juni	22,3	25,0	30,0	63,0	85,0	97,0
Juli	21,2	24,3	29,0	65,0	85,0	98,0
Agustus	21,3	24,4	29,3	66,0	87,0	99,0
September	21,9	25,8	30,3	61,0	85,0	98,0
Oktober	22,4	25,6	31,0	62,0	83,0	94,0
November	22,1	25,0	30,7	67,0	87,0	96,0
Desember	22,2	25,4	31,4	62,0	84,0	94,0
Rata-rata	22,1	25,3	30,7	62,0	83,4	96,0

Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2026.

Sepanjang tahun 2025, Kota Tasikmalaya mencatat, suhu rata-rata bulanan tertinggi terjadi pada bulan Maret yang mencapai 26,4°C, sementara suhu rata-rata terendah tercatat pada bulan Juli sebesar 24,3°C. Dalam rentang harian, kota ini memiliki rata-rata suhu minimum di angka 22,1°C dan rata-rata suhu maksimum sebesar 30,7°C. Adapun titik suhu ekstrem tertinggi secara rata-rata terjadi pada bulan Maret (31,7°C) dan titik terendah pada bulan Juli (21,2°C).

Kondisi kelembaban udara di Kota Tasikmalaya selama tahun 2025 tergolong tinggi dengan rata-rata tahunan mencapai 83,4%. Tingkat kelembaban rata-rata bulanan paling tinggi terjadi pada bulan Agustus dan November, yaitu sebesar 87,0%, sedangkan tingkat kelembaban rata-rata terendah berada di bulan Februari sebesar 78,0%. Secara umum, kelembaban udara di kota ini bergerak dalam rentang rata-rata minimum 62,0% hingga rata-rata maksimum 96,0%. Puncak kelembaban maksimum tertinggi bahkan sempat menyentuh angka 99,0% pada bulan Agustus.



Karakteristik curah hujan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 mencatat fluktuasi yang tajam, dengan puncak presipitasi tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 820,8 mm dan titik terendah pada bulan April yang hanya mencapai 112,9 mm. Pada tahun 2025, jumlah curah hujan dan freku hari hujan di Kota Tasikmalaya setiap bulannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
di Kota Tasikmalaya Tahun 2025

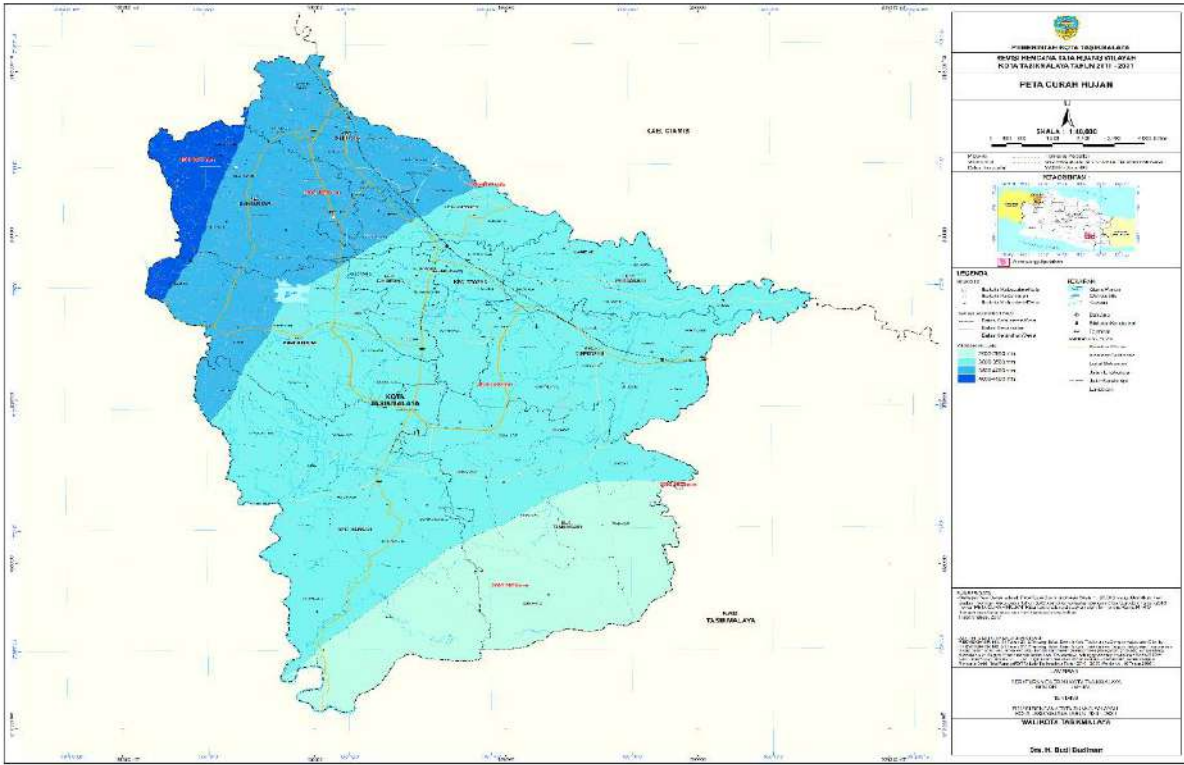
Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari)
(1)	(2)	(3)
Januari	142,0	23,0
Februari	127,4	17,0
Maret	146,5	17,0
April	112,9	15,0
Mei	171,9	21,0
Juni	253,8	17,0
Juli	139,3	13,0
Agustus	204,1	19,0
September	132,1	19,0
Oktober	267,8	23,0
November	820,8	24,0
Desember	292,0	18,0
Rata-rata	234,2	18,8

Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2026.

Pada tahun 2025, Kota Tasikmalaya mencatat rata-rata curah hujan bulanan sebesar 234,2 mm. Intensitas curah hujan tertinggi yang sangat signifikan terjadi pada bulan November dengan jumlah mencapai 820,8 mm, sementara curah hujan terendah tercatat pada bulan April sebesar 112,9 mm. Selain bulan November, volume curah hujan yang cukup tinggi juga terjadi pada bulan Desember (292,0 mm), Oktober (267,8 mm), dan Juni (253,8 mm).

Frekuensi kejadian hujan di Kota Tasikmalaya rata-rata berlangsung selama 18,8 hari setiap bulannya. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November dengan total 24 hari hujan, disusul oleh bulan Januari dan Oktober yang masing-masing memiliki 23 hari hujan. Sebaliknya, frekuensi hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juli dengan catatan hanya 13 hari hujan dalam satu bulan.

Gambar 2.6.
Peta Klimatologi Kota Tasikmalaya



Sumber: Data BIG (diolah), 2026.

Peta klimatologi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kota Tasikmalaya memiliki variasi tingkat curah hujan tahunan yang terbagi ke dalam empat zona klasifikasi utama:

- **Zona Curah Hujan Sangat Tinggi** (> 4000 mm/tahun): Terkonsentrasi di wilayah paling barat dan sedikit area di utara (ditandai dengan warna biru tua).
- **Zona Curah Hujan Tinggi** (3501 - 4000 mm/tahun): Meliputi area transisi di sisi barat dan utara yang berbatasan langsung dengan wilayah pegunungan atau dataran tinggi.
- **Zona Curah Hujan Sedang** (3001 - 3500 mm/tahun): Merupakan zona terluas yang mencakup pusat kota (Kota Tasikmalaya) hingga sebagian besar wilayah tengah dan timur.
- **Zona Curah Hujan Rendah** (2501 - 3000 mm/tahun): Terletak di sisi tenggara wilayah kota (ditandai dengan warna hijau paling muda).

2.1.1.2. Kondisi Pola Ruang

Penggunaan lahan Kota Tasikmalaya didominasi lahan sawah sebesar 32,683% atau 59,797 Km², permukiman sebesar 30,019% atau 54,923 km² dan hutan sebesar 17,151% atau 31,380 km². Berikut rincian penggunaan lahan kota Tasikmalaya.

Tabel 2.5.
Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya

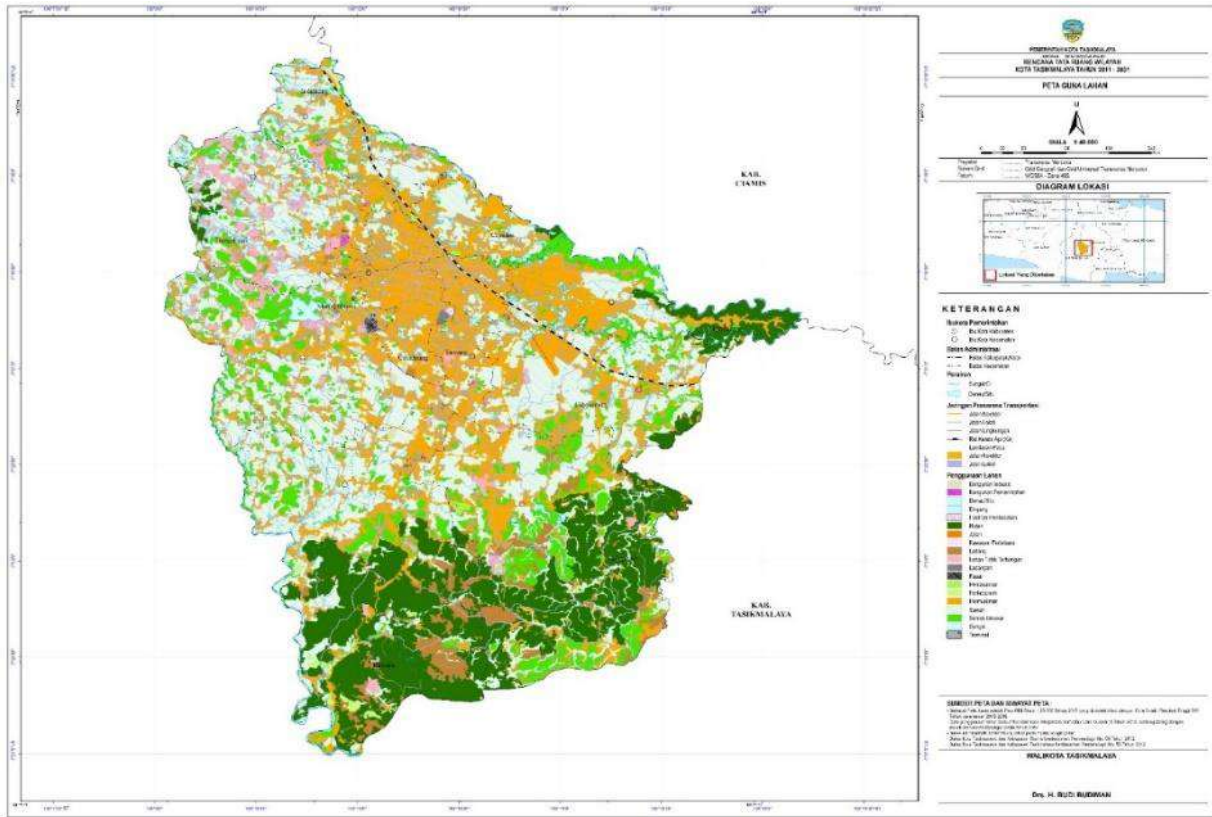
Penggunaan Lahan	Luas	
	km ²	%
Sawah	59,797	32,683
Permukiman	54,923	30,019
Hutan	31,380	17,151
Semak Belukar	18,552	10,139



Penggunaan Lahan	Luas	
	km ²	%
Ladang	5,479	2,994
Lahan Tidak Terbangun	5,244	2,866
Empang	3,570	1,951
Sungai	1,113	0,609
Bangunan Industri	0,583	0,319
Danau/Situ	0,580	0,317
Pemukaman	0,257	0,141
Lapangan	0,175	0,096
Pasar	0,142	0,078
Bangunan Pemerintahan	0,107	0,058
Terminal	0,076	0,042
Kawasan Pariwisata	0,048	0,026
Fasilitas Peribadatan	0,008	0,005
Jumlah	182,964	100

Sumber: Draft RTRW Kota Tasikmalaya 2025 - 2045

Gambar 2.7.
Peta Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2026

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
4. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, daya dukung dan daya tampung wilayah kota, kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah Kota Tasikmalaya dirumuskan dengan kriteria:

1. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
2. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat beserta rencana rincinya;
3. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
4. Memperhatikan mitigasi bencana pada wilayah kota;
5. Memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan dalam wilayah kota;
6. Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 % dari luas wilayah kota;
7. Menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal;
8. Menyediakan ruang terbuka non hijau (RTNH) untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota;
9. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan;
10. Merujuk pada rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya, dimana terdapat beberapa materi terkait rencana pola ruang yang harus diperhatikan secara daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kota yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, maka berdasarkan urutan prioritas pada masing-masing kawasan adalah sebagai berikut:

a) Kawasan lindung yang meliputi:

2. Badan Air
3. Kawasan Perlindungan Setempat
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b) Kawasan budidaya yang meliputi:

1. Badan Jalan
2. Kawasan Hutan Produksi
3. Kawasan Perkebunan Rakyat
4. Kawasan Pertanian
5. Kawasan Peruntukan Industri
6. Kawasan Permukiman
7. Kawasan Perdagangan dan Jasa
8. Kawasan Perkantoran
9. Kawasan Transportasi
10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan



11.Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau

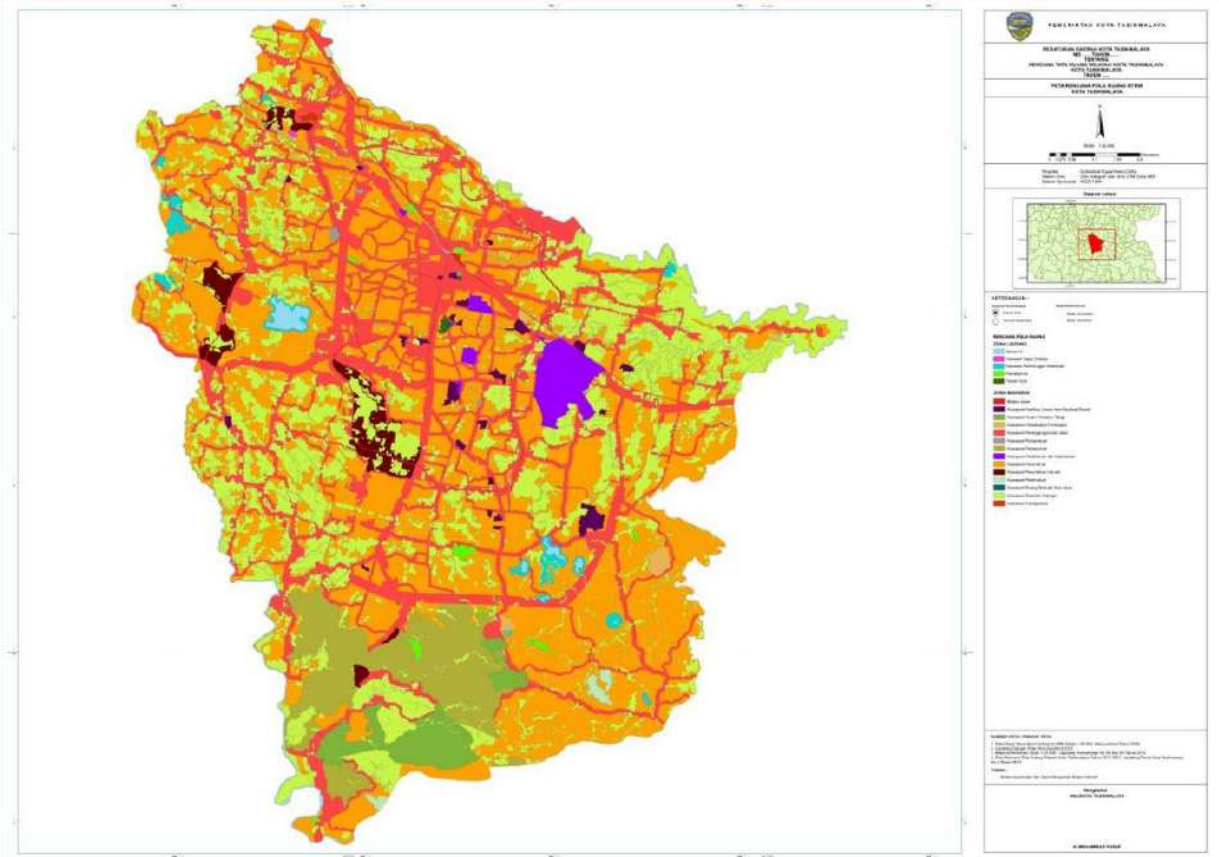
Rencana pola ruang di Kota Tasikmalaya serta luasan masing-masing kegiatan yang akan dikembangkan hingga tahun 2044 dapat dilihat pada Tabel 2.6. dan Gambar 2.8 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2044 berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung pada KLHS Revisi RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6.
Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya

No	Peruntukan Pola Ruang	Draft RTRW 2025-2045	
		Luas (km²)	%
Kawasan Lindung			
1	Badan Air	1,908557	1,0431
2	Kawasan Perlindungan Setempat	0,743803	0,4065
3	Kawasan Cagar Budaya	0,030972	0,0169
4	Pemukaman	1,192297	0,6517
5	Taman Kota	0,095583	0,0522
6	Taman RW	0,038392	0,0210
Kawasan Budidaya			
1	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	2,156137	1,1784
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	3,719547	2,0329
3	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	0,569424	0,3112
4	Kawasan Perdagangan dan Jasa	29,14258	15,9281
5	Kawasan Perikanan Budi Daya	0,035412	0,0194
6	Kawasan Perkantoran	0,331077	0,1810
7	Kawasan Perkebunan	18,61987	10,1768
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2,791515	1,5257
9	Kawasan Perumahan	95,95517	52,4449
10	Kawasan Peruntukan Industri	9,655579	5,2773
11	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	0,34118	0,1865
12	Kawasan Peternakan	0,467299	0,2554
13	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	0,023261	0,0127
14	Kawasan Tanaman Pangan	15,03516	8,2176
15	Kawasan Transportasi	0,111005	0,0607
TOTAL		182,9638	100,00%

Sumber: Draft RTRW Kota Tasikmalaya 2024 – 2044

Gambar 2.8.
Peta Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya

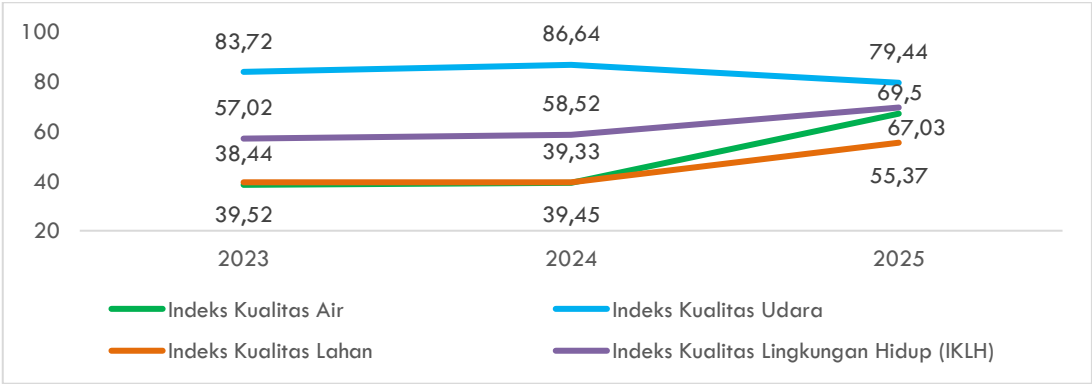


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2026

2.1.1.3. Kondisi Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami perubahan formulasi perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diberlakukan mulai pada tahun 2022. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dari tahun 2023-2025 mengalami kenaikan tiap tahunnya, namun kenaikan ini tidak ditunjang dengan kenaikan komponen lainnya, sehingga kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak terlalu signifikan.

Gambar 2.9.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya tahun 2023-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.



Indeks Kualitas Air di Kota Tasikmalaya tahun 2023 sebesar 38,44% mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 39,33% dan pada tahun 2025 sebesar 67,03% akan tetapi nilai tersebut masih dalam kategori kurang. Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kota Tasikmalaya masih belum baik, sehingga perlu ditingkatkan dalam pengelolaan air buangan (limbah), baik dari rumah tangga maupun dari industri. Selain itu juga ada beberapa sungai yang status mutu airnya cemar berat, di antaranya Sungai Cilamajang Hulu, Cilamajang Tengah, Ciloseh Tengah, Cikalang Tengah, Sungai Cimulu Hilir, dan beberapa sungai lainnya yang berada di lokasi pusat perdagangan dan jasa di Kota Tasikmalaya.

Indeks Kualitas Udara di Kota Tasikmalaya dari tahun 2023-2025 mengalami fluktuatif, namun secara umum kualitas udara di Kota Tasikmalaya berada pada kondisi baik. Indeks Kualitas Udara ini berdasarkan pada pengambilan sampel di lokasi perumahan/permukiman, industri, transportasi, dan kawasan komersil. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) atau *Air Quality Indeks* (AQI) Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 berada pada nilai 79,44 poin atau menurun dari tahun 2024 sebesar 86,64 poin (katagori baik). Hal ini disebabkan karena secara kumulatif daerah yang memiliki aktivitas cukup tinggi masih terpusat di beberapa titik, sehingga masih banyak wilayah yang kondisi udaranya baik.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2023-2025 mengalami peningkatan, tercatat tahun 2023 nilai IKL sebesar 39,52 poin menjadi 55,37 poin (kategori sedang) pada tahun 2025. Hal ini disebabkan ada perbedaan konstanta dalam proses perhitungan berdasarkan tutupan hutan primer, sedangkan untuk hutan primer tidak berada di wilayah Kota Tasikmalaya.

Gas rumah kaca (GRK) adalah sejumlah gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Gas rumah kaca ini berfungsi seperti kaca yang meneruskan cahaya matahari tetapi menangkap energi panas dari dalamnya. Menurut Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim sterdapat 6 (enam) jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu: CO₂ (karbon dioksida), CH₄ (metana), N₂O (dinitrogenoksida), HFC (hidro fluoro karbon), PFC (per fluoro karbon), dan SF₆ (sulfurheksa florida).

Nilai penurunan GRK untuk Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 sebesar 401,96937 Ton CO₂eq terus meningkat sampai dengan tahun 2021 sebesar 413,78127 Ton CO₂eq. Sedangkan untuk tahun 2025 nilai penurunan GRK di Kota Tasikmalaya masih dalam proses verifikasi oleh Bappenas dalam sistem aplikasi AKSARA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7.
Capaian Pembangunan Rendah Karbon
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025

Tahun	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)
2023	401,96
2024	413,78
2025	401,97

Sumber: AKSARA, 2026 (Data diolah).

Capaian akses air minum dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 capaian KK berakses air minum tercatat sebesar 57,57%, kemudian meningkat pada tahun 2024 sebesar 69,93% dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 72,50%. Angka tersebut melebihi dari target yang ditentukan dalam RPJMD yaitu sebesar 58,01% pada tahun 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.8.
Capaian Realisasi KK yang berakses Air Minum Tahun 2023-2025

Indikator	Satuan	Tahun		
		2023	2024	2025
Capaian KK berakses Air Minum	%	57,57	69,93	72,50

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2026.

Limbah domestik berkontribusi cukup besar pada pencemaran sungai di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut selaras dengan belum terpenuhinya akses layanan air limbah untuk seluruh masyarakat. Upaya pemenuhan layanan air limbah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terlihat dari capaian Kepala Keluarga (KK) berakses SPALD yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai pada Tahun 2025. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9.
Capaian KK yang berakses Air Limbah Tahun 2023-2025

Indikator	Satuan	Tahun		
		2023	2024	2025
Capaian KK berakses Air Limbah	%	62,8	63,47	69,35*

Ket * : data sementara

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2026.

Capaian akses air limbah domestik pada tahun 2023 sebesar 62,8% mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 63,47% dan pada tahun 2025 sebesar 69,35%. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pembangunan sarana air limbah baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat sebagai hasil dari pemicuan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

Timbulan sampah di Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 sebanyak 124.254,94 ton/tahun atau 430,42 ton/hari, sedangkan capaian pengelolaan sampah yaitu sebesar 104.610,23 ton/tahun atau 362,37 ton/hari. Dengan demikian capaian pengelolaan sampah mencapai 84,19 persen dari timbulan sampah keseluruhan pada tahun 2025.

Tabel 2.10.
Pengelolaan Persampahan di Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025

No.	Indikator	Satuan	Tahun		
			2023	2024	2025
1	Persentase Pengelolaan Sampah	%	82,17	86,14	84,19
2	Persentase Penanganan Sampah	%	65,21	68,84	66,47
3	Persentase Pengurangan Sampah	%	16,96	17,49	17,72

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026.

Tabel diatas memperlihatkan capaian pengelolaan sampah selama tahun 2023-2025 menunjukan peningkatan mulai dari 82,17 persen di tahun 2020 sampai pada 86,14 persen di tahun 2024 dan mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar 84,19 persen. Hal dikarenakan sampah ada sudah terkelola di sumber oleh sejumlah Masyarakat serta pelayanan persampahan yang masih belum merata di Kota Tasikmalaya. Terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah baik



kuantitas maupun kualitasnya, kurangnya SDM, dan belum adanya teknologi pengolahan sampah modern di TPA Ciangir menjadi faktor lain yang menyebabkan turunnya presentase pengelolaan sampah pada tahun 2025.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, timbulan sampah yang dikelola difasilitas pengelolaan sampah tahun 2025 berasal dari Bank Sampah, Pengepul, Kelompok Maggot, TPS3R, Gedong Resik dan Komposting. Proporsi sampah terkelola paling besar dilaksanakan oleh Pengepul sebanyak 21.673,778 Ton/Tahun, sedangkan untuk terendah dilaksanakan oleh Gedong Resik sebesar 1,1742 Ton/Tahun. Berikut data Capaian timbulan sampah yang terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.

Tabel 2.11.
Capaian timbulan sampah yang terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

No	Sumber	Jumlah (Unit)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
1	Bank Sampah	68	215,442
2	Pengepul	29	21.673,778
3	Kelompok Maggot	5	47,0435
4	TPS3R	3	25,4275
5	Gedong Resik	1	1,1742
6	Komposting	1	60,45
TOTAL			22.023,32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan data dari Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) Tahun 2025 sebesar 66,47%. Angka tersebut tentunya masih jauh dari harapan, sehingga ke depan perlu ada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam layanan penuh pengumpulan sampah.

Untuk data kelistrikan pada tahun 2025, PLN Rayon Kota Tasikmalaya memiliki pelanggan sebanyak 347.703 dan mampu memproduksi energi listrik sebanyak 651.120.427,50 kWh. Dari produksi tersebut, 593.889.491,87 kWh berhasil terjual, sedangkan penggunaan internal adalah 6.718.646,55 kWh. Angka susut atau kehilangan listrik, yang mungkin mencerminkan kerugian teknis atau non-teknis, tercatat pada 50.512.289,08 kWh.

Tabel 2.12.
Statistik Kelistrikan Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Uraian	Volume
Daya Terpasang	411.021,42 kW
Produksi Listrik	651.120.427,50 kWh
Listrik Terjual	593.889.491,87 kWh
Dipakai Sendiri	6.718.646,55 kWh
Susut/Hilang	50.512.289,08 kWh

Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2026.

Rumah tangga yang masih belum teraliri listrik di wilayah Kota Tasikmalaya berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Jabar Wilayah VI Tasikmalaya berjumlah 2.547 rumah atau Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.13.
Daftar Rumah Tangga (KK) Belum Berlistrik Tahun 2026

Kecamatan / Kelurahan		Jumlah KK Belum Berlistrik	Kecamatan / Kelurahan		Jumlah KK Belum Berlistrik
Kecamatan Bungursari		211	Kecamatan Kawalu		486
1	Kelurahan Bantarsari	30	1	Kelurahan Cibeuti	46
2	Kelurahan Bungursari	56	2	Kelurahan Cilamajang	78
3	Kelurahan Cibunigeulis	30	3	Kelurahan Gununggede	69
4	Kelurahan Sukajaya	23	4	Kelurahan Gunungtandala	4
5	Kelurahan Sukalaksana	11	5	Kelurahan Karanganyar	33
6	Kelurahan Sukamulya	21	6	Kelurahan Karsamenak	21
7	Kelurahan Sukarindik	40	7	Kelurahan Leuwiliang	38
			8	Kelurahan Talagasari	34
			9	Kelurahan Tanjung	45
			10	Kelurahan Urug	118
Kecamatan Cibeureum		430	Kecamatan Mangkubumi		381
1	Kelurahan Awipari	27	1	Kelurahan Cigantang	54
2	Kelurahan Ciakar	72	2	Kelurahan Cipari	60
3	Kelurahan Ciherang	52	3	Kelurahan Cipawitra	30
4	Kelurahan Kersanagara	66	4	Kelurahan Karikil	29
5	Kelurahan Kotabaru	60	5	Kelurahan Linggajaya	59
6	Kelurahan Margabakti	35	6	Kelurahan Mangkubumi	68
7	Kelurahan Setiajaya	50	7	Kelurahan Sambongjaya	34
8	Kelurahan Setianagara	44	8	Kelurahan Sambongpari	30
9	Kelurahan Setiaratu	24			
Kecamatan Cihideung		73	Kecamatan Purbaratu		205
1	Kelurahan Argasari	2	1	Kelurahan Purbaratu	17
2	Kelurahan Cilembang	8	2	Kelurahan Singkup	41
3	Kelurahan Nagarawangi	12	3	Kelurahan Sukaasih	13
4	Kelurahan Tugujaya	11	4	Kelurahan Sukajaya	62
5	Kelurahan Tuguraja	39	5	Kelurahan Sukamenak	48
6	Kelurahan Yudanagara	1	6	Kelurahan Sukanagara	54
Kecamatan Cipedes		220	Kecamatan Tawang		63
1	Kelurahan Cipedes	22	1	Kelurahan Cikalang	12
2	Kelurahan Panglayungan	46	2	Kelurahan Empangsari	0
3	Kelurahan Nagarasari	62	3	Kelurahan Kahuripan	37
4	Kelurahan Sukamanah	90	4	Kelurahan Lengkonsari	9
			5	Kelurahan Tawangsari	5
Kecamatan Indihiang		95	Kecamatan Tamansari		400
1	Kelurahan Indihiang	7	1	Kelurahan Mugarsari	5
2	Kelurahan Panyingkiran	5	2	Kelurahan Mulyasari	71
3	Kelurahan Parakannyasag	13	3	Kelurahan Setiamulya	40
4	Kelurahan Sirnagalih	18	4	Kelurahan Setiawargi	147



Kecamatan / Kelurahan		Jumlah KK Belum Berlistrik	Kecamatan / Kelurahan		Jumlah KK Belum Berlistrik
5	Kelurahan Sukamajukaler	16	5	Kelurahan Sukahurip	53
6	Kelurahan Sukamajukidul	36	6	Kelurahan Sumelap	19
			7	Kelurahan Tamanjaya	44
			8	Kelurahan Tamansari	21
Jumlah					2.547

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jabar Wilayah VI Tasikmalaya, 2026.

Pengurusan izin tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara (MBLB) berada di bawah otoritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat. Di Kota Tasikmalaya Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Operasi Produksi MBLB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14.
Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
Mineral Bukan Logam dan Batubara di Kota Tasikmalaya Tahun 2025

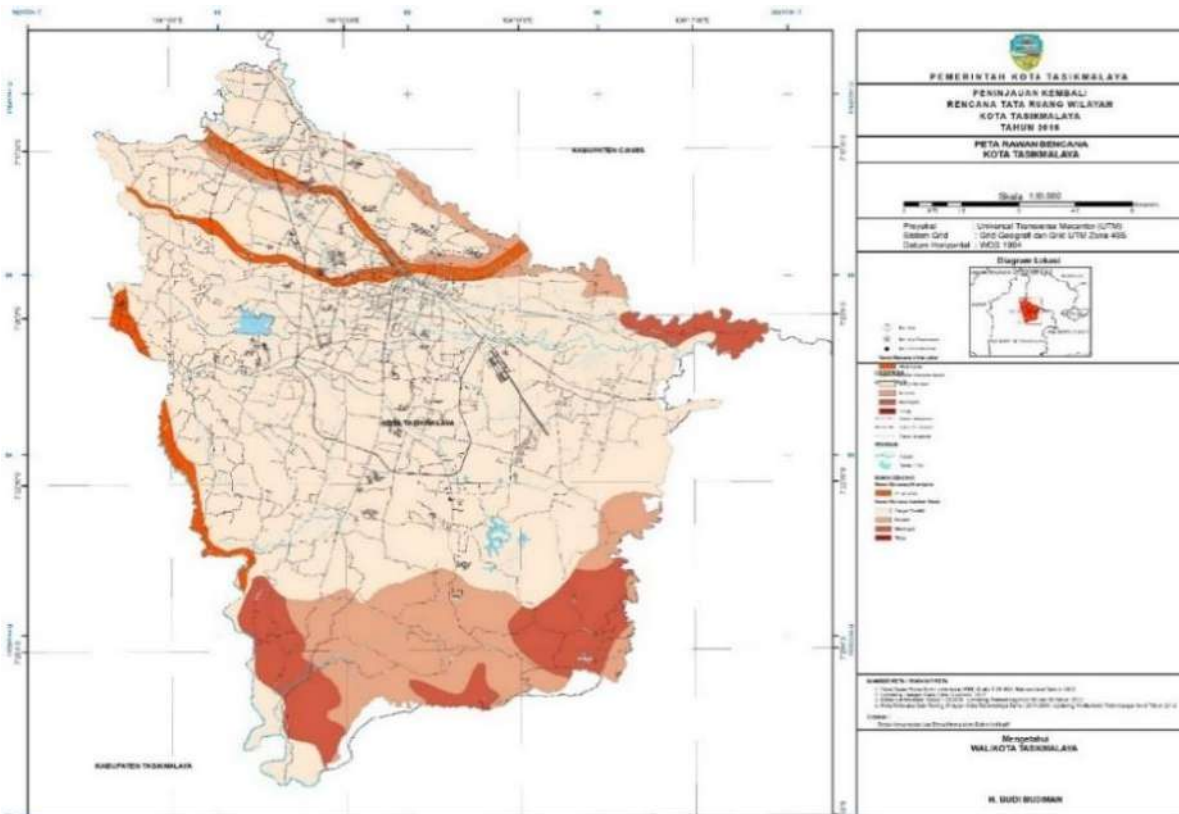
NO	KECAMATAN	JUMLAH IZIN OPERASI
1	Kecamatan Cihideung	-
2	Kecamatan Cipedes	-
3	Kecamatan Tawang	-
4	Kecamatan Indihiang	-
5	Kecamatan Kawalu	-
6	Kecamatan Cibeureum	-
7	Kecamatan Tamansari	-
8	Kecamatan Mangkubumi	1 titik
9	Kecamatan Bungursari	1 titik
10	Kecamatan Purbaratu	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jabar Wilayah VI Tasikmalaya, 2026.

2.1.1.4. Potensi Kebencanaan

Kota Tasikmalaya memiliki potensi bencana yang beragam dan memerlukan perhatian serius dalam hal mitigasi dan kesiapsiagaan. Berdasarkan data dari BPBD Kota Tasikmalaya, berbagai bencana alam yang berpotensi terjadi di kota ini meliputi banjir, banjir bandang, gempa bumi, cuaca ekstrim (seperti puting beliung), tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta letusan gunung api.

Gambar 2.10.
Peta Rawan Bencana Kota Tasikmalaya



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022.

Banjir di Kota Tasikmalaya sering kali terjadi akibat curah hujan yang tinggi, terutama pada musim hujan. Beberapa wilayah dataran rendah dan daerah yang berada di sekitar sungai sangat rentan terhadap genangan air. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti drainase yang tidak berfungsi dengan baik, memperburuk situasi banjir. Dampaknya meliputi kerusakan rumah, sarana transportasi, dan sektor ekonomi seperti pertanian. Lokasi risiko banjir cakupannya cukup luas dimulai dari utara hingga ke pusat kota dan sebagian wilayah selatan. Tingkat Indeks rawan bencana banjir di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

Selain itu, banjir bandang juga menjadi salah satu bencana yang memiliki risiko sedang hingga tinggi di Kota Tasikmalaya. Curah hujan yang ekstrem menyebabkan aliran air yang membawa material seperti lumpur dan batu ke kawasan permukiman. Dampaknya sering kali lebih besar karena selain merendam rumah, banjir bandang juga dapat menghancurkan fasilitas publik dan merusak lahan pertanian. Lokasi risiko banjir bandang berada di sekitar alur Sungai serta di bagian Barat, Selatan dan Utara Kota Tasikmalaya.

Cuaca ekstrim seperti puting beliung berpotensi terjadi di wilayah Kota Tasikmalaya. Meskipun tidak sering terjadi, angin kencang disertai hujan lebat dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, pohon, dan sarana transportasi. Perubahan iklim yang tak terduga berpotensi meningkatkan frekuensi terjadinya puting beliung di kawasan ini. Lokasi risiko cuaca ekstrim mencakup seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Tingkat Indeks rawan bencana risiko cuaca ekstrim di Kota Tasikmalaya sedang-tinggi.

Wilayah dengan kemiringan curam di sekitar kawasan pegunungan di Kota Tasikmalaya sangat rentan terhadap tanah longsor, terutama setelah hujan lebat. Tanah longsor dapat mengancam permukiman, infrastruktur, serta akses transportasi, yang pada gilirannya mempengaruhi ekonomi lokal dan mobilitas penduduk. Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal $>45^\circ$. Sungai-Sungai yang terdapat di

Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, menunjukkan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuh tanah penutup, jatuhnya bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di kota ini dapat juga terjadi di bukit-bukit/gunung-gunung yang telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava, dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik, sangat besar potensi terjadinya gerakan tanah jenis jatuhnya atau runtuh bongkah breksi dan lava.

Potensi kebencanaan di Kota Tasikmalaya diantaranya adalah bencana gempa bumi dan ikutannya, bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah. Intensitas suatu guncangan gempa bumi pada suatu peristiwa gempa bumi pada suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras.

Di wilayah Kota Tasikmalaya untuk potensi bencana gempa bumi berdasarkan kajian Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019 terdapat 3 zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

1. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan I**, meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi;
2. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan II**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 65% wilayah Kecamatan Cipedes, 60% wilayah Kecamatan Tawang, 75% wilayah Kecamatan Cihideung, 45 % wilayah Kecamatan Cibeureum dan 50% wilayah Kecamatan Kawalu;
3. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan III**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 35% wilayah Kecamatan Cipedes, 40% wilayah Kecamatan Tawang, 25% wilayah Kecamatan Cihideung, 40% wilayah Kecamatan Cibeureum dan 25% wilayah Kecamatan Kawalu.

Potensi bencana gunungapi sebagai potensi bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Galunggung, Jawa Barat berskala 1 : 50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983). Gunung api yang paling dekat dengan Kota Tasikmalaya adalah Gunung Galunggung yang terletak sekitar 10 Km dari pusat kota, gunung ini merupakan gunung api tipe A yang masih aktif, letusan terakhir terjadi pada tahun 1982 yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Adapun lokasi risiko bahaya gunung api berada di wilayah utara Kota Tasikmalaya yang menyusuri aliran sungai. Tingkat indeks risiko bahaya gunung api di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga sedang.

Potensi bencana gunungapi tersebut diantaranya berupa potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi. Potensi terlanda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi dan potensi terlanda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu gunungapi ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun (arsir kotak-kotak), zona potensi terlanda aliran awan panas (arsir tegak), lava dan lahar hujan serta daerah potensi terlanda aliran lahar hujan (arsir mendatar).



Kebakaran hutan dan lahan menjadi potensi bencana yang patut diwaspadai, khususnya selama musim kemarau. Lahan yang kering dan terkadang dipengaruhi oleh aktivitas pembukaan lahan secara ilegal dapat memicu kebakaran yang merusak hutan, mengancam habitat alam, dan memperburuk kualitas udara serta kesehatan masyarakat. Lokasi risiko bahaya kebakaran hutan dan lahan berada di wilayah Selatan Kota Tasikmalaya terutama daerah yang berbukit dan kering. Tingkat indeks risiko kebakaran hutan dan lahan di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

Kekeringan di Kota Tasikmalaya, meskipun tidak sering terjadi, dapat mengancam ketahanan air bersih dan sektor pertanian, khususnya di wilayah yang bergantung pada irigasi untuk lahan pertanian. Kekeringan panjang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama di sektor pertanian yang merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal. Lokasi risiko bahaya kekeringan berada di seluruh Kota Tasikmalaya terutama daerah yang berbukit di wilayah selatan. Tingkat indeks risiko kekeringan di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

Indeks Risiko Bencana di Kota Tasikmalaya tahun 2021-2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.15.

Indeks Risiko Bencana di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2025

2021	2022	2023	2024	2025
117,37 poin (Sedang)	114,69 poin (Sedang)	106,93 poin (Sedang)	97,13 poin (Sedang)	90,78 poin (Sedang)

Sumber: BPBD Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Indeks Ketahanan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2021 sebesar 0,34 yang berangsur-angsur naik pada tahun 2025 sebesar 0,62. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai IKD mendekati angka 1, maka kemampuan dalam mengantisipasi bencana semakin tinggi, demikian pula sebaliknya, semakin mendekati angka 0 maka semakin rendah kemampuan dalam mengantisipasi bencana.

Tabel 2.16.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (poin)	0,34	0,35	0,43	0,52	0,62

Sumber: BPBD Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

2.1.1.5. Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program.



IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok/prioritas berdasarkan cut off poin IKP. Wilayah yang berada dalam prioritas 1, 2, dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi sangat rentan (prioritas 1), rentan (prioritas 2), dan agak rentan (prioritas 3), sedangkan wilayah yang berada dalam prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi agak tahan (prioritas 4), tahan (prioritas 5), dan sangat tahan (prioritas 6). Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan mengalami perubahan pada tahun 2025, perbedaan Cut off Point dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.17.
Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan Kota Sebelum Tahun 2025

Prioritas	Cut Off	Keterangan
1	<= 28,84	Sangat rentan
2	> 28,84 – 41,44	Rentan
3	> 41,44 – 51,29	Agak rentan
4	> 51,29 – 61,13	Agak tahan
5	> 61,13 – 70,64	Tahan
6	> 70,64	Sangat tahan

Sumber : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2024

Tabel 2.18.
Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan Kota Tahun 2025

Prioritas	Cut Off	Keterangan
1	<45,59	Sangat rentan
2	45,60 – 53,42	Rentan
3	53,43 – 61,47	Agak rentan
4	61,48 – 69,52	Agak tahan
5	69,53 – 77,35	Tahan
6	>77,35	Sangat tahan

Sumber : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2025

Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19.
Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025

Tahun	IKP (poin)	Prioritas	Keterangan
2021	63,12	5	Tahan
2022	55,38	4	Agak tahan
2023	72,71	6	Sangat tahan
2024	74,37	6	Sangat tahan
2025	78,10	6	Sangat tahan

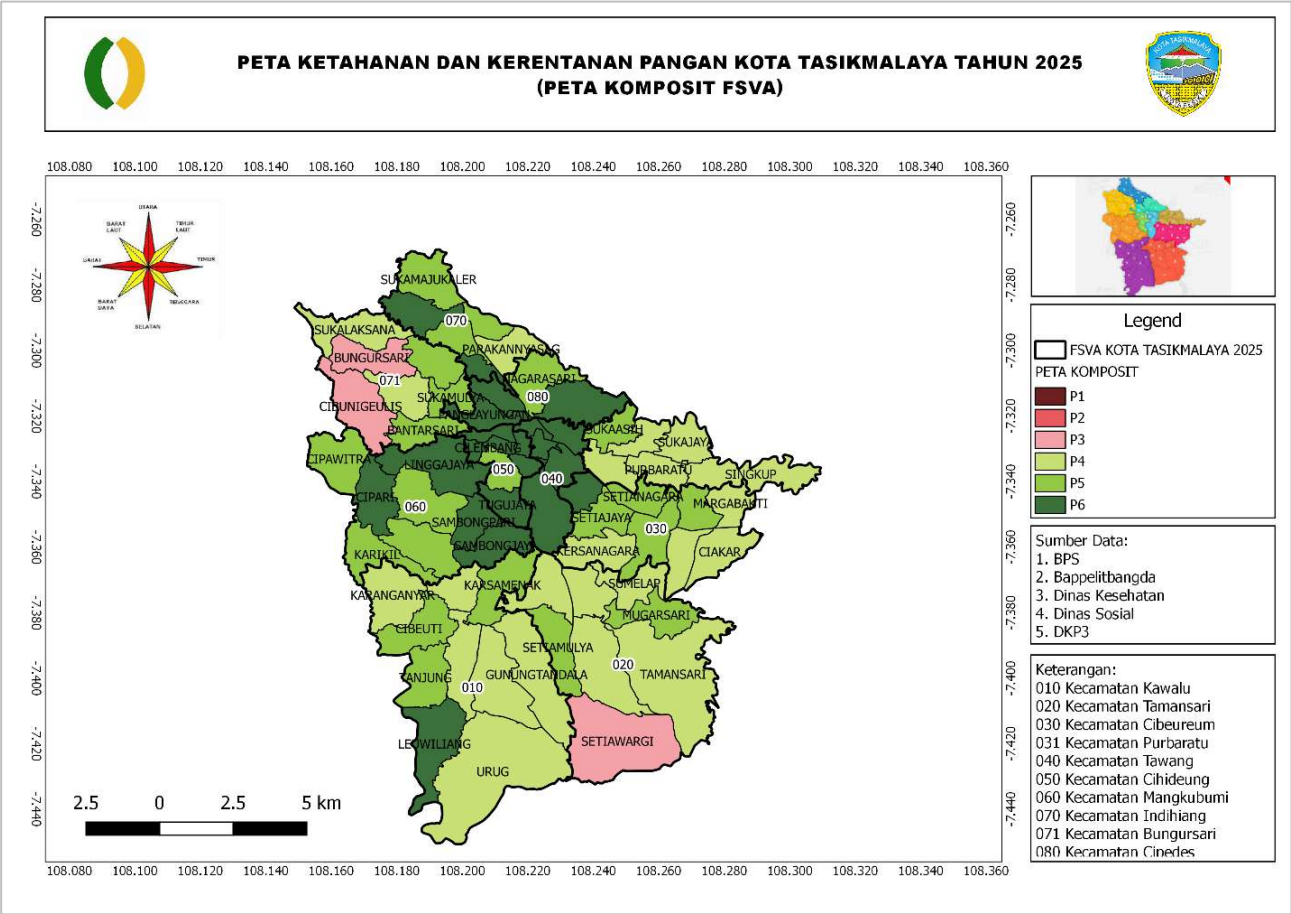
Sumber : Badan Pangan Nasional, 2021-2025



IKP Kota Tasikmalaya menunjukkan tren pertumbuhan positif yang signifikan setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2022. Dari tahun 2021 sampai dengan 2025, Kota Tasikmalaya merupakan wilayah yang tahan pangan dan selama 3 tahun terakhir termasuk dalam klasifikasi prioritas 6 (sangat tahan). Nilai tertinggi IKP selama 5 tahun terakhir pada Tahun 2025 yaitu sebesar 78,10 poin.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Tasikmalaya Tahun 2025 terdapat 3 kelurahan (Kelurahan Bungursari, Kelurahan Cibunigeulis dan kelurahan Setiawargi) atau 4,35% merupakan wilayah rentan pangan masuk dalam kelompok prioritas 3 (agak rentan). Adapun 66 kelurahan lainnya merupakan wilayah tahan pangan yaitu 23 kelurahan atau 33,33% masuk dalam prioritas 4, 22 kelurahan atau 31,88% prioritas 5 dan 21 kelurahan atau 30,43% prioritas 6. Sebaran ketahanan dan kerentanan pangan tiap kelurahan dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini.

Gambar 2.11.
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kelurahan
di Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2025



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2026.

Tabel 2.20.
Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kelurahan
di Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2025

No.	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Komposit	Peringkat	Prioritas Komposit
1	Kawalu	Leuwiliang	77,77	20	6
2	Kawalu	Urug	64,20	62	4
3	Kawalu	Gunungtanda	64,17	63	4
4	Kawalu	Gununggede	65,67	58	4



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Komposit	Peringkat	Prioritas Komposit
5	Kawalu	Talagasari	68,74	51	4
6	Kawalu	Tanjung	74,17	34	5
7	Kawalu	Cibeuti	72,65	36	5
8	Kawalu	Karanganyar	64,39	61	4
9	Kawalu	Cilamajang	66,11	57	4
10	Kawalu	Karsamenak	75,60	27	5
11	Tamansari	Setiamulya	72,05	40	5
12	Tamansari	Setiawargi	60,02	67	3
13	Tamansari	Tamansari	63,61	64	4
14	Tamansari	Tamanjaya	66,75	55	4
15	Tamansari	Mulyasari	67,75	53	4
16	Tamansari	Sukahurip	69,76	47	4
17	Tamansari	Mugarsari	75,38	28	5
18	Tamansari	Sumelap	69,18	48	4
19	Cibeureum	Ciherang	67,15	54	4
20	Cibeureum	Ciakar	68,18	52	4
21	Cibeureum	Margabakti	62,76	66	4
22	Cibeureum	Awipari	71,62	42	5
23	Cibeureum	Kotabaru	71,18	43	5
24	Cibeureum	Kersanagara	64,97	59	4
25	Cibeureum	Setiajaya	72,33	37	5
26	Cibeureum	Setiaratu	80,12	14	6
27	Cibeureum	Setianagara	75,30	30	5
28	Purbaratu	Sukanagara	70,79	44	4
29	Purbaratu	Sukamenak	70,61	45	4
30	Purbaratu	Purbaratu	68,85	50	4
31	Purbaratu	Sukaasih	76,08	24	5
32	Purbaratu	Sukajaya	63,06	65	4
33	Purbaratu	Singkup	66,40	56	4
34	Tawang	Kahuripan	85,96	5	6
35	Tawang	Cikalang	84,46	6	6
36	Tawang	Empangsari	94,39	2	6
37	Tawang	Tawangsari	99,85	1	6
38	Tawang	Lengkongsari	82,26	9	6
39	Cihideung	Tugujaya	80,85	12	6
40	Cihideung	Tuguraja	74,58	32	5
41	Cihideung	Nagarawangi	91,06	3	6
42	Cihideung	Yudanagara	90,80	4	6
43	Cihideung	Cilembang	79,69	15	6
44	Cihideung	Argasari	79,18	17	6
45	Mangkubumi	Karikil	74,43	33	5
46	Mangkubumi	Cigantang	71,92	41	5
47	Mangkubumi	Sambongjaya	77,76	21	6
48	Mangkubumi	Sambongpari	79,61	16	6
49	Mangkubumi	Linggajaya	80,92	11	6



No.	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Komposit	Peringkat	Prioritas Komposit
50	Mangkubumi	Mangkubumi	73,29	35	5
51	Mangkubumi	Cipari	79,11	18	6
52	Mangkubumi	Cipawitra	72,11	38	5
53	Indihiang	Panyingkiran	81,06	10	6
54	Indihiang	Parakannyasag	70,24	46	4
55	Indihiang	Sirnagalih	75,90	26	5
56	Indihiang	Indihiang	77,19	22	5
57	Indihiang	Sukamaju Kidul	80,19	13	6
58	Indihiang	Sukamaju Kaler	76,80	23	5
59	Bungursari	Sukamulya	76,00	25	5
60	Bungursari	Sukarindik	72,05	39	5
61	Bungursari	Bungursari	60,01	68	3
62	Bungursari	Sukajaya	64,84	60	4
63	Bungursari	Cibunigeulis	59,86	69	3
64	Bungursari	Bantarsari	75,34	29	5
65	Bungursari	Sukalaksana	68,85	49	4
66	Cipedes	Panglayungan	78,92	19	6
67	Cipedes	Cipedes	82,41	8	6
68	Cipedes	Nagarasari	75,12	31	5
69	Cipedes	Sukamanah	82,59	7	6

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2026.

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1-3 secara umum disebabkan oleh: (1) Masih banyaknya keluarga dengan kondisi tidak sejahtera, (2) Masih banyaknya rumah tangga tidak memiliki air bersih, (3) kurangnya sarana dan prasarana penyedia pangan (4) kurangnya tenaga kesehatan di wilayah tersebut.

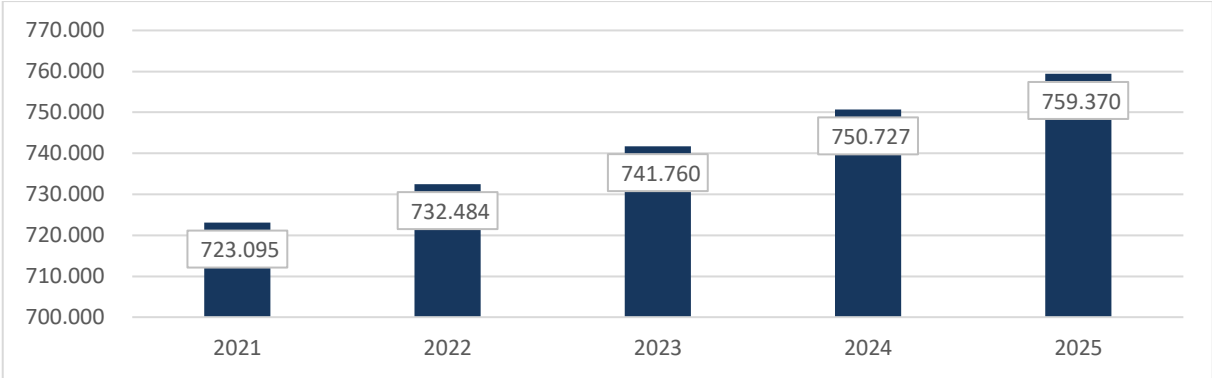
2.1.1.6. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan faktor strategis dalam pembangunan daerah karena dapat menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik, namun menjadi modal pembangunan apabila dikelola secara optimal. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2025 sebanyak 776.743 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,79% (394.497 jiwa) dan persentase jumlah penduduk perempuan sebesar 49,21% (382.246 jiwa).

Berdasarkan data dari BPS Kota Tasikmalaya, yang tercatat di dalam buku Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2026, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 sebanyak 759.370 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,24%. Jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya dari tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.



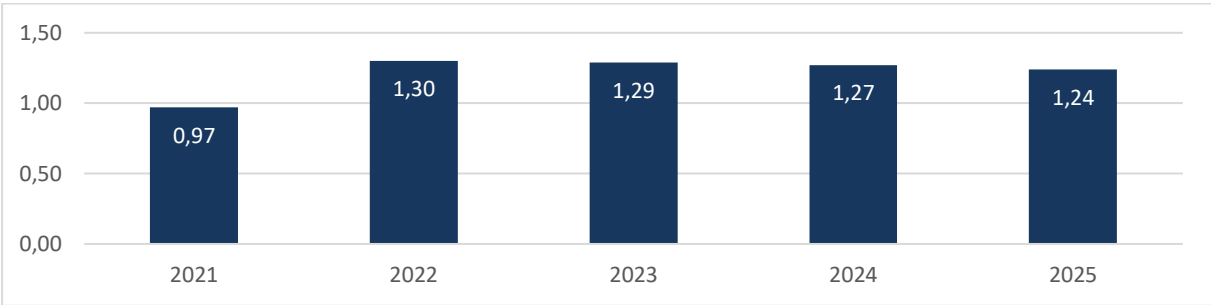
Gambar 2.12.
Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah Tahun 2026.

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2021-2025 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.13.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah Tahun 2026.

Berdasarkan data dari BPS, komposisi penduduk Kota Tasikmalaya terdiri dari laki-laki sebanyak 383.979 jiwa dan perempuan sebanyak 375.397 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.146 jiwa/km². Kecamatan Cihideung merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 13.995 jiwa/km² dan Kecamatan Tamansari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 2.272 jiwa/km². Data sebaran penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21.
Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Kecamatan	Penduduk (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
Kawalu	101.370	13,35	2.437
Tamansari	83.505	11,00	2.272
Cibeureum	71.262	9,38	3.829
Purbaratu	46.970	6,19	3.863



Kecamatan	Penduduk (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
Tawang	63.774	8,40	9.243
Cihideung	76.272	10,04	13.995
Mangkubumi	102.976	13,56	4.260
Indihiang	62.089	8,18	5.701
Bungursari	67.606	8,90	3.848
Cipedes	83.546	11,00	9.242
Kota Tasikmalaya	759.370	100,00	4.146

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah Tahun 2026.

Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Tasikmalaya terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Cihideung 13.995 jiwa/km², Kecamatan Tawang 9.243 jiwa/km², dan Kecamatan Cipedes 9.242 jiwa/km². Sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 2.272 jiwa/km² hingga 5.701 jiwa/km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan pusat kota dan 7 kecamatan lainnya.

Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (*sex ratio*) setiap tahunnya berkisar antara 102,28 sampai dengan 103,34 untuk kurun waktu tahun 2021-2025. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 103 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya menurut jenis kelamin.

Tabel 2.22.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025

Tahun	Jenis Kelamin				Laki-laki + Perempuan	Sex Rasio
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2021	367.563	50,77	356.358	49,22	723.921	103,14
2022	372.285	50,76	361.182	49,24	733.467	103,07
2023	375.737	50,65	366.023	49,35	741.760	102,65
2024	391.746	50,82	379.093	49,18	770.839	103,34
2025	383.973	50,56	375.397	49,44	759.370	102,28

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026.



Secara umum, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada periode 2021 hingga 2024, namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2025. Dilihat dari komposisi jenis kelamin, penduduk Kota Tasikmalaya secara konsisten didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Sepanjang periode 2021-2025, proporsi laki-laki selalu berada di atas 50%, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2024 (50,82%). Dominasi ini juga tercermin dalam Angka Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) yang selalu berada di atas angka 100. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 103,34, yang berarti terdapat sekitar 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan pada tahun tersebut.

Proporsi penduduk perempuan sendiri relatif stabil di kisaran 49%, dengan persentase tertinggi tercatat pada tahun 2025 sebesar 49,44%. Stabilitas komposisi gender ini menunjukkan bahwa struktur demografi Kota Tasikmalaya cukup seimbang, meskipun terdapat selisih jumlah absolut yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok mayoritas.

Data Penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2025 menurut jenis kelamin per kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	31.325	30.085	61.410
5-9	31.189	29.808	60.997
10-14	28.626	27.679	56.305
15-19	31.686	29.755	61.441
20-24	31.316	30.086	61.402
25-29	30.340	29.966	60.306
30-34	30.092	29.036	59.128
35-39	29.317	27.781	57.098
40-44	27.435	26.247	53.682
45-49	25.954	24.387	50.341
50-54	22.863	22.407	45.270
55-59	19.497	19.793	39.290
60-64	16.556	17.110	33.666
65-69	12.111	12.833	24.944
70-74	8.611	9.394	18.005
75+	7.055	9.030	16.085
Kota Tasikmalaya	383.973	375.397	759.370

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, data diolah Tahun 2026.

Data ini menggambarkan Kota Tasikmalaya sebagai kota dengan sumber daya manusia yang melimpah di usia muda dan produktif. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk pada kelompok umur bawah (0-24 tahun) yang sangat besar. Kelompok umur 15-19 tahun merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak, yaitu mencapai 61.441 jiwa, disusul ketat oleh kelompok 0-4 tahun sebanyak 61.410 jiwa. Hal tersebut



menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial. Tantangan utamanya terletak pada pengelolaan transisi penduduk usia sekolah menuju dunia kerja, serta penyediaan layanan kesehatan bagi penduduk lansia perempuan yang jumlahnya meningkat secara signifikan di usia tua. Selain itu, tingginya angka pada usia sekolah dan produktif awal ini mengindikasikan perlunya kesiapan fasilitas pendidikan dan lapangan kerja dimasa depan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Subbab ini umenguraikan berbagai indikator dan capaian kesejahteraan yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Tasikmalaya.

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kota Tasikmalaya terus memantau dan mengevaluasi berbagai indikator makro pembangunan sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Capaian Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.24.
Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2025

NO	INDIKATOR	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,31	74,84	75,47	76,03	76,59
	Indeks Pendidikan	Poin	69,12	69,18	69,27	69,60	69,66
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,53	9,54	9,63	9,64
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,47	13,49	13,5	13,51
	Indeks Kesehatan	Poin	83,88	84,31	84,74	85,09	85,63
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,52	74,80	75,08	75,31	75,66
	Indeks Daya Beli	Poin	70,78	71,85	73,22	74,22	75,32
	Pengeluaran per Kapita	Rp. Juta	10,213	10,578	11,063	11,431	11.849
2	PDRB Perkapita ADH Berlaku	Rp. Juta	31,59	34,10	36,95	39,45	42,13
3	PDRB Perkapita ADH Konstan	Rp. Juta	22,08	22,88	23,97	24,27	19,72
4	PDRB ADH Berlaku	Rp.Trilyun	22,85	24,97	27,41	29,61	31,99
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	5,01	5,96	5,22	5,39
6	Inflasi	%	1,17	6,65	2,84	1,94	2,67
7	Indeks gini	Poin	0,414	0,405	0,439	0,359	0,355
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,45	1,32	1,29	1,27	1,24
9	Angka Kemiskinan	%	13,13	12,72	11,53	11,10	10,84
10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	7,66	6,62	6,55	6,49	6,43

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Data diolah, 2026.



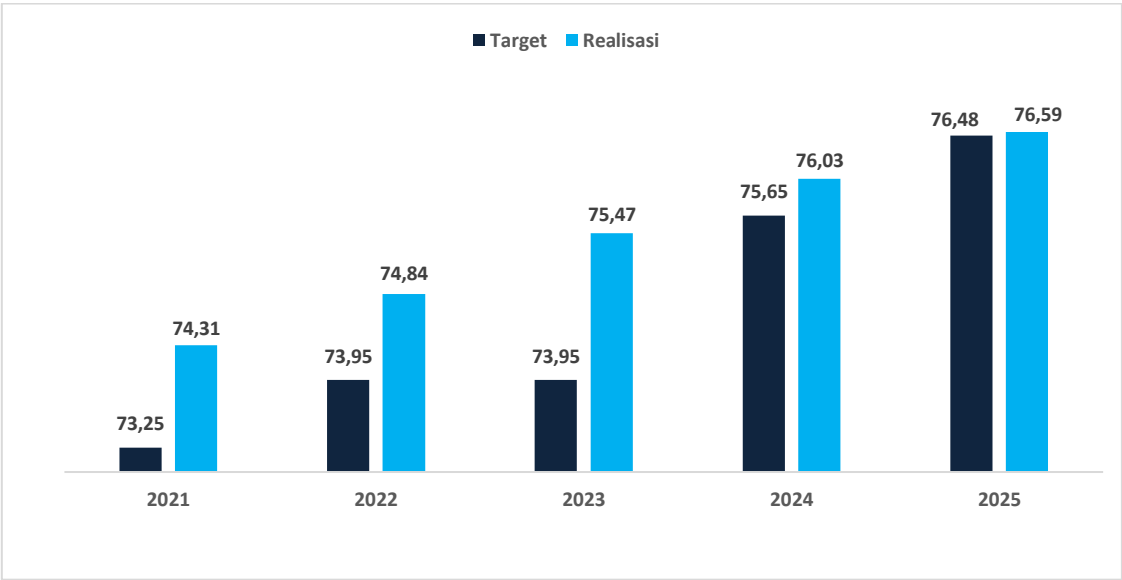
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari 3 indeks yang digabung menjadi indeks tunggal yaitu Umur panjang dan hidup sehat (Usia Harapan Hidup), Pengetahuan dalam bentuk Indeks Pendidikan serta Standar hidup layak dengan Indeks Daya Beli. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia, IPM dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua aspek, yaitu: posisi wilayah relatif terhadap wilayah lainya yang berdekatan dan mengkaji kemajuan pencapaian beragam program yang telah dilakukan.

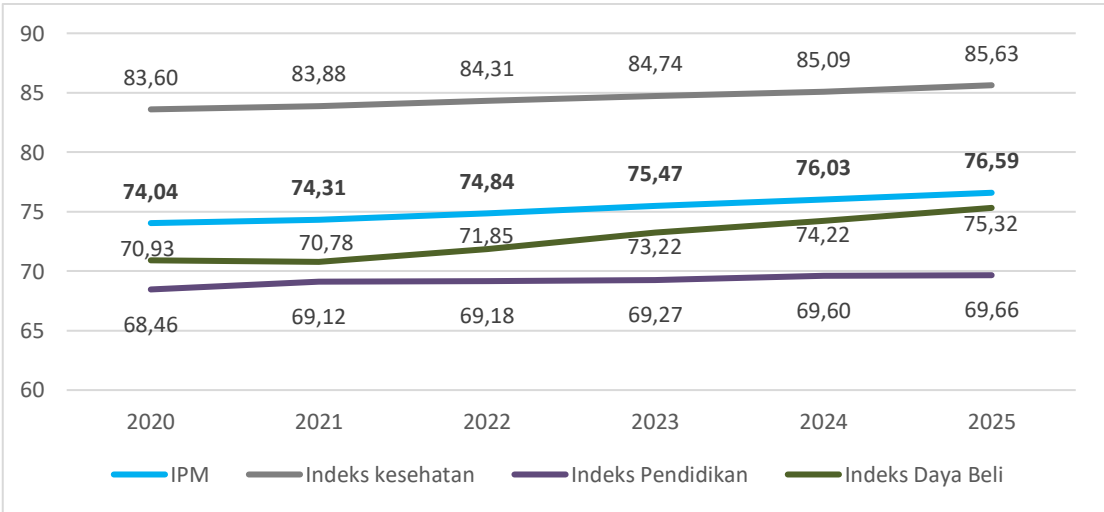
Tahun 2021-2025 (Point) Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.14.
Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia
Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2025 (Poin)



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Gambar 2.15.
Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2025



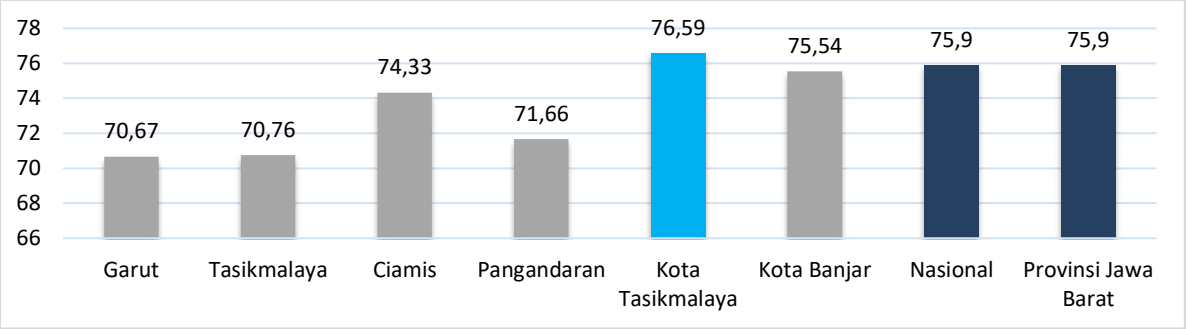
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2026.



Pada tahun 2025, seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 85,63 tahun, meningkat 0,54 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dimensi pengetahuan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata – rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan secara indeks sebesar 0,06. Peningkatan tertinggi secara Indeks berada di Indeks Daya Beli yaitu sebesar 1,10 menggambarkan dimensi standar hidup layak yang diukur oleh rata – rata pengeluaran riil perkapita tingkat pendapatan penduduk Kota Tasikmalaya meningkat.

Keterbandingan nilai IPM antar wilayah terdekat (priangan timur) dan dibandingkan dengan capaian IPM provinsi dan nasional, capaian IPM Kota Tasikmalaya tahun 2025 lebih tinggi dari capaian nasional, provinsi Jawa Barat dan daerah lainnya di priangan timur, seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.16.
Perbandingan IPM Kota Tasikmalaya,
Nasional, Jawa Barat dan Daerah di Priangan Timur Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Tabel 2.25.
Perbandingan IPM Antara Daerah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2024 - 2025

No	Nama Wilayah	IPM (Poin)	
		2024	2025
	NASIONAL	75,02	75,90
	JAWA BARAT	74,92	75,90
1.	Kota Bandung	83,75	84,66
2.	Kota Bekasi	83,55	84,43
3.	Kota Depok	83,05	84,04
4.	Kota Cimahi	80,30	80,85
5.	Kota Bogor	79,03	79,75
6.	Kota Cirebon	78,09	78,99
7.	Kota Sukabumi	77,69	78,23
8.	Bekasi	76,80	77,80
9.	Kota Tasikmalaya	76,03	76,59
10.	Bandung	74,59	75,58
11.	Kota Banjar	75,01	75,54
12.	Sumedang	74,57	75,50
13.	Purwakarta	73,99	74,97
14.	Karawang	73,82	74,59
15.	Bogor	73,63	74,53



No	Nama Wilayah	IPM (Poin)	
		2024	2025
16.	Ciamis	73,64	74,33
17.	Cirebon	72,30	73,27
18.	Subang	72,05	73,00
19.	Majalengka	71,37	72,37
20.	Kuningan	71,56	72,31
21.	Pangandaran	71,03	71,66
22.	Bandung Barat	70,77	71,65
23.	Indramayu	70,72	71,58
24.	Sukabumi	70,18	71,13
25.	Tasikmalaya	69,98	70,76
26.	Garut	69,91	70,67
27.	Cianjur	68,98	69,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026.

Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Tabel 2.26.
Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2021 – 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	13,13	12,72	11,53	11,10	10,84
Penduduk Miskin (ribu orang)	89,46	87,13	79,37	76,71	75,22
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	480.341	498.711	537.497	565,377	591.600
Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,41	2,34	1,62	1,35	1,89
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,69	0,65	0,32	0,26	0,45

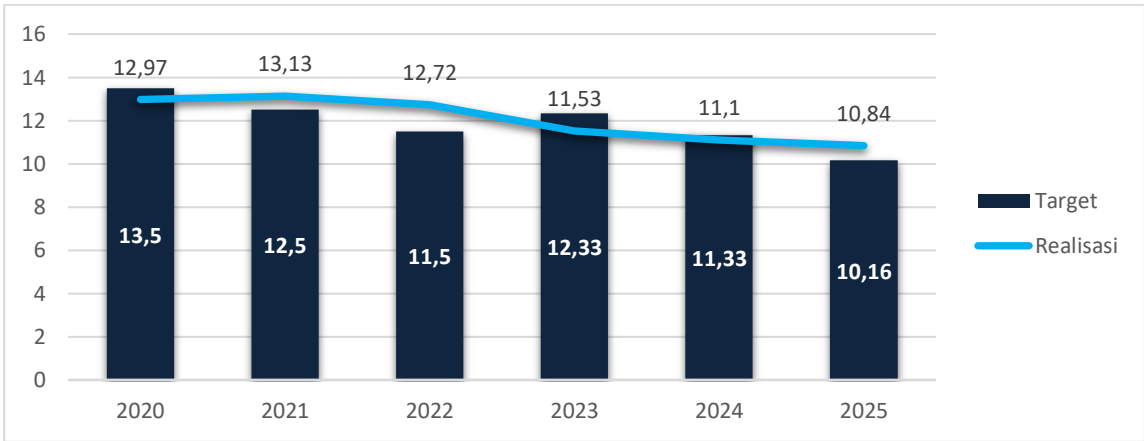
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya mengalami penurunan menjadi 10,84%, namun masih berada pada angka yang masih tinggi, di atas tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Kemiskinan (P0) dan jumlah penduduk miskin menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 2021–

2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Meskipun demikian, kenaikan pedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2025 mengisyaratkan bahwa masyarakat yang masih berada dalam kategori miskin menghadapi kondisi ekonomi yang lebih berat. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin memang berkurang, tetapi sebagian dari mereka yang masih miskin mengalami tingkat kemiskinan yang lebih dalam dan ketimpangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya perlu berfokus pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada peningkatan pendapatan dan daya beli kelompok miskin agar mereka dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

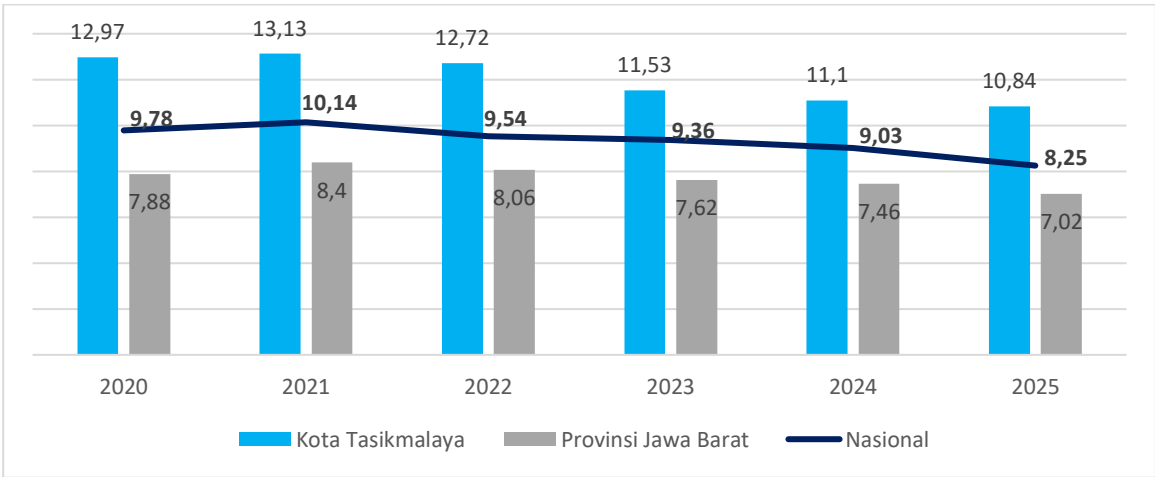
Gambar 2.17.
Target & Realisasi Angka Kemiskinan
Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2025 (Persen)



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Tahun 2026

Kemiskinan Kota Tasikmalaya bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah lainnya di provinsi Jawa Barat selama periode yang cukup lama menjadi daerah kategori kota/kabupaten dengan jumlah penduduk miskinnya secara persentase tertinggi, namun sejak tahun 2022 kondisi tersebut berubah menjadi peringkat 3 (tiga) terbawah secara persentase kemiskinan. Pada tahun 2025 kemiskinan secara makro ini menurun 0,26 persen dari tahun sebelumnya tetapi tidak menurunkan peringkat kemiskinan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, malahan pada tahun 2025 menjadi peringkat ke 26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Gambar 2.18.
Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Tahun 2026



Keberhasilan menurunkan kemiskinan merupakan usaha terpadu seluruh tingkatan lembaga, masyarakat dan seluruh aspek yang berkepentingan serta kebijakan – kebijakan yang terselenggara baik yang tercatat maupun tidak guna memperbaiki kesejahteraan secara umum di Kota Tasikmalaya. (Tercatat Perda Kemiskinan No 3 Tahun 2022 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya telah terbentuk).

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27.
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa barat

No	Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
		2021	2022	2023	2024	2025
	JAWA BARAT	8,4	8,06	7,62	7,46	7,02
1	Kota Depok	2,58	2,53	2,38	2,34	2,31
2	Kota Bandung	4,37	4,25	3,96	3,87	3,78
3	Kota Bekasi	4,74	4,43	4,1	4,01	3,96
4	Kota Cimahi	5,35	5,11	4,66	4,39	4,2
5	Bekasi	5,21	5,01	4,93	4,8	4,36
6	Kota Banjar	7,11	6,73	6,14	5,8	5,73
7	Kota Bogor	7,24	7,1	6,67	6,53	5,89
8	Bandung	7,15	6,8	6,4	6,19	6,04
9	Bogor	8,13	7,73	7,27	7,05	6,26
10	Sukabumi	7,7	7,34	7,01	6,87	6,41
11	Kota Sukabumi	8,25	8,02	7,5	7,2	6,9
12	Karawang	8,95	8,44	7,87	7,86	7,08
13	Ciamis	7,97	7,72	7,42	7,39	7,19
14	Purwakarta	8,83	8,7	8,46	8,41	7,87
15	Pangandaran	9,65	9,32	8,98	8,75	8,03
16	Kota Cirebon	10,03	9,82	9,16	9,02	8,66
17	Sumedang	10,71	10,14	9,36	9,1	8,81
18	Subang	10,03	9,75	9,52	9,49	9,23
19	Garut	10,65	10,42	9,77	9,68	9,39
20	Cianjur	11,18	10,55	10,22	10,14	9,82
21	Bandung Barat	11,3	10,82	10,52	10,49	9,87
22	Tasikmalaya	11,15	10,73	10,28	10,23	10,15
23	Cirebon	12,3	12,01	11,2	11	10,23
24	Majalengka	12,33	11,94	11,21	10,82	10,31
25	Kuningan	13,1	12,76	12,12	11,88	10,74
26	Kota Tasikmalaya	13,13	12,72	11,53	11,1	10,84
27	Indramayu	13,04	12,77	12,13	11,93	11,02

Sumber: BPS Jawa Barat, 2026.



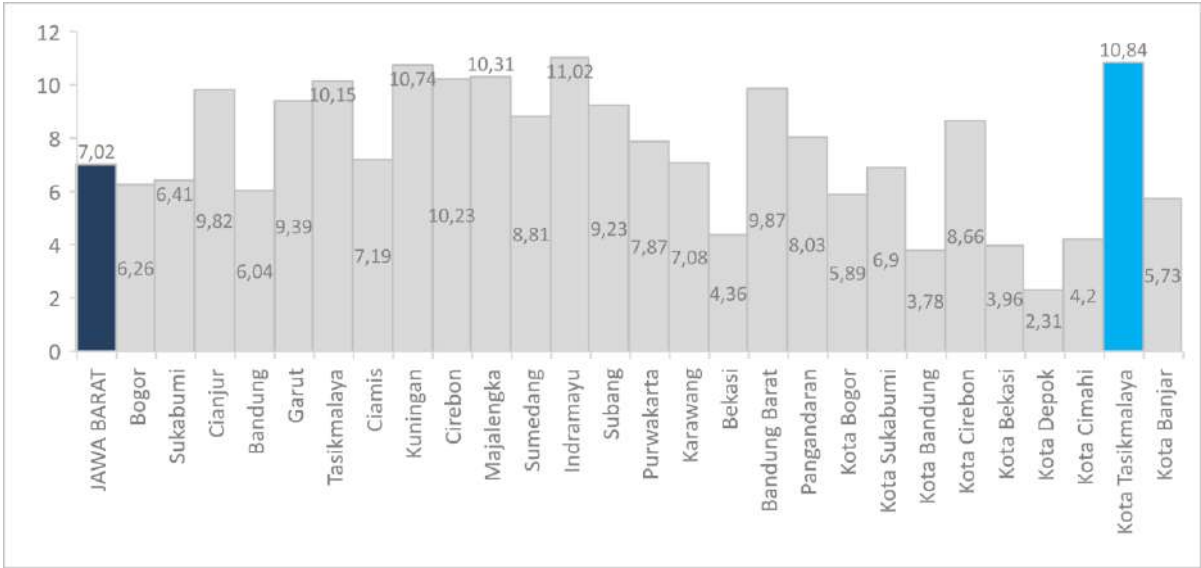
Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 sebanyak 6.590 jiwa.

Tabel 2.28.
Tingkat Miskin Ekstrem menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)
1	Kota Cimahi	0,18
2	Kota Bekasi	0,23
3	Kota Depok	0,23
4	Bekasi	0,25
5	Pangandaran	0,28
6	Indramayu	0,28
7	Kota Bogor	0,29
8	Cirebon	0,31
9	Kota Banjar	0,33
10	Purwakarta	0,33
11	Kota Cirebon	0,35
12	Kuningan	0,35
13	Subang	0,35
14	Majalengka	0,36
15	Bogor	0,37
16	Karawang	0,38
17	Kota Sukabumi	0,39
18	Kota Bandung	0,39
19	Ciamis	0,41
20	Sumedang	0,45
21	Kota Tasikmalaya	0,46
22	Bandung Barat	0,55
23	Sukabumi	0,57
24	Bandung	0,58
25	Cianjur	0,70
26	Garut	1,26
27	Tasikmalaya	1,68
	Provinsi Jawa Barat	0,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026.

Gambar 2.19.
Kemiskinan Jawa Barat Persentase Penduduk Miskin (P0)
Menurut Kabupaten/Kota (Persen)



Sumber: BPS Jawa Barat, 2026.

Sejak tahun 2022, peringkat kemiskinan Kota Tasikmalaya menduduki tempat ke 25 dimana sebelumnya sejak tahun 2008 Kota Tasikmalaya menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat, pada tahun 2025 Kota Tasikmalaya kembali ke peringkat 26 meski telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 10,84 persen dan Kota Tasikmalaya menjadi peringkat ke dua wilayah termiskin di Jawa Barat.

PDRB Menurut Lapangan Usaha

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku terus menunjukkan peningkatan selama periode 2021–2025. PDRB meningkat dari Rp22,84 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp31,99 triliun pada tahun 2025 atau bertambah sebesar Rp9,15 triliun (40,04 persen) dalam kurun waktu lima tahun. Secara rata-rata, peningkatan nominal mencapai sekitar Rp2,29 triliun per tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha / Industry		Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.100,18	1.202,36	1.319,55	1.490,28	1.673,55
B	Pertambangan dan Penggalian	1,91	1,99	2,00	1,97	1,68
C	Industri Pengolahan	3.159,59	3.450,78	3.669,23	3.971,11	4.138,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,99	3,15	3,30	3,51	3,65
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	96,31	97,44	100,96	116,53	123,81



Lapangan Usaha / Industry		Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Konstruksi	3.700,54	3.975,54	4.397,55	4.498,26	4.671,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.954,11	5.416,72	5.929,52	6.290,01	6.617,66
H	Transportasi dan Pergudangan	2.070,97	2.320,07	2.763,40	3.213,26	3.749,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.209,65	1.440,33	1.650,46	1.854,29	2.022,03
J	Informasi dan Komunikasi	978,57	1.038,06	1.121,25	1.217,91	1.335,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.396,31	2.596,50	2.708,69	3.025,16	3.249,44
L	Real Estat	397,89	438,12	472,71	487,02	531,03
M,N	Jasa Perusahaan	240,39	288,50	321,67	357,48	438,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	921,48	918,53	954,97	960,66	1.003,93
P	Jasa Pendidikan	511,52	534,79	592,35	629,26	678,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	547,86	605,46	669,84	690,61	767,71
R,S,T,U	Jasa Lainnya	553,75	646,33	733,97	805,46	986,57
Produk Domestik Bruto		22.844,02	24.974,68	27.411,43	29.612,77	31.991,67

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026

Lima lapangan usaha dengan nilai tambah terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp6,62 triliun, Konstruksi sebesar Rp4,67 triliun, Industri Pengolahan sebesar Rp4,14 triliun, Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp3,75 triliun, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp3,25 triliun.

Dominasi sektor perdagangan mengindikasikan bahwa Kota Tasikmalaya tetap berfungsi sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang serta jasa bagi wilayah Priangan Timur. Meskipun bukan merupakan sektor dominan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yaitu dari Rp1,10 triliun menjadi Rp1,67 triliun atau meningkat sekitar 52 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pangan masih memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat. Lapangan usaha jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan administrasi pemerintahan terus mengalami peningkatan. Nilai jasa pendidikan meningkat dari Rp511,52 miliar menjadi Rp678,73 miliar, sedangkan jasa kesehatan meningkat dari Rp547,86 miliar menjadi Rp767,71 miliar. Perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup.



Selain PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga dilakukan penghitungan PDRB berdasarkan Harga Konstan yang menggambarkan perkembangan riil perekonomian karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi). PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2021 - 2025 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha / Industry		Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	660,75	690,75	718,53	769,27	849,86
B	Pertambangan dan Penggalian	1,36	1,38	1,33	1,33	1,28
C	Industri Pengolahan	2.194,62	2.312,87	2.390,38	2.520,90	2.587,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,68	1,74	1,80	1,91	1,94
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	63,01	63,00	64,65	70,42	70,83
F	Konstruksi	2.475,68	2.577,18	2.762,86	2.804,99	2.884,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.681,31	3.841,48	4.042,74	4.170,43	4.256,36
H	Transportasi dan Pergudangan	1.439,41	1.542,85	1.715,00	1.972,89	2.239,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	771,50	879,72	961,19	1.034,95	1.107,40
J	Informasi dan Komunikasi	932,45	989,33	1.067,95	1.160,38	1.237,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.552,58	1.539,33	1.574,86	1.678,90	1.736,21
L	Real Estat	319,77	341,52	361,79	369,79	399,83
M,N	Jasa Perusahaan	168,53	193,83	207,36	216,55	237,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	591,46	591,23	605,12	608,58	619,89
P	Jasa Pendidikan	314,93	321,55	343,77	346,12	368,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	386,04	416,11	442,76	444,65	488,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	425,66	477,17	519,85	537,82	594,86
Produk Domestik Bruto		15.980,75	16.781,04	17.781,93	18.709,87	19.718,21

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026



Selama periode 2021–2025, hampir seluruh lapangan usaha menunjukkan peningkatan nilai tambah riil. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap menjadi penyumbang terbesar (dominan) terhadap PDRB riil Kota Tasikmalaya. Nilai tambah riil meningkat dari Rp3,68 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp4,26 triliun pada tahun 2025. Meskipun masih menjadi sektor dominan, pertumbuhan riilnya relatif moderat dibandingkan beberapa sektor jasa lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, namun mulai diimbangi oleh pertumbuhan sektor-sektor baru.

Struktur Perekonomian

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan struktur perekonomian Kota Tasikmalaya berdasarkan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total pembentukan nilai tambah daerah. Selama periode 2021–2025, struktur ekonomi Kota Tasikmalaya relatif stabil dengan dominasi sektor perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, transportasi, dan jasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik perekonomian Kota Tasikmalaya masih bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa sebagai pusat aktivitas ekonomi kawasan Priangan Timur. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31.
Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 - 2025 (Persen)

Lapangan Usaha / Industry		Tahun				
		2021	2022	2023*	2024**	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,82	4,81	4,81	5,03	5,23
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	13,83	13,82	13,39	13,41	12,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,42	0,39	0,37	0,39	0,38
F	Konstruksi	16,20	15,92	16,04	15,19	14,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,69	21,69	21,63	21,24	20,69
H	Transportasi dan Pergudangan	9,07	9,29	10,08	10,85	11,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,29	5,77	6,02	6,26	6,32
J	Informasi dan Komunikasi	4,28	4,16	4,09	4,11	4,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,49	10,40	9,88	10,22	10,16
L	Real Estat	1,74	1,75	1,72	1,64	1,66
M,N	Jasa Perusahaan	1,05	1,16	1,17	1,21	1,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,03	3,68	3,48	3,24	3,14



Lapangan Usaha / Industry		Tahun				
		2021	2022	2023*	2024**	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P	Jasa Pendidikan	2,24	2,14	2,16	2,12	2,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,40	2,42	2,44	2,33	2,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,42	2,59	2,68	2,72	3,08
Produk Domestik Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026

Meskipun terjadi perubahan kontribusi antar sektor, pergeseran struktur ekonomi berlangsung secara bertahap. Hal tersebut mengindikasikan bahwa transformasi ekonomi daerah belum mengalami perubahan yang signifikan, namun terdapat kecenderungan meningkatnya peran sektor-sektor jasa produktif dan aktivitas ekonomi berbasis mobilitas masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap menjadi penyumbang terbesar PDRB Kota Tasikmalaya. Meskipun kontribusinya menurun dari 21,69 persen pada tahun 2021 menjadi 20,69 persen pada tahun 2025, sektor ini tetap menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Penurunan pangsa tersebut bukan menunjukkan penurunan kinerja sektor perdagangan, melainkan mencerminkan bahwa sektor-sektor lain tumbuh lebih cepat sehingga komposisi ekonomi menjadi lebih beragam.

Sektor Konstruksi juga masih menjadi sektor strategis dengan kontribusi sebesar 16,20 persen pada tahun 2021 dan menurun menjadi 14,60 persen pada tahun 2025. Penurunan pangsa konstruksi mengindikasikan bahwa pembangunan fisik tetap berlangsung, namun pertumbuhannya tidak secepat sektor jasa lainnya.

Sementara itu, Industri Pengolahan mengalami penurunan kontribusi dari 13,83 persen menjadi 12,94 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur belum berkembang sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Penurunan pangsa industri perlu menjadi perhatian karena sektor ini memiliki kemampuan menciptakan nilai tambah yang tinggi, meningkatkan produktivitas, dan menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

Perubahan paling menonjol selama periode 2021–2025 terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan. Kontribusinya meningkat secara konsisten dari 9,07 persen menjadi 11,72 persen atau naik sebesar 2,65 poin persentase. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi di antara seluruh lapangan usaha dan menunjukkan semakin pentingnya peran jasa logistik, distribusi barang, transportasi penumpang, serta aktivitas perdagangan digital (e-commerce). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mobilitas ekonomi masyarakat terus meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi dan berkembangnya sistem distribusi regional.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga menunjukkan peningkatan kontribusi dari 5,30 persen menjadi 6,32 persen. Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas sektor kuliner, hotel, restoran, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tren tersebut menjadi indikator positif bagi pengembangan industri pariwisata perkotaan, wisata belanja, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan industri halal.

Kontribusi Jasa Perusahaan meningkat dari 1,05 persen menjadi 1,37 persen. Walaupun masih relatif kecil, peningkatan ini menunjukkan berkembangnya jasa



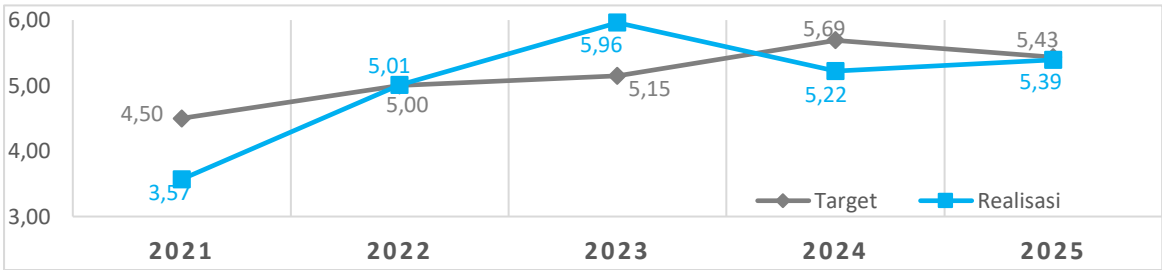
profesional, konsultansi, penyewaan, dan layanan pendukung dunia usaha sebagai konsekuensi meningkatnya aktivitas ekonomi daerah.

Perubahan struktur ekonomi Kota Tasikmalaya menunjukkan perlunya transformasi ekonomi menuju sektor-sektor yang memiliki produktivitas dan nilai tambah lebih tinggi. Arah kebijakan pembangunan daerah perlu difokuskan pada penguatan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan, peningkatan daya saing perdagangan modern dan UMKM, pengembangan pusat logistik regional, percepatan digitalisasi ekonomi, pengembangan pariwisata perkotaan dan industri halal, serta peningkatan investasi pada sektor jasa produktif.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 5,96 persen pada tahun 2023, menjadi 5,22 persen. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.20.
Target & Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 - 2025 (Persen)



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Secara struktural, pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya pada 2025 ditopang oleh sektor-sektor jasa dan perdagangan yang cenderung lebih adaptif terhadap perubahan permintaan. Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,49 persen, mengindikasikan meningkatnya mobilitas barang dan orang, sekaligus menguatnya aktivitas distribusi serta konektivitas antarwilayah. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga tumbuh sangat tinggi sebesar 10,48 persen, yang memperlihatkan adanya penguatan aktivitas hulu dan potensi ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Selain itu, sektor Jasa Lainnya tumbuh 10,61 persen, Informasi dan Komunikasi 9,77 persen, Jasa Kesehatan 9,78 persen, Jasa Perusahaan 9,72 persen, dan Real Estat 8,12 persen. Kinerja ini menandakan bahwa perekonomian Tasikmalaya semakin ditopang oleh sektor tersier yang mencerminkan urbanisasi ekonomi, pertumbuhan konsumsi jasa, dan perluasan layanan berbasis teknologi serta kebutuhan perkotaan.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tetap menjadi salah satu motor penting ekonomi kota, dengan pertumbuhan 7,00 persen pada 2025. Meski sedikit melambat dibandingkan 2024 yang tumbuh 7,67 persen, sektor ini masih mencerminkan kuatnya aktivitas perdagangan, pariwisata, kuliner, dan pergerakan masyarakat. Demikian pula sektor Pendidikan tumbuh 6,55 persen dan sektor Konstruksi 2,85 persen, yang menunjukkan masih adanya dukungan dari belanja pendidikan, pembangunan fisik, dan aktivitas investasi. Sektor Industri Pengolahan tumbuh 2,64 persen pada 2025, lebih rendah dibanding 2024 sebesar 5,46 persen, sehingga perlu dicermati karena menunjukkan perlambatan pada basis produksi



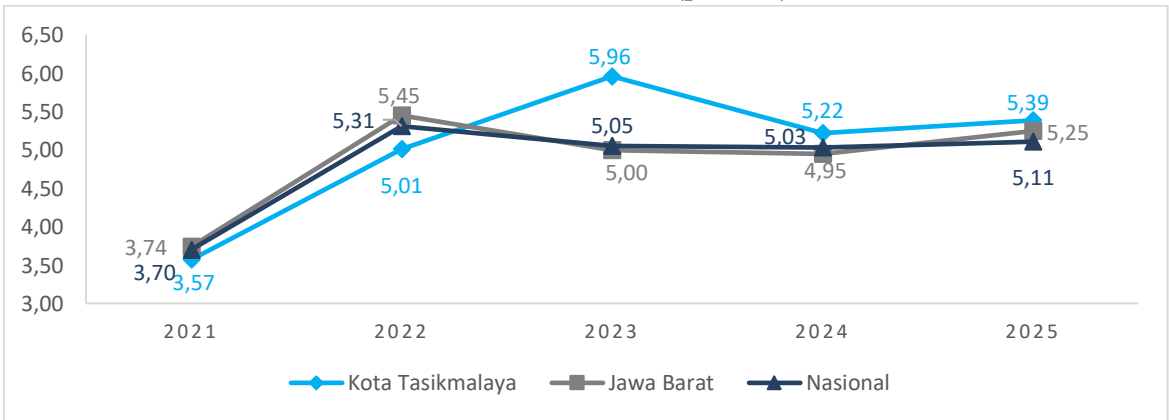
yang seharusnya menjadi penopang nilai tambah daerah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 2,06 persen, juga menunjukkan adanya moderasi konsumsi atau tekanan pada daya beli dan perputaran perdagangan lokal.

Di sisi lain, masih terdapat sektor-sektor yang pertumbuhannya rendah dan perlu perhatian kebijakan. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas hanya tumbuh 1,93 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,58 persen, Administrasi Pemerintahan 1,86 persen, dan Pertambangan dan Penggalian kembali berkontraksi sebesar -3,39 persen. Kontraksi pada pertambangan pada dasarnya tidak menjadi sektor unggulan kota, namun tetap menunjukkan keterbatasan kontribusi sektor primer ekstraktif. Perlambatan pada utilitas, pemerintahan, dan perdagangan mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya masih belum sepenuhnya merata antar-sektor, sehingga penguatan produktivitas dan efisiensi ekonomi lokal masih diperlukan.

Jika dilihat dari dinamika tahunan, 2023 merupakan tahun dengan pertumbuhan tertinggi dalam periode analisis, terutama didorong oleh penguatan sektor transportasi, jasa perusahaan, perdagangan, akomodasi, dan informasi-komunikasi. Tahun 2024 menunjukkan penyesuaian moderat pada beberapa sektor, tetapi tetap tumbuh kuat. Sementara itu pada 2025, pertumbuhan kembali meningkat terutama karena sektor transportasi, pertanian-perikanan, kesehatan, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya bergerak lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Kota Tasikmalaya tidak hanya bertumpu pada satu sektor, melainkan mulai menunjukkan diversifikasi penggerak pertumbuhan yang lebih seimbang.

Bila dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Tasikmalaya tahun 2025 lebih tinggi. Dari perspektif pembangunan daerah, terdapat beberapa implikasi strategis. Pertama, kemampuan Kota Tasikmalaya mempertahankan pertumbuhan di atas Jawa Barat dan nasional sejak 2023 menunjukkan bahwa sektor jasa perkotaan, perdagangan, transportasi, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital memiliki peran yang semakin dominan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, mulai menguatnya sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2025 menunjukkan peluang pengembangan ekonomi berbasis pangan dan agroindustri sebagai sumber pertumbuhan baru. Ketiga, perlambatan pada sektor industri pengolahan dan perdagangan perlu mendapat perhatian karena kedua sektor tersebut berperan penting dalam penciptaan nilai tambah dan kesempatan kerja. Berikut gambaran perbandingan LPE Kota Tasikmalaya dengan LPE Jawa Barat dan LPE Nasional

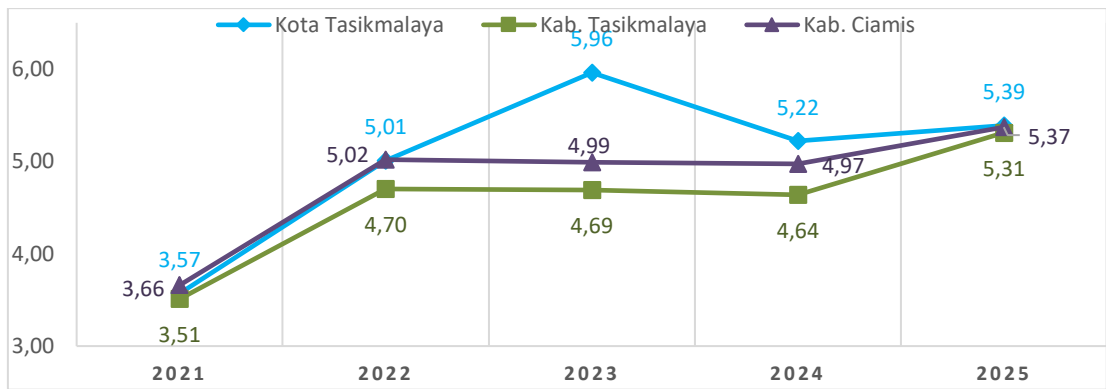
Gambar 2.21.
LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2021 – 2025 (persen)



Sumber: BPS Jawa Barat, diolah 2026.

Apabila dibandingkan dengan daerah tetangga, LPE Kota Tasikmalaya berada di atas LPE Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.22.
LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Jawa Barat, diolah 2026.

Kota Tasikmalaya memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara ketiga daerah selama periode 2021–2025. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mencapai sekitar 5,03 persen, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Ciamis sebesar 4,73 persen dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 4,55 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi perkotaan yang didominasi sektor perdagangan dan jasa memiliki kemampuan tumbuh lebih cepat dibandingkan ekonomi yang masih bergantung pada sektor primer.

Pada tahun 2021, saat fase awal pemulihan pascapandemi, Kabupaten Ciamis mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 3,66 persen, diikuti Kota Tasikmalaya sebesar 3,57 persen dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 3,43 persen. Ketiga daerah mengalami pemulihan yang hampir serupa karena mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Tahun 2022 menjadi periode akselerasi pertumbuhan di seluruh wilayah Priangan Timur. Kota Tasikmalaya tumbuh 5,01 persen, hampir sama dengan Kabupaten Ciamis sebesar 5,02 persen, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya tumbuh 4,70 persen. Kondisi ini mencerminkan kuatnya pemulihan konsumsi rumah tangga, perdagangan, transportasi, serta aktivitas UMKM setelah berakhirnya pembatasan aktivitas masyarakat.

Perbedaan mulai terlihat pada tahun 2023. Kota Tasikmalaya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,96 persen, jauh melampaui Kabupaten Tasikmalaya (4,69 persen) dan Kabupaten Ciamis (4,99 persen). Tingginya pertumbuhan Kota Tasikmalaya didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, serta jasa pendidikan yang berkembang pesat. Sebagai pusat perdagangan dan jasa di Priangan Timur, Kota Tasikmalaya memperoleh manfaat lebih besar dari meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi regional.

Pada tahun 2024, Kota Tasikmalaya tetap mempertahankan posisi tertinggi dengan pertumbuhan 5,22 persen. Kabupaten Ciamis tumbuh 4,97 persen, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya 4,64 persen. Kinerja Kabupaten Ciamis yang relatif lebih baik dibanding Kabupaten Tasikmalaya ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi



tantangan produktivitas pada beberapa sektor utama yang menyebabkan pertumbuhan relatif lebih rendah.

Pada tahun 2025, kesenjangan pertumbuhan mulai menyempit. Kota Tasikmalaya tumbuh 5,39 persen dan Kabupaten Tasikmalaya meningkat menjadi 5,31 persen. Peningkatan Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan adanya perbaikan aktivitas konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah yang mendorong akselerasi ekonomi daerah. Sementara itu, Kota Tasikmalaya tetap unggul dengan penguatan sektor transportasi dan perdagangan, pertanian-perikanan, jasa kesehatan, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya.

Dari perspektif struktur ekonomi, perbedaan kinerja pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Kota Tasikmalaya memiliki keunggulan sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan distribusi wilayah Priangan Timur sehingga lebih mampu memanfaatkan pertumbuhan sektor tersier yang memiliki produktivitas tinggi. Kabupaten Tasikmalaya masih ditopang oleh sektor pertanian, industri pengolahan skala kecil-menengah, dan konstruksi yang pertumbuhannya cenderung lebih moderat. Adapun Kabupaten Ciamis memiliki struktur ekonomi yang lebih seimbang antara sektor pertanian, perdagangan, dan jasa sehingga mampu menjaga stabilitas pertumbuhan meskipun tidak setinggi Kota Tasikmalaya.

Secara regional, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Priangan Timur, sementara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis berfungsi sebagai daerah hinterland yang menopang penyediaan bahan baku, tenaga kerja, serta pasar regional. Oleh karena itu, penguatan konektivitas ekonomi antardaerah, pengembangan kawasan agropolitan dan agroindustri, integrasi rantai pasok UMKM, serta peningkatan sistem logistik regional menjadi strategi penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Priangan Timur yang lebih kuat dan merata.

PDRB Menurut Pengeluaran

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang diciptakan oleh sumber daya ekonomi dalam wilayah Kota Tasikmalaya. Berikut adalah PDRB Menurut Pengeluaran Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025.

Tabel 2.32.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku, 2021-2025 (Miliar Rupiah)

No.	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
1.	Konsumsi Rumah Tangga	15.915,40	17.441,15	19.460,19	21.301,40	23.174,06
2.	Konsumsi LNPR	523,52	552,78	634,37	705,90	736,27
3.	Konsumsi Pemerintah	2.481,65	2.541,71	2.782,24	2.778,19	2.950,77
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.571,50	8.072,08	8.968,07	9.075,99	9.718,78
5.	Perubahan Inventori	-149,56	-54,33	-55,54	47,54	14,17



No.	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
6.	Net Ekspor	-3.498,48	-3.578,72	-4.377,90	-4.296,25	-4.602,37
	Total PDRB	22.844,02	24.974,68	27.411,43	29.612,77	31.991,67

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Keterangan: *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Struktur PDRB Kota Tasikmalaya pada periode ini sangat dominan ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga. Nilainya meningkat konsisten dari Rp15.915,40 miliar pada 2021 menjadi Rp23.174,06 miliar pada 2025. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi kontributor terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Nilainya naik dari Rp7.571,50 miliar pada 2021 menjadi Rp9.718,78 miliar pada 2025. Komponen Konsumsi Pemerintah meningkat dari Rp2.481,65 miliar pada 2021 menjadi Rp2.950,77 miliar pada 2025. Kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
PDRB Menurut Pengeluaran Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2025

Komponen PDRB Pengeluaran	Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	69.67	69.84	70,99	71,93	72,44
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.29	2.21	2,43	2,38	2,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.87	10.26	10,15	9,38	9,22
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	33.15	32.32	32,72	30,65	30,38
Perubahan Inventori	-0.65	-0.22	-0,20	0,16	0,04
Net Ekspor Impor Antar Daerah	-15.32	-14.41	-16,08	-14,51	-14,39
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Struktur PDRB Kota Tasikmalaya pada periode ini sangat dominan ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga. Pangsa konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB juga terus menguat, dari 69,67 persen menjadi 72,44 persen. Rata-rata selama periode 2021–2025, kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 70,97 persen, yang menunjukkan bahwa ekonomi Kota Tasikmalaya masih sangat bertumpu pada belanja masyarakat. Ini lazim untuk daerah perkotaan dengan karakter ekonomi jasa, perdagangan, dan konsumsi yang kuat. Di sisi lain, kondisi ini juga berarti daya beli masyarakat menjadi faktor paling menentukan bagi stabilitas ekonomi daerah.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi kontributor terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Pangsa PMTB memang sedikit menurun dari 33,14 persen pada 2021 menjadi 30,38 persen pada 2025, tetapi tetap menunjukkan bahwa investasi fisik masih merupakan penopang penting ekonomi



Kota Tasikmalaya. Kenaikan PMTB ini mengindikasikan masih adanya aktivitas investasi pada bangunan, sarana produksi, infrastruktur usaha, dan aset tetap lainnya. Dalam perspektif pembangunan daerah, kondisi ini penting karena PMTB berkaitan langsung dengan perluasan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi jangka menengah.

Kontribusi Komponen Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB relatif menurun dari 10,86 persen menjadi 9,22 persen. Ini menunjukkan bahwa peran belanja pemerintah tetap penting, tetapi tidak menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi daerah lebih banyak digerakkan oleh aktivitas masyarakat dan dunia usaha dibandingkan belanja pemerintah. Meski demikian, belanja pemerintah tetap strategis sebagai pengungkit, terutama untuk infrastruktur dasar, layanan publik, dan stimulus ekonomi lokal.

Komponen Konsumsi LNPRT berkontribusi rata-rata sekitar 2,30 persen selama periode 2021-2025. Sektor ini menunjukkan peran lembaga nirlaba dalam aktivitas sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Walaupun kecil secara nominal, keberadaannya penting sebagai penopang layanan sosial yang melengkapi peran pemerintah dan rumah tangga.

Sementara itu, Perubahan Inventori berfluktuasi tajam, dari Rp-149,56 miliar pada 2021 menjadi Rp47,54 miliar pada 2024, lalu Rp14,17 miliar pada 2025. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa akumulasi persediaan barang jadi, setengah jadi, atau bahan baku belum stabil, sehingga belum dapat menjadi penopang yang kuat bagi pembentukan PDRB. Dalam banyak kasus, perubahan inventori lebih mencerminkan penyesuaian siklus usaha dan pergerakan stok daripada sumber pertumbuhan yang berkelanjutan.

Komponen yang paling perlu dicermati adalah Net Ekspor yang masih negatif sepanjang 2021-2025. Nilainya bergerak dari Rp-3.498,48 miliar pada 2021 menjadi Rp-4.602,37 miliar pada 2025. Ini berarti nilai impor barang dan jasa yang masuk ke Kota Tasikmalaya masih lebih besar dibandingkan eksportnya, sehingga terjadi kebocoran ekonomi ke luar daerah. Secara struktural, kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi dan produksi daerah masih banyak dipenuhi dari luar wilayah. Dalam konteks pembangunan, ketergantungan ini perlu dikurangi melalui penguatan produksi lokal, substitusi impor, hilirisasi UMKM, dan perluasan pasar produk daerah.

Jika diringkas, ciri utama ekonomi Kota Tasikmalaya dari sisi pengeluaran adalah ekonomi berbasis konsumsi, dengan dukungan investasi yang cukup besar, namun masih menghadapi tantangan pada sisi net ekspor yang defisit. Hal ini tampak dari komposisi PDRB yang didominasi konsumsi rumah tangga dan PMTB, sementara perdagangan luar daerah masih menunjukkan kebocoran bersih. Pola ini selaras dengan karakter Kota Tasikmalaya sebagai pusat jasa dan perdagangan regional, tetapi sekaligus menegaskan perlunya penguatan struktur produksi lokal agar pertumbuhan tidak semata-mata ditopang oleh belanja konsumsi. Fokus pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya ke depan perlu diarahkan pada penguatan daya beli masyarakat, peningkatan produktivitas investasi, serta pengurangan defisit net ekspor melalui penguatan basis produksi dan rantai pasok lokal.

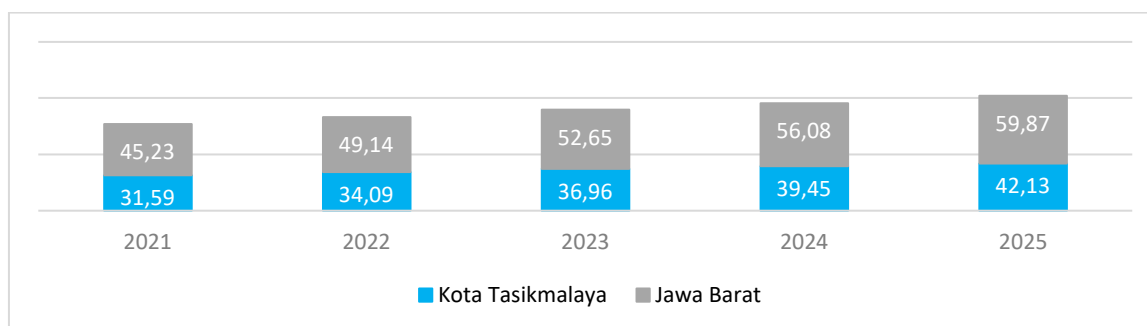
PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan rata-rata kemampuan ekonomi penduduk dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi selama satu tahun. Meskipun tidak secara langsung mencerminkan tingkat pendapatan yang diterima masyarakat, indikator ini sering digunakan untuk

melihat tingkat kemakmuran dan kapasitas ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data yang tersedia, PDRB per kapita Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. PDRB per kapita Kota Tasikmalaya meningkat dari Rp31,59 juta pada tahun 2021 menjadi Rp42,13 juta pada tahun 2025. Pada periode yang sama, PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat meningkat dari Rp45,23 juta menjadi Rp59,87 juta. Data PDRB per kapita Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku dibandingkan dengan PDRB Jawa Barat disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2.23.

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2025 (juta Rupiah)



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya dan BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2026.

Selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita Kota Tasikmalaya meningkat sebesar 33,37 persen, atau bertambah sekitar Rp10,54 juta per penduduk. Sementara itu, Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 32,36 persen, atau bertambah sekitar Rp14,64 juta per penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara persentase, peningkatan kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya sedikit lebih cepat dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mampu melampaui laju pertumbuhan penduduk sehingga menghasilkan peningkatan output ekonomi per penduduk yang cukup baik.

Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan, PDRB per kapita Kota Tasikmalaya masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Selama periode 2021–2025, rasio PDRB per kapita Kota Tasikmalaya terhadap Jawa Barat relatif stabil pada kisaran 69–70 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp100 nilai tambah ekonomi yang dihasilkan rata-rata penduduk Jawa Barat, penduduk Kota Tasikmalaya menghasilkan sekitar Rp70. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan produktivitas ekonomi sekitar 30 persen dibandingkan rata-rata provinsi.

Perbedaan PDRB per kapita tersebut dipengaruhi oleh struktur ekonomi kedua wilayah. Jawa Barat memiliki kontribusi besar dari sektor industri manufaktur berskala besar, kawasan industri nasional, industri otomotif, elektronik, petrokimia, serta investasi PMA dan PMDN yang sangat tinggi. Sektor-sektor tersebut menghasilkan nilai tambah ekonomi yang besar sehingga meningkatkan PDRB per kapita. Sebaliknya, struktur ekonomi Kota Tasikmalaya masih didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, UMKM, dan industri kecil-menengah. Meskipun sektor-sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, nilai tambah yang dihasilkan per pekerja relatif lebih rendah dibandingkan industri manufaktur modern.

Walaupun masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat, tren peningkatan PDRB per kapita Kota Tasikmalaya menunjukkan beberapa perkembangan positif, yaitu:



1. Daya beli masyarakat terus meningkat, tercermin dari tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB.
2. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil di atas 5 persen sejak 2022.
3. Sektor jasa modern berkembang pesat, terutama transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, akomodasi dan makan minum, serta jasa perusahaan.
4. Investasi daerah terus meningkat, terlihat dari kenaikan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai Rp9,72 triliun pada tahun 2025.
5. Posisi Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan jasa Priangan Timur semakin menguat, sehingga menjadi pusat pertumbuhan kawasan (growth center).

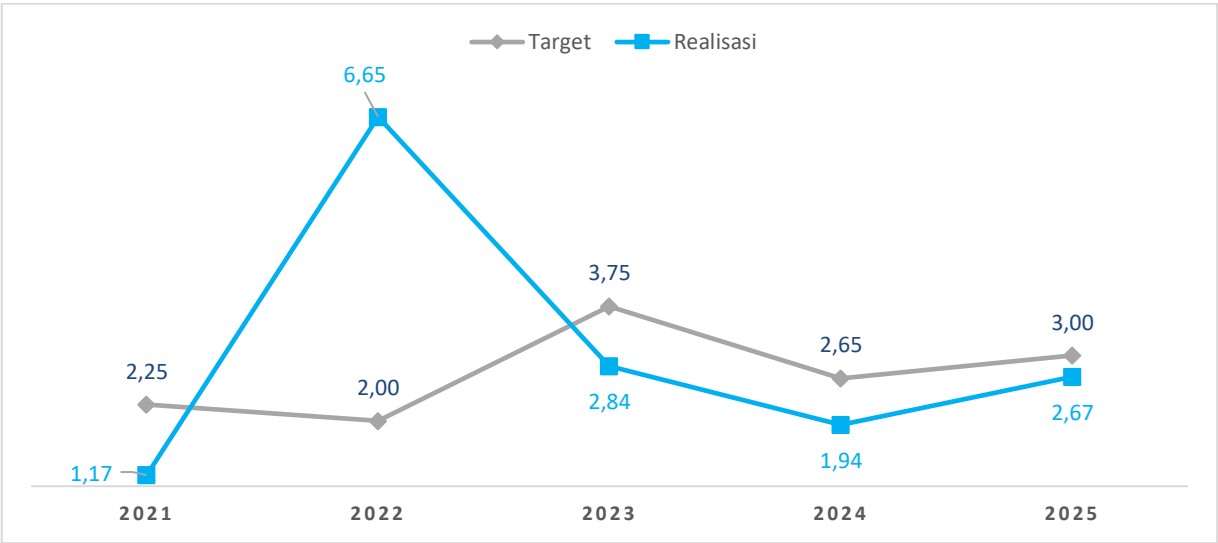
Peningkatan PDRB per kapita yang konsisten menunjukkan bahwa arah pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya berada pada jalur yang positif. Namun demikian, untuk memperkecil kesenjangan dengan rata-rata Jawa Barat, diperlukan upaya peningkatan produktivitas ekonomi melalui:

- Penguatan investasi produktif dan industri pengolahan bernilai tambah tinggi.
- Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja.
- Penguatan UMKM agar naik kelas menjadi usaha menengah dan berorientasi ekspor.
- Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa modern sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Priangan Timur.
- Mendorong hilirisasi produk unggulan daerah agar nilai tambah ekonomi tidak keluar ke wilayah lain.

Inflasi

Perkembangan inflasi di Kota Tasikmalaya selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan tantangan pengendalian harga yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.24.
Target & Realisasi Inflasi Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2025 (Persen)



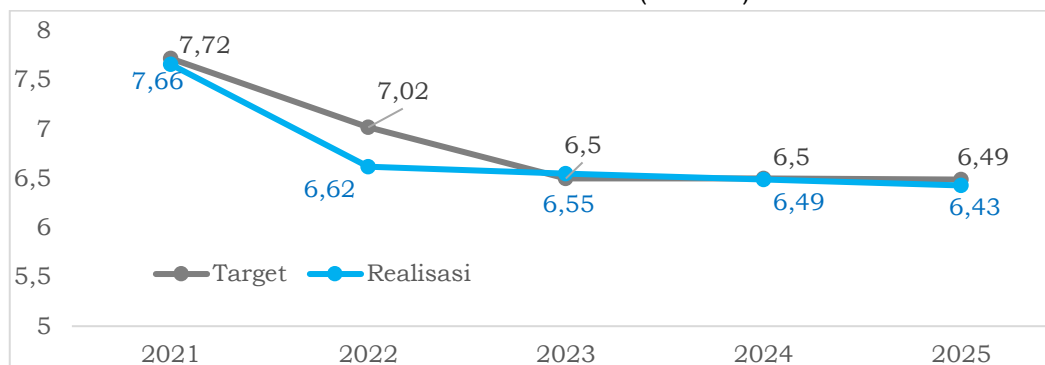
Sumber: RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025.
BPS Kota Tasikmalaya, 2026

Inflasi Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 tercatat relatif rendah dan terkendali yaitu 1,17 persen, namun pada tahun 2022 inflasi Kota Tasikmalaya tercatat 6,65 persen, hal ini merupakan dampak dari kenaikan harga BBM, kenaikan harga Bahan Bakar Rumah Tangga (Gas) dan kenaikan harga telur ayam ras yang terjadi pada tahun 2022. Inflasi Kota Tasikmalaya semakin terkendali, tercatat 2,84 persen pada tahun 2023, 1,94 persen pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 sebesar 2,67 persen. Meskipun angka inflasi Kota Tasikmalaya tahun 2024-2025 berada dalam kategori rendah dan terkendali, deviasi yang konsisten di bawah target ini mencerminkan adanya perlambatan laju kenaikan harga yang mungkin berkaitan dengan daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan atau efektivitas intervensi pasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama periode 2021-2025 perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tasikmalaya menunjukkan tren penurunan yang positif dan progresif, yang mengindikasikan keberhasilan upaya pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.25.
Target & Realisasi Tingkat Pengangguran Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2025 (Persen)



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tasikmalaya sepanjang tahun 2021 hingga 2025 terus mengalami penurunan dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, angka pengangguran berada di level 7,66 persen, sedikit lebih rendah dari target 7,72 persen. Keberhasilan dalam menekan angka pengangguran terlihat semakin signifikan pada tahun 2022, dimana realisasi turun tajam ke angka 6,62 persen, jauh melampaui target penurunan yang dipatok pada angka 7,02 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pasca-pandemi di Kota Tasikmalaya berjalan lebih efektif daripada yang diproyeksikan semula. Memasuki tahun 2023 hingga tahun 2025, angka pengangguran cenderung stabil dengan tren penurunan yang lebih melandai namun tetap terjaga di bawah target. Realisasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,55 persen, tahun 2024 sebesar 6,49 persen, dan terakhir tercatat di angka 6,43 persen pada tahun 2025. Meskipun selisih antara realisasi dan target pada tiga tahun terakhir tersebut semakin tipis, konsistensi pemerintah daerah dalam mempertahankan angka TPT di kisaran 6,49 persen menunjukkan adanya stabilitas pasar kerja yang baik. Keberhasilan mempertahankan realisasi di bawah target ini merupakan capaian strategis bagi Kota Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kerentanan sosial yang disebabkan oleh pengangguran.



Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS, Jumlah angkatan kerja Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 sebanyak 385.800 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 6,43 persen. Sementara itu jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya sebanyak 2.818 orang dengan jumlah yang ditempatkan sebanyak 1.424 orang. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.34.
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Tasikmalaya, Provinsi, dan Nasional
Tahun 2023-2025 (Persen)

	2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nasional	5,3-6,0	5,32	5,0-5,7	4,91	5,0-5,7	4,85
Provinsi Jawa Barat	8,13	7,44	7,4	6,75	6,42 – 6,99	6,66
Kota Tasikmalaya	6,5	6,55	6,5	6,49	6,5	6,43

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026

Jika dibandingkan dengan target dan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada tingkat Provinsi Jawa Barat, sejak tahun 2023 sampai tahun 2025, Kota Tasikmalaya selalu berada di atas realisasi Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya pada tingkat Nasional, realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya belum bisa melampaui realisasi tingkat Nasional.

Tabel 2.35.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya
dengan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023-2025 (Persen)

No	Kabupaten / Kota	2023	2024	2025
1	Pangandaran	1,52	1,58	1,91
2	Majalengka	4,12	4,01	3,62
3	Tasikmalaya	3,89	3,74	3,69
4	Ciamis	3,52	3,37	4,08
5	Kota Banjar	5,43	5,44	5,26
6	Sumedang	6,94	6,16	6,08
7	Cianjur	7,71	5,99	6,17
8	Kota Cirebon	7,66	6,29	6,41
9	Cirebon	7,65	6,74	6,42
10	Kota Tasikmalaya	6,55	6,49	6,43
11	Indramayu	6,46	6,25	6,47
12	Kota Depok	6,97	6,27	6,52
13	Garut	7,33	6,96	6,54
14	Bandung Barat	8,11	6,7	6,6
15	Bandung	6,52	6,36	6,68
16	Subang	7,65	6,73	6,8
17	Kota Bandung	8,83	7,4	7,22
18	Sukabumi	7,32	7,11	7,23
19	Kota Bekasi	7,9	7,82	7,33
20	Purwakarta	7,72	7,34	7,54
21	Kuningan	9,49	7,78	7,59



No	Kabupaten / Kota	2023	2024	2025
22	Bogor	8,47	7,34	7,69
23	Kota Bogor	9,39	8,13	7,95
24	Karawang	8,95	8,04	7,99
25	Kota Sukabumi	8,53	8,34	8,19
26	Kota Cimahi	10,52	8,97	8,75
27	Bekasi	8,87	8,82	8,78
JAWA BARAT		7,44	6,75	6,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2026

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 di Kota Tasikmalaya berada pada urutan ke 10. Jika dilihat pertumbuhan pada setiap tahunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya selalu mengalami penurunan.

Tabel 2.36.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2025

Kategori	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Angkatan Kerja	342.585	347.063	369.778	395.357	385.800
1. Bekerja	316.349	324.099	345.544	369.713	360.981
2. Pengangguran Terbuka	26.236	22.964	24.234	25.644	24.819
Bukan Angkatan Kerja	178.418	178.909	195.315	178.295	196.040
Jumlah	521.003	525.972	565.093	573.652	581.840
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)	92,34	93,38	93,45	93,51	93,57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (%)	65,75	65,98	65,44	68,92	66,31
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,66	6,62	6,55	6,49	6,43

Sumber: BPS Jawa Barat, diolah 2026.

Secara umum, Angkatan kerja akan selalu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan usia kerja. Pertumbuhan penduduk yang didominasi oleh usia produktif dapat menjadi peluang apabila mampu diserap oleh pasar kerja. Namun demikian, apabila pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal, maka berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran dan setengah pengangguran.

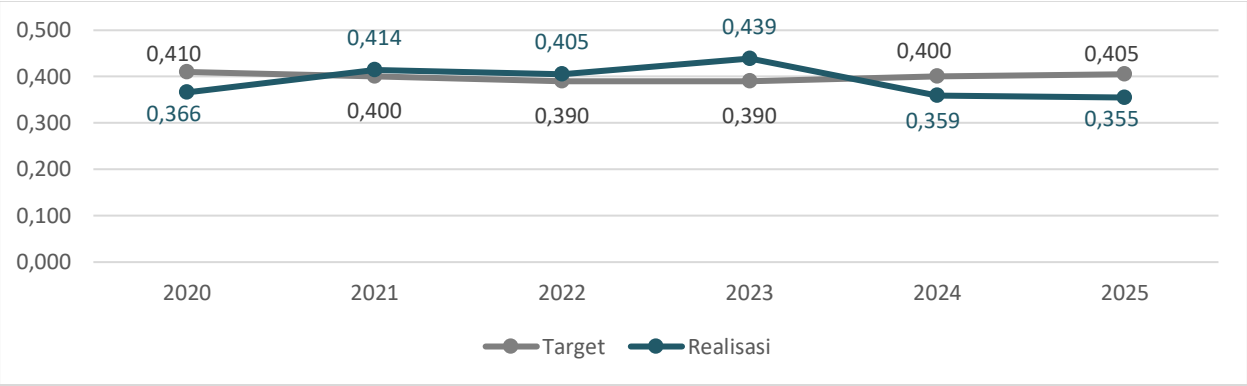
Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini (Indeks Gini). Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.



Indeks Gini di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.26.
Target & Realisasi Indeks Gini Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2025
(Poin)



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026.

Angka indeks gini Kota Tasikmalaya pada tahun 2022-2024 tergolong tinggi jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Perkembangan indeks gini Kota Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir berkembang secara fluktuatif, dengan posisi terakhir pada tahun 2024 mencapai 0,359. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan pendudukan Kota Tasikmalaya cenderung menurun dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2.37.
Perbandingan Capaian Indeks Gini Kota Tasikmalaya, Provinsi, dan Nasional Tahun 2022-2025 (Poin)

	2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nasional	0,376-0,378	0,381	0,375-0,378	0,388	0,374-0,377	0,381	0,379-0,382	0,363
Provinsi Jawa Barat	0,4	0,412	0,396	0,425	0,408	0,428	0,383-0,390	0,397
Kota Tasikmalaya	0,39	0,405	0,39	0,439	0,4	0,359	0,348-0,405	0,355

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

Sebagai pondasi dalam mengukur kualitas hidup masyarakat, pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar dasar yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial serta tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

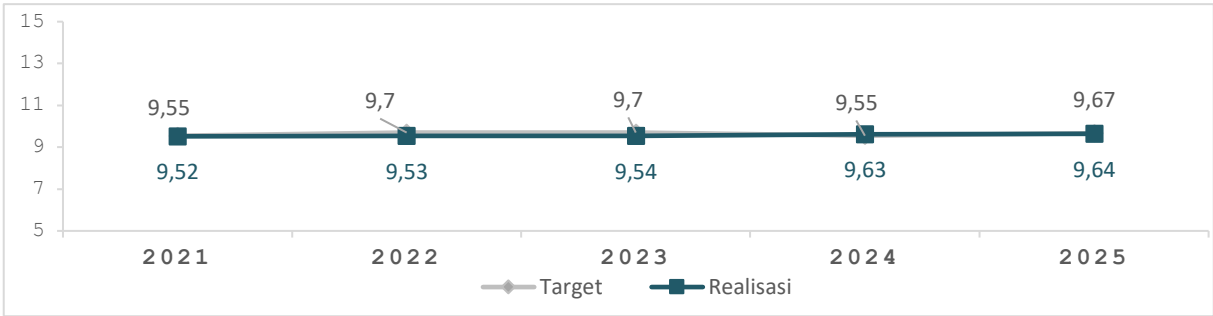
2.1.2.2.1. Pendidikan

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2021 hingga 2025 terus mengalami peningkatan setiap tahun, yang menunjukkan perbaikan dalam akses pendidikan. Pada tahun 2021 capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Tasikmalaya sebesar 9,52 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga mencapai 9,64 tahun pada tahun 2025 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya telah bersekolah selama 9,64 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga setingkat dengan kelas I SMA. Kota Tasikmalaya

memiliki nilai RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 9,46 tahun, hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan yang relatif lebih baik, seperti dukungan program pendidikan dan fasilitas pendidikan. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar dibawa ini.

Gambar 2.27.
 Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 - 2025

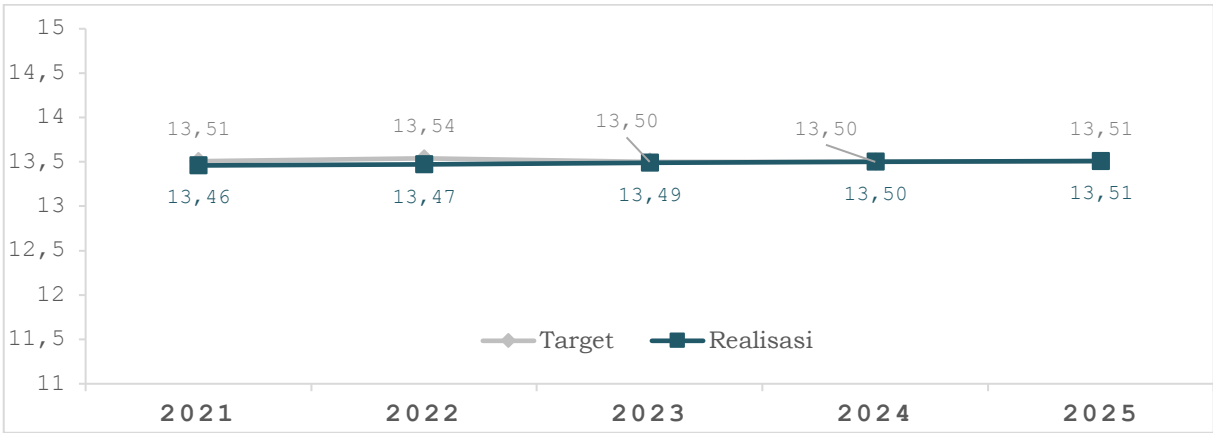


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026

Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan metode penghitungan baru IPM pada Tahun 2010, ada pergantian indikator bidang pendidikan yang semula Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2021-2025 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah 13,46 dan meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2025 mencapai angka 13,51 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.28.
 Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 - 2025

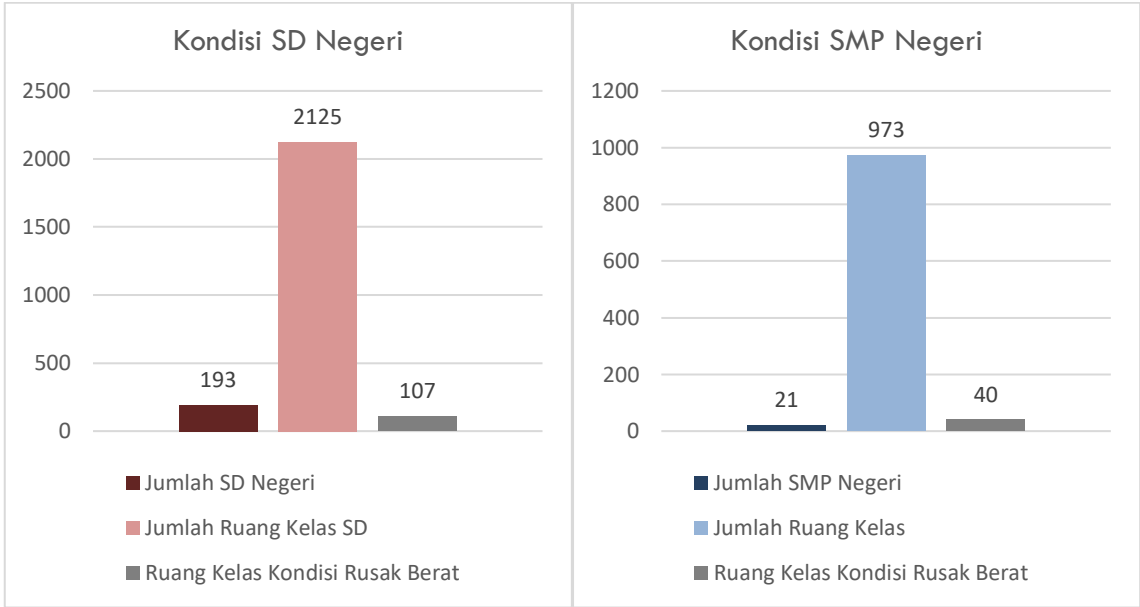


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026.

Kondisi Ruang Kelas Sekolah

Kelayakan kondisi ruang kelas yang representatif dapat mendukung proses belajar-mengajar yang efektif, termasuk untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berikut ini disampaikan data kondisi ruang kelas yang ada di Kota Tasikmalaya tahun 2025.

Gambar 2.29.
Kondisi Ruang Kelas Sekolah Negeri di Kota Tasikmalaya
Tahun 2025



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2026.

Data menunjukkan di Kota Tasikmalaya terdapat sebanyak 193 unit SD Negeri yang didukung oleh total ketersediaan 2.125 ruang kelas. Jika dirata-rata, setiap sekolah memiliki sekitar 11 ruang kelas, sebuah angka yang secara kuantitas sudah cukup ideal untuk mengakomodasi rombongan belajar dari kelas 1 hingga kelas 6 beserta ruang penunjang lainnya. Namun, dari aspek kualitas fisik, tantangan pembangunan masih terlihat dengan adanya 107 ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak berat. Jumlah tersebut setara dengan 5,04% dari total seluruh ruang kelas yang ada. Meskipun persentasenya tergolong kecil, keberadaan lebih dari seratus ruang kelas yang rusak berat ini memerlukan perhatian khusus dan langkah intervensi segera dari pemerintah daerah setempat.

Tercatat terdapat 21 unit SMP Negeri di Kota Tasikmalaya yang didukung oleh ketersediaan fasilitas sebanyak 973 ruang kelas. Secara rata-rata, setiap SMP Negeri di Kota Tasikmalaya memiliki sekitar 46 ruang kelas, yang menunjukkan bahwa kapasitas tampung ruang belajar per sekolah tergolong besar untuk mengakomodasi seluruh rombongan belajar dari kelas VII hingga kelas IX. Sama seperti tingkat Sekolah Dasar, masih terdapat tantangan dari segi kualitas sarana prasarana masih mengemuka dengan adanya 40 ruang kelas SMP Negeri dengan kondisi rusak berat. Jumlah ruang kelas yang rusak tersebut mencakup sekitar 4,11% dari total seluruh ruang kelas yang tersedia.

Kondisi ini memberikan sinyal penting bagi penataan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk segera memprioritaskan program rehabilitasi bangunan guna memastikan seluruh kegiatan belajar mengajar berlangsung di lingkungan yang aman, nyaman, dan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Patisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 dan 13-15 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia (7-12) dan usia (13-15). Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) ntuk dua kelompok usia (7-12 tahun dan 13-15 tahun) di Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.38.
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah			
	Kota Tasikmalaya		Provinsi Jawa Barat	
	Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun	Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun
2020	99,61	95,40	99,66	95,45
2021	99,53	98,88	99,50	95,09
2022	98,70	95,26	99,39	95,27
2023	98,72	97,02	99,40	95,75
2024	97,77	96,47	99,46	95,86
2025	99,23	99,23	-	-

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026 (diolah)

Secara keseluruhan, partisipasi sekolah untuk usia 7-12 tahun (SD/MI sederajat) sudah sangat tinggi, dengan angka pada tahun 2025 sebesar 99,23 persen walaupun perkembangannya cukup fluktuatif. Sementara itu, partisipasi sekolah usia 13-15 tahun (SMP/MTs sederajat) melonjak tinggi hingga 99,23 persen di tahun 2025.

Angka Literasi dan Numerasi

Dalam konteks Rapor Pendidikan, literasi dan numerasi mengacu pada kemampuan dasar siswa dalam membaca dan berhitung yang menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah, melalui Kemendikbudristek, menilai kemampuan ini sebagai indikator utama dalam Rapor Pendidikan, karena keduanya merupakan fondasi penting untuk pembelajaran di semua mata pelajaran. Data Capaian Literasi/Numerasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Tasikmalaya dari tahun 2022 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39.
Capaian Literasi/Numerasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2025

Tahun	Capaian Literasi dan Numerasi			
	Sekolah Dasar		Sekolah Menengah Pertama	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
2022	68,96	44,28	70,80	45,96
2023	77,85	62,80	75,46	51,82
2024	83,40	74,64	80,43	75,39
2025	81,56	79,96	83,54	80,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2026 (diolah)

Capaian Numerasi Sekolah Dasar dari tahun 2023 ke 2024 ada kenaikan 11,84 % dan ada kenaikan lagi pada tahun 2025 sebesar 5,32%. Sedangkan capaian literasi Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2023 ada kenaikan pada tahun 2024 sebesar 23,57 % dan ada kenaikan lagi pada tahun 2025 sebesar 4,68% ini menandakan capaian literasi di Kota Tasikmalaya sangat baik.

Literasi Masyarakat

Indikator untuk melihat perkembangan pembangunan literasi yakni Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1), Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2),



Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3), Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4), Perpustakaan ber-SNP (UPLM5), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6), Anggota Perpustakaan (UPLM7). Pengukuran IPLM dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI dan mulai dihitung pada tahun 2021 dan menghasilkan nilai IPLM pada tahun 2022, Kota Tasikmalaya tercatat sebesar 79,68 dan berada di atas posisi Jawa Barat sebesar 72,73. Pada tahun 2023, IPLM di seluruh Kota Kabupaten dan Provinsi di Indonesia mengalami penurunan, namun demikian IPLM Kota Tasikmalaya masih di atas provinsi Jawa Barat dengan nilai 76,45 dan provinsi Jawa Barat sebesar 60,02. Semenjak tahun 2025, terdapat perubahan formulasi perhitungan IPLM sehingga terdapat penurunan nilai yang cukup signifikan, yaitu sebesar 17,64.

Tabel 2.40.

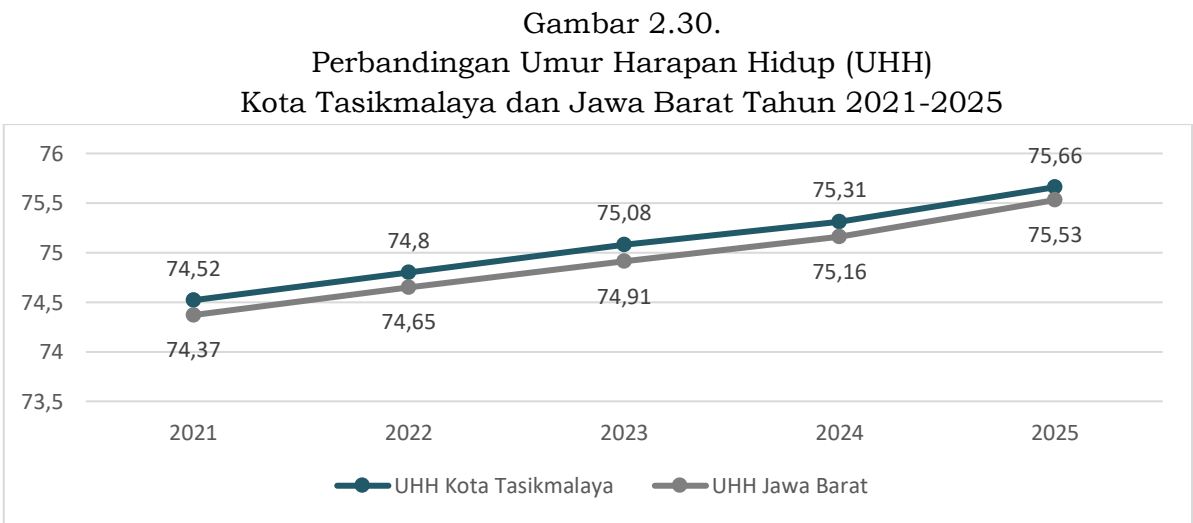
IPLM Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2022-2025

Tahun	IPLM Kota Tasikmalaya	IPLM Jawa Barat
2022	79,68	72,73
2023	76,45	60,02
2024	72,84	72,76
2025	17,64	18,07

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, 2026 (diolah)

2.1.2.2.2. Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Faktor-faktor yang memperngaruhi UHH diantaranya adalah faktor kesehatan yaitu tingkat kelahiran dan kematian, pelayanan kesehatan, dan gizi buruk. Selain faktor kesehatan, UHH juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial.



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Tasikmalaya menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2021–2025. UHH Kota Tasikmalaya meningkat dari 74,52 tahun pada tahun 2021 menjadi 75,66 tahun pada tahun 2025, atau bertambah 1,14 tahun dalam kurun waktu lima tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, perbaikan

status gizi masyarakat, pengendalian penyakit, serta meningkatnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat, UHH Kota Tasikmalaya secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi. Pada tahun 2025, UHH Kota Tasikmalaya mencapai 75,66 tahun, lebih tinggi dibandingkan UHH Jawa Barat sebesar 75,53 tahun, dengan selisih 0,13 tahun. Meskipun selisih tersebut relatif kecil dan cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan kesehatan di Kota Tasikmalaya masih berada pada level yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

Dari sisi pertumbuhan tahunan, peningkatan UHH Kota Tasikmalaya berlangsung secara stabil dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,28 tahun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah berjalan secara konsisten melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan status gizi, serta berbagai program promotif dan preventif yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

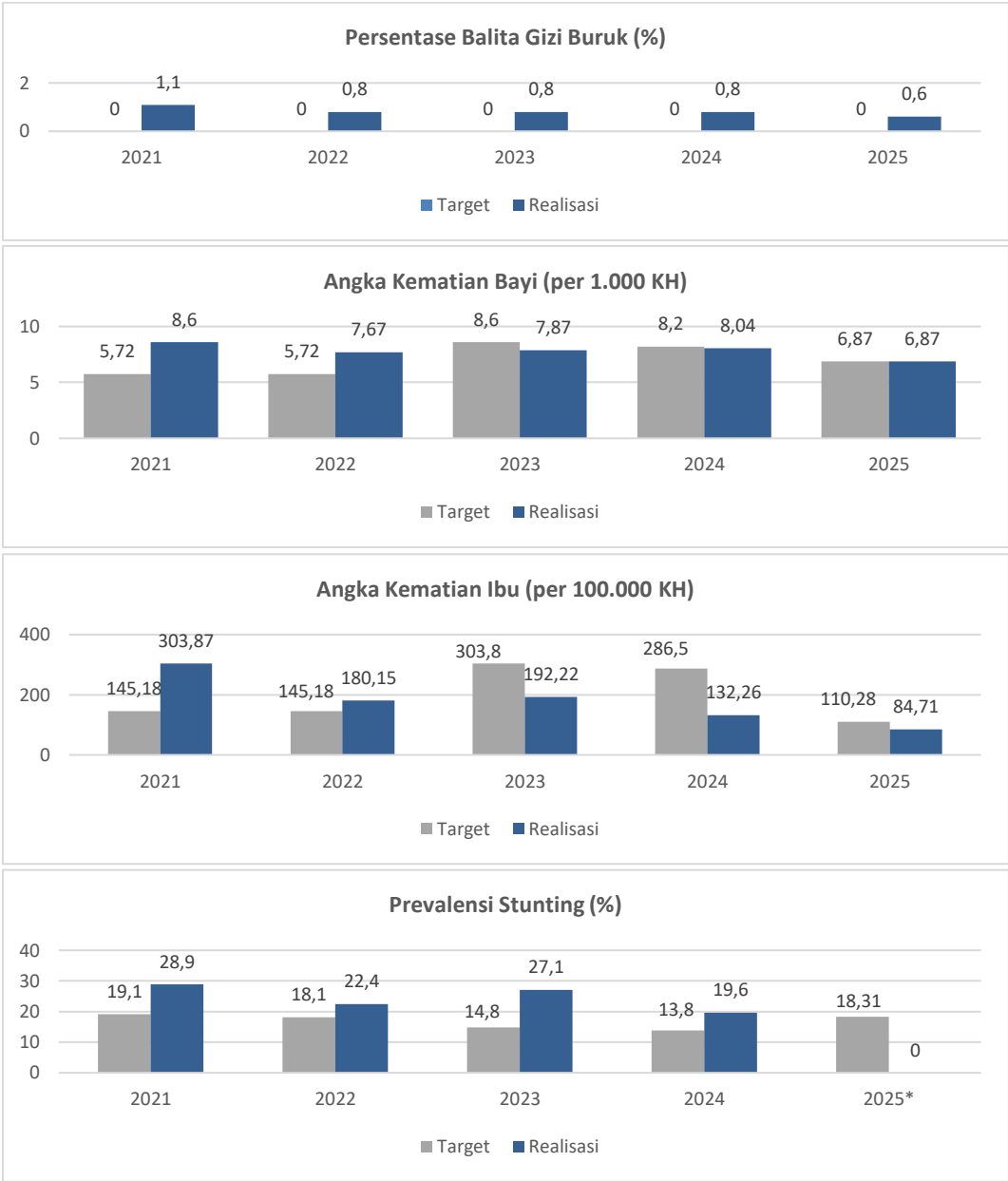
Meskipun demikian, peningkatan UHH juga memberikan konsekuensi terhadap perubahan struktur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang responsif terhadap penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular, memperluas layanan kesehatan bagi lanjut usia, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer melalui Integrasi Layanan Primer (ILP), serta memperkuat upaya promotif dan preventif guna mempertahankan kualitas hidup masyarakat hingga usia lanjut.

Ke depan, peningkatan UHH perlu terus didukung melalui penguatan intervensi lintas sektor, antara lain peningkatan kualitas sanitasi dan air minum, percepatan penurunan stunting, pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, peningkatan aktivitas fisik masyarakat, penguatan kesehatan lingkungan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dengan upaya tersebut diharapkan UHH Kota Tasikmalaya dapat terus meningkat secara berkelanjutan sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2021-2025 adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.31.
Capaian Persentase Balita Gizi Buruk, AKI, AKB, dan Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025



Keterangan: *Prevalensi Stunting Tahun 2025 data belum tersedia
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026.

Indikator kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu ukuran utama dalam menilai kualitas pembangunan kesehatan. Berdasarkan capaian selama periode 2021–2025, secara umum Kota Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang positif pada sebagian besar indikator, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Pada indikator persentase balita gizi buruk, capaian selama lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Meskipun target daerah ditetapkan sebesar 0 persen, realisasi masih berada pada kisaran 1,1 persen pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 0,8 persen pada tahun 2022 hingga 2024, dan kembali menurun menjadi 0,6 persen pada tahun 2025. Tren penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan status gizi balita melalui berbagai intervensi, seperti peningkatan pelayanan gizi di fasilitas kesehatan, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan bagi kelompok sasaran, serta penguatan

edukasi kepada keluarga. Namun demikian, belum tercapainya target nol persen menunjukkan bahwa upaya penanganan balita gizi buruk masih perlu diperkuat, khususnya pada keluarga berisiko tinggi dan wilayah dengan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang lebih besar.

Pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB), perkembangan capaian menunjukkan fluktuasi. Realisasi AKB mengalami penurunan dari 8,6 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 7,67 pada tahun 2022, 7,87 pada tahun 2023, 8,04 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 6,87 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025. Capaian tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan dan menjadi capaian terbaik selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, serta peningkatan akses terhadap pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Meskipun demikian, fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan neonatal, deteksi dini faktor risiko kehamilan, serta penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal masih perlu terus dilakukan agar penurunan AKB dapat berlangsung secara konsisten.

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mencapai 303,87 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, AKI menurun menjadi 180,15 pada tahun 2022, kemudian masih berada pada angka 192,22 pada tahun 2023, turun menjadi 132,26 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 84,71 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025. Capaian tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan sehingga mencerminkan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan ibu, terutama dalam pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan obstetri neonatal emergensi, serta penguatan sistem rujukan. Penurunan AKI ini merupakan indikator positif yang menunjukkan semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan maternal di Kota Tasikmalaya.

Sementara itu, prevalensi stunting berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan tren penurunan dalam jangka panjang meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2023. Prevalensi stunting tercatat sebesar 28,9 persen pada tahun 2021, menurun menjadi 22,4 persen pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 27,1 persen pada tahun 2023, dan kembali turun secara signifikan menjadi 19,6 persen pada tahun 2024. Data prevalensi stunting tahun 2025 masih belum tersedia karena menunggu hasil survei nasional. Secara umum, tren penurunan tersebut menunjukkan bahwa berbagai intervensi percepatan penurunan stunting mulai memberikan dampak positif melalui penguatan konvergensi lintas sektor, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, peningkatan akses air minum layak, edukasi gizi, serta intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara terpadu.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator kesehatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase balita gizi buruk, tercapainya target Angka Kematian Bayi pada tahun 2025, penurunan Angka Kematian Ibu yang cukup signifikan, serta kecenderungan menurunnya prevalensi stunting. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih perlu memperkuat upaya promotif dan preventif melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer, penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP), optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, penguatan sistem rujukan, serta penguatan konvergensi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Langkah-langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan peningkatan derajat



kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan dalam RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Selain itu, terdapat tantangan lain dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Tasikmalaya, yaitu penyakit menular. Data penyakit menular di Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41.
Jumlah Kasus Penyakit Menular Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2025

Penyakit Menular	Jumlah Kasus 2024	Jumlah Kasus 2025
TBC	4.066	4.693
HIV/AIDS	169	49
Malaria	6	7
Kusta/Lepre	8	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, perkembangan kasus penyakit menular selama periode 2024–2025 menunjukkan tren yang bervariasi pada masing-masing jenis penyakit. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengendalian penyakit menular tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga oleh efektivitas upaya promotif, preventif, surveilans epidemiologi, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit.

Kasus Tuberkulosis (TBC) mengalami peningkatan dari 4.066 kasus pada tahun 2024 menjadi 4.693 kasus pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 15,4 persen. Peningkatan jumlah kasus ini tidak selalu menunjukkan bertambahnya penularan, namun dapat mencerminkan semakin optimalnya kegiatan penemuan kasus (*case finding*), perluasan skrining aktif pada kelompok berisiko, penguatan surveilans, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan diagnosis dan pengobatan. Di sisi lain, tingginya jumlah kasus TBC juga menunjukkan bahwa penyakit ini masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius melalui penguatan deteksi dini, keberhasilan pengobatan, investigasi kontak serumah, serta kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi faktor risiko sosial dan lingkungan.

Sebaliknya, kasus HIV/AIDS mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 169 kasus pada tahun 2024 menjadi 49 kasus pada tahun 2025, atau menurun sekitar 71 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan semakin efektifnya upaya pencegahan, edukasi kepada kelompok berisiko, perluasan layanan tes HIV, serta peningkatan akses terhadap terapi antiretroviral (ARV). Meskipun demikian, interpretasi terhadap penurunan kasus perlu dilakukan secara hati-hati karena dapat dipengaruhi oleh cakupan pemeriksaan, intensitas penemuan kasus, maupun mekanisme validasi data. Oleh karena itu, penguatan surveilans epidemiologi, layanan skrining, serta upaya penjangkauan populasi kunci tetap perlu dipertahankan agar penularan HIV dapat dikendalikan secara berkelanjutan.

Untuk malaria, jumlah kasus relatif rendah namun mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 6 kasus pada tahun 2024 menjadi 7 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya tetap perlu mempertahankan kewaspadaan terhadap potensi kasus impor maupun penularan lokal melalui penguatan surveilans, pemeriksaan laboratorium, investigasi epidemiologi, serta pengendalian vektor secara berkelanjutan guna mendukung target eliminasi malaria.

Sementara itu, kasus kusta (lepra) mengalami penurunan dari 8 kasus pada tahun 2024 menjadi 5 kasus pada tahun 2025 atau turun sekitar 37,5 persen. Penurunan ini mencerminkan semakin baiknya upaya deteksi dini, tata laksana pengobatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit kusta.

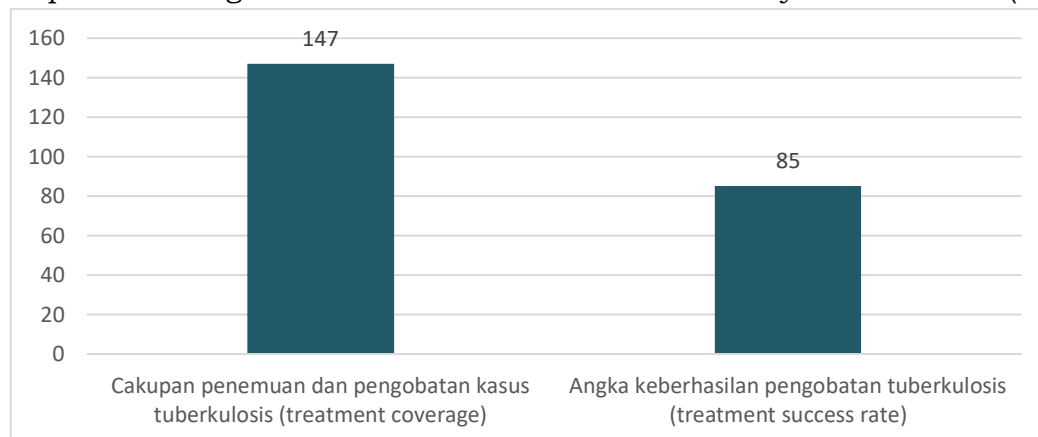
Meskipun jumlah kasus relatif kecil, pengendalian kusta tetap perlu menjadi perhatian mengingat penyakit ini berpotensi menimbulkan kecacatan permanen apabila tidak ditemukan dan ditangani sejak dini.

Secara keseluruhan, perkembangan penyakit menular di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa Tuberkulosis masih menjadi penyakit menular dengan beban kasus tertinggi, sehingga perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan kesehatan daerah. Di sisi lain, penurunan kasus HIV/AIDS dan kusta merupakan capaian positif yang perlu dipertahankan melalui keberlanjutan program pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan. Adapun kasus malaria yang masih ditemukan mengharuskan pemerintah daerah tetap menjaga status eliminasi melalui penguatan surveilans dan respons cepat terhadap setiap kasus.

Dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu terus memperkuat implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Integrasi Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM), termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem surveilans berbasis digital, optimalisasi penemuan kasus secara aktif, investigasi kontak, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut penting untuk mempercepat pengendalian penyakit menular sekaligus mendukung pencapaian target eliminasi Tuberkulosis, HIV/AIDS, dan Malaria sebagaimana diarahkan dalam RPJMN, RPJMD, dan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Gambar 2.32.

Capaian Penanganan Tuberkulosis di Kota Tasikmalaya Tahun 2025 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2026, kinerja program penanggulangan tuberkulosis (TB) pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama dalam aspek penemuan kasus. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) mencapai 147 persen, sedangkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) mencapai 85 persen.

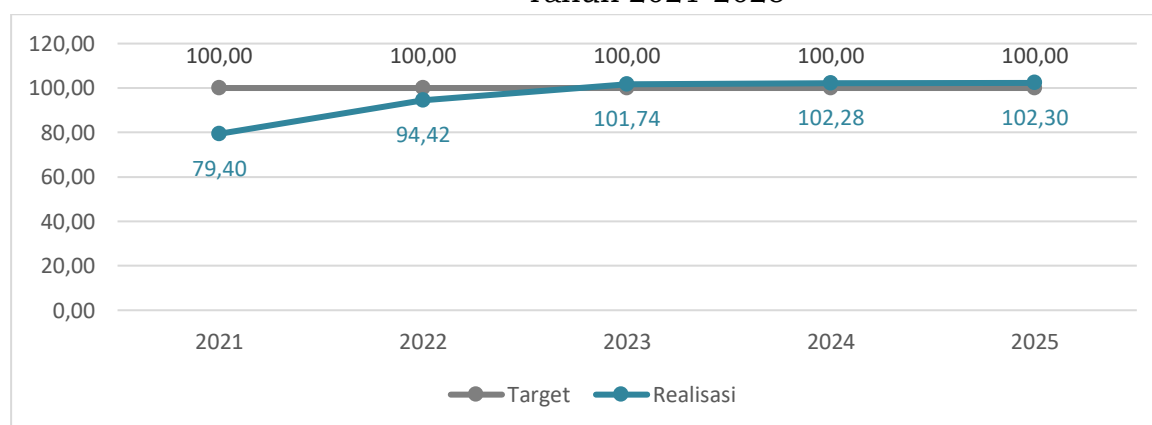
Capaian treatment coverage sebesar 147 persen menunjukkan bahwa jumlah kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan diobati melebihi target estimasi kasus yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan semakin efektifnya pelaksanaan strategi penemuan kasus secara aktif (active case finding), perluasan skrining pada kelompok berisiko, penguatan jejaring layanan kesehatan pemerintah dan swasta, serta meningkatnya kapasitas sistem surveilans tuberkulosis di Kota Tasikmalaya. Tingginya cakupan tersebut juga mengindikasikan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penemuan kasus sebagai salah satu strategi utama untuk memutus rantai penularan penyakit.

Sementara itu, treatment success rate sebesar 85 persen menunjukkan bahwa sebagian besar pasien tuberkulosis yang menjalani pengobatan berhasil menyelesaikan terapi sesuai standar. Capaian ini mencerminkan kualitas pelayanan pengobatan yang cukup baik melalui penerapan pengobatan berbasis standar nasional, pendampingan kepatuhan minum obat, pemantauan pasien secara berkala, serta keterlibatan tenaga kesehatan dan kader dalam mendukung keberhasilan terapi. Namun demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa terdapat sekitar 15 persen pasien yang belum mencapai keberhasilan pengobatan, baik karena putus berobat, meninggal dunia, mengalami kegagalan terapi, maupun belum menyelesaikan pengobatan sesuai ketentuan.

Meskipun indikator penemuan kasus telah menunjukkan capaian yang sangat baik, tantangan utama ke depan adalah mempertahankan tingginya cakupan penemuan kasus sekaligus meningkatkan keberhasilan pengobatan. Keberhasilan pengobatan menjadi faktor penting untuk mencegah kekambuhan, munculnya tuberkulosis resistan obat (TB-RO), serta mengurangi risiko penularan di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pemantauan pasien, investigasi kontak serumah, dukungan psikososial, edukasi kepatuhan berobat, dan pelibatan keluarga perlu terus ditingkatkan.

Gambar 2.33.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat dan telah melampaui target yang ditetapkan sejak tahun 2023. Cakupan kepesertaan meningkat dari 79,40 persen pada tahun 2021 menjadi 94,42 persen pada tahun 2022, kemudian mencapai 101,74 persen pada tahun 2023, meningkat menjadi 102,28 persen pada tahun 2024, dan 102,30 persen pada tahun 2025. Sementara itu, target kepesertaan ditetapkan sebesar 100 persen mulai tahun 2021 hingga 2025.

Peningkatan yang signifikan tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap perlindungan pembiayaan kesehatan melalui Program JKN. Capaian di atas 100 persen mengindikasikan bahwa jumlah peserta yang terdaftar melebihi jumlah penduduk sasaran yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh proses pembaruan data kependudukan, mobilitas penduduk, serta adanya peserta yang berasal dari berbagai segmen kepesertaan, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUPU), maupun Bukan Pekerja (BP).

Keberhasilan mencapai cakupan kepesertaan di atas target merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mendukung implementasi Universal Health Coverage (UHC). Capaian tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tanpa mengalami hambatan finansial. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan perluasan kepesertaan dan pemutakhiran data peserta.

Meskipun cakupan kepesertaan telah mencapai target UHC, tantangan yang dihadapi ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah peserta, tetapi juga pada keaktifan status kepesertaan (active coverage) dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. Kepesertaan yang tinggi perlu diimbangi dengan tingkat keaktifan peserta yang optimal agar masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan layanan kesehatan ketika dibutuhkan. Di samping itu, peningkatan akses pelayanan harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas rujukan, sehingga tujuan JKN untuk memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas dapat tercapai.

Dari perspektif pembangunan daerah, tingginya cakupan kepesertaan JKN memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Akses pembiayaan kesehatan yang lebih baik berpotensi meningkatkan pemanfaatan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang pada akhirnya mendukung peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular.

Ke depan, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) melalui penguatan validitas data kepesertaan, peningkatan kepesertaan aktif, optimalisasi pembiayaan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, penguatan integrasi data antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan perangkat daerah terkait menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan kepesertaan serta efektivitas pelaksanaan Program JKN.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan inti dari kinerja pemerintahan daerah, yang merefleksikan tanggung jawab dan cerminan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada subbab ini akan menguraikan secara rinci capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta kinerja pada urusan pemerintahan pilihan yang menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan spesifik daerah, termasuk tugas pembantuan dan penugasan umum lainnya.

A. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi di Kota Tasikmalaya merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional serta memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, penataan peraturan perundang-undangan, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, reformasi juga mencakup penguatan manajemen



sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kompetensi, penerapan sistem merit, serta pengembangan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi hasil. Dalam implementasinya, Pemerintah Kota Tasikmalaya berfokus pada delapan area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten dan terukur, diharapkan terwujud pemerintahan Kota Tasikmalaya yang adaptif, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Berikut adalah Indeks Reformasi Biroksi Pemerintah Kota Tasikmalaya dari Tahun 2023 sampai dengan 2025.

Tabel 2.42.
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2025

Uraian	Indeks Reformasi Birokrasi		
	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Birokrasi	78,14 (BB)	85,16 (BB)	88,62 (BB)

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2026

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2023-2025. Nilai indeks meningkat dari 78,14 pada tahun 2023 menjadi 85,16 pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 88,62 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas kinerja, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan internal telah memberikan dampak positif terhadap capaian indeks.

Meskipun masih berada pada kategori BB (Sangat Baik), peningkatan nilai yang terus terjadi menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang lebih profesional, efektif, efisien, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi perlu didukung melalui penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, percepatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas inovasi pelayanan publik, penguatan manajemen talenta aparatur, serta optimalisasi evaluasi reformasi birokrasi pada setiap perangkat daerah sehingga kualitas tata kelola pemerintahan dapat terus meningkat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

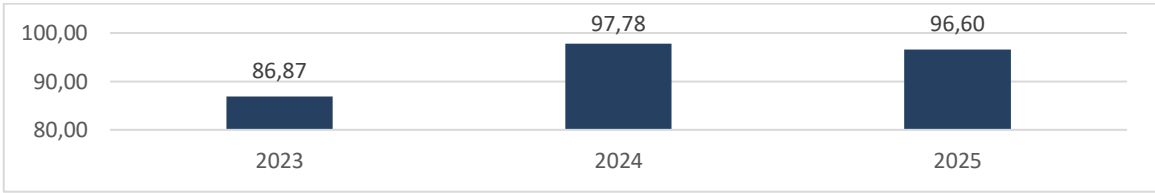
B. Reformasi Hukum

Reformasi hukum diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, terbuka, serta responsif terhadap partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Tasikmalaya



telah menempuh berbagai langkah pembenahan dalam penyusunan regulasi, baik melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun penataan basis data peraturan perundang-undangan. Indeks Reformasi Hukum digunakan sebagai alat ukur untuk menilai capaian reformasi hukum melalui identifikasi dan pemetaan regulasi, pelaksanaan reregulasi dan deregulasi, serta penguatan sistem regulasi yang ada. Adapun variabel yang menjadi komponen penilaian dalam Indeks Reformasi Birokrasi meliputi: (1) tingkat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses harmonisasi regulasi; (2) kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang profesional dan berkualitas; (3) kualitas pelaksanaan reregulasi atau deregulasi berdasarkan hasil reviu peraturan; dan (4) penataan serta pengelolaan database peraturan perundang-undangan. Berikut disajikan Indeks Reformasi Hukum Kota Tasikmalaya Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Gambar 2.34.
Indeks Reformasi Hukum Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2025



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2026

Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 dikarenakan kurang lengkapnya data dukung pada proses pelaksanaan harmonisasi Peraturan Daerah inisiatif DPRD. Selain itu, kajian analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berlaku hanya dilakukan satu kali.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam rangka penyempurnaan proses penyusunan regulasi, baik melalui penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, maupun penataan serta optimalisasi pengelolaan basis data peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan karakteristik dan kondisi di Kota Tasikmalaya, indikator yang digunakan dalam pengukuran meliputi penanganan perkara di wilayah Kota Tasikmalaya serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Data penanganan perkara dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Perkara yang Ditangani dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2025

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Perkara yang ditangani	5	8	8	7	4	5
2.	Jumlah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Misin	0	34	25	25	25	25

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2026

C. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah dan Masyarakat Digital

Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Kota Tasikmalaya menunjukkan kinerja yang sangat baik dan terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari



capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 sebesar 4,18 poin atau 104,50% dari target 4,00 poin, dengan predikat Sangat Baik. Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi Kementerian PANRB berdasarkan penilaian terhadap 4 domain dan 8 aspek SPBE, yang didukung oleh komitmen serta peran aktif seluruh perangkat daerah dalam implementasi SPBE. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang memperoleh nilai 3,96 poin, capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,22 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan digital di Kota Tasikmalaya.

Keberhasilan pencapaian Indeks SPBE Tahun 2025 didukung oleh pemenuhan dokumen eviden penilaian SPBE sebesar 100%, tata kelola dan layanan infrastruktur SPBE yang optimal, kematangan kebijakan SPBE yang mencapai Level 4,9, kematangan layanan SPBE Level 4,44. Layanan yang berkualitas terwujud karena Terbangunnya Aplikasi yang sesuai dengan Dokumen Rencana SPBE sebanyak 11 Aplikasi khusus sesuai Arsitektur SPBE serta kematangan tatakelola SPBE Level 4,40. melalui penyusunan 4 dokumen manajemen SPBE dan koordinasi perencanaan serta penganggaran SPBE pada 36 perangkat daerah. Indeks SPBE Kota Tasikmalaya tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44.
Indeks SPBE Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025

Uraian	Nilai SPBE				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks SPBE	2,68 (B)	2,80 (B)	3,25 (B)	3,96 (SB)	4,18 (SB)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2026.

Transformasi menuju Pemerintah Digital di Kota Tasikmalaya menunjukkan progres signifikan dari sisi tata kelola dan infrastruktur sebagaimana capaian Indeks SPBE 4,18. Hal ini menandakan kesiapan sistem, regulasi, dan manajemen pemerintahan dalam mendukung layanan berbasis elektronik. Namun, keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem, melainkan juga oleh penguatan Masyarakat Digital melalui peningkatan literasi, akses, dan partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi.

Dengan demikian, Pemerintah Digital (kesiapan sistem dan tata kelola) dan Masyarakat Digital (kesiapan pengguna dan partisipasi publik) harus berkembang secara seimbang agar transformasi digital benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

D. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan berbagai bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Layanan tersebut mencakup mekanisme pelayanan, ketersediaan fasilitas, mutu pelayanan, hingga kemudahan akses yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif mengenai pelayanan publik menjadi hal yang krusial dalam rangka mendorong peningkatan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, serta daya tanggap aparatur pemerintah terhadap kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.

Adapun penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan kualitas secara berkelanjutan,



sebagaimana tercermin dalam capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.45.
Indeks Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025

Uraian	Nilai IPP		
	2023	2024	2025
Indeks Pelayanan Publik	3,47	4,40	4,50

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2026 (diolah).

Berdasarkan data tersebut, nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Tasikmalaya menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat dalam periode 2023-2025. Pada tahun 2024 dan 2025, nilai IPP menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 4,40 dan 4,50. Capaian ini tidak hanya melampaui nilai tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga menunjukkan adanya penguatan komitmen dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kualitas layanan secara sistematis dan berkesinambungan. Diperlukan komitmen berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kinerja serta memperkuat inovasi pelayanan, sehingga capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara optimal.

E. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu mekanisme yang disusun secara sistematis untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. SAKIP berperan sebagai instrumen evaluasi kinerja yang mendorong peningkatan transparansi serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakat. Implementasinya tercermin dalam penyusunan dan penyampaian laporan kinerja sebagai wujud keterbukaan informasi atas capaian dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Berikut nilai SAKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2025.

Tabel 2.46.
Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2020 - 2025

Uraian	Nilai SAKIP					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SAKIP	70,84 (BB)	71,63 (BB)	70,73 (BB)	71,82 (BB)	71,11 (BB)	72,76 (BB)

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2026.

Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum, hasil evaluasi SAKIP menunjukkan tren peningkatan. Secara umum, meskipun terjadi fluktuasi kecil dari tahun ke tahun, nilai SAKIP tetap berada pada kategori BB, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berjalan dengan baik dan konsisten. Stabilitas kategori ini mencerminkan komitmen dalam perencanaan kinerja, pengukuran capaian, pelaporan, serta evaluasi yang terintegrasi. Peningkatan nilai pada tahun 2025 menjadi indikator positif adanya penguatan implementasi



manajemen kinerja berbasis hasil. Upaya peningkatan kualitas perencanaan, penyelarasan indikator kinerja, serta penguatan evaluasi internal perlu terus dilakukan guna mendorong peningkatan nilai menuju kategori yang lebih tinggi pada periode selanjutnya.

F. Keamanan, kententraman dan ketertiban umum

Pengukuran proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) hanya sampai Provinsi , sesuai dengan keadaan Kota Tasikmalaya tersebut yang digunakan adalah Jumlah tindakan kriminalitas di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47.
Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus Narkoba	0	5	87	72	87	83
2	Kasus Pembunuhan	1	3	1	2	2	1
3	Kasus seksual	26	35	32	1	68	7
4	Kasus Penganiayaan	43	39	4	38	109	44
5	Kasus Pencurian	77	69	70	4	90	80
6	Kasus Penipuan	96	105	67	88	207	70
7	Kasus Pemalsuan Uang	1	0	1	0	0	1
8	Pidana Lainnya	98	122	120	109	0	179
Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun		366	376	327	246	1.079	465

Sumber: Polresta Kota Tasikmalaya, 2026 (diolah).

Jumlah tindak kriminal di Kota Tasikmalaya menunjukkan fluktuasi selama periode 2019-2024. Jumlah kasus menurun dari 376 kasus pada tahun 2020 menjadi 246 kasus pada tahun 2022, kemudian meningkat tajam menjadi 1.079 kasus pada tahun 2023, sebelum kembali menurun menjadi 465 kasus pada tahun 2024. Pada tahun 2024, kasus yang paling banyak terjadi adalah pidana lainnya (179 kasus), diikuti kasus narkoba (83 kasus), pencurian (80 kasus), dan penipuan (70 kasus). Penurunan jumlah kasus pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 menunjukkan perbaikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, meskipun beberapa jenis kejahatan masih memerlukan perhatian dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

2.1.3.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri atas 17 (tujuh belas) bidang urusan pemerintahan, yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika,



koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, serta perpustakaan dan kearsipan.

1. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) urusan, yaitu:

1) **Urusan Pendidikan**

Adapun capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai berikut:

RAPOR PENDIDIKAN

Rapor Pendidikan merupakan instrumen evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Rapor ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan mutu satuan pendidikan berdasarkan data yang objektif dan terintegrasi. Rapor Pendidikan memanfaatkan berbagai sumber data, seperti Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta survei lingkungan belajar. Melalui sistem ini, sekolah dapat mengetahui capaian kompetensi peserta didik, kualitas proses pembelajaran, serta kondisi lingkungan satuan pendidikan secara lebih terukur dan berbasis data. Keberadaan Rapor Pendidikan bertujuan untuk membantu satuan pendidikan melakukan refleksi diri dan Perencanaan Berbasis data (PBD). Dengan memahami kekuatan dan tantangan yang dimiliki, sekolah dapat menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Selain itu, Rapor Pendidikan juga menjadi alat akuntabilitas publik yang mendorong transparansi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, Rapor Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Berikut capaian rapor Pendidikan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2023 sampai dengan 2025 daftar di bawah ini.

Tabel 2.48.

Rapor Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025

Tahun	Target	Realisasi
2023	70,04	68,19
2024	70,51	78,91
2025	78,92	80,03

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2026 (diolah).

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Patisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah anak usia 5-6, 7-12, 13-15 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia (5-6), usia (7-12) dan usia (13-15) serta anak usia 7–18 tahun yang mengikuti pendidikan melalui jalur pendidikan kesetaraan dibagi anak usia 7-18 yang tidak mengikuti sekolah formal. Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk empat indikator di Kota Tasikmalaya kelompok usia (5-6 tahun, 7–12 tahun, 13–15 tahun dan 7-18 Kesetaraan) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2023 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.49.

Angka partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah Kota Tasikmalaya			
	5-6	7-12	13-15	7-18 (Kesetaraan)
2023	73,77	98,72	97,02	11,92
2024	83,10	97,77	96,47	11,94
2025	92,22	99,22	99,22	15,16

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2026 (diolah).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif di semua kelompok usia selama periode 2023–2025. Kelompok usia dini (5-6 tahun) mencatat lonjakan paling signifikan, tumbuh pesat dari 73,77 persen pada tahun 2023 menjadi 92,22 persen pada tahun 2025. Sementara itu, kelompok usia wajib belajar dasar dan menengah (7-12 tahun dan 13-15 tahun) sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, namun berhasil pulih tajam dan mencapai angka optimal yang sama di tahun 2025, yaitu sebesar 99,22 persen. Di sisi lain, jalur pendidikan Kesetaraan (usia 7-18 tahun) juga menunjukkan tren perkembangan yang baik dengan kenaikan dari 11,92 persen di tahun 2023 menjadi 15,16 persen pada tahun 2025. Secara keseluruhan, pencapaian APS yang hampir menyentuh 100 persen untuk usia sekolah ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas pemerataan akses pendidikan secara makro di Kota Tasikmalaya.

SEKOLAH, GURU DAN MURID

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Pada tahun 2024, ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar untuk tingkat SD/MI mengalami pengurangan, hal ini disebabkan terjadinya penggabungan beberapa sekolah. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs mengalami penambahan sekolah baru untuk SMP Swasta. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50.

Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2025

No	Tahun	SD/MI					SMP/MTs				
		SD		Jumlah SD	MI	Jumlah SD dan MI	SMP		Jumlah SMP	MTs	Jumlah SMP dan MTs
		Negeri	Swasta				Negeri	Swasta			
1	2023	189	37	226	56	282	21	69	90	55	145
2	2024	189	38	227	55	282	21	67	88	55	143
3	2025	186	38	224	56	280	21	69	90	56	146

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2026.



Tabel 2.51.

Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2025

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
2023	3.454	75.360	2.422	1 : 21,82	1 : 31,11
2024	2.867	62.671	2.390	1 : 21,86	1 : 26,22
2025	3.219	63.047	2.401	1 : 19,59	1 : 26,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2026

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2025 di Kota Tasikmalaya mengalami perbaikan yang signifikan yang ditunjukkan dengan jumlah guru yang bertambah sehingga rasio murid dengan guru selama periode tersebut mengalami penurunan sampai pada posisi mendekati standar 1 : 19, yaitu dengan rasio sebesar 1 : 19,59. Dengan demikian rasio guru dan murid Sekolah Dasar di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2025 sebesar 1 : 26,26 sudah di atas standar sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 2.52.

Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SMP
di Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
2023	1.890	44.994	1.209	1 : 23,80	1: 37,22
2024	1.783	29.073	1.235	1 : 16,31	1 : 23,54
2025	1.868	29.150	1.077	1 : 15,60	1 : 27,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2026.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan lanjutan (SMP) menunjukkan lebih baik dari sisi rasio guru dan murid serta rasio murid dan rombel. Rasio guru dengan murid pada tahun 2025 berada pada posisi 1 : 15,60. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru SMP/MTs di Kota Tasikmalaya melayani 15 orang murid SMP/MTs. Dengan demikian rasio guru dan murid SMP di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2025 sebesar 1 : 27,22, hal ini masih di atas standar Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain pendidikan formal yang dilaksanakan juga dilaksanakan pendidikan non formal diantaranya pendidikan kesetaraan. Berikut data murid program kesetaraan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 - 2025.

Tabel 2.53.

Jumlah Murid Program Paket A, B dan C di Kota Tasikmalaya Tahun 2023- 2025

No	Kecamatan	2023			2024			2025		
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C
1	Cihideung	11	40	311	-	117	337	15	85	234
2	Cipedes	2	11	261	-	69	248	-	7	25
3	Tawang	7	28	126	21	74	130	17	48	63
4	Indihiang	-	21	87	-	41	91	-	35	59



No	Kecamatan	2023			2024			2025		
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C
5	Kawalu	5	24	313	17	96	215	30	74	105
6	Cibeureum	6	10	294	7	89	278	2	59	135
7	Tamansari	6	69	816	22	321	680	10	248	431
8	Mangkubumi	1	48	387	6	177	380	2	134	301
9	Bungursari	3	10	242	10	103	211	37	55	177
10	Purbaratu	20	86	387	78	202	337	3	181	249
Kota Tasikmalaya		61	347	3.224	161	1.289	2.907	116	926	1.779

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2026.

Pada tabel atas menunjukkan yang mengikuti Program Paket cenderung turun dari tahun ke tahun, terutama untuk paket C turunnya sampai lebih dari 40% dikarenakan anak usia sekolah sudah bekerja, dan sudah banyak usia sekolah yang mengikuti sekolah formal.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PENDIDIKAN

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dari RPD Tahun 2023-2026 dan RPJMD tahun 2025-2030. Indikator kinerja urusan pada RPJMD Tahun 2017-2022 yang masih relevan, tetap dipergunakan pada RPD tahun 2023-2026 dan yang sudah dianggap tidak relevan, tidak dipergunakan lagi atau diganti dengan indikator lain yang lebih relevan. Hal ini berlaku untuk indikator kinerja semua urusan pada tahun 2023.

Adapun capaian indikator kinerja urusan pendidikan tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

Indikator	Formulasi		2023		2024		2025	
		Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Nilai Jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) Yang di Hitung Oleh BPS	Tahun	9,76	9,54	9,89	9,63	9,67	9,64
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang Yang di Hitung Oleh BPS	Tahun	13,50	13,49	13,52	13,50	13,52	13,51



Indikator	Formulasi		2023		2024		2025	
		Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Rapor Pendidikan	Kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah	%	70,02	68,19	70,51	78,91	78,92	71,42
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (PAUD)	Jumlah Semua Siswa usia 5-6 thn dibagi Penduduk usia 5-6 thn X 100 (Nilai Yang di Hitung dari Rapor Pendidikan)	%	-	73,77	-	83,10	-	92,22
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	Jumlah Semua Siswa usia 7-12 thn dibagi Penduduk usia 7-12 thn X 100 (Nilai Yang di Hitung Oleh BPS)	%	-	98,72	-	97,77	-	99,22
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	Jumlah Semua Siswa usia 13-15 thn dibagi Penduduk usia 13-15 thn X 100 (Nilai Yang di Hitung Oleh BPS)	%	-	97,02	-	96,47	-	99,22
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	Jumlah Siswa Kesetaraan usia 7-18 thn dibagi Penduduk usia 7-18 thn yang tidak bersekolah Formal X 100 (Nilai Yang di Hitung dari Rapor Pendidikan)	%	-	11,92	-	11,94	-	15,16
Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Jumlah sekolah yang menggunakan kurikulum muatan local di bagi Seluruh sekolah	%	100	100	100	100	100	100
Persentase guru bersertifikat pendidik	Jumlah guru bersertifikat pendidik di bagi Seluruh guru	%	-	42,21	-	44,40	-	47,41



Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pengembangan bahasa dan Sastra	Jumlah Peserta Didik yang berprestasi di tingkat Provisi dibagi jumlah Peserta Didik yang mengikuti Perlombaan	%	25,03	25,05	25,05	25,03	25,08	19,74

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian pembangunan pendidikan di Kota Tasikmalaya periode 2023–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif namun masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan target. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terus meningkat setiap tahunnya, dari 9,54 tahun pada 2023 menjadi 9,64 tahun pada 2025, yang mengindikasikan tingkat pendidikan rata-rata penduduk usia dewasa bergerak maju mendekati lulusan SMA. Sejalan dengan itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami kenaikan konsisten dari 13,49 tahun menjadi 13,51 tahun, mencerminkan bahwa anak-anak di Kota Tasikmalaya secara umum memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan hingga bangku perkuliahan. Meskipun demikian, realisasi dari kedua indikator tersebut secara berturut-turut selalu berada sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Nilai Rapor Pendidikan yang mengukur kondisi mutu satuan pendidikan berbasis asesmen dan survei nasional menunjukkan pergerakan yang fluktuatif; setelah sempat melonjak melampaui target pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 78,91%, capaian ini mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025 menjadi 71,42% sehingga gagal memenuhi target optimis yang dipasang di angka 78,92%. Secara keseluruhan, potret ini menandakan bahwa tantangan utama Kota Tasikmalaya bukan lagi sekadar memperpanjang masa sekolah penduduknya, melainkan menjaga konsistensi dan stabilitas mutu serta kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tasikmalaya sepanjang periode 2023–2025 secara umum menunjukkan tren perkembangan yang sangat positif di berbagai kelompok usia, meskipun target kinerja tidak dicantumkan dalam dokumen. Akselerasi paling signifikan terlihat pada APS usia 5-6 tahun (PAUD) yang melonjak tajam dari 73,77% pada tahun 2023 menjadi 92,22% pada tahun 2025, menandakan kesadaran pendidikan usia dini yang semakin kuat di masyarakat. Untuk usia pendidikan dasar dan menengah, APS usia 7-12 tahun dan APS usia 13-15 tahun sempat mengalami penurunan tipis pada tahun 2024, namun keduanya berhasil bangkit secara serentak pada tahun 2025 ke angka yang sama, yaitu 99,22%, menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama di Kota Tasikmalaya sudah terfasilitasi di bangku sekolah. Selain itu, APS usia 7-18 tahun (Jalur Kesetaraan) juga merangkak naik secara konsisten dari 11,92% menjadi 15,16% pada tahun 2025, yang mencerminkan optimalnya upaya pemerintah daerah dalam menjaring anak putus sekolah melalui program pendidikan non-formal atau kesetaraan (Paket A, B, dan C).

Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal mencatatkan hasil yang sempurna dan stabil, di mana realisasinya secara konsisten mencapai target 100% dari tahun 2023 hingga 2025. Peningkatan kualitas tenaga pendidik juga terlihat positif pada Persentase guru bersertifikat pendidik, yang tumbuh merangkak naik setiap tahunnya dari 42,21% pada tahun 2023, menjadi 44,40% di tahun 2024, hingga mencapai 47,41% pada tahun 2025. Sebaliknya, tantangan berat justru terlihat pada Persentase Pengembangan bahasa



dan Sastra; setelah sempat berhasil memenuhi target tipis pada tahun 2023 dan 2024 di kisaran angka 25,03%, realisasi prestasi peserta didik di tingkat provinsi ini mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2025 menjadi hanya 19,74%, sehingga gagal memenuhi target optimis yang ditetapkan sebesar 25,08%.

2) **Urusan Kesehatan**

Target dan realisasi capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.55.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan (pada Dinas Kesehatan)

Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100000dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 KH	Poin	303,8	192,22	286,5	139,96	110,28	84,71
Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	Poin	8,4	7,87	8,32	8,04	6,87	6,87
Prevalensi Stunting (%)	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	%	14,8	10,73*	16,1	19,60	18,31	-
Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan Kesehatan	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	%	-	-	100	100	100	102,3
Indeks Pencapaian SPM Kesehatan Masyarakat	Rata-rata nilai capaian SPM Kesehatan masyarakat	%	75	98,8	100	98,30	100	100
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Jumlah kasus TB yang diobati (ditemukan dan memulai pengobatan) dibagi Estimasi jumlah seluruh kasus TB di populasi kali seratus	%	-	-	100	141	100	147
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Jumlah pasien TB yang sembuh ditambah jumlah pasien TB yang menyelesaikan pengobatan terhadap seluruh pasien TB	%	-	-	-	85	90	85



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	baru yang tercatat memulai pengobatan pada periode tertentu kali seratus							
Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi / registrasi terhadap Jumlah seluruh tenaga kesehatan kali seratus	%	-	-	-	65	70	N/A
Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Persentase sarana kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman yang diperiksa	%	-	-	-	76	77	82,12
Persentase Peningkatan upaya promkes, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, persentase penumbuhan kesadaran dalam peningkatan derajat keluarga dan lingkungan dalam penerapan PHBS	Jumlah kegiatan/promosi/ad vokasi/kemitra an yang terlaksana ditambah Jumlah rumah tangga/individu/lingk ungan yang menerapkan PHBS terhadap Jumlah kegiatan yang direncanakan ditambah jumlah rumah tangga/individu/lingk ungan yang menjadi sasaran kali seratus	%	-	-	-	50	51	N/A
Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Kasus	-	-	-	91	91	73
Jumlah Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Kasus	-	-	-	15	15	9
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Jumlah bayi usia < 1 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap terhadap Jumlah sasaran bayi (< 1 tahun) kali seratus	%	-	-	-	98,1	100	91,1
Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat	Jumlah TPP yang memenuhi syarat higiene-sanitasi (hasil pemeriksaan) terhadap Jumlah TPP yang diperiksa pada periode laporan kali seratus	%	-	-	-	44,2	50	70,5



Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pangan Olahan Siap Saji (POSS) memenuhi syarat	Jumlah sampel POSS yang memenuhi syarat uji mutu dan keamanan terhadap Jumlah sampel diperiksa kali seratus	%	-	-	-	0	50	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan capaian indikator kinerja urusan kesehatan pada periode 2023–2025, secara umum kinerja pembangunan kesehatan di Kota Tasikmalaya menunjukkan tren yang semakin baik. Hal ini tercermin dari Angka Kematian Ibu (AKI) yang terus mengalami penurunan, dari 192,22 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 menjadi 139,96 pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 84,71 pada tahun 2025, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Demikian pula Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan perbaikan dengan realisasi 7,87 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023, 8,04 pada tahun 2024, dan berhasil mencapai 6,87 pada tahun 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, didukung oleh penguatan pelayanan antenatal, persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan neonatal, serta sistem rujukan maternal dan neonatal yang semakin efektif.

Pada indikator prevalensi stunting, capaian tahun 2023 sebesar 10,73 persen berada di bawah target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 19,60 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), sehingga belum memenuhi target daerah sebesar 16,1 persen. Data prevalensi stunting tahun 2025 masih menunggu hasil survei nasional sehingga belum dapat dievaluasi. Sementara itu, persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu mencapai 100 persen pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 102,3 persen pada tahun 2025, melampaui target *Universal Health Coverage* (UHC). Ke depan, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu mempertahankan keberhasilan dalam menurunkan AKI dan AKB, memperkuat konvergensi percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif lintas sektor, serta menjaga keberlanjutan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Capaian indikator kinerja urusan kesehatan menunjukkan perkembangan yang positif, terutama pada aspek pelayanan kesehatan dasar, pengendalian tuberkulosis, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari 88,5 pada tahun 2023 menjadi 98,20 pada tahun 2024, dan mencapai 100 pada tahun 2025, sesuai target yang ditetapkan. Pada program pengendalian tuberkulosis, cakupan penemuan dan pengobatan kasus (*treatment coverage*) meningkat dari 141 persen pada tahun 2024 menjadi 147 persen pada tahun 2025, melampaui target sebesar 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan semakin optimalnya upaya penemuan kasus secara aktif, penguatan jejaring layanan kesehatan, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan diagnosis dan pengobatan tuberkulosis. Sementara itu, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) tetap berada pada angka 85 persen, meskipun masih di bawah target tahun 2025 sebesar 90 persen, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kepatuhan pengobatan, investigasi kontak, dan pendampingan pasien agar keberhasilan terapi dapat terus ditingkatkan.

Di sisi lain, beberapa indikator masih memerlukan perhatian dalam rangka peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Persentase sarana makanan dan minuman yang memenuhi standar mengalami penurunan dari 76 persen pada tahun



2024 menjadi 52,12 persen pada tahun 2025, sehingga belum mencapai target sebesar 77 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keamanan pangan di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Selain itu, jumlah kematian bayi berhasil menurun dari 91 kasus pada tahun 2024 menjadi 75 kasus pada tahun 2025, mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Beberapa indikator lain, seperti persentase tenaga kesehatan yang terstandar dan persentase peningkatan upaya promosi, advokasi, kemitraan, serta pemberdayaan masyarakat, belum tersedia realisasi tahun 2025 sehingga memerlukan penyempurnaan pelaporan dan monitoring.

Secara umum terdapat peningkatan pada sebagian indikator yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi, serta pencegahan penyakit. Jumlah kematian ibu berhasil diturunkan dari 15 kasus pada tahun 2024 menjadi 8 kasus pada tahun 2025, jauh lebih rendah dibandingkan target sebanyak 15 kasus. Hal ini menunjukkan semakin efektifnya pelayanan kesehatan maternal melalui peningkatan kualitas pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan obstetri neonatal emergensi, serta penguatan sistem rujukan. Di sisi lain, cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 91,1 persen pada tahun 2025. Meskipun capaian tersebut relatif tinggi, namun masih berada di bawah target sebesar 100 persen, sehingga diperlukan upaya peningkatan cakupan imunisasi melalui penguatan penjangkauan sasaran, peningkatan peran Posyandu, edukasi kepada masyarakat, serta optimalisasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan kegiatan imunisasi rutin.

Pada aspek perbaikan gizi masyarakat, kinerja menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat meningkat dari 44,2 persen pada tahun 2024 menjadi 70,5 persen pada tahun 2025, melampaui target sebesar 50 persen. Selain itu, persentase Posyandu yang menerapkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengalami peningkatan signifikan dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 100 persen pada tahun 2025, jauh melampaui target sebesar 50 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan penguatan transformasi layanan primer melalui revitalisasi Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Ke depan, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu mempertahankan capaian tersebut sekaligus memprioritaskan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap agar mencapai target nasional, sehingga upaya pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2.56.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2025

No	Puskesmas	No	Rumah Sakit / Faskes Lainnya
1	Kersanagara	1	RSUD dr. Soekardjo
2	Kawalu	2	RSUD Dewi Sartika
3	Karanganyar	3	RS ISLAM Hj. Siti Munaroh
4	Tamansari	4	RS Jasa Kartini
5	Cibeureum	5	RSB dr. Hj. Karmini EH
6	Purbaratu	6	RS Tasik Medika Citratama (TMC)
7	Kahuripan	7	RSB UMMI
8	Tawang	8	RSIA Sayang Bunda
9	Cihideung	9	RSIA Widaningsih
10	Cilembang	10	RS Syifa Medina



No	Puskesmas	No	Rumah Sakit / Faskes Lainnya
11	Mangkubumi	11	RSIA Bunda Aisyah
12	Sambongpari	12	RS Prasetya Bunda
13	Indihiang	13	RS Permata Bunda Tasikmalaya
14	Parakanyasag	14	RS Hermina
15	Bungursari	15	RS Jantung
16	Sukalaksana	16	Klinik Pratama (118 Unit)
17	Bantar	17	Klinink Utama (32 Unit)
18	Cipedes	18	Fasilitas Kesehatan lainnya (6 unit)
19	Panglayungan		
20	Cigeureung		
21	Urug		
22	Sangkali		

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2025, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya telah menunjukkan kondisi yang cukup memadai dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kota Tasikmalaya memiliki 22 Puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan dan wilayah pelayanan, terdiri atas Puskesmas Karangnunggal, Kawalu, Karanganyar, Tamansari, Cibereum, Purbaratu, Kahuripan, Tawang, Cihideung, Cilembang, Mangkubumi, Sambongpari, Indihiang, Parakannyasag, Bungursari, Sukalaksana, Bantarsari, Cipedes, Panglayungan, Cigeureung, Urug, dan Sangkali. Sebaran Puskesmas tersebut menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan primer melalui penyelenggaraan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain pelayanan kesehatan primer, Kota Tasikmalaya juga didukung oleh 18 rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, yang terdiri atas 2 rumah sakit milik pemerintah, yaitu RSUD dr. Soekardjo dan RSUD Dewi Sartika, serta 16 fasilitas kesehatan lainnya yang meliputi rumah sakit swasta, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit khusus, klinik pratama, dan fasilitas kesehatan lainnya. Keberadaan fasilitas tersebut memperkuat sistem rujukan pelayanan kesehatan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialisik dan rujukan lanjutan, serta mendukung pencapaian indikator pembangunan kesehatan daerah. Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya pada aspek ketersediaan fasilitas, tetapi juga pemerataan kualitas pelayanan, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar, transformasi digital kesehatan, serta penguatan jejaring rujukan antar fasilitas kesehatan. Dengan demikian, pembangunan sektor kesehatan perlu diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien, kemudahan akses, dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya.

Selain fasilitas kesehatan, jumlah SDM kesehatan/tenaga medis di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57.
Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah			Rasio terhadap Jumlah Penduduk	Standar SK Menko Kesra no 54/2013
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Dokter Spesialis	228	94	322	0,42	0,12
2	Dokter Umum	180	283	463	0,60	0,5
3	Dokter Gigi	26	104	130	0,16	0,14
4	Dokter Gigi Spesialis	9	11	20	-	-
5	Perawat	753	1.219	1.972	2,56	2
6	Bidan	0	873	873	1,13	1,3
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	40	87	127	0,16	0,18
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	17	26	43	0,06	0,2
9	Tenaga Gizi	7	78	85	0,11	0,18
10	Tenaga Kefarmasian	119	417	536		
	a. Tenaga Teknis Kefarmasian	51	191	242	0,31	0,3
	b. Apoteker	68	226	294	0,38	0,15

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2025, ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan secara umum telah mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan, meskipun masih terdapat beberapa jenis tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar rasio nasional. Tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar adalah perawat sebanyak 1.972 orang (753 laki-laki dan 1.219 perempuan), diikuti bidan sebanyak 873 orang, dokter umum sebanyak 463 orang, apoteker sebanyak 294 orang, tenaga teknis kefarmasian sebanyak 242 orang, dan dokter spesialis sebanyak 322 orang. Dominasi tenaga kesehatan perempuan masih terlihat pada sebagian besar profesi, terutama bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, dan apoteker, yang mencerminkan karakteristik sumber daya manusia di sektor kesehatan.

Ditinjau dari rasio terhadap jumlah penduduk, beberapa jenis tenaga kesehatan telah memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013. Rasio dokter spesialis mencapai 0,42 per 1.000 penduduk, jauh di atas standar 0,12; dokter umum sebesar 0,60, melampaui standar 0,50; perawat sebesar 2,56, melebihi standar 2,00; tenaga kesehatan masyarakat sebesar 0,16, sesuai dengan standar; tenaga teknis kefarmasian sebesar 0,31, sedikit di atas standar 0,30; serta apoteker sebesar 0,38, jauh di atas standar 0,15. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya telah didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang relatif memadai, khususnya pada pelayanan medis, keperawatan, dan kefarmasian.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa jenis tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar kebutuhan. Rasio bidan tercatat sebesar 1,13 per 1.000 penduduk,



masih berada di bawah standar 1,80, sedangkan tenaga gizi memiliki rasio 0,11, lebih rendah dibandingkan standar 0,18. Selain itu, tenaga kesehatan lingkungan juga baru mencapai rasio 0,06, di bawah standar 0,20. Keterbatasan jumlah tenaga pada profesi tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam mendukung upaya promotif dan preventif, percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan lingkungan, pengawasan sanitasi, serta pelaksanaan program kesehatan berbasis masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tenaga bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan melalui perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang lebih terarah, pemerataan distribusi tenaga kesehatan antar fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Di samping itu, penguatan manajemen sumber daya manusia kesehatan perlu diselaraskan dengan implementasi Transformasi Sistem Kesehatan dan Integrasi Layanan Primer (ILP), sehingga ketersediaan tenaga kesehatan tidak hanya memadai dari sisi jumlah, tetapi juga memiliki kompetensi dan distribusi yang mampu menjamin pemerataan akses serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya.

3) **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dan kehidupan sosial masyarakat perlu didukung oleh konektivitas dan kondisi jaringan jalan yang memadai. Pelaksanaan penyelenggaraan jalan di Kota Tasikmalaya, berdasarkan pada Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 600/Kep.880-DPUPR/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, ditetapkan bahwa panjang jalan kota di Kota Tasikmalaya adalah sepanjang 461,209 km. Kinerja infrastruktur jalan dan jembatan diukur berdasarkan kondisi jalan dan jembatan. Adapun indikator yang digunakan untuk sektor jalan dan jembatan pada tahun 2023 antara lain indikator Persentase kondisi jalan dalam keadaan baik, persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi dan persentase drainase jalan dalam kondisi baik. Namun untuk tahun 2024-2025, indikator sektor jalan dan jembatan menjadi tingkat kemantapan jalan dan persentase peningkatan jaringan jalan. Secara rinci kinerja infrastruktur jalan dan jembatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58.
Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2023 – 2025

Indikator	Satuan	Tahun					
		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase jalan dalam kondisi baik	%	53,49	67,69	-	-	-	-
Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi	%	68,66	89,23	-	-	-	-
Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik	%	18,1	17,43	-	-	-	-
Tingkat Kemantapan Jalan	%	-	-	89.62	91.52	91,86	80,75



Indikator	Satuan	Tahun					
		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Peningkatan Jaringan Jalan	%	-	-	2,25	2,99	3,81	4,30

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2026.

Dari tiga indikator pada tahun 2023 yang terkait kinerja infrastruktur jalan dan jembatan hanya satu indikator yang tidak tercapai yaitu persentase drainase jalan dalam kondisi baik yaitu target 18,1% tercapai hanya 17,43%. Sedangkan untuk tahun 2024 seluruh indikator mencapai target, namun untuk tahun 2025 indikator tingkat kemantapan jalan tidak terpenuhi yaitu 80,75 dari target yang ditentukan sebesar 91,86. hal ini disebabkan karena beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup berat yang belum tertangani.

Terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53 Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km). Kinerja infrastruktur irigasi selama kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59.

Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2023-2025

Indikator	Satuan	Tahun					
		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang terdampak oleh irigasi	%	-	-	23.72	26.80	27,85	27,91
Persentase panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal	%	-	-	23,76	25,44	27,94	27,72
Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	%	-	-	38,19	41,41	38,71	41,06

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2026.

Indikator Kinerja Infrastruktur Irigasi dan pengairan lainnya dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya 2023 tidak dikategorikan ke dalam kinerja infrastruktur melainkan dalam indikator pertanian, sehingga khusus untuk indikator irigasi dapat dilihat dalam urusan pertanian. Pada tahun 2024-2025, indikator kinerja infrastruktur irigasi menjadi persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang terdampak oleh irigasi, persentase panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal dan persentase panjang jaringan irigasi Kondisi baik. Dari tiga indikator tersebut, hanya indikator persentase panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal yang tidak tercapai target pada tahun 2025, sedangkan dua indikator lainnya mencapai target.

Indikator Kinerja Tata Ruang mengalami perubahan pada tahun 2024-2025 menjadi persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana tata ruang dan persentase kepatuan pemanfaatan ruang terhadap KKPR yang telah diterbitkan sedangkan pada tahun 2023 indikator yang digunakan adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.60.
Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2023-2025

Indikator	Satuan	Tahun					
		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	98	98,2	-	-	-	-
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	-	-	98.50	98.83	99,00	92,70
Persentase kepatuhan Pemanfaatan Ruang terhadap KKPR yang telah diterbitkan	%	-	-	98	98	99,00	92,70

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2026.

Indikator kinerja tata bangunan yang tidak mengalami perubahan adalah persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis, sedangkan yang lainnya ada perubahan yang disebabkan penyesuain dengan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2024 – 2025, sedangkan indikator tahun 2023 menggunakan indikator yang termuat dalam dokumen RPD. Target dan realisasi tiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61.
Capaian Indikator Kinerja Tata Bangunan Tahun 2023 - 2025

Indikator	Satuan	Tahun					
		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	42,37	54,66	-	-	-	-
Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	%	32,46	32,46	-	-	-	-
Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya	%	16,67	16,67	-	-	-	-
Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	%	32,86	35,32	18.01	18.01	18,19	19,82
Persentase pemilik ijin yang menerapkan ketentuan bangunan	%	-	-	99,373	99,322	99,38	99,02
Persentase jasa konstruksi yang bersertifikat jasa konstruksi	%	-	-	33,66	32,43	35,3	37,71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2026.

Kondisi bangunan gedung kantor pemerintahan di Kota Tasikmalaya kondisinya sangat bervariasi, namun secara umum mengalami rusak ringan, namun ada beberapa yang kondisinya rusak berat dan perlu penanganan. Berikut gambaran mengenai Kondisi bangunan Pemerintahan.

Tabel 2.62.
Kondisi Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Tahun 2025



Kondisi Bangunan	OPD	Kecamatan	Kelurahan
Baik / Konstruksi dalam Pengerjaan	2	0	1
Baik / Memadai	4	0	1
Baik / Kurang Memadai / Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Baik / Memadai /Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
R. Ringan / Memadai	24	10	55
R. Ringan / Kurang Memadai	4	0	0
R. Sedang / Memadai	1	0	9
R. Sedang / Kurang Memadai	3	0	0
Belum memiliki Gedung Definitif	0	0	0
R. Berat /Kurang Memadai	0	0	1
R. Ringan / Memadai / Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	2
Jumlah	36	10	69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2026

Infrastruktur permukiman yang menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur jalan, drainase lingkungan, penyediaan sarana prasarana air minum dan penyediaan sarana prasarana air limbah.

Indikator yang digunakan dalam infrastruktur permukiman antara lain Persentase Infrastruktur Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditingkatkan Kualitasnya, Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Air Minum Dan Air Limbah Domestik), Persentase infrastruktur drainase lingkungan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh dalam kondisi baik, Persentase infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik, Persentase infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik, Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya, Persentase kebutuhan infrastuktur Air limbah domestik yang terpenuhi dan IKM pelayanan pengelolaan Air limbah domestik, indikator ini mengalami perbedaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk melihat perbedaan indikator tersebut dapat dilihat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63.

Indikator Infrastruktur Permukiman Tahun 2023 – 2025

Indikator	Satuan	Tahun					
		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Permukiman yang Layak Huni	%	25	27,13	-	-	-	-
Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	91,07	98,22	-	-	-	-
Capaian KK berakses SPAL	%	61,62	62,8	-	-	-	-
Capaian KK berakses Air Minum	%	56,67	57,57	-	-	-	-
Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik	%	25	27,13	-	-	-	-



Indikator	Satuan	Tahun					
		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Infrastruktur Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	-	-	65,15	67,02	71,97	75,86
Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Air Minum Dan Air Limbah Domestik)	%	-	-	100	100	100	100
Persentase infrastruktur drainase lingkungan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh dalam kondisi baik	%	-	-	65,01	66,85	66,41	64,30
Persentase infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	%	-	-	51,97	67,19	60,88	68,86
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	%	-	-	57,26	58,31	58,01	72,50
Persentase kebutuhan infrastuktur Air limbah domestik yang terpenuhi	%	-	-	62,05	63,14	62,48	*
IKM pelayanan pengelolaan Air limbah domestik	Kategori	-	-	83	83,54	84,00	84,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2026.

Seluruh indikator infrastruktur permukiman yang ditargetkan pada tahun 2025 melebihi target yang telah ditentukan, namun ada satu indikator yang tidak mencapai target yaitu Persentase infrastruktur drainase lingkungan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh dalam kondisi baik yang ditargetkan sebesar 66,41 % hanya tercapai sebesar 64,30. Sedangkan indikator Persentase kebutuhan infrastuktur Air limbah domestik yang terpenuhi belum dapat dihitung karena masih perlu rekonsiliasi dengan Dinas Kesehatan.

Adapun capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan tata ruang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.64.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
1.	Tingkat Kemantapan Jalan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang / Panjang Jalan Total Kewenangan Kota Dikali 100	%	91,86	80,75
2.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang terdampak oleh irigasi	Luas sawah yang terdampak / luas sawah total kewenangan kota tasikmalaya (1749 Ha)	%	27,85	27,91
3.	Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Standar Teknis	Jumlah Bangunan Gedung Yang Memenuhi Standar Teknis / Jumlah Bangunan Gedung Dikali 100	%	18,19	19,82
4.	Persentase Infrastruktur Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik + Persentase Infrastruktur Drainase Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik /2	%	71,97	75,86
5.	Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Air Minum Dan Air Limbah Domestik)	Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang	%	100.00	100.00
6.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana pola ruang / luas lahan yang diberikan KKPR*100 % Luas Wilayah Kota Kali 100	%	99,00	92,70
7.	Persentase peningkatan jaringan jalan	Panjang jalan yang dibangun dan dipelihara / total panjang jalan kota *100%	%	3,81	4,30
8.	Persentase Peningkatan Jaringan Drainase Jalan Kota	Panjang jaringan drainase jalan kota yang dibangun + direhabilitasi + dipelihara/ total jalan kota *100	%	0,36	0,76
9.	Persentase pemilik ijin yang menerapkan ketentuan bangunan	Jumlah pemilik ijin yang menerapkan ketentuan ijin bangunan/jumlah bangunan berijin *100%	%	99,38	99,02
10.	Persentase jasa konstruksi yang bersertifikat jasa konstruksi	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat / jumlah tenaga kerja jasa konstruksi keseluruhan*100%	%	35,3	37,71



No	Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
11.	Persentase infrastruktur drainase lingkungan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh dalam kondisi baik	Panjang drainase lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik dan sedang / total panjang drainase lingkungan permukiman *100%	%	66,41	64,30
12.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	Panjang jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik dan sedang / total panjang jalan lingkungan permukiman *100%	%	60,88	68,86
13.	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota/Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Tasikmalaya * 100%	%	58,01	72,50
14.	Persentase kebutuhan infrastuktur Air limbah domestik yang terpenuhi	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah Proyeksi rumah tangga di Kota Tasikmalaya*100%	%	62,48	
15.	IKM pelayanan pengelolaan Air limbah domestik	Nilai IKM	Kategori	84	84,09
16.	Persentase kepatuhan Pemanfaatan Ruang terhadap KKPR yang telah diterbitkan	Luas area pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen KKPR terhadap seluruh luas lahan yang diberikan KKPR *100%	%	99	92,70
17.	Persentase panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal	Panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal / Panjang jaringan sungai*100%	%	27,94	27,72
18.	Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	Panjang jaringan irigasi kondisi baik / panjang total jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya	%	38,71	41,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2026.

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.65.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Perumahan yang Layak huni	Persentase PSU yang diserahkan + yang dikelola dibagi 2	%	25	47,22	50	75	79,53	86,25
Indeks Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan rekolasi program yang ditangani terhadap target	%	100	99,29	100	100	100	100
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha)	%	2,42	12,69	-	-	-	-
Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha)	%	-	-	15,11	15,57	18,73	19,3
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah penanganan RTLH (didalam kawasan kumuh+diluar kawasan kumuh) dibagi total RTLH se Kota (9081 unit)	%	9,24	12,02	12,23	15,34	15,59	18,39
Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang ditangani terhadap target	%	100	100	-	-	-	-
Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah rumah korban relokasi program yang difasilitasi terhadap target	%	100	20	-	-	-	-
Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program	Persentase penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang ditangani	%	-	-	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kab/Kota yang Tertangani	terhadap target + persentase fasilitasi rumah korban relokasi program terhadap target dibagi 2							
Persentase Perumahan yang Sesuai dengan Standar Bangunan dan Perumahan	Jumlah pemenuhan penerbitan izin perumahan yang sesuai dengan standar bangunan dan perumahan	%	-	-	100	100	100	100
Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	Persentase PSU yang diserahkan +yang dikelola dibagi 2	%	25	50	-	-	-	
Persentase PSU Perumahan yang dimanfaatkan	Persentase PSU yang diserahkan +yang dikelola dibagi 2	%	-	-	50	75	79,53	86,25
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas penanganan kawasan kumuh/total target kawasan kumuh yang ditangani	%	20	23,6	-	-	-	
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Tertata	Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha)	%	-	-	15,11	15,57	18,73	19,3
Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (1.752 Unit)	%	8,56	16,27	-	-	-	-
Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (7329 Unit)	%	1,36	7,76	-	-	-	-



Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	Jumlah unit RTLH yang ditangani di luar kawasan kumuh/total RTLH di luar kawasan kumuh (7329 Unit)	%	-	-	7,76	12,66	9,2	9,47

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2026

Secara garis besar, hampir seluruh indikator menunjukkan tren positif dimana realisasi selalu melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Persentase Perumahan Layak Huni mengalami lonjakan signifikan dari realisasi 47,22% di 2023 menjadi 86,25% di 2025. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni menunjukkan konsistensi pertumbuhan dari 12,02% (2023) ke 18,39% (2025). Hal ini mengindikasikan upaya penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang berkelanjutan. Indeks capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan menunjukkan performa yang sangat stabil, selama tahun 2024 dan 2025, realisasi mencapai angka sempurna 100%. Penerbitan izin perumahan yang sesuai dengan standar bangunan dan perumahan juga mencapai 100% sejak tahun 2024. Pemanfaatan PSU menunjukkan peningkatan dalam serah terima dan pengelolaannya, realisasi yang selalu di atas target menunjukkan keberhasilan dalam mengelola aset PSU yang diserahkan oleh pengembang atau melalui pengelolaan mandiri. Strategi penanganan kawasan kumuh terlihat sangat progresif, efektivitas penanganan pada tahun 2023, dari target 2,42%, realisasinya mencapai 12,69% dan terus naik terus naik hingga 19,3% pada 2025.

Kawasan kumuh ditetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 648/Kep.733.1-Disperwaskim/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Tasikmalaya seluas 168,49 Hektar. Penanganan kawasan kumuh tersebut dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu:

- Luas kawasan diatas 15 Hektar yang merupakan kewenangan Pusat seluas 48,71 Hektar;
- Luas kawasan 10 sampai dengan 15 Hektar yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi seluas 37,10 Hektar;
- Luas kawasan dibawah 10 Hektar yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota seluas 82,68 Hektar.

Adapun rincian pengurangan kawasan kumuh kewenangan kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.66.

Pengurangan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota di Kota Tasikmalaya

No.	Kelurahan	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh menurut SK (Ha)	Realisasi Pengurangan Kawasan Kumuh				Sisa Luasan Kumuh s/d Akhir Tahun 2025 (Ha)
				2023	2024	2025	Total	
1	ARGASARI	CIHIDEUNG	3,78	3,78	-	-	3,78	0
4	INDIHIANG	INDIHIANG	1,59	-	-	-	0	1,59
5	PARAKANNYASAG	INDIHIANG	1,31	-	0,45	-	0,45	0,86
6	SUKAMAJUKALER	INDIHIANG	2,14	2,14	-	-	2,14	0
7	TUGURAJA	CIHIDEUNG	3,9	-	-	-	0	3,9
8	CIKALANG	TAWANG	2,8	-	-	-	0	2,8
9	PURBARATU	PURBARATU	9,3	-	-	-	0	9,3
11	SUKAMENAK	PURBARATU	9,23	0,8	-	-	0,8	8,43
12	MUGARSARI	TAMANSARI	4,73	-	-	1,25	1,25	3,48
13	SETIAWARGI	TAMANSARI	2,25	-	-	-	0	2,25
16	KOTABARU	CIBEUREUM	6,05	0,76	-	-	0,76	5,29
17	SETIAJAYA	CIBEUREUM	9,77	-	1,21	-	1,21	8,56
18	MARGABAKTI	CIBEUREUM	4,36	-	-	-	0	4,36
19	BUNGURSARI	BUNGURSARI	3,22	0,64	0,72	-	1,36	1,86
20	SUKAJAYA	BUNGURSARI	1,22	0,96	-	-	0,96	0,26
21	CIBEUTI	KAWALU	5	0,63	-	-	0,63	4,37
23	LEUWILIANG	KAWALU	2,8	0,33	-	-	0,33	2,47
24	TANJUNG	KAWALU	3,47	-	-	-	0	3,47
25	CIGANTANG	MANGKUBUMI	0,45	0,45	-	-	0,45	0
26	KARIKIL	MANGKUBUMI	5,31	-	-	1,84	1,84	3,47
JUMLAH			82,68	10,49	2,38	3,09	15,96	66,72

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2026.

Jumlah perumahan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 sebanyak 319 perumahan, Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan yang sudah diserahterimakan sebanyak 97 perumahan, dan yang masih dalam proses serah terima PSU sebanyak 222 perumahan.

5) **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Berikut diuraikan pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

A. **Satuan Polisi Pamong Praja**

Pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar Rp.16.662.010,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.110.439.846,00 atau 96,69% dengan rincian terlampir pada buku lampiran LKPJ 2025. Adapun capaian kinerja urusan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:



Tabel 2.67.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
(pada Satpol PP)

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh Satpol PP pada Tahun n-1 dikurangi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh Satpol PP pada Tahun n) dibagi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh Satpol PP pada Tahun n-1 dikali 100 %	%	3,5	3,6
Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat Sanksi	(Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikurangi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n) dibagi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikali100%	%	5,5	5,6
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dari Evaluator Tingkat kota	Nilai	80 (Sangat Baik)	*belum dilakukan penilaian

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2026.

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Adapun capaian kinerja urusan keamanan dan ketertiban umum pada BPBD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.68.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
(pada BPBD)

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi Berdasarkan Assessment dan Review dari BNPB	%	0,54	0,62
Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan yang Sesuai Respon Time	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang Sesuai Respon Time / Jumlah Layanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan x 100%	%	100	73,91
Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan / Jumlah Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran X 100%	%	100	100



Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	Jumlah (Si), untuk i =n 1 sampai 165 / 165	%	0,46	0,49
Indeks Reformasi Birokrasi BPBD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPBD dari Evaluator Tingkat kota	Kategori (Poin)	BB (75,25)	BB (75,25)

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya, 2026.

Tabel di atas menyajikan lima indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menunjukkan hasil yang sangat positif karena mayoritas indikator berhasil mencapai atau bahkan melampaui target. Capaian optimal terlihat pada Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang melampaui target (realisasi 0,62 dari target 0,54), Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat yang juga di atas target (realisasi 0,49 dari target 0,46), serta indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Persentase Pelayanan Kebakaran & Non-Kebakaran yang berhasil mencapai target tepat sasaran sebesar 100%. Namun, masih terdapat tantangan operasional, yaitu pada Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan yang Sesuai *Response Time*, karena realisasinya baru mencapai 73,91% dari target ideal 100%. Secara keseluruhan, BPBD memiliki tata kelola dan tingkat kesiapsiagaan bencana yang sangat kuat, tetapi masih memerlukan optimalisasi taktis lapangan demi mempercepat waktu tanggap darurat kepada masyarakat.

Tabel 2.69.
Kejadian Bencana Tahun 2023-2025

No.	Bencana	Kejadian		
		2023	2024	2025
1.	Angin Putting Beliuang	1		4
2.	Pohon tumbang	47	65	148
3.	Rumah Roboh	119	108	6
4.	Gempa bumi	3	1	53
5.	Longsor	36	44	2
6.	Banjir	24	18	54
7.	Tersambar petir	7	11	
8.	Gerakan Tanah	4		
9.	Kekeringan	1	1	
10.	Pandemi Covid-19	-	-	-
11.	Kebakaran	147	77	69
	Jumlah	389	325	336

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya, 2026.

Data dari BPBD Kota Tasikmalaya menunjukkan fluktuasi intensitas kejadian bencana di Kota Tasikmalaya selama periode tahun 2023 hingga 2025 dengan total peristiwa yang cenderung dinamis, yaitu sebanyak 389 kejadian (2023), menurun ke 325 kejadian (2024), dan sedikit meningkat kembali menjadi 336 kejadian (2025). Karakteristik bencana di wilayah ini didominasi oleh fenomena hidrometeorologi basah dan bencana iklim; peristiwa pohon tumbang mengalami lonjakan paling tajam dari 47 kasus di tahun 2023 menjadi 148 kasus di tahun 2025, yang berjalan selaras dengan peningkatan kasus banjir dari 24 kejadian merangkak naik ke 54 kejadian di tahun 2025. Sebaliknya, beberapa jenis bencana menunjukkan tren pemulihan yang sangat signifikan, seperti kejadian kebakaran yang berhasil ditekan dari 147 kasus menjadi



69 kasus, serta kasus rumah roboh yang turun drastis dari 119 kejadian di tahun 2023 menjadi hanya 6 kejadian pada akhir periode. Meskipun bencana geologi seperti gempa bumi sempat mencatatkan lonjakan temporer hingga 53 kejadian di tahun 2025. secara umum potret data dari BPBD Kota Tasikmalaya tahun 2026 ini memberikan dasar urgensi yang kuat bagi penyusunan kebijakan mitigasi bencana terpadu, peningkatan kesiapsiagaan infrastruktur perkotaan terhadap cuaca ekstrem, serta penguatan manajemen risiko bencana berbasis komunitas secara berkelanjutan.

6) **Urusan Sosial**

Adapun capaian kinerja urusan sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 2.70.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Perolehan Capaian Kinerja Bidang / Target Capaian Kinerja x 100%	%	100	99,65	102,54
Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis	Jumlah PSKS aktif dan mendapatkan bimbingan teknis / Jumlah PSKS x 100	%	100	100	100
Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	Jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial / Jumlah Pengaduan PPKS X 100	%	100	99,66	95,54
Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran	Jumlah penerima bantuan yang diverifikasi / jumlah data pengaduan X 10	%	100	98,59	116
Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial / Jumlah laporan korban bencana X 100	%	100	100	101
Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	Jumlah Makam Pahlawan yg dikelola dan terstandar / Jumlah Makam Pahlawan x100	%	100	100	100
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Sosial dari Evaluator Tingkat Kota	Kategori	B	B	BB (80,72)

Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2026

Indikator urusan sosial yang menjadi tugas dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya terdiri dari 7 Indikator, yaitu:

1. Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,54%, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya program-program inovasi yang dilaksanakan sebagai wujud nyata sebuah terobosan baru untuk mempercepat dalam upaya penanganan permasalahan kemiskinan dan permasalahan sosial, diantaranya:



- a. **Tasik Pintar** merupakan Program Unggulan Kota Tasikmalaya salah satunya melalui Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. *Outcome* langsung dari Program Unggulan Tasik Pintar ini menggunakan kriteria keberhasilan berupa meningkatnya kualitas SDM dari keluarga miskin, dengan indikator kinerja berupa jumlah lulusan sarjana yang berasal dari keluarga miskin. Pada tahap awal, program dinyatakan berhasil apabila mampu melahirkan sarjana-sarjana baru yang berasal dari basis data kemiskinan. Indikator ini berfokus pada kuantitas lulusan sebagai bukti bahwa permasalahan keuangan untuk menempuh Pendidikan Tinggi telah berhasil diurai oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 - b. **Layar Kusumah** yang dibentuk Tahun 2021 dengan tujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam mengakses layanan kebutuhan dasar yang mereka perlukan.
 - c. **Tasik Bageur** merupakan sebuah program sekaligus Platform Digital yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai jembatan kebaikan dan wadah kolaborasi seluruh elemen warga dan menumbuhkembangkan kembali gotong royong di tengah masyarakat Kota Tasikmalaya. Pada Aplikasi 'Bageur', masyarakat dapat melakukan Pelaporan, penggalangan barang maupun bantuan lainnya secara online dimana proses penyalurannya dilakukan secara langsung dengan melakukan janji bersama sibageur lainnya di alamat penerima bantuan.
 - d. **Bakul Tasik** adalah salah satu program yang ada di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, berupa bagi – bagi makanan yang bekerjasama dengan Hotel dan Restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Tasikmalaya. dengan sasaran penerima yaitu Lansia, Disabilitas, Keluarga Tidak Mampu, Yatim Piatu, ODGJ, Gelandangan dan lain-lain.
2. Indikator Program Pemberdayaan Sosial dari kegiatan ini adalah **Persentase PSKS Aktif** dan mendapatkan bimbingan teknis dengan realiasi capaian kinerja sebesar 100% dari target 100%. Dimana pada Tahun 2025 PSKS Aktif dan mendapatkan bimbingan teknis dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota sebanyak 69 orang.
 - b. Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota sebanyak 10 orang.
 - c. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota sebanyak 40 lembaga.
 - d. Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) sebanyak 3 Sertifikat.
3. Program Rehabilitasi Sosial Indikator dari kegiatan ini adalah **persentase rehabilitasi sosial terhadap PPKS**, dengan capaian kinerja sebesar 95,54% dari target 100%. Hal tersebut dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak tercapai salah satunya adalah pemberian beasiswa sebanyak 47 orang dari target 94 orang.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian 99,87%. Indikator dari kegiatan ini adalah persentase bansos kesejahteraan keluarga tepat sasaran, dengan capaian kinerja sebesar 116% dari target 100%, hal tersebut dikarenakan pada sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, pada triwulan ketiga terjadi penghapusan bansos sehingga pada akhir tahun banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang minta pengajuan ulang hal tersebut yang memicu terhadap capaian kinerja yang melebihi target pengusulan yang sudah direncanakan di awal tahun, dan pada sub kegiatan Pengelolaan Data



Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan adanya program BLT Kesra dari Kementrian Sosial RI sehingga perlu dilakukan verifikasi kelayakan KPM yang berhak menerima BLT Kesra dan hal ini pun berdampak pada capaian kinerja yang melebihi target yang sudah direncanakan di awal tahun.

- 5. Program Penanganan Bencana dengan Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial, dengan capaian kinerja sebesar 101% dari target 100%. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2025 banyak yang mengajukan permohonan bantuan logistik bagi korban bencana alam yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Dimana pada Tahun 2025 tercatat jumlah korban bencana alam yang mengajukan permohonan bantuan baik itu sandang maupun permakanan sebanyak 449 orang.
- 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan capaian 99,74%. Indikator dari kegiatan ini adalah persentase pengelolaan taman makam pahlawan yang terstandar, dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target 100%. Dimana pada Tahun 2025 terdapat 1.037 makam yang terpenuhi pemeliharannya.
- 7. **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 115%, Capaian hasil penilaian dari Evaluator Tingkat Kota Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Memperoleh Nilai 80,72 Point dengan kategori **“BB”**, yang terdiri dari 3 komponen penilaian diantaranya Nilai RB General Periodik sebesar 81,45 Point, Nilai RB General Parsial sebesar 74,78 Point dan Capaian Dampak sebesar 98,33 Point. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebesar 115% yaitu dari target B (70,01) (Kategori) tercapai BB (80,72) (Kategori). Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya dan adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara Dinas Sosial dengan instansi terkait yang terlibat.

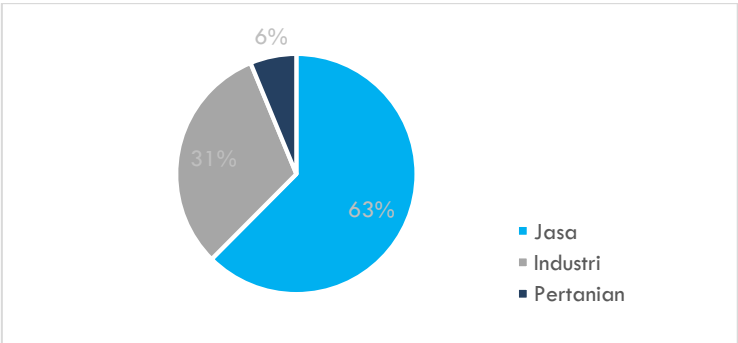
2. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 17 (tujuh belas) urusan, yaitu:

1) **Urusan Tenaga Kerja**

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Jasa sebesar 62,46 persen, diikuti oleh lapangan usaha Industri sebesar 31,31 persen dan lapangan usaha Pertanian sebesar 6,23 persen. Pola lapangan usaha dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan tahun 2025.

Gambar 2.35.
Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2025



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026.



Dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah lapangan usaha Pertanian (5.110 orang), sedangkan penurunan penyerapan tenaga kerja terjadi pada lapangan usaha Industri (11.109 orang) dan lapangan usaha Jasa (2.733 orang).

Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan (LPK) yang berjumlah 85 unit, yang terdiri dari 15 unit Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dan 70 LPK swasta lainnya.

Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.71.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,35	6,55	6,5	6,49	5,97-6,49	6,43
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,9	65,44	65,67	68,92	69,42	66,31
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta rupiah /tenaga kerja	-	51,46	-	54,03	56,15	88,62
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	-	-	-	-	53,05	51,18
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	54,25	80,29	55	77,92	-	-
7	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	4,98	13,25	-	-	-	-
8	Persentase pencari kerja dan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	-	-	19,7	19,8	-	-
9	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	4	100	8	100	-	-
10	Persentase tenaga kerja yang	%	27	54,17	40	44,42	-	-



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota							
11	Persentase peserta pelatihan yang lulus pelatihan berbasis kompetensi (%)	%	-	-	-	-	100	100
12	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (%)	%	-	-	-	-	40	50,50
13	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	orang	-	-	-	-	10.000	28.655
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	-	-	-	-	27,29	37,18
15	Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	%	-	-	-	-	1	1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, 2026.

Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2025 mengalami perubahan indikator kinerja dikarenakan adanya penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 sehingga indikator kinerja disesuaikan Kembali dengan peraturan yang berlaku. Penyesuaian ini dilakukan agar indikator yang digunakan lebih akurat dalam mencerminkan kinerja sektor tenaga kerja sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Pembangunan daerah.

Salah satu indikator strategis yang menggambarkan sektor ketenagakerjaan adalah Tingkat produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2025, capaian Tingkat produktivitas tenaga kerja mencapai 88,62 juta rupiah/tenaga kerja. Perbedaan angka antara target dan realisasi yang cukup signifikan disebabkan oleh perbedaan formulasi perhitungan. Angka target didasarkan pada dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang dihitung menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Untuk angka realisasi dihitung menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Hal ini dilakukan karena perubahan angka produktivitas yang dihasilkan lebih mencerminkan peningkatan volume produksi atau nilai tambah riil yang dihasilkan oleh tenaga kerja.

Tingkat Produktivitas tenaga kerja ini menunjukkan kenaikan ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap pekerja di Kota Tasikmalaya mampu menghasilkan nilai



tambah yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan perbaikan dalam efisiensi tenaga kerja serta pemulihan ekonomi yang berjalan positif.

Indikator selanjutnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik mereka yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Berdasarkan data tahun 2025, TPAK Kota Tasikmalaya sebesar 66,31%. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, menunjukkan berkurangnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain faktor kondisi perekonomian, keterbatasan lapangan kerja serta ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

TPAK Perempuan juga menjadi salah satu indikator penting untuk sektor tenaga kerja. Indikator ini menunjukkan persentase usia kerja Perempuan yang aktif secara ekonomi. Pada tahun 2025, angka TPA Perempuan sebesar 51,18% menurun dibandingkan tahun 2024. Indikator TPAK Perempuan penting menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan responsif gender, seperti penyediaan lapangan kerja fleksibel, peningkatan keterampilan perempuan, dan dukungan terhadap keseimbangan peran kerja-keluarga.

Pada tahun 2025, terdapat empat indikator program yang menjadi tolak ukur capaian urusan ketenagakerjaan. Adapun empat urusan tersebut antara lain: Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (%), Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%), serta Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) dengan realisasi tahun 2025 seperti yang terlihat pada tabel di atas.

2) **Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak**

Adapun capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.72.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	Formulasi	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	Poin	91,89	92,96	92,98	93,41
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	Poin	60,10	69,84	60,15	Belum Rilis BPS
Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Usia 15-64 Tahun / Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15-64 Tahun x 100	%	0,024	0,017	0,022	0,014



Indikator	Formulasi	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Jumlah Anak Usia 13-17 Tahun yang pernah Mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang Hidup / jumlah anak Usia 13-17 Tahun x 100	%	0,19	2,19	0,18	0,25
Persentase perangkat daerah yang menerapkan program PUG	Cakupan OPD yang Menjalankan Program PUG Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan ARG / Jumlah Perangkat Daerah x 100	%	100	100	100	100
Persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender	Cakupan Keluarga yang Mengikuti Pelatihan PUG Jumlah Keluarga yang Aktif dalam Pengarusutamaan Gender / Jumlah keluarga x 100	%	100	100	100	100
Persentase data terpilah yang dimanfaatkan	Jumlah Data Terpilah yang dimanfaatkan / Jumlah Data Terpilah yang ada x 100	%	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase kasus yang tertangani	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti / Jumlah laporan/pengaduan yang masuk x 100	%	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan capaian indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, secara umum kinerja pembangunan keluarga di Kota Tasikmalaya menunjukkan hasil yang cukup baik. Persentase rencana aksi pengendalian penduduk yang terlaksana berhasil mencapai 100 persen pada tahun 2024 maupun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada indikator Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15–19 tahun, capaian tahun 2025 sebesar 8,81 per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun, lebih rendah dari target 12,3, yang menunjukkan semakin rendahnya angka kelahiran pada kelompok usia remaja. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya efektivitas program pendewasaan usia perkawinan, edukasi kesehatan reproduksi remaja, serta penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada remaja dan keluarga. Sementara itu, Total Fertility Rate (TFR) meningkat dari 1,92 pada tahun 2024 menjadi 2,00 pada tahun 2025, sehingga telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat fertilitas di Kota Tasikmalaya berada pada kondisi yang relatif ideal untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk.

Di sisi lain, beberapa indikator masih memerlukan perhatian untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Bangga Kencana. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) mengalami penurunan dari 73,51 persen pada tahun 2024 menjadi 65,28 persen pada tahun 2025, sehingga belum mencapai target sebesar 67,67 persen. Penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan akses pelayanan keluarga berencana, peningkatan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, serta penguatan edukasi kepada pasangan usia subur mengenai pentingnya penggunaan metode kontrasepsi modern.



Sebaliknya, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) menunjukkan perkembangan yang sangat baik dengan penurunan dari 12,05 persen pada tahun 2024 menjadi 5,02 persen pada tahun 2025, jauh lebih rendah dari target sebesar 15 persen. Capaian ini mencerminkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan keluarga berencana. Ke depan, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu mempertahankan capaian pada indikator ASFR, TFR, dan *unmet need*, sekaligus memprioritaskan peningkatan cakupan peserta aktif kontrasepsi modern melalui penguatan pelayanan KB berkualitas, pemberdayaan kader, optimalisasi pelayanan KB pascapersalinan, serta kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan keluarga yang berkualitas dan mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

3) **Urusan Pangan**

Adapun capaian kinerja urusan pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.73.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

INDIKATOR KINERJA DAERAH	FORMULASI	SATUAN	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing- masing kelompok pangan	poin	91,4	92,4	91,5	95,1	95,1	95,9
Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	Persentase Angka Kecukupan Energi	%	110,7	103,9	104	106	-	-
Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	Persentase Angka Kecukupan Protein	%	125	116,8	116,8	136,9	-	-
Persentase kelurahan rentan pangan yang ditangani	Jumlah kelurahan rentan pangan yang ditangani/Jumlah kelurahan rentan warga	%	15	75	-	-	-	-
Persentase penurunan daerah rawan pangan	Jumlah daerah rawan pangan tahun berjalan - Jumlah daerah rawan pangan Tahun sebelumnya x 100%	%	-	-	15	25	-	-
Persentase pengawasan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Total sampel pangan yang diawasi	%	100	100	100	100	-	-
Persentase jumlah cadangan pangan	Jumlah CPP kab/kota/jumlah target CPP kab/kota yang ditetapkan	%	-	-	-	-	100	78,71



INDIKATOR KINERJA DAERAH	FORMULASI	SATUAN	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase daerah rentan rawan pangan	Jumlah daerah rentan rawan pangan/Jumlah kelurahan x 100%	%	-	-	-	-	4,35	4,35
Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Jumlah pangan yang disampel x 100%	%	-	-	-	-	100	70,59

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2026.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan tren yang sangat positif dan konsisten. Realisasi selalu melampaui target setiap tahunnya, pada tahun 2023 capaian 92,4% (target 91,4%), 2024 capaian 95,1% (target 91,5%) dan 2025 capaian 95,9% (target 95,1%). Dapat disimpulkan, masyarakat semakin menuju pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

AKE & AKP (Energi & Protein) pada tahun 2024, realisasi konsumsi energi (106%) dan protein (136,9%) melampaui target. Tingginya angka protein (136,9%) menunjukkan ketersediaan pangan sumber protein di masyarakat sudah sangat mencukupi.

Terdapat pergeseran fokus indikator kerawanan pangan dari tahun ke tahun. Tahun 2023, fokus pada penanganan kelurahan rentan rawan pangan dengan realisasi 75% dari target 15%. Ini menunjukkan akselerasi intervensi yang sangat masif di tahun tersebut. Tahun 2024, fokus bergeser ke persentase penurunan daerah rawan pangan dengan realisasi 25% (melampaui target 15%). Tahun 2025, untuk mengukur daerah rentan rawan pangan menggunakan indikator persentase daerah rentan rawan pangan ditargetkan 4,35% dan tercapai tepat sasaran (100% dari target).

Pengawasan keamanan pangan ditahun 2023 dan 2024 terealisasi sesuai target 100%, namun pada tahun 2025, kualitas pangan segar yang memenuhi syarat mutu hanya mencapai 70,59%. Terdapat gap, antara sampel yang diawasi dengan sampel yang memenuhi standar.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) terealisasi 78,71% menunjukkan bahwa pengadaan atau ketersediaan stok pangan daerah masih berada di bawah target. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga beras pada saat pelaksanaan pengadaan.

4) **Urusan Pertanahan**

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan terdiri dari Persentase PKKPR tanah aset pemkot untuk pembangunan fasilitas umum fasilitas sosial dan Persentase Kesesuaian Luas Tanah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum fasilitas sosial dengan rencana tata ruang.

Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.74.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan

Indikator	Satuan	Tahun					
		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%	100	100	-	-	-	-
Persentase PKKPR tanah aset pemkot untuk pembangunan fasilitas umum fasilitas sosial	%	-	-	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Luas Tanah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum fasilitas sosial dengan rencana tata ruang	%	-	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2026.

Capaian Indikator kinerja urusan pertanahan walaupun terdapat perbedaan indikator tiap tahunnya, namun selalu mencapai target. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Tasikmalaya konsisten dalam mengeluarkan perizinan pembangunan selalu memperhatikan tata ruang.

5) **Urusan Lingkungan Hidup**

Adapun capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2025

Indikator	Formulasi	Satuan	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Air	$IPj = [\sqrt{(Ci/Lij)^2 M + (Ci/Lij)^2 A}] / 2$	Point	53,70	48,6	65.09	38,44	39,33	67,15
Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [(50/0,9 \times Ieu - 0,1)]$	Point	80,00	81,18	63,64	83,72	86,64	79,44
Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW) - DKK) \times 100)) \times 50/54,3$	Point	-	31,96	51,91	-	39,45	55,37
Persentase Pengurangan Sampah	Persentase capaian kinerja Pengurangan sampah	%	27	28	30	16,96	17,49	17,72
Persentase Penanganan Sampah	Persentase capaian kinerja penanganan sampah	%	72	71	70	65,21	68,64	66,21
Persentase Dokumen Perencanaan	Rata-rata persentase pemenuhan	%	-	100	100	-	100	100



Indikator	Formulasi	Satuan	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
Lingkungan Hidup yang Dimanfaatkan	dokumen lingkungan hidup pada tahun berjalan							
Persentase Penurunan Pencemaran	Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Berjalan dkurangi Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Sebelumnya (Persentase penurunan adalah Nilai Indeks Kualitas yang diperoleh dibagi dengan nilai indeks kualitas kategori baik(70) dikali 100)	%	-	0,15	0,2	-	2,72	3,94
Persentase Peningkatan RTH	Rata-rata persentase capaian kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati	%	-	100	100	-	100	100
Persentase pelaku usaha / kegiatan yang mematuhi ketentuan lingkungan	Jumlah pelaku usaha / kegiatan yang memenuhi ketentuan lingkungan pada tahun berjalan dibagi target pelaku usaha / kegiatan yang dinilai dan diawasi pada tahun berjalan	%	-	100	100	-	100	200
Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Yang terselesaikan	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang tertangani pada tahun berjalan dibagi target jumlah pengaduan lingkungan hidup dikali 100	%	-	100	100	-	433	120

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada umumnya telah tercapai dan beberapa indikator melebihi target seperti Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Mematuhi Ketentuan Lingkungan dan Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Yang terselesaikan. Namun untuk capaian pengelolaan sampah, dari tahun 2023 hingga tahun 2025 belum mencapai target yang



ditetapkan. Keadaan ini terjadi karena tingkat pengurangan sampah dari sumbernya belum terlaksana secara maksimal serta belum meratanya pelayanan persampahan di Kota Tasikmalaya, diperlukan kerjasama dan komitmen yang kuat antar semua pihak, karena masalah sampah sudah menjadi isu Nasional.

Ruang lingkup urusan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Dinas Lingkungan Hidup mengelola Ruang Terbuka Hijau yang dikelola terdiri dari Tempat Pemakaman Umum (TPU), Taman dan Daerah Resapan Air (bukit) dengan total luas 27,78 Ha atau 0,15% terhdap luas kota (18.698,76 Ha). TPU yang dikelola diantaranya Aisha Rashida, Cieunteng dan Cinehel dengan total luas keseluruhan 12,274994 Ha. RTH yang berasal dari taman, tersebar di 28 (Dua Puluh Delapan) lokasi di Kota Tasikmalaya, dengan total luas 4,396716 Ha. Taman yang memiliki luas terbesar yaitu Taman Alun-Alun yang berada di Jl. Otto Iskandardinata (Jl. R.A.A. Wiratanuningrat). Pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya melakukan pembebasan lahan di Bukit Putri dengan total luas 1400 m² atau 0.14 Ha, sehingga menambah luas bukit menjadi 11,1086 Ha. Secara rinci Ruang Terbuka Hijau Kota Tasikmalaya dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.76.

Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas (Ha)	Persentase terhadap luas kota (%)
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	12,274994	0,06565
2	Taman	4,396716	0,02351
3	Daerah Resapan Air (Bukit)	11,1086	0,05941
	Total	27,78031	0,14857

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Catatan: Luas Kota = 18.698,76 Ha

Tabel 2.77.

Tempat Pemakaman Umum (TPU)

No.	Nama TPU	Luas (Ha)
1	Aisha Rashida	7,151238
2	Cieunteung	1,556754
3	Cinehel	3,567002
	Total	12,274994

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026

Tabel 2.78.

Taman Kota Tasikmalaya Tahun 2025

No.	Nama	Luas (Ha)
1	Taman Dadaha	0,7
2	Taman Kota	0,4362
3	Taman Alun-Alun	1,2789
4	Taman Warga Cigeureung	0,1596
5	Batas Kota Indihiang	0,061
6	Batas Kota Karangresik	0,0552
7	Median Jalan Wasita Kusumah	0,0372



No.	Nama	Luas (Ha)
8	Median Jalan HZ Mustofa	0,482
9	Median Jalan Letnan Harun	0,065
10	Median Brigjen Sutoko	0,132
11	Median Jalan Aji Witono	0,13
12	Median Jalan EZ Mutaqin	0,16
13	Tugu HZ Mustofa	0,048531
14	Tugu Asmaul Husna	0,003997
15	Tugu Canting Batik/Pulau Jalan Wasita Kusumah	0,007992
16	Tugu Simpang Lima	0,004373
17	Pulau Jalan Cibogor	0,013631
18	Pulau Jalan Dewi Sartika	0,0006
19	Pulau Jalan Tanuwijaya-Sutsen	0,009486
20	Pulau Jalan Tanuwijaya-PM	0,007839
21	Pulau Jalan Tarumanagara	0,001726
22	Pulau Jalan HZ Mustofa (Adipura)	0,0143
23	Pulau Jalan Tentara Pelajar (Dadaha)	0,004891
24	Pulau Jalan Cilolohan	0,00262
25	Pulau Jalan Ir. H. Juanda-RE Martadinata (Jati)	0,009398
26	Pulau Jalan Tamansari (Kelom Geulis)	0,006178
27	Pulau Jalan Rancabango	0,084054
28	Huta Kota (Dadaha)	0,48
Total		4,396716

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026

Tabel 2.79.
Pembebasan Lahan untuk RTH

No.	Nama Bukit	Lokasi		Luas (Ha)	Tahun Pembebasan	Ket.
		Kelurahan	Kecamatan			
1.	Bukit Kokosan	Cibunigeulis	Bungursari	3,5796	2008, 2009, 2011, 2015	Setda, KPLH
2.	Bukit Kiara	Bungursari	Bungursari	1,0162	2011	KPLH
3.	Bukit Tengah	Bungursari	Bungursari	0,4555	2013	KPLH
4.	Bukit Pondok	Bungursari	Bungursari	0,5410	2013, 2014	KPLH
5.	Bukit Hanjuang	Cibunigeulis	Bungursari	0,6707	2013	KPLH
6.	Bukit Bondan	Sukajaya	Bungursari	0,1027	2014	KLH
7.	Bukit Jambore	Sukalaksana	Bungursari	0,3965	2014	KLH
8.	Bukit Bubut	Cipawitra	Mangkubumi	0,22	2017	DLH
9.	Bukit Putri	Cibunigeulis	Bungursari	1,9145	2018, 2022, 2025	DLH
10.	Bukit Cilamajang	Cipawitra	Mangkubumi	2,0453	2017, 2018, 2019	DLH
11.	Bukit Situ Butak	Mangkubumi	Mangkubumi	0,1666	2022, 2023	DLH
Jumlah				11,1086		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air dan udara,



penanganan pengaduan, dan pemantauan izin lingkungan. Berikut beberapa data dan penjelasan mengenai pengendalian dan pengawasan lingkungan.

• **Pemantauan kualitas air dan udara**

Pemantauan kualitas air dan udara adalah salah satu kegiatan pengendalian lingkungan, dengan pengambilan contoh air atau udara secara berkala ataupun secara terus menerus untuk keperluan menentukan tingkat pencemaran/radiasi. Aktivitas pemantauan ini adalah salah satu tugas pengendali dampak lingkungan dalam mendeteksi dan mengevaluasi apabila terjadi perubahan kualitas suatu lingkungan.

Pemantauan kualitas air dan udara ini berfungsi untuk memberikan informasi faktual tentang kondisi (status) kualitas air masa sekarang, kecenderungan masa lalu dan prediksi perubahan lingkungan masa depan. Informasi dasar yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dapat dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, ijin lokasi untuk usaha atau kegiatan, serta penentuan baku mutu air dan air limbah. Tabel 2.78. dan Tabel 2.79. berikut ini memperlihatkan Indeks Kualitas Air dan Udara berdasarkan lokasi sampel di Kota Tasikmalaya.

Kualitas Air

Status mutu telah dibagi sesuai kelas peruntukan penggunaan air, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemantaun air Sungai dilakukan di 15 titik Lokasi, dengan periode pemantau sebanyak 3 (tiga) periode. Pelaksanaan pemantau periode 1 di bulan April dan Mei, periode 2 bulan Mei dan periode 3 pada bulan Oktober.

Tabel 2.80.
Lokasi Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2025

No.	Sugai yang dipantau	Lokasi Sampling	Koordinat
1.	Sungai Ciloseh Hulu	Bendung Bengkok Kp. Bengkok Kel. Sukalaksana Kec. Bungursari, Tasikmalaya	S 07°17'36,8" E 108°10'47,4"
2.	Sungai Ciloseh Tengah	Jl. Cimulu Tawangsari Kec. Tawang, Tasikmalaya	S 07°19'15,4" E 108°13'17,5"
3.	Sungai Ciloseh Hilir	Jl. Syekh Tubagus Abdullah Kel. Sukaasih, Kec. Purbaratu Tasikmalaya Plang Leuwi Anyar	S 07°18'59,5" E 108°15'4,44"
4.	Sungai Cikalang Hulu	Jl. Abahamuy Cipanas Galunggung Kec. Bungursari, Tasikmalaya	S 07°19'19,9" E 108°10'48,7"
5.	Sungai Cikalang Tengah	Jl. Laswi jembatan, Cikalang Kec. Tawang, Tasikmalaya	S 07°20'13,3" E 108°13'41,9"
6.	Sungai Cikalang Hilir	Kp. Gobang Kel. Singkup Kec. Purbaratu, Tasikmalaya	S 07°20'29,8" E 108°17'04,9"
7.	Sungai Cilamajang Hulu	Jl. Ciponyo No. 05 RT 01 RW09 Cigantang Kec. Mangkubumi	S 07°21'18,4" E 108°11'25,2"
8.	Sungai Cilamajang Tengah	Jln. Cijeruk Hilir Kel. Talagasari Kecamatan Kawalu	S 07°22'59,3" E 108°12'00,3"
9.	Sungai Cilamajang Hilir	Kp. Tanjung Loka Kec. Kawalu	S 07°23'31,1" E 108°11'01.0"
10.	Sungai Cibangbay Hulu	Kp. Peundeuy Kel. Urug Kec. Kawalu	S 07°25'25,4" E 108°12'34,3"



No.	Sugai yang dipantau	Lokasi Sampling	Koordinat
11.	Sungai Cibangbay Tengah	Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu	S 07°25'04,2" E 108°12'20,2"
12.	Sungai Cibangbay Hilir	Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu	S 07°26'14,6" E 108°11'33,8"
13.	Sungai Cimulu Hulu	Kp. Gn. Carik Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya	S 07°18'47,5" E 108°09'37,8"
14.	Sungai Cimulu Tengah	Jl. Ir. H. Juanda Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya (Jembatan Cimulu - Klinik Avicenna)	S 07°19'17,4" E 108°11'55,5"
15.	Sungai Cimulu Hilir	Jl. Dr. Sukardjo No.80, Panglayungan, Kec. Cipedes, Tasikmalaya	S 07°19'17,4," E 108°11'55,5"

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Tahun 2026.

Kelas I merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas II merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan air tawar, perternakan, air untuk mengairi pertanian, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas III merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, perternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas IV merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Tabel 2.81.
Baku Mutu Air Sungai

No	Parameter	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Keterangan
1.	pH		6-9	6-9	6-9	6-9	Tidak berlaku untuk gambut (berdasarkan kondisi alaminya)
2.	BOD	mg/L	2	3	6	12	
3.	COD	mg/L	10	25	40	80	
4.	TSS	mg/L	40	50	100	400	
5.	DO	mg/L	6	4	3	1	Batas Minimal
6.	NO ₃ -N (Nitrat)	mg/L	10	10	20	20	
7.	Total Phosphat	mg/L	0,2	0,2	1,0	-	
8.	Fercal Coliform	mg/L	100	1000	2000	2000	

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Tabel 2.82.

Hasil Pemantauan Kualitas Air dan Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2025

NO	PERIODE PEMANTAUAN	ALAMAT LOKASI	NILAI MUTU AIR							
			pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO3-N (Nitrat) (mg/L)	TOTAL PHOSPH AT (mg/L)	FECAL COLIFORM MPN/100 mL
1	1	S. Ciloseh Hulu-Bendung Bengkok Kp. Bengkok Kel. Sukalaksana Kec. Bungursari, Tasikmalaya	8,42	2	5,01	7	5,3	1,1	0,36	9100
2	2	S. Ciloseh Hulu-Bendung Bengkok Kp. Bengkok Kel. Sukalaksana Kec. Bungursari, Tasikmalaya	8,96	2	5,01	2	7,6	0,8	0,48	3000
3	3	S. Ciloseh Hulu-Bendung Bengkok Kp. Bengkok Kel. Sukalaksana Kec. Bungursari, Tasikmalaya	8,2	2	3,19	2	7,2	0,7	0,39	910
4	1	S. Ciloseh Tengah-Jl. Cimulu Tawangsari Kec. Tawang, Tasikmalaya	8,13	8	12,9	4	5,1	1,2	0,61	3000
5	2	S. Ciloseh Tengah-Jl. Cimulu Tawangsari Kec. Tawang, Tasikmalaya	8,61	2,6	7,64	5	5,7	0,3	0,99	3000
6	3	S. Ciloseh Tengah-Jl. Cimulu Tawangsari Kec. Tawang, Tasikmalaya	8,38	2,7	3,19	2	6,4	0,8	0,48	2300
7	1	S. Ciloseh Hilir-Jl. Syekh Tubagus Abdullah Kel. Sukaasih, Kec. Purbaratu Tasikmalaya Plang Leuwi Anyar	8,2	6	12,9	3	6	1	0,54	3000
8	2	S. Ciloseh Hilir-Jl. Syekh Tubagus Abdullah Kel. Sukaasih, Kec. Purbaratu Tasikmalaya Plang Leuwi Anyar	8,68	3,1	10,27	5	6	0,3	0,84	3000
9	3	S. Ciloseh Hilir-Jl. Syekh Tubagus Abdullah Kel. Sukaasih, Kec. Purbaratu Tasikmalaya Plang Leuwi Anyar	8,23	3	5,76	5	6,4	0,9	0,52	300
10	1	S. Cikalang Hulu-Jl. Abahamuy Cipanas ◆Galunggung Kec. Bungursari, Tasikmalaya	7,94	6	26,05	8	4,2	1,4	0,6	7300
11	2	S. Cikalang Hulu-Jl. Abahamuy Cipanas ◆Galunggung Kec. Bungursari, Tasikmalaya	8,24	6,6	12,9	16	5,8	0,6	0,75	43000
12	3	S. Cikalang Hulu-Jl. Abahamuy Cipanas ◆Galunggung Kec. Bungursari, Tasikmalaya	7,49	4,9	7,64	5	5,4	0,9	0,03	3000
13	1	S. Cikalang Tengah-Jl. Laswi jembatan, Cikalang Kec. Tawang, Tasikmalaya	7,75	19	62,86	3	5,1	1	1,69	91000
14	2	S. Cikalang Tengah-Jl. Laswi jembatan,	8,32	22	63,86	8	2,7	0,7	2,94	930000

STATUS MUTU			
KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4
4,14 Cemar Ringan	1,75 Cemar Ringan	0,66 Memenuhi	0,66 Memenuhi
5,55 Cemar Sedang	2,07 Cemar Ringan	0,93 Memenuhi	0,94 Memenuhi
5,62 Cemar Sedang	3,14 Cemar Ringan	2,06 Cemar Ringan	2,07 Cemar Ringan
2,43 Cemar Ringan	0,83 Memenuhi	0,78 Memenuhi	0,78 Memenuhi
7,68 Cemar Sedang	4,14 Cemar Ringan	3,08 Cemar Ringan	3,08 Cemar Ringan
3,06 Cemar Ringan	0,68 Memenuhi	0,67 Memenuhi	0,68 Memenuhi
7,98 Cemar Sedang	5,49 Cemar Sedang	4,41 Cemar Ringan	4,42 Cemar Ringan
7,96 Cemar Sedang	5,48 Cemar Sedang	4,4 Cemar Ringan	4,41 Cemar Ringan
9,14 Cemar Sedang	5,65 Cemar Sedang	4,56 Cemar Ringan	4,58 Cemar Ringan
5,99 Cemar Sedang	3,49 Cemar Ringan	2,41 Cemar Ringan	2,42 Cemar Ringan
6,53 Cemar Sedang	4,04 Cemar Ringan	2,96 Cemar Ringan	2,97 Cemar Ringan
2,01 Cemar Ringan	0,66 Memenuhi	0,65 Memenuhi	0,66 Memenuhi
5,56 Cemar Sedang	2,01 Cemar Ringan	0,94 Memenuhi	0,95 Memenuhi
9,56 Cemar Sedang	6,66 Cemar Sedang	5,57 Cemar Sedang	5,6 Cemar Sedang



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	PERIODE PEMANTAUAN	ALAMAT LOKASI	NILAI MUTU AIR							
			pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO3-N (Nitrat) (mg/L)	TOTAL PHOSPH AT (mg/L)	FECAL COLIFORM MPN/100 mL
		Cikalang Kec. Tawang, Tasikmalaya								
15	3	S. Cikalang Tengah-Jl. Laswi jembatan, Cikalang Kec. Tawang, Tasikmalaya	7,45	31,8	62,86	4	3,5	0,7	0,04	30000
16	1	S. Cikalang Hilir-Kp. Gobang Kel. Singkup Kec. Purbaratu, Tasikmalaya	8,23	8	18,16	3	5,4	0,7	0,82	7300
17	2	S. Cikalang Hilir-Kp. Gobang Kel. Singkup Kec. Purbaratu, Tasikmalaya	8,57	4,9	12,9	10	7	1	1,14	4300
18	3	S. Cikalang Hilir-Kp. Gobang Kel. Singkup Kec. Purbaratu, Tasikmalaya	7,77	4,3	10,27	8	4,9	1,1	0,01	2300
19	1	S. Cilamajang Hulu-Jl. Ciponyo Rt.01 Rw 09 No.05, Cigantang, Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya	7,78	11	28,68	1	4	1,4	0,63	4300
20	2	S. Cilamajang Hulu-Jl. Ciponyo Rt.01 Rw 09 No.05, Cigantang, Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya	7,45	2	5,01	76	5	1,1	0,97	9100
21	3	S. Cilamajang Hulu-Jl. Ciponyo Rt.01 Rw 09 No.05, Cigantang, Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya	7,94	6,1	18,61	5	4,7	1	0,66	23000
22	1	S. Cilamajang Tengah-Jl. Cijeruk Hilir Kel. Talagasari Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,24	5	12,9	3	6,1	1	1,38	23000
23	2	S. Cilamajang Tengah-Jl. Cijeruk Hilir Kel. Talagasari Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,33	2,6	7,64	22	6,1	0,3	0,8	3000
24	3	S. Cilamajang Tengah-Jl. Cijeruk Hilir Kel. Talagasari Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,18	1,1	3,19	8	5,9	0,8	0,73	730
25	1	S. Cilamajang Hilir-Kp. Tanjung Loka Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,32	3	7,64	4	6,9	1	0,74	23000
26	2	S. Cilamajang Hilir-Kp. Tanjung Loka Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,71	5,1	10,27	6	7,3	0,3	0,55	9100
27	3	S. Cilamajang Hilir-Kp. Tanjung Loka Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,29	2	5,76	4	6,7	0,8	0,54	4300
28	1	S. Cibangbay Hulu-Kp. Peundeuy Kel. Urug Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,69	3,2	5,76	3	6,4	0,6	0,21	300
29	2	S. Cibangbay Hulu-Kp. Peundeuy Kel. Urug Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,49	2	2,38	1	6,5	0,9	0,88	910
30	3	S. Cibangbay Hulu-Kp. Peundeuy Kel. Urug Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,31	7,2	12,9	1	7,5	1	0,3	4600

STATUS MUTU			
KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4
7,71 Cemar Sedang	5,22 Cemar Sedang	4,15 Cemar Ringan	4,16 Cemar Ringan
5,98 Cemar Sedang	2,95 Cemar Ringan	1,35 Cemar Ringan	1,35 Cemar Ringan
5,98 Cemar Sedang	3,2 Cemar Ringan	1,35 Cemar Ringan	1,35 Cemar Ringan
5,96 Cemar Sedang	2,42 Cemar Ringan	1,34 Cemar Ringan	1,35 Cemar Ringan
7,68 Cemar Sedang	4,13 Cemar Ringan	3,05 Cemar Ringan	3,06 Cemar Ringan
6,27 Cemar Sedang	3,78 Cemar Ringan	2,69 Cemar Ringan	2,7 Cemar Ringan
7,69 Cemar Sedang	4,14 Cemar Ringan	3,05 Cemar Ringan	3,06 Cemar Ringan
6,54 Cemar Sedang	3,42 Cemar Ringan	1,9 Cemar Ringan	1,91 Cemar Ringan
14,87 Cemar Berat	11,31 Cemar Berat	10,21 Cemar Berat	10,25 Cemar Berat
10,09 Cemar Berat	6,54 Cemar Sedang	5,45 Cemar Sedang	5,47 Cemar Sedang
10,2 Cemar Berat	6,64 Cemar Sedang	5,56 Cemar Sedang	5,58 Cemar Sedang
6,65 Cemar Sedang	4,15 Cemar Ringan	3,07 Cemar Ringan	3,08 Cemar Ringan
6,64 Cemar Sedang	3,09 Cemar Ringan	2 Cemar Ringan	2,01 Cemar Ringan
7,07 Cemar Sedang	3,52 Cemar Ringan	2,42 Cemar Ringan	2,43 Cemar Ringan
6,29 Cemar Sedang	3,12 Cemar Ringan	2,02 Cemar Ringan	2,03 Cemar Ringan
5,62 Cemar Sedang	2,36 Cemar Ringan	1 Memenuhi	1 Memenuhi



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	PERIODE PEMANTAUAN	ALAMAT LOKASI	NILAI MUTU AIR							
			pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO3-N (Nitrat) (mg/L)	TOTAL PHOSPH AT (mg/L)	FECAL COLIFORM MPN/100 mL
31	1	S. Cibangbay Tengah-Kel. Urug Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,49	2	3,19	2	7,5	0,5	0,16	30
32	2	S. Cibangbay Tengah-Kel. Urug Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,24	3	5,01	2	6,3	0,5	0,6	4300
33	3	S. Cibangbay Tengah-Kel. Urug Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,41	8	12,9	3	6,7	0,5	0,28	2300
34	1	S. Cibangbay Hilir-Kel. Urug Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,49	2,2	3,19	3	7,5	0,6	0,23	9300
35	2	S. Cibangbay Hilir-Kel. Urug Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,3	2	2,38	1	5,5	0,7	1,44	24000
36	3	S. Cibangbay Hilir-Kel. Urug Kec. Kawalu, Tasikmalaya	8,77	8,2	20,79	6	6,5	0,4	0,35	46000
37	1	S. Cimulu Hulu-Kp. Gn. Carik Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya	7,12	2,7	5,01	1	6,2	0,6	0,45	3
38	2	S. Cimulu Hulu-Kp. Gn. Carik Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya	7,26	1	2,38	2	4,4	0,8	0,58	2400
39	3	S. Cimulu Hulu-Kp. Gn. Carik Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya	6,8	1,8	2,38	1	4,7	0,7	0,06	230
40	1	S. Cimulu Tengah Jl. Ir. H. Juanda Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya (Jembatan Cimulu - Klinik Avicenna)	7,32	15,4	20,79	3	6,1	1,3	0,66	93000
41	2	S. Cimulu Tengah Jl. Ir. H. Juanda Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya (Jembatan Cimulu - Klinik Avicenna)	8,49	12,1	23,42	3	5,4	0,8	0,77	3600
42	3	S. Cimulu Tengah Jl. Ir. H. Juanda Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya (Jembatan Cimulu - Klinik Avicenna)	7,44	4,9	5,01	4	3,8	0,5	0,02	3000
43	1	S. Cimulu Hilir-Jl. Dr. Sukardjo No.80, Panglayungan, Kec. Cipedes, Tasikmalaya	8	7	10,79	4	6,7	1	0,73	150000
44	2	S. Cimulu Hilir-Jl. Dr. Sukardjo No.80, Panglayungan, Kec. Cipedes, Tasikmalaya	7,81	8,1	15,53	7	5,6	0,9	0,88	6000
45	3	S. Cimulu Hilir-Jl. Dr. Sukardjo No.80, Panglayungan, Kec. Cipedes, Tasikmalaya	7,7	9,5	26,05	8	3,8	0,8	0,04	2300

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

STATUS MUTU			
KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4
9,2 Cemar Sedang	5,65 Cemar Sedang	4,56 Cemar Ringan	4,57 Cemar Ringan
6,66 Cemar Sedang	4,17 Cemar Ringan	3,08 Cemar Ringan	3,08 Cemar Ringan
4,14 Cemar Ringan	3 Cemar Ringan	1,71 Cemar Ringan	0,66 Memenuhi
9,13 Cemar Sedang	5,59 Cemar Sedang	4,5 Cemar Ringan	4,51 Cemar Ringan
9,15 Cemar Sedang	5,6 Cemar Sedang	4,51 Cemar Ringan	4,51 Cemar Ringan
6,56 Cemar Sedang	3,01 Cemar Ringan	1,92 Cemar Ringan	1,91 Cemar Ringan
12,04 Cemar Berat	8,82 Cemar Sedang	7,73 Cemar Sedang	7,75 Cemar Sedang
11,58 Cemar Berat	9,08 Cemar Sedang	7,99 Cemar Sedang	8,01 Cemar Sedang
2,08 Cemar Ringan	2,07 Cemar Ringan	2,06 Cemar Ringan	0,66 Memenuhi
7,38 Cemar Sedang	3,83 Cemar Ringan	2,91 Cemar Ringan	2,72 Cemar Ringan
11,29 Cemar Berat	7,74 Cemar Sedang	6,64 Cemar Sedang	6,65 Cemar Sedang
7,37 Cemar Sedang	3,82 Cemar Ringan	2,72 Cemar Ringan	2,72 Cemar Ringan
6 Cemar Sedang	2,46 Cemar Ringan	2,14 Cemar Ringan	1,35 Cemar Ringan
7,38 Cemar Sedang	4,88 Cemar Ringan	3,79 Cemar Ringan	3,79 Cemar Ringan
7,74 Cemar Sedang	5,25 Cemar Sedang	4,17 Cemar Ringan	4,17 Cemar Ringan



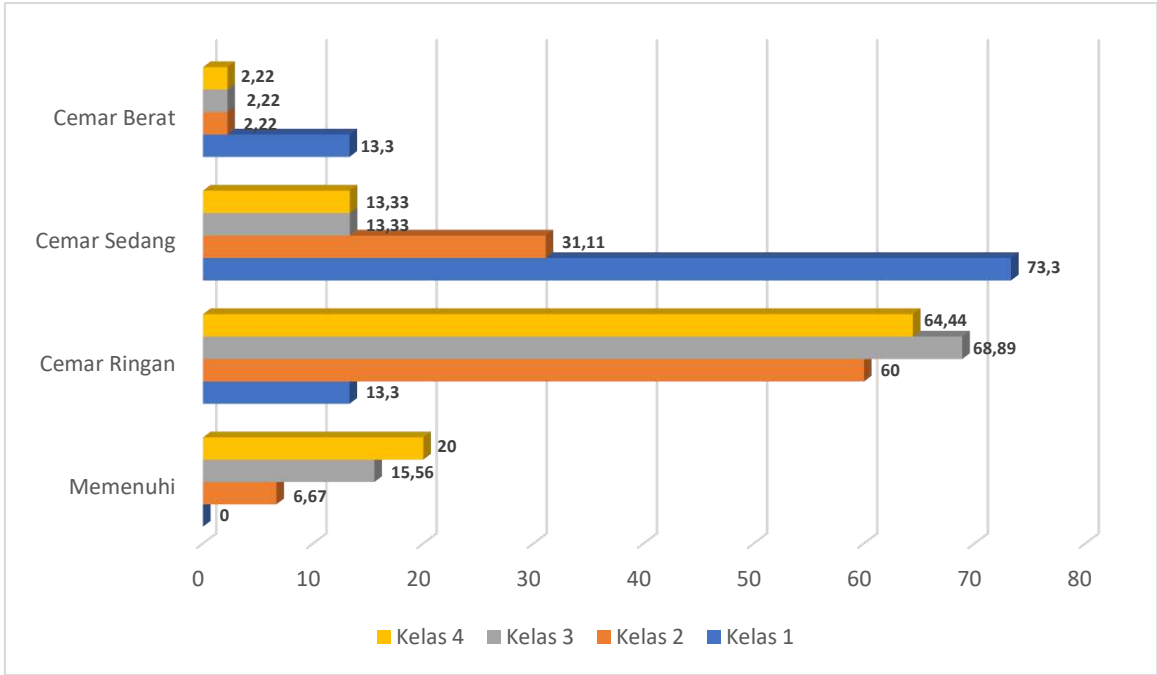
Berdasarkan tabel di atas, tergambarkan bahwa hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Tasikmalaya pada umumnya dapat berfungsi untuk status mutu Kelas 2, 3 dan 4. Dengan nilai 60% status air memenuhi baku mutu dan cemar ringan, sedangkan mutu kelas 1 umumnya tercemar sedang. Secara umum kompilasi hasil pemantauan dapat dilihat dalam Tabel dan Gambar berikut ini:

Tabel 2.83.
Kompilasi Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kota Tasikmalaya Tahun 2025
(15 Lokasi 3 kali pengambilan)

Status	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4
	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)
Memenuhi	0%	6,67%	15,56%	20%
Cemar Ringan	13,3%	60%	68,89%	64,44%
Cemat Sedang	73,3%	31,11%	13,33%	13,33%
Cemar Berat	13,3%	2,22%	2,22%	2,22%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Gambar 2.36.
Kompilasi Hasil Pemantauan Kualitas Air dan Perhitungan Indeks Kualitas Air
Tahun 2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Berdasarkan Tabel dan Gambar di atas, menunjukkan bahwa dimasing-masing kelas kualitas air Sungai tercemar ringan untuk Kelas 2 sampai 4 sekitar 60%, artinya beberapa parameter kualitas air melewati batas baku mutu (mis. BOD, COD, TSS) tapi tidak sangat jauh. Dampaknya masih tergolong kecil, ekosistem masih bisa bertahan dengan beberapa gangguan.

Sedangkan untuk pemanfaatan sungai untuk kelas 1 (air baku air minum) pada umunya sungai tercemar sedang (73,3%) dimana diindikasikan ada lebih dari satu parameter yang melebihi baku mutu jauh dari batas toleransi, sehingga kualitas



air sudah mengganggu fungsi tertentu (mis. budidaya ikan atau rekreasi) secara lebih nyata.

Pemanfaatan air sungai di Kota Tasikmalaya pada umumnya dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan pertanian atau untuk pemanfaatan kelas 3 dan 4. Secara umum, sungai di Kota Tasikmalaya masih dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan budidaya ikan karena mayoritas segmen sungai (84,44%) berada pada kondisi memenuhi baku mutu dan cemar ringan. Namun, pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara selektif dan dengan pengendalian ketat, serta menghindari segmen sungai dengan status cemar sedang dan cemar berat.

Namun jika melihat kembali tabel 2.81 dimana terindikasi sungai dengan kondisi tercemar berat yang berada di Sungai Cilamajang Tengah Jl. Cijeruk Hilir Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu. Hasil tersebut berada pada saat pengambilan periode 2 (bulan Mei), sedangkan pada periode 1 (bulan Juli) dan 3 (Oktober) di masing-masing kelas berbeda hasilnya. Pengambilan periode 1 berturut-turut dari kelas 1 s.d 4 sebagai berikut: Cemar Sedang, Cemar Ringan, Cemar Ringan, dan Cemar Ringan. Pengambilan periode 3 berturut-turut dari kelas 1 s.d 4 sebagai berikut; Cemar Berat, Cemar Sedang, Cemar Sedang dan Cemar Sedang. Perbedaan status kualitas air Sungai Cilamajang Tengah Jl. Cijeruk Hilir antar periode pengambilan sampel menunjukkan adanya pengaruh faktor temporal. Status cemar berat yang terjadi pada periode 2 (bulan Juli) diduga kuat disebabkan oleh kondisi musim kemarau yang mengakibatkan penurunan debit air sungai sehingga kemampuan pengenceran terhadap beban pencemar menurun. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi parameter pencemar, terutama BOD dan COD, meskipun sumber pencemar relatif sama dengan periode lainnya.

Kualitas Udara

Lokasi pemantauan kualitas udara tahun 2025 dilakukan di Empat area (Transportasi, Industri, Permukiman, dan Perkantoran/Komersil) masing-masing dua titik pemantauan dan dilakukan selama 2 periode. Periode 1 di bulan Mei, dan periode 2 di bulan September Oktober.

Tabel 2.84.
Hasil Uji Udara Metode *Passive Sampler*

Peruntukan	Lokasi Titik Pantau	Periode	Konsentrasi		
			NO ₂ (µG/M3)	SO ₂ (µG/M3)	PM2,5 (µG/M3)
TRANSPORTASI	Jl. Ir. H. Djuanda No. 82 Tasikmalaya (Pos Polisi Rancabango)	1	20,56	12,69	11,59
		2	23,48	11,97	11,59
	Jl. RE. Martadinata No.20 Panglayungan Cipedes Tasikmalaya	1	10,7	9,7	11,59
		2	11,7	10,2	11,59
INDUSTRI	Jl. Raya Mangin KM. 1400 Bungursari Tasikmalaya (Depan Mandiri Beton)	1	17,33	19,46	11,59
		2	15,01	10,15	11,59
	Jl. Saguling Babakan Karsamenak-Kawalu	1	12,8	15,6	11,59
		2	13,8	15,3	11,59



Peruntukan	Lokasi Titik Pantau	Periode	Konsentrasi		
			NO ₂ (µG/M3)	SO ₂ (µG/M3)	PM2,5 (µG/M3)
PERMUKIMAN	Jl. Paseh Gg. Cigaraja 1 Tuguraja Cihideung Tasikmalaya (Depan Rumah Ibu Elin)	1	10,07	7,56	11,59
		2	9,75	7,26	11,59
	Jl. Raya Nusa Indah No. 21, Perumnas Cisalak Nagarasari - Cipedes	1	3,79	4,52	11,59
		2	3,37	4,26	11,59
PERKANTORAN/ KOMERSIAL	Jl. Pasar Wetan Aryasari Kec. Cihideung Tasikmalaya (Pos Polisi Mayasari Plaza)	1	15,3	5,14	11,59
		2	8,23	9,35	11,59
	Jl. Mesjid Agung No. 1, Yudanegara Tawangan	1	0	0	11,59
		2	7,95	6,65	11,59
Rata-rata Konsentrasi			12,56	10,23	11,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata konsentrasi parameter kualias udara Kota Tasikmalaya untuk NO₂ : 12,56 µg/M³, SO₂ :10,23 µg/M³ dan PM 2,5 23 µg/M³: 11,59. Jika melihat perbandingan nilai untuk NO₂ , SO₂, dan PM 2,5: 11,59 di masing masing lokasi, terlihat bahwa area transportasi memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan area lainnya hal tesebut disebabkan oleh aktifitas kegiatan transportasi yaitu dominasi aktivitas kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas dan partikel secara langsung. Selain itu, kondisi lalu lintas yang padat dan minimnya vegetasi menyebabkan akumulasi polutan di udara ambien, sehingga kualitas udara di area transportasi menjadi lebih buruk dibandingkan dengan area lain.

Tabel 2.85.
Indeks Kualitas Udara Tahun 2025

Parameter	Rerata NO ₂ , SO ₂ dan PM _{2,5}	BMUA Tahunan (µG/M3)	Indeks
NO ₂	12,56	50	0,25
SO ₂	10,23	45	0,23
PM _{2,5}	11,59	15	0,77
<i>I</i> _{INA}			0,42
Indeks Kualitas Udara (IKU)			79,44

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan data hasil pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler* dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kementrian Lingkungan Hidup dapat diketahui nilai IKU Kota Tasikmalaya sebesar 79,44 termasuk dalam kategori sedang, dengan nilai rerata indikator di bawah baku mutu.

Kategori kualitas udara sedang memeplihatkan kualitas udara masih memenuhi fungsi dasar (udara masih layak dihirup oleh masyarakat umum, tidak menimbulkan dampak Kesehatan akut secara luas dan aktivitas sehari-hari masih dapat berlangsung normal. Namun dengan kategori sedang sudah ada



tekanan pencemaran terutama dari emisi kendaraan bermotor dan aktivitas perkotaan, sehingga perlu ada pengendalian terhadap aktivitas tersebut. Pada Tabel berikut ini diperlihatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.86.
Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Tahun									
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Air (IKA)	53,54 (Sedang)	65,75 (Sedang)	53,60 (Sedang)	35,33 (Kurang)	53,70 (Sedang)	38,44 (Kurang)	48,60 (Kurang)	39,33 (Kurang)	65,09 (Sedang)	67,03 (Sedang)
Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,00 (Baik)	83,45 (Baik)	79,60 (Baik)	82,26 (Sedang)	80,5 (Baik)	83,72 (Baik)	81,18 (Baik)	86,64 (Baik)	63,64 (Sedang)	79,44 (Sedang)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Dari tabel di atas diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir, IKU di Kota Tasikmalaya berada pada kategori baik (berdasarkan rentang nilai AQI), hal ini berarti kualitas udara di Kota Tasikmalaya masih cukup baik. Akan tetapi pada tahun 2025 nilai Indeks Kualitas Udara terdapat penurunan target dan penurunan capaian. Hal ini dikarenakan ada perubahan formulasi rumus hitungan. Sedangkan untuk kualitas air, mengalami kenaikan nilai serta peningkatan kategori. Pada tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Air mencapai 39,33 dengan kategori kurang, sedangkan tahun 2025 mencapai nilai 65,09 dengan kategori sedang. Hal ini membuktikan bahwa adanya perubahan kualitas air di Kota Tasikmalaya menjadi lebih baik.

• **Penanganan Pengaduan**

Ada beberapa pengaduan permasalahan lingkungan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. Tabel 2.85. berikut ini menunjukkan beberapa pengaduan yang berhasil ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.87.
Penanganan Pengaduan Tahun 2021 – 2025

Penanganan Pengaduan	Tahun					Jumlah
	2021	2022	2023	2024	2025	
	6	6	10	13	12	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan tabel 2.85. di atas, jumlah pengaduan yang berhasil ditangani oleh Dinas lingkungan Hidup dari tahun-ketahun mengalami peningkatan dan rata-rata dari tahun 2023 s.d 2025 sebanyak 12 pengaduan, hal tersebut menunjukkan sebagai peningkatan efektivitas pengelolaan lingkungan, serta tumbuhnya kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan.

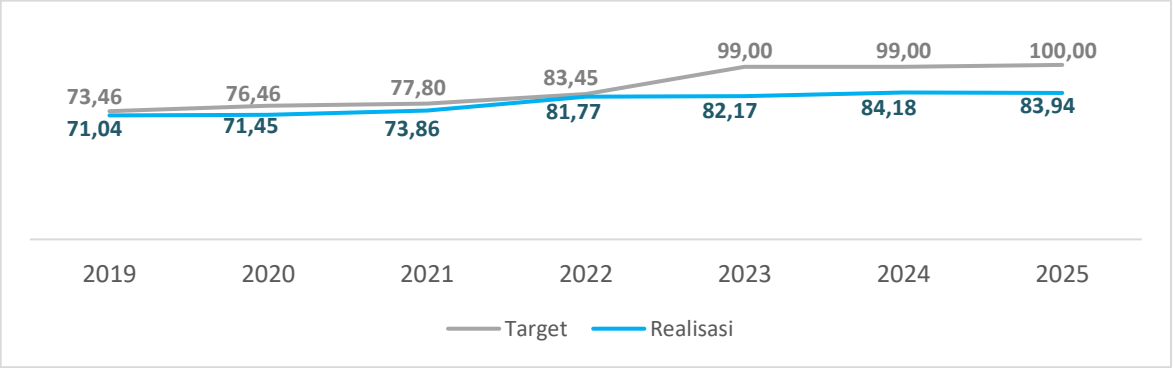
• **Pengelolaan Persampahan**

Pengelolaan persampahan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui dua langkah, yaitu penanganan dan pengurangan sampah. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka setiap tahunnya jumlah sampah akan semakin meningkat pula. Timbulan sampah di Kota Tasikmalaya pada tahun



2025 adalah 124.254,94 ton/tahun atau 340,42 ton/hari, sedangkan capaian pengelolaan sampah, yaitu sebesar 286,61 ton/hari atau 104.612,20 ton/tahun. Dengan demikian capaian pengelolaan sampah baru mencapai 83,94 % dari timbunan sampah keseluruhan pada tahun 2025. Gambar 2.32. memperlihatkan capaian pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya.

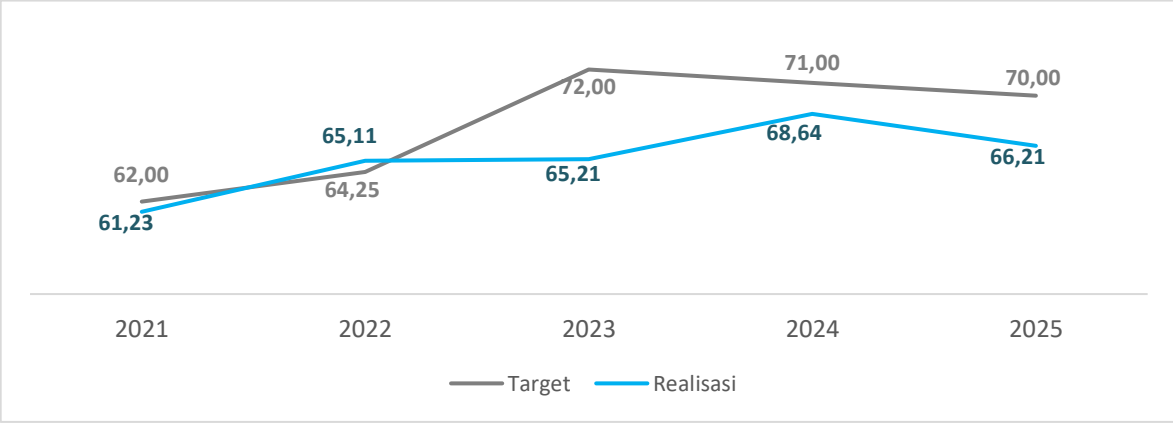
Gambar 2.37.
Persentase Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Apabila melihat Gambar di atas, capaian pengelolaan sampah selama tahun 2019-2025 menunjukkan trend yang meningkat walaupun masih di bawah target yang ditetapkan. Adapun perkembangan dalam penanganan dan pengurangan sampah selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

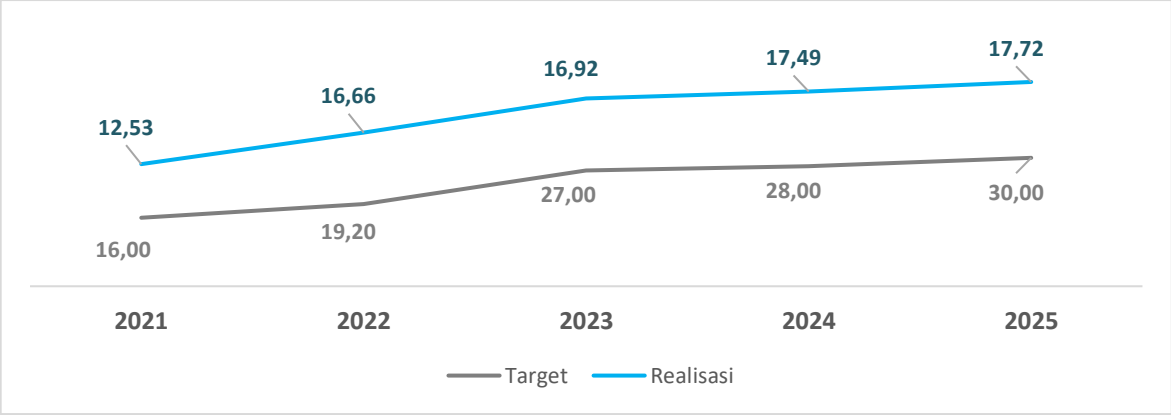
Gambar 2.38.
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Jika melihat grafik penanganan sampah di atas, diketahui bahwa selama periode 2021 – 2025 capaian penanganan sampah mendekati target yang ditetapkan, bahkan pada tahun 2022 dapat melebihi target. Pada tahun 2023 capaian penanganan sampah juga terlihat sedikit meningkat dari tahun 2022, namun tingkat capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kemudian di tahun 2024 capaian penanganan sampah meningkat dan mencapai capaian sebesar 68,64%. Capaian tersebut didongkrak dengan adanya kegiatan penanganan sampah yang melibatkan banyak pihak baik itu Masyarakat, instansi pemerintah, Perusahaan dan lain sebagainya. Pada tahun 2025 capaian penanganan sampah mengalami penurunan dikarenakan sampah sudah terkelola di sumber oleh sejumlah Masyarakat serta pelayanan persampahan yang masih belum merata di Kota Tasikmalaya.

Gambar 2.39.
 Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Sedangkan untuk pengurangan sampah, grafik di atas menunjukkan bahwa capaian pengurangan sampah masih belum mencapai target yang ditetapkan. Akan tetapi dari tahun ketahunnya capaian pengurangan sampah mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Hal ini disebabkan pengurangan sampah atau pengelolaan sampah secara mandiri dari sumbernya belum menjadi pola hidup atau kebiasaan pada masyarakat Kota Tasikmalaya, sehingga capaian pengurangan sampah masih rendah dan belum bisa mencapai target. Namun demikian, upaya terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam pengelolaan sampah pada sumbernya, yaitu dengan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai program, di antaranya pembentukan bank sampah, sedekah sampah, budidaya maggot, dan program Gedong Resik.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya diikuti oleh jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang mendukung agar tidak terjadi penumpukan sampah. Penyebab kondisi penumpukan sampah pada beberapa wilayah dikarenakan sistem pengangkutan sampah kurang efektif dan efisien. Pada Tabel 2.86. dapat dilihat jenis dan jumlah sarana pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.88.
 Sarana Pengangkutan Persampahan Tahun 2025

No.	Jenis	Kondisi				Jumlah
		Baik	Layak	Tidak Layak	Rusak	
1	Dump Truck	5	15	7	-	27
2	Arm roll	3	8	-	-	11
3	Truck Engkel	-	2	-	-	2
4	Pick Up	3	-	2	-	5
5	Motor Roda 3	4	8	12	1	25
6	Kontainer Amroll	30	33	10	-	73

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Selain sarana pengangkutan sampah, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan sarana alat berat. Berikut sarana alat berat yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tasikmalaya.



Tabel 2.89.
Sarana Alat Berat Persampahan Tahun 2025

No.	Jenis	Kondisi		Jumlah	Keterangan
		Layak	Rusak		
1	Bulldozer	3	1	2	1 rusak berat 1 sudah masuk Lelang 2026
2	Eksavator	2	1	1	1 rusak ringan masi dipergunakan, perlu perbaikan segera sebelum rusak berat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

Pengelolaan sampah di TPA Ciangir saat ini masih menggunakan sistem yang paling sederhana yaitu open dumping. Namun Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya untuk membenahi sistem pengelolaan yang ada di TPA Ciangir. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya:

- 1. Jalan operasional**
Jalan operasional akan dibangun berupa jalan lingkaran pada tahun 2026. Selain untuk sarana pengawasan (jalur inspeksi), badan jalan lingkaran yang dibuat dengan bahan tanah dicampur dengan sampah lama sebagai agregat menjadi media control landfill yang mengurangi timbunan sampah secara signifikan. Jalan lingkaran juga digunakan sebagai jalur yang akan menampung truk armada sebelum buang di landasan sehingga antrian tidak akan mengular keluar gerbang.
- 2. Saluran pengumpulan lindi**
Saluran pengumpul lindi telah dibuat melalui beberapa storbak dengan menggunakan media ijuk sebagai filter pada setiap storbak sebelum masuk ke kolam utama ipal sehingga pengurangan kepekatan telah diupayakan sebelum air lindi masuk ke kolam utama.
- 3. Instalasi pengolahan lindi**
Sudah terbangun instalasi pengolahan lindi pada fasilitas IPAL di TPA dengan kelengkapan berupa bangunan genset, mesin genset, mesin pencampur serta alat2 lainnya yang diperlukan untuk pencampur bahan kimia. Selain itu, telah diajukan pula permohonan personal untuk Petugas Operasional IPAL (POPAL) kepada pihak BKPSDM untuk dilakukan pelatihan petugas sehingga kedepan operasional dapat berjalan dengan baik. Operasional pencampuran bahan kimia pada fasilitas IPAL menunggu terpasangnya instalasi Listrik.
- 4. Zona pengurangan (landfill)**
Zona pengurangan di TPA Ciangir masih tersedia zona aktif sekitar 25% dari keseluruhan landfill. Masih menggunakan sistem open dumping di zona pembuangan, namun luasan lahan lainnya sudah dilakukan proses control landfill dengan melakukan penutupan menggunakan media tanah. Salahsatu control landfill yang berhasil dilakukan di TPA Ciangir adalah memanfaatkan media tanah dengan campuran sampah lama sebagai agregat badan jalan inspeksi.
- 5. Jembatan timbang**
Bangunan dan alat jembatan timbang lama yang telah rusak akibat tertimbun gunung sampah di masa lalu, saat ini telah tergantikan kembali dengan fasilitas bangunan jembatan timbang beserta alat timbangan yang baru. Namun sementara belum beroperasi menunggu terlaksananya pembangunan jalan lingkaran TPA tahun 2026.



6. Pemasangan Bronjong sebagai landasan buang

Telah dibuat landasan buang pada zona aktif landfill dengan menggunakan media Bronjong dengan juas 20m x 16m sehingga pergerakan armada truk diatas landasan dapat leluasan saat mengantri dan membuang serta tidak perlu mengantri sampai gerbang.

7. Umur TPA

Berdasar hasil perhitungan keteknik-sipilan, dengan kondisi : 1. Luas lahan tersedia; 2. Timbunan sampah eksisting; 3. Timbulan sampah saat ini; maka diperkirakan usia TPA masih sampai 4,5 - 5 tahun kedepan. Dibutuhkan inovasi dalam hal pemanfaatan sampah lama supaya level ketinggian berkurang secara signifikan. Salahsatu harapan adalah rencana pembangunan sarana TPST yg bersumber dari DAK Kemen PU tahun 2027.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah, telah dikembangkan gerakan 3R melalui kegiatan bank sampah yang dimulai dari tingkat paling rendah yaitu tingkat RW sampai dengan tingkat kecamatan. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan dibentuknya bank sampah di setiap kelurahan melalui anggaran Dana Kelurahan, sehingga sampai dengan tahun 2025 jumlah bank sampah, baik bank sampah induk maupun unit, dan TPS3R di Kota Tasikmalaya mencapai 71 unit. Secara lebih jelas jumlah bank sampah diperlihatkan pada Tabel 2.88.

Tabel 2.90.

Jumlah Bank Sampah di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2025

Jenis Bank Sampah	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Bank Sampah Induk	1	1	1	1	1
Bank Sampah Unit	16	21	28	64	67
TPS3R	2	2	2	3	3
Jumlah	19	24	31	68	71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2026.

6) Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Adapun capaian indikator kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.91.

Capaian Indikator Kinerja

Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran penduduk + Persentase Kepemilikan Dokumen pencatatan sipil/2	%	98	98,28
Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan/jumlah lembaga yang telah melakukan perjanjian kerjasama x 100%	%	100	100



Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan yang terlayani sesuai standar	Jumlah kepemilikan KTP + kepemilikan KIA + kepemilikan IKD / 3 x 100%	%	100	102,96
Persentase Kepemilikan Dokumen Permohonan Pencatatan Sipil yang terlayani sesuai standar	Kepemilikan Akte Kelahiran + kepemilikan Akte Kematian + kepemilikan Akte Perceraian + Kepemilikan Akta Perkawinan / 4 x 100%	%	99,03	109,12
Persentase Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis Sistem Informasi/Jumlah sistem informasi x 100%	%	100	100
Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	Jumlah Buku Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain + pengelolaan Aplikasi Website Profil Data Perkembangan Kependudukan (SIMANTAP WEB GIS) / 3 x 100	%	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, 2026.

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya melaksanakan sebanyak 5 (Lima) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2025 sejumlah Rp 10.851.978.803 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 10.796.626.534 (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 99,49 persen.

Program Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pelayanan pendaftaran penduduk. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pendaftaran Penduduk. Target program pada tahun 2025 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 102,96 persen, dan capaian kinerja program sebesar 102,96 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 356.823.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 356.603.700,00 atau sebesar 99,94 persen.

Program Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pencatatan Sipil. Target program pada tahun 2024 adalah 99,1 persen. Realisasi program sebesar 107,76 persen, dan capaian kinerja program sebesar 109,12 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 372.153.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 369.983.600,00 atau sebesar 99,42 persen.

Realisasi dari 2 (dua) kegiatan tersebut melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada Bidang Pendaftaran Penduduk, melakukan penyisiran masyarakat yang akan memasuki usia 17 tahun dan melakukan perekaman bagi penyandang disabilitas maupun ODGJ. Begitu pula pada Bidang Pencatatan Sipil, yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, untuk memudahkan masyarakat dalam membuat akte kelahiran dan updating Kartu Keluarga.



Selain kepemilikan dokumen kependudukan terdapat indikator tambahan sebagai pendukung tercapainya sasaran perangkat daerah terkait pemanfaatan data kependudukan yaitu persentase pemanfaatan data penduduk bagi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Indikator ini dilaksanakan dalam Program Pengelolaan Informasi Adminsitasi Kependudukan. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi Adminsitasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Target program pada tahun 2025 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 307.221.125,00 dengan realisasi sebesar Rp 300.801.981,00 atau sebesar 97,91 persen.

Program Pengelolaan Profil Kependudukan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi Adminsitasi Kependudukan. Target program pada tahun 2025 adalah 100 persen. Realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 28.425.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.424.900,00 atau sebesar 100 persen.

Sasaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Indikator program ini adalah Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah, dimana melalui anggaran sebesar Rp 9.787.356.328,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.740.812.353,00 (99,52%) dengan capaian kinerja 73,04 poin dari target 83,35 poin. Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

7) **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Adapun capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.92.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Indikator	Formulasi	Satuan	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase rencana aksi pengendalian penduduk yang diterapkan	Jumlah rencana aksi yang direncanakan terhadap Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan $\times 100\%$	%	100	100	100	100
ASFR (Age Specific Fertility Rate) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun	Jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15–19 tahun/Jumlah perempuan usia 15–19 tahun $\times 1.000$	%	9,15	9,19	12,3	8,81
Total Fertility Rate (TFR)	$i=7$ $TFR= 5 \times \sum ASFR i$ $i=1$	%	2,00	1,92	2,00	2,00
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Realisasi pelayanan Kb MKJP/Target Perkiraan Permintaan	%	73,07	73,51	67,67	65,28



Indikator	Formulasi	Satuan	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Masyarakat (PPM KB) x100					
Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Un Met Need)	Unmeet need (ingin anak ditungu (iat)+ tidak ingin anak lagi (tial)/PUS x 100	%	13,25	12,05	13	5,02

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, 2026.

Capaian indikator kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tasikmalaya menunjukkan kinerja yang secara umum cukup baik dan terkendali. Hal ini terlihat dari konsistensi capaian 100% pada indikator pelaksanaan rencana aksi, serta keberhasilan menjaga Total Fertility Rate (TFR) pada level ideal (2,00) yang mencerminkan kondisi fertilitas yang stabil. Selain itu, terjadi perbaikan signifikan pada Angka Kelahiran Remaja (ASFR usia 15–19 tahun) yang menurun pada tahun 2025, mengindikasikan efektivitas program edukasi dan pendewasaan usia perkawinan. Indikator unmet need juga menunjukkan penurunan yang sangat baik, yang berarti akses dan pemenuhan kebutuhan ber-KB masyarakat semakin meningkat.

Namun demikian, terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian, khususnya pada Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) yang mengalami penurunan dan tidak mencapai target pada tahun 2025. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi keberlanjutan pengendalian kelahiran apabila tidak segera diintervensi. Selain itu, adanya ketidaksinkronan antara penurunan unmet need dan mCPR perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data dan efektivitas program di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelayanan KB modern, peningkatan kualitas pendataan, serta optimalisasi edukasi dan advokasi kepada masyarakat guna menjaga keberlanjutan capaian program.

8) **Urusan Perhubungan**

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarannya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.93.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perhubungan

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rasio Konektivitas Kab/Kota	%	-	-	64	62	64,29	63,19
2	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	poin	-	-	0,36	0,35	-	-
3	V/C Rasio	Poin	-	-	-	-	0,345	0,34
4	Tingkat Keselamatan Transportasi	%	-	-	-	-	64,76	64,81
5	Persentase kenyamanan berlalulintas dan angkutan umum	%	98	135,25	-	-	-	-



No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	100	63,66	-	-	-	-
7	Persentase pelayanan andalin	%	100	161	-	-	-	-
8	Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan	%	100	164,50	-	-	-	-
9	Persentase Pelayanan angkutan umum	%	85,91	110,58	-	-	-	-
10	Persentase kebutuhan prasarana perhubungan yang terpenuhi	%	82,8	82,9	84,94	85	-	-
11	Persentase ruas jalan yang lancar	%	57,14	57,30	58,93	59,15	-	-
12	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	%	77,32	77,51	78,32	78,73	-	-
13	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	-	-	-	-	50,32	51,96
14	Konektivitas Darat	km	-	-	-	-	448	451

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2026

Pada tahun 2025, Dinas Perhubungan mengalami perubahan indikator kinerja dikarenakan adanya penyusunan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 yang berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025, indikator kinerja utama Dinas Perhubungan adalah Rasio Konektivitas Kab/Kota, V/C Rasio, dan Tingkat Keselamatan Transportasi. Untuk indikator program adalah Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal dan Konektivitas Darat.

Pada tahun 2025 capaian indikator Rasio Konektivitas Kota Tasikmalaya sebesar 63,19% dari target 64,29% (capaian 98,2%). Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas jalan hampir mencapai target yang ditetapkan. Namun perlu ditingkatkan lagi dengan optimalisasi melalui penguatan konektivitas dan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

Pada tahun 2025 capaian indikator V/C Rasio Kota Tasikmalaya sebesar 0,340 poin dari target sebesar 0,345 poin (capaian 100%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi lalu lintas di Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 masih berada dalam kategori baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan sedikit lebih baik karena nilai V/C Ratio yang lebih rendah menunjukkan tingkat kepadatan lalu lintas yang relatif lebih terkendali.

Pada Tahun 2025 capaian Tingkat keselamatan Transportasi sebesar 64,81% Capaian tingkat keselamatan transportasi tersebut menunjukkan bahwa kondisi keselamatan transportasi sudah berada pada tingkat yang cukup baik, namun masih



diperlukan berbagai upaya peningkatan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Untuk indikator program Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal dan Konektivitas Darat. Pada tahun 2025, capaian indicator program Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal sebesar 51,96% dan capaian indicator Konektivitas Darat sebesar 451 km. Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan serta dukungannya terhadap konektivitas jaringan transportasi darat, yang berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta peningkatan aksesibilitas antar wilayah.

Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan jalan di Kota Tasikmalaya tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94.
Jumlah Perlengkapan Jalan Dari Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Satuan	Jumlah				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Rambu terpasang	Unit	2.006	2.036	2.063	2.063	2.063
2	Jumlah Marka Jalan terpasang	m ²	3.622,2	4.123	4.123	4.123	4.123
3	Jumlah <i>Traffic light</i> terpasang	Lokasi	21	21	21	21	21
4	Jumlah <i>Warning Light</i> terpasang	Lokasi	49	49	49	49	49
5	Jumlah PJU terpasang	Unit	11.030	11.624	12.057	12.284	12.812
6	Jumlah Halte/shelter terbangun	Unit	33	33	33	33	33
7	Jumlah <i>Guardrail</i> terbangun	Meter	261	261	261	261	261
8	Jumlah ATCS terpasang	Unit	24	24	24	24	24
9	Jumlah Terminal terbangun	Buah	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2026

Berdasarkan data pada tabel diatas tahun 2022–2024, terdapat beberapa perlengkapan jalan yang tidak mengalami penambahan jumlah secara signifikan. Fasilitas yang stagnan meliputi *Traffic Light*/APILL (21 lokasi), *Warning Light* (49 lokasi), Halte/Shelter (33 unit), *Guardrail* (261 m²), ATCS (24 unit), dan Terminal (5 unit). Selain itu, marka jalan tidak mengalami penambahan sejak tahun 2022 (4.123 m²), dan jumlah rambu lalu lintas tidak bertambah pada tahun 2024.

Tabel 2.95.
Kebutuhan, Ketersediaan, dan Kondisi Perlengkapan Jalan Tahun 2025

No	Fasilitas Kelengkapan Jalan	Satuan	Kebutuhan	Terpasang	Kondisi	
					Baik	Rusak
1	Rambu-Rambu Lalu Lintas	unit	1.750	1.632	877	755
2	Marka Jalan	m ²	4.022,29	4.000	3.400	600



No	Fasilitas Kelengkapan Jalan	Satuan	Kebutuhan	Terpasang	Kondisi	
					Baik	Rusak
3	Penerangan Jalan Umum (PJU)	unit	14.000	13.010	11.510	1.500
4	Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross)	buah	120	461	176	285
5	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	buah	12	12	8	4
6	Guard Rail (Pagar Pengaman)	meter	750	261	261	-
7	Cermin Tikungan	buah	20	2	2	-
8	Pita Penggaduh	buah	25	12	12	-
9	Ruang Parkir pada Badan Jalan	km	33	15	15	-
10	Jumlah Kamera ATCS	kamera	61	41 Kamera (22 Sp, 3 Ruas, 2 Taman)	23 kamera	18 Kamera 10 Lokasi

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2026.

Kota Tasikmalaya memiliki keseluruhan jalan sepanjang 122,002 km, dimana jaringan jalan menurut status terdiri dari jalan nasional dengan panjang 11,000 km, jalan provinsi dengan panjang 32,332 km, jalan kota dengan panjang 78,670 km.

Pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka angka permintaan terhadap jasa transportasi semakin tinggi dan apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kemacetan.

Pada tabel fasilitas kelengkapan jalan, terlihat perbandingan antara kebutuhan, jumlah terpasang, serta kondisi fasilitas. Untuk rambu lalu lintas, dari kebutuhan sebanyak 1.750 unit, telah terpasang 1.632 unit, dengan kondisi 877 unit dalam keadaan baik dan 755 unit rusak. Marka jalan menunjukkan kebutuhan 4.022,29 m² dengan realisasi terpasang 4.000 m², di mana 3.400 m² dalam kondisi baik dan 600 m² dalam kondisi rusak.

PJU tercatat telah terpasang sebanyak 13.010 unit, kebutuhan sebesar 14.000 unit, dengan 11.510 unit dalam kondisi baik dan 1.500 unit rusak. Fasilitas penyebrangan (zebra cross) juga melampaui kebutuhan (461 terpasang dari kebutuhan 120), namun masih terdapat 285 unit dalam kondisi rusak.

Beberapa fasilitas lainnya seperti APILL, guard rail, cermin tikungan, pita penggaduh, dan ruang parkir pada badan jalan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan, serta perlunya perhatian terhadap kondisi fasilitas yang mengalami kerusakan.

Dari penjelasan diatas terkait dengan fasilitas pelengkap lalu lintas jalan dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penambahan jumlah yang signifikan pada beberapa rambu-rambu lalu lintas. Penyediaan perlengkapan jalan beberapa tahun terakhir difokuskan pada penyediaan dan rehabilitasi PJU. Untuk tahun kedepan sudah direncanakan untuk penambahan jumlah rambu-rambu lalu lintas agar jumlah nya sesuai dengan kebutuhan.

Selain infrastruktur jalan serta fasilitas kelengkapannya, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal. Kewenangan Kota untuk pengelolaan terminal adalah terminal penumpang tipe C yang saat ini berjumlah 4 terminal serta 1 terminal tipe A



yang dikelola oleh pemerintah pusat. Prasarana terminal angkutan penumpang di Kota Tasikmalaya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.96.
Terminal Angkutan Penumpang Tahun 2025

No	Nama Terminal	Tipe	Luas (ha)	Instansi Pengelola	Kondisi
1	Terminal Indihiang	A	7,50	Kementerian Perhubungan	Baik
2	Terminal Pancasila	C	0,30	Dinas Perhubungan	Tidak Sesuai Standar
3	Terminal Padayungan	C	0,23	Dinas Perhubungan	Tidak Sesuai Standar
4	Terminal Cikurubuk	C	0,29	Dinas Perhubungan	Tidak Sesuai Standar
5	Terminal Awipari	C	1,49	Dinas Perhubungan	Tidak Sesuai Standar

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2026

Menurut Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 550/kep.969–Dishub/2019, Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe C dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- Terminal Pancasila: Jl. A. Yani, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang
- Cibeureum: Jl. Letkol Basyir Surya, Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum.
- Cikurubuk: Jl. Residen Ardiwinangun, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi.
- Padayungan: Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung.
- Batu Nungku: Jl. Mangkubumi–Indihiang, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi.
- Rest Area Urug: Jl. Syeikh Abdul Muhyi, Kelurahan Urug , Kecamatan Kawalu
- Indihiang: Jl. Letjend Ibrahim Adjie, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang
- Cigeureung: Jl. Cigeureung, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes
- Setiawargi: Jl. Setiawargi, Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari
- Nyantong: Jl. Siliwangi, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang
- Cilembang: Jl. Cilembang, Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung
- Sirnagalih: Jl. Sirnagalih, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang

Terkait dengan sarana yang dibutuhkan dalam transportasi yaitu adanya alat transportasi yang baik. pada Kota Tasikmalaya terdapat alat transportasi berupa angkutan umum berupa Angkutan Kota (Angkot), Angkutan Perbatasan (Angtas), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), serta Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP). Adapun jumlah trayek angkutan umum di Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97.
Jumlah Trayek Angkutan Umum Tahun 2025

No.	Trayek	Jumlah Trayek eksisting	Jumlah Usulan Trayek Baru
1	Angkutan Kota (Angkot)	21	3
2	Angkutan Perbatasan (Angtas)	44	1
3	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	43	9



No.	Trayek	Jumlah Trayek eksisting	Jumlah Usulan Trayek Baru
4	Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)	20	-
Total		128	13

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2026.

Dapat terlihat dari tabel diatas jumlah keseluruhan trayek angkutan kota yang ada di Kota Tasikmalaya adalah 128 trayek yang dibagi dalam 4 jenis angkutan yaitu 21 trayek untuk angkot, 44 trayek angkutan perbatasan, 43 trayek AKDP, dan 20 trayek AKAP. Selain itu akan diusulkan trayek baru sebanyak 13 trayek. Untuk rincian angkutan kota sebanyak 13 trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.98.
Data Trayek Angkutan Kota Tahun 2024 - 2025

No	No/ kode trayek	Panjang trayek (km)	2024					2025				
			Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum					Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum				
			Alokasi	Realisasi	Status		Sisa	Alokasi	Realisasi	Status		Sisa
					Aktif	Non Aktif				Aktif	Non Aktif	
1	01	27	91	91	21	70	0	91	91	24	67	0
2	02	16	52	49	6	43	3	52	49	1	48	3
3	03	19,5	125	122	31	91	3	125	122	29	93	3
4	04	23	100	92	32	60	8	100	92	25	67	8
5	05	23,5	150	141	20	121	9	150	141	19	122	9
6	06	23	33	21	6	15	12	33	21	5	16	12
7	07	23	70	63	18	45	7	70	63	8	55	7
8	08	23	70	60	2	58	10	70	60	2	58	10
9	09	25	56	27	4	23	29	56	27	2	25	29
10	09 A	30	35	32	11	21	3	35	32	9	23	3
11	010	34,5	71	67	6	61	4	71	67	7	60	4
12	011	16	19	19	6	13	-	19	19	2	17	-
13	012	15	28	23	8	15	5	28	23	6	17	5
14	012 A	20	4	2	-	2	2	4	2	-	2	2
15	013	26	50	47	4	43	3	50	47	1	46	3
16	014	33	20	16	3	13	4	20	16	1	15	4
17	015	44	35	31	11	20	4	35	31	5	26	4
18	016	28	35	21	-	-	14	35	21	-	21	14
19	017	13	35	35	5	30	-	35	35	3	32	-
20	018	19,5	40	25	7	18	15	40	25	6	19	15
21	019	28	19	18	5	13	1	19	18	2	16	1
Jumlah			775	136	206	775	136	775	136	157	845	136

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2026.

Selain hal-hal yang telah diuraikan, Dinas Perhubungan bertugas pula untuk menguji kendaraan umum bermotor. Pengujian kendaraan umum bermotor dilakukan dengan memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun rincian data ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel 2.99.
Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2023 - 2025

TAHUN	MOBIL BARANG						KERETA GANDENGAN	KERETA TEMPELAN	MOBIL BUS	KHUSUS	MOBIL PENUMPANG	TOTAL					
	KECIL		SEDANG		BESAR												
	U	BU	U	BU	U	BU							U	BU	U	BU	U
2023	2.357	4.880	1.223	1.933	541	212	0	13	30	169	1.689	214	64	23	142	9	13.499
2024	2.491	4.607	1.016	1.780	579	173	6	-	168	-	1.687	-	93	-	136	-	12.739
2025	2359	3811	848	1.590	549	146	0	5	14	144	1.326	214	51	19	109	4	11196

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2026.

Dapat terlihat dari tabel tersebut bahwa jumlah kendaraan wajib uji dari tahun 2023-2025 terus mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran pemilik kendaraan terhadap keselamatan. Hal ini dikarenakan kendaraan dirasa masih berjalan dengan normal sehingga mengabaikan kewajiban uji kendaraan. Dari data-data tersebut setiap tahunnya diwajibkan untuk dilakukan uji. Adapun realisasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100.
Realisasi Kegiatan Ijin Trayek Aktif dan Jumlah Kendaraan Lulus Uji
Dinas Perhubungan 2023-2025

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun		
			2023	2024	2025
1	Ijin trayek aktif	Unit	262	206	217
2	Jumlah kendaraan lulus uji	Unit	13.499	12.789	11.196

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2026

Berdasarkan jumlah kendaraan yang melakukan izin trayek di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023-2025 mengalami penurunan dimana kendaraan aktif yang melakukan perpanjangan izin trayek pada tahun 2025 sebesar 217 kendaraan. Hal ini menunjukkan kenaikan 11 kendaraan dari tahun 2024, namun angka ini masih jauh dibandingkan tahun 2023 dikarenakan menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, berdampak terhadap disiplin pemilik/awak angkutan kota untuk memperpanjang izin trayek, dan adanya eksistensi kendaraan angkutan penumpang berbasis online/ojol.

Untuk jumlah kendaraan yang lulus uji juga mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini dikarenakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa akan dihapusnya retribusi pengujian kendaraan bermotor, ini bisa dibuktikan mulai bulan September Tahun 2023 pelayanan uji kendaraan bermotor semakin berkurang sampai bulan Desember 2023. Selain itu, kurangnya pengawasan dilapangan terhadap kendaraan angkutan barang dan angkutan orang yang tidak melakukan uji, sehingga mereka tidak sadar untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor.



9) **Urusan Komunikasi Dan Informatika**

Adapun capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.101.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian Predikat Indeks SPBE	Capaian Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	Predikat	2,90 (Baik)	3,25 (Baik)	-	-	-	-
Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan SPBE yang dilakukan secara online dan terintegrasi/ Jumlah Layanan SPBE yang ada*100	%	60		60		-	-
Persentase Nama Domain dan Subdomain yang aktif dari seluruh domain dan subdomain yang ada	Jumlah Subdomain yang aktif/ Jumlah subdomain yang ada*100	%	100	100	-	-	-	-
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	Poin	-	-	3,6	3,96	4	4,18
Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur SPBE	(Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan infrastruktur SPBE / Jumlah Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya) x 100%	%	-	-	100	100	100	100
Persentase Pemenuhan Dokumen Evidence Penilaian SPBE	Realisasi Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang terpenuhi/ Jumlah Total Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang harus dipenuhi x 100	%	-	-	100	100	100	100
Persentase Pemenuhan unsur-unsur Sistem Pemerintahan	Jumlah Unsur SPBE yang terpenuhi/ Jumlah seluruh unsur spbe yang menjadi	%	100	100	-	-	-	-



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
n Berbasis Elektronik	urusan kominfo*100							
Tingkat Kematangan Kebijakan SPBE	Nilai Kematangan Kebijakan SPBE pada LHE SPBE	Level	-	-	4		4	
Tingkat Kematangan Layanan SPBE	Nilai Kematangan Layanan SPBE pada LHE SPBE	Level	-	-	4		4	
Tingkat Kematangan Tatakelola SPBE	Nilai Kematangan Tata Kelola SPBE pada LHE SPBE	Level	-	-	3		4	
Capaian Predikat Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Capaian Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi	%	80 (Informatif)	90,14 (Informatif)	-	-	-	-
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Capaian Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi	%	80 (Informatif)		-	-	-	-
Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	%	80 (Informatif)		-	-	-	-
Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media Komunikasi Publik yang digunakan/Jumlah Media Komunikasi Publik sesuai permenkominfo nomor 8 tahun 2019 pasal 8 ayat 2	%	100		-	-	-	-
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi	Poin	-	-	92	94,08	94,10	95,02



Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	No 1 tahun 2021 yang 15.3 diselenggarakan oleh Komisi Informasi							
Nilai pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai yang dihasilkan pada indikator penilaian indeks keterbukaan informasi publik	Poin			92	94,08	94,10	95,02
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kota yang dibuat/Target jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kota sesuai dengan strategi komunikasi	%	65		-	-	-	-
Persentase layanan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	(Realisasi capaian seluruh subkegiatan / Jumlah target capaian subkegiatan)x100%	%	-	-	92		92,5	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2026

Capaian predikat Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah maupun dalam menjangkau opini serta aspirasi publik. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan konten sebagai bahan informasi yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi publik, baik yang dikelola secara internal maupun melalui kerja sama dengan pihak eksternal.

Capaian Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi, pada Tahun 2023 mencapai 90,14 persen dari target 80,00 persen. Dengan demikian, persentase capaian kinerja sebesar 112,68 persen dan dinyatakan melebihi target yang telah ditetapkan.

Tingginya capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pelaksanaan pelayanan publik yang optimal serta tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! secara efektif dan efisien. Selain itu, penguatan konten informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kanal media komunikasi turut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai keterbukaan informasi.



Atas capaian tersebut, Kota Tasikmalaya memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dari Komisi Informasi Jawa Barat sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pelayanan informasi publik.

Pencapaian indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pemerintah Kota Tasikmalaya memperoleh nilai sebesar 4,18 poin dengan kategori Sangat Baik, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 4,00 poin. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional. Pelaksanaan pemantauan Tahun 2025 menggunakan instrumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas layanan digital, integrasi sistem pemerintahan, penguatan manajemen risiko dan keamanan informasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan konsistensi dalam mendorong transformasi digital pemerintahan guna mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2013 telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Penetapan kebijakan PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas operasional PPID Kota Tasikmalaya, khususnya dalam pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik.

Pembentukan kelembagaan PPID telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 550/Kep.119-Kominfo/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya. Keputusan ini menjadi landasan formal struktur dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, pada Tahun 2022 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 473.2/Kep.02/PPID-Utama tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Sekretariat PPID Utama. Pembentukan Tim PLID ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, percepatan layanan informasi, serta penguatan tata kelola dokumentasi publik secara lebih sistematis dan terstruktur.

Dalam meningkatkan Pelayanan informasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui PPID telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Melalui website <http://ppid.tasikmalayakota.go.id>
2. Help desk/layanan langsung/frontdesk



- 3. Ruang tunggu pelayanan
- 4. Layanan melalui telepon dan email
Nomor tlp : (0265) 7523616
Email : ppid@tasikmalayakota.go.id

Dalam memberikan layanan informasi secara langsung kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pelayanan yang dilaksanakan pada hari kerja (Senin sampai dengan Jumat). Adapun pelayanan informasi secara online dapat diakses melalui website PPID (www.ppid.tasikmalayakota.go.id). Permohonan informasi publik dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.102.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak	Jumlah
2024	28	0	0	-
2025	37	0	0	-

Sumber: Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026

Jumlah permohonan informasi yang masuk di PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2025 permohonan dikabulkan seluruhnya sebanyak 37 permohonan, permohonan dikabulkan sebagian dan tidak dikabulkan atau ditolak sebanyak 0 permohonan.

10) **Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang per-seorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan ke-kayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Undang Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 1). Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2008 salah satu tujuan pemberdayaan UMKM yaitu untuk pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Koperasi dan UMKM tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki peran yang saling mendukung dalam memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya ekonomi kerakyatan. Koperasi juga berperan dalam mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai layanan, seperti penyediaan pembiayaan, pengadaan bahan baku, pemasaran produk, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kongres Koperasi Indonesia pertama kali diselenggarakan di Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 Juni 1947, kongres tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat gerakan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat pasca kemerdekaan. Sebagai penanda peristiwa penting tersebut, dibangunlah Tugu Koperasi Indonesia di Jalan Dr. Moh. Hatta, Kota Tasikmalaya. Tugu ini menjadi simbol sejarah sekaligus pengingat bahwa Tasikmalaya adalah salah satu pusat lahirnya semangat ekonomi kerakyatan di Indonesia. Maka perkembangan Koperasi di Kota Tasikmalaya penting untuk dikembangkan dan dimajukan. Berikut keragaan Koperasi di Kota Tasikmalaya.



Tabel 2.103.

Indikator Kinerja Koperasi Kota Tasikmalaya 2023-2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realiasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Persentase Peningkatan SHU	%	2.5	2.5	5	-15.7	2.9	-0.8
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhdap PDRB				1.4			0.82

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa perkembangan Koperasi di Kota Tasikmalaya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam perubahan Restra Dinas KUKM Perindag Kota Tasikmalaya, ditargetkan persentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya meningkat, namun realisasi persentase peningkatan SHU fluktuatif dari 2023 sampai 2025, berturut-turut -15,7%, 2,9 % dan -0,8%. Pada tahun 2024 persentase peningkatan SHU realisasinya melebihi target 0,4 %, sedangkan pada tahun 2023 dan 2025 tidak terjadi peningkatan bahkan penurunan hal tersebut dilihat dari realisasinya bernilai negatif yaitu di angka -15,7 dan -0.8.

Selain itu berdasarkan indikator Renstra Dinas KUKM Perindag Kota Tasikmalaya 2025-2029, yaitu Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB masih dibawah target, dimana rasio volume usaha koprasi belum berkembang dengan optimal hal tersebut dapat disebabkan jika transaksi anggota menurun, daya beli melemah, atau usaha koperasi tidak berkembang, maka margin usaha ikut turun sehingga hal tersebut dapt berdampak pada SHU menurun.

Volume usaha yang belum optimal dapat disebabkan juga karena meningkatnya kredit bermasalah (khusus koperasi simpan pinjam). Apabila tingkat tunggakan tinggi, koperasi harus membentuk cadangan kerugian. Manajemen dan tata kelola yang kurang optimal, seperti lemahnya pengawasan, perencanaan usaha yang tidak adaptif, atau kurangnya profesionalisme pengelola, dan faktor eksternal ekonomi makro, seperti perlambatan ekonomi daerah, inflasi tinggi, atau gangguan pasar yang mempengaruhi kemampuan anggota dalam bertransaksi. Tabel berikut ini menerangkan data secara rinci keragaan Koperasi di Kota Tasikmalaya.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Tabel 2.104.
Keragaan Koperasi di Kota Tasikmalaya tahun 2023-2025

NAMA KOPERASI	KONDISI KOPERASI									JUMLAH ANGGOTA			JUMLAH PENGURUS			JUMLAH PENGAWAS			JUMLAH KARYAWAN			JMLH MNJR			RAT		
	AKTIF	TDK	JML	AKTIF	TDK	JML	AKTIF	TDK	JML	(ORANG)			(ORANG)			(ORANG)			(ORANG)			(ORANG)					
	2023			2024			2025			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
I. KOPERASI UNIT DESA (KUD)	10	-	10	10	-	10	10	-	10	4.110	4.134	4.143	27	27	27	19	20	20	20	16	14	-	-	-	3	3	3
II. KOPERASI SERBA USAHA	60	45	105	60	45	105	60	45	105	8.899	9.407	10.759	335	335	334	272	269	271	163	165	165	8	7	7	19	11	13
III. KOP. PONDOK PESANTREN	12	34	46	14	34	48	14	33	47	6.138	6.368	6.136	146	152	152	125	131	137	11	19	12	1	1	1	4	4	4
IV. KOPERASI SIMPAN PINJAM																											
4.1. KSP	77	16	93	86	16	102	91	16	107	21.467	22.640	21.456	300	325	341	237	256	274	172	186	187	15	15	15	29	28	26
4.2 KBMT	13	21	34	13	21	34	13	21	34	6.185	6.185	6.191	106	106	106	97	97	97	68	68	68	7	7	7	3	3	1
V. KOPERASI KONSUMSI																											
5.1. KPRI	37	16	53	40	15	55	40	15	55	9.710	9.196	9.153	178	187	187	138	146	146	54	49	49	4	4	4	20	23	20
5.2. KOPKAR :	18	21	39	18	21	39	18	21	39	4.975	4.921	4.930	118	117	116	97	97	97	28	26	40	9	7	8	9	9	9
5.3. KOPERASI ANGKATAN DARAT	2	-	2	2	-	2	2	-	2	1.535	1.555	1.298	10	10	10	6	6	6	8	8	6			-	1	2	2
5.4. KOPERASI ANGKATAN UDARA	1	-	1	1	-	1	1	-	1	173	173	165	3	3	4	2	2	2	3	4	4			-	1	1	1
5.5. KOPERASI KEPOLISIAN	1	-	1	1	-	1	1	-	1	862	855	877	3	3	3	3	3	3	2	2	2			-	1	1	1
5.6. KOPERASI WANITA	6	4	10	6	4	10	6	4	10	1.287	1.247	1.236	32	32	32	24	24	24	7	5	5	1	1	1	2	2	2
5.7. KOPERASI WREDATAMA	1	5	6	1	5	6	1	5	6	486	486	486	17	17	17	17	17	17	3	3	3	1	1	1	0	0	0



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NAMA KOPERASI	KONDISI KOPERASI									JUMLAH ANGGOTA			JUMLAH PENGURUS			JUMLAH PENGAWAS			JUMLAH KARYAWAN			JMLH MNJR			RAT		
	AKTIF	TDK	JML	AKTIF	TDK	JML	AKTIF	TDK	JML	(ORANG)			(ORANG)			(ORANG)			(ORANG)			(ORANG)					
	2023			2024			2025			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
5.8. KOPERASI MAHASISWA/PEMUDA	1	1	2	1	1	2	1	1	2	759	759	759	8	8	6	6	6	6				1	1	1	1	1	1
5.9. KOPERASI LAINNYA																											
5.9.1. KOPERASI WARGA	23	78	101	23	78	101	23	78	101	7.046	7.070	7.064	281	281	281	250	251	249	32	33	33	2	2	2	6	5	5
5.9.2. POKMAS	4	37	41	4	37	41	4	37	41	3.151	3.141	3.118	127	127	127	113	113	113	18	15	15			-	1	1	1
5.9.3. PEPABRI	1	-	1	1	-	1	1	-	1	380	366	360	4	4	4	3	3	3	2	2	2			-	1	1	1
5.9.4. KOP. VETERAN	1	-	1	1	-	1	1	-	1	942	858	814	4	3	3	2	2	2	1	1	1			-	1	1	1
VI. KOPERASI PRODUKSI																											
6.1 KOPINKRA / INKRA	6	20	26	6	20	26	6	20	26	1.399	1.398	1.347	84	84	84	72	74	74	23	22	22			-	4	2	3
6.2 KOPERASI PERTANIAN	1	8	9	1	8	9	1	8	9	637	637	637	27	27	27	27	27	27	3	3	3			-	-	-	-
VII. KOPERASI PEMASARAN																											
7.1. KOPERASI PASAR	8	8	16	16	8	24	16	8	24	1.681	1.780	1.777	44	67	67	35	59	59	10	9	9			-	-	-	1
VIII. KOPERASI PROFESI	1	1	2	1	1	2	1	1	2	75	75	75	6	6	6	6	6	6	5	5	5			-	-	-	-
IX. KOPERASI SEKUNDER	3	3	6	3	3	6	3	3	6	13.288	13.285	13.282	18	18	18	17	17	17	10	8	8			-	2	2	1
X. KOPERASI PRODUSEN	5	-	5	11	-	11	12	-	12	127	152	152	19	28	31	15	24	27	2	2	2			-		-	0



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NAMA KOPERASI	KONDISI KOPERASI									JUMLAH ANGGOTA			JUMLAH PENGURUS			JUMLAH PENGAWAS			JUMLAH KARYAWAN			JMLH MNJR			RAT		
	AKTIF	TDK	JML	AKTIF	TDK	JML	AKTIF	TDK	JML	(ORANG)			(ORANG)			(ORANG)			(ORANG)			(ORANG)					
	2023			2024			2025			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
XI. KOPERASI KONSUMEN	28	5	33	47	5	52	51	5	56	2.637	3.193	4.156	89	137	155	70	115	135	14	43	45	3	2	2	12	14	18
XII. KOPERASI JASA				8	-	8	8	-	8	-	35	38		19	19		18	18			2				1	1	
JUMLAH TOTAL	320	323	643	375	322	697	385	321	706	97.948	99.885	100.398	1.986	2.123	2.157	1.652	1.782	1.829	659	694	702	52	48	49	120	115	115

Sumber: Dinas KUKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2026.



Berdasarkan tabel di atas, jenis koperasi yang berkembang di Kota Tasikmalaya sangat beragam, jenis koperasi yang berkembang dengan baik di Kota Tasikmalaya yaitu Koperasi Simpan Pinjam. kondisi keragaann koperasi secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.105.
Kompilasi Kondisi Keragaan Koperasi
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025

Kondisi Koperasi	2023	2024	2025
Koperasi Aktif (unit)	320	375	385
Koperasi Tidak Aktif (unit)	323	322	321
Jumlah (unit)	643	697	706
Jumlah Anggota (Orang)	97.948	99.885	100.398
Jumlah Pengurus (Orang)	1986	2123	2157
Jumlah Pengawas (Orang)	1652	1782	1829
Jumlah Karyawan (Orang)	659	694	702
Jumlah Manajer (Orang)	52	48	49
Koperasi RAT (Orang)	120	115	115
Persentasi Koperasi Aktif melakukan RAT (%)	38%	31%	30%
Persentasi Koperasi aktif (%)	50%	54%	55%

Sumber: Dinas KUKM Perindag Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Berdasarkan tabel di atas, kompilasi kondisi keragaan Koperasi di Kota Tasikmalaya Tahun 2023–2025, jumlah koperasi secara total mengalami peningkatan dari 643 unit menjadi 706 unit, dengan pertumbuhan terutama pada koperasi aktif yang naik dari 320 menjadi 385 unit. Persentase koperasi aktif juga menunjukkan tren positif dari 50% pada 2023 menjadi 55% pada 2025, yang mengindikasikan adanya perbaikan dari sisi kuantitas kelembagaan yang beroperasi. Jumlah anggota pun meningkat secara konsisten dari 97.948 orang menjadi 100.398 orang, mencerminkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap koperasi yang masih cukup baik. Selain itu, jumlah pengurus, pengawas, dan karyawan juga mengalami kenaikan setiap tahun, yang menunjukkan penguatan struktur organisasi dan dukungan sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi.

Namun demikian, peningkatan jumlah koperasi aktif belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola. Hal ini terlihat dari jumlah koperasi yang melaksanakan RAT yang justru menurun dari 120 unit pada 2023 menjadi 115 unit pada 2024 dan stagnan hingga 2025. Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT juga turun dari 38% menjadi 30%, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap kewajiban organisasi masih rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek manajerial, administrasi, dan kepatuhan regulasi, sehingga meskipun secara kuantitas koperasi tumbuh, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan masih perlu menjadi prioritas pembinaan ke depan.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 21/Per/M/KUKM/IX/2025 tentang Peningkatan Koperasi menyatakan Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta



memiliki kepedulian sosial. Koperasi berkualitas dinilai dari koperasi aktif (yang melaksanakan RAT) yang meningkat volume usaha dan asetnya. Data Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya bersarkan Izin Usaha dari Aplikasi OSS (*Online Single Submission*) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya. Aplikasi ini merupakan Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang wajib digunakan pelaku usaha (perorangan/badan usaha) untuk menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin operasional. Berikut data jumlah Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025.

Tabel 2.106.

Jumlah Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2023-2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA MIKRO		
		2023	2024	2025
1	CIHIDEUNG	1.206	1.977	950
2	CIPEDES	1.107	2.541	850
3	TAWANG	1.478	3.173	2.353
4	INDIHIANG	1.368	2.855	1.256
5	KAWALU	1.334	3.330	1.068
6	CIBEUREUM	1.850	3.646	1.488
7	TAMANSARI	1.934	3.764	1.218
8	MANGKUBUMI	3.617	1.455	498
9	BUNGURSARI	1.452	2.793	1.061
10	PURBARATU	2.166	2.714	2.226
	JUMLAH	17.512	28.248	12.968

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan tabel jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya menurut kecamatan tahun 2023–2025, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024, kemudian diikuti penurunan tajam pada tahun 2025. Pada tahun 2023 jumlah usaha mikro tercatat sebanyak 17.512 unit, kemudian meningkat menjadi 28.248 unit pada tahun 2024 atau bertambah sekitar 10.736 unit (sekitar 61%). Peningkatan ini terlihat hampir di seluruh kecamatan, terutama di Kecamatan Tamansari, Cibeureum, Tawang, dan Indihiang yang menunjukkan pertumbuhan cukup besar. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, kemungkinan dipengaruhi oleh program pemberdayaan UMKM, akses pembiayaan yang lebih luas, serta pemulihan ekonomi pasca perlambatan ekonomi pada periode sebelumnya.

Namun pada tahun 2025 jumlah usaha mikro tercatat turun drastis menjadi 12.968 unit, atau berkurang sekitar 15.280 unit dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh kecamatan, dengan penurunan cukup besar di Tamansari, Cibeureum, Cipedes, dan Kawalu. Penurunan tajam tersebut kemungkinan tidak sepenuhnya mencerminkan berkurangnya aktivitas usaha secara nyata, tetapi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemutakhiran atau pembersihan basis data usaha (data cleansing) sehingga usaha yang sudah tidak aktif tidak lagi tercatat, perubahan metode pendataan atau klasifikasi usaha, serta kemungkinan adanya usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil sehingga tidak lagi masuk kategori usaha mikro. Selain itu, faktor lain seperti penutupan usaha akibat persaingan usaha, perubahan daya beli masyarakat, atau keterbatasan akses modal juga dapat berkontribusi terhadap penurunan jumlah unit usaha yang tercatat pada tahun tersebut.

Adapun capaian indikator kinerja daerah urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.107.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Indikator	Formulasi	Satuan	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase Peningkatan SDM Usaha Mikro yang Bersertifikat	Jumlah Usaha Mikro yang bersertifikat / Jumlah total Usaha Mikro x 100%	%	5,56	5,57	5,6	NA	3,17	2.41
Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi / Jumlah total pengurus koperasi x 100%	%	8,25	8,25	9	NA	33,33	24.21
Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah volume usaha tahun n - tahun n-1 / Jumlah volume usaha tahun n-1 x 100%	%	2,5	2,5	4	NA	8	8.66

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, 2026

Berdasarkan tabel capaian indikator sektor koperasi dan usaha mikro, terlihat bahwa realisasi beberapa indikator belum sepenuhnya sejalan dengan target yang ditetapkan. Pada indikator persentase peningkatan SDM usaha mikro yang bersertifikat, realisasi pada tahun 2024 sebesar 3,17% dan tahun 2025 2,41%, masih berada di bawah target masing-masing 5,57% dan 5,6%, yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan sertifikasi pelaku usaha mikro masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan akses pelatihan, pendampingan, maupun proses sertifikasi. Sementara itu, pada indikator persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi, realisasi justru jauh melampaui target pada tahun 2024 yaitu 33,33% dari target 8,25%, meskipun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 24,21%, namun tetap berada di atas target 9%, yang mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Adapun pada indikator laju pertumbuhan volume usaha koperasi, realisasi pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing mencapai 8% dan 8,66%, jauh melampaui target 2,5% dan 4%, yang menunjukkan bahwa secara umum aktivitas usaha koperasi mengalami pertumbuhan yang cukup baik meskipun peningkatan kualitas SDM usaha mikro masih perlu terus diperkuat melalui program pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan.

11) Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat.

Merujuk pada data dari *Online Single Submission* (OSS) periode 1 Januari – 31



Desember 2025, pada Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2026, di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2025 terdapat 33.731 perusahaan berbadan hukum yang terdiri dari perseroan terbatas 234 unit, CV/Firma 288 unit, Koperasi 371 unit, perorangan 32.632 unit dan lainnya 206 unit. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan berdasarkan skala usaha pada tahun 2025 sebanyak 15.365 NIB terdiri dari 13 NIB untuk Non UMK dan 15.352 NIB untuk UMK.

Tabel 2.108.

Jumlah Nomor Induk Berusaha yang Diterbitkan

Tahun	Non UMK	UMK	Jumlah
2023	23	20.826	20.849
2024	32	42.174	42.206
2025	13	15.352	15.365

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2026

Tahun 2025 menunjukkan iklim investasi yang membaik, tetapi tantangan utamanya adalah bagaimana mengarahkan investasi agar lebih berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Menurut Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat melalui Kementerian Investasi/BKM, berdasarkan 2.448 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2025 tidak ada penanaman modal asing (PMA) sementara jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.649.113.599.407 naik 51,65 persen dari tahun 2024 yang sebesar Rp.428.041.375.235. Realisasi investasi tahun 2025 menyerap tenaga sebanyak 2.344 orang meningkat 11 persen dari Tahun 2024 sebanyak 2.079 orang. Pada tahun 2025, kinerja investasi di Kota Tasikmalaya menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari sisi nilai, tetapi kenaikan penyerapan tenaga kerja masih relatif terbatas. Ini menandakan bahwa pertumbuhan investasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa investasi yang masuk cenderung lebih padat modal daripada padat karya. Hal ini terlihat dari naiknya nilai investasi jauh lebih cepat dibanding jumlah tenaga kerja yang terserap. Secara sederhana, nilai investasi per pekerja pada 2025 juga lebih tinggi dibanding 2024, sehingga setiap tambahan investasi belum banyak mengubah kapasitas penyerapan tenaga kerja.

Lima (5) sektor terbesar yang menyerap investasi di Kota Tasikmalaya adalah sektor perumahan, kawasan industry dan perkantoran (38,51%), jasa lainnya (30,38), perdagangan dan reparasi (12,87%), Hotel dan restoran (7,91) serta transportasi, Gudang dan telekomunikasi (5,48%). Lima (5) sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah Jasa lainnya (28,29%), perdagangan dan reparasi (26,71%), Industri Kayu (15,36%), Industri Tekstil (12,16%), dan hotel dan restoran (5,55%). Sektor yang paling besar menyerap investasi tidak selalu menjadi sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja. Investasi banyak terkonsentrasi pada sektor yang kemungkinan membutuhkan modal besar, sedangkan serapan tenaga kerja lebih banyak terjadi pada sektor jasa, perdagangan, dan industri pengolahan. Ini memperlihatkan bahwa struktur investasi di Tasikmalaya masih belum sepenuhnya berorientasi pada penciptaan kerja massal.

Adapun capaian indikator kinerja daerah urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:



Tabel 2.109.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Penanaman Modal Daerah dari PMA dan PMDN yang Masuk	Jumlah nilai PMA dan PMDN yang masuk yang tercatat di Dinas PMPTSP	M/Rp	1.304	18.702,16	1.369	2.138	-	-
Nilai investasi daerah	Jumlah investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	M/Rp	-	-	-	-	437	649,113
Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengelolaan Data Perijinan sesuai SOP	Jumlah Data Perijinan yang Dikelola Sesuai SOP/Jumlah Total Data Perijinan x 100%	%	75	100	100	100	-	-
Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	%	-	-	-	-	BB (80 point)	N/A
Persentase Realisasi RUPM Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya	Realiasi RUPM/Jumlah tahapan dalam RUPM x 100%	%	-	-	-	-	N/A	-
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Jumlah investor tahun n - jumlah investor n-1 dibagi Jumlah jumlah investor n-1 x 100%	%	-	-	-	-	10	10
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	(Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha) x100%	%	-	-	-	-	100	100



Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor x 100%	%	100	100	-	-	100	100
Persentase data dan informasi DPMPTSP yang dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi yang dimanfaatkan / Jumlah Total Data dan Informasi yang tersedia x100	%	-	-	-	-	100	-
Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP		25	100	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya, 2026.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki regulasi terkait kemudahan penanaman modal yaitu dengan telah terbitnya Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dalam meningkatkan investasi atau penanaman modal perlu dukungan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian yang memadai. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Tasikmalaya, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan laju perekonomian sekaligus pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Berdasarkan hal ini di Kota Tasikmalaya terdapat Kawasan yang strategis dari sudut perekonomian seperti kawasan perdagangan, hotel dan restoran di pusat kota, Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan, Kawasan Minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, dan Kawasan Pendidikan Terpadu di Kecamatan Tamansari.

12) **Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga**

Aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran jasmani serta meningkatkan interaksi sosial tercermin dari ketersediaan sarana olahraga, salah satunya berupa lapangan olahraga. Adapun jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang masih aktif hingga tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.110.

Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga
di Kota Tasikmalaya sampai dengan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Lapangan Sepakbola/ Futsal	Sepak Bola dan Pacuan Kuda	Futsal dan Bola Volly	Lapangan Basket	Lapangan Volly	Bulutangkis (Terbuka/ Tertutup)	Kolam Renang
1	Mangkubumi	4	-	-	1	-	1	-
2	Purbaratu	3	-	-	-	1	4	1



No.	Kecamatan	Lapangan Sepakbola/ Futsal	Sepak Bola dan Pacuan Kuda	Futsal dan Bola Volly	Lapangan Basket	Lapangan Volly	Bulutangkis (Terbuka/ Tertutup)	Kolam Renang
3	Indihiang	-	-	-	-	-	-	-
4	Bungursari	-	-	-	-	-	-	-
5	Kawalu	4	-	-	-	13	-	-
6	Cihideung	-	-	-	-	-	-	-
7	Cipedes	-	-	-	-	-	-	-
8	Tamansari	3	-	-	-	-	3	-
9	Tawang	-	-	-	-	-	-	-
10	Cibeureum	4	1	1	1	1	5	-
	TOTAL	18	1	1	2	15	13	1

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2026.

Pelaksanaan pelayanan umum urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.111.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2023 -2025

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi	%	2,20	8,8	-	-	-	-
2.	Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda di Tingkat Provinsi	%	-	-	40	44	42,00	46,84
3.	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	34,15	52,38	-	-	-	-
4.	Persentase Cabang Olahraga Berperestasi Tingkat Provinsi	%	-	-	36,59	53,66	39,02	48,28
5.	Persentase OKP yang Dibina	%	29,67	31,87	-	-	-	-
6.	Persentase Pemuda Terbina Keorganisasian Yang Aktif Dalam Organisasi Kemasyarakatan	%	-	-	67,71	76,55	67,89	67,89
7.	Persentase Pemuda Terbina Wirausaha Yang Berwirausaha	%	-	-	33,24	38,43	34,21	34,21



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
8.	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	34,15	52,38	-	-	-	-
9.	Persentase Medali Yang Diperoleh Dalam Event Provinsi	%	-	-	37	53,66	39,02	48,28

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2026.

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga selama periode Tahun 2023-2025 secara umum menunjukkan kinerja yang berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang positif. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja yang dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator Peningkatan Prestasi Pemuda Di Tingkat Provinsi yang mulai diukur pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2024 realisasi mencapai 44 persen dari target 40 persen, sedangkan pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi 46,84 persen dari target 42 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Pada indikator Cabang Olahraga Berprestasi Tingkat Provinsi, realisasi pada tahun 2024 mencapai 53,66 persen dari target 36,59 persen, sedangkan pada tahun 2025 realisasi sebesar 48,28 persen dari target 39,02 persen. Meskipun terjadi penurunan capaian pada tahun 2025, hasil tersebut tetap berada di atas target yang ditetapkan, sehingga secara umum kinerja masih tergolong baik.

Pada indikator Pemuda Terbina Keorganisasian Yang Aktif Dalam Organisasi Kemasyarakatan, capaian tahun 2024 mencapai 76,55 persen, melampaui target 67,71 persen. Pada tahun 2025 realisasi mencapai 67,89 persen dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun terjadi penurunan, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi masih berada pada kategori baik dan sesuai dengan sasaran kinerja.

Selanjutnya, indikator Pemuda Terbina Wirausaha menunjukkan realisasi sebesar 38,43 persen pada tahun 2024 dari target 33,24 persen, sedangkan pada tahun 2025 realisasi mencapai 34,21 persen dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program kewirausahaan pemuda telah berjalan efektif, meskipun perlu dilakukan penguatan agar pertumbuhan capaian dapat lebih optimal.

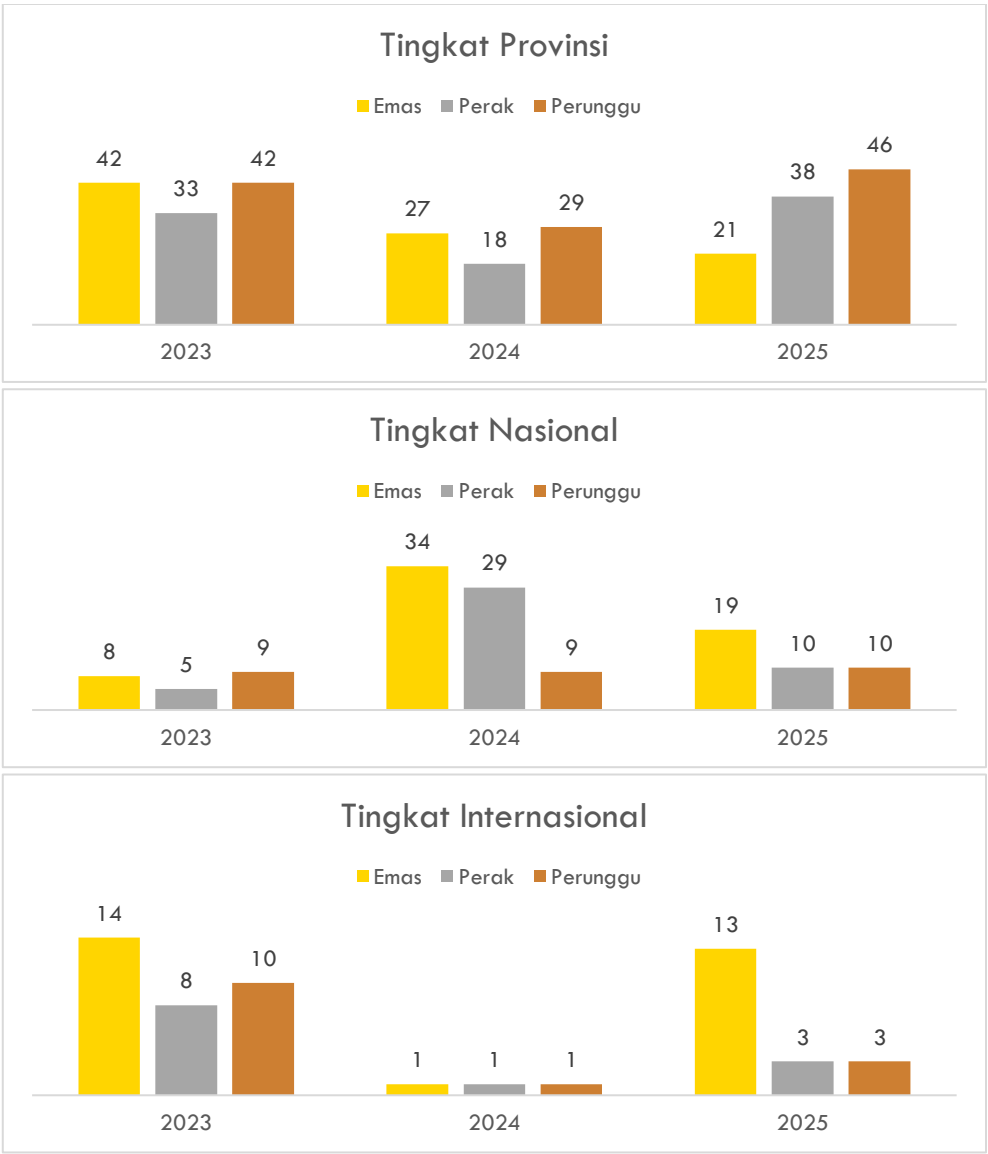
Indikator Jumlah Medali Yang Diperoleh Dalam Event Tingkat Provinsi menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2024 realisasi mencapai 53,66 persen dari target 37 persen, dan pada tahun 2025 realisasi sebesar 48,28 persen dari target 39,02 persen. Meskipun terjadi penurunan capaian, hasil tersebut tetap melampaui target dan mencerminkan daya saing atlet daerah yang masih kuat.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Diperlukan penguatan dan optimalisasi

program pembinaan secara terencana dan berkesinambungan guna mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja secara berkelanjutan.

Perolehan medali pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dapat dalam tabel di bawah ini.

Gambar 2.40.
Perolehan Medali Cabang Olahraga Beprestasi
Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2025



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2026.

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan olahraga, baik untuk melahirkan atlet berprestasi maupun menumbuhkan budaya gemar berolahraga di tengah masyarakat, sehingga tercipta generasi yang sehat dan bugar. Namun demikian, ketersediaan fasilitas olahraga di Kota Tasikmalaya masih belum sepenuhnya memadai dan belum sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Selain itu, sebagian besar sarana olahraga yang tersedia masih terkonsentrasi di lingkungan sekolah atau bersifat terbatas pada lingkungan tertentu. Berikut disajikan data jumlah lapangan olahraga di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2025.



Tabel 2.112.
Jumlah Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2025

No.	Kecamatan	Lapangan Sepakbola / Futsal	Sepak Bola dan Pacuan Kuda	Futsal dan Bola Volly	Lapangan Basket	Lapangan Volly	Bulungtangkis (Terbuka/ Tertutup)	Kolam Renang
1	Mangkubumi	4	-	-	1	-	1	-
2	Purbaratu	3	-	-	-	1	4	1
3	Indihiang	-	-	-	-	-	-	-
4	Bungursari	-	-	-	-	-	-	-
5	Kawalu	4	-	-	-	13	-	-
6	Cihideung	-	-	-	-	-	-	-
7	Cipedes	-	-	-	-	-	-	-
8	Tamansari	3	-	-	-	-	3	-
9	Tawang	-	-	-	-	-	-	-
10	Cibeureum	4	1	1	1	1	5	-
	TOTAL	18	1	1	2	15	13	1

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2026.

Meskipun demikian, tetap diperlukan optimalisasi program agar indikator yang baru mencapai target dapat meningkat lebih tinggi, serta penguatan basis data dan monitoring untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja.

13) **Urusan Statistik**

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui dengan uraian program 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Adapun capaian indikator kinerja daerah urusan statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.113.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Statistik

Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Data dan Informasi Statistik Sektoral	Jumlah realisasi kelompok data pada statistik sektoral terhadap jumlah kelompok data statistik sektoral. Berdasarkan Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang SIPD terdapat 3	%	100	100	-	-	-	-



Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Kelompok Data : Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar dan Non Dasar, Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan dan Kelompok Data Umum							
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dlm penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah/Jumlah OPD yang ada di Pemerintah Kota*100	%	100	100	-	-	-	-
Rata-rata kunjungan website open data per hari	Jumlah Kunjungan website opendata selama 1 tahun/Jumlah hari dalam 1 tahun	Kunjungan	500		520		-	-
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berdasarkan Penilaian dari Badan Pusat Statistik	Poin	-	-	3	3,01	3,10	3,01
Persentase Peningkatan pengunjung web open data	Jumlah Pengunjung Tahun Sekarang- Jumlah Pengunjung Tahun Kemarin/Jumlah Pengunjung Tahun KemarinTahun Kemarin x 100	%	-	-	20	25,81	25	25,53



Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase data prioritas yang tersusun		%			50		55	94,59

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya, 2026.

Capaian Indeks Pembangunan Statistik tahun 2025 di angka 3,01 poin dari target 3,10 poin atau tingkat capaian kinerjanya sebesar 97,10 persen. Secara umum kinerja urusan statistic menunjukkan tren positif terutama dalam aspek pemanfaatan dan aksesibilitas data, namun masih memerlukan perbaikan diantaranya belum optimalnya pemenuhan standar metadata statistik sektoral, integrasi sistem data antar perangkat daerah serta peningkatan kualitas eviden pendukung yang belum maksimal dalam evaluasi EPSS.

Tingkat capaian kinerja peningkatan pengunjung web open data pada tahun 2025 telah melampaui target sebesar 102,12 persen. Hal ini menunjukkan meningkatnya pemanfaatan portal open data dan efektivitas pengelolaan serta diseminasi data kepada masyarakat.

14) **Urusan Persandian**

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan 2 (dua) kegiatan utama, yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah. Adapun indikator kinerja daerah urusan Persandian adalah Nilai kelengkapan pengamanan informasi, dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 2.114.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Persandian

Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Realisasi Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah terhadap total Area Pengendalian Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	41	48,21	-	-	-	-
Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah		%	41		42		-	-
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai per Area Keamanan/Jumlah Area Keamanan*100	%	25		-	-	-	-
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Laporan Hasil Evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 27001	%	-	-	45	45,74	45	58,61



Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	(Nilai Hasil Indeks KAMI/Jumlah Total Nilai Indeks KAMI x 100)							
Nilai kelengkapan pengamanan informasi	Nilai yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	Poin	400		290	295	350	538

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks KAMI 5.0 oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), nilai kelengkapan pengamanan informasi Pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai 538 poin dari target 350 poin. Capaian ini menunjukkan kinerja yang melampaui target serta mencerminkan peningkatan signifikan dalam penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Verifikasi dilakukan melalui penilaian dokumen, wawancara, dan observasi terhadap pengelolaan Sistem Elektronik IKET (Informasi Kepegawaian Elektronik Terpadu) yang termasuk kategori Tinggi (skor kategorisasi SE : 27). Hasil evaluasi menempatkan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada level Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar dengan tingkat kelengkapan penerapan standar International Organization for Standardization ISO 27001 sesuai kategori sebesar 538 poin.

Capaian ini menjadi dasar bagi pimpinan daerah dalam pengambilan kebijakan strategis penguatan keamanan informasi, sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Berikut ini adalah Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah di Kota Tasikmalaya:

Tabel 2.115.
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah di Kota Tasikmalaya

No.	Area Pengamanan Informasi	Area Penilaian	Keterangan
1.	Tata Kelola	115	Hasil Evaluasi Akhir Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar dengan tingkat kelengkapan penerapan standar SNI/ISO 27001 sesuai kategori pada skor 538
2.	Pengelolaan Risiko	52	
3.	Kerangka Kerja Keamanan Informasi	60	
4.	Pengelolaan Aset	141	
5.	Teknologi Dan Keamanan Informasi	120	
6.	Perlindungan Data Pribadi	50	
	Jumlah	538	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2026.

Capaian ini menempatkan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada kategori Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar, dengan tingkat kelengkapan penerapan standar SNI/ISO 27001 sesuai kategori sistem elektronik yang dikelola (kategori Tinggi).

Secara substantif, nilai tertinggi terdapat pada area Pengelolaan Aset dan Teknologi dan Keamanan Informasi, yang menunjukkan penguatan pada aspek pengendalian infrastruktur dan perlindungan sistem elektronik. Sementara itu, area Pengelolaan Risiko dan Perlindungan Data Pribadi masih memerlukan penguatan lanjutan guna meningkatkan tingkat kematangan keamanan informasi secara menyeluruh.

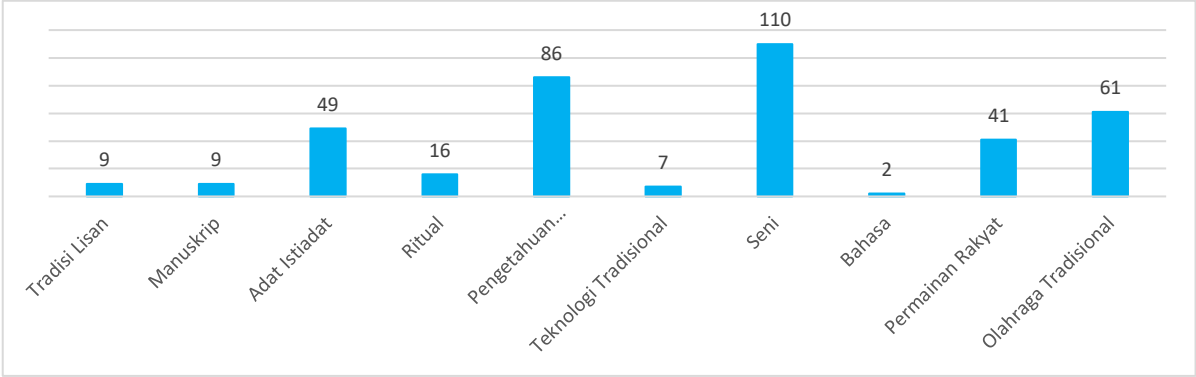


15) **Urusan Kebudayaan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya, pemerintah memiliki tugas untuk menjamin perlindungan atas Kebudayaan Daerah Kota, memelihara kebhinekaan, mengelola Kebudayaan Daerah Kota, menyelenggarakan promosi Kebudayaan Daerah Kota, menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah Kota, menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya, membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya, mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya; dan menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah Kota berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya. Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah merumuskan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Berdasarkan Dokumn Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Tasikmalaya, berikut data sarana prasarana kebudyaan daerah Kota Tasikmalaya.

Gambar 2.41.
Data Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Kota Tasikmalaya Tahun 2025



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2026.

Pembangunan di bidang seni dan budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni dan budaya merupakan perwujudan kearifan lokal yang keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Berikut jumlah grup dan gedung seni budaya yang ada di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.116.
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah grup kesenian (buah)	173	173	173	173	173
Jumlah gedung (unit)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2026.



Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan pada tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.117.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2023-2025

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	%	63,73	64,65	-	-	-	-
2.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan	%	-	-	68,63	68,69	73,53	81,82
3.	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	63,73	64,65	-	-	-	-
4.	Persentase Peningkatan Kebudayaan Daerah	%			68,63	68,69	73,53	73,53
5.	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	25	25,43	-	-	-	-
6.	Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional	%	-	-	25	25	25	25
7.	Persentase Sejarah Lokal Yang Dilestarikan	%	25	25	-	-	-	-
8.	Persentase Dokumen Sejarah Lokal Yang Dilestarikan	%	-	-	25	25	25	25
9.	Persenstase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	46,15	46,15	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2026.



Berdasarkan data capaian indikator pelayanan urusan kebudayaan Tahun 2023-2025, secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan kebudayaan menunjukkan capaian yang baik, dengan seluruh indikator mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

Indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi, Dikembangkan, Dibina, Dan Dimanfaatkan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2024 realisasi mencapai 68,69 persen, sesuai dengan target 68,63 persen, dan pada tahun 2025 meningkat signifikan dengan realisasi 81,82 persen, melampaui target 73,53 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen dan efektivitas dalam pengelolaan objek pemajuan kebudayaan. Pada indikator Persentase Peningkatan Kebudayaan Daerah, realisasi tahun 2024 mencapai 68,69 persen, melampaui target 68,63 persen, sedangkan pada tahun 2025 realisasi sebesar 73,53 persen telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberlanjutan program penguatan kebudayaan daerah yang dilaksanakan secara konsisten. Pada indikator Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional, realisasi pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing mencapai 25 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan stabilitas kinerja, namun juga mengindikasikan perlunya inovasi program agar capaian dapat ditingkatkan pada periode selanjutnya. Indikator Persentase Dokumen Sejarah Lokal Yang Dilestarikan pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing mencapai 25 persen, sesuai dengan target. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam upaya pelestarian sejarah dan dokumentasi budaya lokal.

Secara umum, seluruh indikator pada urusan kebudayaan menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program yang baik karena seluruh target dapat direalisasikan sesuai rencana tanpa deviasi. Hal ini mencerminkan perencanaan yang realistis, pengelolaan program yang terukur, serta koordinasi pelaksanaan yang berjalan optimal. Namun demikian, meskipun target tercapai, evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk menilai kualitas dampak dari capaian tersebut terhadap keberlanjutan pelestarian kebudayaan daerah.

16) **Urusan Perpustakaan**

Adapun capaian indikator kinerja daerah urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.118.
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025
Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai TGM yang berasal dari Perpunas RI	Nilai	82,09	63,30
Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai IPLM yang berasal dari Perpunas RI	Poin	76,55	18,56
Jumlah Kunjungan Masyarakat	Kunjungan Masyarakat dalam 1 tahun ke Perpustakaan Umum Daerah	Orang	20.987	21.028



Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Jumlah Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi	Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi dalam 1 tahun	Orang	530	930

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. 2026.

Untuk Indikator Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) formulasi berubah sehingga nilainya Realisi jauh dari target akan tetapi Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Tasikmaya menjadi yang terbaik di Jawa Barat. Untuk Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat juga tidak tercapai disebabkan oleh adanya perubahan formulasi sehingga targetnya tidak tercapai sehingga menjadi bahan pertimbangan perubahan Renstra yang akan datang.

17) **Urusan Kearsipan**

Adapun capaian indikator kinerja daerah Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.119.
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025
Urusan Kearsipan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah (60% x Nilai Pengawasan Eksternal + 40% x Nilai Pengawasan Internal)	Indeks	61,55	71,92
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah	Nilai	63,50	65,21
Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai	63.00	76,39
Nilai aspek kebijakan	Nilai aspek kebijakan hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	19,70	12,82
Nilai aspek pembinaan	Nilai aspek pembinaan hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	13,80	21,18
Nilai aspek pengelolaan arsip statis	Nilai aspek pengelolaan arsip statis hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	16,30	20,18
Nilai aspek sumber daya kearsipan	Nilai aspek sumber daya kearsipan hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	13,20	13,83

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. 2026.

Untuk urusan kearsipan realisasinya relatif baik, kecuali indikator nilai aspek kebijakan dari target 19,70 realisasinya 12,82 ini disebabkan oleh adanya perubahan formulasi audit sistem kearsipan eksternal pada aspek kebijakan yaitu instrumen kaitan dengan sosialisasi masuk ke dalam aspek pembinaan, sehingga indikator ini menjadi bahan perubahan restra yang akan datang.

2.1.3.2 Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan, yakni kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Adapun Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri atas 5 (lima) bidang urusan yakni perencanaan, keuangan, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, serta fungsi penunjang urusan lainnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1) Urusan Perikanan

Potensi perikanan budidaya di Kota Tasikmalaya bertumpu pada lahan seluas 692,28 Hektar, terdiri dari kolam pembesaran seluas 621,23 Ha, sawah irigasi (mina padi) seluas 51,42 Ha, kolam pembenihan seluas 19,49 Ha, kolam air deras seluas 0,14 Ha.

Selain budidaya, Kota Tasikmalaya memanfaatkan kekayaan perairan darat untuk sektor perikanan tangkap dengan total areal mencapai 7.698,8 Ha. Sumber daya tersebut terdiri dari :

- Sungai, menjadi tumpuan utama dengan luasan 7.631,3 Ha.
- Situ (danau), meliputi Situ Gede (47 Ha), Situ Cibeureum (10 Ha), Situ Cipajaran (6 Ha), Situ Cicangri (2,5 Ha) dan Situ Malingping (2 Ha).

Usaha perikanan digerakkan oleh 12.393 Rumah Tangga Perikanan (RTP). Mayoritas pelaku usaha adalah pembudidaya ikan (12.234 RTP), sementara sektor penangkapan melibatkan 159 RTP. Hal ini menegaskan bahwa sektor perikanan di Kota Tasikmalaya adalah perikanan budidaya berbasis masyarakat.

Infrastruktur pendukung sektor perikanan, di antaranya:

- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) seperti Balai Benih Ikan (BBI) dan Pengembangan Produksi Ikan (PPI)
- Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)
- Kawasan Minapolitan
- 61 Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan melibatkan 6.768 orang yang terhimpun dalam :

- 452 Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan);
- 21 Poklahsar (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran);
- 3 Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas);
- 1 Gapoktan; dan
- 7 Perkumpulan Pelaku Usaha Perikanan.

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.120.
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan
Tahun 2023-2025

No	Komoditas	2023 (Ton)	2024 (Ton)	2025 (Ton)
1	Mas	1.692,080	1.752,462	1.763,040
2	Nila	2.518,420	2.502,347	2.517,217
3	Nilem	1.239,090	1.248,324	1.255,802
4	Mujair	465,030	465,286	468,014
5	Lele	1.511,600	1.535,626	1.544,086
6	Gurame	643,240	635,943	639,617
7	Tawes	1.157,000	1.106,476	1.113,130
8	Tambakan	463,320	461,906	464,699
9	Ikan Lainnya	270,300	281,344	282,997
Jumlah		9.960,08	9.989,71	10.048,602

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2026.

Produksi perikanan budidaya menunjukkan tren pertumbuhan positif setiap tahunnya. Tahun 2023 ke 2024 mengalami kenaikan tipis sebesar 29,63 ton (0,30%), selanjutnya dari tahun 2024 ke 2025 mengalami kenaikan yang lebih signifikan, yaitu sebesar 58,89 ton (0,59%). Total produksi sebesar 10.048,60 ton pada tahun 2025.

Terdapat tiga jenis ikan yang mendominasi produksi di Kota Tasikmalaya secara konsisten, yaitu Nila, Mas dan Lele. Ikan Mas, Nilem, Lele, dan Mujair menunjukkan performa yang stabil dengan peningkatan produksi tanpa penurunan selama tiga tahun tersebut. Fluktuasi produksi pada Ikan Gurame, Tawes dan Tambakan sempat mengalami penurunan produksi pada tahun 2024 dan meningkat kembali di tahun 2025.

Pelaksanaan urusan perikanan di Kota Tasikmalaya menjadi wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Berikut disajikan data pelaksanaan pelayanan umum urusan Perikanan.

Tabel 2.121.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2023-2025

INDIKATOR KINERJA DAERAH	FORMULASI	SATUAN	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Ton	10.000	9.960,08	10.000	9.989,71	10.100	10.048,60
Produksi produk hasil olahan perikanan	Jumlah produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	300	335,497	310	373,42	-	-
Persentase peningkatan	(Jumlah produksi olahan ikan	%	-	-	5	11,30	-	-



INDIKATOR KINERJA DAERAH	FORMULASI	SATUAN	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
produksi olahan ikan	tahun berjalan - Jumlah Produksi olahan ikan tahun sebelumnya) / Jumlah Produksi olahan ikan tahun sebelumnya x 100%							
Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan yang dihitung dan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	Kg / Kapita/ Tahun	22,25	43,95	44	43,95	44,05	57
Persentase sarana dan prasarana perikanan yang dimanfaatkan	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan / Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan x 100%	%	-	-	100	100	-	-
IKM Pelayanan Pasar Ikan	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD PPI	Kategori (Indeks)	-	-	Baik (84)	Baik (85,19)	-	-
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Angka produksi perikanan tangkap	Ton	-	-	-	-	102	100,35

Ket : - perubahan indikator
Sumber: Dinas Ketahanan pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2026

Produksi Perikanan Budidaya menunjukkan stabilitas yang sangat tinggi, namun dengan pertumbuhan yang cenderung konservatif. Meskipun tidak memenuhi target, terjadi peningkatan bertahap setiap tahunnya (9.960 Ton di 2023 menjadi 10.048 Ton di 2025). Produksi produk hasil olahan perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2024, persentase peningkatan produksi olahan mencapai 11,30%, jauh melampaui target (5%). Peningkatan dan capaian angka konsumsi ikan pada tahun 2025, target 44,05 kg/kapita/tahun berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 57 kg/kapita/tahun, menunjukkan lompatan minat konsumsi protein ikan yang sangat masif. Pada tahun 2024, pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan infrastruktur yang disediakan pemerintah dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan di Pasar Ikan (UPTD PPI) mendapatkan predikat "Baik" dengan skor 85,19, sedikit melampaui target 84 mencerminkan tata kelola birokrasi yang sehat. Produksi



Perikanan Tangkap merupakan indikator baru di tahun 2025 dengan target 102 Ton dan realisasi 100,35 Ton. Meskipun tercapai 98%, angkanya jauh lebih kecil dibandingkan perikanan budidaya, menegaskan bahwa wilayah ini (Kota Tasikmalaya) memang berbasis budidaya darat, bukan tangkap laut.

2) **Urusan Pariwisata**

Pariwisata di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar. Secara lebih detail data objek wisata dan daya tarik wisata di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122.
Data Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kota Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
1	Kawalu	1. Makam Syekh Abdul Ghorib	Wisata Budaya	Kel. Gunung Gede Kecamatan Kawalu	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Air Tanjung	Wisata Alam	Jl. Air Tanjung-Tasikmalaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Bordir Kawalu	Wisata Minat Khusus	Jl. Perintis Kemerdekaan, Karsamenak	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		4. Kampung Salapan (Hutan Urug) - Gua Sarongge - Curug Sawidak - Puncak Nangela - Cadas Ngampar	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Bukit Lestari	Wisata Alam	RT 03 RW 03 Kel. Leuwiliang	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Arung Jeram Sungai Ciwulan	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Dalem Patuakan	Wisata Budaya	Tanjung 02/04	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		8. Makam Guning Saena	Wisata Budaya	Citamiang 06/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		9. Tugu Istiwa	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		10. Makam H.M. Bakri	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		11. Makam Eyang Ciseeng/ Cakraningrat	Wisata Budaya	Babakan Arsi 03/06	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan



No.	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
2	Tamansari	12. Makam H. Hasan	Wisata Budaya	Babakan Peundeuy 007	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		13. Makam Gn. Subang	Wisata Budaya	Cilamajang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		14. Makam Eyang Patinggi	Wisata Budaya	Leuwiliang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		1. Situ Cibeureum	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Kelom Gelis	Wisata Minat Khusus	Kp. Gobras Kel. Sukahurip	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Curug Tonjong	Wisata Alam	Kel. Setiawargi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		4. Situ Malingping	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
3	Cibeureum	5. Situ Cipajaran	Wisata Alam	Kel. Mugarsari	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		6. Makam Situ Malingping	Wisata Budaya	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Makam Situ Kasindang	Wisata Budaya	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		1. Petilasan Purbasari	Wisata Budaya	Jl. Letkol Basir Surya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Pasir Pataya	Wisata Rekreasi	Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		3. Perkebunan Salak	Wisata Minat Khusus	Peundeuy, Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		1. Arung Jeram sungai Citanduy	Wisata Alam	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
4	Purbaratu	2. Wisata Edukasi Bambu	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukajaya	Produk Wisata potensial yang belum dikembangkan
		3. Makam Syekh Kusumayuda	Wisata Budaya	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		4. Makam Tubagus Abdulah	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		5. Makam Jiwa Raga	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan



No.	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
		6. Kampung Awi	Wisata Alam		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		7. Farm House	Wisata Buatan		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		8. Kerajinan Mendong	Wisata Kriya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
5	Tawang	1. Kuliner Tawang	Wisata Minat Khusus	Jl. BKR, Jl. Kolektoran	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		2. Titik Nol	Wisata Budaya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		3. Mambo Kuliner	Wisata Kuliner	Jl. Mayor Utarya	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
6	Cihideung	1. Pasar Minggu Dadaha	Wisata Minat Khusus	Jl. Dadaha	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		2. Teejay Waterpark	Wisata Rekreasi	Komp. Plaza Asia Jl. KHZ mustofa	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Kolam Renang Asia	Wisata Buatan	Komplek Dadaha	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
7	Mangkubumi	1. Situ Gede	Wisata Alam	Kel. Linggajaya Kecamatan Mangkubumi	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Makam Eyang Prabudilaya	Wisata Budaya	Kel. Batarsari Kecamatan Bungursari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Mangkubumi Water Park	Wisata Rekreasi	Jl.A.H. Nasution KM. 7	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		4. Kampung Ulin	Wisata Alam	Kel.Linggajaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		5. Perkebunan Buah Naga	Wisata Minat Khusus	Jl. Cibeet	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
8	Indihiang	1. Situs Linggayoni	Wisata Budaya	Kel. Sukamaju Kidul	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Payung Geulis Tasik	Wisata Minat Khusus	Kel. Panyingkiran	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Wisata Ciloseh	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Lapang Minisoccer (Indosoccernesia)	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukamaju Kidul	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan



No.	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
		5. Batu Bangkong	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Kawasan Cipanyir (Cipedes Panyingkiran)	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		7. Babakan Sanca	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
9	Bungursari	1. Makam Eyang Dalem Sakarembong	Wisata Budaya	Kel. Bantarsari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Ma'arif Garden	Wisata Alam	Jl. Sukarindik No.71, Sukarindik	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Mutiara Aboh	Wisata Tirta	Kel. Sukamulya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
10	Cipedes	1. Taman Rekreasi Karang Resik	Wisata Rekreasi	Jl. Mohamad Hatta, Sukamanah	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Sentra Batik	Wisata Minat Khusus	Jl. Ciroyom No.20, Nagarasari, Kec. Cipedes	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		3. Tebing Putih	Wisata Alam	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Budak Capetang	Wisata Buatan	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Pesantren Benda 67	Wisata Minat Khusus	Jl. Cisalak No.15, Benda, Nagarasari	Obyek wisata potensial yang belum kembangkan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2026.

Jumlah kunjungan wisata ke Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, kunjungan wisatawan ke Kota Tasikmalaya tercatat sebanyak 667.521 orang terdiri dari 919 orang wisatawan mancanegara dan 666.602 orang wistawan domestik. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 24.910 orang dari jumlah kunjungan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 642.611 orang wisatawan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kunjungan wisata di Kota Tasikmalaya selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 2.123.
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2025

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)		Jumlah Total (Orang)
	Mancanegara	Domestik	
2023	1.166	641.445	642.611
2024	987	642.445	643.432



Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)		Jumlah Total (Orang)
	Mancanegara	Domestik	
2025	919	666.602	667.521

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026.

Jumlah kunjungan wisata di Kota Tasikmalaya menunjukkan kenaikan tipis namun konsisten dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan dari 2023 ke 2024 hanya sekitar 0,13%, sedangkan dari 2024 ke 2025 naik sekitar 3,74%. Ini menunjukkan bahwa pariwisata Tasikmalaya mulai bergerak positif, meskipun pertumbuhannya belum terlalu besar. Dari komposisinya, kunjungan wisata masih didominasi wisatawan domestik. Pada 2025, wisatawan domestik mencapai 666.602 orang, sedangkan wisatawan mancanegara hanya 919 orang. Artinya, pariwisata Kota Tasikmalaya masih sangat bergantung pada pasar dalam negeri. Jumlah wisatawan mancanegara terus turun. Penurunan ini mengindikasikan bahwa daya tarik Tasikmalaya di pasar luar negeri masih perlu diperkuat, baik dari promosi, aksesibilitas, maupun paket wisata yang lebih spesifik untuk wisatawan asing.

Sarana pendukung yang dibutuhkan untuk kegiatan pariwisata di Kota Tasikmalaya berupa penginapan. Tabel berikut merupakan data sarana penginapan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.124.
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan
di Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Kecamatan	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
Kawalu	1	10	12
Tamansari	-	-	-
Cibeureum	1	10	10
Purbaratu	-	-	-
Tawang	12	359	551
Cihideung	14	882	1.427
Mangkubumi	10	270	372
Indihiang	6	141	183
Bungursari	1	10	10
Cipedes	7	222	381
Kota Tasikmalaya	52	1.904	2.946

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026.

Pada tahun 2025 terdapat 52 hotel, 1.904 kamar, dan 2.946 tempat tidur. Rata-rata setiap hotel hanya memiliki sekitar 37 kamar dan sekitar 57 tempat tidur, sehingga kapasitas akomodasi masih tergolong sedang dan cenderung menengah. Sebaran hotel belum merata. Konsentrasi terbesar ada di Cihideung, Tawang, Mangkubumi dan Cipedes.



Tabel 2.125.
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan
di Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2025

Kecamatan	2023	2024	2025
Kawalu	41	48	19
Tamansari	40	21	24
Cibeureum	31	80	17
Purbaratu	92	28	3
Tawang	197	67	43
Cihideung	136	43	42
Mangkubumi	57	87	31
Indihiang	109	28	16
Bungursari	67	12	11
Cipedes	78	27	25
Kota Tasikmalaya	848	441	231

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026.

Data rumah makan/restoran menunjukkan penurunan yang sangat besar. Dari 2023 ke 2025, jumlahnya turun sekitar 72,8%. Penurunan sebesar ini cukup mencolok dan perlu dicermati, apakah disebabkan oleh penutupan usaha, perubahan klasifikasi data, pendataan ulang, atau faktor ekonomi pascapandemi dan daya beli. Secara wilayah, pada 2025 jumlah rumah makan/restoran terbesar berada di Tawang, Cihideung, Mangkubumi, Cipedes dan Tamansari. Ini menunjukkan bahwa pusat kuliner juga masih terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan utama kota.

Kunjungan wisata naik pada 2025, tetapi jumlah rumah makan/restoran justru turun tajam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan wisata belum diiringi penguatan ekosistem pendukung secara memadai. Dengan kata lain, destinasi wisata boleh saja meningkat, tetapi jika fasilitas makan, minum, dan akomodasi tidak tumbuh seimbang, maka kualitas pelayanan wisata bisa kurang optimal.

Adapun capaian kinerja urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.126.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pariwisata

Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	%	443.505	642.862	-	-	643.721	667.521
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Distribusi persentase PDRB kategori Penyediaan Akomomasi dan Makan Minum yang	%	-	-	-	-	6,11	6,32



Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	dihitung dan dikeluarkan oleh BPS							
Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	(Jumlah destinasi pariwisata yang diintervensi / Jumlah Destiasi pariwisata pada Ripparkot) x 100	%	-	-	-	-	42,86	46,15
Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Daerah	(Jumlah pelaksanaan pemasaran dalam dan luar daerah / Jenis pemasaran) x 100	%	-	-	-	-	40	66,67
Persentase Jenis Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	(Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan / Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif x 100	%	-	-	-	-	N/A	-
Persentase Usaha Pariwisata dan Subsektor ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	(Jumlah usaha pariwisata dan sub sekor ekraf yang dikembangkan /jumlah usaha pariwisata dan sub sekor ekraf) x 100	%	-	-	-	-	23,33	33,3
Persentase peningkatan wisatawan	(Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan thn n-1) x 100	%	-	-	3,82	7,78	-	-
Persentase Peningkatan wisatawan yang Mengakses Informasi Pariwisata	((Jumlah akses terhadap media promosi tahun Njumlah akses Tahun N-1) / (Jumlah wisatawan tahun n	%	-	-	3,82	7,78	-	-



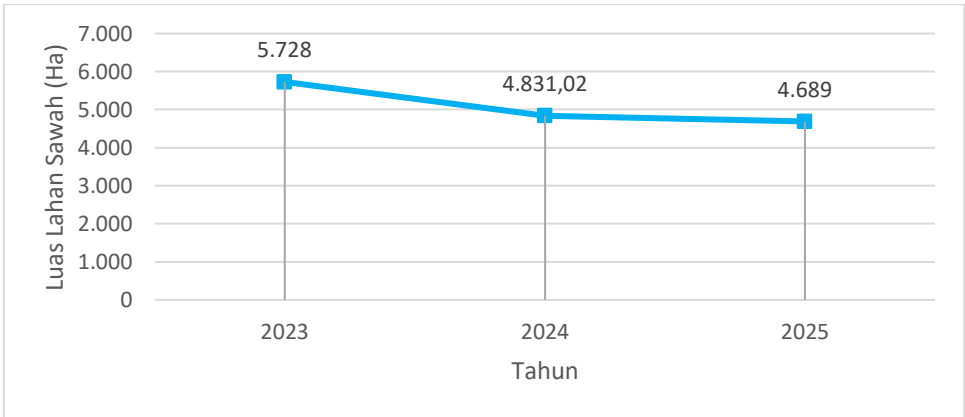
Indikator	Formulasi	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	– jumlah wisatawan thn n-1) x 100							
Persentase kebutuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Profesional Yang Terpenuhi	(Jumlah jenis usaha pariwisata atau sub sektor ekraf yang dibina/ jumlah usaha pariwisata atau sub sektor ekraf) x 100	%	-	-	56,67	61,54	-	-
Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		%	59,18	60	-	-	-	-
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif		%	53,33	53,85	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2026.

3) **Urusan Pertanian**

Sektor pertanian meliputi sektor pertanian tanaman pangan, sektor tanaman hortikultura, sektor tanaman perkebunan dan sektor peternakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sektor pertanian adalah luas lahan. Luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan tiap tahunnya karena terjadi alih fungsi wasah ke kegiatan lainnya. Pada kurun waktu 2023 sampai dengan 2025, luas sawah berkurang sebanyak 1039 Ha dari 5.728 Ha menjadi 4.689 Ha. Ini berarti dalam waktu dua tahun sekitar 18,1% lahan sawah terjadi alih fungsi menjadi kegiatan lainnya. Luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.42.
Luas Lahan Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2026



Penyelenggaraan pertanian di Kota Tasikmalaya didukung oleh kelembagaan pertanian berbentuk kelompok tani yang terdiri dari Kelompok Dewasa, Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Taruna Tani. Dari tahun 2023 sampai dengan 2025 terdapat peningkatan jumlah kelompok tani dari 699 kelompok menjadi 738 kelompok. Berikut disajikan perkembangan kelompok tani di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.127.
Kelompok Tani di Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2025

Tahun	Kelompok Tani				Jumlah Anggota (Orang)
	Kelompok Dewasa	KWT	Taruna Tani	Jumlah Poktan	
2023	455	161	83	699	27.573
2024	461	175	86	722	27.573
2025	468	178	92	738	27.449

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2026

Produksi tanaman pangan selama tiga tahun terakhir, terdapat komoditas yang mengalami fluktuatif yaitu padi turun di tahun 2024 (sekitar 58.675 ton), produksi bangkit secara impresif pada 2025 mencapai 75.859,51 ton, selanjutnya adalah jagung, kacang tanah dan ubi kayu (naik di tahun 2024, turun di tahun 2025). Produksi ubi jalar mengalami penurunan hampir 50% pada tahun 2025, sedangkan kedelai berhenti produksi pada tahun 2024 dan 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.128.
Produksi Tanaman Pangan di Kota Tasikmalaya
Tahun 2023 – 2025

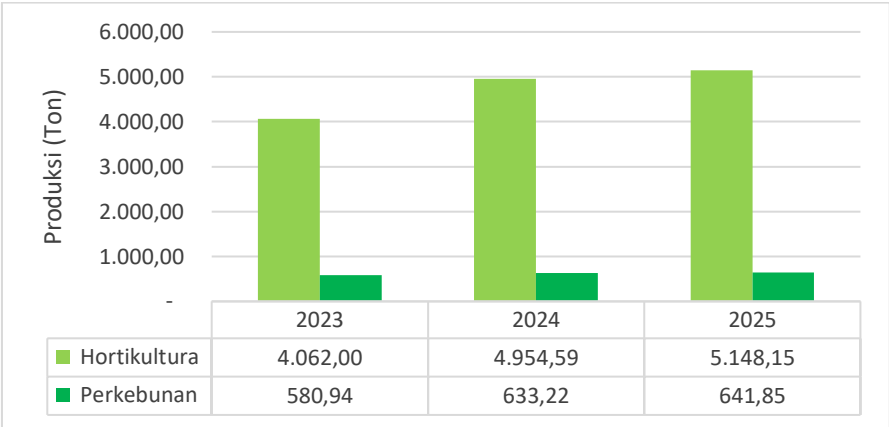
Tahun	Padi (ton)	Jagung (ton)	Kedelai (ton)	Kacang Tanah (ton)	Ubi Jalar (ton)	Ubi Kayu (ton)
2023	68.528	562	8,4	64,2	274	938
2024	58.675,93	788,87	0	117,6	280,50	1517,50
2025	75.859,51	639,9	0	51,1	145,6	677,50

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2026

Sektor tanaman hortikultura di Kota Tasikmalaya terdiri dari tanaman hortikultura sayuran dan tanaman hortikultura buah-buahan. Komoditas tanaman hortikultura sayuran terdiri dari komoditas cabe besar, cabe rawit, tomat, ketimun, petsai/sawi, dan kacang panjang. Sementara komoditas tanaman hortikultura buah-buahan terdiri dari komoditas salak, pisang, rambutan, mangga, pepaya, durian dan manggis. Selain itu terdapat juga komoditas tanaman perkebunan yang terdiri dari komoditas mendong, kelapa, lada, kakao, pala, kopi dan tembakau

Produksi hortikultura dan perkebunan dalam kurun waktu 2023 sampai dengan 2025 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.43.
Produksi Hortikultura dan Perkebunan
di Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Tasikmalaya, 2026

Pada tanaman hortikultura, komoditas yang banyak ditanam di Kota Tasikmalaya adalah ketimun dan cabai besar/tw/teropong. Luas panen ketimun pada tahun 2025 seluas 30,11 hektar dengan total produksi 4.999,89 kuintal. Sedangkan untuk cabai besar/tw/teropong dengan luas panen 16,83 hektar dengan produksi 1.882,32 kuintal. Pada tanaman buah-buahan, buah primadona Kota Tasikmalaya yaitu pepaya. Pada tahun 2025 total produksinya sebanyak 2.597,30 kuintal. Komoditi perkebunan yang paling banyak di Kota Tasikmalaya adalah kelapa. Luas tanam komoditi ini pada tahun 2025 adalah 1.169,25 hektar dengan produksi sebanyak 524,05 ton (Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2026, BPS Kota Tasikmalaya).

Komoditas sektor peternakan terdiri dari ternak besar seperti sapi, kambing dan domba serta unggas seperti ayam, itik dan puyuh. Populasi Sapi Perah (202 ekor) dan Kuda (442 ekor) sama sekali tidak berubah selama periode 2023-2025. Domba mengalami penurunan drastis di tahun 2025 menjadi 11.432 ekor, setelah sebelumnya sempat naik ke angka 13.394 pada tahun 2024. Sapi Potong sempat mengalami penurunan di 2024 (2.686 ekor), namun berhasil pulih di 2025 menjadi 2.779 ekor. Ayam Ras Pedaging menjadi komoditas dengan populasi tertinggi, stabil di angka 1.095.145 ekor pada 2023-2024, dan meningkat menjadi 1.097.445 ekor pada 2025. Ayam Buras & Ayam Ras Petelur: Keduanya menunjukkan tren kenaikan konsisten. Ayam Ras Petelur tumbuh dari 144.090 (2023) menjadi 154.830 (2025). Itik dan Puyuh mengalami kenaikan populasi di tahun 2024 dan cenderung dipertahankan (stabil) hingga 2025.

Tabel 2.129.
Populasi Ternak di Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2025

Komoditas (Ton)	2023	2024	2025
Sapi Potong	2.774	2.686	2.779
Sapi Perah	202	202	202
Kerbau	680	671	671
Kuda	442	442	442
Kambing	3.313	3.355	3.313
Domba	13.279	13.394	11.432



Komoditas (Ton)	2023	2024	2025
Ayam Buras	731.293	738.793	738.793
Ayam Ras Petelur	144.090	151.890	154.830
Ayam Ras Pedaging	1.095.145	1.095.145	1.097.445
Itik	46.279	46.849	46.849
Puyuh	33.859	34.859	34.958

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Tasikmalaya, 2026

Sementara produksi daging dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Produksi daging di Kota Tasikmalaya didominasi daging sapi potong dan daging ayam ras. Produksi daging ayam ras lebih banyak daripada produksi daging sapi dan trennya terus meningkat selama 3 tahun terakhir seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.130.
Produksi Daging di Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2025

Tahun	Produksi Daging (Ton)						
	Sapi	Kambing	Domba	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila
2023	3993	5	10	751	134	8391	39
2024	3175	3	8	759	144	10109	37
2025	4425*	8*	23*	751*	133*	10519*	36*

Keterangan : * data sementara
Sumber: Open Data Jabar, 2026

Produksi telur didominasi oleh telur ayam ras petelur dan telur ayam bukan ras. Produksi telur ayam ras petelur mengalami penurunan dari 3.431 ton (2023) menjadi 3083 ton pada tahun 2025. Produksi susu sapi mengalami stagnasi dari tahun 2023 sampai dengan 2025, sedangkan susu kambing tidak ada produksi ditahun 2024 dan 2025. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.131.
Produksi Telur dan Susu di Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2025

Tahun	Produksi Telur (Ton)				Produksi Susu (Ton)	
	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik	Puyuh	Sapi	Kambing
2023	1568	3431	294	57	503	7
2024	1585	3327	295	59	503	0
2025	1568*	3083*	294*	57*	503*	0

Keterangan : * data sementara
Sumber: Open Data Jabar, 2026

Di sektor peternakan, sarana prasarana milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ada saat ini adalah Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan. Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH dan Pasar Hewan. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini



pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

Adapun capaian kinerja urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.132.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian

INDIKATOR KINERJA DAERAH	FORMULASI	SATUAN	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Produksi pertanian dan perikanan	Jumlah produksi pertanian dan perikanan	Ton	75.000	96.189,88	-	-	-	-
Produksi Tanaman Pangan	Angka Produksi Tanaman Pangan	Ton	85.500	70.374,60	75.000	61.364,40	61.400	62.241,75
Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Angka Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	5.900	4.642,79	6.000	5.587,81	5.750	3.372,42
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi padi/luas panen hektar	Kw/Ha	62,9	62,64	62,65	61,52	-	-
Persentase sarana Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan yang dimanfaatkan	Jumlah sarana yang dimanfaatkan / Jumlah sarana yang disediakan x 100%	%	-	-	100	100	-	-
Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Perda LP2B	Ha	-	-	-	-	1.351	1.351
Produksi Komoditas Peternakan	Jumlah Produksi Hasil Peternakan	Ton	10.350	11.212	10.400	13.148	13.149	16.609,27
Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah populasi ternak tahun n – Jumlah populasi ternak tahun n-1 / jumlah populasi ternak n-1 x 100	%	1	0,12	-	-	-	-
Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan	Jumlah sarana yang dimanfaatkan / Jumlah sarana yang disediakan x 100%	%	-	-	100	100	-	-
Persentase penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	jumlah kejadian/kasus yang ditangani dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular yang terjadi	%	100	100	-	-	-	-
Persentase penyakit hewan yang tertanggulangi	Jumlah penyakit hewan yang ditanggulangi / Jumlah penyakit hewan yang terjadi x 100%	%	-	-	100	100	-	-
Tingkat pengendalian	Persentase penanganan	%	-	-	-	-	100	100



INDIKATOR KINERJA DAERAH	FORMULASI	SATUAN	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
penyakit hewan menular strategis (PHMS)	kejadian kasus penyakit hewan menular							
Persentase penanganan bencana pertanian	Jumlah areal terdampak bencana yang ditanggulangi/Jumlah total areal terdampak bencana x 100	%	-	-	-	-	75	100
Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	(Jumlah kegiatan penanganan dampak perubahan iklim yang dilakukan/Total jumlah kegiatan yang direncanakan) x 100%	%	-	-	-	-	75	100
Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan perizinan	%	-	-	-	-	100	100
Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Jumlah penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya/Jumlah penyuluh pertanian x 100	%	-	-	-	-	5,7	100
Persentase kelembagaan tani yang dibentuk dan beroperasi	Pesentase kelembagaan tani yang aktif beroperasi dari total kelembagaan tani yang dibentuk	%	-	-	-	-	60	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2026

Berdasarkan data capaian diatas, produksi tanaman pangan mengalami fluktuasi dan tekanan. Pada tahun 2024, realisasi (61.364,40 Ton) berada di bawah target (75.000 Ton), namun berhasil bangkit pada tahun 2025 dengan realisasi 62.241,75 Ton yang melampaui target tahun tersebut. Produktivitas padi terdapat penurunan pada produktivitas per hektar dari 62,64 Kw/Ha (tahun 2023) menjadi 61,52 Kw/Ha (tahun 2024). Produksi hortikultura dan perkebunan mengalami penurunan drastis pada tahun 2025, di mana realisasi hanya mencapai 3.372,42 Ton dari target 5.750 Ton. Penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) terealisasi penuh seluas 1.351 Ha.

Produksi komoditas peternakan konsisten melampaui target setiap tahunnya, dan menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Pada tahun 2025, realisasi mencapai 16.609,27 Ton, melampaui target sebesar 13.149 Ton. Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan penanganan kasus penyakit hewan selalu mencapai terealisasi 100%.

Meskipun produksi sektor pertanian fluktuatif, penanganan bencana pertanian dan dampak perubahan iklim pada 2025 mencapai 100%, melampaui target sebesar



75%. Realisasi kelembagaan tani yang aktif mencapai 100% melampaui target 60%. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh pertanian mencapai 100%, melonjak jauh dari target yang hanya 5,7%. Hal ini dikarenakan seluruh penyuluh wajib mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM.

4) **Urusan Perdagangan**

Perekonomian Kota Tasikmalaya banyak didorong dan didukung oleh kategori perdagangan. Pasar rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya semakin penting sebagai pusat lalu lintas perdagangan hasil pertanian dan hasil industri kecil menengah dari dan ke berbagai wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Saat ini, Pasar Cikurubuk menjadi pasar induk hasil bumi bagi masyarakat di wilayah Priangan Timur, yang mampu memasarkan berbagai produk hasil pertanian paling lengkap, seperti: beras, sayuran, daging, ikan, telur dan lainnya serta hasil industri kecil menengah seperti alas kaki dan bordir. Berikut data pasar rakyat di Kota Tasikmalaya

Tabel 2.133.
Jumlah Pasar Rakyat

No.	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Lantai	Los	Kios	Estimasi Pedagang
1	Pasar Cikurubuk	Jl. Residen Ardiwinangun, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1994	43.120	25.650	1	50	2.772	±2.500–3.000
2	Pasar Pancasila	Jl. Pancasila, Kel. Lengkongsari Kec. Tawang	1995	6.540	4.656	2	60	334	±600
3	Pasar Indihiang	Jl. Letnan Harun, Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang	1997	10.622	743	1	0	402	±450
4	Pasar Padayungan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tugujaya Kec. Cihideung	1995	9.000	1.968	1	0	261	±280
5	Pasar Cibeuti	Jl. Raya Cibeuti Kel. Cibeuti Kec. Kawalu	1990	696	691	1	12	44	±60
6	Pasar Gegernoong	Jl. Raya Tamansari Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari	1999	1.000	538	1	0	91	±100
7	Pasar Burung dan Besi	Jl. Kh. Ez. Mutaqien, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1997	6.407	444	1	0	244	±280



No.	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Lantai	Los	Kios	Estimasi Pedagang
8	Pasar Nyemplong/ Sindang Hayu	Setiawargi Kel. Setiawargi Kec. Tamansari	2016	5.650	1.364	1	26	0	±60
9	Pasar Cibeureum	Jl. Kh. Khoer Affandi Kel. Margabakti Kec. Cibeureum	2018	4.630	2.989	1	128	78	±200
10	Pasar Purbaratu	Kp. Ciwasmandi. Kel. Singkup Ke. Purbaratu	2019	938	303	1	18	8	±30

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2026.

Pasar rakyat di Kota Tasikmalaya berjumlah sekitar 10 pasar utama yang tersebar di berbagai kecamatan. Pasar-pasar tersebut berperan sebagai pusat perdagangan lokal, distribusi komoditas pertanian, serta penopang ekonomi masyarakat, dengan Pasar Cikurubuk sebagai pasar induk terbesar di wilayah Priangan Timur.

Tabel 2.134.
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Tasikmalaya
Tahun 2022-2025

Sarana Perdagangan	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Pasar Tradisional	10	10	10	10
Pasar Modern	9	9	10	10
Toko	443	443	277	285
Kios	4,443	4,443	4,185	4,185
Gudang	-	-	-	100
Jumlah/ Total	4,905	4,905	4,482	4,590

Sumber: Kota Tasikmalaya dalam Angka, BPS 2026

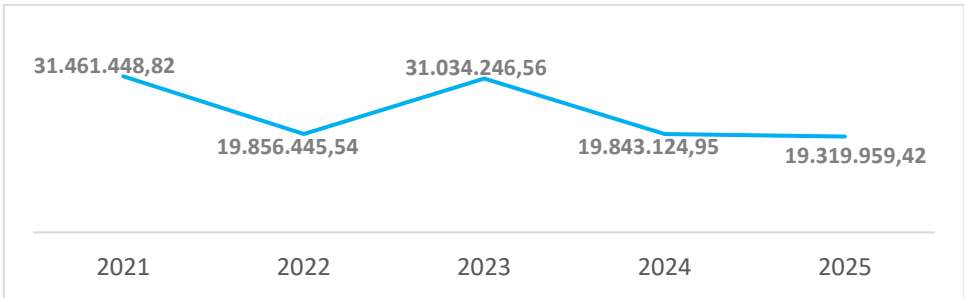
Data menunjukkan bahwa jumlah pasar tradisional di Kota Tasikmalaya relatif stabil selama periode 2022–2025 yaitu sebanyak 10 unit setiap tahun. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat pembangunan pasar tradisional baru maupun pengurangan pasar selama periode tersebut. Sementara itu, jumlah pasar modern mengalami sedikit peningkatan dari 9 unit pada tahun 2022–2023 menjadi 10 unit pada tahun 2024–2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan sektor perdagangan modern yang mulai bertambah di Kota Tasikmalaya. Keberadaan pasar modern tersebut berpotensi meningkatkan pilihan tempat berbelanja bagi masyarakat sekaligus mendorong persaingan dengan pasar tradisional.

Jumlah toko mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 443 unit pada tahun 2022–2023 menjadi 277 unit pada tahun 2024, kemudian sedikit meningkat menjadi 285 unit pada tahun 2025. Penurunan ini dapat disebabkan oleh perubahan klasifikasi usaha, pergeseran aktivitas perdagangan ke pasar modern atau platform digital, maupun penataan ulang data sarana perdagangan. Sementara itu, jumlah kios juga mengalami sedikit penurunan dari 4.443 unit pada tahun 2022–2023 menjadi 4.185 unit pada tahun 2024–2025. Pada tahun 2025 muncul 100 unit gudang, yang

sebelumnya tidak tercatat pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga total sarana perdagangan meningkat kembali menjadi 4.590 unit dari 4.482 unit pada tahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa jenis sarana perdagangan, sektor perdagangan di Kota Tasikmalaya masih menunjukkan kapasitas yang besar dengan dominasi sarana perdagangan berupa kios.

Berdasarkan pengamatan monitoring di lapangan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat dengan pasar modern, pasar rakyat secara bertahap harus ditingkatkan kebersihan, ketertiban dan kenyamanannya. Dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan Standar Nasional Indonesia mengenai pengelolaan pasar rakyat.

Gambar 2.44.
 Total Nilai Ekspor per Tahun (dalam USD)



Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan grafik Total Nilai Ekspor per Tahun Kota Tasikmalaya tahun 2021–2025, terlihat bahwa nilai ekspor mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2021 nilai ekspor tercatat sekitar USD 31 juta, kemudian mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2022 menjadi sekitar USD 19–20 juta. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perlambatan permintaan pasar global, gangguan rantai pasok pasca pandemi, serta penyesuaian produksi pada sektor industri ekspor utama seperti kerajinan, tekstil, dan produk kayu.

Pada tahun 2023 nilai ekspor kembali meningkat secara signifikan hingga sekitar USD 31 juta atau mengalami pertumbuhan 56,30%, yang menunjukkan adanya pemulihan aktivitas perdagangan internasional dan meningkatnya permintaan terhadap produk unggulan daerah seperti kerajinan mendong, bordir, serta produk kayu olahan. Namun demikian, pada tahun 2024 nilai ekspor kembali mengalami penurunan hingga sekitar USD 19–20 juta dan relatif stagnan hingga tahun 2025 dengan nilai sekitar USD 19 juta atau mengalami penurunan -36,06% pada tahun 2024 dan di tahun 2025 -3,51 atau secara rinci dapat melihat tabel di bawah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja ekspor daerah masih belum stabil dan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar global serta kapasitas produksi industri lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan daya saing produk ekspor, diversifikasi pasar tujuan, serta peningkatan kualitas dan inovasi produk unggulan daerah agar kinerja ekspor Kota Tasikmalaya dapat meningkat secara lebih stabil di masa mendatang.

Tabel 2.135.
 Persentase Pertumbuhan Nilai Ekpor 2022-2025

Tahun	2022	2023	2024	2025
Persentase Pertumbuhan Nilai Ekpor (%)	-58.45	56.30	-36,06	-3.51

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.



Adapun capaian kinerja urusan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.136.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	(PDRB sektor perdagangan n – PDRB sektor perdagangan n-1)/ PDRB sektor Perdagangan n-1 x 100%	%	4,59	5,86	6,53	NA	3,16	5,21
Nilai Ekspor non migas	Nilai ekspor tahun n - tahun n-1)/ nilai ekspor tahun n-1 x 100%	(Juta)US\$		33	35	NA	19,3	6
Nilai ekspor barang	Jumlah Barang yang Diekspor x Harga Barang per Unit atau Total Nilai FOB (Free On Board) dari Barang yang Diekspor	Juta USD			20.8	NA	19.28	19.14
Laju Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik tahun n - tahun n-1 / jumlah sarana perdagangan dalam kondisi baik tahun n-1) x 100%	%		80	100	NA	85	100
Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan yang Ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang ditindaklanjuti/ jumlah rekomendasi hasil pemantauan x 100%	%		10	100	NA	10	100
Persentase Konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu pada UPTD Metrologi Legal	Jumlah konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu/ jumlah konsumen yang mengajukan pelayanan x 100%	%	80	80	85	NA	100	100

Sumber: Dinas KUMKM, Perindag Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan tabel capaian indikator sektor perdagangan, terlihat bahwa kinerja beberapa indikator menunjukkan hasil yang bervariasi antara target dan realisasi pada periode 2023–2025. Pada indikator persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, realisasi pada tahun 2024 sebesar 3,16% masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 5,86%, sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor perdagangan belum mampu mencapai tingkat yang diharapkan. Namun pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi 5,21%, mendekati target sebesar 6,53%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja sektor perdagangan meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut dapat



dipengaruhi oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi, meningkatnya aktivitas perdagangan, serta bertambahnya perputaran barang dan jasa di daerah.

Sementara itu, beberapa indikator pelayanan dan pengawasan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pada indikator laju sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik, realisasi tahun 2024 sebesar 85% telah melampaui target 80%, dan pada tahun 2025 mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Demikian pula pada indikator persentase rekomendasi hasil pemantauan yang ditindaklanjuti, realisasi tahun 2024 sebesar 10% sesuai target, dan meningkat signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai 100%, menunjukkan adanya peningkatan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan yang dilakukan. Selain itu, indikator persentase konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu pada UPTD Metrologi Legal juga menunjukkan kinerja sangat baik, dengan realisasi 100% pada tahun 2024 dan 2025, melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada bidang perlindungan konsumen dan metrologi telah berjalan dengan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5) **Urusan Perindustrian**

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas.

Berikut adalah data unit industri di Kota Tasikmalaya tahun 2025 berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 sesuai NIB yang dikeluarkan melalui aplikasi OSS (Online Single Submission) berbasis resiko yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Data unit Industri tersebut tidak dapat dibandingkan dengan data sebelumnya karena klasifikasi dalam KBLI Tahun 2025 berbeda dengan jenis dan klasifikasi sebelumnya.

Tabel 2.137.
Penambahan Unit Industri Di Kota Tasikmalaya 2025
berdasarkan KBLI Tahun 2025

No.	Gol. Pokok (2 digit)	Klasifikasi Industri Pengolahan	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)
1	10	Industri Makanan	12.112	20.247	62.266.243.024
2	11	Industri Minuman	906	1.473	4.174.200.000
3	12	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-
4	13	Industri Tekstil	41	176	1.947.300.000
5	14	Industri Pakaian Jadi	390	2.313	37.101.00.000
6	15	Industri Kulit dan Alas Kaki	42	312	3.450.000.000
7	16	Industri Kayu dan Anyaman	33	155	2.836.600.000
8	17	Industri Kertas	6	48	200.000.000
9	18	Industri Percetakan dan reproduksi media	69	292	4.773.600.000
10	19	Industri Produk dari batu bara dan minyak bumi	3	17	125.000.000
11	20	Industri Bahan kimia	38	70	2.243.500.000



No.	Gol. Pokok (2 digit)	Klasifikasi Industri Pengolahan	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)
12	21	Industri Farmasi	16	22	659.600.000
13	22	Industri Karet dan Plastic	9	26	690.000.000
14	23	Industri Barang galian bukan logam	21	76	5.725.000.000
15	24	Industri logam dasar	2	6	120.000.000
16	25	Indusri Barang Logam	31	68	2.061.500.000
17	26	Industri Komputer, elektronik dan optic	26	92	1.256.200.000
18	27	Industri Peralatan Listrik	13	34	1.040.000.000
19	28	Industri Mesin dan peralatannya	28	105	1.795.500.000
20	29	Industri Kendaraan bermotor	3	13	200.000.000
21	30	Industri Alat angkutan lainnya	5	16	430.000.000
22	31	Industri Furniture	39	335	12.442.604.000
23	32	Industri Pengolahan Lainnya	25	101	2.858.000.000
24	33	Industri reparasi dan Instalasi Mesin/Peralatan	59	73	5.017.555.555
		Jumlah	13.917	26.070	153,413,402,579.00

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan tabel klasifikasi Industri Pengolahan menurut golongan pokok KBLI (2 digit), terlihat bahwa struktur industri pengolahan didominasi oleh beberapa subsektor utama baik dari sisi jumlah perusahaan, tenaga kerja, maupun nilai investasi. Secara keseluruhan tercatat 13.917 unit usaha industri pengolahan dengan total tenaga kerja sekitar 206.033 orang dan nilai investasi sebesar Rp153,41 miliar. Jumlah unit usaha terbesar berada pada Industri Makanan sebanyak 12.112 perusahaan, yang juga menyerap tenaga kerja paling besar yaitu 20.247 orang dengan nilai investasi sekitar Rp62,26 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa industri makanan merupakan sektor yang paling dominan dan menjadi tulang punggung industri pengolahan di daerah tersebut, kemungkinan besar didukung oleh keberadaan usaha mikro dan kecil yang bergerak pada pengolahan makanan tradisional maupun produk kuliner lokal.

Selain industri makanan, subsektor lain yang cukup menonjol adalah Industri Pakaian Jadi dengan 390 perusahaan dan 2.313 tenaga kerja serta investasi sekitar Rp37,1 miliar, yang mencerminkan kuatnya sektor tekstil dan garmen sebagai salah satu basis ekonomi daerah. Subsektor Industri Furnitur juga memiliki kontribusi cukup signifikan dengan 39 perusahaan, 335 tenaga kerja, dan nilai investasi sekitar Rp12,44 miliar, yang kemungkinan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kayu serta kerajinan lokal. Sementara itu, beberapa subsektor seperti Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kayu dan Anyaman, serta Industri Barang Logam juga memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi meskipun dalam skala yang lebih kecil.

Di sisi lain, terdapat beberapa subsektor industri yang jumlah unit usahanya relatif sedikit dan nilai investasinya masih terbatas, seperti Industri Kendaraan



Bermotor, Industri Logam Dasar, dan Industri Alat Angkutan Lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur industri pengolahan di daerah tersebut masih didominasi oleh industri padat karya berskala kecil hingga menengah, khususnya pada sektor makanan, tekstil, dan kerajinan. Kondisi ini sekaligus menggambarkan bahwa pengembangan industri pengolahan ke depan dapat diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui modernisasi teknologi produksi, penguatan rantai pasok, serta peningkatan investasi pada subsektor industri yang memiliki potensi pengembangan lebih lanjut agar struktur industri menjadi lebih beragam dan berdaya saing.

Tabel 2.138.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Industri

Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Rasio PDRB Industri Pengolahan				13.03			12.94
Persentase Peningkatan Industri	%	6.78	6.78	8	NA	5	5,21
Persentase Pencapaian sasaran Pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	%	-	-	100	-	-	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri yang dikeluarkan	%	-	-	16.9	-	-	5.47
Persentase Ketersediaan informasi industri secara lengkap. Akurat dan terkini	%	-	-	100	-	-	100

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan tabel capaian indikator **Rasio PDRB Industri Pengolahan**, pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar **13,03**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **12,94**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah **belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan**, meskipun selisihnya relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor industri pengolahan masih cukup stabil dan tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah, namun pertumbuhannya belum optimal. Capaian indikator pembangunan sektor industri, terlihat bahwa persentase peningkatan industri pada tahun 2024 dan 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 realisasi hanya mencapai 5% dari target 6,78%, dan pada tahun 2025 sebesar 5,21% dari target 8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah atau perkembangan industri masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan permodalan, daya saing produk, serta dinamika pasar yang mempengaruhi perkembangan industri di daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sektor industri pengolahan melalui peningkatan kapasitas produksi, pengembangan inovasi produk, perluasan akses pasar, serta dukungan kebijakan dan pembinaan industri agar kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dapat terus meningkat pada periode berikutnya.

Sementara itu, indikator persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK menunjukkan realisasi 100% pada tahun 2025, yang menandakan bahwa program atau kegiatan yang direncanakan dalam dokumen



perencanaan industri daerah telah terlaksana sesuai dengan target. Pada indikator persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dibandingkan dengan jumlah izin usaha industri yang dikeluarkan, realisasi pada tahun 2025 sebesar 5,47% masih jauh di bawah target 16,9%, yang mengindikasikan bahwa kegiatan pemantauan dan pengawasan industri masih perlu ditingkatkan agar seluruh industri yang memiliki izin dapat terpantau secara optimal. Di sisi lain, indikator ketersediaan informasi industri yang lengkap, akurat, dan terkini telah mencapai 100% pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa sistem pendataan dan penyediaan informasi industri telah berjalan dengan baik dan dapat mendukung perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menghadapi dinamika persaingan regional dan nasional yang semakin ketat, penting untuk mengidentifikasi dan memperkuat aspek-aspek kunci daya saing Kota Tasikmalaya.

2.1.4.1 Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Tasikmalaya memiliki skor tinggi dari Sumber Daya Manusia dan Pasar. Komponen yang belum mendapat nilai optimal di lingkungan pendukung dan ekosistem inovasi. Lebih rinci dapat melihat tabel berikut:

Gambar 2.45.
Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kota Tasikmalaya



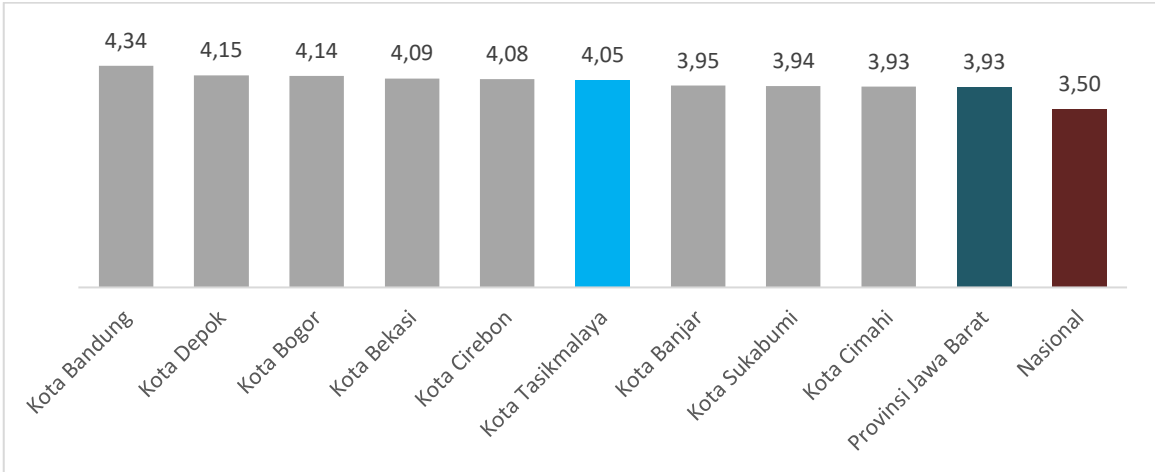
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026.

Berdasarkan Gambar di atas, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Tasikmalaya menunjukkan performa yang sangat kompetitif dengan skor keseluruhan 4,05 poin, yang menempatkannya pada peringkat ke-6 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Capaian ini didorong oleh dominasi yang kuat pada komponen Pasar, khususnya Pilar

7 (Pasar Produk) yang meraih skor sempurna 5,00, serta dukungan infrastruktur digital yang memadai melalui Pilar 3 (Adopsi TIK) dengan skor 4,94. Secara struktural, Kota Tasikmalaya memiliki fondasi kelembagaan yang solid (Institusi: 4,70), namun masih menghadapi tantangan pada aspek produktivitas ekonomi riil.

Meskipun secara umum berada di papan atas, analisis terhadap 12 pilar menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu mendapat perhatian. Sektor tenaga kerja dan dinamika bisnis menjadi titik lemah utama, terlihat dari skor rendah pada Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja: 3,27) dan Pilar 11 (Dinamika Bisnis: 3,41). Rendahnya skor pada pasar tenaga kerja dan efisiensi bisnis ini mengindikasikan bahwa meskipun pasar produk sangat kuat, penyerapan tenaga kerja lokal dan kemudahan operasional bisnis belum optimal. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu difokuskan pada sinkronisasi antara kualitas SDM dengan kebutuhan pasar kerja serta penyederhanaan birokrasi bisnis untuk menyeimbangkan ekosistem inovasi yang saat ini masih berada di angka rata-rata (3,95).

Gambar 2.46.
 Perbandingan Nilai IDSD Tahun 2025
 Kota Tasikmalaya dengan, Nasional, Jawa Barat, dan Kota-Kota di Jawa Barat

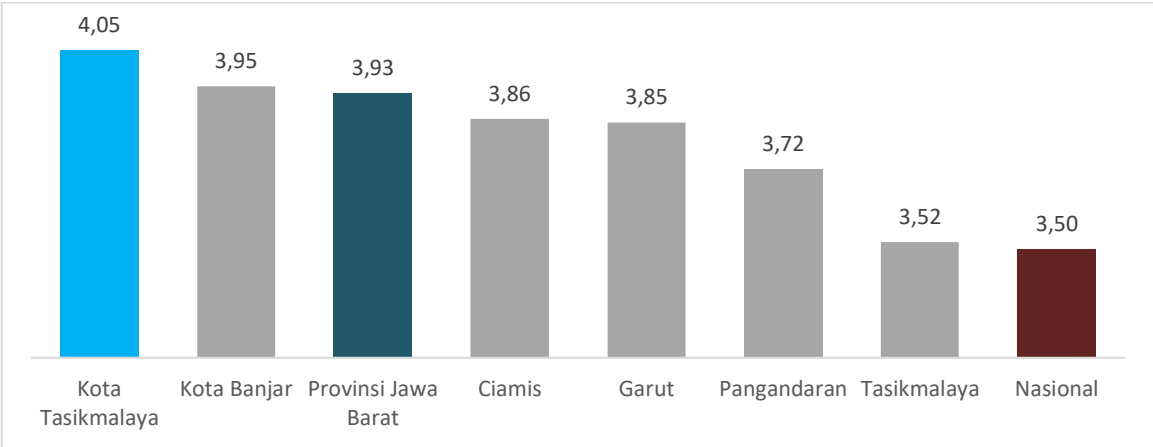


Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026.

Secara posisi, Kota Tasikmalaya menempati peringkat ke-6 di antara kota-kota yang ditampilkan dengan skor 4,05. Angka ini menunjukkan bahwa daya saing Kota Tasikmalaya berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat (3,93) dan jauh melampaui rata-rata Nasional (3,50). Meskipun terdapat selisih yang cukup terlihat dengan Kota Bandung sebagai pemuncak (4,34), posisi Tasikmalaya yang melampaui skor provinsi mengindikasikan bahwa kota ini merupakan salah satu penggerak utama daya saing di wilayah Jawa Barat.

Tren data ini memperlihatkan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki keunggulan kompetitif yang solid dibandingkan kota-kota satelit di sekitarnya seperti Kota Banjar (3,95), Kota Sukabumi (3,94), dan Kota Cimahi (3,93). Dengan skor yang sudah melampaui ambang batas rata-rata nasional dan provinsi, fokus kebijakan daerah ke depan dapat diarahkan untuk memperkecil kesenjangan dengan kota-kota besar di wilayah Metropolitan (seperti Bandung dan Depok) melalui optimalisasi pilar-pilar IDSD yang masih memiliki ruang untuk peningkatan. Namun jika melihat perkembangan IDSD Kabupaten Kota sekitar Priangan Timur, Kota Tasikmalaya lebih unggul dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti yang terlihat pada Gambar 2.42. Hal tersebut menjadi modal bagi Kota Tasikmalaya terus menjadi pusat perdagangan di Priangan Timur.

Gambar 2.47.
 Perbandingan Nilai IDSD Kota Tasikmalaya dengan, Nasional, Jawa Barat, dan Kota/Kabupaten di Priangan Timur

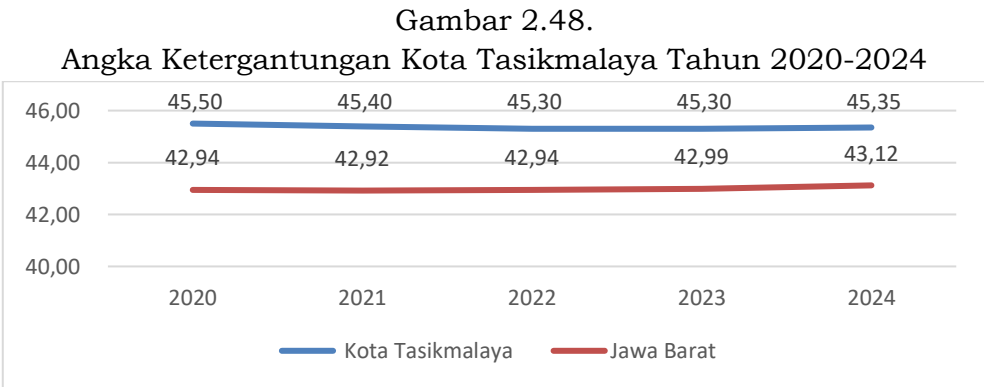


Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026.

Kota Tasikmalaya tampil sebagai pemimpin daya saing di wilayah Priangan Timur, dengan skor 4,05, yang menempatkannya secara signifikan di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat (3,93) dan rata-rata Nasional (3,50). Secara keseluruhan, wilayah Priangan Timur menunjukkan performa yang cukup variatif. Kota Banjar (3,95) menyusul di posisi kedua dengan angka yang masih melampaui rata-rata provinsi, sementara Ciamis (3,86) dan Garut (3,85) berada sedikit di bawah angka rata-rata Jawa Barat namun masih jauh di atas rata-rata nasional. Posisi terendah dalam grafik ini diduduki oleh Kabupaten Tasikmalaya (3,52), yang skornya hampir mendekati ambang batas nasional. Data ini menunjukkan perlunya akselerasi pembangunan dan pemerataan inovasi dari pusat kota ke daerah-daerah penyangga di sekitarnya guna mengangkat daya saing kawasan secara kolektif.

2.1.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kota Tasikmalaya yang memiliki jumlah penduduk besar, tentunya akan semakin memiliki daya saing SDM yang baik jika rasio ketergantungannya rendah. Jika dilihat tren dalam beberapa tahun terakhir, angka ketergantungan Kota Tasikmalaya cenderung membaik dan masih di bawah angka nasional.



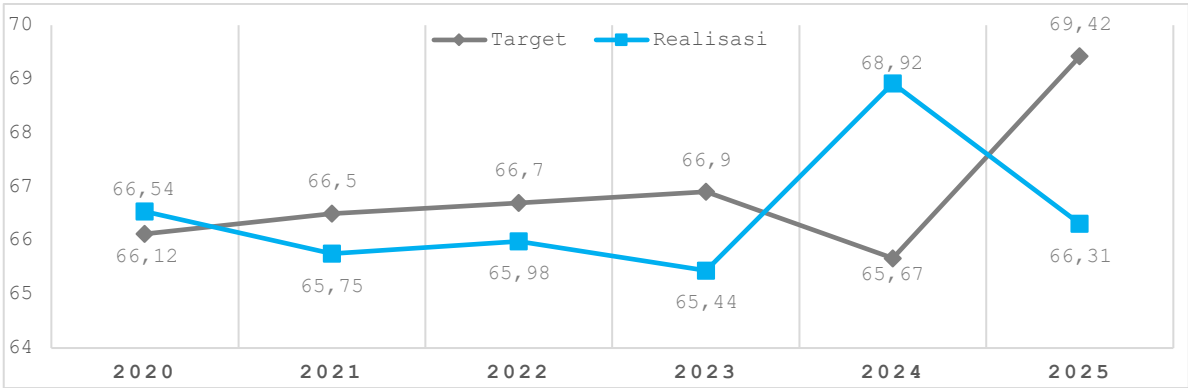
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Kota Tasikmalaya, 2026.

Pada tahun 2024, angka ketergantungannya sebesar 45,50, artinya setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi.



Pada tahun 2021-2024, Angkatan kerja di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 9.557 orang. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 sebanyak 385.800 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 2,61 persen poin dari 68,92 persen menjadi 66,31 persen.

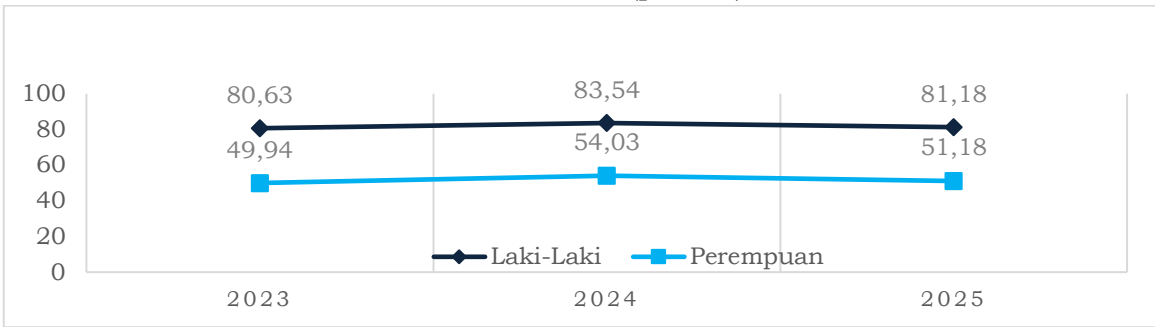
Gambar 2.49.
Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2025 (persen)



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 66,31 persen, turun 2,61 persen poin dibandingkan tahun 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kota Tasikmalaya.

Gambar 2.50.
Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025 (persen)



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2025, TPAK laki-laki sebesar 81,18 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 51,18 persen. Jika dibandingkan 2024, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 2,36 persen poin (dari 83,54 persen menjadi 81,18 persen) dan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 2,85 persen poin (dari 54,03 persen menjadi 51,18 persen).

2.1.4.3 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Kombinasi antara adopsi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang strategis, dorongan Inovasi lokal, dan peningkatan Produktivitas Ekonomi menentukan daya saing sebuah daerah. Integrasi ketiga faktor ini memungkinkan daerah mengoptimalkan potensi sumber daya alam, menciptakan keunggulan kompetitif, dan menarik investasi.



1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Peranan kategori Industri Pengolahan di Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir terus menurun. Pada tahun 2021 perannya terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya sebesar 13,83 persen, terus menurun hingga pada tahun 2025 menjadi 12,94 persen.

Tabel 2.139.
Pertumbuhan PDRB Kota Tasikmalaya
Kategori Industri Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	22.844,02	24.974,68	27.411,43	29.612,77	31.991,67
PDRB Kategori Industri Pengolahan ADHB (Miliar Rupiah)	3.159,59	3.450,78	3.669,23	3.971,11	4.138,81
Peranan Kategori Industri Pengolahan (%)	13,83	13,82	13,39	13,41	12,94
Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan	1,91	5,39	3,35	5,46	2,64

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026 (diolah)

Industri pengolahan di Kota Tasikmalaya digerakkan oleh Industri Kecil Menengah (IKM). Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. IKM Kota Tasikmalaya terus tumbuh baik unit industri maupun penyerapan tenaga kerja. Mengacu dari data NIB yang dikeluarkan oleh DPMPPTS dan IUI Dinas KUKM Perindag, Unit industri Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mampu tumbuh 183,5 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pertumbuhan unit industri ini dipacu adanya *self declare* sertifikasi halal dari Kementerian Agama.

2. Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minum

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB regional yang berkontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan serta Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi ekonomi yang menjadi unggulan di Kota Tasikmalaya. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya cenderung signifikan.

Tahun 2025, kontribusi kategori ini terhadap PDRB Kota Tasikmalaya sebesar 2,022 triliun rupiah atau 6,32 persen. Peranannya terhadap PDRB relatif meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan tumbuhnya usaha kuliner di Kota Tasikmalaya.



Tabel 2.140.
PDRB, Peran dan Laju Pertumbuhan
Sektor Akomodasi Makanan dan Minum
Tahun 2023-2025

Uraian	2023	2024	2025
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	27.411,43	29.612,77	31.991,67
PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rupiah)	1.650,45	1.854,29	2.022,18
Peranan (%)	6,02	6,26	6,32
Laju Pertumbuhan	9,26	7,67	7,00

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026 (diolah)

Data ini menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum masih memiliki peran penting dalam struktur ekonomi Kota Tasikmalaya. Kenaikan pangsa sektor dari 6,02% di Tahun 2023 menjadi 6,32% di tahun 2025 mengindikasikan sektor ini relatif cukup tahan dan terus berkembang. Namun, perlambatan laju pertumbuhan perlu menjadi perhatian karena bisa menandakan mulai jenuhnya pasar, tekanan biaya, atau belum optimalnya daya tarik wisata dan konsumsi masyarakat.

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Menurut klasifikasi industri, pada tahun 2025 di Kota Tasikmalaya terdapat 37 jenis industri. Merujuk pada data yang tersaji di Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2026 menunjukkan jumlah perusahaan yang terlibat dalam industri pengolahan di Kota Tasikmalaya berjumlah 14.270 perusahaan. Tenaga Kerja yang terserap di sektor industri pengolahan mencapai 37.192 orang dengan nilai investasi sebesar Rp.180,106 miliar. Apabila dibandingkan dengan data tahun 2024, terdapat penambahan data jenis industri, jumlah tenaga kerja serta investasi.

Industri kreatif mendominasi industri pengolahan yang ada di Kota Tasikmalaya dari aspek jumlah perusahaan (95,96%), serapan tenaga kerja (67,73%) dan nilai investasi (66,60%). Industri kreatif yang ada di Kota Tasikmalaya ada di sub sektor kuliner, kriya, fashion, desain produk, pengembang permainan dan arsitektur.



Tabel 2.141.
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Industri Kreatif
Menurut Klasifikasi Industri di Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Klasifikasi Industri	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi
Kuliner	Makanan	8.017	12.097	61.383.114.000	12.113	20.247	62.266.243.000
	Minuman	568	868	16.489.315.000	906	1.473	4.174.200.000
Kriya	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	42	192	835.000.000	42	312	3.450.000.000
	Tekstil	56	453	361.500.000	41	176	1.947.300.000
	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	306	547	2.480.060.000	33	155	2.836.600.000
Fesyen	Pakaian Jadi	633	2.591	5.840.600.000	390	2.313	37.101.000.000
Desain Produk	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	-	-	-	25	95	1.923.000.000
Pengembang Permainan	Aktivitas Pengemban gan Video game	-	-	-	141	416	6.255.100.000
Arsitektur	Aktivitas arsitektural dan enjinering; pengujian dan analisis teknis	-	-	-	2	4	6.000.000
Jumlah		9.622	16.748	87.389.598.000	13.693	25.191	119.959.443.000

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2006.

Industri kreatif Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat dari sisi skala usaha, tenaga kerja, dan investasi. Mengacu pada baris total tabel, jumlah perusahaan naik dari 9.622 menjadi 13.693 atau tumbuh 42,31%, tenaga kerja naik dari 16.748 menjadi 25.191 atau tumbuh 50,41%, dan nilai investasi meningkat dari Rp87,39 miliar menjadi Rp119,96 miliar atau naik 38,54%.

Kuliner menyumbang mayoritas perusahaan dan tenaga kerja, terutama pada subsektor Makanan dan Minuman. Pada 2025, kuliner menampung sekitar 95,1% perusahaan dan 86,2% tenaga kerja industri kreatif. Namun, dari sisi investasi, kuliner justru turun 14,68% dibanding 2024, karena investasi pada subsektor minuman menurun tajam. Artinya, jumlah pelaku dan pekerja naik, tetapi kualitas nilai tambah investasi belum merata.

Subsektor fesyen mengalami penurunan jumlah perusahaan dari 633 menjadi 390 dan tenaga kerja dari 2.591 menjadi 2.313, tetapi nilai investasinya melonjak dari Rp5,84 miliar menjadi Rp37,10 miliar. Ini menunjukkan adanya konsentrasi modal yang lebih besar pada usaha yang lebih sedikit, terutama pada pakaian jadi.

Jumlah perusahaan kriya turun cukup tajam dari 404 menjadi 116 dan tenaga kerja dari 1.192 menjadi 643, tetapi nilai investasi naik dari Rp3,68 miliar menjadi Rp8,23 miliar. Ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha berkurang, ada peningkatan modal pada usaha yang bertahan atau masuk, terutama pada kulit, tekstil, dan kayu.

Pada 2025 mulai tercatat subsektor Desain Produk, Pengembang Permainan, dan Arsitektur. Kehadiran subsektor baru ini penting karena memperluas struktur industri kreatif Tasikmalaya yang sebelumnya sangat bertumpu pada kuliner. Terutama Pengembang Permainan yang sudah menyerap 141 perusahaan, 416 tenaga kerja, dan investasi Rp6,26 miliar.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa industri kreatif Kota Tasikmalaya berkembang pesat, tetapi masih sangat terkonsentrasi pada kuliner. Tantangan utamanya adalah menjaga pertumbuhan jumlah usaha agar diikuti pemerataan investasi, peningkatan produktivitas, dan penguatan subsektor non-kuliner supaya struktur industrinya lebih seimbang.

4. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian ekonomi masyarakat dan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam pengukuran ini, wirausaha didefinisikan sebagai penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, karena kelompok ini menunjukkan usaha yang telah berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025 Jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar di Kota Tasikmalaya sebanyak 21.367 orang dan Jumlah angkatan kerja berjumlah 385.800 orang maka Rasio Kewirausahaan Kota Tasikmalaya Tahun 2025 sebesar 5,54 persen. Nilai rasio kewirausahaan sebesar 5,54 persen menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja di Kota Tasikmalaya, terdapat sekitar 5 hingga 6 orang yang berstatus sebagai pengusaha yang telah mempekerjakan buruh tetap. Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor kewirausahaan di Kota Tasikmalaya memiliki peran yang cukup signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.

Jika dibandingkan dengan target nasional yang selama ini mendorong rasio kewirausahaan di atas 4 persen sebagai salah satu indikator negara maju berbasis kewirausahaan, maka capaian Kota Tasikmalaya sebesar 5,54 persen dapat dikategorikan cukup baik dan berada di atas ambang minimal nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kultur usaha masyarakat Kota Tasikmalaya relatif kuat, terutama didukung oleh aktivitas perdagangan, industri kreatif, kerajinan, kuliner, jasa, dan UMKM yang menjadi karakteristik ekonomi daerah.

Tingginya rasio kewirausahaan tidak terlepas dari karakter Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Priangan Timur. Struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan skala kecil-menengah, serta berbagai sektor jasa telah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya pelaku usaha. Data PDRB Kota Tasikmalaya juga menunjukkan bahwa sektor perdagangan, jasa perusahaan, akomodasi dan makan minum, serta informasi dan komunikasi merupakan sektor yang tumbuh relatif tinggi selama periode 2021–2025. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi berkembangnya usaha yang mampu meningkatkan skala bisnis dan menyerap tenaga kerja tetap.



Namun demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk bekerja secara keseluruhan, proporsi pengusaha yang mampu mempekerjakan buruh tetap masih relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kota Tasikmalaya masih berada pada kategori usaha mikro dan usaha mandiri yang belum berkembang menjadi usaha yang memiliki tenaga kerja tetap.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam peningkatan rasio kewirausahaan antara lain:

1. Dominasi usaha mikro dan informal yang memiliki keterbatasan modal dan akses pasar.
2. Rendahnya kemampuan usaha untuk melakukan ekspansi dan meningkatkan skala usaha.
3. Keterbatasan akses pembiayaan produktif bagi UMKM.
4. Rendahnya pemanfaatan teknologi digital dan inovasi bisnis pada sebagian pelaku usaha.
5. Persaingan usaha yang semakin ketat, baik dari dalam maupun luar daerah.

Untuk meningkatkan rasio kewirausahaan pada periode mendatang, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu mendorong:

- Transformasi UMKM mikro menjadi usaha kecil dan menengah yang lebih produktif.
- Penguatan akses pembiayaan melalui KUR, pembiayaan syariah, dan kemitraan perbankan.
- Pengembangan inkubasi bisnis dan kewirausahaan berbasis potensi lokal.
- Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan literasi digital.
- Penguatan hilirisasi produk unggulan daerah agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.
- Perluasan akses pasar melalui digitalisasi dan promosi produk lokal.

5. Indeks Inovasi Daerah

Pemerintah Kota Tasikmalaya pun telah aktif dalam mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Tercatat bahwa Indeks Inovasi Kota Tasikmalaya terus naik dari tahun 2021-2025, seperti tertera dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.142.

Indeks Inovasi Kota Tasikmalaya 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Inovasi	36,43 (inovatif)	38,70 (inovatif)	46,70 (inovatif)	49,38 (inovatif)	52,57 (inovatif)

Sumber: SK Menteri Dalam Negeri RI tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025

Sampai dengan tahun 2026, terdapat beberapa inovasi yang masih dilaksanakan antara lain:

1. **Perikatan Kasih (Pelayanan Pencatatan Pelaporan Akta Perkawinan dalam Jaringan mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP-EL Sehari Jadi)**
Inovasi "PERIKATAN KASIH" dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya pada tahun 2024, bertujuan untuk meningkatkan akurasi data



kependudukan melalui layanan pencatatan, pelaporan akta perkawinan, serta penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el dalam satu hari bagi pasangan non-Muslim. Inovasi ini mengubah pola layanan konvensional menjadi digital dan kolaboratif dengan melibatkan pimpinan rumah ibadah (Gereja, Vihara, Khonghucu) sebagai operator yang mengunggah berkas secara daring. Hasilnya, pengantin tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil karena dokumen dikirim melalui email dan diantar langsung, sehingga status perkawinan segera tercatat dan terintegrasi dengan dokumen kependudukan lainnya.

2. Digitalisasi Data Agregat Kependudukan SIMANTAP WEB-GIS (Sistem Informasi Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis WEB-GIS)

Inovasi "SIMANTAP WEB-GIS" dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sejak tahun 2023, bertujuan untuk mendigitalisasi data agregat kependudukan berbasis sistem informasi geografis (WEB-GIS) guna meningkatkan akurasi, kecepatan, dan aksesibilitas data bagi perangkat daerah, instansi, serta masyarakat. Dengan SIMANTAP, permintaan data dapat diajukan secara daring, diverifikasi melalui DITJENDUKAPIL, dan disajikan dalam bentuk agregat tematik serta peta digital kecamatan/kelurahan, sehingga waktu pelayanan berkurang menjadi maksimal 2 hari kerja.

3. Bakul Tasik (Berbagi Kumpulan Makanan di Kota Tasikmalaya)

Inovasi "Bakul Tasik" dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya merupakan program non-digital yang bertujuan mengatasi ketimpangan antara makanan berlebih dari sektor usaha kuliner (hotel dan restoran) dan kerentanan pangan kelompok miskin ekstrem, lansia, disabilitas, serta anak yatim/piatu. Program ini bekerja dengan mengumpulkan makanan siap saji yang layak konsumsi dari lebih 21 mitra donatur, kemudian didistribusikan secara langsung oleh relawan (Tagana, TKSK, PSM, PKH) kepada penerima manfaat yang terdata dalam DTKS dan P3KE. Dari November 2023 hingga Maret 2025, Bakul Tasik telah mendistribusikan lebih dari 17.730 paket makanan kepada 300–350 penerima tetap per bulan, mengurangi pemborosan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan mingguan kelompok rentan.

4. PROTASIK Ver. 2.0 (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya Versi 2.0)

Inovasi "PROTASIK Ver. 2.0" dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya merupakan sistem digital berbasis web dan cloud computing yang menyajikan profil tanah milik pemerintah daerah secara detail, transparan, dan akuntabel. Inovasi ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset tanah secara konvensional, seperti ketiadaan dokumentasi digital, sulitnya pengawasan pemanfaatan, serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sewa tanah (hanya Rp60,6 juta pada 2019). Dengan fitur peta digital Google Maps, digitalisasi dokumen kepemilikan, perhitungan potensi pendapatan secara real-time, serta pembuatan perjanjian pemanfaatan tanah by system, PROTASIK Ver. 2.0 berhasil meningkatkan PAD dari pemanfaatan tanah menjadi Rp346,9 juta pada 2024 (kenaikan 82,53%), menyajikan informasi 733 bidang tanah, dan menghasilkan 101 dokumen perjanjian digital.

5. THR "TABUNGAN HARI RAYA" Asyik

Inovasi "THR (Tabungan Hari Raya)" dari PT BPRS Almadinah Tasikmalaya Perseroda merupakan inovasi digital yang bertujuan memperluas akses keuangan formal yang aman, transparan, dan akuntabel bagi kelompok rentan, khususnya perempuan, rumah tangga prasejahtera, dan penyandang disabilitas, melalui produk tabungan berbasis syariah untuk merencanakan kebutuhan saat Hari



Raya Idul Fitri. Diluncurkan pada Januari 2015, inovasi ini mengatasi permasalahan tingginya tekanan finansial menjelang hari raya dan dominasi praktik penghimpunan dana informal (arisan atau tabungan lebaran non-bank) yang rawan penipuan, dengan kasus arisan bodong merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah di berbagai daerah. Produk ini menggabungkan tiga pendekatan: layanan jemput bola oleh petugas lapangan yang mendatangi nasabah ke rumah, pasar, atau komunitas sesuai zonasi; dukungan teknologi digital berupa tablet dengan aplikasi Mobile Collection System (MCS) dan mini printer yang mencatat transaksi secara real-time; serta pemberdayaan koordinator komunitas (mantan penghimpun dana informal) sebagai mitra resmi bank yang mendapat reward berdasarkan capaian jumlah rekening dan target saldo. Hasilnya, jumlah rekening (Number of Account) meningkat dari 0 (2013) menjadi 960 (2019) dan 2.481 (2024), portofolio tabungan meningkat dari Rp0 menjadi Rp2,3 miliar (2019) dan Rp6,34 miliar (2024), serta indeks literasi keuangan meningkat dari 21,8% menjadi 64,44% dan indeks inklusi keuangan dari 59,7% menjadi 77,03% dalam periode 2013-2024. Inovasi ini selaras dengan Asta Cita ke-4 tentang penguatan SDM dan kesetaraan gender, serta mendukung Perpres 114/2020 tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan, dengan potensi replikasi tinggi di lembaga keuangan dan daerah lain yang masih menghadapi tantangan akses keuangan formal dan kasus penyalahgunaan dana.

6. MUSAPAHAH (Mari Unggah Struk Agar Pajak Anda Dapat Hadiah)

Inovasi Mari Unggah Struk Agar Pajak Anda Dapat Hadiah (MUSAPAHAH) merupakan inovasi dari Badan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi wisata yang ada di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya menunjukkan geliat pertumbuhannya sebagai salah satu kota yang berkembang pesat di Priangan Timur dan mempunyai daya tarik diantaranya kekayaan kulinernya. Mulai dari jajanan tradisional hingga masakan modern yang inovatif sehingga menjadi daya rangsang kedatangan wisatawan ke Kota Tasikmalaya. Sebagai kawasan pusat kuliner, Kota Tasikmalaya pun menjadi magnet utama bagi wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah.

Tak hanya itu, sektor hiburan di Kota Tasikmalaya juga mengalami perkembangan pesat. Hadirnya pusat perbelanjaan modern, taman hiburan, pusat pertunjukan seni, hingga kafe-kafe tematik menjadikan kota ini sebagai tempat yang cocok untuk menikmati waktu luang bersama keluarga dan rekan sejawat. Berbagai event dan festival yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun swasta turut menghidupkan suasana kota, menambah daya tarik wisata dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pertumbuhan kunjungan ke Kota Tasikmalaya mendorong pesatnya pembangunan sektor perhotelan. Mulai dari hotel berbintang hingga penginapan yang ramah di kantong. Kota Tasikmalaya kini mampu melayani kebutuhan akomodasi bagi semua segmen wisatawan. Fasilitas hotel yang modern, pelayanan yang prima, serta lokasi yang strategis menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai destinasi ideal untuk kunjungan bisnis maupun wisata.

Dengan potensi yang terus tumbuh dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Kota Tasikmalaya berada pada jalur yang tepat untuk menjadi pusat kunjungan unggulan di kawasan. Ke depan, Kota Tasikmalaya siap memperkuat perannya sebagai kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga menyenangkan untuk dikunjungi dan dijelajahi.

7. GENTING (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting)

Inovasi "GENTING" (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting) dari Puskesmas



Cihideung Kota Tasikmalaya merupakan program non-digital yang bertujuan menurunkan prevalensi stunting melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dimulai pada 2018 dengan membentuk Pos Ranting (RW Peduli Stunting) di tingkat RW, program ini melibatkan kader kesehatan, tenaga medis, donatur, dan perguruan tinggi dalam kegiatan pemantauan gizi, edukasi rutin, pemberian makanan tambahan, serta pelayanan ibu hamil dan balita. Sebelum inovasi, prevalensi stunting di wilayah tersebut mencapai 20,8% (2018); setelah implementasi, angka stunting turun menjadi 5,4% pada 2024, melampaui target kinerja Puskesmas (6,8%) maupun target RPJMD (17,4%). Program ini juga berhasil menggerakkan pembiayaan swadaya masyarakat hingga 20% dari total kebutuhan, meningkatkan praktik pemberian makanan bayi dan anak sesuai standar dari 0% menjadi 79,04%, serta difasilitasi oleh Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Inovasi ini selaras dengan Asta Cita ke-4 tentang penguatan SDM dan kesehatan, serta telah direplikasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi program nasional bernama GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).

8. Sarang Walet (Sambongpari Perang Lawan dan Kendalikan Diabetes)

Inovasi "Sarang Walet" (Sambongpari Perang Lawan dan Kendalikan Diabetes) dari Puskesmas Sambongpari Kota Tasikmalaya merupakan program non-digital yang bertujuan mengendalikan diabetes melitus melalui pendekatan holistik, kolaboratif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Diluncurkan pada Februari 2023, program ini melakukan deteksi dini secara masif tidak hanya di puskesmas tetapi juga di perkantoran, tempat ibadah, fasilitas umum, hingga door to door, serta melibatkan kader kesehatan, keluarga penyandang, klinik swasta, dan perguruan tinggi (Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya). Sebelum inovasi, pasien diabetes yang terkontrol sesuai standar hanya 150-170 orang per tahun (2021-2022); setelah inovasi, jumlah tersebut melonjak menjadi 873 orang pada 2024, dengan deteksi dini pada usia produktif meningkat dari 799 orang (2022) menjadi 11.960 orang (2024), serta terbentuknya kader terlatih dan peningkatan skrining lanjutan (dari 0 menjadi 873). Program ini didukung oleh Permenkes No. 71 Tahun 2015 dan PERDA Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2022, serta telah direplikasi oleh 18 puskesmas lain di Kota Tasikmalaya.

9. Siap No Diabetes (Sistem Aplikasi Pengingat Minum Obat Pada Pasien Degeneratif Dengan Aman, Benar dan Sehat)

Inovasi "Tebar Jala Darah" dari RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya merupakan program non-digital yang bertujuan meningkatkan jumlah donor darah sukarela dan memenuhi kebutuhan darah yang stabil di rumah sakit melalui pendekatan kolaboratif dan sistem jemput bola. Diluncurkan pada April 2023, inovasi ini mengatasi permasalahan rendahnya donor sukarela yang hanya mencapai 15-18% dari total kebutuhan darah (kebutuhan 2022: 10.115 kantong, terkumpul 1.511 kantong) dengan membangun jejaring donor darah melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, pendidikan, puskesmas, dan tempat ibadah. Program ini melakukan identifikasi mitra potensial, sosialisasi dan edukasi secara rutin, pelaksanaan donor darah menggunakan mobil unit keliling, serta membentuk grup WhatsApp sebagai wadah koordinasi dan penyebaran informasi jadwal donor. Hasilnya, jumlah jejaring kerjasama meningkat dari 2 MoU menjadi 21 MoU (2024), kepuasan pasien naik dari 75% menjadi 91,5%, ketersediaan stok darah dalam 24 jam tetap 100%, serta terbentuknya 100% kelompok donor

melalui WhatsApp, meskipun capaian donor sukarela baru mencapai 33% dari target 90% dan frekuensi kegiatan donor baru 7 dari target 10 kali per bulan (namun menunjukkan tren peningkatan).

10. TEBAR JALA DARAH (Tersebarunya Jejaring Donor Darah)

Inovasi "Tebar Jala Darah" dari RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya merupakan program non-digital yang bertujuan meningkatkan jumlah donor darah sukarela dan memenuhi kebutuhan darah yang stabil di rumah sakit melalui pendekatan kolaboratif dan sistem jemput bola. Diluncurkan pada April 2023, inovasi ini mengatasi permasalahan rendahnya donor sukarela yang hanya mencapai 15-18% dari total kebutuhan darah (kebutuhan 2022: 10.115 kantong, terkumpul 1.511 kantong) dengan membangun jejaring donor darah melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, pendidikan, puskesmas, dan tempat ibadah. Program ini melakukan identifikasi mitra potensial, sosialisasi dan edukasi secara rutin, pelaksanaan donor darah menggunakan mobil unit keliling, serta membentuk grup WhatsApp sebagai wadah koordinasi dan penyebaran informasi jadwal donor. Hasilnya, jumlah jejaring kerjasama meningkat dari 2 MoU menjadi 21 MoU (2024), kepuasan pasien naik dari 75% menjadi 91,5%, ketersediaan stok darah dalam 24 jam tetap 100%, serta terbentuknya 100% kelompok donor melalui WhatsApp, meskipun capaian donor sukarela baru mencapai 33% dari target 90% dan frekuensi kegiatan donor baru 7 dari target 10 kali per bulan (namun menunjukkan tren peningkatan).

11. MESIN WAKTU (Melawat Sepuh-Sepuh Idaman Sebagai Wujud Pelayanan yang terpadu dan terjangkau)

Inovasi "MESIN WAKTU" dari RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya merupakan program non-digital berupa layanan home care dan home visite yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia melalui pendekatan komprehensif yang meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, edukasi gizi dan perawatan diri, serta pemberdayaan lansia melalui pelatihan keterampilan (menyulam, membuat perhiasan, berkebun) dan kegiatan sosial (senam lansia, pengajian). Diluncurkan pada Mei 2023, inovasi ini mengatasi keterbatasan layanan kesehatan lansia yang selama ini belum memiliki klinik khusus geriatrik dan menyulitkan akses bagi lansia dengan mobilitas terbatas. Tim geriatri yang terdiri dari dokter, perawat, nutrisionis, dan apoteker melakukan kunjungan setiap Jumat minggu kedua dan keempat setiap bulan ke rumah atau panti lansia yang pernah berobat ke RSUD dan jauh dari fasilitas kesehatan. Hasilnya, jumlah lansia terlayani mencapai 607 orang (melebihi target 600), frekuensi kunjungan 60 kali (target 58 kali), jumlah rawat inap lansia turun 7% (dari 3.124 menjadi 2.672, melampaui target penurunan 5%), lansia yang hidup mandiri dan produktif naik 14% (dari 32 menjadi 46 orang, melebihi target 10%), serta skor Indeks Kepuasan Masyarakat naik 11% (dari 74 menjadi 82, melebihi target 10%). Inovasi ini selaras dengan Asta Cita ke-4 tentang penguatan SDM dan kesehatan, telah direplikasi oleh 23 unit kerja/instansi (termasuk seluruh puskesmas di Kota Tasikmalaya), dan bersinergi dengan program Gubernur "Nyaah ka Kolot" serta program Wali Kota "Kota Tasik Nyaah ka Sepuh".

12. GEMILANG (Gerakan Pemeriksaan Ibu Hamil Lengkap)

Inovasi "GEMILANG" dari Puskesmas Bantar Kota Tasikmalaya merupakan program non-digital yang bertujuan meningkatkan cakupan pemeriksaan ibu hamil lengkap sesuai standar (10T) dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui pendekatan kolaboratif antara kader, bidan kelurahan, dan dokter spesialis. Diluncurkan pada Januari 2022, inovasi ini mengatasi permasalahan rendahnya cakupan pemeriksaan sesuai standar yang hanya 13% pada 2021 dan



tingginya AKI (5 kematian dari 76 ibu hamil dengan komplikasi) yang disebabkan keterlambatan deteksi dini risiko akibat ibu hamil memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan yang belum memiliki sarana lengkap.

Hasilnya, cakupan pemeriksaan kehamilan sesuai standar meningkat drastis dari 13% (2021) menjadi 84% (2022), 92% (2023), dan 100% (2024), cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 100% pada 2024 (dari 67% di 2021), serta AKI turun dari 5 kematian (2021) menjadi 0 kematian pada 2022, 2023, dan 2024. Inovasi ini didukung oleh Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun 2021 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita.

13. Jiwa Sedatif Panto Tobat Stabil

Pemulihan kesehatan mental tidak cukup hanya dengan layanan klinis, tetapi juga butuh penerimaan sosial, dukungan keluarga, dan akses ekonomi. Pendekatan terpadu yang mengintegrasikan stabilisasi klinis, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses dimulai dari stabilisasi kondisi, lalu reintegrasi sosial melalui aktivitas sederhana dengan pendampingan tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi lewat pelatihan keterampilan dan dukungan usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri. Keberlanjutan program dijamin melalui integrasi dalam perencanaan daerah, pendanaan rutin pemerintah, jaminan kesehatan publik, serta kolaborasi dengan filantropi dan swasta. Kesimpulannya, pendekatan bertahap, pendampingan berkelanjutan, dan pendanaan konsisten adalah kunci pemulihan jangka panjang dan inklusi sosial.

14. SISNAF KRANLANIS (Sistem Informasi Notifikasi Aktif, Ketuk, Rawat dan Antar Lansia Risti)

Inovasi "SISNAF KRANLANIS" dari Puskesmas Panglayungan Kota Tasikmalaya merupakan program non-digital yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia risiko tinggi (risti) melalui notifikasi pengingat minum obat dan kontrol, edukasi caregiver, kunjungan rumah berkala setiap 10 hari, serta layanan rujukan. Diluncurkan pada Februari 2023, inovasi ini mengatasi permasalahan rendahnya cakupan skrining lansia (hanya 24,89% pada 2022) dan ketidakpatuhan 134 lansia penderita hipertensi dan diabetes dalam mengonsumsi obat dan kontrol rutin akibat keterbatasan mobilitas, kurangnya dukungan keluarga, dan minimnya informasi. Sebelum inovasi, layanan hanya melalui Posbindu yang menjangkau 24,6% lansia dan tidak menyediakan pengobatan langsung. Dengan SISNAF KRANLANIS, petugas daerah binaan melakukan kunjungan rumah untuk pemeriksaan fisik dan laboratorium, sistem mengirimkan notifikasi otomatis melalui WhatsApp, caregiver dapat mengambil obat tanpa antrai, dan tersedia hotline konsultasi 24 jam. Hasilnya, kepatuhan lansia minum obat dan kontrol rutin meningkat dari 0% (2022) menjadi 70% (2024), cakupan skrining kesehatan lansia melonjak dari 24,89% menjadi 99,88%, kunjungan caregiver untuk pengambilan obat mencapai 100% (dari 0%), persentase caregiver yang mampu menerapkan perawatan lansia di rumah mencapai 70% (dari 0%), serta kemandirian lansia meningkat dengan 2 dari 6 lansia dengan ketergantungan berat naik ke tingkat kemandirian sedang.

15. Gema Cinta (Gerakan Bersama Masyarakat Merawat Ibu Hamil dengan Cinta)

Inovasi "GEMA CINTA" dari Puskesmas Panglayungan Kota Tasikmalaya merupakan program non-digital yang bertujuan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui pendekatan terintegrasi lintas program, lintas sektor, dan lintas inovasi dengan fokus pada pemenuhan gizi ibu hamil, edukasi, serta penyediaan mobil siaga untuk rujukan kegawatdaruratan. Diluncurkan pada Februari 2023, inovasi ini mengatasi permasalahan tingginya angka ibu hamil dengan



Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anemia akibat rendahnya akses pangan bergizi dan minimnya pengetahuan kesehatan (48% penduduk berpendidikan SD), serta keterbatasan transportasi rujukan di luar jam pelayanan yang sebelumnya hanya mengandalkan Sictar. Program ini memberikan Bahan Makanan Bergizi (BMB) mingguan dari swadaya masyarakat dan Puskesmas, mendistribusikan buku saku KIA untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan ANC, menyelenggarakan USG berkala oleh dokter spesialis Obygyn, senam hamil, kelas ibu hamil luring dan daring bulanan, serta menyediakan mobil siaga untuk rujukan 24 jam. Hasilnya, AKI turun dari 1 kasus (2022) menjadi 0 kasus (2023 dan 2024), cakupan ANC minimal 6 kali meningkat dari 90,86% menjadi 100%, distribusi buku saku KIA mencapai 100% (dari 0%), layanan rujukan mobil siaga tersedia 100% (dari sebelumnya tidak ada), donor darah untuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) meningkat dari 50% menjadi 100%, penanganan ibu hamil risiko tinggi (RISTI) mencapai 100% (dari 80%), serta USG spesialis dan kelas ibu hamil/senam hamil terlaksana rutin 4-12 kali per tahun (sebelumnya 4 kali/tahun).

- 16. KITA PANTAU DIA (Kegiatan Terpadu Pemantauan Kesehatan Ibu dan Anak)**
Inovasi "KITA PANTAU DIA" dari Puskesmas Sukalaksana Kota Tasikmalaya merupakan program non-digital yang menghadirkan sistem pemantauan kesehatan ibu dan anak secara terpadu melalui delapan layanan integratif, meliputi GEMANCIK, SUKA PEDULI IBU, JEBOL LADU (jemput bola pemeriksaan laboratorium penyakit menular di posyandu), Temu Psikolog, SETIA (skrining PTM ibu dan anak), KaTaSik (kader laktasi ASI eksklusif), KUPAS TUNTAS (kunjungan ibu nifas dan neonatus), serta SI BADUT MATA ELANG (pengingat imunisasi via WhatsApp). Diluncurkan pada Januari 2023, inovasi ini mengatasi pemantauan pasif yang sebelumnya hanya mengandalkan kunjungan pasien ke Puskesmas, dengan pendekatan jemput bola menggunakan USG mobile, laboratorium mobile, konsultasi psikolog klinis, dan pemberdayaan kader laktasi di seluruh posyandu. Hasilnya, angka kematian ibu turun dari 1 kasus (2023) menjadi 0 kasus (2024), angka kematian bayi turun dari 6 kasus (2023) menjadi 5 kasus (2024), cakupan ANC meningkat dari 71,9% (2022) menjadi 99,02% (2024), cakupan imunisasi meningkat dari 74,28% menjadi 97,06%, cakupan skrining PTM pada ibu hamil mencapai 100% (dari 20%), serta berhasil menyediakan layanan konseling psikolog dan membentuk kader laktasi yang sebelumnya tidak ada.

Inovasi yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat Kota Tasikmalaya mendapatkan apresiasi baik lokal, Provinsi dan Nasional. Berikut Inovasi yang mendapatkan penghargaan.

Tabel 2.143.

Inovasi yang Dikembangkan Pemerintah dan Masyarakat Kota Tasikmalaya
Mendapatkan Apresiasi Baik/Mendapatkan penghargaan

NO.	NAMA INOVASI	RUANG LINGKUP INOVASI	TAHUN	PERINGKAT	TINGKAT
1	PROTASIK Ver. 2.0 (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmlaya Versi 2.0)	Pengelolaan Aset Tanah	2024	Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
2	GENTING (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting)	Kesehatan (stunting)	2024	Juara III Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
3	Aplikasi Golden 1000, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya	Kesehatan Anak	2024	Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat



NO.	NAMA INOVASI	RUANG LINGKUP INOVASI	TAHUN	PERINGKAT	TINGKAT
4	Box Sampah Pintar Berbasis AI dan IoT, Universitas Siliwangi	Persampahan	2024	Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
5	Vertical Sealer Sederhana	UMKM	2024	Juara II Lomba TTG Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
6	Kompos Juara: Recycle Faecal Waste Menggunakan Smart Machine Compost Sebagai Solusi Alternatif Penanganan Limbah Terpadu di UPTD Singkup	Sanitasi (Limbah Domestik)	2022	Top 45 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
7	Layar Kusumah (Layanan Antar Sampai Ke Rumah)	Sosial	2022	Terbaik 15 Besar Program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I- SIM) for Cities 2022	Nasional

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

2.1.4.4 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada prinsipnya terdapat tiga pilar namun, dengan menyesuaikan dengan kapasitas, kewenangan, akses data, dan rencana pelaporan kedepan di tingkat kabupaten/kota maka Indeks Ekonomi Hijau yang diturunkan ke kabupaten/kota adalah “Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pada Pilar Ekonomi” artinya untuk tingkatan kabupaten/kota cukup diukur sampai dengan pilar ekonomi dengan parameter yang ditentukan oleh provinsi. Terkait pilar sosial dan pilar lingkungan tidak menjadi pilar yang dievaluasi di tingkat kabupaten/kota sehubungan hampir seluruh parameter pada 2 pilar tersebut sudah tergambarkan pada indikator tersendiri/terpisah pada dokumen perencanaan kabupaten/kota sebagai turunan indikator juga dari provinsi.

Pada tahun 2024 Indeks Ekonomi Hijau Kota Tasikmalaya pada pilar ekonomi mencapai **32,43 poin** dan tahun 2025 mencapai **36,49 poin**. Nilai indikator pembentuk Indeks Ekonomi Hijau Kota Tasikmalaya pada pilar ekonomi adalah:

Tabel 2.144.
Indeks Ekonomi Hijau Kota Tasikmalaya

No.	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Produktivitas Akuakultur (ton/ha)	14,44	14,90
2	Produktivitas Padi	6,15	5,92
3	Produktivitas Tenaga Kerja Industri (Juta Rp/Jiwa)	69,21	79,07
4	Produktivitas Tenaga Kerja Jasa (Juta Rp/jiwa)	85,58	94,82



No.	Indikator	Capaian	
		2024	2025
5	PDRB Perkapita (US Dollar)	2.556	2.729,09
6	GEI Pilar Ekonomi (poin)	32,43	36,49

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026

Pada periode tahun 2024–2025, kinerja Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index/GEI*) Kota Tasikmalaya pada pilar ekonomi menunjukkan tren peningkatan yang positif. Nilai indeks tercatat sebesar 32,43 poin pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 36,49 poin pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan sebesar 4,06 poin (12,52 persen). Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas pertumbuhan ekonomi yang mulai mengarah pada prinsip-prinsip ekonomi hijau, meskipun capaian tersebut masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Peningkatan nilai indeks tersebut didukung oleh membaiknya beberapa indikator utama. Produktivitas tenaga kerja sektor industri meningkat dari 69,21 juta rupiah per jiwa pada tahun 2024 menjadi 79,07 juta rupiah per jiwa pada tahun 2025, atau tumbuh sebesar 14,25 persen. Demikian pula, produktivitas tenaga kerja sektor jasa mengalami peningkatan dari 85,58 juta rupiah per jiwa menjadi 94,82 juta rupiah per jiwa, atau tumbuh sebesar 10,80 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi non-pertanian.

Selain itu, PDRB per kapita juga mengalami peningkatan dari US\$2.556 pada tahun 2024 menjadi US\$2.729,09 pada tahun 2025, atau tumbuh sebesar 6,77 persen, yang mengindikasikan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Pada sektor perikanan, produktivitas akuakultur meningkat dari 14,44 ton per hektare menjadi 14,90 ton per hektare, atau naik sebesar 3,19 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan efisiensi dalam kegiatan budidaya.

Namun demikian, terdapat indikator yang menunjukkan penurunan, yaitu produktivitas padi, yang menurun dari 6,15 menjadi 5,92 atau turun sebesar 3,74 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian tanaman pangan masih menghadapi tantangan, baik dari sisi produktivitas maupun efisiensi, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih terarah.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai Indeks Ekonomi Hijau pada pilar ekonomi menunjukkan bahwa arah pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya telah mulai mengarah pada prinsip keberlanjutan, melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi. Namun demikian, dengan capaian indeks yang masih relatif moderat, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya melalui penguatan sektor pertanian, peningkatan efisiensi sumber daya, serta pengembangan sektor ekonomi yang ramah lingkungan.

Sampai saat ini, Bappenas memang telah menetapkan Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index/GEI*) sebagai alat ukur transformasi ekonomi, tetapi kategori baku (resmi nasional) seperti “rendah–sedang–tinggi” dalam bentuk rentang angka belum dipublikasikan secara eksplisit dan seragam dalam dokumen umum. Namun, dalam praktik analisis perencanaan (termasuk yang digunakan oleh lembaga riset/ESG dan pemerintah daerah), interpretasi kategori nilai GEI umumnya menggunakan pendekatan skala 0–100, sehingga dapat dikelompokkan secara normatif/analitis sebagai berikut:



Kategori Nilai Indeks Ekonomi Hijau (Pendekatan Analitis)

- 0 – <40 : Rendah (tahap awal / early transition)
- 40 – <60 : Sedang (berkembang / moderate transition)
- 60 – <80 : Tinggi (maju / advanced transition)
- ≥80 : Sangat tinggi (optimal / green economy mature)

Pendekatan ini juga sejalan dengan gambaran empiris, di mana skor sekitar 30–40 masih mencerminkan tahap awal transformasi, seperti terlihat pada beberapa sektor ekonomi hijau di Indonesia yang berada di kisaran tersebut.

2. Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Kota Tasikmalaya, meskipun bukan kota pesisir, memiliki potensi perikanan, pariwisata berbasis air, serta pengelolaan limbah yang berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi biru.

1) Potensi Perikanan

Sektor perikanan di Kota Tasikmalaya memiliki potensi yang strategis dalam mendukung implementasi pembangunan ekonomi biru, yaitu pendekatan pembangunan yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya perairan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Subsektor perikanan di Kota Tasikmalaya terdiri atas perikanan budidaya dan perikanan tangkap, yang keduanya memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Secara umum, struktur perikanan daerah masih didominasi oleh perikanan budidaya yang menjadi kontributor utama produksi.

a) Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya di Kota Tasikmalaya didukung oleh luas areal mencapai 692,28 hektare, yang terdiri atas kolam pembesaran seluas 621,23 hektare, kolam pembenihan seluas 19,49 hektare, sawah irigasi untuk minapadi seluas 51,42 hektare, serta kolam air deras seluas 0,14 hektare. Pada periode tahun 2024–2025, jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya relatif stagnan, yaitu sebanyak 11.738 RTP untuk budidaya kolam dan 496 RTP untuk budidaya sawah. Namun demikian, produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan dari 9.989,73 ton pada tahun 2024 menjadi 10.048,58 ton pada tahun 2025. Berikut adalah jumlah rumah tangga dan produksi perikanan budidaya.

Tabel 2.145.
Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya
Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2025

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)				Produksi (Ton)			
	2024		2025		2024		2025	
	Kolam	Sawah	Kolam	Sawah	Kolam	Sawah	Kolam	Sawah
Kawalu	1.652	16	1.652	16	1.484,74	45,92	1.493,50	46,19
Tamansari	1.477	215	1.477	215	564,27	43,12	567,59	43,38
Cibeureum	1.826	25	1.826	25	1.280,11	43,74	1.285,13	46,50
Purbaratu	1.597	110	1.597	110	1.016,21	190,12	1.022,18	191,24
Tawang	393	-	393	-	190,85	-	191,98	-
Cihideung	209	-	209	-	97,13	-	97,70	-



Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)				Produksi (Ton)			
	2024		2025		2024		2025	
	Kolam	Sawah	Kolam	Sawah	Kolam	Sawah	Kolam	Sawah
Mangkubumi	1.262	1	1.262	1	1.369,01	20,85	1.377,11	20,97
Indihiang	1.047	19	1.047	19	1.070,43	74,71	1.079,25	72,64
Bungursari	1.276	110	1.276	110	1.560,28	229,29	1.569,46	230,64
Cipedes	999	-	999	-	708,95	-	713,12	-
Kota Tasikmalaya	11.738	496	11.738	496	9.341,98	647,75	9.397,02	651,56
	12.194		12.234		9.989,73		10.048,58	

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan produksi lebih didorong oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, yang merupakan salah satu prinsip dalam ekonomi biru, yaitu optimalisasi sumber daya tanpa harus melakukan ekspansi lahan secara signifikan. Secara spasial, produksi perikanan budidaya terkonsentrasi di beberapa kecamatan seperti Bungursari, Mangkubumi, dan Cibeureum yang berperan sebagai sentra produksi utama, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan minapolitan berbasis ekonomi biru.

Dari aspek kelembagaan, jumlah kelompok pembudidaya ikan mengalami peningkatan dari 434 kelompok pada tahun 2024 menjadi 452 kelompok pada tahun 2025, serta peningkatan jumlah pelaku usaha perikanan dari 6.117 menjadi 6.768. Hal ini menunjukkan adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat yang menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi biru berbasis komunitas. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya partisipasi seluruh rumah tangga perikanan dalam kelembagaan yang ada.

Tabel 2.146.
Lembaga Perikanan Kota Tasikmalaya

Kelompok Perikanan	2024	2025
Kelompok Pembudidaya Ikan	434	452
Poklahsar	16	21
Pokmaswas	3	3
Gapoktan	1	1
Perkumpulan Pelaku Usaha Perikanan	7	7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

b) Perikanan Tangkap

Subsektor perikanan tangkap didukung oleh potensi sumber daya perairan umum. Areal perikanan tangkap di Kota Tasikmalaya berupa situ dan sungai seluas 7.698,8 Ha yang terdiri dari Situ Gede seluas 47 Ha, Situ Cibeureum seluas 10 Ha, Situ Cipajaran seluas 6 Ha, Situ Malingping seluas 2 Ha, Situ Cicangri seluas 2,5 Ha dan Sungai dengan luas total 7.631,30 Ha. Meskipun memiliki cakupan wilayah yang luas, jumlah RTP perikanan tangkap relatif kecil dan stagnan, yaitu sebanyak 159 RTP, dengan produksi yang juga cenderung stagnan dari 100,04 ton pada tahun 2023 menjadi 100,34 ton pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi perairan umum belum optimal dan masih memiliki ruang untuk ditingkatkan melalui pendekatan pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Berikut adalah data rumah tangga dan produksi perikanan tangkap di Kota Tasikmalaya.



Tabel 2.147.
Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap
Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)			Produksi (Ton)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Kawalu	4	4	4	3,97	3,97	3,98
Tamansari	53	53	53	20,43	20,45	20,49
Cibeureum	12	12	12	11,92	11,93	11,96
Purbaratu	-	-	-	-	-	-
Tawang	-	-	-	-	-	-
Cihideung	-	-	-	-	-	-
Mangkubumi	73	73	73	46,83	46,88	46,97
Indihiang	-	-	-	-	-	-
Bungursari	17	17	17	16,89	16,91	16,94
Cipedes	-	-	-	-	-	-
Kota Tasikmalaya	159	159	159	100,04	100,14	100,34

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Kondisi tersebut di atas, mencerminkan bahwa subsektor perikanan tangkap memiliki keterbatasan dalam pengembangan, mengingat ketergantungannya pada sumber daya alam yang bersifat terbatas dan harus dijaga kelestariannya. Secara wilayah, aktivitas perikanan tangkap terkonsentrasi di beberapa kecamatan seperti Mangkubumi, Tamansari, Bungursari, dan Cibeureum sesuai potensi perairan umum yang terdapat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan pada upaya pelestarian sumber daya perairan melalui pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk kegiatan restocking ikan, pengendalian pencemaran, serta penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Selain itu, diperlukan upaya diversifikasi usaha masyarakat perikanan menuju subsektor budidaya yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi, guna meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi biru, kondisi tersebut mencerminkan adanya peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi, diversifikasi usaha perikanan, serta integrasi dengan sektor lain seperti pariwisata air dan pengolahan hasil perikanan. Selain itu, pengembangan sistem minapadi juga menjadi salah satu praktik ekonomi biru yang potensial karena mengintegrasikan sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan.

Namun demikian, pengembangan sektor perikanan di Kota Tasikmalaya juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan inovasi teknologi, belum optimalnya pengelolaan kualitas air, serta potensi tekanan terhadap lingkungan perairan akibat aktivitas domestik dan ekonomi. Selain itu, nilai tambah produk perikanan masih relatif terbatas karena sebagian besar produksi masih dijual dalam bentuk segar.

Sejalan dengan prinsip ekonomi biru, pengembangan sektor perikanan perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, penguatan kelembagaan pelaku usaha, penerapan praktik budidaya ramah lingkungan, serta pengembangan hilirisasi produk perikanan. Upaya ini perlu didukung dengan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.



Dengan pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, sektor perikanan di Kota Tasikmalaya berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi biru, yang tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

c) Produktivitas Perikanan

Produktivitas perikanan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja sektor perikanan, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi biru yang menekankan pada efisiensi pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Berdasarkan data tahun 2024–2025, produktivitas perikanan di Kota Tasikmalaya menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan peningkatan yang terbatas.

Pada subsektor perikanan budidaya, dengan total luas areal sebesar 692,28 hektar, produktivitas lahan pada tahun 2024 tercatat sebesar 14,43 ton per hektar dan meningkat menjadi 14,52 ton per hektare pada tahun 2025. Peningkatan ini terjadi di tengah kondisi jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang relatif stagnan, sehingga mencerminkan bahwa pertumbuhan produksi lebih didorong oleh peningkatan efisiensi usaha dan produktivitas lahan, bukan oleh ekspansi areal maupun penambahan pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang menekankan optimalisasi pemanfaatan sumber daya tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap lingkungan.

Secara struktural, produktivitas budidaya kolam masih lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya berbasis sawah (minapadi). Produktivitas kolam pada tahun 2025 mencapai sekitar 14,66 ton per hektare, sedangkan produktivitas minapadi berada pada kisaran 12,67 ton per hektare. Kondisi ini menunjukkan bahwa budidaya kolam masih menjadi tulang punggung produksi perikanan daerah, sementara sistem minapadi berperan sebagai pelengkap yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan, khususnya dalam mendukung integrasi sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, subsektor perikanan tangkap menunjukkan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Dengan luas perairan umum mencapai 7.698,8 hektare, produktivitas perikanan tangkap pada tahun 2025 hanya mencapai sekitar 0,013 ton per hektare atau sekitar 13 kilogram per hektare. Selain itu, peningkatan produksi dalam kurun waktu 2023–2025 juga sangat terbatas, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya perairan umum belum optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya ikan di perairan umum, termasuk aspek kualitas lingkungan, ketersediaan stok ikan, serta pola pemanfaatan yang masih bersifat tradisional.

Perbandingan antara produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan, di mana produktivitas budidaya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perikanan tangkap. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kota Tasikmalaya ke depan perlu lebih difokuskan pada penguatan subsektor budidaya sebagai sektor unggulan, tanpa mengabaikan upaya optimalisasi perikanan tangkap melalui pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem.

Dalam perspektif ekonomi biru, peningkatan produktivitas lahan perikanan perlu diarahkan pada penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan, penguatan manajemen kualitas air, serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan perairan yang ada. Selain itu, pengembangan sistem budidaya terintegrasi seperti minapadi serta pemanfaatan perairan umum secara berkelanjutan melalui

restocking, pengawasan, dan pengendalian pencemaran menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, peningkatan produktivitas lahan perikanan di Kota Tasikmalaya tidak hanya menjadi indikator keberhasilan sektor perikanan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

d) Konsumsi Ikan

Pengembangan ekonomi biru di Kota Tasikmalaya memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat konsumsi ikan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Konsumsi ikan tidak hanya mencerminkan aspek pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama dalam rantai ekonomi sektor perikanan dari hulu hingga hilir.

Pada tahun 2025 terdapat perubahan metode penghitungan besaran konsumsi ikan. Berdasarkan data yang tersedia, tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 sebesar 56,52 kg/kapita/tahun menjadi 15,13 kg/kapita/tahun (publikasi Direktorat Pemasaran Kementerian KKP). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil produksi perikanan daerah belum sepenuhnya terserap oleh pasar lokal, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi nilai ekonomi dari sektor perikanan.

Dalam perspektif ekonomi biru, rendahnya konsumsi ikan menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya integrasi antara produksi perikanan dengan pola konsumsi masyarakat, termasuk faktor preferensi konsumsi, distribusi produk, serta keterjangkauan harga. Di sisi lain, kondisi ini membuka ruang yang cukup besar untuk meningkatkan permintaan domestik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor perikanan secara berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi biru menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan produksi dan penguatan sisi permintaan. Dalam hal ini, peningkatan konsumsi ikan menjadi kunci dalam menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan, di mana peningkatan permintaan akan mendorong peningkatan produksi, pengembangan usaha budidaya, serta pertumbuhan industri pengolahan hasil perikanan. Dengan demikian, peningkatan konsumsi ikan akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, rendahnya konsumsi ikan juga berkaitan dengan belum optimalnya pengembangan produk olahan perikanan yang memiliki nilai tambah dan daya tarik bagi masyarakat. Dalam kerangka ekonomi biru, pengembangan hilirisasi produk perikanan menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan konsumsi, melalui diversifikasi produk yang lebih variatif, praktis, dan sesuai dengan preferensi konsumen.

Di sisi lain, peningkatan konsumsi ikan juga perlu diimbangi dengan jaminan keberlanjutan sumber daya perikanan melalui penerapan praktik budidaya yang ramah lingkungan, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran. Hal ini penting agar peningkatan permintaan tidak berdampak negatif terhadap daya dukung lingkungan perairan.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi biru di Kota Tasikmalaya perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga pada peningkatan konsumsi ikan masyarakat melalui penguatan rantai pasok,

pengembangan produk olahan, serta edukasi dan kampanye gemar makan ikan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara sisi produksi dan konsumsi, sehingga sektor perikanan dapat berkembang secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

e) Infrastruktur pendukung sektor perikanan

Pengembangan sektor perikanan di Kota Tasikmalaya dalam kerangka ekonomi biru sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung. Infrastruktur ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, serta menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Beberapa infrastruktur strategis yang mendukung sektor perikanan di Kota Tasikmalaya antara lain Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), kawasan minapolitan, serta Unit Pembenihan Rakyat (UPR).

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), seperti Balai Benih Ikan (BBI) dan Pengembangan Produksi Ikan (PPI), memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan benih ikan yang berkualitas serta pengembangan teknologi budidaya. Dalam konteks ekonomi biru, peran UPTD menjadi sangat penting dalam menjamin keberlanjutan produksi melalui penyediaan input yang efisien dan ramah lingkungan. BBI berfungsi sebagai pusat produksi benih unggul, sedangkan PPI berperan dalam pengembangan teknik budidaya yang lebih produktif dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas produksi, kebutuhan peningkatan teknologi, serta optimalisasi fungsi pelayanan kepada pelaku usaha perikanan.

Selanjutnya, Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) berperan sebagai ujung tombak dalam penyuluhan, pendampingan, dan diseminasi inovasi kepada masyarakat perikanan. Dalam kerangka ekonomi biru, UPP memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penerapan praktik budidaya yang efisien dan ramah lingkungan. Meskipun demikian, efektivitas UPP masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal jangkauan layanan, intensitas pendampingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyuluhan.

Kawasan minapolitan di Kota Tasikmalaya menjadi salah satu infrastruktur kawasan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, meliputi produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Dalam perspektif ekonomi biru, pengembangan kawasan minapolitan dapat mendorong efisiensi rantai nilai, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat daya saing sektor perikanan. Namun demikian, pengembangan kawasan ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur pendukung, belum optimalnya integrasi antar pelaku usaha, serta perlunya penguatan konektivitas dengan sektor lain seperti perdagangan dan pariwisata.

Selain itu, keberadaan 61 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penyediaan benih ikan. UPR memiliki peran penting dalam mendukung desentralisasi produksi benih serta memperluas akses pelaku usaha terhadap input produksi. Dalam konteks ekonomi biru, UPR dapat menjadi bagian dari sistem produksi yang berkelanjutan apabila didukung dengan standar kualitas, pengawasan, serta pembinaan yang memadai. Namun demikian, tantangan yang dihadapi antara lain terkait dengan variasi kualitas benih, keterbatasan teknologi, serta belum optimalnya sertifikasi dan standarisasi produksi.

Secara keseluruhan, infrastruktur pendukung sektor perikanan di Kota Tasikmalaya telah tersedia dan memiliki peran strategis dalam mendorong

pengembangan ekonomi biru. Namun demikian, masih diperlukan upaya penguatan dalam hal kapasitas, kualitas layanan, integrasi antar infrastruktur, serta penerapan prinsip keberlanjutan. Pengembangan infrastruktur ke depan perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi sistem produksi, penguatan kelembagaan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan guna mendukung sektor perikanan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pembangunan sektor perikanan di Kota Tasikmalaya memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung implementasi ekonomi biru. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan seperti :

- a) Terbatasnya pertumbuhan skala usaha perikanan, yang ditunjukkan oleh stagnannya jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) baik pada subsektor budidaya maupun tangkap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ekspansi usaha belum berkembang secara signifikan, sehingga peningkatan produksi lebih banyak bergantung pada efisiensi internal yang masih terbatas ruang pengembangannya.
- b) Ketimpangan produktivitas antar subsektor juga menjadi tantangan. Produktivitas perikanan budidaya relatif tinggi dan terus meningkat, sementara produktivitas perikanan tangkap masih sangat rendah dan cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya perairan umum belum optimal, baik dari sisi teknologi, manajemen, maupun pengelolaan ekosistem perairan.
- c) Kualitas lingkungan perairan yang berpotensi menurun, terutama akibat pencemaran dari limbah domestik dan aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha perikanan, baik budidaya maupun tangkap, karena kualitas air merupakan faktor utama dalam menentukan produktivitas dan keberhasilan usaha perikanan.
- d) Belum seluruh pelaku usaha tergabung dalam kelembagaan yang kuat dan produktif. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap pembinaan, teknologi, permodalan, serta pemasaran hasil perikanan. Kelembagaan yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas yang merupakan salah satu prinsip utama ekonomi biru.
- e) Keterbatasan penerapan teknologi dan inovasi dalam usaha perikanan juga menjadi tantangan. Sebagian besar kegiatan budidaya masih menggunakan metode konvensional dengan tingkat efisiensi yang belum optimal. Hal ini berdampak pada produktivitas yang belum maksimal serta potensi peningkatan biaya produksi.
- f) Rendahnya nilai tambah produk perikanan juga menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Produk perikanan masih didominasi dalam bentuk segar, sehingga belum memberikan nilai ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan masih terbatas, baik dari sisi kapasitas, kualitas produk, maupun akses pasar.
- g) Pengelolaan perairan umum untuk perikanan tangkap belum berbasis pada prinsip keberlanjutan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya kegiatan seperti restocking, pengawasan sumber daya ikan, serta pengendalian pemanfaatan perairan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan daya dukung ekosistem perairan dalam jangka panjang.
- h) Belum terintegrasinya pengembangan sektor perikanan dengan sektor lain secara optimal, seperti pariwisata, pertanian (minapadi), dan ekonomi kreatif. Padahal, integrasi antar sektor merupakan kunci dalam menciptakan efisiensi

dan nilai tambah yang lebih besar dalam pembangunan berbasis sumber daya air.

Dengan demikian, permasalahan dan tantangan pembangunan sektor perikanan di Kota Tasikmalaya mencakup aspek produktivitas, lingkungan, kelembagaan, teknologi, hilirisasi, serta integrasi antar sektor. Penanganan terhadap berbagai tantangan tersebut memerlukan pendekatan yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru guna mewujudkan sektor perikanan yang produktif, berdaya saing, dan ramah lingkungan.

2) Potensi Pariwisata Berbasis Air

Sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep pengembangan ekonomi biru, khususnya melalui pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi daerah. Ekonomi biru menekankan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya perairan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem dan kualitas lingkungan. Dalam konteks tersebut, wisata air di Kota Tasikmalaya dapat diklasifikasikan menjadi wisata alam dan wisata rekreasi buatan. Wisata alam meliputi kegiatan arung jeram di Sungai Ciwulan dan Sungai Citanduy, serta wisata berbasis kawasan perairan seperti Situ Gede dan Curug Tonjong. Aktivitas ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ekowisata dan wisata petualangan yang berbasis pada keaslian alam dan keberlanjutan lingkungan. Keberadaan sungai dan situ tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga berfungsi sebagai ekosistem penting yang mendukung kehidupan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, wisata rekreasi air buatan seperti Teejay Waterpark, Kolam Renang Asia, Mangkubumi Water Park, Ma'arif Garden, dan Mutiara Aboh menunjukkan perkembangan sektor pariwisata berbasis layanan yang mampu menarik kunjungan wisatawan dalam skala lebih luas. Wisata jenis ini memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas, keamanan, dan fasilitas yang lebih terstandarisasi, sehingga menjadi pilihan utama bagi wisata keluarga dan masyarakat perkotaan.

Dalam perspektif ekonomi biru, keberadaan wisata air tersebut memberikan peluang sebagai sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maupun peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Aktivitas wisata air juga mendorong tumbuhnya sektor pendukung seperti jasa transportasi, kuliner, serta ekonomi kreatif berbasis lokal.

Namun demikian, pengembangan wisata air di Kota Tasikmalaya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam kerangka ekonomi biru. Permasalahan utama meliputi pengelolaan limbah wisata yang belum optimal, potensi pencemaran air akibat aktivitas wisata dan domestik, serta belum sepenuhnya terintegrasinya prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas lingkungan perairan yang pada akhirnya dapat mengurangi daya tarik wisata itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan upaya penguatan pengelolaan wisata air yang berbasis prinsip ekonomi biru, antara lain melalui penerapan standar pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pelestarian ekosistem perairan. Selain itu, integrasi antara pengembangan wisata air dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan sektor ini. Dengan pendekatan ekonomi biru,

pengembangan wisata air di Kota Tasikmalaya tidak hanya berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

3) Pengelolaan Limbah dan Sampah

Pengelolaan Limbah

Capaian akses air limbah domestik menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari 62,8% pada tahun 2023 menjadi 63,47% pada tahun 2024 dan meningkat lebih tinggi menjadi 69,35% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya percepatan pembangunan sarana air limbah domestik, baik melalui program pemerintah maupun partisipasi masyarakat, khususnya sebagai dampak dari kegiatan pemucuan sanitasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Bertambahnya akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik menandakan semakin banyak rumah tangga yang memiliki fasilitas pengolahan limbah yang layak, sehingga limbah cair domestik tidak langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan.

Jika dikaitkan dengan konsep ekonomi biru, peningkatan akses air limbah domestik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya air. Pengelolaan air limbah domestik yang lebih baik akan mengurangi beban pencemaran ke sungai, drainase, dan badan air lainnya, sehingga mendukung kualitas air yang menjadi fondasi bagi berbagai aktivitas ekonomi berbasis air, seperti pertanian, perikanan, dan penyediaan air bersih. Dalam kerangka ekonomi biru, pengelolaan limbah cair yang efektif tidak hanya bertujuan untuk melindungi lingkungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air agar tetap produktif dan bernilai ekonomi dalam jangka panjang.

Selain itu, peningkatan akses air limbah domestik juga membuka peluang penerapan prinsip ekonomi biru melalui pemanfaatan limbah sebagai sumber daya, misalnya pengolahan lumpur tinja menjadi kompos atau energi alternatif, serta pemanfaatan air hasil olahan untuk kebutuhan non-konsumsi seperti penyiraman tanaman atau kegiatan pertanian perkotaan. Dengan demikian, tren peningkatan akses air limbah domestik di Kota Tasikmalaya tidak hanya mencerminkan kemajuan sektor sanitasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi ekonomi biru melalui pengurangan pencemaran air, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta perlindungan ekosistem perairan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan lumpur tinja menjadi kompos di IPLT Singkup sejak Tahun 2022 sudah dilaksanakan. Kompos tersebut dimanfaatkan untuk menanam tanaman kayu. Berdasarkan Permenpu No. 4 Tahun 2017 hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padat dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan pangan. Serta hasil pengolahan air domestik berbentuk gas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, seperti pelaksanaan Pembangunan MCK ++, dimana gas dari tanki septik disalurkan untuk kompor gas.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami tren meningkat dan relatif positif dimana persentase pengelolaan sampah meningkat. Akan tetapi capaian tersebut masih dibawah target yang telah ditetapkan. Pengelolaan sampah mengalami peningkatan sebesar 10,08% dari 73,86% pada tahun 2021 menjadi 83,93% pada tahun 2025 atau setara dengan 286,85 ton/hari sampah yang

telah terkelola. Hal tersebut menunjukkan arah yang sejalan dengan prinsip efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan perlindungan ekosistem perairan.

Peningkatan ini didukung oleh kenaikan persentase pengurangan sampah atau sampah yang ditangani oleh masyarakat secara mandiri dengan salah satu kegiatan memilah sampah dari sumber kemudian dilakukan 3R (*Reuse* (menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang) dan *Reduse* (mengurangi) dan menjual sampah di bank sampah atau relawan sampah. Nilai persentase pengurangan sampah dari 12,53% menjadi 17,72%. Nilai tersebut masih jauh di bawah target (target 30%), sehingga memerlukan upaya ekstra dalam mencapai capaian ini. Capaian persentase pengurangan sampah sangat dipengaruhi dari perubahan perilaku atau budaya dari masyarakat, sehingga kolaborasi antar pemangku harus dilaksanakan.

Peningkatan pengurangan sampah mencerminkan praktik ekonomi sirkular yang merupakan bagian dari ekonomi biru, dimana sampah yang dihasilkan diupayakan untuk dimanfaatkan kembali sehingga tidak mencemari lingkungan, baik tanah, air maupun udara. Ekosistem air sangat mendukung keberlanjutan sektor berbasis air seperti perikanan, wisata air, dan penyediaan air bersih. Namun, fluktuasi pada persentase penanganan sampah tahun 2025 menunjukkan masih perlunya penguatan inovasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi biru, seperti pengembangan bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos atau energi, serta pemanfaatan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi, sehingga pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pengelolaan sampah mengalami peningkatan sebesar 10.08% dipengaruhi juga dengan peningkatan penanganan sampah, yaitu kegiatan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA. Pada tahun 2021 sebesar 61,23% meskipun sedikit menurun ditahun 2024 namun pada tahun 2025 menjadi 66,21%. Berbeda dengan capaian pengurangan, capaian penanganan dari target yang ditentukan (70%) telah dicapai 66,21% atau 3.79% yang belum tercapai. Capaian ini sangat dipengaruhi oleh sarana prasarana pengangkutan sampah, sehingga diperlukan efektifitas dari pemanfaatan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.

Selain itu pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Ciangir perkembangan di akhir tahun cukup signifikan dari open dumping menjadi controlled landfill. Perubahan ini memiliki dampak positif terhadap prinsip ekonomi biru, khususnya dalam upaya menjaga kualitas lingkungan perairan dan mengurangi pencemaran yang bersumber dari limbah padat. Pada sistem open dumping, sampah dibuang secara terbuka tanpa pengelolaan lindi (leachate) dan gas secara memadai, sehingga berpotensi mencemari air tanah, sungai, dan badan air di sekitarnya. Dengan penerapan controlled landfill, sampah mulai ditata dan ditutup secara berkala, serta dilengkapi dengan pengelolaan lindi dan drainase, sehingga risiko pencemaran air dapat ditekan secara signifikan.

Perubahan ini memberikan efek strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan yang menjadi bagian penting dalam sistem lingkungan perkotaan. Pengendalian lindi dari TPA Ciangir berkontribusi langsung terhadap pencegahan pencemaran sungai dan badan air, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan sektor berbasis air seperti perikanan, pertanian irigasi, dan penyediaan air bersih. Selain itu, pengelolaan *controlled landfill* membuka peluang pemanfaatan gas metana dari timbunan sampah sebagai sumber energi alternatif serta pemanfaatan residu yang lebih terkontrol, yang merupakan implementasi prinsip efisiensi sumber daya dalam ekonomi biru.

Namun masih memerlukan penanganan serius dalam pemanfaatan gas yang keluar dari kegiatan pengelolaan sampah di TPA Ciangir, karena jika tidak di tangkap dan



dimanfaatkan dikhawatirkan terjadi bencana seperti di TPA Legok Nangka di Cimahi beberapa waktu silam. Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu dengan memasang pipa penangkap gas di area *landfill*.

Di sisi lain, persentase sampah tidak tertangani mengalami penurunan cukup signifikan dari 26,14% pada tahun 2021 menjadi 16,07% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan di sumber maupun peningkatan kapasitas layanan persampahan. Namun menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani karena 16,07 % sampah yang tidak ditangani artinya ada 45,31 ton/hari sampah yang mencemari baik air, udara maupun tanah.

2.1.4.5 Transformasi Digital

Pemerintah Kota Tasikmalaya terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Implementasi SPBE dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan melalui penguatan aspek tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.

Upaya peningkatan manajemen SPBE meliputi penerapan manajemen risiko, keamanan informasi, pengelolaan data, pengelolaan aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengembangan kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, serta peningkatan kualitas layanan SPBE. Layanan SPBE di Kota Tasikmalaya mencakup layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.

- a. Layanan administrasi, meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan kinerja organisasi;
- b. Layanan publik, meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan JDIH, layanan bidang pendidikan, layanan bidang komunikasi dan layanan administrasi kelurahan.

Pada tahun 2025 Indeks SPBE Kota Tasikmalaya mencapai 4,18 poin dengan predikat Sangat Baik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Indeks SPBE Kota Tasikmalaya tahun 2021 sampai tahun 2025 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.148.
Indeks SPBE Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025

Uraian	Nilai SPBE				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks SPBE	2,68 (B)	2,80 (B)	3,25 (B)	3,96 (SB)	4,18 (SB)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2026.

Sebagai wujud komitmen terhadap keamanan informasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan menerapkan berbagai kontrol keamanan yang mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis serta Prosedur Keamanan SPBE.



Kebijakan ini selaras dengan salah satu misi BSSN Tahun 2020–2024, yaitu menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien guna mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional dan tatakelola pemerintahan yang baik.

Berikut ini adalah Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2025:

Tabel 2.149.
Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2025

Uraian	Tahun (Persen)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	31,2	33,33	45,74	48,21	45,74	58,61

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan data Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kota Tasikmalaya Tahun 2020–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dalam pengelolaan keamanan informasi daerah. Nilai indeks meningkat dari 31,2% pada tahun 2020 menjadi 48,21% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan tata kelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), termasuk pada aspek kebijakan, pengendalian risiko, pengamanan aset informasi, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 45,74%. Namun demikian, capaian tersebut masih berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan periode awal pengukuran, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kematangan keamanan informasi tetap berada dalam kategori berkembang dan relatif stabil.

Tahun 2025 menunjukkan lonjakan yang signifikan dengan capaian sebesar 58,61%. Peningkatan ini mencerminkan akselerasi perbaikan pada aspek tata kelola, manajemen risiko, penguatan kontrol teknis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Capaian tersebut juga mengindikasikan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan andal.

Secara keseluruhan, tren peningkatan Indeks KAMI selama periode 2020–2025 menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan upaya penguatan keamanan informasi daerah. Ke depan, penguatan kebijakan keamanan informasi, peningkatan literasi keamanan siber bagi aparatur, audit internal berkala, serta integrasi pengelolaan risiko keamanan informasi dalam perencanaan SPBE akan menjadi faktor strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan indeks KAMI secara berkelanjutan.

Berdasarkan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri dari Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) versi 5.0, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Tasikmalaya mengelola SE IKET (Informasi Kepegawaian Elektronik Terpadu) dalam kategori Tinggi (skor Kategorisasi SE: 27) dengan hasil evaluasi akhir pada level Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar dengan tingkat kelengkapan penerapan standar SNI/ISO 27001 sesuai kategori pada skor 538.

Berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, rencana Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2025-2029, maka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 tidak dilaksanakan.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Berikut adalah nilai IPS Kota Tasikmalaya tahun 2020-2024:

Tabel 2.150.
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah
Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Poin)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	0	0	2,92 (Baik)	2,47 (Baik)	3,01 (Baik)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2024 mencapai 3,01 dengan predikat “Baik”. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dibandingkan tahun sebelumnya.

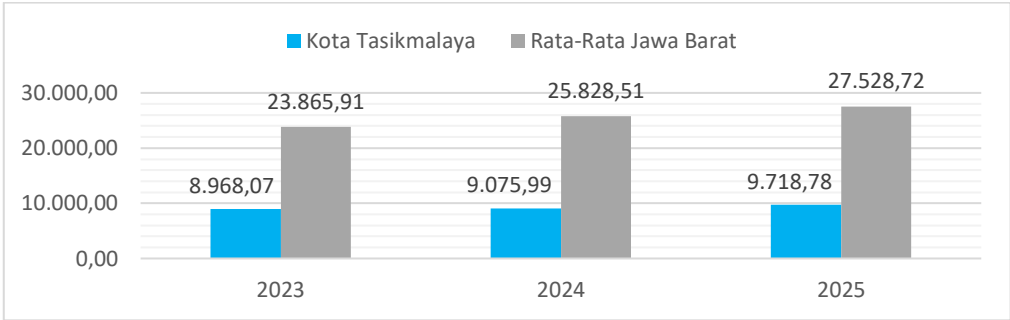
Nilai IPS sebesar 3,01 menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan statistik sektoral Kota Tasikmalaya telah memasuki tahap awal kematangan (*initial maturity*). Meski demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek strategis, seperti integrasi data antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas SDM statistik, serta perbaikan kualitas metadata dan interoperabilitas sistem guna mendorong peningkatan IPS ke tingkat yang lebih tinggi.

2.1.4.6 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Gambaran umum investasi di Kota Tasikmalaya dapat diilustrasikan dengan meninjau salah satu komponen PDRB pengeluaran yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun dengan meninjau penanaman modal langsung yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Pengusaha. Komponen PMTB merepresentasikan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan produksi. Berdasarkan data BPS, besaran nilai PMTB Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan rata-rata provinsi disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2.51.
Nilai PMTB Kota Tasikmalaya dan Rata-Rata Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023-2025



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat, 2026

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa komponen PMTB dalam PDRB Pengeluaran Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan secara nominal dalam kurun waktu tersebut, di mana pada tahun 2023 nilai komponen PMTB yang tercatat adalah sebesar Rp8,97 triliun, sedangkan pada tahun 2025 sebesar Rp9,72 triliun. Adapun secara proporsi, komponen PMTB cenderung menurun dengan rata-rata 31,25% yang juga mengindikasikan signifikansinya yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata provinsi sebesar 24,57%.

Adapun dari segi penanaman modal, berdasarkan LKPM, pencapaian Kota Tasikmalaya dalam dua tahun ke belakang diketahui cenderung meningkat. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.151.
Realisasi Investasi Kota Tasikmalaya

Uraian	2023	2024	2025
Realisasi Investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)(Milyar)	-	428,041	649,113

Sumber: DPMPTSP Kota Tasikmalaya, 2026.

Dari sisi realisasi investasi berdasarkan LKPM, capaian Kota Tasikmalaya juga mengalami peningkatan, dari Rp428,041 miliar pada 2024 menjadi Rp649,113 miliar pada 2025, atau naik sekitar 51,7%. Kenaikan ini memperlihatkan adanya penguatan minat investasi dan iklim penanaman modal di Kota Tasikmalaya. Secara umum, data tersebut menggambarkan bahwa sektor investasi di Kota Tasikmalaya berada pada tren positif, meskipun masih perlu didorong agar pertumbuhan PMTB tidak hanya naik secara nominal, tetapi juga meningkat kontribusinya secara lebih kuat terhadap struktur PDRB daerah.

2) Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor merupakan salah satu komponen penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran yang mencerminkan selisih antara nilai ekspor dan impor barang dan jasa. Berdasarkan data tahun 2020–2025, kinerja net ekspor Kota Tasikmalaya menunjukkan kondisi yang belum menguntungkan, di mana nilai net ekspor secara konsisten berada pada posisi negatif. Tren Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Tasikmalaya selama kurun Tahun 2020–2025 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.152.
Tren Net Ekspor Barang dan Jasa
Kota Tasikmalaya Tahun 2020–2025

Tahun	Net Ekspor (Miliar Rupiah)
2020	-3.959,49
2021	-3.498,48
2022	-3.578,72
2023	-4.377,90
2024	-4.296,72
2025	-4.602,37

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026.

Selama periode 2020-2025, net ekspor Kota Tasikmalaya mengalami defisit yang cukup signifikan, dengan nilai sebesar minus Rp3.959,49 miliar pada tahun 2020, kemudian membaik menjadi minus Rp3.498,48 miliar pada tahun 2021. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya kondisi kembali memburuk, dengan nilai defisit mencapai minus Rp3.578,72 miliar pada tahun 2022, meningkat menjadi minus Rp4.377,90 miliar pada tahun 2023, sedikit membaik menjadi minus Rp4.296,72 miliar pada tahun 2024, dan kembali mengalami penurunan hingga minus Rp4.602,37 miliar pada tahun 2025. Kondisi net ekspor yang selalu negatif tersebut menunjukkan bahwa nilai impor barang dan jasa di Kota Tasikmalaya secara konsisten lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan barang dan jasa dari luar wilayah, baik untuk kebutuhan konsumsi masyarakat maupun untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Secara tren, meskipun sempat terjadi perbaikan pada tahun 2021, namun secara umum defisit net ekspor cenderung meningkat dalam periode 2022–2025. Peningkatan defisit ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan permintaan domestik tidak diimbangi dengan kemampuan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga mendorong peningkatan arus masuk barang dan jasa dari luar daerah. Dari sisi struktur ekonomi, kondisi ini juga mencerminkan bahwa basis produksi dan daya saing sektor unggulan daerah masih perlu diperkuat, khususnya dalam menghasilkan produk yang mampu menembus pasar luar daerah. Selain itu, keterbatasan kapasitas industri pengolahan dan rendahnya nilai tambah produk lokal turut berkontribusi terhadap rendahnya kinerja ekspor.

Dalam konteks pembangunan daerah, defisit net ekspor memberikan implikasi terhadap kebocoran ekonomi (economic leakage), di mana sebagian pendapatan masyarakat digunakan untuk membeli produk dari luar daerah, sehingga manfaat ekonomi tidak sepenuhnya berputar di dalam wilayah. Kondisi ini dapat menghambat optimalisasi pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan upaya strategis untuk memperbaiki kinerja net ekspor melalui penguatan sektor produksi lokal, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, serta pengembangan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah. Selain itu, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk sektor perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif, perlu dioptimalkan guna mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian, perbaikan kinerja net ekspor menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan ekonomi Kota

Tasikmalaya, yang memerlukan intervensi kebijakan secara terintegrasi guna mewujudkan struktur ekonomi yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan

2.1.4.7 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kota dan desa memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda. Perkotaan adalah wilayah dengan ciri-ciri permukiman padat, kegiatan ekonomi non pertanian (seperti industri, perdagangan, jasa), dan infrastruktur yang kompleks.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020, seluruh kelurahan di wilayah administrasi Kota Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi perkotaan. Adapun, kawasan pusat kota yang menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cipedes.

Pengembangan pusat kota Tasikmalaya sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa skala regional, selaras dengan pembangunan sub pusat kota yang melayani kegiatan ekonomi, sosial dan/atau administrasi di kecamatan dan kelurahan, memerlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, air bersih, sanitasi, dan akses informasi, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kualitas dan efektivitas infrastruktur suatu daerah, digunakan Indeks Infrastruktur dalam menilai perkembangan serta dampak infrastruktur terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. Indeks infrastruktur memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk Kota Tasikmalaya. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasik-Cilacap (Getaci) merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar PSN. Rencana pintu akses (exit toll) Getaci di Kota Tasikmalaya adalah di Jl. Gubernur Sewaka yang terkoneksi dengan:

- Jalan Mashudi (Jalan Akses Bandara Wiriadinata)
- Jalan Lingkar (terkoneksi dengan Jalan Nasional III menuju ke Bandung/Jakarta dan Kabupaten Ciamis dan Jawa Tengah)

Untuk mengukur kualitas dan efektivitas infrastruktur di Kota Tasikmalaya, digunakan beberapa indikator diantaranya:

1. Indeks Infrastruktur Daerah. Dalam hal ini, Indeks Infrastruktur Daerah dihitung dari capaian kualitas dan ketersediaan infrastruktur jalan, drainase perkotaan, air minum, air limbah, sumber daya air, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman. Pada tahun 2025, Indeks Infrastruktur Daerah Kota Tasikmalaya adalah 60,42 poin.
2. Persentase Infrastruktur Dasar Perkotaan yang Berkualitas, merupakan indikator kinerja utama urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari kemantapan jalan, layanan air minum, layanan air limbah domestik, pengelolaan



- sumber daya air (sungai dan irigasi), tata bangunan dan gedung negara, serta penataan ruang. Capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 66,9%
3. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan capaian Tahun 2025 adalah 51,22%, merupakan indikator kinerja utama urusan perumahan dan kawasan permukiman, diukur berdasarkan proksi yaitu rumah yang memenuhi empat kriteria sebagai berikut : ketahanan bangunan (bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat), kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai perkapita lebih atau sama dengan 7,2 m²), memiliki akses air minum layak dan memiliki akses sanitasi layak;
 4. Rasio Konektivitas pada Tahun 2025 adalah 63,19, merupakan indikator kinerja utama urusan perhubungan diukur berdasarkan tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur transportasi.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada tahap penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027, sebagai salah satu landasan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan telah dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD. Hal ini dilaksanakan sejak tahapan persiapan sampai dengan penetapan, pelaksanaan, hingga hasil RKPD dengan tujuan untuk memastikan bahwa RKPD Kota Tasikmalaya telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD.

Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD pada Tahun 2025. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 yang diperbaharui dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada APBD Tahun 2025. Capaian kinerja dan anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.153.
Realisasi RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
				Kinerja	Anggaran		
1	DINAS PENDIDIKAN	508.301.768.212	498.752.375.321	99,93	98,12	ST	ST
2	DINAS KESEHATAN	441.568.685.814	416.783.932.758	99,25	94,39	ST	ST
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	104.484.865.951	88.321.392.018	113,08	84,53	ST	T
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.862.605.039	11.298.622.872	102,41	87,84	ST	T



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
				Kinerja	Anggaran		
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.662.010.707	16.110.439.846	100,00	96,69	ST	ST
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.939.326.364	11.710.234.018	100,00	98,08	ST	ST
7	DINAS SOSIAL	14.450.215.464	11.102.962.639	102,12	76,84	ST	T
8	DINAS TENAGA KERJA	7.471.995.584	7.117.835.810	98,16	95,26	ST	ST
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	40.532.903.547	39.203.728.841	99,94	96,72	ST	ST
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	52.556.047.367	42.737.610.639	100,00	81,32	ST	T
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIIL	10.851.978.803	10.796.626.534	101,37	99,49	ST	ST
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.041.668.292	14.816.040.554	100,00	92,36	ST	ST
13	DINAS PERHUBUNGAN	47.128.424.360	44.990.670.035	72,25	95,46	S	ST
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.237.292.255	15.767.723.553	133,50	91,47	ST	ST
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.438.841.381	24.085.841.522	108,30	84,69	ST	T
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.020.647.924	6.932.716.949	98,75	98,75	ST	ST
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	28.132.408.231	27.334.688.614	102,74	97,16	ST	ST
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.218.474.698	7.556.439.199	116,77	91,94	ST	ST
19	SEKRETARIAT DAERAH	87.910.555.524	85.565.698.830	93,97	97,33	ST	ST
20	SEKRETARIAT DPRD	61.456.877.584	59.513.230.107	97,02	96,84	ST	ST
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14.865.095.969	14.453.559.090	106,91	97,23	ST	ST
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.421.806.302	23.410.239.212	98,98	95,86	ST	ST
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	26.304.908.406	24.010.130.102	99,30	91,28	ST	ST



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
				Kinerja	Anggaran		
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.013.457.104	13.972.915.440	116,59	99,71	ST	ST
25	INSPEKTORAT	20.101.135.081	18.045.060.559	107,29	89,77	ST	T
26	KECAMATAN CIHIDEUNG	11.957.095.698	11.228.372.847	100,81	93,91	ST	ST
27	KECAMATAN CIPEDES	9.176.689.415	9.093.414.074	100,00	99,09	ST	ST
28	KECAMATAN TAWANG	11.131.833.584	11.009.907.973	99,11	98,90	ST	ST
29	KECAMATAN INDIHIANG	10.997.695.831	10.946.777.660	99,94	99,54	ST	ST
30	KECAMATAN KAWALU	18.521.719.317	18.440.320.534	100,00	99,56	ST	ST
31	KECAMATAN CIBEUREUM	14.760.812.931	14.644.690.621	96,46	99,21	ST	ST
32	KECAMATAN TAMANSARI	13.896.367.333	13.852.492.518	100,00	99,68	ST	ST
33	KECAMATAN MANGKUBUMI	13.722.262.471	13.438.167.350	100,00	97,93	ST	ST
34	KECAMATAN BUNGURSARI	13.855.644.730	13.675.796.827	100,00	98,70	ST	ST
35	KECAMATAN PURBARATU	10.397.780.236	10.346.976.630	99,49	99,51	ST	ST
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.555.301.359	30.442.623.903	95,56	93,51	ST	ST

Keterangan: ST = Sangat Tinggi, T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah, SR = Sangat Rendah.

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Tabel 2.154.
Rekap Urusan Evaluasi Hasil terhadap RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu	Realisasi	Fisik	Predikat Fisik	Keuangan	Predikat Keuangan
		(Rp.)	(Rp.)	(%)		(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	URUSAN WAJIB						
1.	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1.110.248.750.341	1.054.059.248.427				
1.01	Pendidikan	508.301.768.212	498.752.375.321	99,93	Sangat Tinggi	98,12	Sangat Tinggi
1.02	Kesehatan	441.568.685.814	416.783.932.758	99,25	Sangat Tinggi	94,39	Sangat Tinggi
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.464.138.741	88.300.680.973	124,11	Sangat Tinggi	84,53	Tinggi
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.862.605.039	11.298.622.872	102,41	Sangat Tinggi	87,84	Tinggi
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	28.601.337.071	27.820.673.864	100,00	Sangat Tinggi	97,27	Sangat Tinggi



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu	Realisasi	Fisik	Predikat Fisik	Keuangan	Predikat Keuangan
		(Rp.)	(Rp.)	(%)		(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06	Sosial	14.450.215.464	11.102.962.639	102,12	Sangat Tinggi	76,84	Tinggi
2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	224.915.537.065	207.066.446.737				
2.07	Tenaga Kerja	7.471.995.584	7.117.835.810	98,16	Sangat Tinggi	95,26	Sangat Tinggi
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.709.608.890	1.621.981.579	100,00	Sangat Tinggi	94,87	Sangat Tinggi
2.09	Pangan	19.998.166.106	19.258.910.989	99,94	Sangat Tinggi	96,30	Sangat Tinggi
2.10	Pertanahan	20.727.210	20.711.045	99,92	Sangat Tinggi	99,92	Sangat Tinggi
2.11	Lingkungan Hidup	52.556.047.367	42.737.610.639	100,00	Sangat Tinggi	81,32	Tinggi
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	10.851.978.803	10.796.626.534	101,37	Sangat Tinggi	99,49	Sangat Tinggi
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.332.059.402	13.194.058.975	100,00	Sangat Tinggi	92,06	Sangat Tinggi
2.15	Perhubungan	47.128.424.360	44.990.670.035	72,25	Sedang	95,46	Sangat Tinggi
2.16	Komunikasi dan Informatika	16.799.702.755	15.336.209.380	104,79	Sangat Tinggi	91,29	Sangat Tinggi
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.404.960.630	13.773.760.985	138,25	Sangat Tinggi	95,62	Sangat Tinggi
2.18	Penanaman Modal	7.020.647.924	6.932.716.949	98,75	Sangat Tinggi	98,75	Sangat Tinggi
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	21.030.027.836	20.662.513.589	105,61	Sangat Tinggi	98,25	Sangat Tinggi
2.20	Statistik	232.737.500	230.534.912	171,98	Sangat Tinggi	99,05	Sangat Tinggi
2.21	Persandian	204.852.000	200.979.261	181,14	Sangat Tinggi	98,11	Sangat Tinggi
2.22	Kebudayaan	2.935.126.000	2.634.886.856	100,00	Sangat Tinggi	89,77	Tinggi
2.23	Perpustakaan	8.053.968.398	7.408.072.487	125,15	Sangat Tinggi	91,98	Sangat Tinggi
2.24	Kearsipan	164.506.300	148.366.712	100,00	Sangat Tinggi	90,19	Sangat Tinggi
B	URUSAN PILIHAN	164.506.300	148.366.712				
3.25	Kelautan dan Perikanan	164.506.300	148.366.712	99,94	Sangat Tinggi	90,19	Sangat Tinggi
3.26	Pariwisata	4.167.254.395	4.037.288.169	101,67	Sangat Tinggi	96,88	Sangat Tinggi
3.27	Pertanian	13.141.146.113	12.684.064.692	99,94	Sangat Tinggi	96,52	Sangat Tinggi
3.30	Perdagangan	12.412.038.818	8.801.936.013	70,05	Sedang	70,91	Sedang
3.31	Perindustrian	1.621.841.933	1.510.144.524	119,85	Sangat Tinggi	93,11	Sangat Tinggi
C	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	149.367.433.108	145.078.928.937				
4.01	Sekretariat Daerah	87.910.555.524	85.565.698.830	93,97	Sangat Tinggi	97,33	Sangat Tinggi
4.02	Sekretariat DPRD	61.456.877.584	59.513.230.107	97,02	Sangat Tinggi	96,84	Sangat Tinggi
D	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	79.605.267.781	75.846.843.844				
5.01	Perencanaan	14.147.359.106	13.822.906.377	101,44	Sangat Tinggi	97,71	Sangat Tinggi



No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu	Realisasi	Fisik	Predikat Fisik	Keuangan	Predikat Keuangan
		(Rp.)	(Rp.)	(%)		(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02	Keuangan	50.726.714.708	47.420.369.314	99,14	Sangat Tinggi	93,48	Sangat Tinggi
5.03	Kepegawaian	12.683.311.579	12.645.545.910	118,00	Sangat Tinggi	99,70	Sangat Tinggi
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1.330.145.525	1.327.369.530	100,00	Sangat Tinggi	99,79	Sangat Tinggi
5.05	Penelitian dan Pengembangan	717.736.863	630.652.713	123,32	Sangat Tinggi	87,87	Tinggi
E	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20.101.135.081	18.045.060.559				
6.01	Inspektorat	20.101.135.081	18.045.060.559	107,29	Sangat Tinggi	89,77	Tinggi
F	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	128.417.901.546	126.676.917.034				
7.01	Kecamatan	128.417.901.546	126.676.917.034	99,58	Sangat Tinggi	98,64	Sangat Tinggi
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.555.301.359	30.442.623.903				
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	32.555.301.359	30.442.623.903	95,56	Sangat Tinggi	93,51	Sangat Tinggi

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Adapun rincian evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 untuk setiap Urusan dan Bidang Urusan dapat dilihat pada **LAMPIRAN**.

Dari uraian capaian tersebut, dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Faktor pendorong pencapaian kinerja dan anggaran antara lain:

- Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan program sesuai dokumen perencanaan dan penganggaran yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- Sinergitas *stakeholder* pihak yang memiliki kepentingan dalam keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, seperti halnya antar Perangkat Daerah atau juga instansi-instansi lainnya. Ketika *stakeholder* dapat bekerjasama dengan baik, maka dapat membantu dalam ketercapaian kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
- Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari *output* sampai dengan *outcome* kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.
- Ketersediaan anggaran yang memadai dengan tingkat serapan keuangan mencapai rata-rata 94,71%, sehingga sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.
- Kinerja aparatur yang solid dan adaptif, tercermin dari capaian kinerja rata-rata 101,67% yang melampaui target.
- Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, dukungan dari staf dan bawahan, perencanaan, dukungan anggaran yang tersedia, dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat yang aktif dalam keterlibatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.
- LAKIP instansi pada tiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kota Tasikmalaya telah dibuat secara periodik sebagai bentuk transparansi dan pengukuran kinerja instansi, dengan didukung oleh keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran pada masing-masing satuan unit kerja sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi.

- Dokumen perencanaan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala.
- Adanya penilaian kinerja Perangkat Daerah setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dan monitoring kinerja, yang meningkatkan efektivitas dan transparansi.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan adalah:

- 1) Sistem pencairan baru dari sehingga perlu pelatihan serta adaptasi baru.
- 2) Masih adanya kendala dalam sistem informasi pemerintahan daerah dalam proses pencairan.
- 3) Kurangnya komitmen Pelaksana Pekerjaan terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
- 4) Kurangnya pemahaman dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- 5) Banyak SDM yang juga masih belum terampil dalam mengolah data dan menyusun laporan Evaluasi Hasil Renja.
- 6) Tahapan dan proses pencairan dana sering mengalami keterlambatan.
- 7) Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
- 8) Waktu pelaksanaan berkaitan erat dengan perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, ketika waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan maka dapat menjadi faktor penghambat keberjalanan program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
- 9) Kejadian tidak terduga merupakan kejadian yang tidak diduga akan terjadi pada tahun perencanaan, misalnya bencana alam, wabah, dan lain sebagainya yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
- 10) Ketersediaan data, ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan terpadu.
- 11) Lemahnya/kurangnya pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- 12) Kurangnya sarana dan prasana dalam mendukung kinerja pegawai.
- 13) Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait.
- 14) Rendahnya/terbatasnya kapasitas fiskal APBD.
- 15) Transisi dari sistem lama ke sistem baru yang masih perlu disosialisasikan.

2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator kinerja utama daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 000.2.7/Kep. 42 -Bappelitbangda/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Adapun capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.155.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Pemerintah Kota Tasikmalaya

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,48	76,59
2	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,56	75,66
3	Prevalensi Stunting	%	18,31	N/A
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	100,00	102,3
5	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,67	9,64
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,51	13,51
7	Tingkat Kemiskinan	%	9,20-10,16	10,84
8	Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	97,73	98,21
9	Indeks Kerukunan Beragama	Poin	70,00	N/A
10	Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya	Poin	32,05	43,55
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	61,21	N/A
12	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,319	0,203
13	Indeks Pembangunan Pemuda	%	29,02	N/A
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,43-6,17	5,39
15	Indeks Gini	Poin	0,348-0,405	0,355
16	Inflasi	%	1,00-3,00	2,67
17	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	35,23	36,49
18	Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	79,40	79,77
19	Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	36,15	35,46
20	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	4,61	5,31
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	32,79	30,28
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,37-6,45	6,43
23	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	86,53	88,63
24	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	5,81	5,80
25	Indeks Inovasi Daerah	Poin	50,00	52,57
26	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	60,40	60,42
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	61,62	69,50
28	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar	2,17	1,87
29	Indeks Risiko Bencana	Poin	93,61	90,78

Sumber: Evaluasi RKPD Tasikmalaya Tahun 2025, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026

Tabel 2.156.
Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025
Pemerintah Kota Tasikmalaya

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	Indeks Ketahanan Pangan Publikasi Bapanas	78,097
2	Prevelensi Ketidacukupan konsumsi Pangan	%	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	4,24
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kwh/ Kapita	Pengukuran yang digunakan untuk mengukur penggunaan energi listrik oleh populasi	N/A
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	(Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum perpipaan dibagi total jumlah rumah tangga) x 100%	17,63
5	Indeks Kualitas lingkungan Hidup Daerah	Poin	Gambaran kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas	69,5



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
			Lahan (IKL) $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	(Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap SPALD-T + Jumlah Rumah Tangga dengan Akses terhadap Tangki Septic yang disedot setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam IPLT) / (Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya) x 100%	3,61
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihitung melalui aplikasi Aksara Bappenas	1,87
8	Indeks Risiko Bencana	Nilai	Tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunannya, yaitu bahaya, keterpaparan dan kapasitas pemerintah, serta komunitas dalam menghadapi bencana dan dikeluarkan oleh BNPB	90,78
9	Indeks Ketahanan daerah	%	Kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi	0,62
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu	1,24
11	Rasio Penduduk	%	Perbandingan jumlah penduduk dalam kelompok tertentu, misalnya perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan, atau perbandingan jumlah penduduk usia muda dengan penduduk usia tua	102,28
12	Kepadatan Penduduk	Orang per Km2	Banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah	4.146
13	Kapasitas Air Baku	(m3/detik)	Total Kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan domestik, perkotaan, industri dan lain lain disetiap sumber air (mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber lainnya)	0,9
14	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/ Hari	Sampah yang terkumpul dikurangi jumlah sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) ditambah residu dari fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari)	54,82
15	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	%	Jumlah rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah / Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan x 100	55,97
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,39
2	Tingkat Kemiskinan	%	Persentase penduduk miskin yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	10,84
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	PDRB Per Kapita berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	42,13
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	6,43
5	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	0,355
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	76,59
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	Usia Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	75,66
8	Prevalensi Stunting	%	Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)	N/A
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,64
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,51
11	Nilai Rapor Pendidikan	Poin	Kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah	71,42
12	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk* (SD/SMP):			
	Literasi SD	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	75,18



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
	Numerasi SD	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	69,70
	Literasi SMP	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	87,71
	Numerasi SMP	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	81,42
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	Nilai yang diperoleh dari Perpustakaan RI/Swasta	17,64
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	102,3
15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	Indeks Ketimpangan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,203
16	Indeks Pembangunan Gender	Poin	(Indeks Pembangunan Manusia Perempuan) / (Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki) * 100. Dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	93,41
Fokus Kesejahteraan Masyarakat				
1	Pendidikan			
1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,64
2	Kesehatan			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	6,87
2.2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	84,71
2.3	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan Kesehatan	%	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	100
2.4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100, Data Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)	N/A
2.5.	Penanganan Tuberkulosis:			
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	Jumlah kasus TB yang diobati (ditemukan dan memulai pengobatan) dibagi Estimasi jumlah seluruh kasus TB di populasi kali seratus	147
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	Jumlah pasien TB yang sembuh ditambah jumlah pasien TB yang menyelesaikan pengobatan terhadap seluruh pasien TB baru yang tercatat memulai pengobatan pada periode tertentu kali seratus	85
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Angka Ketergantungan	%	Angka Ketergantungan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	45,58
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Distribusi persentase PDRB kategori industri pengolahan terhadap PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	12,94
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	Distribusi persentase PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	6,32
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	∑ PDRB 17 sektor ekonomi kreatif regional/PDRB x 100% yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,66*
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	66,31
6	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri	52,57
7	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Nilai	Indeks Ekonomi Hiiaw pilar ekonomi yang dihitung dan dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi	36,49
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	Distribusi persentase PMTB berdasarkan PDRB pengeluaran hasil penghitungan dikeluarkan oleh BPS	30,38
9	Ekspor Barang dan Jasa	%	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) = total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB sisi pengeluaran (Milyar Rupiah) / PDRB ADHB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	-14,39
10	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	Penjumlahan dari (0,67 x Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) ditambah (0,25 x Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan) ditambah (0,08 x Rasio Konektivitas)	60,42



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan berdasarkan hasil perhitungan dan dikeluarkan oleh BPS	51,22
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	Indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian daerah (Penerimaan Pajak Daerah / PDRB) x 100%	0,73
13	Tingkat Inflasi	%	Tingkat Inflasi yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	2,67
14	Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%	Distribusi persentase PDRB kategori Pertanian dan Perikanan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	5,23
15	Rasio kewirausahaan	%	Berusaha dibantu buruh tetap daerah / total angkatan kerja daerah x 100%	5,54
16	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	919
17	Jumlah Kerjasama Internasional	Buah	Jumlah Kerjasama Internasional	-
ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Hasil Penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum Republik Indonesia	97,78
2	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	4,18
3	Indeks Pemerintah Digital	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pemerintah Digital berdasarkan Penilaian dari Menpan RB	N/A
4	Indek Pelayanan Publik	Nilai	IPP hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KemenpanRB	4,5
5	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi dikali 100	100
6	Tingkat Partisipasi Pemilih	%	Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya yang menggunakan hak pilihnya/ Jumlah masyarakat yang terdaftar x 100%	-
7	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka	(T x Pn) T = Total jawaban Respon Pn = Pilihan angka Skor likert	62,81
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat kabupaten/kota untuk merefleksikan tingkat produktivitas daerah, dikeluarkan oleh BRIN	4,05
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	88,62
10	Indeks Masyarakat Digital	Poin	Penilaian dari Kementrian Komunikasi dan Digital RI	56,24
INDIKATOR KINERJA KUNCI				
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan			
1.1	Nilai Rapor Pendidikan	Poin	Kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah	71,42
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (PAUD)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (PAUD)	92,22
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (SD)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (SD)	99,22
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (SMP)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (SMP)	99,22
1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	15,16
1.6	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	(Total Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal / Total Satuan Pendidikan) *100%	100
1.7	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	(Total Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik / Total Guru) * 100%	47,41
1.8	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	(Total prestasi yang diraih dalam O2SN / Jumlah Peserta O2SN Tingkat Provinsi) * 100%	19,74



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
2	Kesehatan			
2.1	Prevalensi Stunting	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	N/A
2.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	6,87
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	84,71
2.4	Persentase Masyarakat Miskin mendapat Jaminan Kesehatan	%	(Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat Jaminan Kesehatan / Jumlah Masyarakat Miskin) x100%	102,3
2.5	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan Masyarakat	Poin	Rata-rata nilai capaian SPM Kesehatan masyarakat	100
2.6	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	73
2.7	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	9
2.8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	Jumlah pasien TB yang sembuh ditambah jumlah pasien TB yang menyelesaikan pengobatan terhadap seluruh pasien TB baru yang tercatat memulai pengobatan pada periode tertentu kali seratus	85
2.9	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	Jumlah kasus TB yang diobati (ditemukan dan memulai pengobatan) dibagi Estimasi jumlah seluruh kasus TB di populasi kali seratus	147
2.10	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah bayi usia < 1 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap terhadap Jumlah sasaran bayi (< 1 tahun) kali seratus	91,1
2.11	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi/registrasi terhadap Jumlah seluruh tenaga kesehatan kali seratus	N/A
2.12	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	Persentase sarana kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman yang diperiksa	82,12
2.13	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat	%	Jumlah TPP yang memenuhi syarat higiene-sanitasi (hasil pemeriksaan) terhadap Jumlah TPP yang diperiksa pada periode laporan kali seratus	70,5
2.14	Persentase Pangan Olahan Siap Saji (POSS) memenuhi syarat	%	Jumlah sampel POSS yang memenuhi syarat uji mutu dan keamanan terhadap Jumlah sampel diperiksa kali seratus	100
2.15	Persentase Peningkatan upaya promkes, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, persentase penumbuhan kesadaran dalam peningkatan derajat keluarga dan lingkungan dalam penerapan PHBS	%	Jumlah kegiatan/promosi/advokasi/kemitraan yang terlaksana ditambah Jumlah rumah tangga/individu/lingkungan yang menerapkan PHBS terhadap Jumlah kegiatan yang direncanakan ditambah jumlah rumah tangga/individu/lingkungan yang menjadi sasaran kali seratus	N/A
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	Dihitung dari Hasil Survey Parameter Kemantapan Jalan yang Sesuai dengan SNI	80,75
3.2	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terdampak Oleh Irigasi	%	(Luas Sawah yang Terdampak Irigasi (Ha)/Total Luas Sawah dalam Kewenangan Kota (1749 Ha))*100%	27,91
3.3	Persentase Infrastruktur Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	Jumlah Infrastruktur yang Ditingkatkan Kualitasnya / Total Jumlah Infrastruktur di Luar Kawasan Permukiman Kumuh) x 100%	75,86
3.4	Capaian Rumah Tangga Yang Terlayani Akses SPAM Dan SPALD	%	(Persentase Capaian Rumah Tangga Berakses SPAM + Persentase Capaian Kk Berakses SPALD)/2	70,925
3.5	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda yang Memenuhi Ketentuan Bangunan	%	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/Lingkungan yang Ditingkatkan sesuai dengan RTBL nya (10%) + Persentase Jumlah Penyedia Jasa yang Mendapatkan Pembinaan (20%)	19,82



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
3.6	Persentase Luas Lahan yang Sesuai dengan Rencana Pola Ruang	%	(Luas Lahan yang Dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Pola Ruang / Luas Lahan yang Diberikan KKPR)*100%	92,7
3.7	Persentase Peningkatan Jaringan Drainase Jalan Kota	%	(jumlah panjang saluran drainase kota yang dibangun dan direhab pada tahun berjalan / panjang jalan kota)*100	0,76
3.8	Persentase Panjang Jaringan Sungai Yang Berfungsi Optimal	%	Panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal / Panjang jaringan sungai*100%	27,72
3.9	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	(panjang jaringan irigasi kondisi baik km/ panjang total jaringan irigasi kewenangan kota 332,53 km) * 100%	41,06
3.10	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda Yang Sesuai Standar Teknis	%	(Jumlah bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani PUTR yang memenuhi standar teknis / Jumlah bangunan gedung pemda yang ditangani PUTR) * 100%	N/A
3.11	Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%	(Panjang Jalan dalam Kondisi Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Luar Kawasan Permukiman Kumuh) x 100%	68,86
3.12	Persentase Infrastruktur Drainase Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%	(Jumlah Unit Drainase yang Berfungsi Baik / Total Jumlah Unit Drainase) x 100% atau (Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi Baik / Total Panjang Saluran Drainase) x 100%	64,3
3.13	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota	%	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota/Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Tasikmalaya * 100%	72,5
3.14	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap SPALD Berupa Akses Layak, Dan Akses Aman	%	(Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Layanan SPALD Berupa Akses Layak dan Aman / Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya) x 100%	69,35
3.15	IKM Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Nilai	Nilai IKM UPTD SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik)	84,09
3.16	Persentase Peningkatan Jaringan Jalan	%	Panjang jalan yang dibangun dan dipelihara / Total panjang jalan kota *100%	4,3
3.17	Persentase Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat Jasa Konstruksi	%	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat / jumlah tenaga kerja jasa konstruksi keseluruhan*100%	37,71
3.18	Persentase Luas Lahan Yang Dimanfaatkan Pemohon Pasca KKPR Terbit	%	Luas area pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen KKPR terhadap seluruh luas lahan yang diberikan KKPR *100%	N/A
4	Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
4.1	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	(Total RTLH-Penanganan RTLH)/Total rumah di Kota Tasikmalaya x 100	43,15
4.2	Persentase Perumahan yang Layak dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	((30% x Target SPM)+(35% x Target penanganan kawasan kumuh)+(35% x Target pengelolaan PSU))	50,18
4.3	Persentase Perumahan yang Layak dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	Realisasi penyediaan rumahbagi korban bencana/Target penyediaan rumah bagi korban bencana x 100	100
4.4	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	Realisasi penyediaan rumah bagi korban relokasi/Target penyediaan rumah x 100	100
4.5	Persentase Perumahan yang Sesuai dengan Standar Bangunan dan Perumahan	%	Realisasi perumahan yang sesuai standar/Target perumahan yang sesuai standar x 100	100
4.6	Persentase Penanganan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	%	Luas penanganan kawasan kumuh kewenangan kota/Total kawasan kumuh kewenangan kota x 100	19,63
4.7	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kawasan Permukiman Kumuh	%	(Total RTLH di kawasan kumuh-Penanganan RTLH)/Total RTLH di Kota Tasikmalaya x 100	42,38



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
4.8	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%	(Total RTLH di luar kawasan kumuh-Penanganan RTLH)/Total RTLH di Kota Tasikmalaya x 100	57,34
4.9	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Jumlah unit rumah di perumahan yang tersedia PSU/Total unit rumah di perumahan x 100	38,04
4.10	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU	%	Realisasi Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU dibagi target pelayanan X 100	100
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
5.1	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada tahun n-1 dikurangi Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada Tahun n) dibagi Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada tahun n-1 dikali 100 %	3,66
5.2	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggar Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi	%	Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikurangi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n) dibagi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikali100%	5,6
5.3	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	jumlah pelanggaran Perda dan Perkada dibagi Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	100
5.4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	Jumlah Gangguan Trantibum yang diselesaikan dibagi jumlah Laporan Gangguan Trantibum dikali 100 %	100
5.5	Persentase Anggota Linmas aktif	%	Jumlah anggota linmas yang melaksanakan tugas dibagi jumlah anggota linmas aktif dikali 100%	51
5.6	Indeks Ketahanan Daerah	%	Kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi	0,62
5.7	Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan yang Sesuai Respon Time	%	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang Sesuai Respon Time / Jumlah Layanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan x 100%	73,91
5.8	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan / Jumlah Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran X 100%	100
5.9	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	%	Jumlah (Si), untuk i =n 1 sampai 165 / 165	0,49
6	Sosial			
6.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	%	Jumlah Aduan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani / Jumlah Aduan PPKS Yang diterima X 100%	100
6.2	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang terlayani/jumlah PPKS yg membutuhkan layanan rehabilitasi sosial x 100%	95,54
6.3	Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran	%	Jumlah Masarakat miskin penerima bantuan / Jumlah masyarakat miskin terdata x 100 %	116
6.4	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang diberi bantuan / jumlah korban bencana alam dan sosial yang diusulkan kelurahan X 100%	100,83
6.5	Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis	%	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan & mendapat pembinaan / Jumlah PSKS Aktif dan Terdaftar X 100%	100
6.6	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	%	Jumlah Makam yang terperlihara sesuai standar pada Taman Makam Pahlawan / Jumlah Makam di TMP Kusuma Bangsa X 100%	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
7.1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta Rupiah/ Tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)/Jumlah penduduk yang bekerja	88,62
7.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	Jumlah angkatan kerja perempuan/ Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas x 100%	51,18
7.3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/Kota x 100%	-
7.4	Persentase peserta pelatihan yang lulus pelatihan berbasis kompetensi	%	Lulusan pelatihan yang lulus uji kompetensi BNSP/ jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi x 100%	100
7.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	Jumlah pencari kerja yang bekerja di dalam negeri/ jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100 %	50,5
7.6	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	orang	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak dasar pekerja dan dialog sosial di perusahaan diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyusunan struktur dan skala upah, atau menjadi peserta pada program jaminan social ketenagakerjaan, atau pembentukan Lembaga Kerjasama bipartit. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online.	28.655
7.7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	Jumlah pekerja yang memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja x 100%	37,18
7.8	Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal/ Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas x 100%	1
7.9	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	Calon transmigran yang dibina dan diberdayakan dibagi calon transmigran yang mendaftar dikali 100%	N/A
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	(Indeks Pembangunan Manusia Perempuan) / (Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki) * 100. Dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	93,41
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Persentase Keterlibatan di Parlemen + Perempuan sebagai Tenaga Profesional + Sumbangan Pendapatan Perempuan	Belum Rilis
8.3	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	%	(Total Kasus Kekerasan terhadap Perempuan / Total Penduduk Perempuan) *100%	0,014
8.4	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	%	(Total Kasus Kekerasan terhadap Anak / Total Penduduk usia Anak) *100%	0,25
8.5	Persentase perangkat daerah yang menerapkan program PUG	%	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan ARG/jumlah perangkat daerah X 100	100
8.6	Persentase kasus yang tertangani	%	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti / jumlah laporan/pengaduan yang masuk X 100	100
8.7	Persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender	%	Jumlah keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender/jumlah keluarga x 100	100
8.8	Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang aktif	%	Jumlah lembaga yang melakukan melaksanakan pemenuhan hak anak/jumlah lembaga yg ada X 100	100
8.9	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	%	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan adalah bentuk layanan yang diberikan oleh petugas unit pelayanan terpadu dalam merespon aduan atau pelaporan oleh masyarakat dan/atau lembaga lain. Jika pelapor adalah bukan korban, maka petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan yang harus tetap dijaga	100
8.10	Persentase Data Terpilah yang Dimanfaatkan	%	(Total Data Gender dan Anak Terpilah yang dimanfaatkan / Total Data Gender dan Anak) x 100%	N/A



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
9	Ketahanan Pangan			
9.1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	Indeks Ketahanan pangan yang diitung dan dikeluarkan oleh Bapanas	78,097
9.2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	Jumlah CPP kab/kota / jumlah target CPP kab/kota yang ditetapkan	78,71
9.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dikali dengan bobot setiap kelompok pangan yang telah ditetapkan. Hasil perkalian ini kemudian dijumlahkan untuk setiap kelompok pangan	95,9
9.4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	Jumlah daerah rentan rawan pangan/Jumlah Kelurahan x 100%	4,35
9.5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Jumlah pangan yang disampel x 100%	70,59
10	Pertanahan			
10.1	Persentase PKKPR tanah aset pemkot untuk pembangunan fasilitas umum fasilitas sosial	%	Jumlah tanah aset pemkot yang sesuai dengan peruntukan ruang / luas tanah aset pemkot yang diberikan PKKPR*100%	100
10.2	Persentase Kesesuaian Luas Tanah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum fasilitas sosial dengan rencana tata ruang	%	Luas tanah aset pemkot untuk pembangunan fasum fasos yang sesuai PKKPR / Luas tanah ases pemkot yang diperlukan untuk pembangunan fasum fasos	100
11	Lingkungan Hidup			
11.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	Hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah, yang dihitung dan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup	47,4
11.2	Indeks Kualitas Udara	Poin	$IKU=100-(50/0,9 \times (I_{eu}-0,1))$	79,44
11.3	Indeks Kualitas Air	Poin	$IKA=\sum_{i=1}^n W_i \times I_i$ W= Bobot Parameter i I = Nilai dari Parameter i	67,15
11.4	Indeks Kualitas Lahan	Poin	DKK = $\sum$ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar IKL = $100 - ((84,3 - ((LTL / LW) - DKK) \times 100)) 50 / 54,3$	55,37
11.5	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Persentase Pengurangan Sampah + Persentase Penanganan Sampah	86,13
11.6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi total rekomendasi kajian lingkungan hidup yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan dikali 100	100
11.7	Persentase Penurunan Pencemaran	%	Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Berjalan dkurangi Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Sebelumnya (Persentase penurunan adalah Nilai Indeks Kualitas yang diperoleh dibagi dengan nilai indeks kualitas kategori baik(70) dikali 100)	3,94
11.8	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	%	Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola milik Pemerintah dibagi total luas Ruang Terbuka Hijau eksisting milik pemerintah dikali 100	100
11.9	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	Jumlah LB3 yg dikelola pihak ketiga berizin pada tahun berjalan dibagi jumlah LB3 yang dihasilkan dan dilaporkan pada tahun berjalan dikali 100	N/A
11.10	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH	%	Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang taat Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH dibagi Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi pada tahun berjalan dikali 100	10
11.11	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	Jumlah penyuluh yang melaksanakan peningkatan kompetensi dibagi total penyuluh aktif dikali 100	100
11.12	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan hidup dibagi jumlah target partisipasi masyarakat dibagi 100	100
11.13	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	%	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan pada tahun berjalan dibagi Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang teregistrasi pada tahun berjalan dikali 100	100
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
12.1	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Jumlah skor yang diperoleh/Jumlah maksimal skor x 100	83,89
12.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	Jumlah Kepemilikan KIA/Jumlah penduduk yang wajib memiliki KIA x100	51,94
12.3	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	Jumlah Pemanfaatn IKD/ Jumlah penduduk wajib KTP El yang sudah rekam x100 %	7,33
12.4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	%	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-4 thn)/Jumlah Penduduk Usia 0-4 thn x 100%	95,77
12.5	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	%	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan)/Jumlah Penduduk Berstatus Kawin x 100	87,93
12.6	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Berceraai	%	(Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian)/Jumlah Penduduk Berstatus Berceraai) x 100%	87,61
12.7	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	(Jumlah Kepemilikan Akta Kematian/Jumlah Pelaporan Akta Kematian) x 100%	100
12.8	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan) /Jumlah target) x 100%	100
12.9	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Yang Dicetak sesuai Permendagri / Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga x 100%	100
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
13.1	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama tahun n dibagi jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada tahun n	Belum Rilis
13.2	Persentase rencana aksi pengendalian penduduk yang diterapkan	%	Laporan hasil pemutakhiran data keluarga	100
13.3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	Jumlah perempuan usia 15an-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern / jumlah total perempuan usia 15an-49 tahun yang sudah menikah atau sedang berhubungan x 100	65,28
13.4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Un Met Need)	%	Jumlah perempuan usia 15an-49 tahun yang ingin menunda atau tidak ingin ber-KB / jumlah total perempuan usia 15an-49 tahun yang menikah atau sedang berhubungan x 100	5,02
13.5	Persentase keluarga yang memenuhi delapan fungsi keluarga	%	Jumlah keluarga yang dilatih orientasi ketahanan keluarga / jumlah keluarga x 100	100
14	Perhubungan			
14.1	Rasio Konektivitas Kabupaten/kota	%	(Jumlah Trayek yg dilayani x Bobot Trayek)/jumlah Kebutuhan Trayek	63,19
14.2	V/C Rasio	poin	Volume Lalu Lintas / Kapasitas Jalan	0,340
14.3	Tingkat Keselamatan Transportasi	%	(Persentase Kendaraan Wajib Uji + Persentase Angkutan Umum Laik Jalan + Persentase Penyediaan Faslalin)/3	64,81
14.4	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	Fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia / Fasilitas Perlengkapan Jalan yang dibutuhkan	51,96
14.5	Konektivitas Darat	km	Jumlah Trayek yang Tersedia + Rencana Trayek Yang Akan Dilayani	451
15	Komunikasi dan Informatika			
15.1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	4,18
15.2	Indeks Pemerintah Digital	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pemerintah Digital berdasarkan Penilaian dari Menpan RB	N/A
15.3	Persentase Pemenuhan Dokumen Evidence Penilaian SPBE	%	Realisasi Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang terpenuhi/Jumlah Total Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang harus dipenuhi x 100	100
15.4	Peningkatan Kematangan Penerapan Pemerintah Digital	%	Persentase Perbandingan Hasil pengurangan Nilai Kematangan Penerapan SPBE tahun berjalan dengan Nilai Kematangan Penerapan SPBE tahun sebelumnya terrhadap Nilai Kematangan Penerapan SPBE tahun sebelumnya (Nilai Akhir - Nilai Awal)/Nilai Awal*100	N/A
15.5	Peningkatan Implementasi Smart City	%	Persentase Perbandingan Hasil pengurangan Nilai Implementasi Smart City tahun berjalan dengan Nilai Implementasi Smart City tahun sebelumnya	N/A



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
			terhadap Nilai Implementasi Smart City tahun sebelumnya (Nilai Akhir - Nilai Awal)/Nilai Awal*100	
15.6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi	78
15.7	Nilai pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Poin	Nilai yang dihasilkan pada indikator penilaian indeks keterbukaan informasi publik	78
15.8	Nilai Kualitas Informasi	%	Hasil Nilai Kualitas Informasi pada LHE Capaian Keterbukaan Informasi	N/A
15.9	Nilai Pelayanan Informasi	%	Hasil Nilai Pelayanan Informasi pada LHE Capaian Keterbukaan Informasi	N/A
16	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
16.1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	Volume usaha koperasi /PDRB atas dasar harga berlaku x 100	0,82
16.2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	(Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan) x100%	97,83
16.3	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	Volume usaha koperasi tahun n - (n-1)/Volume Usaha Koperasi Tahun n	2,22
16.4	Persentase Koperasi Aktif	%	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100%	54,61
16.5	Persentase koperasi sehat	%	Jumlah KSP/USP sehat dibagi Jumlah total KSP/USP x 100%	27,59
16.6	Persentase koperasi yang bersertifikat uji kompetensi	%	Jumlah koperasi yang bersertifikat kompetensi/ jumlah total koperasi x 100%	12,99
16.7	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (berdasarkan RAT, volume usaha dan aset) dibagi jumlah seluruh koperasi aktif	37,72
16.8	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	Jumlah usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal dibagi total usaha mikro	N/A
16.9	Pertumbuhan Wirausaha	%	(Jumlah wirausaha tahun n - jumlah wirausaha tahun n-1) dibagi jumlah wirausaha tahun n-1) x 100%	12,84
17	Penanaman Modal			
17.1	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	Jumlah investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	649,113
17.2	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	Persentase capaian pelayanan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	100
17.3	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	Realiasi RUPM/Jumlah tahapan dalam RUPM x 100%	N/A
17.4	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	Jumlah investor tahun n - jumlah investor n-1 dibagi Jumlah jumlah investor n-1 x 100%	N/A
17.5	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	(Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha) x100%	100
17.6	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor x 100%	-
17.7	Persentase data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	%	Jumlah Data dan Informasi yang dimanfaatkan / Jumlah Total Data dan Informasi yang tersedia x100	N/A
18	Kepemudaan dan Olahraga			
18.1	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	%	Rata-rata Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	42,73
18.2	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	(Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi di Tingkat Provinsi / Jumlah Cabang Olahraga yang Berpartisipasi) x 100%	48,28
18.3	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	(Jumlah pemuda berwirausaha/ jumlah pemuda di Kota Tasikmalaya) x 100	8,65
18.4	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	%	(Jumlah pemuda aktif di organisasi/ jumlah pemuda di Kota Tasikmalaya) x 100	76,81
18.5	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%	(Jumlah intervensi sarpras olahraga/ Target intervensi terhadap sarpras olahraga) x 100	30



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
18.6	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga	%	(Jumlah cabang olahraga yang dibina / jumlah cabang olahraga) x 100	52,73
18.7	Persentase cabang olahraga masyarakat yang dibina	%	(Jumlah induk olahraga masyarakat atau [INORGA] yang dibina / Jumlah INORGA) x 100	16,13
19	Statistik			
19.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berdasarkan Penilaian dari Badan Pusat Statistik	3,01
19.2	Persentase Peningkatan pengunjung web open data	%	Jumlah Pengunjung Tahun Sekarang-Jumlah Pengunjung Tahun Kemarin/Jumlah Pengunjung Tahun KemarinTahun Kemarin x 100	25,53
19.3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dlm penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah/Jumlah OPD yang ada di Pemerintah Kota*100	N/A
20	Persandian			
20.1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	%	Laporan Hasil Evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 270001 (Nilai Hasil Indeks KAMI/Jumlah Total Nilai Indeks KAMI x 100)	58,61
20.2	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 270001	N/A
20.3	Nilai kelengkapan pengamanan informasi	Poin	Nilai yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	538
20.4	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	Poin	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	N/A
20.5	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM)	Poin	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM) yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	N/A
21	Kebudayaan			
21.1	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan sejarah Daerah	%	Rata-rata persentase capaian program urusan kebudayaan	17,88
21.2	Persentase Intervensi Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	%	(Rata-rata Persentase Capaian Pengembangan Kebudayaan)	37,36
21.3	Persentase Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	(Jumlah Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan tahun N - Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan tahun N- 1)/Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan tahun N-1) x 100%	6,29
21.4	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	(Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan / target pelestarian) x 100	10
21.5	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya) x 100	0
21.6	Persentase Museum yang Dilestarikan	%	(Jumlah Museum yang Dilestarikan / Jumlah Museum) x 100	0
22	Perpustakaan			
22.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin	Nilai yang diperoleh dari Perpustakaan RI/Swasta	17,64
22.2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	Ukuran perbandingan antara jumlah koleksi yang tergolong sebagai Koleksi Nasional dan/atau Naskah Kuno dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan yang tercatat	N/A
22.3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah ukuran yang menunjukkan intensitas, frekuensi, durasi, dan jenis aktivitas membaca yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui bahan bacaan cetak maupun digital, yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk perpustakaan, toko buku, maupun media daring	63,36
23	Kearsipan			
23.1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal	Nilai	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal dari Provinsi Jawa Barat, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	76,39



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
23.2	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal	Nilai	Rata-rata Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	62,21
23.3	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	Persentase jumlah arsip dinamis, statis, dan sikon/jikn yang sudah dibuatkan daftar dibagi dengan jumlah keseluruhan arsip dinamis, statis, dan sikon/jikn	100,00
23.4	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	nilai capaian aspek PAS + PAI dibagi nilai standar dalam LAKE x 100 %	61,33
23.5	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup yang terselesaikan(dipenuhi)/ jumlah permohonan kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup	100,00
Urusan Pemerintahan Pilihan				
1	Kelautan dan Perikanan			
1.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Angka produksi perikanan budidaya	10.048,60
1.2	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/Tahun	Jumlah Ikan yang dikonsumsi dibagi jumlah penduduk	15,13
1.3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Angka produksi perikanan tangkap	100,35
2	Pariwisata			
2.1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	667.484
2.2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	Distribusi persentase PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	6,32
2.3	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	%	(Jumlah destinasi pariwisata yang diintervensi / Jumlah destiasi pariwisata pada Ripparkot) x 100	46,15
2.4	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Daerah	%	(Jumlah pelaksanaan pemasaran dalam dan luar daerah / Jenis pemasaran) x 100	66,67
2.5	Persentase Jenis Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	(Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan / Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif) x 100	-
2.6	Persentase Usaha Pariwisata dan Subsektor ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	(Jumlah usaha pariwisata dan sub sekor ekraf yang dikembangkan / jumlah usaha pariwisata dan sub sekor ekraf) x 100	33,33
3	Pertanian			
3.1	Produksi Komoditas Peternakan	Ton	Angka produksi Peternakan	16.609,27
3.2	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Angka produksi tanaman pangan	62.241,75
3.3	Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	Angka produksi hortikultura dan perkebunan	3.372,42
3.4	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	Perda LP2B	1.351
3.5	Tingkat Pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	Persentase penanganan kejadian kasus penyakit hewan menular	100
3.6	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol veteriner)	%	(Jumlah Unit Usaha dengan Sertifikat Pra NKV atau NKV / Total Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan) x 100%	N/A
3.7	Persentase penanganan bencana pertanian	%	Jumlah areal terdampak bencana yang ditanggulangi/Jumlah total areal terdampak bencana x 100	100
3.8	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	(Jumlah Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim yang Dilakukan / Total Jumlah Kegiatan yang Direncanakan) x 100%	100
3.9	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	%	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan perizinan	100
3.10	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	Jumlah kelompok naik kelas / Jumlah kelompok x 100%	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
3.11	Persentase kelembagaan tani yang dibentuk dan beroperasi	%	Persentase kelembagaan tani yang aktif beroperasi dari total kelembagaan tani yang terbentuk.	100
4	Perdagangan			
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	Distribusi persentase PDRB kategori perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	20,69
4.2	Persentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	(Jumlah Ijin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi / Total Jumlah Permohonan Ijin Usaha Perdagangan) x 100%	100
4.3	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	(Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya / Total Jumlah Sarana Perdagangan yang Direncanakan untuk Ditingkatkan) x 100%	30
4.4	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	Persentase = (Jumlah Hari dengan Harga Stabil / Total Jumlah Hari dalam Periode Tertentu) x 100%	69,39
4.5	Nilai ekspor barang	(Juta)US\$	Jumlah Barang yang Diekspor x Harga Barang per Unit atau Total Nilai FOB (Free On Board) dari Barang yang Diekspor	19,14
4.6	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang	100
4.7	Persentase peningkatan omset pelaku usaha yang difasilitasi promosi	%	((Omset Setelah Promosi - Omset Sebelum Promosi) / Omset Sebelum Promosi) x 100%	N/A
5	Perindustrian			
5.1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Distribusi persentase PDRB kategori industri pengolahan terhadap PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	12,94
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	%	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri yang dikeluarkan	%	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan	5,47
5.4	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	1) Informasi Industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (0%). 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%). Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	100
	Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan			
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
1.1	Nilai Komposit Kelembagaan	Nilai	Nilai Komposit Kelembagaan Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	84,37
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	Nilai	Nilai IKM pemerintah Daerah hasil penilaian Evaluator Tim Kota	89,05
1.3	Nilai Dimensi Pelaporan Kinerja dalam Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja yang Dinilai Oleh Kemenpan-RB	10,97
1.4	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Hasil Penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum Republik Indonesia	96,6
1.5	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	IPP hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KemenpanRB	4,5



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
1.6	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	Indeks Kualitas Kebijakan Hasil Penilaian Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)	86,10
1.7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	Indeks Tata Kelola Pengadaan Hasil Penilaian LKPP	71,21
1.8	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	Nilai	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	43,75
1.9	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Proses	Nilai	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Proses Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	39,00
1.10	Rata-rata Indeks pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	Jumlah IPP Perangkat Daerah / Jumlah PD (hasil FEKPPP Mandiri)	3,25
1.11	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM kategori "Sangat Baik" (88,31 - 100)	%	(Jumlah PD dengan Nilai IKM "Sangat Baik" / Jumlah PD) x 100%	46
1.12	Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	Jumlah Nilai Indeks Reformasi Birokrasi seluruh Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah	71,86
1.13	Rata-rata Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Nilai	Jumlah Nilai Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah	57,78
1.14	Persentase Pemenuhan Eviden Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam SILPPD	%	(Jumlah Eviden IKK yang Terpenuhi / Jumlah Eviden IKK yang Harus Dipenuhi) X 100%	100
1.15	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan	63,99
1.16	Indeks Zakat Nasional (IZN)	poin	Nilai Indeks Zakat Nasional yang dikeluarkan oleh BAZNAS Pusat	0,59
1.17	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat	77,34
1.18	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	46,92
1.19	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Administrasi Pembangunan / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Administrasi Pembangunan	76,21
1.20	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	%	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Evluasi Pembangunan yang Dilaksanakan / Jumlah Saran Tindak Lanju) X 100%	100
1.21	Persentase Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	((Nilai ITKP Tahun n - Nilai ITKP Tahun n-1) / Nilai ITKP Tahun n-1) x 100%	3,99
1.22	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Target fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD / Realisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD x 100%	86,09
1.23	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	(Jumlah Hari Penetapan Perda APBD yang Tepat Waktu / Jumlah Hari yang Ditentukan) x 100%	100
1.24	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	Jumlah Ranperda yang Ditetapkan / Jumlah Ranperda yang Direncanakan) x 100%	100
1.25	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	(Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Efektif / Total Jumlah Kegiatan Pengawasan) x 100% atau (Jumlah Rekomendasi yang Dilaksanakan / Total Jumlah Rekomendasi) x 100%	100
2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1	Perencanaan Pembangunan			
2.1.1	Nilai Pencapaian Komponen Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Poin Pencapaian Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP Kota dari Kementerian PANRB	24,30
2.1.2	Nilai Pencapaian Komponen Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Poin Pencapaian Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Kota dari Kementerian PANRB	19,88
2.1.3	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah) / (Jumlah Perangkat Daerah)	26,32
2.1.4	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah	24,59
2.1.5	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM)	26,60



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
	bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
2.1.6	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	(Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM)	24,53
2.1.7	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK)	25,25
2.1.8	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan	Poin	(Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK)	24,80
2.2	Keuangan			
2.2.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	Opini dari BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	WTP
2.2.2	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/Target Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah) x 100	100
2.2.3	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/Target Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah) x 100	100
2.2.4	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/Target Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah) x 100	100
2.2.5	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar/Target Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah) x 100	100
2.2.6	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	(Total PAD Tahun Ini – Total PAD Tahun Lalu) / (Total PAD Tahun Lalu) × 100%	20,96
2.2.7	Persentase Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah yang tersedia	%	(Jumlah Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah yang tersedia / Jumlah dokumen Target PAD) * 100%	100
2.2.8	Persentase penerapan kebijakan teknis	%	(Jumlah kebijakan teknis yang diterapkan / Jumlah kebijakan teknis) * 100%	100
2.2.9	Persentase pengelolaan penerimaan pajak yang sesuai standar	%	(Jumlah dokumen pengelolaan penerimaan pajak yang sesuai ketentuan / Jumlah dokumen pengelolaan penerimaan pajak) * 100%	100
2.2.10	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pendapatan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pendapatan) * 100%	100
2.2.11	Persentase Layanan yang memanfaatkan teknologi informasi	%	(Jumlah layanan yang memanfaatkan teknologi informasi / Jumlah layanan) * 100%	100
2.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
2.3.1	Indeks Sistem Merit	Nilai	Penilaian mandiri sistem merit yang diverifikasi dan ditetapkan oleh KASN, meliputi aspek: a. perencanaan kebutuhan; b. pengadaan; c. pengembangan karier; d. promosi dan mutasi; e. manajemen kinerja; f. penggajian, penghargaan dan disiplin; g. perlindungan dan pelayanan; dan h. sistem informasi. (Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah)	335
2.3.2	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Nilai	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN	37,5
2.3.3	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN	Nilai	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN	36
2.3.4	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	Nilai	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	12
2.3.5	Nilai kriteria kualitas sistem informasi	Nilai	Nilai kriteria kualitas sistem informasi	22



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
2.3.6	Nilai kriteria kualitas evaluasi kinerja	Nilai	Nilai kriteria kualitas evaluasi	67,5
2.3.7	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	35
2.3.8	Nilai kriteria kualitas pengelolaan promosi dan mutasi	Nilai	Nilai kriteria kualitas kualitas pengelolaan promosi dan mutasi	35
2.3.9	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	Nilai	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	60
2.3.10	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi pengembangan kompetensi	Nilai	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi pengembangan kompetensi	30
2.4	Penelitian dan Pengembangan			
2.4.1	Persentase hasil riset/kajian yang dimanfaatkan	%	(Hasil riset/kajian yang dipublikasikan / Total target Seluruh Hasil Riset/Kajian) x 100%	N/A
2.4.2	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Perangkat Daerah minimal berkategori inovatif	%	(Jumlah PD yang IIPD minimal berkategori inovatif/Jumlah PD)X 100%	N/A
2.4.3	Persentase hasil riset/kajian yang sesuai standar	%	(Hasil riset/kajian yang disusun / Total target Seluruh Hasil Riset/Kajian) x 100%	N/A
2.4.4	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang terverifikasi nasional	%	((Total inovasi di IGA tahun ini) - (Total inovasi di IGA tahun sebelumnya)) / (Total inovasi di IGA tahun sebelumnya) x 100%	38,75
2.4.5	Persentase pencapaian fasilitasi HAKI	%	(Jumlah Karya/Inovasi yang difasilitasi HAKI dan telah terdaftar/ Jumlah Target Karya/Inovasi yang difasilitasi HAKI) x 100 %	N/A
3	Unsur Pengawasan Pemerintahan			
3.1	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level (Poin)	Level Kapabilitas APIP yang telah dilakukan Penilaian oleh BPKP	Level 3 -3,06
3.2	Nilai Komponen Evaluasi Internal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	Nilai Unsur Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Tingkat Kota yang dikeluarkan oleh evaluator PAN RB	17,15
3.3	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	Level Maturitas SPIP Tingkat Kota hasil evaluasi BPKP	3,144
3.4	Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja strategis pemerintah daerah yang sesuai dengan standar	%	Jumlah Pengawasan kinerja Strategis Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dibandingkan jumlah seluruh kinerja strategis pemerintah daerah	100
3.5	Persentase kesesuaian Indikator kinerja kunci Laporan kinerja Pemerintah Daerah (LPPD)	%	Jumlah Indikator Kinerja Kunci yang terverifikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Indikator Kinerja Kunci	100
3.6	Persentase Laporan hasil revidi atas LKPD yang sesuai SAP	%	kesesuaian laporan keuangan yang disusun dibandingkan dengan unsur laporan keuangan	100
3.7	Persentase capaian penyelesaian TLHP	%	Akumulasi jumlah rekomendasi APIP yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh rekomendasi yang di terbitkan	N/A
3.8	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	%	jumlah pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dibandingkan dengan jumlah PDTT dalam PKPT	100
3.9	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%	Capaian penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP terhadap total rekomendasi hasil pengawasan APIP yang diterbitkan	100
3.10	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	%	jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	87,31
3.11	Persentase kesesuaian antara peraturan / kebijakan terkait pengawasan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	%	Jumlah kebijakan yang sesuai antara peraturan/kebijakan terkait pengawasan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dibandingkan dengan jumlah aturan yang harus disesuaikan	N/A
3.12	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi	%	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksnakan dibandingkan dengan jumlah rencana pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada PKPT	N/A
3.13	Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP hasil Penjaminan Kualitas	Skor	Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP hasil Penjaminan Kualitas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pembantu IV	3,221



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
3.14	Persentase cakupan pengawasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi	%	Persentase jumlah perangkat daerah yang terevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasinya dibandingkan dengan jumlah total perangkat daerah yang harus dievaluasi	100
3.15	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	%	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi adalah Indeks yang menggambarkan efektifitas pencegahan korupsi dalam kerangka maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi oleh BPKP	2,49
3.16	Predikat SPI	Predikat	Predikat yang didapat berdasarkan Skor SPI hasil survey yang dilakukan oleh KPK terhadap risiko- risiko korupsi di lingkungan pemerintah kota tasikmalaya	Rentan (0-72,9)
4	Unsur Kewilayahan			
4.1	Persentase permohonan administratif Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administrasi Bidang Kesra yang terlayani/ Target permohonan administrasi Bidang Kesra yang terlayani) x 100	100
4.2	Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	%	(Realisasi sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan/ Target sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan) x 100	100
4.3	Persentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	%	(Realisasi data dan informasi kecamatan yang dilaporkan/Target data dan informasi kecamatan yang dilaporkan) x 100	100
4.4	Persentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administrasi Bidang Pemerintahan yang terlayani/ Target permohonan administrasi Bidang Pemerintahan yang terlayani) x 100	100
4.5	Persentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	%	(Realisasi Peningkatan Kelurahan berprestasi/Target Peningkatan Kelurahan berprestasi) x 100	100
4.6	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	%	(Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum/Target Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum) x 100	100
4.7	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar/Target permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar) x 100	100
4.8	Persentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar	%	(Realisasi bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar/Target bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar) x 100	100
4.9	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	%	(Realisasi infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan/Target infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan) x 100	100
4.10	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang	%	(Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Ekbang/Target Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Ekbang) x 100	100
4.11	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administrasi Bidang Ekbang yang terlayani/ Target permohonan administrasi Bidang Ekbang yang terlayani) x 100	100
4.12	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	%	(Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Kesra/Target Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Kesra) x 100	100
4.13	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	%	(Realisasi penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum/Target penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum) x 100	100
5	Urusan Pemerintahan Umum			
5.1	Persentase Masyarakat Terbina Kesatuan Bangsa dan Politik	%	Jumlah masyarakat terbina kesatuan bangsa dan politik / jumlah masyarakat kota tasikmalaya usia produktif x 100%	6,06
5.2	Tingkat Partisipasi Pemilih	%	Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya yang menggunakan hak pilihnya/ Jumlah masyarakat yang terdaftar x 100%	-
5.3	Persentase Penurunan Potensi Konflik	%	Jumlah potensi konflik (thn n-1) - jumlah potensi konflik (n)/ jumlah potensi konflik (thn n-1) x 100%	20
5.4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	Jumlah masyarakat terbina bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan / jml masyarakat terbina yang ditargetkan x 100%	100
5.5	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	Jumlah masyarakat terbina di bidang Pendidikan Politik/ jml masyarakat yang ditargetkan x 100%	100



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025
5.6	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	Jumlah Ormas yang aktif / Jumlah Ormas x 100%	65
5.7	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	Jumlah kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan / jumlah kebijakan yang ditargetkan x 100%	100
5.8	Persentase Intensitas Koordinasi antarumat Beragama	%	Jumlah realisasi intensitas koordinasi antar umat beragama/ Jumlah intensitas koordinasi antar umat beragama yang ditargetkan x 100%	100
5.9	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	Jumlah potensi konflik yang diselesaikan/ jumlah potensi konflik x 100%	100

Sumber:Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

2.2.2. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Prioritas pembangunan selanjutnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, ada 6 (enam) jenis SPM yang terdiri dari:

1. SPM Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

2. SPM Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

3. SPM Pekerjaan umum

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. SPM Perumahan rakyat

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:



- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. SPM Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. SPM Sosial

Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka pencapaian SPM:

1. Pada bidang SPM Pendidikan dialokasikan anggaran khusus yang dialokasikan untuk pemenuhan indikator SPM bidang pendidikan. pemenuhan capaian SPM melalui program kegiatan yang memuat indikator serta sasaran yang bertujuan untuk PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan yaitu pemenuhan sarana dan prasarana peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas data sasaran SPM bidang pendidikan.
2. Untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam pemenuhan pelayanan terhadap 12 kelompok penerima layanan kesehatan;
3. Untuk pemenuhan SPM bidang perumahan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam penyediaan infrastruktur perumahan korban bencana dan program pemerintah;
4. Untuk pemenuhan SPM bidang Pekerjaan umum, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik;
5. Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban umum Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran melalui peningkatan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban umum. Adapun untuk pemenuhan dalam sub bidang kebencanaan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan informasi pengurangan risiko bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
6. Peningkatan Pemenuhan SPM bidang Sosial, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran yang dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti; rehabilitasi sosial dasar anak



terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan merujuk pada Permendagri 59 tahun 2021. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat (khususnya pada masyarakat miskin) secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya. Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Keamanan dan Ketertiban Umum, dan Sosial. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya pada Tahun 2025.

Tabel 2.157.
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kota Tasikmalaya Tahun 2025

No.	Bidang Layanan	Satuan	Pencapaian SPM	
			Target 2025	Capaian 2025
1.	SPM Bidang Pendidikan	%	96,02	99,79
2.	SPM Bidang Kesehatan	%	100,00	98,58
3.	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	98,30	100,00
4.	SPM Bidang Perumahan Rakyat	%	100,00	100,00
5.	SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100,00	100,00
6.	SPM Bidang Sosial	%	100,00	100,00
	SPM Kota Tasikmalaya	%	100,00	99,79

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum capaian SPM Kota Tasikmalaya hampir sempurna, yaitu 99,79%. Meski masih terdapat kesenjangan sekitar 0,21% yang dipengaruhi oleh bidang Pendidikan dan Kesehatan. Dari angka capaian tersebut dapat dikategorikan sangat berhasil, dimana hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat.

Dalam upaya pencapaian target SPM bidang Kesehatan terdapat beberapa hambatan yang menjadi faktor utama, diantaranya:

- Angka kematian ibu dan bayi masih relatif tinggi, meskipun tren menurun, hal ini memengaruhi indikator capaian layanan kesehatan dasar.
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, misalnya pada layanan ibu melahirkan belum seluruh puskesmas dapat melayani persalinan dan perlunya peningkatan kualitas *home care*.
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar belum maksimal, pelayanan kesehatan pada usia produktif misalnya kader Posbindu PTM belum semua mendapatkan pelatihan terutama di tingkat RW, dan lain sebagainya.
- Masih tingginya prevalensi stunting dan gizi buruk, sehingga capaian layanan kesehatan belum optimal.
- Disparitas akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pinggiran, termasuk keterbatasan tenaga medis dan fasilitas Kesehatan.
- Beban penyakit menular dan tidak menular (seperti diabetes, hipertensi, dan jantung) yang meningkat di tingkat nasional juga berdampak pada capaian daerah.

Sedangkan dalam SPM bidang Pendidikan, meskipun capaiannya telah melampaui target, tapi masih terdapat beberapa hal yang berpotensi menghambat pencapaian penuh SPM, diantaranya:

- Kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dan daerah pinggiran, terutama terkait sarana prasarana dan mutu guru.
- Pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah dan daerah dengan keterbatasan transportasi.
- Transformasi digital pendidikan belum merata, sehingga integrasi teknologi pembelajaran masih menghadapi hambatan.

2.2.3. Evaluasi Capaian Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang sulit untuk selesaikan. Hal ini menjadi isu di dunia dan menjadi tujuan pertama dalam 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yakni No Poverty atau Tanpa Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang disebabkan banyak faktor yang saling berkaitan, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, motivasi yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dibentuk dalam upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, selanjutnya diperbaharui sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dan terakhir diperbaharui kembali sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 24 Oktober 2023, Nomor 400.4.7/11163/Bangda, Hal Penunjukkan Ketua TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.861-bappelitbangda/2023.

Kondisi umum kemiskinan daerah perlu digambarkan di awal sebagai dasar untuk melihat indikator-indikator utama kemiskinan di suatu daerah. Adapun indikator makro kemiskinan Kota Tasikmalaya ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.158.
 Indikator Makro Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Garis Kemiskinan (Rp/Bulan/Kapita)	480.341	498.711	537.497	565.377	591.600
Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan)	89.460	87.130	79.370	76.710	75.220
Tingkat Kemiskinan (P0)	13,13	12,72	11,53	11,10	10,84
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,42	2,34	1,62	1,35	1,89
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,69	0,65	0,32	0,26	0,45

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Dari tabel di atas, secara umum dapat dilihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin menurun, hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi di Kota Tasikmalaya. Namun jika dilihat dari kedalaman dan keparahan kemiskinan yang meningkat Kembali pada tahun 2025, mengindikasikan adanya Sebagian penduduk miskin semakin tertinggal. Hal ini menunjukkan perlu adanya intervensi yang lebih terarah untuk kelompok miskin ekstrem agar tidak terjadi pelebaran ketimpangan.

Data kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2020–2025 menunjukkan tren positif, dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan (P0) terus menurun, meskipun garis kemiskinan meningkat setiap tahun. Namun, indeks kedalaman (P1) dan keparahan (P2) berfluktuasi, menandakan masih ada kerentanan di kelompok miskin ekstrem.

Garis kemiskinan di suatu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya, tergantung harga barang dan pola konsumsi. Tren garis kemiskinan pada tabel di atas memperlihatkan adanya kenaikan secara konsisten, yaitu dari Rp. 470.150 (2020) menjadi Rp. 591.600 (2025). Kenaikan yang tajam pada 2023 kemungkinan besar dipengaruhi oleh inflasi pasca-pandemi dan penyesuaian kebutuhan hidup layak. Garis kemiskinan yang meningkat berarti standar minimum hidup juga naik, sehingga meskipun pendapatan naik, lebih banyak orang bisa tetap tergolong miskin jika kenaikan pendapatan tidak sebanding.

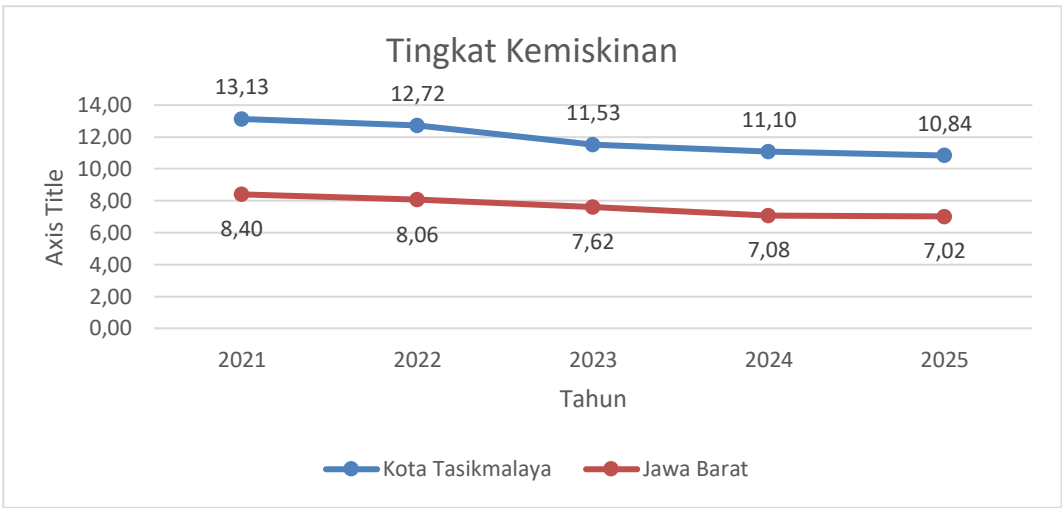
Jumlah penduduk miskin turun signifikan dari 89.460 ribu jiwa (2021) menjadi 75.220 ribu jiwa (2025) atau terjadi penurunan sekitar 14.000 ribu jiwa dalam 4 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya sejak tahun 2021 terus menurun hingga tahun 2025, dengan penurunan sebesar 2,29%. Penurunan yang terjadi secara konsisten ini mengindikasikan efektivitas kebijakan sosial ekonomi. Perluasan jangkauan bantuan sosial dan peningkatan akses lapangan kerja produktif juga menjadi pendorong penurunan angka kemiskinan.

Sedangkan peningkatan kedalaman dan keparahan kemiskinan P1 dan P2 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun jumlah orang miskin menurun, namun yang masuk kategori miskin yang tersisa, justru semakin jauh dari garis kemiskinan dan lebih tidak merata. Ini bisa disebabkan oleh ketimpangan distribusi bantuan, akses pendidikan, atau pekerjaan yang layak.

Harapan selanjutnya adalah penurunan jumlah penduduk miskin bisa lebih besar mengingat program dan kegiatan yang memprioritaskan mereka yang berada dibawah garis kemiskinan lebih terarah, terpadu dan menyasar mereka yang betul-betul terkategori penduduk miskin, serta didukung oleh data kemiskinan yang up to date dan terpadu meskipun terdiri dari beragam sumber data kemiskinan tersebut.

Gambar 2.52.
 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Tasikmalaya dengan Jawa Barat
 Tahun 2021–2025



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah tertuang dalam Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yakni pada Tujuan 1 yakni Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, dengan sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan, serta strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- b) Pemberdayaan masyarakat miskin;
- c) Sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

Arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
- b) Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya.

Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan telah melakukan beberapa kebijakan, yaitu:

1. Melakukan koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas Perangkat Daerah terkait;
2. Mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk program penanggulangan kemiskinan pada Perangkat Daerah, misalnya dengan Program P3KK (Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas) pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas KUMKM Perindag, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan Perangkat Daerah lainnya;
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.



Dalam rangka percepatan pelaksanaan penghapusan kemiskinan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, untuk tahun anggaran 2025 Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran pada tagging kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Adapun realisasinya sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.159.
Kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Tagging Kemendagri Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025
Berdasarkan Tujuan Program

No.	Tujuan Program	Anggaran	Realisasi
1.	Mengurangi Beban Pengeluaran	45.149.470.470	38.865.683.015
2.	Meningkatkan Pendapatan	186.893.956.343	186.151.648.045
3.	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	14.359.424.488	13.496.892.053
	JUMLAH	246.402.851.301	238.514.223.113

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026

Berikut ini perincian kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang tersebar di berbagai perangkat daerah Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.160.
Kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Tagging Kemendagri Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025
Berdasarkan Perangkat Daerah Pelaksana

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi
1.	Dinas Pendidikan	118.663.369.800	120.178.860.321
2.	Dinas Kesehatan	64.101.223.053	64.132.042.923
3.	Dinas Sosial	10.009.481.450	6.042.152.258
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25.934.939.000	23.037.975.314
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.588.468.020	5.134.007.219
6.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	14.482.579.888	13.646.664.518
7.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	145.535.000	145.386.500
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.987.200.000	1.987.200.000
9.	Dinas Perhubungan	137.363.000	136.835.272
10.	Dinas Tenaga Kerja	1.768.281.768	1.495.522.035
11.	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	360.000.000	358.375.820
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	661.350.075	657.106.456



No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi
13.	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	1.062.016.247	1.061.050.477

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026

2.3. Permasalahan Pembangunan

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2025, maka rumusan permasalahan pembangunan yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2027 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.161.
Rumusan Permasalahan Pembangunan Tahun 2027

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1.	Aspek Geografi	1. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Belum optimalnya pengelolaan rawan bencana; 3. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan; 4. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; 5. Daya dan debit air danau/situ kurang optimal; 6. Peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang akibat pertambahan penduduk; 7. Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH); 8. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber; 9. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah; 10. Kurang seimbangnya antara SDM pengangkut sampah dengan luas wilayah pengangkutan sampah dan jumlah penduduk; 11. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang dapat mengakses infrastruktur pelayanan dasar air minum; 12. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah.	1. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Optimalisasi pengelolaan rawan bencana; 3. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan; 4. Optimalisasi upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; 5. Optimalisasi Daya dan debit air danau/situ; 6. Pengendalian dan konservasi sumber daya alam dan ruang; 7. Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 8. Sosialisasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber; 9. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah; 10. Penambahan SDM pengangkut sampah; 11. Peningkatan pelayanan dasar air minum; 12. Peningkatan akses terhadap sarana pengelolaan air limbah.
2.	Aspek Demografi	1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang perlu diantisipasi untuk persiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebutuhan akan sarana prasarana umum untuk peningkatan	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana umum untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat;



No	Aspek	Permasalahan	Solusi
		kualitas hidup masyarakat; 2. Pertambahan penduduk yang akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang; 3. Urbanisasi penduduk ke pusat perkotaan dapat meningkatkan kebutuhan akan sarana prasarana serta dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial; 4. Masih tingginya angka beban ketergantungan (<i>dependency ratio</i>).	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan pengendalian sumber daya alam dan ruang; 3. Pengendalian urbanisasi penduduk ke pusat perkotaan, dan pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana.
3.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	1. Masih terdapat ketidakstabilan harga barang pokok dan penting; 2. Masih rendahnya daya beli masyarakat; 3. Masih rendahnya indeks ketahanan pangan; 4. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal; 5. Terbatasnya lapangan pekerjaan; 6. Belum optimalnya informasi ketenagakerjaan; 7. Masih terdapat kesenjangan ketersediaan peluang kerja dengan latar belakang pencari kerja; 8. Masih tingginya AKI/ AKB; 9. Masih tingginya prevalensi stunting; 10. Kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan belum optimal; 11. Belum optimalnya pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan; 12. Masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular; 13. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 14. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial; 15. Masih rendahnya pemberdayaan fakir miskin dan PMKS; 16. Belum optimalnya pemberdayaan gender; 17. Masih rendahnya ketahanan keluarga; 18. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak; 19. Belum optimalnya upaya pemajuan kesenian dan kebudayaan; 20. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesenian dan olahraga; 21. Masih kurangnya skala dan promosi event seni budaya dan olahraga; 22. Belum optimalnya pembangunan kepemudaan; 23. Belum optimalnya capaian RLS dan HLS;	1. Pengendalian harga barang pokok dan penting; 2. Meningkatkan daya beli masyarakat; 3. Meningkatkan indeks ketahanan pangan; 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terhadap guncangan eksternal; 5. Penciptaan lapangan pekerjaan; 6. Optimalisasi informasi ketenagakerjaan; 7. Link and Match antara Lembaga Pendidikan dengan dunia usaha; 8. Peningkatan layanan kesehatan ibu hamil dan balita; 9. Pencegahan dan penanganan balita stunting; 10. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 11. Pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan; 12. Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; 13. Optimalisasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 14. Optimalisasi perlindungan dan jaminan sosial; 15. Peningkatan pemberdayaan fakir miskin dan PMKS; 16. Peningkatan pemberdayaan gender; 17. Peningkatan ketahanan keluarga; 18. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak; 19. Pemajuan kesenian dan kebudayaan; 20. Penyediaan sarana dan prasarana kesenian dan olahraga; 21. Peningkatan promosi event seni budaya dan olahraga; 22. Optimalisasi pembangunan kepemudaan; 23. Peningkatan akses; 24. Peningkatan kompetensi tenaga kerja baik dari segi maupun keahlian; 25. Penciptaan lapangan kerja; 26. Peningkatan budaya literasi



No	Aspek	Permasalahan	Solusi
		24. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi maupun keahlian; 25. Masih rendahnya angka partisipasi kerja; 26. Belum optimalnya link and match antara dunia Pendidikan dengan dunia kerja; 27. Masih rendahnya budaya literasi.	masyarakat.
4.	Aspek Daya Saing Daerah	1. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat; 2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi; 3. Masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro; 4. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk; 5. Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro; 6. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam aktivitas ekonomi mikro; 7. Rendahnya rasio wirausahaan enterpreneurship); 8. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar rakyat; 9. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 10. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 11. Belum optimalnya penataan pergudangan; 12. Belum optimalnya digitalisasi pasar rakyat; 13. Masih minimnya Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional; 14. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas IKM; 15. Rendahnya akses pemasaran, promosi dan daya saing IKM; 16. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam pengembangan IKM; 17. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan perikanan; 18. Krisis regenerasi pengrajin, petani dan pembudidaya muda; 19. Masih Rendahnya nilai tambah usaha pertanian dan perikanan; 20. Terdapat ancaman perubahan iklim serta aktivitas di sektor pertanian dan perikanan banyak menyumbang terhadap emisi gas rumah kaca (contoh: penggunaan pupuk dan pestisida anorganik); 21. Belum optimalnya pengendalian harga produk pertanian dan	1. Pembinaan koperasi; 2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi; 3. Peningkatan pemberdayaan usaha mikro; 4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk; 5. Membuka akses pasar bagi produk usaha mikro; 6. Optimalisasi pemanfaatan digitalisasi dan teknologi dalam aktivitas ekonomi mikro; 7. Pendidikan wirausaha; 8. Revitalisasi pasar rakyat; 9. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 10. Penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 11. Penataan pergudangan; 12. Digitalisasi pasar rakyat; 13. Meningkatkan Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional; 14. Meningkatkan kualitas dan produktivitas IKM; 15. Membuka akses pemasaran, promosi dan daya saing IKM; 16. Digitalisasi dan teknologi dalam pengembangan IKM; 17. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan; 18. Pembinaan generasi muda pengrajin, petani dan pembudidaya muda; 19. Meningkatkan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan; 20. Penanganan ancaman perubahan iklim serta aktivitas di sektor pertanian dan perikanan; 21. Optimalisasi pengendalian harga produk pertanian dan perikanan; 22. Peningkatan akses dan implementasi terhadap teknologi informasi dan digitalisasi di sektor pertanian dan perikanan; 23. Meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk pertanian dan perikanan; 24. Optimalisasi ketersediaan sumber air irigasi; 25. Pemenuhan sarana prasarana dan



No	Aspek	Permasalahan	Solusi
		perikanan; 22. Kurangnya akses dan implementasi terhadap teknologi informasi dan digitalisasi di sektor pertanian dan perikanan; 23. Rendahnya kualitas dan kontinuitas produk pertanian dan perikanan; 24. Belum optimalnya ketersediaan sumber air irigasi; 25. Kurangnya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian; 26. Belum optimalnya ketersediaan bahan pangan lokal; 27. Belum optimalnya akses pangan; 28. Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan lokal; 29. Belum optimalnya pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan; 30. Perubahan Fungsi Lahan, terutama lahan hijau dan pertanian; 31. Pertambahan penduduk yang akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang; 32. Masih rendahnya kolaborasi antar stakeholder pariwisata; 33. Belum optimalnya pengemasan kepariwisataan Kota Tasikmalaya; 34. Masih minimnya informasi kepariwisataan di wilayah Kota Tasikmalaya dan sekitarnya; 35. Masih terdapatnya permukiman kumuh; 36. Masih terdapat rumah tidak layak huni; 37. Masih terdapat jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan; 38. Belum optimalnya konektivitas dan kemantapan jalan; 39. Belum optimalnya pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase; 40. Belum optimalnya pengelolaan parkir; 41. Belum terpenuhinya penyediaan perlengkapan jalan; 42. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan dan perpakiran; 43. Belum tersedianya pelayanan transportasi massal terintegrasi; 44. Belum optimalnya implementasi iklim investasi daerah; 45. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi investasi daerah; 46. Belum optimalnya promosi investasi daerah; 47. Belum optimalnya pemanfaatan	infrastruktur pertanian; 26. Optimalisasi ketersediaan bahan pangan lokal; 27. Optimalisasi akses pangan; 28. Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan lokal; 29. Optimalisasi pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan; 30. Pengendalian Fungsi Lahan, terutama lahan hijau dan pertanian; 31. Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder pariwisata; 32. Optimalisasi pengemasan kepariwisataan Kota Tasikmalaya; 33. Peningkatan informasi kepariwisataan di wilayah Kota Tasikmalaya dan sekitarnya; 34. Penanganan permukiman kumuh; 35. Rehabilitasi rumah tidak layak huni; 36. Penyediaan bangunan pelengkap jalan; 37. Peningkatan konektivitas dan kemantapan jalan; 38. Peningkatan pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase; 39. Optimalisasi pengelolaan parkir; 40. Pemenuhan penyediaan perlengkapan jalan; 41. Optimalisasi penyediaan perlengkapan jalan dan perpakiran; 42. Kajian pelayanan transportasi massal terintegrasi; 43. Optimalisasi implementasi iklim investasi daerah; 44. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi investasi daerah; 45. Optimalisasi promosi investasi daerah; 46. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk investasi daerah; 47. Optimalisasi pelayanan dan pengendalian investasi daerah.



No	Aspek	Permasalahan	Solusi
		ruang untuk investasi daerah; 48. Belum optimalnya pelayanan dan pengendalian investasi daerah.	
5.	Aspek Pelayanan Umum	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas; 2. Belum optimalnya pelayanan yang adaptif; 3. Belum optimalnya penggunaan TIK dalam layanan pemerintah; 4. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko; 5. SDM Aparatur belum sepeuhnya memenuhi kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan kebutuhan daerah; 6. Belum optimalnya penerapan penerapan manajemen talenta, <i>reward and punishment</i> dalam pengembangan karir ASN; 7. Belum optimalnya pemenuhan kualitas sarana dan prasarana serta kelembagaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 8. Belum optimalnya hasil kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmlaya; 9. Belum kuatnya komitmen seluruh masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa; 10. Belum optimalnya sistem inovasi daerah; 11. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 12. Keamanan dan ketertiban umum belum sepenuhnya ditegakkan untuk seluruh masyarakat; 13. Belum optimalnya kehidupan demokrasi daerah; 14. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah.	1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas; 2. Optimalisasi pelayanan yang adaptif; 3. Optimalisasi penggunaan TIK dalam layanan pemerintah; 4. Penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah; 5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Aparatur; 6. Optimalisasi penerapan manajemen talenta, <i>reward and punishment</i> dalam pengembangan karir ASN; 7. Optimalisasi pemenuhan kualitas sarana dan prasarana serta kelembagaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 8. Optimalisasi hasil kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmlaya; 9. Peningkatan komitmen seluruh masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa; 10. Peningkatan inovasi daerah; 11. Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 12. Peningkatan Keamanan dan ketertiban umum; 13. Optimalisasi kehidupan demokrasi daerah; 14. Optimalisasi penegakan peraturan daerah.

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a. Belum optimalnya capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS);
- b. Masih Banyaknya usia 5-6 tahun yang belum bersekolah pada jenjang Pendidikan Paud;
- c. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum memadai.

2) Kesehatan

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
- b. Masih tingginya prevalensi stunting;
- c. Kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer

- dan rujukan belum optimal;
- d. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional;
 - e. Belum optimalnya ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar;
 - f. Masih terdapatnya balita dengan kondisi gizi buruk;
 - g. Belum optimalnya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - h. Belum optimalnya kesehatan keluarga, penanganan penyakit menular dan tidak menular;
 - i. Masih kurangnya tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu antara lain sub spesialis dan spesialis tertentu.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Menurunnya tingkat kemantapan jalan menjadi 80,75%.
 - b. Masih terjadinya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.
 - c. Masih terdapat pemilik ijin yang belum menerapkan ketentuan bangunan.
 - d. Belum optimalnya infrastruktur drainase lingkungan perumahan dan permukiman.
 - e. Belum optimalnya jaringan irigasi kondisi baik baru mencapai 41,06%.
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah kota seluas 66,72 Hektar dari 82,68 Hektar;
 - b. Masih terdapat rumah tidak layak huni.
 - c. Belum optimalnya pengelolaan PSU yang sudah menjadi aset Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- a. Masih terdapat masyarakat yang kurang patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah;
 - c. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- 6) Sosial
- a. Belum optimalnya pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - b. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan social;
 - c. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
 - d. Masih rendahnya pemberdayaan fakir miskin dan PPKS.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

- 1) Tenaga Kerja
- a. Masih tingginya angka pengangguran;
 - b. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja;
 - c. Belum adanya sarana Balai Latihan Kerja (BLK);
 - b. Kurang optimalnya hubungan industrial, pengantar kerja dan instruktur pelatihan ketenagakerjaan;
 - c. Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan;
 - d. Belum optimalnya *link and match* antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha;
 - e. Belum optimalnya penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar.
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender.
 - b. Masih rendahnya ketahanan keluarga;
 - c. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak.



- 3) Pangan
 - a. Belum optimalnya pengelolaan bahan pangan lokal;
 - b. Belum optimalnya akses pangan;
 - c. Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan lokal;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan;
 - e. Masih ada sekitar 29,41% pangan segar yang beredar di pasar atau masyarakat yang belum memenuhi standar keamanan/mutu.
 - f. Ketersediaan cadangan pangan pemerintah masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Lingkungan Hidup
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan;
 - b. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - c. Daya tampung dan debit air danau/situ kurang optimal;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif;
 - e. Belum tercapainya proporsi Ruang Terbuka Hijau.
- 5) Kependudukan dan Catatan Sipil

Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Belum optimalnya layanan keluarga berencana;
 - b. Belum optimalnya capaian *Total Fertility Rate* (TFR);
 - c. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB;
 - d. Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.
- 7) Perhubungan
 - a. Kurangnya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung yang memadai.
 - b. Belum optimalnya pengawasan dan data lalu lintas.
 - c. Belum optimalnya pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan parkir tepi jalan umum.
 - e. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pengawasan terhadap uji kendaraan bermotor
- 8) Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi publik;
 - b. Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - c. Belum memadainya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- 9) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
 - a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;
 - b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi;
 - c. Masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro;
 - d. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;
 - e. Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro;
 - f. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam aktivitas ekonomi mikro.
- 10) Penanaman Modal
 - a. Belum optimalnya implementasi iklim investasi daerah
 - b. Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi investasi daerah;



- c. Belum optimalnya promosi investasi daerah;
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan ruang untuk investasi daerah;
 - e. Belum optimalnya pelayanan dan pengendalian investasi daerah.
- 11) Kepemudaan dan Olahraga
- a. Prestasi kepemudaan dan olahraga di tingkat provinsi masih belum optimal;
 - b. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas pemuda masih belum terlaksana secara optimal;
 - c. Penyediaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga masih belum terlaksana dengan optimal.
- 12) Kebudayaan
- a. Pembinaan dan upaya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan cagar budaya belum terlaksana dengan optimal;
 - b. Sarana dan prasarana Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya belum mampu mengakomodasi pengembangan seluruh pelaku seni budaya;
 - c. Peningkatan kapasitas dan optimalisasi Sumber Daya Manusia Objek Pemajuan Kebudayaan belum dilaksanakan secara optimal.
- 13) Perpustakaan
- a. Belum optimalnya layanan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan;
 - b. Masih rendahnya budaya literasi.
- 14) Kearsipan
- a. Belum tersedianya Depo Arsip yang memenuhi standar baku;
 - b. Belum optimalnya penerapan standar baku kearsipan pada perangkat daerah.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

- 1) Kelautan dan Perikanan
- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas sector perikanan.
 - b. Pelaku usaha budidaya ikan masih banyak yang belum menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - c. Masih rendahnya nilai tambah usaha perikanan;
 - d. Belum optimalnya infrastruktur pendukung perikanan;
 - e. Masih tingginya biaya produksi (pakan, pupuk, tenaga kerja);
 - f. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam pengembangan sector perikanan.
- 2) Pariwisata
- a. Belum optimalnya pengemasan industri dan promosi kepariwisataan Kota Tasikmalaya;
 - b. Belum optimalnya kolaborasi antar stakeholders pariwisata;
 - c. Belum optimalnya pemerataan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel, dan pusat kuliner
 - d. Masih minimnya informasi kepariwisataan di wilayah Kota Tasikmalaya dan sekitarnya.
- 3) Pertanian
- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian.
 - b. Belum optimalnya nilai tambah dan daya saing produk.
 - c. Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian.
 - d. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
 - e. Krisis regenerasi petani.
 - f. Adanya perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

- g. Keterbatasan petani dalam mengakses informasi dan teknologi pertanian.
- 4) Perdagangan
 - a. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat
 - b. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur;
 - d. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- 5) Perindustrian
 - a. Masih minimnya Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional;
 - b. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas IKM;
 - c. Rendahnya akses pemasaran, promosi dan daya saing IKM
 - d. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam pengembangan IKM
 - e. Krisis regenerasi pengrajin.

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

- 1) Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - a. Belum optimalnya capaian Indeks Inovasi Daerah (IID);
 - b. Belum optimalnya pengelolaan data perencanaan pembangunan.
- 2) Keuangan
 - Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah.
- 3) Kepegawaian
 - a. Belum optimalnya merit sistem;
 - b. Belum optimalnya kompetensi ASN.

e. Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
 - a. Belum optimalnya pembinaan ideologi pancasila.
 - b. Belum optimalnya Verifikasi hibah
 - c. Laporan bantuan keuangan politik (hibah) tidak tepat waktu.
 - d. Belum adanya monitoring dan evaluasi lapangan kepada organisasi masyarakat yang melaksanakan kegiatan hibah.

2.3.3. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan RKPD harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengejawantahkan kewajibannya sebagai representasi masyarakat Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, demikian pula halnya ketentuan yang diatur pada Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tasikmalaya, bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat/konstituen melalui kunjungan kerja secara



berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kegiatan dalam rangka penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan hasil kegiatan reses 45 Anggota DPRD, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dan hasil kunjungan kerja dalam daerah alat-alat kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya.

1. Kegiatan Reses

Kegiatan reses dilaksanakan dilaksanakan dalam 3 kali masa reses yang disesuaikan dengan 3 kali masa sidang. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya sebagai bahan penyusunan laporan reses dan kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Lokasi Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) anggota dewan terdiri dari 4 lokasi yaitu:

- Wilayah Dapil I meliputi: Kecamatan Cihideung; Kecamatan Tawang; dan Kecamatan Bungursari.
- Wilayah Dapil II meliputi: Kecamatan Cipedes; dan Kecamatan Indihiang.
- Wilayah Dapil III meliputi: Kecamatan Cibeureum; Kecamatan Tamansari; dan Kecamatan Purbaratu
- Wilayah Dapil IV meliputi: Kecamatan Mangkubumi; dan Kecamatan Kawalu.

Tujuan pelaksanaan kegiatan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan mengundang peserta reses yaitu para penerima dampak langsung dari kelompok masyarakat kemudian anggota dewan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan dalam bentuk masalah dan usulan kegiatan menjadi rekomendasi sebagai laporan reses setiap anggota dewan, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, sebagaimana dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

2. Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengan Pendapat (RDP) dilakukan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan penyerapan aspirasi yang harus segera diselesaikan secara politis, pesertanya adalah kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, OPD yang terkait dan Komisi DPRD yang menjadi mitra kerjanya, serta pihak-pihak terkait yang dapat menyelesaikan masalah yang tersampaikan selama proses rapat dengar pendapat. Lapornya adalah hasil risalah rapat dengan kesimpulannya disajikan bahan rekomendasi dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

3. Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja DPRD adalah kegiatan selain kegiatan reses anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen yang lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Proses kunjungan kerja dilakukan dengan komunikasi dua arah dengan konstituen secara berkala, dengan melibatkan OPD mitra kerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, membuat laporan sebagai bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran dalam hubungan dengan pengawasan pembangunan.

Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, hasil dengar pendapat, hasil audiensi, hasil reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat langsung yang dilakukan oleh anggota DPRD, yang diperoleh dari DPRD melalui sekretariat DPRD. DPRD telah menyampaikan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 100.3.3/KEP.01/DPRD/2026 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Gambar 2.53.
Skema sumber data Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kota Tasikmalaya Tahun 2027



Sumber: Hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

Beberapa pokok pikiran DPRD diantaranya adalah:

1. Peningkatan akses, mutu sekolah, kualitas guru, pendidikan karakter serta pemanfaatan teknologi digital menjadi fokus utama. Selain itu, pengembangan pendidikan berbasis keterampilan, vokasi industri, fasilitas literasi dan program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu akan mendukung tercapainya pendidikan yang merata, berkualitas dan berdaya saing;
2. Penguatan jaminan kesehatan, integrasi sistem pelayanan, penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pencegahan penyakit menular dan tidak menular, percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan bagi lansia, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan serta dukungan program pemenuhan gizi masyarakat. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar derajat kesehatan masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan;



3. Penguatan pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, dengan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemutakhiran data kesejahteraan sosial, evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan, rehabilitasi sosial bagi PMKS, penguatan nilai kesetiakawanan sosial, peningkatan koordinasi antarinstansi dan masyarakat, serta optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan PMKS guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
4. Fasilitasi permodalan bagi perempuan, promosi kesetaraan gender, peningkatan peran dalam organisasi sosial, penyediaan layanan bagi perempuan dan anak, penguatan sistem perlindungan anak, pencegahan kekerasan dan eksploitasi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak terdampak, pengembangan pusat layanan terpadu, sosialisasi hak anak serta peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;
5. Penguatan program keluarga berencana guna mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera dengan peningkatan sosialisasi, penyediaan alat kontrasepsi, kemudahan akses layanan di fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas petugas lapangan, pemutakhiran data kependudukan, penguatan ketahanan keluarga, integrasi program dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor yang didukung monitoring dan evaluasi berbasis data untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan pelayanan;
6. Penyediaan dan perbaikan fasilitas olahraga yang merata dan ramah bagi semua kalangan, pembinaan atlet, serta penyelenggaraan kegiatan olahraga dan kepemudaan secara berkelanjutan. Selain itu dilakukan pengembangan program keterampilan dan kreativitas pemuda, fasilitasi komunitas, pelatihan pelatih dan wasit, promosi pola hidup sehat, dukungan bagi atlet berprestasi, serta pengembangan taman kota, ruang terbuka, dan ruang kreatif melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat;
7. Penguatan nilai toleransi dan kebhinekaan, pelestarian sarana budaya, pemetaan potensi seni serta pengembangan kampung budaya berbasis kearifan lokal. Selain itu dilakukan fasilitasi kreativitas masyarakat, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya, peningkatan kapasitas kelembagaan serta optimalisasi implementasi kebijakan melalui digitalisasi dan pengembangan ekonomi kreatif guna memperkuat jati diri masyarakat dan mendukung pembangunan daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan umum dan keliling, penyediaan koleksi buku dan referensi yang mutakhir, serta pengembangan layanan digital. Selain itu dilakukan peningkatan kompetensi pustakawan, penyelenggaraan program literasi bagi masyarakat, penguatan kerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi, digitalisasi koleksi serta pengembangan komunitas literasi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
9. Penguatan sarana prasarana rumah ibadah, kerukunan antar umat beragama, peran organisasi keagamaan, serta implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Religius;
10. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui peningkatan investasi daerah yang menyerap tenaga kerja, penguatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, pengembangan kewirausahaan dan UMKM, peningkatan perlindungan tenaga kerja, penguatan sistem informasi pasar kerja, serta pengembangan kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pelatihan;
11. Peningkatan kapasitas manajemen koperasi, pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), pendampingan transformasi digital dan literasi keuangan, serta



- perluasan akses permodalan dan pemasaran. Selain itu dilakukan penyediaan ruang promosi, penguatan kerja sama dengan dunia usaha, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi, peningkatan kualitas SDM dan inovasi produk, serta pengembangan sentra industri kecil unggulan seperti batik, payung geulis, kelom geulis, dan bordir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
12. Program GEMARIKAN, optimalisasi lahan budidaya masyarakat, peningkatan teknologi budidaya dan pakan mandiri, pelatihan serta penguatan kelembagaan pembudidaya, peningkatan akses permodalan, manajemen usaha, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, pengembangan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, pemasaran berbasis digital, pengembangan sentra budidaya berkelanjutan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya air tawar seperti sungai, embung, kolam, dan sawah untuk meningkatkan produksi;
 13. Implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA), penguatan branding pariwisata, pengembangan desa dan kampung wisata, optimalisasi potensi destinasi, peningkatan infrastruktur pendukung, pengembangan wisata edukasi, budaya, agrowisata dan berbasis lingkungan, promosi pariwisata digital, penataan kawasan kota sebagai etalase seni dan ekonomi kreatif, penguatan UMKM sektor pariwisata, serta pengembangan event dan festival budaya daerah;
 14. Perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani serta dukungan teknologi dan permodalan melalui peningkatan produksi komoditas strategis seperti padi, kedelai, daging, telur dan susu, pelatihan dan pendampingan petani, advokasi perlindungan lahan sesuai Perda, penerapan teknologi pertanian modern, peningkatan populasi ternak, stabilisasi harga dan jaminan sosial petani, diversifikasi komoditas, penguatan kelembagaan kelompok tani, fasilitasi akses permodalan UMKM pertanian serta intensifikasi dan diversifikasi produksi untuk mengurangi desa rawan pangan dan memperkuat pertanian sebagai penggerak ekonomi daerah;
 15. Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan yang adaptif, penguatan digitalisasi perdagangan, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dengan upaya pengendalian inflasi, penguatan kerja sama perdagangan dan industri antar daerah, pengembangan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM, kemudahan perizinan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, revitalisasi dan peningkatan kinerja BUMD serta penguatan digitalisasi perdagangan dan pemasaran UMKM guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah;
 16. Peningkatan daya saing industri melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan UMKM, inovasi, dan penguatan sentra industri kreatif, dengan upaya pengembangan SDM industri, fasilitasi industri kecil dan menengah, peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi, akses teknologi modern, revitalisasi sentra industri lokal, penguatan jejaring pemasaran, pendampingan perizinan dan manajemen usaha, pengembangan industri berkelanjutan, fasilitasi pembiayaan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mendorong inovasi dan peningkatan daya saing industri daerah;
 17. Penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, penguatan koordinasi antarinstansi serta peningkatan partisipasi masyarakat guna menjaga stabilitas daerah dan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Tasikmalaya;
 18. Penyediaan jaringan internet yang cepat dan aman, peningkatan kapasitas server dan pusat data, serta integrasi layanan publik berbasis online antar perangkat daerah. Selain itu dilakukan penguatan e-government dan keamanan siber,



pemutakhiran data, peningkatan literasi digital masyarakat dan UMKM, optimalisasi media informasi pemerintah, pengembangan inovasi berbasis TIK, peningkatan kapasitas SDM serta penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta guna memastikan penerapan teknologi informasi yang efektif dan berkelanjutan;

19. Peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, pengembangan drainase perkotaan dan jalan lingkungan, pengelolaan bangunan publik, penanganan permukiman kumuh, pengembangan perumahan layak, pengelolaan sumber daya air dan limbah domestik, pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW serta konservasi ruang terbuka hijau;
20. Penyediaan hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau seiring pertumbuhan penduduk, dengan upaya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, pengembangan perumahan ramah lingkungan, peningkatan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan permukiman yang sehat dan aman, relokasi dari kawasan rawan bencana, konservasi sumber daya air, pemenuhan air bersih dan sanitasi, serta pengelolaan air limbah domestik guna mendukung kesejahteraan masyarakat;
21. Penyelenggaraan transportasi yang aman, efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan, dengan arah pembangunan pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau, integrasi moda transportasi, peningkatan keselamatan dan pengawasan lalu lintas, pemeliharaan penerangan jalan umum dan rambu lalu lintas, penataan parkir serta fasilitas pejalan kaki, pemanfaatan teknologi dalam manajemen transportasi, pengembangan transportasi ramah lingkungan, penguatan layanan logistik dan pengawasan antar wilayah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemantauan kinerja transportasi berbasis data guna mewujudkan sistem transportasi yang tertib, lancar, dan berkelanjutan;
22. Optimalisasi pengumpulan dan pengolahan sampah, penerapan prinsip 3R, pengembangan bank sampah, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, pengelolaan limbah B3, pengawasan kualitas udara dan air, penegakan peraturan lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau, konservasi sumber daya air termasuk pemanfaatan air hujan, peningkatan edukasi lingkungan kepada masyarakat, serta rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan ekosistem guna mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

2.3.4. Isu Strategis

Perumusan isu strategis Kota Tasikmalaya tahun 2027 disusun berdasarkan beberapa aspek, antara lain hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2026, arah kebijakan RPJMD, arah kebijakan RKP dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional, seperti ancaman resesi global. Secara umum permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan pada:

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.
Pertambahan penduduk yang diproyeksikan akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang. Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Kota Tasikmalaya untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan sosial bagi penduduk untuk menyediakan pelayanan yang inklusif. Untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan diperlukan karakter sosial budaya yang



terbuka, ramah dan saling menghargai, religius serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kota Tasikmalaya seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, energi, perumahan dan pemukiman serta infrastuktur informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk pemerataan pembangunan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar terutama di wilayah sub urban. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkeadilan.
Produktifitas ekonomi dan daya saing daerah merupakan perekonomian daerah yang produktif berbasis industry, jasa dan perdagangan yang dapat bertahan dari hambatan dan tantangan ekonomi global dan nasional serta mampu bersaing dengan daerah lainnya. Selain itu perekonomian harus memperhatikan keberkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih dan pengarusutamaan green economy. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Sedangkan pembangunan ekonomi yang inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, atau yang sering disebut dengan good governance dan clean governance, merupakan konsep yang berkaitan dengan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi karena tata kelola yang buruk dapat menyebabkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketimpangan sosial. Secara keseluruhan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga pengawasan, maupun masyarakat. Hal ini juga membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kota Tasikmalaya seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, energi, perumahan dan pemukiman serta infrastuktur informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk pemerataan pembangunan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar terutama di wilayah sub urban. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
5. Lingkungan hidup yang berkelanjutan
Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan wilayah dalam jangka panjang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan



sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan meningkatnya kebutuhan lahan akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pengendaliannya diantaranya pemanfaatan ruang menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis baik ditingkat provinsi, nasional maupun internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan, maka isu strategis pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kesejahteraan sosial
2. Produktivitas dan daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
4. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata
5. Lingkungan hidup yang berkelanjutan.



Tabel 2.162.

Sandingan Isu Strategis, Hasil Evaluasi Capaian Pembangunan Tahun 2025,
Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prioritas Pembangunan

Isu Strategis RPJMD	Hasil Evaluasi Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027
1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Kesejahteraan Sosial	▪ IPM: 76,59 Poin ▪ UHH: 75,66 Tahun ▪ Prevalensi Stunting: ▪ Cakupan Kepesertaan JKN: 102,3% ▪ RLS: 9,64 Tahun ▪ HLS: 13,51 Tahun ▪ Tingkat Kemiskinan: 10,84% ▪ Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP): 98,21% ▪ Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya: 43,55 Poin ▪ Indeks Ketimpangan Gender: 0,203 Poin ▪ LPP: 1,24%	1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang perlu diantisipasi untuk persiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebutuhan akan sarana prasarana umum untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; 2. Pertambahan penduduk yang akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang; 3. Urbanisasi penduduk ke kawasan pusat perkotaan dapat meningkatkan kebutuhan akan sarana prasarana serta dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial; 4. Masih tingginya angka beban ketergantungan (dependency ratio); 5. Masih tingginya AKI/ AKB; 6. Masih tingginya prevalensi stunting; 7. Kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan belum optimal; 8. Belum optimalnya pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan; 9. Masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular; 10. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 11. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial; 12. Masih rendahnya pemberdayaan fakir miskin dan PMKS; 13. Belum optimalnya pemberdayaan gender; 14. Masih rendahnya ketahanan keluarga; 15. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak. 16. Belum optimalnya upaya pemajuan kesenian dan kebudayaan; 17. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesenian dan olahraga; 18. Masih kurangnya skala dan promosi event seni budaya dan olahraga; 19. Belum optimalnya pembangunan kepemudaan; 20. Belum optimalnya capaian rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah; 21. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian; 22. Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja;	Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Kesejahteraan Sosial



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Isu Strategis RPJMD	Hasil Evaluasi Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027
		23. Belum optimalnya <i>link and match</i> antara dunia pendidikan dengan dunia kerja; 24. Masih rendahnya budaya literasi.	
2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkeadilan	▪ LPE: 5,39% ▪ Indeks Gini: 0,355 Poin ▪ Inflasi: 2,67% ▪ Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi): 36,49 Poin ▪ Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB: 79,77% ▪ Persentase Penerapan Ekonomi Syariah: 35,46% ▪ Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan: 4,24% ▪ Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB): 30,28% ▪ TPT: 6,43%	1. Masih terdapat ketidakstabilan harga barang pokok dan penting 2. Masih rendahnya daya beli masyarakat 3. Masih rendahnya indeks ketahanan pangan; 4. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal; 5. Terbatasnya lapangan pekerjaan 6. Belum optimalnya informasi ketenagakerjaan; 7. Masih terdapat kesenjangan ketersediaan peluang kerja dengan latar belakang pendidikan pencari kerja 8. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat; 9. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi; 10. Masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro; 11. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk; 12. Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro; 13. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk; 14. Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro; 15. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam aktivitas ekonomi mikro; 16. Rendahnya rasio wirausahaan (enterpreneurship); 17. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar rakyat; 18. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 19. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 20. Belum optimalnya penataan pergudangan; 21. Belum optimalnya digitalisasi pasar rakyat; 22. Masih minimnya Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional;	Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkeadilan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Isu Strategis RPJMD	Hasil Evaluasi Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027
		23. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas IKM; 24. Rendahnya akses pemasaran, promosi dan daya saing IKM; 25. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam pengembangan IKM; 26. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan perikanan; 27. Krisis regenerasi pengrajin, petani dan pembudidaya muda; 28. Masih Rendahnya nilai tambah usaha pertanian dan perikanan; 29. Terdapat ancaman perubahan iklim serta aktivitas di sektor pertanian dan perikanan banyak menyumbang terhadap emisi gas rumah kaca (contoh: penggunaan pupuk dan pestisida anorganik); 30. Belum optimalnya pengendalian harga produk pertanian dan perikanan;	
3. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	▪ Indeks Reformasi Birokrasi: 88,62 Poin ▪ Indeks Akses Keuangan Daerah: 5,80 Poin ▪ Indeks Inovasi Daerah: 52,57 Poin	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas; 2. Belum optimalnya pelayanan publik yang adaptif dan responsif; 3. Belum optimalnya penggunaan TIK dalam layanan pemerintah; 4. Belum optimalnya sistem inovasi daerah; 5. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko; 6. SDM Aparatur belum sepenuhnya memenuhi kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan kebutuhan daerah; 7. Belum optimalnya penerapan penerapan manajemen talenta, reward and punishment dalam pengembangan karir ASN; 8. Belum optimalnya pemenuhan kualitas sarana dan prasarana serta kelembagaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 9. Belum optimalnya hasil kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmlaya; 10. Belum kuatnya komitmen seluruh masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa; 11. Belum optimalnya sistem inovasi daerah; 12. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 13. Keamanan dan ketertiban umum belum sepenuhnya ditegakkan untuk seluruh masyarakat; 14. Belum optimalnya kehidupan demokrasi daerah;	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Isu Strategis RPJMD	Hasil Evaluasi Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027
		15. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah.	
4. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata	▪ Indeks Infrastruktur Daerah: 60,42 poin	1. Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh; 2. Masih terdapat rumah tidak layak huni; 3. Masih terdapat jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan; 4. Belum optimalnya konektivitas dan kemantapan jalan; 5. Belum optimalnya pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase; 6. Belum optimalnya pengelolaan parkir 7. Belum terpenuhinya penyediaan perlengkapan jalan; 8. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan dan perpakiran; 9. Belum tersedianya pelayanan transportasi massal terintegrasi.	Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata
5. Lingkungan hidup yang berkelanjutan	▪ IKLH Daerah: 69,50 Poin ▪ Penurunan Intensitas Emisi GRK: 1,87 Ton CO₂ eq/2010 IDR Milyar ▪ Indeks Risiko Bencana: 90,78 Poin	1. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Belum optimalnya pengelolaan kawasan rawan bencana; 3. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan 4. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup 5. Daya tampung dan debit air danau/situ kurang optimal 6. Peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang akibat pertambahan penduduk 7. Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber 9. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah 10. Kurang seimbangnya antara SDM pengangkut sampah dengan luas wilayah pengangkutan sampah dan jumlah penduduk 11. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang dapat mengakses infrastruktur pelayanan dasar air minum 12. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik	Lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kota Tasikmalaya Tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Jawa Barat, Nasional dan Global hingga Tahun 2025.

Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2027. Kerangka pendanaan daerah menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Gambaran pengelolaan keuangan daerah menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 1 (satu) tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2027 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2026. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Tasikmalaya baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang



memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Kerangka ekonomi dan pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2027 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Tasikmalaya.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2027 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2026 dan 2027. Arah kebijakan ekonomi Kota Tasikmalaya mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2026 maupun perkiraan tahun 2027, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Nasional untuk Provinsi Jawa Barat.

3.1.1. Kondisi dan Prospek Ekonomi Global

Tahun 2025 tercatat sebagai periode di mana ekonomi global menunjukkan ketahanan (*resilience*) yang lebih baik dari perkiraan semula, meskipun berada di bawah tekanan kebijakan moneter yang ketat. Pertumbuhan ekonomi dunia stabil di kisaran 3,2%, didorong oleh melandainya tingkat inflasi global yang secara bertahap mendekati target bank-bank sentral dunia. Narasi utama tahun 2025 adalah keberhasilan mayoritas negara maju dalam mencapai *soft landing*, yaitu menurunkan inflasi tanpa memicu resesi yang mendalam. Secara global, inflasi melandai ke angka 3,4% pada tahun 2025 (turun dari rata-rata periode sebelumnya). Kondisi ini memberikan ruang bagi otoritas moneter untuk mulai melonggarkan suku bunga secara perlahan. Namun, dampak dari suku bunga tinggi yang berkepanjangan pada awal tahun masih menyisakan beban biaya modal bagi sektor usaha dan memperlambat pemulihan sektor properti dan investasi manufaktur di beberapa kawasan.

Memasuki tahun 2026, ekonomi global berada pada titik persimpangan yang krusial. Setelah berhasil melewati fase normalisasi pasca-pandemi, dunia kini menghadapi fenomena *The Great Transition*, yakni transisi menuju tatanan ekonomi yang lebih terfragmentasi namun berbasis pada keamanan pasokan (*resilience*). Meskipun indikator makro global menunjukkan ketahanan dengan proyeksi pertumbuhan di kisaran 3,3% (IMF, 2026), namun distribusi pertumbuhan ini mengalami divergensi yang tajam antar wilayah. Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tetap menjadi salah satu motor utama pertumbuhan di tengah perlambatan yang dialami oleh negara-negara maju akibat kebijakan suku bunga tinggi yang persisten (*higher for longer*).

Setelah perjuangan panjang melawan lonjakan harga, inflasi global pada 2026 diproyeksikan mulai melandai ke angka 3,3% - 3,5%. Namun bukan berarti kita kembali ke era uang murah. Perbankan sentral di seluruh dunia tampaknya sepakat bahwa suku bunga akan bertahan di level yang lebih tinggi dibandingkan dekade sebelumnya. Ini adalah normal di mana efisiensi modal dan manajemen utang menjadi kunci utama keberlanjutan usaha maupun anggaran pemerintah.

Prospek ekonomi menuju tahun 2027 mengalami pergeseran risiko yang signifikan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah,



khususnya yang melibatkan Iran. Situasi ini telah mengubah asumsi dasar perencanaan global dari "stabilitas transisi" menjadi mitigasi krisis. Gangguan pada jalur logistik strategis di Selat Hormuz memicu kekhawatiran akan lonjakan harga energi dunia yang diprediksi dapat melampaui ambang batas psikologis USD 100 per barel. Kondisi ini menempatkan dunia dalam ancaman Stagflasi, di mana pertumbuhan ekonomi melambat secara drastis namun diikuti oleh lonjakan inflasi akibat kenaikan biaya produksi dan distribusi (biaya logistik global). proyeksi ekonomi global untuk tahun 2027 mulai memperlihatkan gambaran yang lebih konkret. Secara umum, dunia diperkirakan masih berada dalam fase transisi yang penuh tantangan, dengan dinamika pertumbuhan yang bervariasi antar kawasan. Menghadapi prospek 2027 yang penuh ketidakpastian, perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk lebih adaptif dan antisipatif. Strategi utama difokuskan pada penguatan ekonomi domestik melalui:

1. Transformasi Digital: Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk efisiensi birokrasi dan peningkatan produktivitas sektor jasa.
2. Kemandirian Lokal: Memperkuat rantai pasok pangan dan energi lokal guna meminimalkan ketergantungan pada fluktuasi pasar global.
3. Hilirisasi Industri: Melanjutkan penguatan nilai tambah sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tengah pergeseran arus perdagangan dunia.

Berdasarkan laporan *Global Economic Prospects* yang dirilis oleh Bank Dunia (*World Bank*) pada Januari 2026, pertumbuhan ekonomi global memang diprediksi mengalami perlambatan tipis (stagnasi yang melandai) menjadi 2,6% pada tahun 2026.

Tabel 3.1.
Proyeksi Pertumbuhan per Kawasan (PDB Riil)

Kawasan	Proyeksi 2026	Tren vs 2025	Faktor Utama
Asia Timur & Pasifik (EAP)	4,4%	Melambat	Penurunan pertumbuhan Tiongkok ke 4,4% mengimbangi ketahanan di ASEAN.
Asia Selatan (SAR)	6,2%	Melambat	Dampak tarif impor baru dari AS terhadap ekspor India (namun tetap kawasan tercepat).
Timur Tengah & Afrika Utara (MNA)	3,6%	Meningkat	Didorong oleh peningkatan kuota produksi minyak dan aktivitas sektor swasta.
Afrika Sub-Sahara (SSA)	4,3%	Meningkat	Asumsi kondisi keamanan yang lebih stabil di negara-negara rapuh (<i>fragile states</i>).
Eropa & Asia Tengah (ECA)	2,4%	Stagnan	Konsumsi domestik yang solid melawan dampak ketegangan dagang dan lemahnya ekonomi zona Euro.
Amerika Latin & Karibia (LAC)	2,4%	Meningkat	Pemulihan bertahap pada ekonomi utama di Amerika Selatan.

Sumber: Bank Dunia (*World Bank*), **Laporan:** *Global Economic Prospects (Prospek Ekonomi Global)* edisi **Januari 2026**. **Fokus:** Memberikan proyeksi pertumbuhan PDB riil untuk jangka pendek dan menengah, serta analisis mendalam mengenai hambatan struktural di negara berkembang.



3.1.2. Kondisi dan Prospek Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2025 menunjukkan ketahanan dalam menghadapi berbagai tekanan, menjadi dasar yang kuat bagi kinerja ekonomi ke depan. Perekonomian Indonesia di penutup tahun 2025 tetap resilien, didukung aktivitas manufaktur yang ekspansif, inflasi yang terkendali, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus. Faktor-faktor tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di tahun 2026.

Aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan kinerja positif di akhir tahun 2025. PMI Manufaktur Desember 2025 tercatat sebesar 51,2; ekspansif selama lima bulan berturut-turut. Kinerja positif ini didukung kuatnya permintaan domestik, peningkatan ketenagakerjaan, serta aktivitas pembelian bahan baku. Optimisme pelaku usaha juga menguat dan mencapai level tertinggi dalam tiga bulan terakhir, mencerminkan keyakinan terhadap prospek sektor manufaktur ke depan. Dari sisi global, aktivitas manufaktur negara mitra utama Indonesia secara umum juga berada di zona ekspansif seperti Amerika Serikat (51,8), China (50,1), dan India (55,7). Di kawasan ASEAN, PMI manufaktur Thailand (57,4) dan Malaysia (50,1) juga menguat, memberikan sinyal positif bagi permintaan ekspor Indonesia. Pada November 2025, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus USD2,66 miliar, melanjutkan tren yang telah berlangsung sejak Mei 2020. Secara kumulatif Januari – November 2025, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD38,54 miliar, naik USD9,30 miliar (ctc). Ekspor Januari – November 2025 tercatat sebesar USD256,56 miliar, meningkat 5,61 % (ctc). Peningkatan ekspor terutama disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi 10,41 %, mencerminkan meningkatnya nilai tambah ekspor nasional. Sementara itu, impor pada periode yang sama tercatat sebesar USD218,02 miliar, naik 2,03 % (ctc). Penyumbang utama peningkatan impor adalah dari sisi impor Barang Modal dengan kontribusi 3,28%, sejalan dengan aktivitas produksi yang ekspansif. Ke depan, dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama akan terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai dinamika global.

Stabilitas harga di tahun 2025 tetap terjaga tercermin dari tingkat inflasi yang terkendali sebesar 2,92% (yoy). Tingkat inflasi Desember 2025 dipengaruhi oleh naiknya harga beberapa komoditas pangan di tengah tetap menguatnya inflasi inti dan rendahnya inflasi *administered price* (AP). Gangguan cuaca dan kendala distribusi mendorong naiknya inflasi *volatile food* hingga mencapai 6,21% (yoy), dipengaruhi oleh komoditas aneka cabai, beras, dan ikan segar. Inflasi AP tercatat sedikit meningkat menjadi 1,93% (yoy) yang didorong oleh kenaikan harga bensin nonsubsidi dan tarif transportasi di periode Nataru. Sementara itu, inflasi inti tercatat stabil pada level 2,38% (yoy) karena naiknya harga emas perhiasan. Sepanjang tahun 2025, inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional yang didukung oleh kebijakan intervensi harga dan pasokan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan.

Berdasarkan konsensus terbaru dari IMF (Januari 2026), Bank Dunia, di berbagai daerah, Indonesia diproyeksikan tetap menjadi salah satu kekuatan ekonomi paling stabil di kawasan Asia Pasifik. Saat ekonomi global diprediksi tumbuh moderat di angka 3,2%, Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih cepat pada level 5,1% hingga 5,3% (IMF dan Bank Dunia). Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi mesin utama, didukung oleh stabilitas daya beli dan penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan mencapai 6,5% – 7,5%. Pemanfaatan teknologi digital dan hilirisasi industri mineral (seperti nikel dan tembaga) mulai memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).



Pemerintah dan otoritas moneter mengarahkan tahun 2027 sebagai tahun dengan inflasi yang jinak namun tetap waspada. Suku bunga dan rupiah di tengah kebijakan normal suku bunga global, harga komoditas seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di angka USD 60 – 80 per barel, memberikan ruang fiskal yang cukup untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Investasi pada energi terbarukan mulai memberikan dampak pada struktur ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru di sektor hijau. Ekonomi nasional 2027 adalah cerita tentang Transformasi yang Terukur. Indonesia tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga stabilitas makro ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui digitalisasi, sektor digital bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pengungkit produktivitas nasional untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle-income trap*) dan investasi pada energi terbarukan mulai memberikan dampak pada struktur ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru di sektor hijau. Meskipun prospeknya cerah namun tahun 2027 tetap menyertakan catatan kehati-hatian akan hambatan dagang dari negara-negara maju dapat menekan kinerja ekspor dan tantangan utama yang tersisa adalah memastikan pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, bukan sekadar sektor bernilai tambah rendah.

Hingga tahun 2027, pemerintah tetap konsisten menjadikan infrastruktur sebagai tulang punggung daya saing nasional. Terdapat 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk dalam daftar prioritas periode 2025 – 2029, terdiri dari 48 proyek lanjutan (*carry over*) dan 29 proyek baru. Pelaksanaan proyek-proyek ini pada tahun 2027 diharapkan telah memasuki tahap penyelesaian akhir atau tahap operasional penuh bagi proyek-proyek yang dimulai pada awal dekade 2020-an.

Penyelesaian proyek infrastruktur pada tahun 2027 diprediksi akan menurunkan biaya logistik nasional secara signifikan. Sebagai contoh, pelabuhan-pelabuhan terintegrasi di Ambon dan akses tol ke Pelabuhan Patimban akan memperlancar arus ekspor produk olahan sumber daya alam. Dampak makro dari penyelesaian PSN ini adalah peningkatan efisiensi modal (*Incremental Capital Output Ratio* atau ICOR) yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan input investasi yang sama.

Tabel 3.2.
Proyek Strategis Nasional di Kota Tasikmalaya

No.	Daftar Proyek Strategis Nasional	Keterangan
A. Sektor Jalan dan Jembatan		
1	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya)	Konstruksi

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Salah satu program unggulan pemerintah pusat yang mendapatkan alokasi anggaran signifikan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah dimulai pada 2025 dengan anggaran awal sekitar Rp 71 triliun, program ini direncanakan akan mencapai cakupan hingga 80 persen dari total sasaran pada tahun 2027. Tujuan utama MBG pada tahun 2027 adalah perbaikan kualitas gizi nasional, penurunan angka stunting secara drastis, serta peningkatan prestasi akademis siswa. Namun secara ekonomi, dimensi pemberdayaan dari program ini belum optimal, mengingat masih minimnya peran UMKM dan Petani/Peternak/Nelayan lokal dalam rantai pasok SPPG. Selain pemberdayaan, optimasi dampak program ini pada 2027 akan sangat



bergantung pada efisiensi logistik distribusi, transparansi anggaran, dan standar kualitas gizi yang konsisten di berbagai wilayah Indonesia.

Kebijakan fiskal tahun 2027 diperkirakan akan menghadapi dilema yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah memiliki ambisi besar untuk menekan defisit anggaran menuju level nol persen pada periode 2027 – 2028 guna menjaga kemandirian finansial dan disiplin fiskal. Di sisi lain, kebutuhan belanja untuk program strategis seperti IKN, MBG, dan penyelesaian PSN tetap sangat tinggi.

Upaya peningkatan efisiensi belanja negara melalui restrukturisasi anggaran kementerian dan lembaga yang lebih ketat, perlu dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih. Pemerintah tentunya menargetkan pemangkasan pemborosan dan pengalihan dana ke program-program prioritas yang memiliki multiplier tertinggi, tetapi praktek yang terjadi sepanjang tahun 2025 belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi dan pemangkasan pemborosan. Selain itu, upaya optimalisasi pendapatan negara melalui digitalisasi administrasi perpajakan (CORETAX) dan penguatan sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil hilirisasi menjadi andalan utama.

3.1.3. Kondisi dan Prospek Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Perekonomian Provinsi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, terutama melalui perdagangan barang dan jasa. Di sepanjang tahun 2025, daya beli masyarakat menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang mencapai 5,32%. Masyarakat menunjukkan resiliensi yang tinggi, didukung oleh inflasi yang berhasil ditekan pada angka 2,63%. Stabilitas harga ini memastikan bahwa meskipun ada kenaikan biaya hidup, masyarakat Jawa Barat masih memiliki sisa pendapatan untuk belanja non-primer. Digitalisasi juga memainkan peran kunci; ledakan penggunaan QRIS (tumbuh 132% secara volume) menunjukkan bahwa transaksi ritel tetap sangat aktif, baik di mal besar maupun di lapak UMKM.

Memasuki awal 2026, daya beli diproyeksikan semakin menguat seiring dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok lebih tinggi (5,5% - 6,0%). Pemerintah daerah berfokus pada menjaga psikologi pasar, terutama menjelang momen besar seperti Ramadan dan Idul Fitri 2026. Upaya menjaga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga menjadi prioritas agar "gairah belanja" masyarakat tidak terhambat oleh lonjakan harga komoditas tertentu seperti cabai atau daging ayam yang sempat memberikan andil inflasi di akhir 2025, kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan target ekonomi makro pada tahun 2026.

Tabel 3.3.
Target Ekonomi Makro Jawa Barat Tahun 2026-2027

No	Indikator	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027
1	LPE (% <i>, c-to-c</i>)	5,25*	5,15-6,20	5,23 - 7,48
2	Laju Inflasi (% <i>, y-o-y</i>)	2,63	2,5 ± 1	2,5 ± 1
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	40,94*	40,10-42,00	41,15-41,35
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (% PDRB)	3,18*	3,21-3,46	3,28 - 3,65
5	PMTB (% PDRB)	24,63*	23,82-23,84	24,96-25,24



No	Indikator	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027
6	Rasio Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,53**	20,50- 20,54	

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Keterangan: *Data Triwulan III 2025 **Data 2024

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diproyeksikan tumbuh sebesar 5,23% – 7,4% pada tahun 2027 yang didukung oleh peningkatan serapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja melalui investasi. Terkendalnya perekonomian ditunjukkan oleh terkendalnya inflasi pada tingkat $2,5\% \pm 1\%$ yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali juga mencerminkan tingkat produksi barang dan jasa yang terkendali seiring dengan peningkatan efektivitas produksi dan distribusi bahan pokok penting. Secara bersamaan, prospek ekonomi global dan nasional yang tumbuh lebih baik juga mempengaruhi kondisi Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari peranan industri pengolahan yang signifikan, industri pengolahan secara konsisten menyumbang lebih dari 40% terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat. Artinya, hampir separuh dari perputaran uang dan nilai tambah ekonomi di provinsi ini berasal dari pabrik dan aktivitas manufaktur. Kontribusi industri Jawa Barat terhadap industri Nasional mencapai 27,8%, yang merupakan tertinggi di antara provinsi lainnya. Dengan pencapaian tersebut, Jawa Barat diperkirakan akan tetap menjadi pusat industri nasional hingga tahun 2045. Pada tahun 2027, industri pengolahan diproyeksikan tetap menjadi jantung mekanis yang menggerakkan seluruh tubuh perekonomian Jawa Barat. Sektor ini bukan lagi sekadar penyumbang angka statistik, melainkan penentu apakah Jawa Barat mampu melompat menjadi provinsi industri berstandar global. Industri Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan output pada sektor Pertanian, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan, Transportasi, dan Real Estate. Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat diproyeksikan tumbuh 4,85 – 6,59% yang didorong oleh sub sektor industri Alat Angkutan, Barang dari Logam, Makan dan minum, dan Tekstil. Selain itu, operasionalisasi berbagai kawasan industri baru di Jawa Barat diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru pada sektor industri pengolahan Jawa Barat.

Realisasi investasi yang mencapai Rp. 296 Triliun pada Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan efek multiplier pada perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri, dan peningkatan peran industri lokal dalam rantai pasok industri besar.

Pertumbuhan yang solid di sektor lapangan usaha pada tahun 2027 didukung oleh tingginya pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 6,40% – 9,15% (c-to-c), dengan nilai ADHB sebesar Rp. 852,23 Triliun – Rp. 886,25 Triliun. Sementara itu, nilai realisasi investasi Jawa Barat pada tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp. 290 Triliun – Rp. 343 Triliun, atau sekitar 15% terhadap target realisasi investasi nasional. Upaya pencapaian realisasi investasi tersebut dilakukan melalui perbaikan iklim investasi, baik melalui peningkatan kepastian hukum, ketersediaan sumber daya input, serta stabilitas ekonomi dan politik. Penerapan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan juga menjadi penting, utamanya melalui implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru, ketersediaan infrastruktur dan pemerataan investasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan potensi masing-masing, serta hilirisasi sektor primer bernilai tambah tinggi di Jawa Barat bagian Selatan. Pengembangan ekonomi di Jawa Barat bagian Selatan melalui promosi investasi juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan Jawa Barat.



Pada tahun 2027, realisasi investasi yang terjadi di Jawa Barat harus menjadi sumber penciptaan lapangan kerja lokal. Serapan tenaga kerja per 1 Triliun investasi di Jawa Barat pada tahun 2025 tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2024, dimana serapan per 1 triliun investasi adalah 1528 orang, sementara tahun 2025 hanya mencapai 1530 orang. Serapan ini tidak sejalan dengan realisasi investasi yang meningkat signifikan sekitar Rp. 40 Triliun, dimana dengan rasio yang sama, peningkatan realisasi sebesar Rp. 40 Triliun diharapkan dapat menambah serapan tenaga kerja hingga 70 ribu orang.

3.1.4. Kondisi dan Prospek Ekonomi Kota Tasikmalaya

Perekonomian Kota Tasikmalaya mengalami pertumbuhan yang stabil, namun belum mampu berlari secepat dinamika ekonomi regional Jawa Barat secara keseluruhan. Perekonomian Kota Tasikmalaya saat ini berada dalam fase tumbuh namun terbatas. Diperlukan adanya diversifikasi sektor unggulan terutama penguatan industri kreatif dan digitalisasi UMKM agar Kota Tasikmalaya tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Sepanjang tahun 2025, perekonomian Kota Tasikmalaya tumbuh sebesar 5,39%, pencapaian tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22%.

Tabel 3.4.
Target Ekonomi Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2026 – 2027

No	Indikator	Realisasi 2025 ¹⁾	Target 2026 ²⁾	Target 2027 ³⁾
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (% , c-to-c)	5,39	5,45	5,46 – 6,19
2	Inflasi (% , y-to-y)	2,67	1,00 – 3,00	1,00 – 3,00
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%))	12,94	12,95	12,87
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	6,32	6,47	6,65
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	30,38	32,85	32,92
6	Ekspor Barang dan Jasa (%)	-14,39	-13,71	-13,31

Sumber: 1) BPS Kota Tasikmalaya

2) RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026

3) RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,39%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat yang berada di kisaran 5,20% hingga 5,32% pada periode yang sama. Ekonomi Kota Tasikmalaya didorong oleh sektor perdagangan, jasa keuangan, dan konstruksi, sementara Jawa Barat ditopang oleh industri pengolahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tasikmalaya tidak hanya tumbuh secara positif, tetapi juga melampaui kinerja ekonomi provinsi secara keseluruhan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya kekuatan internal yang spesifik, efektivitas kebijakan lokal, atau komposisi sektoral yang lebih tangguh dan dinamis di Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Keunggulan ini menempatkan Kota Tasikmalaya sebagai salah satu mesin pertumbuhan potensial di Jawa Barat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai angka 5,45%, menunjukkan tren pemulihan dan stabilitas



yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tetap menjadi kontributor utama PDRB, didukung oleh akselerasi sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh progresif sebagai dampak dari transformasi ekonomi digital. Sinergi antara penguatan industri kreatif lokal (hilirisasi) dan stabilitas sektor jasa diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menekan tingkat pengangguran terbuka di daerah, struktur ekonomi Kota Tasikmalaya tahun 2026 masih didominasi oleh sektor tersier (jasa), dengan sektor perdagangan besar dan eceran (6,1%-6,5%), industri pengolahan (4,8%-5,2%), konstruksi (5,5%-6,0%), informasi dan komunikasi (7,5%-8,2%) dan jasa pendidikan (5,2%-5,6%).

Dalam konteks Kota Tasikmalaya, hilirisasi menjadi salah satu strategi penting yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat sektor unggulan, seperti UMKM, pariwisata, dan industri kreatif. Dalam rangka mewujudkan hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu melibatkan berbagai pihak sehingga terjadi sinergitas program guna mewujudkannya. Program-program untuk mengoptimalkan hilirisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain melalui penguatan kolaborasi regulasi antar instansi pemerintah, peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur pendukung hilirisasi, penyederhanaan perizinan di sektor hilirisasi, dan pengembangan riset dan inovasi teknologi hilirisasi.

Inflasi Kota Tasikmalaya di akhir 2025 berada di angka 2,67% mencerminkan kondisi stabilitas harga yang terjaga di tengah akselerasi ekonomi. Tantangan ke depan tetap pada mitigasi dampak iklim terhadap harga pangan lokal agar tidak menggerus pertumbuhan ekonomi yang sedang dibangun. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) cukup berhasil menjaga stabilitas harga, karena angka tersebut berada di dalam rentang sasaran nasional ($2,5\% \pm 1\%$). Meskipun secara keseluruhan terkendali, terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang memberikan tekanan inflasi signifikan pada akhir 2025 yang pertama Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau: Menjadi kontributor utama, terutama kenaikan harga pada komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Hal ini dipicu oleh faktor cuaca dan tingginya permintaan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026 dan Sektor Transportasi: Adanya penyesuaian tarif angkutan antar kota seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat di akhir tahun. Jika disandingkan dengan LPE Triwulan III sebesar 4,03% dan proyeksi akhir tahun di angka 5,2%, maka kondisi ekonomi Kota Tasikmalaya bisa dikatakan sehat. Analisis karena angka pertumbuhan ekonomi (5,2%) lebih tinggi dibandingkan angka inflasi (2,67%), ini berarti secara riil daya beli masyarakat Tasikmalaya masih mengalami peningkatan. Masyarakat memiliki kemampuan belanja yang lebih besar dibandingkan kenaikan harga barang di pasar. Keberhasilan menekan inflasi di bawah 3% pada akhir 2025 tidak lepas dari beberapa langkah strategis: Operasi Pasar Murah: Dilakukan secara intensif di beberapa kecamatan untuk menstabilkan harga beras dan minyak goreng, Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen: Program pemanfaatan pekarangan untuk menanam cabai secara mandiri guna meredam gejolak harga *volatile foods* dan Kerjasama Antar Daerah (KAD): Memastikan pasokan bahan pokok tetap aman dengan mendatangkan suplai dari daerah penghasil di sekitar Priangan Timur.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,43%. Angka ini merepresentasikan perbaikan yang berkelanjutan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana TPT tercatat 7,66% pada tahun 2021, 6,62% pada tahun 2022 dan 6,55% pada tahun 2023 dan 6,49% pada tahun 2024. Tren penurunan TPT yang konsisten ini, beriringan dengan LPE yang positif, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dialami Kota Tasikmalaya



semakin inklusif. Ini berarti ekspansi ekonomi berhasil menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja secara efektif, sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penurunan TPT menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya bersifat kapital-intensif, tetapi juga mampu menghasilkan peluang kerja yang memadai bagi angkatan kerja.

Persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 adalah 10,84%. Angka ini menunjukkan penurunan pada tahun 2024 adalah 11,10%, melanjutkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota ini. Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan penurunan pengangguran, mengisyaratkan bahwa pembangunan ekonomi di Kota Tasikmalaya memiliki dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup penduduknya. Hal ini juga menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah, seperti yang diuraikan dalam dokumen perencanaan, telah memberikan hasil yang positif. Pencapaian ini berkontribusi pada distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang terbukti paling efektif, seperti program "Bageur" dan berbagai layanan sosial, guna mengoptimalkan alokasi sumber daya di masa mendatang.

Pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya terus menunjukkan kemajuan signifikan, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,59 poin pada tahun 2025, mengalami kenaikan dari 76,03 poin pada tahun 2024. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kota Tasikmalaya telah berada di level "tinggi". Peningkatan IPM tahun 2025 terjadi pada semua dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Umur harapan hidup (UHH) warga Kota Tasikmalaya meningkat menjadi 75,66 tahun, Rata-rata lama sekolah 9,64 tahun, harapan lama sekolah 13,51 tahun dan rata-rata pengeluaran riil per kapita juga meningkat menjadi Rp. 11,849 Juta pada tahun 2025. Kemajuan yang berkelanjutan dan berbasis luas dalam IPM ini menandakan bahwa Kota Tasikmalaya secara efektif berinvestasi pada modal manusianya. Populasi yang lebih sehat, teredukasi, dan sejahtera membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing kota secara keseluruhan. Peningkatan IPM juga menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi telah diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup, yang dapat menciptakan siklus positif untuk pembangunan di masa depan. Untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal, investasi berkelanjutan dalam pendidikan berkualitas (termasuk pelatihan kejuruan), layanan kesehatan yang mudah diakses, dan program perlindungan sosial akan sangat penting sebagai pendorong utama kemakmuran ekonomi jangka panjang dan ketahanan kota.

Data Badan Pusat Statistik 2025 mencatat IPM Kota Tasikmalaya berada di kisaran 76,59, yang termasuk dalam kategori tinggi, namun, angka ini menempatkan Kota Tasikmalaya di peringkat ke-91 dari 98 kota secara nasional, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan manusia dibandingkan daerah lain hal ini disebabkan komponen IPM dari bidang Pendidikan (rata rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) yang masih bernilai rendah sekitar 68,29, capaian rata rata lama sekolah (RLS) Tahun 2025 adalah 9,64. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Tasikmalaya telah menempuh pendidikan hingga setingkat kelas 9 atau lulus SMP, sementara capaian Harapan lama Sekolah (HLS) Tahun 2025 adalah 13,02 Berarti anak-anak di Kota Tasikmalaya



diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga setidaknya semester awal di perguruan tinggi.

Kota Tasikmalaya secara spasial memiliki keterbatasan lahan pertanian formal. Oleh karena itu, roda perekonomian bertumpu pada sektor non-primer. Sektor Industri Pengolahan menjadi motor penggerak utama pada kategori sektor sekunder (manufaktur). Rasio yang menyentuh angka sekitar 13,8% mencerminkan bahwa aktivitas pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi memiliki basis massa yang kuat di masyarakat Tasikmalaya, terutama didominasi oleh industri skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam struktur perekonomian Kota Tasikmalaya, Rasio Kontribusi Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini (termasuk proyeksi akhir tahun/analisis indikator makro 2025), angka rasio ini berada di kisaran 13,7% hingga 14,1% dari total PDRB Kota Tasikmalaya. Nilai tambah industri pengolahan di Kota Tasikmalaya tidak digerakkan oleh industri manufaktur berat atau pabrik skala besar nasional, melainkan oleh klaster industri kreatif domestik yang padat karya. Komoditas utama yang mendorong rasio PDRB ini antara lain:

1. Industri Makanan dan Minuman: Pengolahan pangan lokal yang skalanya terus naik kelas menjadi industri rumah tangga modern.
2. Industri Kerajinan (Kriya): Kerajinan anyaman mendong, payung geulis, dan kelom geulis.
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (Konveksi): Pusat-pusat konveksi dan bordir (seperti di Kecamatan Kawalu) yang menyuplai pasar regional hingga nasional.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (sering disebut sebagai sektor pariwisata dan kuliner dalam arti luas) merupakan salah satu lapangan usaha yang paling dinamis di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2025, kontribusi atau rasio sektor ini terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya stabil berada di kisaran 3,5% hingga 3,9%. Meskipun secara persentase angka ini terlihat tidak sebesar sektor perdagangan atau industri pengolahan, sektor akomodasi dan makan minum memiliki *multiplier effect* (efek pengganda) yang sangat tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja informal dan perputaran uang di masyarakat. Kota Tasikmalaya secara geografis berfungsi sebagai *hub* atau pusat pertumbuhan bagi wilayah Priangan Timur (Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan Garut). Hal ini membuat aktivitas perjalanan bisnis, rapat kedinasan, dan transit regional berpusat di kota Tasikmalaya, jika dibedah di dalam struktur internal sektor ini, sub-sektor Makan Minum (Kuliner) memberikan andil yang jauh lebih dominan dibandingkan akomodasi. Kota Tasikmalaya mengalami transformasi pesat dalam industri kreatif kuliner:

1. Menjamurnya kafe, kedai kopi modern (*coffee shop*), dan rest area estetik yang menyasar segmen generasi muda serta pekerja produktif.
2. Eksistensi kuliner legendaris khas Tasikmalaya yang tetap kuat dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik saat akhir pekan atau musim mudik Lebaran.

Berdasarkan data dan analisis indikator makro Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2025, rasio kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap total PDRB Pengeluaran Kota Tasikmalaya berada di kisaran 24,5% hingga 26,0%. Angka ini menunjukkan bahwa seperempat dari total aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya digerakkan oleh akumulasi modal fisik, baik yang bersumber dari sektor publik (pemerintah) maupun sektor privat (swasta/masyarakat). Sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), atau yang dalam istilah praktisnya dikenal sebagai Investasi Fisik, merupakan komponen krusial kedua terbesar dalam struktur PDRB Kota



Tasikmalaya menurut pengeluaran (setelah Konsumsi Rumah Tangga). Sebagai komponen investasi, PMTB mencerminkan penambahan dan pembaruan aset-aset fisik yang digunakan dalam proses produksi. Di Kota Tasikmalaya, tingginya rasio PMTB (sekitar 25%) mengindikasikan bahwa Kota Tasikmalaya terus melakukan pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang modal. Aset fisik ini mencakup pembangunan gedung/perumahan, perbaikan jalan, jembatan, pemasangan instalasi jaringan, hingga pengadaan mesin-mesin industri untuk klaster konveksi. Selain bangunan fisik, komponen PMTB Kota Tasikmalaya juga digerakkan oleh pengadaan alat angkut dan mesin-mesin produksi oleh pelaku usaha. Mengingat sektor industri pengolahan (manufaktur mikro-kecil) dan sektor perdagangan adalah motor utama kota Tasikmalaya, investasi swasta dalam bentuk mesin jahit komputer (untuk bordir), mesin pengemasan modern, serta armada logistik/transportasi barang memegang peranan penting dalam menjaga tren positif PMTB ini.

Ditinjau dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran Kota Tasikmalaya, komponen Net Ekspor Barang dan Jasa secara konsisten menunjukkan angka neto yang negatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Tasikmalaya merupakan wilayah *net importer*, di mana nilai pasokan barang dan jasa yang didatangkan dari luar daerah (impor) lebih besar daripada nilai komoditas yang keluar (ekspor). Hal ini wajar terjadi pada wilayah perkotaan yang berbasis jasa, di mana pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kreatif, barang modal, hingga komoditas konsumsi masyarakat masih sangat bergantung pada daerah penyangga di sekitarnya. Defisit net ekspor ini sekaligus mengonfirmasi bahwa roda perekonomian Kota Tasikmalaya digerakkan secara dominan oleh aktivitas domestik, khususnya komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang menyumbang lebih dari 70% total PDRB.

1. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur ekonomi Kota Tasikmalaya didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi terbesar yaitu 21,24% dengan nilai PDRB sebesar Rp. 6.290,01 miliar kemudian Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,41% senilai Rp 3.971,11 miliar). Sektor jasa lainnya lain yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian adalah Sektor Konstruksi yang berkontribusi 15,19% senilai Rp. 4.498,26 miliar, Sektor Transportasi dan Pergudangan berkontribusi 10,85% senilai Rp. 3.213,26 miliar, dan Jasa Keuangan dan Asuransi berkontribusi 10,22% senilai Rp. 3.025,16 miliar.

Kuat dan konsistennya dominasi sektor perdagangan, industri dan jasa ini mengukuhkan identitas Kota Tasikmalaya sebagai pusat komersial dan layanan regional. Peran ini sangat penting dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi di wilayah Priangan Timur yang lebih luas. Kontribusi substansial dari sektor manufaktur (Industri Pengolahan) menunjukkan adanya mesin ekonomi ganda, di mana baik sektor jasa maupun manufaktur berperan vital. Struktur ekonomi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kota didorong oleh aktivitas yang berkaitan dengan konsumsi serta industri produktif, menawarkan tingkat diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, strategi pembangunan di masa depan perlu memprioritaskan penguatan sektor-sektor inti ini melalui investasi terarah pada infrastruktur, transformasi ekonomi digital (misalnya, *e-commerce* untuk perdagangan), dan pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor jasa dan manufaktur. Peningkatan keterkaitan antar-sektor



antara manufaktur dan jasa dapat lebih lanjut meningkatkan ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

2. Sektor Unggulan dan Potensi Ekonomi Lokal

Mempertimbangkan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Konstruksi; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Transportasi dan Pergudangan serta Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menjadi sektor unggulan di Kota Tasikmalaya. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Sektor Konstruksi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya namun mengalami perlambatan pertumbuhannya di tahun 2025. Sektor unggulan dengan pertumbuhan tinggi terjadi di sektor transportasi dan pergudangan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan, serta sektor informasi dan komunikasi.

Tabel 3.5.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
serta Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
di Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Lapangan Usaha	PDRB (Miliar Rupiah)	Kontribusi (%)	Laju Pertumbuhan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.673,55	5,23	10,48
B. Pertambangan dan Penggalan	1,68	0,01	-3,39
C. Industri Pengolahan	4.138,81	12,94	2,64
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,65	0,01	1,93
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	123,81	0,38	0,58
F. Konstruksi	4.671,28	14,60	2,85
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.617,66	20,69	2,06
H. Transportasi dan Pergudangan	3.749,03	11,72	13,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.022,03	6,32	7,00
J. Informasi dan Komunikasi	1.335,09	4,17	9,77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.249,44	10,16	3,41
L. Real Estat	531,03	1,66	8,12
M,N. Jasa Perusahaan	438,23	1,37	9,72
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.003,93	3,14	1,86
P. Jasa Pendidikan	678,73	2,12	6,55
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	767,71	2,40	9,78



Lapangan Usaha	PDRB (Miliar Rupiah)	Kontribusi (%)	Laju Pertumbuhan
R.S.T.U Jasa Lainnya	986,57	3,08	10,61
PDRB	31.991,67	100	5,39

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2026.

Salah satu jasa yang cukup berkembang pesat di Kota Tasikmalaya adalah jasa kecantikan, dimana pada 4 tahun terakhir jumlah klinik kecantikan melonjak signifikan, dari yang jumlahnya hanya di bawah 10 klinik di akhir tahun 2022, saat ini mencapai puluhan. Tidak hanya klinik kecantikan lokal, namun klinik-klinik kecantikan jaringan regional maupun nasional pun turut hadir di Kota Tasikmalaya untuk memperluas pasarnya.

Perkembangan dan potensi jasa kecantikan di Kota Tasikmalaya menunjukkan tren yang sangat positif. Sebagai pusat perekonomian dan urbanisasi di wilayah Priangan Timur, kota ini menjadi magnet pertumbuhan berbagai industri modern, termasuk kosmetik, klinik estetika, dan salon kecantikan. Dengan adanya pergeseran demografi dan gaya hidup yang didominasi oleh generasi muda (Gen Z dan Milenial) dimana tingkat kesadaran akan kesehatan kulit membuat perawatan kecantikan kini dianggap sebagai kebutuhan pokok (lifestyle), bukan lagi kemewahan.

Selain itu, sektor potensial lainnya adalah sektor yang tumbuh cepat walaupun kontribusi terhadap perekonomian masih kecil yaitu sektor Informasi dan Komunikasi serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Di lain pihak, Kota Tasikmalaya memiliki sejumlah komoditi unggulan yang menjadi ciri khas dan potensi ekonomi lokal. Industri-industri terkemuka yang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi produk unggulan kota meliputi industri pakaian jadi bordir, makanan dan minuman, konveksi tekstil, alas kaki (sandal, sepatu, dan *kelom geulis*), batik, industri kayu dan furnitur kayu, serta industri pengolahan lainnya seperti *payung geulis* dan kerajinan anyaman dari tanaman non-rotan dan non-bambu (*mendong*). Di antara industri kreatif, olahan makanan, konveksi, dan bordir adalah tiga sektor utama yang memiliki eksistensi sangat tinggi dan pengaruh besar terhadap perekonomian. Kota ini juga dikenal sebagai pusat kewirausahaan, dengan banyaknya lapangan pekerjaan di bidang kewirausahaan, industri, pendidikan, dan kesehatan.

Keunggulan industri lokal dan kreatif ini memberikan keunggulan kompetitif yang unik, yang berakar pada warisan budaya dan keahlian lokal kota. Hal ini tidak hanya menciptakan identitas yang khas tetapi juga dapat menarik pasar khusus, termasuk pariwisata. Basis kewirausahaan yang kuat bertindak sebagai inkubator alami bagi industri-industri ini, mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja lokal, terutama dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Potensi ekonomi lokal lainnya adalah sektor pertanian dan perikanan dengan luas lahan yang masih cukup luas. Sektor pertanian dan perikanan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi secara cukup signifikan dan berperan dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah.

Ini menunjukkan potensi pertumbuhan nilai tambah yang sangat tertanam dalam komunitas lokal. Kebijakan ke depan harus berfokus pada pengembangan kekuatan lokal yang unik ini melalui perlindungan kekayaan intelektual, *branding*,



akses ke pelatihan khusus, dan memfasilitasi akses pasar yang lebih luas untuk produk-produk khas ini, mungkin dengan memanfaatkan platform digital dan inisiatif pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 didukung oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan pemerintah yang proaktif hingga karakteristik demografi dan geografis kota. Faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Iklim Investasi

Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kerangka kebijakan yang terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tercantum jelas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang menggarisbawahi prioritas seperti pengendalian inflasi daerah, peningkatan iklim usaha dan investasi, peningkatan kompetensi pencari kerja, pengembangan UMKM, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, dan industri berbasis sumber daya lokal. Pendekatan "Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)" diterapkan untuk akselerasi pembangunan, termasuk penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) 2021-2041 menetapkan strategi jangka panjang untuk pengembangan industri unggulan, termasuk pengembangan sumber daya manusia industri dan sarana prasarana.

Pendekatan kebijakan yang *multi-faceted* dan terintegrasi ini menunjukkan upaya strategis untuk mengatasi berbagai dimensi ekonomi secara simultan, dengan tujuan mencapai efek sinergis. Tata kelola yang proaktif ini menciptakan lingkungan yang dapat diprediksi dan mendukung bagi dunia usaha. Meskipun data investasi spesifik untuk Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 belum tersedia secara rinci dalam sumber yang diberikan, Realisasi investasi Jawa Barat pada tahun 2025 mencapai angka fantastis Rp. 296,8 triliun, menjadikannya provinsi dengan investasi tertinggi di Indonesia. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 109,9%, dan mengalami pertumbuhan sebesar 18,21% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berhasil menyerap tenaga kerja hingga September 2025 berhasil menyerap 303.469 orang tenaga kerja di 27 kota/kabupaten (Bappeda Provinsi Jawa Barat). Keberhasilan investasi di tingkat provinsi ini secara kuat mengindikasikan bahwa Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat, kemungkinan besar turut merasakan dampak positif dari iklim investasi yang kondusif ini, menarik modal dan menciptakan lapangan kerja. Momentum regional ini bertindak sebagai pendorong tidak langsung namun kuat bagi aktivitas ekonomi lokal. Penting bagi pemerintah kota untuk terus melacak dan melaporkan realisasi investasi spesifiknya guna mengukur dampak langsung dari pendorong ini dan mempromosikan keunggulan lokal untuk menarik lebih banyak investasi.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan sumber daya manusia merupakan pilar utama pendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya. Kebijakan pemerintah daerah secara eksplisit menargetkan peningkatan kompetensi pencari kerja dan optimalisasi *link and match* dengan dunia kerja melalui pelatihan dan pembinaan hubungan industrial. Misi pembangunan kota juga mencakup "Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas". Peningkatan kualitas SDM ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan



Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya yang terus meningkat dan berada pada kategori "tinggi". Faktor sumber daya manusia yang melimpah juga diidentifikasi sebagai potensi kekuatan ekonomi yang penting bagi Kota Tasikmalaya.

Di tahun 2027, investasi pada pendidikan dasar dan kesehatan mulai membuahkan hasil. Melalui keberlanjutan program Tasik Pintar antara lain pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan mebel sekolah SD dan SMP, perlengkapan sekolah, program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi, dan selanjutnya dalam rangka menanggulangi angka putus sekolah, Pemerintah Kota Tasikmalaya menghadirkan pendidikan paket B, paket C dan kursus melalui UPTD SKB Dinas Pendidikan secara gratis yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya yang putus sekolah dan untuk mendukung program prioritas nasional Pemerintah Kota Tasikmalaya telah meresmikan sekolah rakyat yang terdiri dari 3 rombel yakni 1 (satu) SD dan 2 (dua) SMP. Di sisi lain, penanganan *stunting* yang masif di tahun-tahun sebelumnya telah melahirkan generasi balita yang lebih sehat dan siap tumbuh menjadi pelajar yang kompetitif, memastikan rantai kemiskinan struktural mulai terputus melalui kualitas fisik manusia yang lebih prima. Keunggulan kompetitif SDM Kota Tasikmalaya di tahun 2027 terletak pada keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kematangan spiritual melalui program Ohan (*One hafiz one kelurahan*) pembangunan manusia di tahun 2027 tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kematangan spiritual.

Tenaga kerja yang terampil dan berkualitas secara langsung meningkatkan produktivitas di semua sektor, menjadikan bisnis lebih kompetitif. Dalam ekonomi yang didominasi oleh sektor jasa dan industri kreatif, tenaga kerja terampil sangat penting untuk inovasi dan kualitas produk/layanan. Secara khusus, perlu difokuskan pada peningkatan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penguatan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja internasional, peningkatan kualitas sertifikasi kompetensi, serta integrasi data pencari kerja ke dalam platform Nyari Gawe guna memperkuat layanan penempatan tenaga kerja yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut perlu memperhatikan arahan Pemerintah Pusat terkait penundaan program transmigrasi formal antar-pulau, sehingga strategi perluasan kesempatan kerja lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi peluang kerja di dalam maupun luar negeri.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan memperluas perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM dan pekerja informal melalui peningkatan dukungan anggaran, perluasan kepesertaan, serta penguatan edukasi publik mengenai pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Peningkatan IPM yang berkelanjutan menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup menghasilkan angkatan kerja yang lebih cakap dan mudah beradaptasi, yang merupakan aset jangka panjang yang sangat penting. Pendorong ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tentang akumulasi modal tetapi juga tentang peningkatan potensi manusia, yang mengarah pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan



tangguh. Investasi berkelanjutan dalam program pelatihan kejuruan yang selaras dengan kebutuhan industri unggulan dan yang sedang berkembang, serta promosi literasi digital di semua kelompok usia, akan memaksimalkan pengembalian ekonomi dari pengembangan modal manusia.

3. Peran Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri Kreatif

Sektor perdagangan, industri dan jasa, yang secara konsisten mendominasi struktur PDRB Kota Tasikmalaya, merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kota Tasikmalaya dikenal sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa di Priangan Timur, menarik mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi karena ketersediaan lapangan pekerjaan di bidang kewirausahaan, pendidikan, kesehatan, jasa kecantikan, dan perkantoran, serta fasilitas umum yang memadai. Selain itu, industri kreatif, seperti bordir, konveksi, dan olahan makanan, telah menjadi sektor unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan menciptakan peluang usaha.

Kinerja kuat sektor perdagangan dan jasa diperkuat oleh peran Kota Tasikmalaya sebagai pusat regional, yang menarik konsumen dan bisnis dari daerah sekitarnya, sehingga memperluas ukuran pasar. Industri kreatif, yang berakar kuat pada budaya lokal dan semangat kewirausahaan, menyediakan produk bernilai tambah yang unik yang membedakan ekonomi kota. Sinergi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis di mana produksi lokal menemukan pasar yang lebih luas melalui saluran perdagangan yang mapan, dan daya tarik kota menarik talenta dan modal, mendorong siklus pertumbuhan dan inovasi yang positif. Kebijakan harus berfokus pada peningkatan konektivitas dan keterkaitan pasar antara produsen lokal (terutama UMKM di industri kreatif) dan pasar regional/nasional yang lebih luas, berpotensi melalui platform digital dan program fasilitasi perdagangan. Lebih lanjut mengembangkan peran Tasikmalaya sebagai pusat layanan dan logistik regional juga akan menjadi kunci.

Di Tahun 2027 peran Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri Kreatif telah didukung dengan Program Tasik Pelak (Pembiakan Ekonomi Lokal Kewilayahan), program ini adalah untuk menumbuhkankembangkan usaha mikro kecil dan meningkatkan kesempatan bekerja serta berusaha pada sektor industri, perdagangan, jasa, koperasi, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan disetiap wilayah kelurahan atau kecamatan berbasis potensi dan kearifan lokal. Pelak secara khusus dirancang untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi menyebar ke wilayah-wilayah penyangga melalui pemberdayaan potensi unik di tiap kelurahan.

Beberapa program yang telah dilaksanakan dan bisa menjadi pondasi untuk Tahun 2027, antara lain: 1) Penataan Pasar Cikurubuk; 2) Pembentukan Koperasi Merah Putih di 69 kelurahan; 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian Koperasi sebanyak 47 Unit Koperasi; 4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian kepada 255 orang sumber daya manusia koperasi; 5) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebanyak 308 orang; 6) Pelaksanaan pemberdayaan UMKM bagi 455 orang pelaku UMKM; 7) Pembinaan dan pengembangan industri sebanyak 610 orang pelaku industri; 8) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil pada infrastruktur publik bagi 7 unit usaha.

Pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan telah diadakan pelatihan pelatihan dan bantuan bahan praktek sarana budidaya perikanan



untuk pembudidaya ikan kecil sebanyak 360 orang, bantuan sarana budi daya perikanan untuk kelompok pembudidaya ikan sebanyak 54 kelompok, pelatihan dan bantuan sarana pengolahan hortikultura kepada 50 orang. Sedangkan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif kepada 145 orang dan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata sebanyak 25 orang, pengadaan/ pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata sebanyak 10 unit.

4. Dukungan Infrastruktur

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai menjadi faktor pendorong mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi di Kota Tasikmalaya. Infrastruktur fisik, termasuk jalan raya, telekomunikasi, dan listrik, diidentifikasi sebagai industri pendukung yang krusial untuk meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur kota juga merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya, dengan target peningkatan indeks kemantapan jalan.

Infrastruktur yang kuat mengurangi biaya operasional bagi bisnis, meningkatkan efisiensi logistik untuk perdagangan dan manufaktur, serta meningkatkan konektivitas bagi barang dan manusia. Hal ini secara langsung berkontribusi pada iklim investasi yang lebih menarik dan memperluas jangkauan pasar untuk produk lokal. Fokus pemerintah pada peningkatan kualitas infrastruktur, sebagaimana dibuktikan oleh masuknya dalam dokumen perencanaan strategis, menunjukkan pengakuan akan peran fundamentalnya dalam mempertahankan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan mudah diakses bagi semua pelaku ekonomi. Investasi berkelanjutan dalam peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur penting, terutama yang mendukung koridor ekonomi utama dan zona industri, bersama dengan perluasan infrastruktur digital, akan sangat penting untuk ekspansi ekonomi di masa depan.

Meskipun menunjukkan tren pertumbuhan positif, Kota Tasikmalaya juga menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap UMKM

Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Tasikmalaya, yang ditetapkan sebesar Rp. 2.801.962 pada tahun 2025 dan diusulkan naik menjadi Rp. 2.980.336 untuk tahun 2026, menimbulkan beban biaya operasional tambahan bagi pengusaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal dan penyerap tenaga kerja yang signifikan. Situasi ini menghadirkan dilema kebijakan klasik dimana menyeimbangkan keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui upah yang lebih tinggi dengan memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM. Jika UMKM menghadapi beban biaya yang berlebihan tanpa peningkatan produktivitas atau akses pasar yang sepadan, hal itu dapat menghambat pertumbuhan mereka, berpotensi menyebabkan penurunan investasi, perlambatan penciptaan lapangan kerja, atau bahkan penutupan usaha. Hal ini pada akhirnya akan mengikis tren positif dalam LPE dan TPT. Tantangan ini menyoroti perlunya respons kebijakan yang nuansa yang



mendukung baik tenaga kerja maupun dunia usaha. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme dukungan yang terarah bagi UMKM, seperti program peningkatan produktivitas, akses ke pembiayaan yang terjangkau, insentif pajak, atau pelatihan efisiensi dan inovasi, untuk membantu mereka menyerap biaya tenaga kerja yang meningkat tanpa mengorbankan daya saing.

2. Isu Pemasaran dan Akses Pasar bagi Industri Lokal

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif di Kota Tasikmalaya adalah keterbatasan dalam pemasaran dan akses pasar. Banyak sektor industri masih menjual produk mereka hanya kepada pelanggan dengan jarak yang dekat atau di sekitar tempat usaha, tanpa mengetahui cara menjual produk dalam jangkauan pasar yang lebih luas. Hal ini menghambat potensi pertumbuhan dan skala usaha. Meskipun memiliki kemampuan produksi yang kuat dan semangat kewirausahaan yang hidup dalam industri kreatif, ketidakmampuan untuk secara efektif menembus pasar yang lebih luas bertindak sebagai hambatan signifikan terhadap realisasi potensi ekonomi penuh mereka. Hal ini membatasi pertumbuhan pendapatan, membatasi skala ekonomi, dan menghambat penciptaan lapangan kerja, mencegah komoditi unggulan ini berkontribusi secara optimal terhadap PDRB kota dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literasi digital untuk pemasaran dan distribusi, yang menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan saluran pasar modern. Intervensi strategis diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran digital, memfasilitasi akses ke platform e-commerce, membangun keterkaitan rantai pasokan yang lebih kuat, dan mempromosikan produk lokal melalui pameran dagang nasional dan internasional atau *marketplace* daring.

3. Penanganan Kemiskinan dan Isu Sosial Ekonomi Lainnya

Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan di tahun 2025, penanganan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah dengan berbagai program yang komprehensif. Program-program ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan pelayanan sosial (termasuk program "Bageur" yang melibatkan partisipasi masyarakat), pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pendapatan melalui pelatihan keterampilan dan bantuan sarana dan prasarana.

Persistensi kemiskinan, meskipun indikator makro ekonomi positif, menunjukkan bahwa akar penyebabnya mungkin bersifat struktural atau bahwa manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Adanya program pengentasan kemiskinan yang komprehensif menunjukkan pengakuan akan kompleksitas penyebab kemiskinan dan komitmen untuk mengatasi kemiskinan multi-dimensi. Sektor perekonomian yang mungkin cocok dalam meningkatkan produktivitas dan berakhir pada pendapatan masyarakat Kota Tasikmalaya yang meningkat bisa menurunkan tingkat kemiskinan yang selama ini terjadi di Kota Tasikmalaya. Program pengentasan kemiskinan seyogyanya terintegrasi dengan pengembangan sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja terutama pada sektor perdagangan, industri, jasa dan pertanian yang didukung investasi daerah.

Isu sosial ekonomi yang berkaitan dengan kemiskinan di Kota Tasikmalaya diantaranya adalah masalah stunting, infrastuktur dan sanitasi, permasalahan sosial dan daya beli masyarakat yang masih rendah. Oleh karena



itu, implementasi program pengentasan kemiskinan perlu penyempurnaan berkelanjutan yang lebih terarah seperti penanganan stunting melalui perbaikan gizi dan intervensi kesehatan masyarakat, penanganan permasalahan sosial, peningkatan sanitasi, penyediaan infrastruktur pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

3.1.5. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi nasional Republik Indonesia pada Tahun 2027 merupakan bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Perumusan arah kebijakan ini bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2027 mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri “ Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada penguatan industri pengolahan, serta integrasi fiskal-moneter yang adaptif terhadap tantangan global. Tujuan Utama RKP Tahun 2027 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan (berkualitas). Fokus Strategis RKP Tahun 2027 adalah meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional melalui Master Plan Produktivitas Nasional, dengan Investasi untuk mendorong penanaman modal yang memiliki kualitas tinggi dan mampu menciptakan nilai tambah. Dan Industri adalah Penguatan sektor industri pengolahan (hilirisasi) sebagai penggerak utama ekonomi.

Pemerintah menyadari bahwa angka pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Pertumbuhan pada tahun 2027 dirancang untuk menjadi berkualitas, yang artinya pertumbuhan tersebut harus mampu menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi ketimpangan, dan menjaga kelestarian lingkungan (ekonomi hijau). Di tahun 2027, fokus beralih dari sekadar pemanfaatan sumber daya alam menuju penguatan modal manusia dan teknologi. Narasi besarnya adalah bagaimana tenaga kerja Indonesia bisa menghasilkan nilai lebih tinggi dalam waktu yang sama. Hal ini dilakukan melalui reformasi pendidikan vokasi dan riset yang selaras dengan kebutuhan pasar. Investasi tidak lagi hanya dikejar secara kuantitas, tetapi ditekankan pada sektor-sektor yang memiliki dampak berantai (*multiplier effect*).

Pemerintah mendorong investasi yang masuk ke sektor teknologi tinggi dan infrastruktur digital guna mendukung konektivitas antarwilayah yang lebih efisien. Industri adalah kunci untuk memberikan nilai tambah. Melalui RKP 2027, narasi industri fokus pada hilirisasi. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya di dalam negeri (seperti nikel untuk baterai EV atau hilirisasi produk pertanian). Ini bertujuan untuk memperkuat struktur manufaktur nasional agar lebih tahan terhadap guncangan global. Untuk mencapai target ini, pemerintah pusat melakukan sinkronisasi ketat dengan pemerintah daerah. Sebagai contoh, dokumen perencanaan seperti RKPD Jawa Barat 2027 dan daerah lainnya wajib menyelaraskan program kewilayahan mereka agar sejalan dengan prioritas nasional ini, memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di Jakarta. Target Indikator Makro ekonomi RKP Tahun 2027 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.6.
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2027

NO	Indikator	Tahun 2027
Sasaran Pembangunan Nasional		
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9-7,5
2	GNI Per Capita (US\$)	5.900-5.990
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,84
5	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-6,5
	b. Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0
6	Rasio Gini	0,362-0,367
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30 -4,87
8	Indeks Modal Manusia	0,575
Indikator Pembangunan		
9	Indeks Kesejahteraan Petani	0,8038
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40,81
Indikator Ekonomi Makro		
11	Inflasi (% YoY); Akhir Periode	2,5 -1,0
12	Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US\$)	16.800-17.500
13	Cadangan Devisa (Miliar US\$)	160,44-162,91
14	Cadangan Devisa (dalam Bulan Impor)	5,3-5,5 (a)
15	Neraca TRansaksi Berjalan (% PDB)	(0,36) - (0,40) (b)
16	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,5
17	Rasio PDB Pariwisata (Miliar US\$)	4,70-4,80
18	Devisa Pariwisata (Miliar US\$)	25,5-28,6
19	Pendapatan Negara (% PDB)	11,82-12,40
20	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,02-10,50
21	Keseimbangan Primer (%)	0,42- (0,16) (b)
22	Surplus /Defisit APBN (% PDB)	(1,80)-(2,40)) (b)
23	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,8-8,8
24	Nilai RealisasiPMA dan PMDN (Triliun Rp.)	2.361,6-2.451,0
25	Nilai: Realisasi PMA daPMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp.)	1.114,8-1.180,4

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027.

Setelah melewati periode konsolidasi di tahun 2025 dan 2026, pemerintah memfokuskan seluruh energi untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar mampu menembus angka 6% hingga 7%. Tahun ini menjadi titik krusial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk melepaskan diri dari jebakan pendapatan menengah. Kebijakan utama pada 2027 adalah memperluas cakupan hilirisasi. Pemerintah tidak lagi hanya fokus pada mineral mentah, tetapi mulai merambah secara agresif ke sektor perkebunan, kelautan, dan industri teknologi tinggi. Arah kebijakan diarahkan pada penguatan ekosistem kendaraan listrik (EV) dan industri semikonduktor nasional. Tujuannya jelas: Indonesia tidak hanya ingin menjadi eksportir bahan baku, tetapi menjadi pemain utama dalam rantai pasok teknologi global.

Ekonomi Hijau bukan lagi sekadar komitmen lingkungan, melainkan mesin pertumbuhan baru. Pemerintah mulai mengimplementasikan pasar karbon secara lebih luas dan mempercepat transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).



Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa industri nasional memiliki daya saing tinggi di pasar internasional yang kini sangat menuntut standar keberlanjutan (ESG). Pemerataan ekonomi menjadi narasi sentral. Investasi diarahkan untuk lebih tersebar ke luar Pulau Jawa, dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai Kawasan Industri di Indonesia Timur sebagai motor penggerakannya. Infrastruktur logistik yang dibangun pada tahun-tahun sebelumnya mulai diintegrasikan secara digital untuk menurunkan biaya distribusi nasional, sehingga harga kebutuhan pokok di seluruh pelosok Indonesia menjadi lebih seragam. Di sisi sosial, kebijakan ekonomi 2027 menekankan pada peningkatan kualitas SDM. Reformasi pendidikan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri masa depan seperti AI dan otomasi. Selain itu, pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial melalui sistem data tunggal yang lebih akurat, memastikan daya beli masyarakat kelas bawah tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

Tabel 3.7.
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (Persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2027	
		Pertumbuhan	Kontribusi
1	Konsumsi Rumah Tangga	5,3-5,7	53,9
2	Konsumsi LNPRT	5,8-6,1	1,3
3	Konsumsi Pemerintah	4,4-8,3	7,6
4	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto /PMTB)	6,8-8,8	28,9
5	Ekspor Barang dan Jasa	7,4-10,4	22,7
6	Impor Barang danJasa	8,1-9,7	21,0
Pertumbuhan PDB		5,9-7,5	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026.

Hingga tahun 2027, pemerintah tetap konsisten menjadikan infrastruktur sebagai tulang punggung daya saing nasional. Terdapat 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk dalam daftar prioritas periode 2025–2029, terdiri dari 48 proyek lanjutan (*carry over*) dan 29 proyek baru. Pelaksanaan proyek-proyek ini pada tahun 2027 diharapkan telah memasuki tahap penyelesaian akhir atau tahap operasional penuh bagi proyek-proyek yang dimulai pada awal dekade 2020-an.

Penyelesaian proyek infrastruktur pada tahun 2027 diprediksi akan menurunkan biaya logistik nasional secara signifikan. Sebagai contoh, pelabuhan-pelabuhan terintegrasi di Ambon dan akses tol ke Pelabuhan Patimban akan memperlancar arus ekspor produk olahan sumber daya alam. Dampak makro dari penyelesaian PSN ini adalah peningkatan efisiensi modal (*Incremental Capital Output Ratio* atau ICOR) yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan input investasi yang sama.

Tabel 3.8.
Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat

No.	Daftar Proyek Strategis Nasional	Keterangan
A. Sektor Jalan dan Jembatan		
1.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang – Padalarang	Pembebasan Lahan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Daftar Proyek Strategis Nasional	Keterangan
2.	Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda)	Konstruksi Seksi IV (Bojonggede - Salabenda)
3.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	Operasional
4.	Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda)	Konstruksi
5.	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya)	Konstruksi
6.	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Operasional
7.	Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North - South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road	Pembebasan Lahan
B. Sektor Pelabuhan		
1.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Tahap 1-2 Jangka Pendek
C. Sektor Kereta		
1.	Double Track Jawa Selatan	Segmen Kiaracondong - Cicalengka
2.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Operasional Line 1 Jatimulya - Dukuh Atas dan Line 2 Harjamukti - Dukuh Atas
3.	Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East - West Phase I	Konstruksi
D. Sektor Bendungan dan Irigasi		
1.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Kegiatan Multiyears
E. Sektor Air Bersih dan Sanitasi		
1.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Proses KPBU
F. Sektor Energi		
1.	Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Tahap 2 dan 3
G. Sektor Tanggul Pantai		
1.	Tanggul Pantai	Kegiatan Multiyears
H. Sektor Perumahan		
1.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Kegiatan Multiyears
I. Sektor Kawasan		
1.	Kawasan Industri Patimban Industrial Estate	Pencarian Tenant Potensial

Sumber: Rancangan Awal RKPD Jawa barat Tahun 2027



Salah satu program unggulan pemerintah pusat yang mendapatkan alokasi anggaran signifikan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah dimulai pada 2025 dengan anggaran awal sekitar Rp 71 triliun, program ini direncanakan akan mencapai cakupan hingga 80 persen dari total sasaran pada tahun 2027.

Tujuan utama MBG pada tahun 2027 adalah perbaikan kualitas gizi nasional, penurunan angka stunting secara drastis, serta peningkatan prestasi akademis siswa. Namun secara ekonomi, dimensi pemberdayaan dari program ini belum optimal, mengingat masih minimnya peran UMKM dan Petani/Peternak/Nelayan lokal dalam rantai pasok SPPG. Selain pemberdayaan, optimasi dampak program ini pada 2027 akan sangat bergantung pada efisiensi logistik distribusi, transparansi anggaran, dan standar kualitas gizi yang konsisten di berbagai wilayah Indonesia.

Kebijakan fiskal tahun 2027 diperkirakan akan menghadapi dilema yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah memiliki ambisi besar untuk menekan defisit anggaran menuju level nol persen pada periode 2027–2028 guna menjaga kemandirian finansial dan disiplin fiskal. Di sisi lain, Kebutuhan belanja untuk program strategis seperti IKN, MBG, dan penyelesaian PSN tetap sangat tinggi.

Upaya peningkatan efisiensi belanja negara melalui restrukturisasi anggaran kementerian dan lembaga yang lebih ketat, perlu dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih. Pemerintah tentunya menargetkan pemangkasan pemborosan dan pengalihan dana ke program-program prioritas yang memiliki multiplier tertinggi, tetapi praktek yang terjadi sepanjang tahun 2025 belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi dan pemangkasan pemborosan. Selain itu, upaya optimalisasi pendapatan negara melalui digitalisasi administrasi perpajakan (CORETAX) dan penguatan sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil hilirisasi menjadi andalan utama.

Tabel 3.9.
Program Strategis Nasional di Jawa Barat

No.	Daftar Program Strategis Nasional	Keterangan Program Strategis Nasional
1.	Program Ketenagalistrikan	Program Ketenagalistrikan terdiri dari: a. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) PLTA Wado (50 MW). b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Nasional.
2.	Program Pemerataan Ekonomi	Percepatan Penyelesaian Penguatan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta Peremajaan Kebun Rakyat.
3.	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka sebagai Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
4.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional/Food Estate	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan Food Estate.



No.	Daftar Program Strategis Nasional	Keterangan Program Strategis Nasional
5.	Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan dan Peraturan mengenai Ibu Kota Negara	Program terdiri dari: Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; dan Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, meliputi: KEK Lido, ditetapkan melalui PP 69 Tahun 2021, KEK Patimban Industrial Estate (target ditetapkan di 2025), KEK Industri Teknologi Terpadu Subang (target ditetapkan di 2025).
7.	Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit	Integrasi Grup PT. Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.

Sumber: Rancangan Awal RKPD Jawa barat Tahun 2027

3.1.6. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat Tahun 2027 tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk memperluas kesempatan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah, memperkuat struktur ekonomi daerah, serta menjaga daya dukung lingkungan hidup.

Kebijakan ini menekankan transformasi ekonomi dari berbasis komoditas mentah menuju ekonomi bernilai tambah melalui hilirisasi, penguatan industri pengolahan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta integrasi ekonomi hijau dan ekonomi biru. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat yang menjadi prioritas pada tahun 2027 meliputi:

1. Pemetaan, penataan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal bernilai tambah tinggi disertai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP, khususnya Jawa Barat bagian selatan;
2. Perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mendorong kemitraan dan keterkaitan usaha besar dengan koperasi dan UMKM (*link and match*);
3. Pemberian deregulasi dan insentif bagi investasi pada sektor ekonomi produktif, hijau, biru, dan energi baru terbarukan, termasuk akses pembiayaan hijau dan berbiaya rendah;
4. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
5. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global;
6. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik upskilling dan reskilling, dan;
7. Pengembangan investasi di wilayah bertata ruang industri berbasis klaster dan potensi keunggulan wilayah dengan mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM.



Selain arah kebijakan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran, kebijakan yang menekankan pada transformasi ekonomi juga menjadi penting pada tahun 2027 yang meliputi:

1. Penguatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan peternakan melalui penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul berorientasi pasar ekspor serta penerapan praktik budidaya yang efisien dan ramah lingkungan.
2. Penyediaan sarana produksi pertanian yang terjangkau dan berkelanjutan, termasuk pengendalian hama terpadu, pupuk dan pakan ramah lingkungan, serta penguatan layanan penyuluhan dan pendampingan teknologi.
3. Penyediaan dan integrasi infrastruktur esensial pertanian dan perdesaan (irigasi, jalan produksi, gudang, cold chain, dan logistik) untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas hasil.
4. Perlindungan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
5. Hilirisasi komoditas unggulan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
6. Penguatan tata kelola perdagangan melalui modernisasi sarana perdagangan, penguatan rantai pasok dan distribusi, promosi produk unggulan daerah, serta perlindungan konsumen. Penataan dan penguatan destinasi wisata alam, budaya, dan perkotaan berbasis kolaborasi pentahelix untuk meningkatkan kunjungan dan belanja wisatawan.
7. Penciptaan dan penguatan government-induced activities guna meningkatkan pergerakan orang dan barang serta menciptakan permintaan ekonomi baru di wilayah afirmasi 3TP.
8. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk mendukung transformasi industri dan tumbuhnya Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global.
9. Penguatan riset terapan pada sektor ekonomi produktif melalui peningkatan kapasitas peneliti, pembiayaan riset, serta kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, DUDI, dan masyarakat, termasuk jejaring internasional.
10. Transformasi dan digitalisasi UMKM melalui perluasan akses pasar digital, ruang inovasi dan inkubator bisnis, serta integrasi ke dalam rantai pasok industri.
11. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan yang inklusif, khususnya bagi masyarakat di wilayah afirmasi dan perdesaan.
12. Peningkatan kualitas dan kesiapan tenaga kerja melalui pemetaan kebutuhan kompetensi, program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan industri.
13. Penguatan tata kelola pelatihan kerja, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta pemanfaatan jejaring diaspora berketerampilan menengah dan tinggi.
14. Peningkatan kompetensi kewirausahaan, penguasaan teknologi, serta perluasan akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi pelaku usaha.
15. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi sektor produktif (petani, nelayan, dan petambak) serta integrasi dengan pasar, perbankan, dan skema asuransi.
16. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas, penguatan tata kelola dan model bisnis, serta adopsi teknologi tepat guna.
17. Pengembangan ekonomi hijau dan biru melalui penyiapan kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, pajak karbon, dan skema pembayaran berbasis kinerja.



18. Penataan dan restrukturisasi BUMD agar lebih profesional, sehat secara finansial, dan berorientasi pada pelayanan publik serta penguatan ekonomi daerah.
19. Penguatan sistem logistik daerah dan konektivitas antarwilayah produksi–distribusi untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa.
20. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi daerah melalui pengembangan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal serta efisiensi dan konservasi energi pada sektor produktif.
21. Penguatan integrasi ekonomi regional dan rantai nilai antarwilayah di Jawa Barat melalui pengembangan kluster industri dan kawasan ekonomi strategis berbasis potensi unggulan daerah.

3.1.7. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dan memperhatikan arah kebijakan dan kondisi ekonomi nasional dan regional, maka sasaran dan target pembangunan ekonomi makro daerah Kota Tasikmalaya tahun 2025 yang disandingkan dengan realisasi tahun 2025 dan proyeksi capaian 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Indikator Makro Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2027

Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Realisasi 2025 ¹⁾	Proyeksi 2026 ²⁾	Target 2027 ³⁾
Indeks Pembangunan Manusia	Point	76,59	76,99	77,17
PDRB Perkapita	Juta Rp	42,13	43,00	45,24-46,99
PDRB ADH Berlaku	Triliyun Rp	31.99	32,96	34,61-35,13
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,45	6,04 - 6,77
Inflasi	%	2,67	1,00-3,00	1,00-3,00
Indeks gini	Point	0,355	0,350	0,338 - 0,381
Tingkat Kemiskinan	%	10,84	9,47	7,52 - 8,27
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,43	6,34	5,76 - 6,2

Sumber: 1. BPS Kota Tasikmalaya, 2026.
2. RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026
3. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029, Data diolah Tahun 2026

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi tahun 2027 sebagaimana Tema Pembangunan tahun 2027 yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat”, maka disusun arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya Tahun 2027 tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk memperluas kesempatan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah, memperkuat struktur ekonomi daerah serta menjaga daya dukung lingkungan hidup.



Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya yang menjadi prioritas pada tahun 2027 meliputi:

1. Pemetaan, penataan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal bernilai tambah tinggi disertai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi;
2. Perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mendorong kemitraan dan keterkaitan antar pelaku usaha;
3. Penguatan dan pengembangan kurikulum vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
4. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik upskilling dan reskilling;
5. Penguatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian/perikanan melalui penerapan praktik budidaya yang efisien dan ramah lingkungan, penyediaan sarana produksi pertanian/perikanan yang terjangkau dan berkelanjutan, termasuk pengendalian hama terpadu, pupuk dan pakan, serta penguatan layanan penyuluhan dan pendampingan teknologi;
6. Penyediaan dan integrasi infrastruktur esensial pertanian/perikanan (irigasi, jalan produksi, *cold chain* dan logistik) untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas hasil;
7. Perlindungan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan daerah;
8. Pengembangan industri pengolahan untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan berbasis keunggulan daerah yang halal dan ramah lingkungan;
9. Penguatan tata kelola perdagangan melalui modernisasi sarana perdagangan, penguatan rantai pasok dan distribusi, promosi produk unggulan daerah;
10. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam partisipasi penataan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata (ODTW) dan ekonomi kreatif;
11. Pengembangan ekosistem riset, inovasi daerah, penguatan riset terapan pada sektor ekonomi produktif untuk mendukung transformasi industri dan tumbuhnya Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global, serta peningkatan kapasitas peneliti;
12. Pemberdayaan, transformasi dan digitalisasi UMKM melalui perluasan akses pasar digital, ruang inovasi dan inkubator bisnis, serta integrasi ke dalam rantai pasok industri;
13. Peningkatan kualitas dan kesiapan tenaga kerja melalui program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan industri, penempatan, dan perlindungan tenaga kerja;
14. Penguatan kelembagaan usaha, peningkatan kompetensi kewirausahaan, penguasaan teknologi tepat guna, serta perluasan akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi pelaku usaha, serta integrasi dengan pasar, perbankan, koperasi, dan asuransi;
15. Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD agar lebih profesional, sehat secara finansial, dan berorientasi pada pelayanan publik serta penguatan ekonomi daerah;
16. Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka pengelolaan ketahanan pangan;
17. Peningkatan ketahanan pangan daerah melalui ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan.



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pada bagian ini menyajikan mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama satu tahun yang didukung oleh kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Kebijakan keuangan tersebut memberikan gambaran tentang anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2027 dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah kedepan. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Penganggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, dukungan APBD Provinsi dan APBN serta pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Berikut ini disajikan realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tabel berikut ini.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Tabel 3.11.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2023 – 2027

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	APBD 2026	Target 2027
4.	PENDAPATAN	1.698.776.143.136,64	1.792.496.242.472,06	1.708.924.901.429,37	1.475.118.627.786,00	1.483.807.826.247,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	364.302.263.151,64	351.777.584.751,06	425.503.016.558,37	455.654.716.705,00	466.092.936.166,00
4.1.01	Pajak Daerah	165.183.534.730,00	168.952.023.618,00	232.458.168.959,00	235.434.213.413,00	239.050.251.856,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.333.653.274,00	168.040.917.264,06	25.387.829.031,00	48.691.877.937,00	46.867.725.571,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.338.000.075,00	6.798.537.734,00	6.066.249.069,00	6.066.249.069,00	6.066.249.069,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	179.447.075.072,64	7.986.106.135,00	161.590.769.499,37	165.462.376.286,00	174.108.709.670,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.334.473.879.985,00	1.440.718.657.721,00	1.283.421.884.871,00	1.019.463.911.081,00	1.017.714.890.081,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.122.149.154.645,00	1.174.724.029.446,00	1.184.524.098.847,00	933.636.750.000,00	931.887.729.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.122.149.154.645,00	1.174.724.029.446,00	1.184.524.098.847,00	933.636.750.000,00	931.887.729.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	212.324.725.340,00	265.994.628.275,00	98.897.786.024,00	85.827.161.081,00	85.827.161.081,00
4.2.02.01	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	<i>137.139.050.331,00</i>	<i>141.854.155.395,00</i>	<i>98.897.786.024,00</i>	<i>85.827.161.081,00</i>	<i>85.827.161.081,00</i>
4.2.02.02	<i>Bantuan Keuangan</i>	<i>75.185.675.009,00</i>	<i>124.140.472.880,00</i>			
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: LRA Tahun 2023-2025, APBD Tahun 2026, RPJMD Tahun 2025-2029, data diolah tahun 2026



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Tabel 3.12.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2023 – 2027

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	APBD 2026	Target 2027
5	BELANJA DAERAH	1.716.186.584.365,88	1.790.597.242.391,64	1.691.510.255.999,42	1.525.903.391.396,00	1.501.834.349.572,27
5.1	BELANJA OPERASI	1.574.042.659.011,88	1.635.468.452.199,64	1.606.202.045.524,03	1.453.433.764.314,96	1.443.685.828.037,27
5.1.01	Belanja Pegawai	778.692.539.495,00	796.214.695.004,00	811.183.941.185,00	748.603.253.063,00	724.088.574.882,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.956.600.470,00	739.471.162.696,00	722.027.460.534,72	630.173.351.251,96	649.152.213.155,27
5.1.03	Belanja Bunga	113.122.048,88	287.869.906,64	280.824.285,31	500.000.000,00	500.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	512.325.000,00	370.000.000,00	180.000.000,00	411.450.000,00	450.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	88.968.071.998,00	97.664.724.593,00	71.009.819.519,00	72.445.710.000,00	65.255.040.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.800.000.000,00	1.460.000.000,00	1.520.000.000,00	1.300.000.000,00	4.240.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	137.927.625.828,00	152.907.959.308,00	84.005.895.318,39	53.636.844.279,04	51.263.767.181,00
5.2.01	Belanja Tanah	1.621.454.876,00	3.847.895.080,00	2.813.728.327,00	623.000.000,00	7.525.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.575.727.583,00	72.971.536.933,00	36.282.820.494,39	35.287.299.100,00	23.321.363.310,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.755.190.641,00	31.809.801.708,00	28.410.299.163,00	10.236.598.031,04	10.222.799.971,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.174.056.628,00	43.667.091.198,00	14.661.587.684,00	5.892.989.548,00	9.628.770.500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	801.196.100,00	566.171.110,00	1.770.624.550,00	1.596.957.600,00	565.833.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	45.463.279,00	66.835.100,00	0	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.216.299.526,00	2.220.830.884	1.302.315.157,00	18.832.782.802,00	6.884.754.354,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.216.299.526,00	2.220.830.884	1.302.315.157,00	18.832.782.802,00	6.884.754.354,00

Sumber: LRA Tahun 2023-2025, APBD Tahun 2026, RPJMD Tahun 2025-2029, data diolah tahun 2026



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH **KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027**

Tabel 3.13.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2023 – 2027

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	APBD 2026	Target 2027
	SURPLUS/DEFISIT	-17.410.441.229,24	1.899.000.080,42	17.414.995.429,95	-50.784.763.610,00	-18.026.523.325,27
		-1,01	0,11	1,03	-3,33	-1,21
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	29.753.908.942,07	18.206.326.669,70	14.592.750.142,05	72.284.763.610,00	18.026.523.325,27
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	48.729.670.617,07	29.097.595.804,70	38.535.768.338,05	52.284.763.610,00	39.526.523.325,27
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.502.803.290,07	12.343.467.712,70	20.107.618.338,05	52.284.763.610,00	19.526.523.325,27
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	18.676.776.100,00	1.831.404.624,00	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	7.475.761.675,00	14.914.287.331,00	18.420.000.000,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	74.329.552,00	8.436.137,00	8.500.000,00	0	0
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	0	0	0	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.975.761.675,00	10.891.269.135,00	23.943.018.196,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.475.761.675,00	10.891.269.135,00	22.443.018.196,00	0	0



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	APBD 2026	Target 2027
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	0	0	0	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	12.343.467.712,83	20.105.326.750,12	32.007.745.572,00	0	0

Sumber: LRA Tahun 2023-2025, APBD Tahun 2026, RPJMD Tahun 2025-2029, data diolah tahun 2026



Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi APBD tersebut diantaranya:

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
 - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi hasil dari pendataan dan pemeriksaan lapangan;
 - b. Adanya peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. Opsen pajak TNKB dan BBNKB sama dengan tahun sebelumnya;
 - d. Tren pertumbuhan ekonomi yang positif tiap tahunnya di kota Tasikmalaya.
2. Diasumsikan dana transfer sama dengan tahun sebelumnya.

B. Belanja Daerah

1. Pemenuhan belanja *mandatory spending*, alokasi anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBD;
2. Pemenuhan belanja pegawai sebesar 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru dilaksanakan secara bertahap dan dimungkinkan pertumbuhan pegawai tidak ada penambahan (*zero growth*);
3. Besaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit sebesar 40% dari APBD secara bertahap;
4. Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat untuk mendanai program prioritas daerah;
6. Pemenuhan belanja yang bersumber dari DAU ditentukan;
7. Dukungan terhadap program prioritas nasional dan provinsi;
8. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

C. Pembiayaan Daerah

1. Penganggaran defisit sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Proyeksi penerimaan SiLPA;
3. Penambahan penyertaan modal untuk PT. BPRS Al-Madinah;
4. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh BLUD.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

- 1) Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta POLRI dan Kejaksaan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Optimalisasi pemanfaatan aset dan keuangan daerah;
- 7) Memperkuat promosi investasi guna mendorong investasi swasta yang berkelanjutan;
- 8) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional, serta pengembangan



sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Transfer;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:
 1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 2. Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
 4. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 5. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, digitalisasi layanan dan kerjasama dengan pihak perbankan;
 6. Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
 7. Mendorong pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) secara profesional serta peningkatan sarana/prasarana;
 8. Optimalisasi pemanfaatan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 9. Pemutakhiran data objek pajak;
 10. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
 11. Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.
- b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:
 1. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya;
 2. Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
 3. Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

- c. Strategi pencapaian target Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi, dapat ditempuh melalui:
 1. Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrologi dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan Bantuan Keuangan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Pemenuhan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran belanja pegawai dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang ketentraman dan ketertiban umum dan bidang sosial;
4. Pemenuhan alokasi anggaran *Mandatory Spending* untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Penganggaran belanja kegiatan dan program prioritas secara proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas melalui pendekatan *Money Follow Programs dan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial* (THIS) untuk mendukung capaian target kinerja utama RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
6. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
7. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada:

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;
3. Pengelolaan hutang terutama untuk menjaga arus kas pada BLUD;

Adapun rencana penggunaan SiLPA yang berasal dari SiLPA *earmarked* (DAK, DBHCHT, DBH dan BLUD) akan dialokasikan untuk program/kegiatan yang sesuai dengan pedoman penggunaannya sedangkan yang berasal dari SiLPA *non-earmarked* akan digunakan untuk menutup defisit.

3.2.4. Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah Lainnya

1. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) / *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sumber alternatif pendanaan lain yang dapat digunakan dalam membiayai pembangunan daerah adalah pelibatan pihak swasta melalui penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membentuk regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Kota Tasikmalaya. Selain itu, telah dibentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kota Tasikmalaya sesuai Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 978.5/Kep.66/Bappeda/2015.

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut:

- a) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- c) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- d) Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- e) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
- f) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
- g) Sarana dan prasarana keagamaan; dan
- h) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka terus mendorong minat pihak swasta untuk berkerjasama dalam pembangunan daerah melalui Program TJSL dan PKBL dilakukan melalui upaya-upaya:

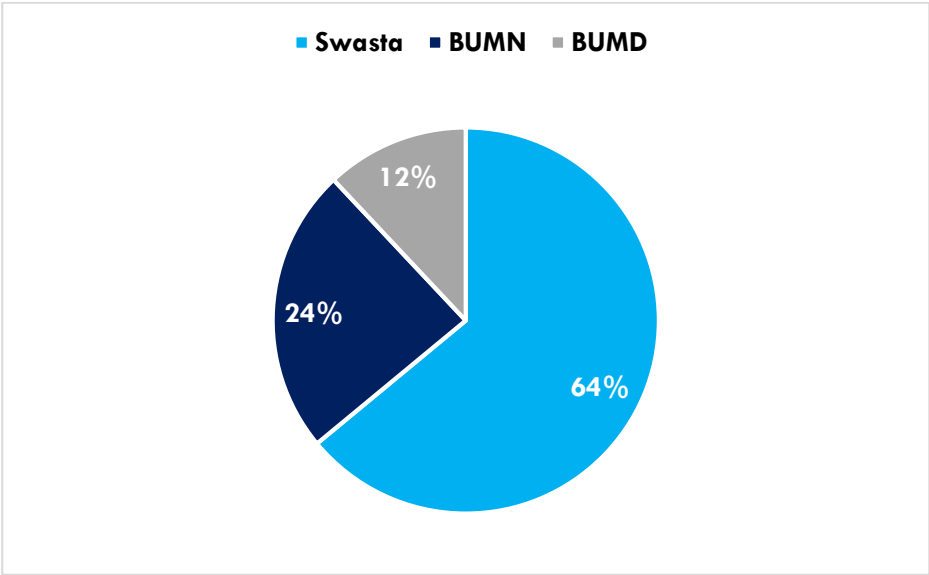
- a) Sosialisasi program Program TJSL dan PKBL kepada pihak swasta dan perusahaan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya;
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinergi program pembangunan dengan perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya;



- c) Memberikan penghargaan bagi pihak swasta dan perusahaan yang telah berkerjasama dan melaksanakan program Program TJSL dan PKBL;
- d) Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi Program TJSL dan PKBL dalam meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan.

Pada Tahun 2025, tercatat 25 mitra PKBL dan TJSL di Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 16 perusahaan swasta, 6 BUMN, dan 3 BUMD. Proporsi mitra PKBL dan TJSL di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.1.
Proporsi Mitra PKBL dan TJSL di Kota Tasikmalaya Tahun 2025



Sumber: Sekretariat Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kota Tasikmalaya

Terdapat 297 kegiatan di Kota Tasikmalaya yang didanai oleh TJSL dan PKBL pada Tahun 2025, kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa bidang sesuai gambar berikut ini.

Gambar 3.2.
Jumlah Kegiatan TJSL dan PKBL Kota Tasikmalaya Tahun 2025



Sumber: Sekretariat Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kota Tasikmalaya



Berdasarkan Gambar di atas, kegiatan pada Bidang Sosial dan Keagamaan memiliki proporsi kegiatan paling banyak dibandingkan dengan Bidang lainnya, hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan TJSL dan PKBL di Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 masih didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dukungan sosial dan keagamaan.

2. Pemanfaatan Dana Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya adalah melalui dana umat. Pemanfaatan dana umat yang dihimpun oleh lembaga-lembaga keuangan non pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya, yayasan dan lembaga lainnya untuk mendukung pembangunan melalui cara mensinergikan sasaran program lembaga tersebut dengan sasaran pembangunan kota. Melalui kolaborasi yang terintegrasi, dana umat ini diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi produktif, peningkatan kualitas Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, hingga pembangunan infrastruktur dasar berskala mikro yang belum terakomodasi sepenuhnya oleh APBD, sehingga diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat Kota Tasikmalaya secara lebih luas.

3. Kerja sama dengan pihak ketiga

Pendanaan pembangunan dengan pihak ketiga (KSP/KPBU) adalah solusi kreatif mengatasi keterbatasan anggaran daerah (APBD/APBN) dengan melibatkan sektor swasta, BUMN/D atau koperasi untuk mendanai infrastruktur. Skema ini mencakup obligasi daerah, kerja sama pemanfaatan aset serta skema pendanaan berkelanjutan melalui lembaga seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Penjaminan Investasi Infrastruktur (PII) dan Pinjaman Investasi Aset (PIA).

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2027 merupakan pelaksanaan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih periode 2025-2030. Penyusunan Rencana Kerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan RKPD tahun 2027 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027.

Gambar 4.1.
Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027



Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 dilaksanakan melalui integrasi yang kuat antara empat pendekatan perencanaan berbasis **THIS**, yaitu **Tematik**, **Holistik**, **Integratif**, **Spasial**. Dokumen ini dirumuskan secara Teknokratik menggunakan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran secara terukur, sekaligus bersifat Partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menyerap aspirasi publik. Di saat yang sama, dimensi Politik berjalan untuk menerjemahkan Visi-Misi Kepala Daerah terpilih bersama DPRD, yang diselaraskan melalui pendekatan Atas Bawah – Bawah Atas guna menyatukan masukan dari tingkat kelurahan hingga amanat dari Prioritas Nasional. Pembangunan dirancang secara **Tematik** agar sesuai dengan isu strategis dan tema pembangunan yang prioritas, serta dikelola secara **Holistik** demi menyelesaikan permasalahan kota secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir. Melalui keterkaitan prinsip Tematik dan Holistik ini,

perencanaan memperhatikan pertimbangan seluruh unsur pembangunan sebagai satu kesatuan potensi, tantangan, hambatan, dan permasalahan yang saling berkaitan. Program kerja tersebut dikunci dengan prinsip **Integratif** yang menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu demi fokus yang jelas, serta prinsip **Spasial** yang mempertimbangkan dimensi keruangan dan aspek geografis dalam perencanaan, sehingga seluruh target pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2027 dapat dicapai secara efektif dan tepat sasaran.

Pembangunan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2027 diimplementasikan dengan: (1) menerapkan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, diantaranya target indikator makro pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2025, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan stunting, serta penyelesaian isu strategis dan kewilayahan; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan daerah (APBD), CSR, dana masyarakat/umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta (4) melibatkan secara aktif pemangku kepentingan di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Rumusan perencanaan pembangunan Tahun 2027 disajikan dalam bentuk kerangka pikir perencanaan pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027, seperti terlihat pada Gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2.
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2027



Sumber: Hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan melalui program prioritas daerah dan program pembangunan daerah



menjadi acuan rencana kerja dan pendanaan daerah Kota Tasikmalaya serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2027.

Perencanaan pembangunan Kota Tasikmalaya pada tahun 2027 diimplementasikan dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, dengan 5 (lima) tujuan, dan 13 (tiga belas) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2027 mengacu pada (1) Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029, (2) hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, (3) Rencana Tata Ruang Wilayah, (4) capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029, (5) Prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2027, (6) Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, (7) identifikasi permasalahan pembangunan dan mempertimbangkan rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis, yang akan dijadikan sebagai salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2027, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Untuk meningkatkan capaian indikator makro pembangunan daerah, sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi nasional, maka konsentrasi prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2027 berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik. Demikian juga untuk mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, pada tahun 2027 peningkatan pertumbuhan ekonomi akan dikonsentrasikan pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan kualitas dan produksi industri, penguatan koperasi, usaha mikro dan IKM, dan fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, serta peningkatan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perizinan dalam rangka mendukung penciptaan lapangan kerja.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi



pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

RPJPN Tahun 2025–2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan RPJPN Tahun 2025 – 2045 dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan sebagai berikut:

1. Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi
2. Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi
3. Tahap 3 (2035-2039) Ekspansi Global
4. Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas.

Dalam upaya mendukung mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN tahap I Tahun 2025-2029, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran utama pembangunan nasional, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; peningkatan daya saing sumber daya manusia; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission*.

RPJMN 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Rencana pembangunan nasional Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi, sebagai berikut:

1. Transformasi sosial (pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial);
2. Transformasi ekonomi (Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja);
3. Transformasi Tata Kelola (Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil);
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia (Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi);
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan).

Visi RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Prioritas nasional tersebut yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;



4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMN Tahun 2025-2029. Tahun 2027 menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis. Faktor produktivitas, investasi, dan industri dipandang sebagai tiga pilar utama yang paling menentukan dalam mendorong akselerasi pertumbuhan berkualitas. Oleh karena itu, ditetapkan tema RKP Tahun 2027, yaitu **Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri**. Tema ini merupakan kelanjutan dari transisi pembangunan yang dimulai pada RKP 2026 yang berfokus pada ketahanan pangan, energi, dan ekonomi produktif. Tema ini mencerminkan upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan RKP Tahun 2027, prioritas pembangunan kewilayahan difokuskan pada:

- 1) Pembangunan perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi;
- 2) Pembangunan kota terpadu;
- 3) Pembangunan wilayah kepulauan;
- 4) Pemulihan wilayah pascabencana; serta
- 5) Pembangunan Papua.

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai pendekatan inovatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat, serta untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola untuk mencapai tujuan global, pengarusutamaan tersebut meliputi (1) Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, (2) *Sustainable Development Goals* (SDG), (3) Transformasi Digital, (4) Pembangunan Rendah Karbon, dan (5) Pembangunan Berketahanan Iklim.

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional tahun 2027 dan sebagai strategi pengembangan wilayah di Jawa Barat, dilaksanakan intervensi kewilayahan untuk beberapa lokasi prioritas di Jawa Barat serta dilaksanakan Program Direktif Presiden yang meliputi:

1. Pemberian Makanan Bergizi Gratis;
2. Revitalisasi Sekolah;
3. Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas;
4. Cek Kesehatan Gratis;
5. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir;
7. Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif dan Kartu Kesejahteraan.



Dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, pemerintah mengagendakan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat mendorong produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional. Salah satu Proyek Strategis Nasional di Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional adalah Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya – Cilacap. Selanjutnya pada RKP tahun 2026, pemerintah telah mengagendakan Kota Tasikmalaya sebagai salah satu wilayah yang mendapatkan intervensi di Kawasan Perkotaan Tasikmalaya meliputi:

1. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya (PHTC);
2. Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya;
3. Pembangunan jalur ganda KA Lintas Bandung-Cicalengka–Tasikmalaya–Kroya;
4. Pembangunan TPST Regional Tasikmalaya–Ciamis;
5. Pengembangan Kota Agropolitan Tasikmalaya.

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode tahun 2025-2030 yaitu “JABAR ISTIMEWA, Lembur diurus, Kota ditata”, dengan Misi:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan, Pedesaan serta Miskin dan Kaya;
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang *cageur, bageur, bener, pinter, dan singer*, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - b) Terbentuknya Individu bertaqwa, beretika dan berbudaya;
 - c) Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
 - d) Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan;
 - e) Terbentuknya individu kreatif dan cekatan.
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi berbasis sumber daya lokal dan teknologi, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing;
 - b) Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas;
 - c) Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan petani/nelayan;
 - d) Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja serta aktivitas usaha ekonomi kerakyatan dan tenaga kerja kompeten;
 - e) Terkendalinya stabilitas ekonomi makro; dan



- f) Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
- 3. Terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial dan ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya layanan infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan sekitar kawasan konservasi serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan; dan
 - b) Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.
- 4.1. Terwujudnya masyarakat mandiri dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya penerapan Iptek, riset dan inovasi dalam pembangunan;
 - b) Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan.
- 4.2. Terwujudnya birokrasi yang gesit dan berorientasi pelayanan, dengan sasaran meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2027 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan tahun 2025 yang menghasilkan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2027 sebagai berikut:

1. Daya saing sumber daya manusia berkarakter Pancawaluya, didukung dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata;
2. Pertumbuhan ekonomi inklusif, melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan penguatan kapasitas fiskal daerah;
3. Pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas, serta lingkungan yang asri dan lestari;
4. Tata kelola Pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah, serta integrasi data dan sinergitas pembangunan.

Adapun tema pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2027 yaitu **“Pengembangan Produktivitas Perekonomian Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pembangunan”**. Adapun pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 berfokus terhadap pengembangan produktivitas melalui produksi pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta industri yang didukung oleh SDM manajemen pembangunan yang berkualitas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penuntasan pembangunan infrastruktur jalan sebagai penghubung konektivitas wilayah demi tercapainya perluasan lapangan pekerjaan;
2. Pembangunan infrastruktur pendidikan (Ruang Kelas Baru / Unit Sekolah Baru) sebagai upaya perluasan akses pendidikan untuk meningkatkan kompetensi SDM Jawa Barat;
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan pada masyarakat;
4. Rehabilitasi kawasan hutan dengan reboisasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup Jawa Barat;
5. Penciptaan, perluasan, dan pengembangan lapangan kerja dan usaha baru, serta iklim usaha yang kondusif;
6. Penguatan kapasitas fiskal Daerah melalui tata Kelola Pajak Daerah, BUMD, dan Optimalisasi aset serta kerjasama Daerah, sebagai penguatan pondasi ekonomi;
7. Penguatan data pembangunan menggunakan Data Tunggal, baik sosial ekonomi, sektoral, maupun indikator kinerja pembangunan didukung pemutakhiran data yang konsisten; dan
8. Optimalisasi program Pemerintah Pusat didukung kolaborasi dan sinergitas Daerah.



4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2027 merupakan RKPD tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2025-2029. Visi yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Tasikmalaya Sebagai Kota Industri, Jasa dan Perdagangan Yang Religius, Inovatif, Maju Dan Berkelanjutan”

Visi tersebut mengandung makna:

Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa dan Perdagangan	>	Tasikmalaya yang perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh sektor industri kecil dan menengah, jasa dan perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan dan pertanian.
Religius	>	Masyarakat Kota Tasikmalaya terkondisikan secara psikologis dan sosiologis, dengan dasar nilai keagamaan, moral, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan dalam pembangunan secara fisik yang terintegrasi dengan pembangunan kesehatan mental dan ketangguhan karakter.
Inovatif	>	Masyarakat Kota Tasikmalaya yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan orisinal, yang mencakup berbagai aspek meliputi produk, layanan, proses, atau metode kerja yang berbeda dari yang telah ada dari sebelumnya dan memberikan nilai tambah, berpikir di luar kebiasaan, menemukan solusi kreatif untuk memecahkan masalah dan terus mencari cara untuk meningkatkan sesuatu.
Maju	>	Kota Tasikmalaya yang berdaya, modern, tangguh, dan adil dalam aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, maupun kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, serta mampu bersaing dalam aspek- aspek tersebut dalam wilayah yang lebih luas dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya.
Berkelanjutan	>	Kota Tasikmalaya memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, serta memanfaatkan sumber daya dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, keseimbangan ekonomi, sosial, dan budaya secara bijak.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa dan Perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan dan pertanian dengan kondisi masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, moral, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari yang inovatif, berdaya saing, modern, tangguh, adil dan seimbang dalam aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, politik, sosial dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Misi ke-1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan sosial yang religius, menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang luhur.

Misi ke-2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian daerah Kota Tasikmalaya yang berkeadilan, kuat, berdaya saing, memperhatikan nilai-nilai religius dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan serapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing daerah di tingkat regional, nasional, dan global. Pembangunan ekonomi berbasis pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditunjang oleh lembaga koperasi, penerapan ekonomi syariah, peningkatan investasi daerah dan kerja sama serta kolaborasi dengan sektor swasta. Selain itu, dilakukan upaya mendorong kewirausahaan lokal untuk memantapkan posisi Kota Tasikmalaya sebagai pusat pertumbuhan di Kawasan Priangan Timur dengan berbasis pada industri, jasa dan perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan dan pertanian.

Misi ke-3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berkomitmen pada penegakan hukum, kesetaraan dan responsif yang ditunjang oleh peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur yang profesional, adaptif dan inovatif, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta didukung oleh sarana prasarana pemerintahan yang representatif dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang terintegrasi.

Misi ke-4 : Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur daerah di Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dasar perkotaan antara lain penyediaan air bersih dan drainase, sanitasi dan pengelolaan limbah, dan perumahan. Selain itu pembangunan infrastruktur daerah juga dilaksanakan pada infrastruktur publik perkotaan yang meliputi penyediaan jalan, jembatan, energi dan kelistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur tersebut tersebar secara merata, representatif, aman, nyaman, ramah lingkungan, ramah bagi kelompok rentan (anak, disabilitas, dan lansia), serta mampu menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi terutama pada sentra-sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, dan pertanian.

Misi ke-5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Misi ini menjelaskan bahwa pembangunan Kota Tasikmalaya mengutamakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara bijak, dengan memperhatikan rencana tata ruang



untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Dari ke lima misi tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Misi ke-1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya.

Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya, dengan sasaran:

Sasaran 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

Sasaran 2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata;

Sasaran 3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;

Sasaran 4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya;

Sasaran 5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi ke-2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan

Tujuan 2: Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan, dengan sasaran:

Sasaran 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing;

Sasaran 7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Sasaran 8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja.

Misi ke-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif, dengan sasaran:

Sasaran 9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih.

Sasaran 10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik.

Misi ke-4: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata

Tujuan 4: Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata, dan inklusif, dengan sasaran:

Sasaran 11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif.

Misi ke-5: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Tujuan 5: Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran:

Sasaran 12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran 13. Menurunnya Risiko Bencana Daerah dan Perubahan iklim



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
					2025	2026 ⁽¹⁾	2027
Misi ke-1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya							
1	T1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya		IT.1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,59	76,99	77,17
		S1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	IS.1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,59	76,99	77,17
			IS.2. Umur Harapan Hidup	Tahun	75,66	75,63	75,81
			IS.3. Prevalensi Stunting	%	N/A	17,02	15,73
			IS.4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	102,3	100,00	100,00
		S2. Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	IS.5. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,64	9,79	9,87
			IS.6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,51	13,56	13,60
		S3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	IS.7. Tingkat Kemiskinan	%	10,84	9,47	7,52-8,27
		S4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	IS.8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	98,21	97,84	98,25
			IS.9. Indeks Kerukunan Beragama	Poin	84,72	70,37	70,74
			IS.10. Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya	Poin	43,55	34,17	44,79
		S5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IS.11. Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	N/A	61,91	62,61
			IS.12. Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,203	0,284	0,249
			IS.13. Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	N/A	29,11	62,96



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
					2025	2026 ⁽¹⁾	2027
Misi ke-2: Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkeadilan Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan							
2	T2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan		IT.2. Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4,05	3,98	4,09
			IT.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,45	6,04 - 6,77
		S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing	IS.14. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,45	6,04 - 6,77
			IS.15. Indeks Gini	Poin	0,355	0,350	0,338 - 0,381
			IS.16. Inflasi	%	2,67	1,00-3,00	1,00-3,00
			IS.17. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	36,49	35,23	36,65
			IS.18. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	79,77	79,45	79,50
			IS.19. Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	35,46	36,84	37,54
		S7. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	IS.20. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	4,24	4,44	4,00
		S8. Meningkatnya investasi Daerah dan lapangan Kerja	IS.21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	30,28	32,85	32,92
			IS.22. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,43	6,34	5,76 - 6,20
Misi ke-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih							
3	T.3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif		IT.4. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	88,62	87,88	89,09
		S9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	IS.23. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	88,62	87,88	89,09
			IS24. Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	5,80	5,82	5,82



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
					2025	2026 ⁽¹⁾	2027
		S10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik	IS.25. Indeks Inovasi Daerah	Poin	52,57	51,00	54,00
Misi ke-4: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata							
4	T.4. Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif		IT.5. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	60,42	61,19	64,83
		S11. Meningkatnya Infrastruktur Daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	IS.26. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	60,42	61,19	64,83
Misi ke-5: Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan							
5	T5. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan		IT.6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	69,50	61,79	61,96
		S12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	69,50	61,79	61,96
		S13. Menurunnya Risiko bencana daerah dan Perubahan iklim	IS.28. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar	1,87	2,36	2,56
			IS.29. Indeks Risiko Bencana	Poin	90,78	90,10	86,58

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

Keterangan: 1) Target Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026



Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran pembangunan nasional. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya, fokus pembangunan tahun 2027 antara lain:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya;
2. Peningkatan Perekonomian Daerah;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur Daerah;
5. Peningkatan Pembangunan yang berkelanjutan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

4.2.1. Telaahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027, ditetapkan prioritas nasional (Asta Cita) sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1, Memperkokoh ideologi pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dengan sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Prioritas Nasional 2, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan sasaran:
 - a. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan.
 - b. Terbangunnya *Eco-region* Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal.
 - c. Meningkatnya Ketahanan Energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih.
 - d. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi.
 - e. Terwujudnya pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
 - f. Meningkatnya indeks ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - g. Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.
3. Prioritas Nasional 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.



- b. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB.
 - c. Meningkatnya nilai tambah pariwisata.
 - d. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas.
 - e. Terwujudnya pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
4. Prioritas Nasional 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan sasaran:
- a. Pendidikan berkualitas yang merata.
 - b. Kesehatan untuk semua.
 - c. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.
 - d. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi.
 - e. Peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga.
5. Prioritas Nasional 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan.
 - b. Menguatnya kinerja layanan konektivitas backbone dan sistem logistik nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global.
 - c. Integrasi ekonomi domestik dan global.
6. Prioritas Nasional 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan sasaran:
- a. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan.
 - b. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
 - c. Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - d. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
7. Prioritas Nasional 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan sasaran:
- a. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
 - b. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani.
 - c. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - d. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan.
 - e. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan.
 - f. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi.
 - g. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
8. Prioritas Nasional 8, Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan sasaran:
- a. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
 - b. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Guna mewujudkan tema RKP Tahun 2027, Prioritas Nasional (Asta Cita) kemudian dijabarkan ke dalam tiga subtema utama (Produktivitas, Investasi, dan



Industri), yang dilaksanakan melalui 11 (sebelas) Fokus Pembangunan (FP) sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan ketajaman arah kebijakan dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Dalam rangka memastikan sebelas FP dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang lebih konkret, RKP Tahun 2027 menjabarkannya lebih lanjut ke dalam delapan klaster **Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)**. Penjabaran daftar program PKPN, keterpaduan program dengan PN, serta strategi pembiayaan program secara lebih detail dijabarkan dalam Buku I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKP Tahun 2027. Penajaman prioritas pembangunan melalui intervensi kebijakan strategis bertujuan untuk menjawab ketercapaian Trisula Pembangunan. Melalui klaster PKPN, intervensi pembangunan lintas sektor diarahkan agar lebih terintegrasi, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan tahunan. Dalam RKP Tahun 2027, PKPN terhimpun dalam 8 (delapan) klaster, yaitu:

- 1) kedaulatan pangan;
- 2) kemandirian energi dan air;
- 3) pendidikan;
- 4) kesehatan;
- 5) penurunan kemiskinan;
- 6) hilirisasi dan industrialisasi;
- 7) infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; serta
- 8) ekonomi kerakyatan dan desa.

Adapun delapan klaster tersebut didukung oleh penguatan aspek pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Gambar 4.3.
Keterkaitan Prioritas Nasional, Sub Tema, Fokus Pembangunan, dan Klaster PKPN
RKP Tahun 2027



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027, Kementerian PPN/Bappenas 2026.



Pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2027 diharapkan mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional yang disusun sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, sekaligus menjadi instrumen pengendalian agar arah kebijakan tetap selaras dengan target pembangunan jangka menengah. Sasaran pembangunan nasional disusun berlandaskan pada **Trisula Pembangunan**, yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027 beserta capaian tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

SASARAN DAN INDIKATOR	CAPAIAN 2025	TARGET 2027
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas		
 1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	5,9 – 7,5
 2. GNI Per Capita (US\$)	5.520	5.900 – 5.990
 3. a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	43,72 (2024)	39,57
 b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,53 (2024)	76,84
Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan		
 4. Tingkat Kemiskinan (%)	8,25	6,0 – 6,5
 5. Tingkat Kemiskinan Ekstreem (%)	0,85	0,0
 6. Rasio Gini	0,375	0,362 – 0,367
 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,85	4,30 – 4,87
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
 8. Indeks Modal Manusia	0,56	0,575
INDIKATOR PEMBANGUNAN		
 9. Indeks Kesejahteraan Petani	0,6930	0,8038
 10. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	0,8038	40,81

Sumber: Rancangan RKP 2027, Kementerian PPN/ Bappenas 2026.

Selain indikator utama tersebut, sasaran pembangunan juga diperkuat dengan indikator pendukung yang mencerminkan kinerja sektor-sektor strategis, antara lain indeks kesejahteraan petani dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal. Indikator tersebut penting untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi yang didorong melalui produktivitas, investasi, dan industrialisasi juga diikuti dengan peningkatan



kesejahteraan pelaku ekonomi di sektor riil serta penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

Secara keseluruhan, sasaran pembangunan RKP Tahun 2027 dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Trisula Pembangunan. Dengan keterkaitan yang kuat antara sasaran, indikator, dan intervensi kebijakan, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

4.2.2. Telaahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 4 (empat) prioritas pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembanguna daerah yang ditetapkan pada tahun 2027 merupakan prioritas pembangunan yang tertuang pada rancangan akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan, rancangan akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan serta memuat pokok-pokok pikiran DPRD untuk tahun 2027.

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2027 meliputi:

- 1. Prioritas 1, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
- 2. Prioritas 2, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif;
- 3. Prioritas 3, Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
- 4. Prioritas 4, Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Keempat prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dijabarkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Prioritas, sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2027 dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Prioritas, Sasaran Pembangunan, dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Realisasi	Target
			2025	2027
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,16	75,84
		Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,90	13,65
	Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,67	74,39
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,5 (2023)	57,78



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Realisasi	Target	
			2025	2027	
	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	N/A	57,98	
		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	50,26	
		Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	N/A	3,14	
	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	9,24	9,61	
		Harapan Lama Sekolah	12,80	13,03	
	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	61,1	65,41	
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	66,44	71,29	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458	0,448	
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,51	73,87	
	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Rasio PDRB Industri Pengolahan	41,39	41,15 – 41,35
Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing		Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	4,85	6,44	
Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan		Prevalence of Undernourishment (PoU)	5,99	4,23	
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,59	2,27 – 4,52	
		Nilai Tukar Petani (NTP)	112,17	115 - 121	
Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten		Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,7	24,96 – 25,24	
		Rasio Kewirausahaan Daerah	3,05	3,34	
Terkendalinya stabilitas ekonomi makro		Tingkat Inflasi	1,64	1,5 – 3,5	
		Inklusi Keuangan	N/A	95,18	
		Kapasitas Fiskal Daerah	2,142	1,5	
		Total Kredit/PDRB	N/A	26,55	
Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	N/A	22,36	
		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	3,07	3,28 – 3,65	
Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan		Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan	Indeks Kualitas Infrastruktur	76,06	67,53
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	56,25	59,26
	Indeks Desa		77,11	80	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		66,02	64,56	
	Indek Ketahanan Air		N/A	3,35	



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Realisasi	Target
			2025	2027
Kaya	Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK		
		a. Kumulatif	N/A	3,35
		b. Tahunan	N/A	12,46
		Indeks Risiko Bencana	114,15	107,44
	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,08	4,78 – 5,44
		Indeks Kesejahteraan Sosial	56,88	58,5
Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	81,27	81,3
	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Indeks Demokrasi Provinsi	82,8	89,02
	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)	86,44	86,5

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat.

4.2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. RTRW ini harus menjadi acuan dan sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : *Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priangan Timur - Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kreatif termaju di Jawa Barat. Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft).*

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (*Handycraft*). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan (R&D). Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (*Handycraft*). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
- b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- e. pelestarian kawasan cagar budaya;
- f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota;
- g. pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- h. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien
- i. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
- j. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup
- k. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- l. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

3. Strategi Penataan Ruang Wilayah

Kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

1. Kebijakan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; dan
 - b. mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala regional.
2. Kebijakan peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan;
 - b. mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) dan jalan lingkar luar (outer ring road);
 - c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan;
 - d. mengembangkan sistem transportasi massal;
 - e. meningkatkan fungsi terminal angkutan umum; dan
 - f. meningkatkan integrasi sistem antar moda transportasi.
3. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 - b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - d. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik- teknik yang berwawasan lingkungan;
 - e. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - f. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
4. Kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. menetapkan kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun; dan
 - c. meningkatkan konservasi kawasan yang berfungsi lindung.
5. Kebijakan pelestarian kawasan cagar dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai kawasan cagar budaya; dan
 - b. memelihara kelestarian kawasan cagar budaya
6. Kebijakan penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut::
 - a. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang telah ada;
 - b. menetapkan persyaratan penyediaan RTH pada setiap fungsi kegiatan;
 - c. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; dan
 - d. mengembangkan pola-pola kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.
7. Kebijakan pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan pinggiran pusat kota; dan



- b. mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota.
- 8. Kebijakan pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
 - b. menerapkan insentif dan disinsentif.

4. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis dalam dokumen RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031 adalah kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan yang meliputi:

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup;
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
- 4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan keamanan negara

Kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kota Tasikmalaya meliputi:

- (1) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a) menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa skala regional
 - b) pengembangan kawasan industri dan pergudangan skala regional
 - c) pengembangan sentra bisnis baru
 - d) pengembangan dan penataan sentra-sentra produksi pertanian dan industri kecil dan menengah. Antara lain yaitu pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, Kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari.
- (2) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a) mengatur pemanfaatan kawasan konservasi dengan memadukan perlindungan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan, yaitu di Kawasan Situ Gede; dan
 - b) mengintegrasikan fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan fungsi-fungsi lainnya tanpa mengganggu fungsi utama kawasan, yaitu di Kawasan Wisata Alam Urug.
- (3) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a) menetapkan kawasan strategis pendidikan; dan
 - b) mengintegrasikan kegiatan sosial budaya dengan fungsifungsi penunjangnya dan/atau fungsi-fungsi lain yang terkait.
- (4) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a) menata kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b) mengoptimalkan fungsi kawasan dengan mengintegrasikan fungsi pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi komersial tanpa mengganggu fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara, yaitu di kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

5. Indikasi Program Utama RTRW Kota Tasikmalaya

Indikasi Program Utama RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, pada Tahap III (2021-2025) adalah sebagai berikut:

A. Perwujudan Struktur Ruang

- 1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota



- 1.1. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Priatim-Pangandaran (PKW)
 - a. Pengembangan Pasar Induk Cikurubuk sebagai Pasar Induk Komoditi Regional.
 - b. Pengembangan TPPAS Ciangir.
- 1.2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)
 - a. Pengembangan Pusat pelayanan pemerintahan Kota Tasikmalaya.
 - b. Pengembangan Pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa.
- 1.3. Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPK), Penyediaan Sarana Pelayanan
- 1.4. Pengembangan Pusat Lingkungan (PL), Penyediaan Sarana Pelayanan
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota
 - 2.1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Di Wilayah Kota
 - 2.1.1. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Raya
 - a. Pembangunan jaringan jalan arteri sekunder
 - b. Peningkatan jaringan jalan kolektor
 - c. Pembangunan jaringan jalan kolektor
 - d. Pengembangan Flyover atau Interchange, dan atau Underpass
 - e. Peningkatan Ruas Jalan Ibukota Kecamatan
 - f. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
 - g. Pengembangan Sistem Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan (Off Street)
 - h. Pembangunan Halte/ Shelter
 - i. Pembangunan Jembatan Penyebrangan
 - 2.1.2. Pengembangan Angkutan Umum
 - a. Pengembangan Angkutan Umum Trayek
 - b. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
 - 2.2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
 - a. Pengembangan BTS Terpadu
 - b. Pengembangan Sistem Informasi
 - c. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tasikmalaya
 - d. Penyediaan Database Kota Tasikmalaya
 - e. Pembentukan dan Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat
 - f. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Tasikmalaya
 - g. Pembinaan Pengelolaan Website OPD
 - h. Penyediaan Akses Internet di Ruang Publik
 - 2.3. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - 2.3.1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya
 - b. Peningkatan Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya
 - 2.3.2. Program Penanggulangan Banjir
 - a. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cikalang-Cidongkol
 - b. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cicantel
 - c. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir Irigasi Bengkok - S. Closeh
 - d. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cihideung- S. Ciromban
 - e. Penanggulangan Sungai Kota Tasikmalaya



2.4. Rencana Sistem Infrastruktur

2.4.1. Sistem Penyediaan Air Minum

- a. Pengembangan pelayanan air minum
- b. Perlindungan dan pemanfaatan mata air

2.4.2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah

- a. Pembuatan Tangki Septik Komunal/ SANIMAS
- b. Rehabilitasi IPLT
- c. Pembuatan IPAL
- d. Pemasangan perpipaan SPAL
- e. Pengembangan Kawasan Permukiman
- f. Pengembangan IPAL industri di Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan

2.4.3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

- a. Pengadaan Pewadahan Sampah
- b. Pengadaan Alat Transportasi dan Kendaraan operasional
- c. Koordinasi Penilaian Kota/Adipura
- d. Pemeliharaan TPS Mini, Bak Sampah, Transfer depo, Container, Roda Sampah
- e. Pengadaan Pakaian Kerja

2.4.4. Sistem Jaringan Drainase

- a. Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder (drainase pengumpul) pada setiap sisi jalan utama dengan menggunakan lapis perkerasan (lining)
- b. Pembuatan sistem saluran drainase tersier
- c. Lanjutan Pembuatan Trotoar dan drainase
- d. Pemeliharaan Trotoar dan drainase Kota Tasikmalaya

2.4.5. Pengembangan Sistem Evakuasi Bencana

- a. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
- b. Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

B. Perwujudan Pola Ruang

1. Perwujudan Kawasan Lindung

a. Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat

- i. Pengembangan Sempadan Sungai
 - a. Rehabilitasi reboisasi dan konservasi kawasan sempadan sungai
 - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan sungai
- ii. Pengembangan Sempadan Danau
 - a. Rehabilitasi, reboisasi dan konservasi kawasan sempadan danau
 - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan danau
- iii. Pengembangan Sempadan Mata Air
 - a. Rehabilitasi, reboisasi dan konservasi kawasan sempadan mata air
 - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan mata air

b. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

- i. Pengembangan RTH jalur Hijau Jalan
 - a. Rencana Jalan Lingkar Utara

c. Pengembangan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

2. Perwujudan Kawasan Budi Daya

a. Pengembangan kawasan permukiman

b. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa

- a). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Perumahan
- b). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Lingkungan/Kelurahan



- c). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Kecamatan
- d). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala SWK
- e). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Kota / Regional
- f). Pengembangan Pasar Induk Agribisnis
- c. Pengembangan Perkantoran
 - a). Bantuan Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung
 - b). Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Dinas Badan Lembaga Kantor (Dibaleka) Pemerintah Kota Tasikmalaya
- d. Pengembangan Industri, Penataan kawasan peruntukan industri dan pergudangan
- e. Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan wisata belanja
- f. Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - a). Pengembangan RTNH pada Sub-Kawasan
 - b). Pengembangan RTNH pada Wilayah Kota
 - c). Pengembangan RTNH pada Fungsi Tertentu
 - d). Pengembangan dan Penyediaan Lahan Parkir
- g. Pengembangan Ruang Peruntukan Sektor Informal, Pengawasan dan penertiban Ruang Peruntukan Sektor Informal
- h. Pengembangan Kawasan Pertanian
 - a). Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
 - b). Pengembangan pertanian tanaman pangan
 - c). Pengembangan kawasan pertanian hortikultura
 - d). Pengembangan kawasan perkebunan
 - e). Pengembangan Kawasan Perikanan
 - f). Pengembangan Kawasan Peternakan.

C. Perwujudan Kawasan Strategis

1. Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara yaitu dengan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Pangkalan Udara Wiriadinata dan Industri Dahana
2. Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi:
 - a). Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Terminal Peti Kemas
 - b). Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Sentra Bisnis Baru.

4.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tasikmalaya

Isu strategis pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2027 yang tercantum pada Bab II RKPD Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Kesejahteraan Sosial
2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkeadilan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
4. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata
5. Lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2027, maka perlu ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2027 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2027, mengacu pada strategi dan arah kebijakan pada rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2027 adalah sebagai berikut.



Tabel 4.4.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya			
T.1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya	S.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
			2. Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
			3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
			4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan
			5. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui deteksi dini/ <i>screening</i> , pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan agama
			6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan
	S.2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Transformasi Sistem Pendidikan	1. Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui pendidikan formal maupun non formal dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya
			2. Penguatan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren
			3. Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui pendidikan formal maupun non formal yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai
			4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
			5. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter
			6. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, serta literasi digital
	S.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1. Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marginal dan rentan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi
			3. Peningkatan Konvergensi/Intergrasi Program dan sinergi stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan
			4. Pengembangan sistem tata kelola basis data terpadu
	S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Peningkatan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, serta berasaskan kepada Pancasila
			2. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam kelestarian serta pemajuan budaya
			3. Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
			4. Peningkatan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa
	S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan ketahanan Keluarga, Pengarusutamaan gender, Perlindungan Anak dan peningkatan partisipasi aktif pemuda.	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
			2. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan; Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda dan olahraga
			4. Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan			
T.2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing	S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan	Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru	1. Pemberdayaan ekonomi usaha mikro dan industri kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan dan kewilayahan
			2. Penguatan proses bisnis Usaha mikro dan industri kecil melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi,



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
berbasis industri, jasa dan perdagangan	berdaya saing		kreasi, dan inkubator bisnis
			3. Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna
			4. Penataan dan penyiapan kelembagaan pembiayaan bagi pelaku usaha serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, koperasi dan asuransi
			5. Penguatan tata kelola perdagangan serta dukungan terhadap produk unggulan, pusat inkubasi bisnis, pemasaran terpadu, dan perlindungan konsumen
			6. Mendorong ekspor daerah melalui pengembangan komoditas unggulan yang potensial untuk ekspor dan membuka pasar luar negeri
			7. Penguatan infrastruktur distribusi perdagangan dan logistik
			8. Pengendalian perdagangan domestik dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			9. Pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan melalui e-commerce dan digital marketing
			10. Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi regional
			11. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri dan produk unggulan daerah
			12. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan
			13. Penyiapan infrastruktur industri dan pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang halal dan ramah lingkungan
			14. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, wisata olahraga (sport tourism) maupun wisata kultural secara kolaboratif



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan partisipatif
			15. Peningkatan implementasi perekonomian dan keuangan syariah
			16. Pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan
			17. Peningkatan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian
			18. Pengendalian inflasi daerah
			19. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global
			20. Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD
	S.7. Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan daerah	1. Penyediaan benih, pupuk, instrumen pengendali hama, obat, pakan, alat dan mesin pertanian yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan
			2. Pengembangan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudidaya guna meningkatkan produktivitasnya
			3. Penyediaan infrastruktur esensial yang terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, kualitas serta daya saing produk pertanian dan perikanan
			4. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan
			5. Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi Pangan regional
			6. Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan.
	S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja	Peningkatan penanaman modal serta perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan iklim investasi, kemudahan bekerja dan berusaha yang mempertimbangkan link and match Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
			2. Penyediaan database dan roadmap investasi, fasilitasi promosi investasi dan Kerjasama investasi berbasis digital



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> (<i>vocational</i>) 4. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
T.3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif	S.9. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
			2. Peningkatan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel
			3. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan berintegritas dalam upaya pencegahan korupsi; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment, serta kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
			4. Penataan dan peningkatan kualitas regulasi daerah
			5. Penguatan kelembagaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			6. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan nasional
			7. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan <i>blended finance</i>
			8. Peningkatan bangunan Gedung dan sarana pemerintahan
			9. Peningkatan kerja sama daerah, regional dan internasional
	S.10. Meningkatkan penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi dalam pelayanan publik	1. Peningkatan pelayanan publik berbasis ekosistem digital dalam rangka perwujudan smart city 2. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sektor pemerintahan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dalam pelayanan publik		3. Penataan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata			
T.4. Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	S.11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	Pemerataan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur	1. Peningkatan konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan RTRW Kota Tasikmalaya
			2. Peningkatan infrastruktur sumber daya air, meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kota
			3. Penyediaan drainase perkotaan yang terintegrasi
			4. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik
			5. Peningkatan elektrifikasi dan telekomunikasi
			6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur
		Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau	1. Penyediaan prasarana air minum meliputi: pembangunan SPAM perkotaan, rintisan pembentukan BUMD PDAM, pembangunan perlindungan dan pemanfaatan mata air
			2. Penyediaan prasarana air limbah meliputi: pembangunan SPAL, perluasan IPLT, penyediaan sarana dan prasarana IPLT, penyediaan sarana pengangkut lumpur tinja, perencanaan pengelolaan air limbah terjadwal
			3. Peningkatan prasarana limbah domestik, industri dan medis serta penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga
			4. Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, aman dan terjangkau masyarakat
			5. Penanganan kawasan kumuh
Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan			
T.5. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	S.12. Meningkatnya kualitas	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup
			2. Peningkatan pengelolaan sampah terpadu di hulu dan hilir berbasis teknologi yang ramah lingkungan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	lingkungan hidup		3. Transformasi pengelolaan persampahan meliputi: pembangunan prasarana persampahan, penyediaan sarana persampahan dan kerja sama pengelolaan persampahan
			4. Peningkatan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang
			5. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan mengutamakan pemanfaatan secara efisien dan ramah lingkungan
			6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
	S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan mitigasi bencana dan resilience terhadap iklim	1. Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim
			2. Pembangunan ekonomi hijau melalui pembangunan ekonomi yang rendah karbon, hemat energi dan berbasis pada energi terbarukan
			3. Peningkatan ketahanan air di Kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
			4. Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan diantaranya infrastruktur yang tahan iklim, resilience terhadap bencana, dan ramah lingkungan
			5. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim
			6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana

Sumber: Hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026



Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan kondisi dinamis yang terjadi, maka fokus pembangunan Kota Tasikmalaya atau Tema Pembangunan Tahun 2027 adalah:

**“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik
untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat”**

Untuk mencapai tema pembangunan tersebut, arah kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya diharapkan dapat mendukung pencapaian beberapa indikator makro pembangunan sebagai berikut:

A. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tasikmalaya, ditargetkan angka TPT Kota Tasikmalaya Tahun 2027 sebesar 5,76 - 6,2 persen. Realisasi pencapaian pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,43 persen. Angka ini merepresentasikan perbaikan yang berkelanjutan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana TPT tercatat 6,62 persen pada tahun 2022, 6,55 persen pada tahun 2023, dan 6,49 pada tahun 2024.

Tren penurunan TPT yang konsisten ini, beriringan dengan LPE yang positif, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dialami Kota Tasikmalaya semakin inklusif. Ini berarti ekspansi ekonomi berhasil menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja secara efektif, sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penurunan TPT menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya bersifat kapital-intensif, tetapi juga mampu menghasilkan peluang kerja yang memadai bagi angkatan kerja.

Arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2027, antara lain:

1. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM;
2. Penyediaan database dan roadmap investasi, fasilitasi promosi investasi dan Kerjasama investasi;
3. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling (vocational); dan
4. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya pada tahun 2027 ditargetkan dapat mencapai angka 6,04 - 6,77 persen. Pada tahun 2025, Kota Tasikmalaya mencatat LPE sebesar 5,39 persen. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang solid dan positif dalam aktivitas ekonomi kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tasikmalaya tidak hanya tumbuh secara positif, tetapi juga diinterpretasikan sebagai indikasi adanya kekuatan internal yang spesifik, efektivitas kebijakan lokal, atau komposisi sektoral yang lebih tangguh dan dinamis di Kota Tasikmalaya. Keunggulan ini menempatkan Kota Tasikmalaya sebagai salah satu mesin pertumbuhan potensial di Jawa Barat.

Pada tahun 2024, sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan di atas LPE Kota Tasikmalaya terjadi di sektor transportasi dan pergudangan 13,49%,



disusul sektor jasa lainnya sebesar 10,61%, kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,48%, jasa kesehatan sebesar 9,78%, informasi dan komunikasi sebesar 9,77%, dan jasa perusahaan sebesar 9,72%.

Arah kebijakan pembangunan terkait Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2027, antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan berbasis kewilayahan;
2. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna;
4. Penataan dan penyiapan kelembagaan pembiayaan bagi pelaku usaha serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi;
5. Penguatan tata kelola perdagangan serta dukungan terhadap produk unggulan dan perlindungan konsumen;
6. Mendorong ekspor daerah melalui pengembangan komoditas unggulan yang potensial untuk ekspor dan membuka pasar luar negeri;
7. Penguatan infrastruktur distribusi perdagangan dan logistik;
8. Pengendalian perdagangan domestik dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok;
9. Pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan melalui *e-commerce* dan *digital marketing*;
10. Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi regional;
11. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri unggulan daerah;
12. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan;
13. Penyiapan infrastruktur industri dan pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang halal dan ramah lingkungan;
14. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata olahraga (*sport tourism*) maupun wisata kultural secara kolaboratif dan partisipatif;
15. Peningkatan implementasi perekonomian dan keuangan syariah;
16. Pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan;
17. Peningkatan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian;
18. Pengendalian inflasi daerah;
19. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global;
20. Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD.

C. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya ditargetkan mencapai 7,52 - 8,27 persen pada tahun 2027. Penetapan target tersebut diproyeksikan berdasarkan capaian pada tahun 2025 sebesar 10,84 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dari 11,10 persen pada tahun 2024, melanjutkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota ini. Penurunan tingkat



kemiskinan yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan penurunan pengangguran, mengisyaratkan bahwa pembangunan ekonomi di Kota Tasikmalaya memiliki dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup penduduknya.

Arah kebijakan pembangunan untuk menurunkan angka Kemiskinan pada tahun 2027, antara lain:

1. Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
2. Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi;
3. Peningkatan Konvergensi/Integrasi Program dan sinergi stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan

D. Indeks Gini

Indeks Gini Kota Tasikmalaya ditargetkan mencapai 0,338 - 0,381 poin pada tahun 2027. Perkembangan indeks gini Kota Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu sebesar 0,439 poin pada tahun 2023, 0,359 pada tahun 2024, dan posisi terakhir pada tahun 2025 mencapai 0,355 poin.

Arah kebijakan pembangunan untuk menurunkan Indeks Gini Kota Tasikmalaya tahun 2026, antara lain:

1. Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin;
2. Perluasan akses layanan Pendidikan dan kesehatan;
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik terutama di wilayah kantong-kantong kemiskinan;
4. Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya ditargetkan mencapai 77,17 poin pada tahun 2027. Sejak tahun 2020, Pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya terus menunjukkan kemajuan signifikan, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,59 pada tahun 2025. Peningkatan IPM tahun 2025 terjadi pada semua dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Umur harapan hidup (UHH) warga Kota Tasikmalaya meningkat menjadi 75,66 tahun pada tahun 2025, dan rata-rata pengeluaran riil per kapita juga meningkat menjadi Rp.11,849 Juta pada tahun 2025. Untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal, investasi berkelanjutan dalam pendidikan berkualitas (termasuk pelatihan kejuruan), layanan kesehatan yang mudah diakses, dan program perlindungan sosial akan sangat penting sebagai pendorong utama kemakmuran ekonomi jangka panjang dan ketahanan kota.

Arah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya pada tahun 2027, antara lain:

- a. Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui pendidikan formal maupun non formal dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya



- b. Penguatan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren;
- c. Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai;
- d. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- e. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter;
- f. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, serta literasi digital
- g. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- h. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
- i. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan;
- j. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan agama;
- k. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan.

F. Prevalensi Stunting

Angka Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya ditargetkan mencapai 15,73 persen pada tahun 2027. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya mencapai 19,60 persen.

Arah kebijakan pembangunan yang mendukung penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2026 adalah penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif, serta kolaborasi lintas sektor.

4.2.5. Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2027

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah bertujuan untuk mengutamakan dan memfokuskan rencana pembangunan dalam rangka percepatan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator kinerja pembangunan. Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya disusun dengan mempertimbangkan visi dan misi Wali Kota Tasikmalaya tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis pembangunan, arah kebijakan RPJMD serta memuat pokok-pokok pikiran DPRD untuk tahun 2027.

Prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2027 meliputi:

1. Prioritas 1, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya antara lain:
 - Peningkatan mutu dan akses pelayanan pendidikan;
 - Dukungan fasilitasi sekolah rakyat dan sekolah unggulan;
 - Peningkatan minat dan budaya gemar membaca serta literasi masyarakat;
 - Dukungan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren;
 - One Hafidz One Kelurahan;
 - Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf;
 - Peningkatan akses pelayanan kesehatan terutama penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi stunting dan kesehatan anak serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - Peningkatan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - Penyediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - Peningkatan partisipasi dan prestasi pemuda;



- Peningkatan partisipasi dan prestasi olahraga;
- Peningkatan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pemajuan seni dan kebudayaan daerah melalui pengembangan komunitas kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal;
- Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat dan kerukunan beragama;
- Pengelolaan data kemiskinan;
- Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- Penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan;
- Penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;
- Pemberdayaan keluarga miskin;
- Beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin;
- Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin;
- Bantuan bagi siswa miskin;
- Bantuan pangan bagi masyarakat miskin;
- Peningkatan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Prioritas 2, yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan antara lain:

- Peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perijinan;
- Penciptaan lapangan kerja;
- Peningkatan tenaga kerja yang kompeten;
- Optimalisasi link and match dunia pendidikan dengan dunia kerja dan dunia usaha;
- Peningkatan hubungan industrial yang harmonis;
- Peningkatan produktivitas tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro;
- Peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- Peningkatan ketahanan pangan daerah;
- Penciptaan kawasan pengembangan ekonomi baru berbasis lokal kewilayahan;
- Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sektor Industri;
- Peningkatan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pengendalian inflasi daerah;
- Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD;
- Inovasi dan Digitalisasi dalam mendukung perekonomian daerah.

3. Prioritas 3, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih antara lain:

- Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan akuntabel;
- Peningkatan pelayanan publik;
- Percepatan implementasi reformasi birokrasi general dan tematik;
- Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
- Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;
- Peningkatan kerjasama daerah.



4. Prioritas 4, yaitu Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata antara lain:
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan kota;
 - Pengembangan sarana dan prasarana air limbah;
 - Pengembangan sarana dan prasarana air minum;
 - Penanganan kawasan permukiman kumuh;
 - Peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
 - Peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman;
 - Perbaikan rumah tidak layak huni;
 - Peningkatan pengelolaan sumber daya air;
 - Pembangunan dan rehabilitasi sarana pelayanan publik;
 - Dukungan infrastruktur menuju pusat pelayanan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan keagamaan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
5. Prioritas 5, yaitu Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan antara lain:
- Penyusunan rencana tata ruang;
 - Optimalisasi pemanfaatan ruang;
 - Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang;
 - Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - Peningkatan ruang terbuka hijau dan sarana publik;
 - Peningkatan pengelolaan persampahan

Kelima prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dijabarkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Prioritas, sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2027 dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	Target	
					2025	2026 ⁽¹⁾	2027
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,59	76,99	77,17
			Umur Harapan Hidup	Tahun	75,66	75,63	75,81
			Prevalensi Stunting	%	N/A	17,02	15,73
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	102,3	100,00	100,00
		Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,64	9,79	9,87
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,51	13,56	13,60



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	Target	
					2025	2026 ⁽¹⁾	2027
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	10,84	9,47	7,52-8,27
		Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	98,21	97,84	98,25
			Indeks Kerukunan Beragama	Poin	84,72	70,37	70,74
			Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya	Poin	43,55	34,17	44,79
		Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	N/A	61,91	62,61
			Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,203	0,284	0,249
			Indeks Pembangunan Pemuda	%	N/A	29,11	62,96
	2. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkeadilan Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,45	6,04 - 6,77
			Indeks Gini	Poin	0,355	0,350	0,338 - 0,381
			Inflasi	%	2,67	1,00-3,00	1,00-3,00
			Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	36,49	35,23	36,65
			Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	79,77	79,45	79,50
			Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	35,46	36,84	37,54
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,24	4,44	4,00
		Meningkatnya investasi Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	30,28	32,85	32,92



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	Target	
					2025	2026 ⁽¹⁾	2027
		dan lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,43	6,34	5,76 - 6,20
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	88,62	87,88	89,09
			Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	5,80	5,82	5,82
		Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	Poin	52,57	51,00	54,00
4.	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Infrastruktur Daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	60,42	61,19	64,83
5.	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	69,50	61,79	61,96
		Menurunnya Risiko bencana daerah dan Perubahan iklim	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar	1,87	2,36	2,56
			Indeks Risiko Bencana	Nilai	90,78	90,10	86,58

Keterangan: 1) Target Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2027, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD untuk tahun 2027. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.6.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan Daerah,
Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kota Tasikmalaya Tahun 2027

Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 (Untuk Tahun 2027)	Prioritas Pembangunan
1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang perlu diantisipasi untuk persiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebutuhan akan sarana prasarana umum untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; 2. Pertambahan penduduk yang akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang; 3. Urbanisasi penduduk ke kawasan pusat perkotaan dapat meningkatkan kebutuhan akan sarana prasarana serta dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial; 4. Masih tingginya angka beban ketergantungan (dependency ratio); 5. Masih tingginya AKI/ AKB; 6. Masih tingginya prevalensi stunting; 7. Kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan belum optimal; 8. Belum optimalnya pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan; 9. Masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular;	Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Kesejahteraan Sosial	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 2. Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting 3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan 5. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui deteksi dini/ screening, pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan agama 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan 7. Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui pendidikan formal maupun non formal dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya 8. Penguatan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren 9. Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui pendidikan formal maupun non formal yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai 10. Pemerataan dan peningkatan sertifikasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan 11. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter 12. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, serta literasi digital	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya



Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 (Untuk Tahun 2027)	Prioritas Pembangunan
10. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 11. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial; 12. Masih rendahnya pemberdayaan fakir miskin dan PMKS; 13. Belum optimalnya pemberdayaan gender; 14. Masih rendahnya ketahanan keluarga; 15. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak. 16. Belum optimalnya upaya pemajuan kesenian dan kebudayaan; 17. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesenian dan olahraga; 18. Masih kurangnya skala dan promosi event seni budaya dan olahraga; 19. Belum optimalnya pembangunan kepemudaan; 20. Belum optimalnya capaian rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah; 21. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian; 22. Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja; 23. Belum optimalnya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja; 24. Masih rendahnya budaya literasi.		13. Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan 14. Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi 15. Peningkatan Konvergensi/Intergrasi Program dan sinergi stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan 16. Pengembangan sistem tata kelola basis data terpadu 17. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, serta berasaskan kepada Pancasila 18. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam kelestarian serta pemajuan budaya 19. Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan 20. Peningkatan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa 21. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 22. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan; Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 (Untuk Tahun 2027)	Prioritas Pembangunan
		23. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda dan olahraga 24. Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga	
1. Masih terdapat ketidakstabilan harga barang pokok dan penting 2. Masih rendahnya daya beli masyarakat 3. Masih rendahnya indeks ketahanan pangan; 4. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal; 5. Terbatasnya lapangan pekerjaan 6. Belum optimalnya informasi ketenagakerjaan; 7. Masih terdapat kesenjangan ketersediaan peluang kerja dengan latar belakang pendidikan pencari kerja 8. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat; 9. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi; 10. Masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro; 11. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk; 12. Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro; 13. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;	Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi usaha mikro dan industri kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan dan kewilayahan 2. Penguatan proses bisnis Usaha mikro dan industri kecil melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna 4. Penataan dan penyiapan kelembagaan pembiayaan bagi pelaku usaha serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, koperasi dan asuransi 5. Penguatan tata kelola perdagangan serta dukungan terhadap produk unggulan, pusat inkubasi bisnis, pemasaran terpadu, dan perlindungan konsumen 6. Mendorong ekspor daerah melalui pengembangan komoditas unggulan yang potensial untuk ekspor dan membuka pasar luar negeri 7. Penguatan infrastruktur distribusi perdagangan dan logistik 8. Pengendalian perdagangan domestik dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok 9. Pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan melalui <i>e-commerce</i> dan <i>digital marketing</i> 10. Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi regional 11. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri dan produk unggulan daerah 12. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 (Untuk Tahun 2027)	Prioritas Pembangunan
14. Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro; 15. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam aktivitas ekonomi mikro; 16. Rendahnya rasio wirausahaan (entrepreneurship); 17. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar rakyat; 18. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 19. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 20. Belum optimalnya penataan pergudangan; 21. Belum optimalnya digitalisasi pasar rakyat; 22. Masih minimnya Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional; 23. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas IKM; 24. Rendahnya akses pemasaran, promosi dan daya saing IKM; 25. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam pengembangan IKM; 26. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan perikanan; 27. Krisis regenerasi pengrajin, petani dan pembudidaya muda; 28. Masih Rendahnya nilai tambah usaha pertanian dan perikanan;		13. Penyiapan infrastruktur industri dan pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang halal dan ramah lingkungan 14. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, wisata olahraga (<i>sport tourism</i>) maupun wisata kultural secara kolaboratif dan partisipatif 15. Peningkatan implementasi perekonomian dan keuangan syariah 16. Pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan 17. Peningkatan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian 18. Pengendalian inflasi daerah 19. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global 20. Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD 21. Penyediaan benih, pupuk, instrumen pengendali hama, obat, pakan, alat dan mesin pertanian yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan 22. Pengembangan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudidaya guna meningkatkan produktivitasnya 23. Penyediaan infrastruktur esensial yang terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, kualitas serta daya saing produk pertanian dan perikanan 24. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan 25. Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi pangan regional 26. Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 (Untuk Tahun 2027)	Prioritas Pembangunan
29. Terdapat ancaman perubahan iklim serta aktivitas di sektor pertanian dan perikanan banyak menyumbang terhadap emisi gas rumah kaca (contoh: penggunaan pupuk dan pestisida anorganik); 30. Belum optimalnya pengendalian harga produk pertanian dan perikanan;		27. Peningkatan iklim investasi, kemudahan bekerja dan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 28. Penyediaan database dan roadmap investasi, fasilitasi promosi investasi dan kerjasama investasi berbasis digital 29. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> (<i>vocational</i>) 30. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	
1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas; 2. Belum optimalnya pelayanan publik yang adaptif dan responsif; 3. Belum optimalnya penggunaan TIK dalam layanan pemerintah; 4. Belum optimalnya sistem inovasi daerah; 5. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko; 6. SDM Aparatur belum sepenuhnya memenuhi kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan kebutuhan daerah; 7. Belum optimalnya penerapan penerapan manajemen talenta, reward and punishment dalam pengembangan karir ASN; 8. Belum optimalnya pemenuhan kualitas sarana dan prasarana serta kelembagaan	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 2. Peningkatan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel 3. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan berintegritas dalam upaya pencegahan korupsi; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment, serta kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja 4. Penataan dan peningkatan kualitas regulasi daerah 5. Penguatan kelembagaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat 6. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan nasional	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 (Untuk Tahun 2027)	Prioritas Pembangunan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 9. Belum optimalnya hasil kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmalaya; 10. Belum kuatnya komitmen seluruh masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa; 11. Belum optimalnya sistem inovasi daerah; 12. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 13. Keamanan dan ketertiban umum belum sepenuhnya ditegakkan untuk seluruh masyarakat; 14. Belum optimalnya kehidupan demokrasi daerah; 15. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah.		7. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan <i>blended finance</i> 8. Peningkatan bangunan Gedung dan sarana pemerintahan 9. Peningkatan kerja sama daerah, regional dan internasional 10. Peningkatan pelayanan publik berbasis ekosistem digital dalam rangka perwujudan <i>smart city</i> 11. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sektor pemerintahan 12. Penataan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah	
1. Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh; 2. Masih terdapat rumah tidak layak huni; 3. Masih terdapat jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan; 4. Belum optimalnya konektivitas dan kemantapan jalan; 5. Belum optimalnya pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase; 6. Belum optimalnya pengelolaan parkir 7. Belum terpenuhinya penyediaan perlengkapan jalan; 8. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan dan perpakiran;	Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata	1. Peningkatan konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan RTRW Kota Tasikmalaya 2. Peningkatan infrastruktur sumber daya air, meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kota 3. Penyediaan drainase perkotaan yang terintegrasi 4. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik 5. Peningkatan elektrifikasi dan telekomunikasi 6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur 7. Penyediaan prasarana air minum meliputi: pembangunan SPAM perkotaan, rintisan pembentukan BUMD PDAM, pembangunan perlindungan dan pemanfaatan mata air	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata



Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 (Untuk Tahun 2027)	Prioritas Pembangunan
9. Belum tersedianya pelayanan transportasi massal terintegrasi.		8. Penyediaan prasarana air limbah meliputi: pembangunan SPAL, perluasan IPLT, penyediaan sarana dan prasarana IPLT, penyediaan sarana pengangkut lumpur tinja, perencanaan pengelolaan air limbah terjadwal 9. Peningkatan prasarana limbah domestik, industri dan medis serta penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga 10. Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, aman dan terjangkau masyarakat 11. Penanganan kawasan kumuh	
1. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Belum optimalnya pengelolaan kawasan rawan bencana; 3. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan 4. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup 5. Daya tampung dan debit air danau/situ kurang optimal 6. Peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang akibat pertambahan penduduk 7. Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber 9. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah	Lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup 2. Peningkatan pengelolaan sampah terpadu di hulu dan hilir 3. Transformasi pengelolaan persampahan meliputi: pembangunan prasarana persampahan, penyediaan sarana persampahan dan kerja sama pengelolaan persampahan 4. Peningkatan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang 5. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan ramah lingkungan 6. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 7. Implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim 8. Pembangunan ekonomi hijau melalui pembangunan ekonomi yang rendah karbon, hemat energi dan berbasis pada energi terbarukan 9. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air 10. Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan diantaranya infrastruktur yang tahan iklim, <i>resilience</i> terhadap bencana, dan ramah lingkungan 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

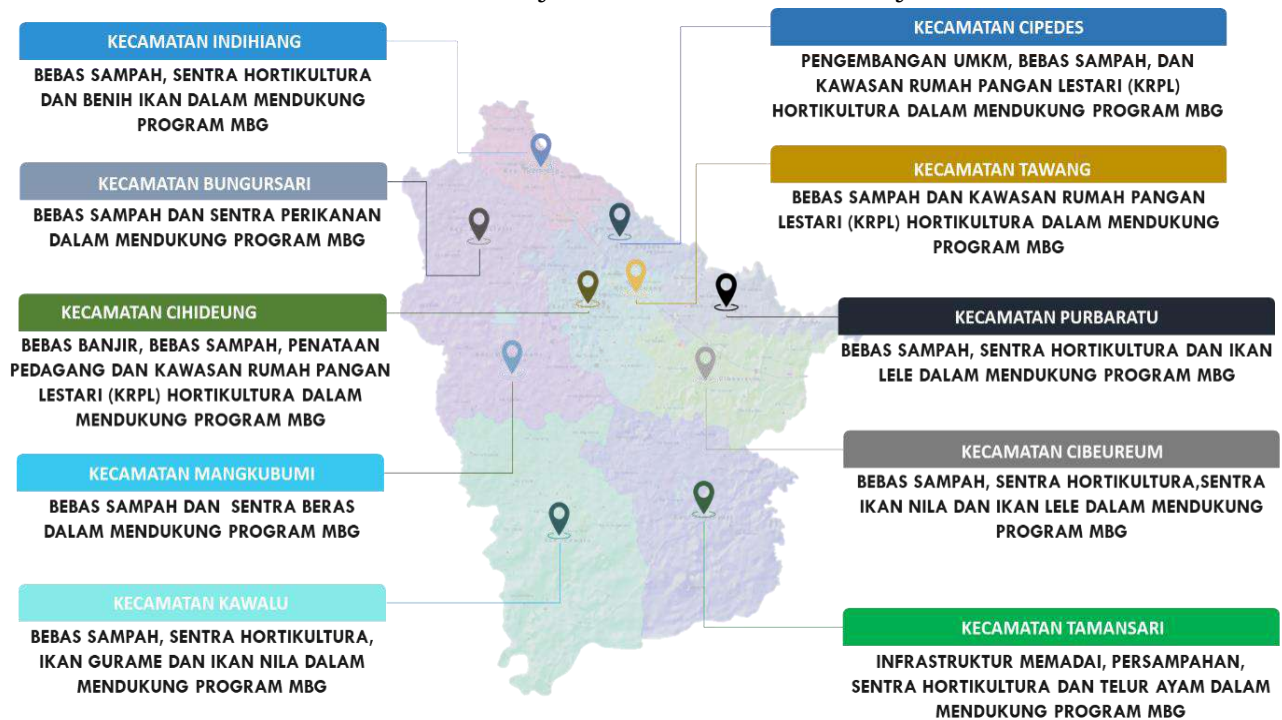
Permasalahan Pembangunan Tahun 2027	Isu Strategis Tahun 2027	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 (Untuk Tahun 2027)	Prioritas Pembangunan
10. Kurang seimbangnya antara SDM pengangkut sampah dengan luas wilayah pengangkutan sampah dan jumlah penduduk 11. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang dapat mengakses infrastruktur pelayanan dasar air minum 12. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik		12. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana	

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026



Prioritas pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya Tahun 2027 diarahkan untuk mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan. Guna mewujudkan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan potensi ekonomi yang berbasis kewilayahan. Upaya tersebut sudah dilaksanakan melalui proses partisipatif pada saat pelaksanaan musrenbang. Adapun potensi ekonomi berbasis kewilayahan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 4.4.
Tematik Kewilayahan di Kota Tasikmalaya



Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

Secara umum, penentuan tematik kewilayahan ini diarahkan untuk mendukung Program MBG (Makan Bergizi Gratis), penataan lingkungan (bebas sampah/banjir), serta ketahanan pangan lokal. Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Kawalu, dan Kecamatan Cibeureum dioptimalkan sebagai pemasok utama komoditas makro seperti beras, telur, daging ikan, dan sayuran skala besar. Kecamatan yang berada di Pusat Kota seperti Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Cipedes dioptimalkan pada penguatan ketahanan pangan mandiri (KRPL) dan penataan Pedagang/UMKM. Isu Lingkungan Terintegrasi di seluruh kecamatan dengan target "Bebas Sampah" yang disematkan hampir di seluruh kecamatan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Pendekatan tematik kewilayahan di Kota Tasikmalaya diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan karakteristik setiap wilayah sebagai dasar pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, pengembangan kawasan dan peningkatan produktivitas daerah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta memperkuat pemerataan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Guna mewujudkan hal tersebut maka perlu dukungan infrastruktur berupa sarana dan prasarana diantaranya:

A. Sentra hortikultura :



- Jaringan irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim.
- Jalan usaha tani agar distribusi sarana produksi dan hasil panen lebih mudah.
- *Greenhouse* atau *screen house* untuk budidaya yang lebih terkontrol.
- Gudang penyimpanan pupuk, benih, dan alat pertanian.
- *Cold storage* untuk menjaga kesegaran hasil panen sebelum dipasarkan.
- Rumah kemas (*packing house*) untuk sortasi, *grading*, dan pengemasan produk.
- Fasilitas pascapanen seperti alat pencuci, pengering, dan pengolah hasil.
- Sarana listrik dan air bersih yang memadai.

B. Sentra Benih Ikan :

- Kolam induk, kolam pemijahan, kolam pendederan, dan kolam pembesaran sesuai standar teknis.
- Sistem penyediaan air yang kontinu dan berkualitas, termasuk saluran masuk dan keluar air.
- Instalasi aerasi dan pompa air untuk menjaga kualitas air.
- *Hatchery* (balai pembenihan) lengkap dengan bak penetasan telur.
- Laboratorium kesehatan ikan untuk pemeriksaan penyakit dan kualitas air.
- Gudang pakan dan peralatan.
- Fasilitas karantina benih sebelum distribusi.
- Sarana transportasi benih seperti tangki beroksigen atau kendaraan khusus.
- Instalasi pengolahan limbah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

C. Sentra Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) :

- Lahan dan demplot KRPL
- Kebun bibit
- Rumah pembibitan (*greenhouse* sederhana)
- Sistem irigasi sederhana
- Sumur bor/tandon air
- Gudang sarana produksi
- Fasilitas pengomposan
- Jalan lingkungan
- Sarana edukasi dan pelatihan
- Fasilitas pemasaran hasil.

D. Sentra Perikanan :

- Kolam budidaya
- *Hatchery* atau balai benih
- Saluran irigasi dan drainase
- Instalasi pompa dan aerasi
- Gudang pakan
- Laboratorium kualitas air dan kesehatan ikan
- instalasi pengolahan limbah
- *Cold storage*
- Unit pengolahan hasil perikanan
- Kendaraan berpendingin untuk distribusi.

E. Sentra Beras :

- Jaringan irigasi
- Embung atau waduk kecil
- Jalan usaha tani,



- Alat dan mesin pertanian (traktor, *transplanter*, *combine harvester*)
- Lantai jemur atau *vertical dryer*
- *Rice Milling Unit* (RMU)
- Gudang penyimpanan gabah dan beras
- Fasilitas pengemasan
- Laboratorium uji mutu
- Pusat distribusi dan pemasaran.

F. Sentra Telur Ayam :

- Kandang ayam petelur sesuai standar
- Gudang pakan
- Sistem penyediaan air minum otomatis
- Instalasi listrik
- Tempat penyimpanan telur (*cold room/cold storage*)
- Ruang sortasi dan *grading*
- Fasilitas pengemasan
- Instalasi pengelolaan limbah dan kotoran ternak
- Laboratorium kesehatan hewan
- Akses jalan produksi
- Kendaraan distribusi.

Disisi lain, arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD guna mendukung prioritas pembangunan Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan.

Guna mendukung pengembangan kawasan dan produktivitas daerah, telah ditetapkan beberapa kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi di Kota Tasikmalaya, yaitu:

1. Kawasan Pusat Kota (Kawasan Bisnis, Perdagangan dan Jasa Regional)

Kawasan pusat kota merupakan pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas perkotaan. Oleh karena itu, kebutuhan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kota dan mengurangi tingkat kemacetan serta meningkatkan kenyamanan aktivitas ekonomi.

Kebutuhan infrastruktur meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas jalan utama dan jalan kolektor;
- b. Pembangunan jalan alternatif dan konektivitas antar pusat pelayanan;
- c. Pengembangan sistem transportasi publik perkotaan;
- d. Pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda;
- e. Peningkatan sistem drainase perkotaan;
- f. Pembangunan jaringan utilitas bawah tanah;
- g. Revitalisasi kawasan perdagangan tradisional;
- h. Penyediaan lahan parkir terpadu;
- i. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital;
- j. Peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan.

Pengembangan kawasan ini sejalan dengan kebijakan menjadikan pusat kota sebagai kawasan bisnis perdagangan dan jasa berskala regional.

2. Kawasan Industri dan Pergudangan Regional

Kawasan industri diarahkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang mampu memperlancar arus barang dan investasi. Prioritas kebutuhan infrastruktur meliputi:

- a. Peningkatan jalan logistik menuju kawasan industri;



- b. Pembangunan akses menuju jaringan jalan nasional dan jalan provinsi;
- c. Penyediaan jaringan listrik berkapasitas tinggi;
- d. Penyediaan jaringan air baku industri;
- e. Pembangunan IPAL kawasan;
- f. Pembangunan sistem drainase industri;
- g. Pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi;
- h. Pengembangan kawasan pergudangan dan pusat distribusi;
- i. Penyediaan terminal logistik dan fasilitas bongkar muat.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur transportasi, logistik, dan pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah.

3. Kawasan Sentra Bisnis Baru

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, kawasan ini membutuhkan infrastruktur yang mampu menarik investasi dan memperluas aktivitas perdagangan. Prioritas pembangunan meliputi:

- a. Pembangunan jaringan jalan kawasan;
- b. Pembangunan utilitas perkotaan terpadu;
- c. Penyediaan air minum dan sanitasi;
- d. Jaringan drainase kawasan;
- e. Ruang publik dan plaza ekonomi;
- f. Smart lighting;
- g. Jaringan fiber optic;
- h. Fasilitas parkir;
- i. Penataan kawasan komersial.

Pengembangan kawasan ini telah menjadi bagian dari strategi kawasan strategis ekonomi Kota Tasikmalaya.

4. Kawasan Minapolitan Kecamatan Indihiang dan Bungursari

Kawasan minapolitan diarahkan sebagai pusat pengembangan perikanan budidaya sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur produksi. Prioritas pembangunan meliputi:

- a. Rehabilitasi jaringan irigasi perikanan;
- b. Pembangunan embung dan kolam retensi;
- c. Jalan usaha perikanan;
- d. Cold storage;
- e. Tempat pelelangan ikan;
- f. Gudang pakan;
- g. Laboratorium kesehatan ikan;
- h. Jaringan listrik produksi;
- i. Akses distribusi hasil perikanan;
- j. Pusat pemasaran produk perikanan.

Pengembangan kawasan minapolitan secara eksplisit menjadi bagian strategi kawasan strategis ekonomi Kota Tasikmalaya.



5. Kawasan Pendidikan Terpadu Kecamatan Tamansari

Sebagai kawasan pendidikan, kebutuhan infrastruktur diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Prioritas pembangunan meliputi:

- a. Peningkatan akses jalan menuju kawasan pendidikan;
- b. Ttransportasi publik pelajar;
- c. Pedestrian;
- d. Jaringan internet berkecepatan tinggi;
- e. Smart campus area;
- f. Ruang terbuka hijau edukatif;
- g. Drainase kawasan;
- h. Air minum;
- i. Sanitasi;
- j. Kawasan parkir terpadu.

Pengembangan kawasan pendidikan terpadu telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis Kota Tasikmalaya.

6. Kawasan Konservasi Situ Gede

Kawasan ini diprioritaskan sebagai kawasan lindung sekaligus wisata alam sehingga pembangunan infrastruktur harus tetap menjaga daya dukung lingkungan. Prioritas pembangunan meliputi:

- a. Rehabilitasi sempadan situ;
- b. Konservasi daerah resapan air;
- c. Pembangunan drainase ramah lingkungan;
- d. Jalur pedestrian wisata;
- e. Dermaga wisata;
- f. Pusat informasi lingkungan;
- g. Ruang terbuka hijau;
- h. Sistem pengelolaan sampah kawasan;
- i. fasilitas sanitasi wisata;
- j. sistem mitigasi bencana.

Pengembangannya diarahkan dengan memadukan fungsi konservasi dan pemanfaatan kawasan.

7. Kawasan Wisata Alam Urug

Sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas tanpa mengurangi fungsi ekologis kawasan. Prioritas pembangunan meliputi:

- a. Peningkatan jalan menuju kawasan wisata;
- b. Area parkir;
- c. Pedestrian;
- d. Pusat informasi wisata;
- e. Sanitasi wisata;
- f. Jaringan air bersih;
- g. Penerangan jalan;
- h. Pengelolaan sampah;
- i. Ruang UMKM;
- J. Sistem mitigasi longsor dan banjir.



Pengembangan dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi wisata dan pelestarian lingkungan.

8. Kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata

Kawasan ini merupakan kawasan strategis dari aspek pertahanan dan keamanan. Kebutuhan infrastruktur meliputi:

- Peningkatan akses jalan menuju kawasan;
- Penataan koridor keselamatan penerbangan;
- Penguatan sistem utilitas kawasan;
- Sistem keamanan kawasan;
- Jaringan telekomunikasi;
- Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan;
- Pengembangan kawasan penyangga.

Pengembangannya tetap mengutamakan fungsi pertahanan negara dengan pemanfaatan ruang yang terkendali. Dengan pendekatan tersebut, setiap kawasan memperoleh dukungan infrastruktur yang berbeda sesuai fungsi ruangnya, yaitu:

Tabel 2.7.
Dukungan Infrastruktur setiap Kawasan di Kota Tasikmalaya

No	Kawasan	Fokus Infrastruktur
1	Pusat Kota	Jalan, transportasi, drainase, utilitas kota, parkir, digital
2	Industri & Pergudangan	Jalan logistik, listrik, air baku, IPAL, pergudangan
3	Sentra Bisnis Baru	Utilitas kawasan, jalan, smart city, parkir
4	Minapolitan	Irigasi, cold storage, jalan produksi, pemasaran
5	Pendidikan Terpadu	Jalan, internet, transportasi, pedestrian
6	Situ Gede	Konservasi, wisata, drainase ekologis, RTH
7	Wisata Alam Urug	Akses wisata, sanitasi, mitigasi bencana
8	Lanud Wiriadinata	Jalan akses, keamanan, pengendalian ruang

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

Pengembangan kawasan dan peningkatan produktivitas daerah perlu didukung oleh konektivitas wilayah yang memadai agar aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat dapat berlangsung lebih efisien. Peningkatan aksesibilitas menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing daerah sekaligus mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Dalam konteks tersebut, rencana pembangunan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) menjadi peluang strategis bagi Kota Tasikmalaya untuk memperkuat konektivitas regional, meningkatkan investasi, serta mengembangkan kawasan ekonomi, logistik, dan perdagangan secara lebih terintegrasi

Rencana pembangunan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diproyeksikan meningkatkan konektivitas kawasan selatan Pulau Jawa. Bagi Kota Tasikmalaya, keberadaan simpul akses (interchange) Tol Getaci akan menjadi katalis bagi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan mobilitas masyarakat, serta penguatan fungsi Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pelayanan regional di wilayah Priangan Timur. Untuk memaksimalkan manfaat pembangunan jalan tol tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mempersiapkan konektivitas internal



maupun eksternal secara komprehensif. Kesiapan tersebut tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga penataan ruang, pengembangan kawasan ekonomi, serta peningkatan kapasitas pelayanan perkotaan agar dampak ekonomi dapat dirasakan secara optimal.

Mengingat pembangunan exit tol berpotensi memicu perubahan pola pergerakan dan pertumbuhan lalu lintas, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memperhitungkan perhitungan ulang (forecasting) terhadap volume lalu lintas, pertumbuhan kendaraan, serta proyeksi penduduk untuk periode 2030 dan seterusnya. Proyeksi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa skenario pertumbuhan sehingga dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat terkait kebutuhan kapasitas jalan, tingkat pelayanan, serta langkah pengendalian transportasi di masa mendatang. Keberadaan akses Tol Getaci akan meningkatkan arus kendaraan menuju dan keluar Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah merencanakan kan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dan jalan arteri yang menghubungkan simpul tol dengan pusat kota, kawasan industri, sentra perdagangan, kawasan permukiman, terminal, serta kawasan strategis lainnya. Prioritas Indikasi Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkar
2. Pembangunan Jalan Akses Masuk ke Bandara Wiriadinata
3. Pembangunan Jalan Tembus dari Jl. Mashudi ke Jl. Noenoeng Tisnasaputra
4. Optimalisasi/Peningkatan Jaringan Jalan menuju pusat layanan Pendidikan tinggi (Universitas Negeri Siliwangi) di Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari
5. Reaktifasi dan Optimalisasi Layanan Transportasi Udara di Bandara Wiriadinata (Penerbangan konvensional dan kargo)
6. Penetapan Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan (dalam RTRW)
7. Optimalisasi Gedung Pusat Pengembangan Industri Kreatif (Gedung PPIK)
8. Pengembangan dan Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Penyelesaian permasalahan kumuh dan alternatif pembangunan hunian vertical ramah lingkungan)
9. Revitalisasi Situ Gede

Selain berkaitan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2027 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Tasikmalaya sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.8.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
1. Peningkatan akses, mutu sekolah, kualitas guru, pendidikan karakter serta pemanfaatan teknologi digital menjadi fokus utama. Selain itu, pengembangan pendidikan berbasis keterampilan, vokasi industri, fasilitas literasi, dan program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
2. Penguatan jaminan kesehatan, integrasi sistem pelayanan, penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pencegahan penyakit menular dan tidak menular, percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan bagi lansia, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan serta dukungan program pemenuhan gizi masyarakat. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar derajat kesehatan masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan;	



Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
3. Penguatan pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, dengan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemutakhiran data kesejahteraan sosial, evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan, rehabilitasi sosial bagi PMKS, penguatan nilai kesetiakawanan sosial, peningkatan koordinasi antarinstansi dan masyarakat, serta optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan PMKS guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; 4. Fasilitasi permodalan bagi perempuan, promosi kesetaraan gender, peningkatan peran dalam organisasi sosial, penyediaan layanan bagi perempuan dan anak, penguatan sistem perlindungan anak, pencegahan kekerasan dan eksploitasi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak terdampak, pengembangan pusat layanan terpadu, sosialisasi hak anak serta peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan; 5. Penguatan program keluarga berencana guna mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera dengan peningkatan sosialisasi, penyediaan alat kontrasepsi, kemudahan akses layanan di fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas petugas lapangan, pemutakhiran data kependudukan, penguatan ketahanan keluarga, integrasi program dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor yang didukung monitoring dan evaluasi berbasis data untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan pelayanan; 6. Penyediaan dan perbaikan fasilitas olahraga yang merata dan ramah bagi semua kalangan, pembinaan atlet, serta penyelenggaraan kegiatan olahraga dan kepemudaan secara berkelanjutan. Selain itu dilakukan pengembangan program keterampilan dan kreativitas pemuda, fasilitasi komunitas, pelatihan pelatih dan wasit, promosi pola hidup sehat, dukungan bagi atlet berprestasi, serta pengembangan taman kota, ruang terbuka, dan ruang kreatif melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat; 7. Penguatan nilai toleransi dan kebhinekaan, pelestarian sarana budaya, pemetaan potensi seni serta pengembangan kampung budaya berbasis kearifan lokal. Selain itu dilakukan fasilitasi kreativitas masyarakat, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya, peningkatan kapasitas kelembagaan serta optimalisasi implementasi kebijakan melalui digitalisasi dan pengembangan ekonomi kreatif guna memperkuat jati diri masyarakat dan mendukung pembangunan daerah; 8. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan umum dan keliling, penyediaan koleksi buku dan referensi yang mutakhir, serta pengembangan layanan digital. Selain itu dilakukan peningkatan kompetensi pustakawan, penyelenggaraan program literasi bagi masyarakat, penguatan kerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi, digitalisasi koleksi serta pengembangan komunitas literasi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia; 9. Penguatan sarana prasarana rumah ibadah, kerukunan antar umat beragama, peran organisasi keagamaan, serta implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Religius	



Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
1. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui peningkatan investasi daerah yang menyerap tenaga kerja, penguatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, pengembangan kewirausahaan dan UMKM, peningkatan perlindungan tenaga kerja, penguatan sistem informasi pasar kerja, serta pengembangan kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pelatihan. 2. Peningkatan kapasitas manajemen koperasi, pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), pendampingan transformasi digital dan literasi keuangan, serta perluasan akses permodalan dan pemasaran. Selain itu dilakukan penyediaan ruang promosi, penguatan kerja sama dengan dunia usaha, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi, peningkatan kualitas SDM dan inovasi produk, serta pengembangan sentra industri kecil unggulan seperti batik, payung geulis, kelom geulis, dan bordir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 3. Program GEMARIKAN, optimalisasi lahan budidaya masyarakat, peningkatan teknologi budidaya dan pakan mandiri, pelatihan serta penguatan kelembagaan pembudidaya, peningkatan akses permodalan, manajemen usaha, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, pengembangan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, pemasaran berbasis digital, pengembangan sentra budidaya berkelanjutan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya air tawar seperti sungai, embung, kolam, dan sawah untuk meningkatkan produksi. 4. Implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA), penguatan branding pariwisata, pengembangan desa dan kampung wisata, optimalisasi potensi destinasi, peningkatan infrastruktur pendukung, pengembangan wisata edukasi, budaya, agrowisata dan berbasis lingkungan, promosi pariwisata digital, penataan kawasan kota sebagai etalase seni dan ekonomi kreatif, penguatan UMKM sektor pariwisata, serta pengembangan event dan festival budaya daerah; 5. Perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani serta dukungan teknologi dan permodalan melalui peningkatan produksi komoditas strategis seperti padi, kedelai, daging, telur dan susu, pelatihan dan pendampingan petani, advokasi perlindungan lahan sesuai Perda, penerapan teknologi pertanian modern, peningkatan populasi ternak, stabilisasi harga dan jaminan sosial petani, diversifikasi komoditas, penguatan kelembagaan kelompok tani, fasilitasi akses permodalan UMKM pertanian serta intensifikasi dan diversifikasi produksi untuk mengurangi desa rawan pangan dan memperkuat pertanian sebagai penggerak ekonomi daerah; 6. Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan yang adaptif, penguatan digitalisasi perdagangan, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dengan upaya pengendalian inflasi, penguatan kerja sama perdagangan dan industri antar daerah, pengembangan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM, kemudahan perizinan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, revitalisasi dan peningkatan kinerja BUMD serta penguatan digitalisasi perdagangan dan pemasaran UMKM guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah; 7. Peningkatan daya saing industri melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan UMKM, inovasi, dan penguatan sentra industri kreatif, dengan upaya pengembangan SDM industri, fasilitasi industri kecil dan menengah, peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi, akses teknologi modern,	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan



Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
revitalisasi sentra industri lokal, penguatan jejaring pemasaran, pendampingan perizinan dan manajemen usaha, pengembangan industri berkelanjutan, fasilitasi pembiayaan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mendorong inovasi dan peningkatan daya saing industri daerah.	
1. Penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, penguatan koordinasi antarinstansi serta peningkatan partisipasi masyarakat guna menjaga stabilitas daerah dan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. 2. Penyediaan jaringan internet yang cepat dan aman, peningkatan kapasitas server dan pusat data, serta integrasi layanan publik berbasis online antar perangkat daerah. Selain itu dilakukan penguatan e-government dan keamanan siber, pemutakhiran data, peningkatan literasi digital masyarakat dan UMKM, optimalisasi media informasi pemerintah, pengembangan inovasi berbasis TIK, peningkatan kapasitas SDM serta penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta guna memastikan penerapan teknologi informasi yang efektif dan berkelanjutan.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, pengembangan drainase perkotaan dan jalan lingkungan, pengelolaan bangunan publik, penanganan permukiman kumuh, pengembangan perumahan layak, pengelolaan sumber daya air dan limbah domestik; 2. Penyediaan hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau seiring pertumbuhan penduduk, dengan upaya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, pengembangan perumahan ramah lingkungan, peningkatan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan permukiman yang sehat dan aman, relokasi dari kawasan rawan bencana, konservasi sumber daya air, pemenuhan air bersih dan sanitasi, serta pengelolaan air limbah domestik guna mendukung kesejahteraan masyarakat;	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata
3. Penyelenggaraan transportasi yang aman, efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan, dengan arah pembangunan pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau, integrasi moda transportasi, peningkatan keselamatan dan pengawasan lalu lintas, pemeliharaan penerangan jalan umum dan rambu lalu lintas, penataan parkir serta fasilitas pejalan kaki, pemanfaatan teknologi dalam manajemen transportasi, pengembangan transportasi ramah lingkungan, penguatan layanan logistik dan pengawasan antar wilayah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemantauan kinerja transportasi berbasis data guna mewujudkan sistem transportasi yang tertib, lancar, dan berkelanjutan;	



Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
1. Optimalisasi pengumpulan dan pengolahan sampah, penerapan prinsip 3R, pengembangan bank sampah, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, pengelolaan limbah B3. pengawasan kualitas udara dan air, penegakan peraturan lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau, konservasi sumber daya air termasuk pemanfaatan air hujan, peningkatan edukasi lingkungan kepada masyarakat, serta rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan ekosistem guna mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan; 2. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW serta konservasi ruang terbuka hijau;	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

4.2.6. Keselarasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Tahun 2027. Keselarasan antara Prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2027, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2027 dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9.

Keselaran Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2027 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya	
PN 1	Memperkokoh ideologi pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	P 4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i> .	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P 2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan
		P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif		
		P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif	P 4	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata
		P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya	
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
		P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif		
		P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif	P 2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P 3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif		
		P 4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i> .		
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P 5	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan
		P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Tabel 4.10.

Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027 dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Tasikmalaya
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	P3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
S1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	S17. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	S9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
	P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P4: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata
	P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P5: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan
S2. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	P2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan S4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
S3. Terbangunnya Eco-region Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	S7. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah S3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
S4. Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	S11. Meningkatnya Infrastruktur Daerah yang berkualitas, merata dan inklusif
S5. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing
S6. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Tasikmalaya
S7. Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	S7. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	S11. Meningkatnya Infrastruktur Daerah yang berkualitas, merata dan inklusif S12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
S8. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	S7. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P4: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata
	P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan
S9. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	S11. Meningkatnya Infrastruktur Daerah yang berkualitas, merata dan inklusif
S10. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing
S11. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	S11. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing
S12. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	S8. Meningkatnya investasi Daerah dan lapangan Kerja
		S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing
S13. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	S11. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
	P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Tasikmalaya
	P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
S14. Pendidikan Berkualitas yang Merata	S4. Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	S2. Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
S15. Kesehatan untuk Semua	S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
S16. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	S5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
S17. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten S14. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	S8. Meningkatnya investasi Daerah dan lapangan Kerja S10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik
S18. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	S5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan
S19. Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing
S20. Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	S7. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing
S21. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	S8. Meningkatnya investasi Daerah dan lapangan Kerja
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya P2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan P5: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Tasikmalaya
S22. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	S5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
S23. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing
S24. Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		S11. Meningkatnya Infrastruktur Daerah yang berkualitas, merata dan inklusif
S25. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		S12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
	P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan
	P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	P3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
S26. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	S4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
S27. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	S16. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	S9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih
S28. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	S4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
S29. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan		
S30. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing
S31. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi		S8. Meningkatnya investasi Daerah dan lapangan Kerja
S32. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Tasikmalaya
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
	P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P5: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan
S33. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	S2. Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	S4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
S34. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	S13. Menurunnya Risiko bencana daerah dan Perubahan iklim

Sumber: Hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2026

4.2.7. Standar Pelayanan Minimal

Prioritas pembangunan selanjutnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, ada 6 (enam) jenis SPM yang terdiri dari:

1. SPM Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

2. SPM Kesehatan;

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

3. SPM Pekerjaan umum

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. SPM Perumahan rakyat

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. SPM Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. SPM Sosial

Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian SPM:

1. Dalam rangka pencapaian pencapaian SPM Pendidikan dialokasikan anggaran khusus yang dialokasikan untuk pemenuhan indikator SPM bidang pendidikan. pemenuhan capaian SPM melalui program kegiatan yang memuat indikator serta sasaran yang bertujuan untuk PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan yaitu pemenuhan sarana dan prasarana peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas data sasaran SPM bidang pendidikan.
2. Untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam pemenuhan pelayanan terhadap 12 kelompok penerima layanan kesehatan;
3. Untuk pemenuhan SPM bidang perumahan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam penyediaan infrastruktur perumahan korban bencana dan program pemerintah;
4. Untuk pemenuhan SPM bidang Pekerjaan umum, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik;
5. Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban umum Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran melalui peningkatan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban umum. Adapun untuk pemenuhan dalam sub bidang kebencanaan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan informasi pengurangan risiko bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
6. Peningkatan Pemenuhan SPM bidang Sosial, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran yang dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

4.2.8. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2027 diimplementasikan melalui program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Program prioritas pembangunan adalah program yang ditetapkan pemerintah dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan potensi daerah.

4.2.8.1. Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah didasarkan pada agenda pembangunan Kota Tasikmalaya untuk memenuhi sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun pada



periode RPJMD 2025-2029. Program prioritas pembangunan daerah ditetapkan dengan mengacu pada hasil penjabaran strategi sebagai langkah nyata untuk mengimplementasikan kebijakan (visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan) pada RPJMD 2025-2029.

Kota Tasikmalaya menetapkan 7 (tujuh) program prioritas daerah sebagai berikut:

1) Program Tasik Gemas (Gerakan Masyarakat Sehat)

Program pembangunan daerah bidang kesehatan yang menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya:

- a. Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil, balita, dan remaja putri, melalui:
 - 1) Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk, balita stunting, balita gizi kurang dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK);
 - 2) Pemberian tablet penambah darah/vitamin bagi ibu hamil dan remaja putri.
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan anak melalui pemberian kartu anak sehat bagi anak balita.
- c. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, melalui:
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;
 - 2) Pengembangan Puskesmas;
 - 3) Peningkatan alat kesehatan dan alat penunjang kesehatan lainnya.
- e. Pemenuhan jaminan kesehatan nasional, terutama dalam penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kegiatan dilaksanakan melalui:
 - 1) Verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS kesehatan;
 - 2) Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - 3) Koordinasi dengan BPJS kesehatan dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.

2) Program Tasik Pintar

Program Pembangunan dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, diantaranya:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, melalui:
 - 1) Pembangunan ruang kelas baru;
 - 2) Rehabilitasi ruang kelas;
 - 3) Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan;
 - 4) Pembangunan/rehabilitasi laboratorium;
 - 5) Pembangunan/rehabilitasi utilitas sekolah.
 - 6) Pengadaan sarana penunjang pendidikan.
 - 7) Peningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidikan.
- b. Bantuan Pendidikan, melalui:
 - 1) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu;
 - 2) Pemberian peralatan dan perlengkapan sekolah terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
- c. Peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olah raga, melalui:
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga;
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pemuda;
 - 3) Pembinaan organisasi keolahragaan dan kepemudaan;
 - 4) Pembinaan atlet.

3) Program Tasik Religius

Program Tasik Religius merupakan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan karakter masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius melalui



peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, diantaranya:

- a. Fasilitasi pondok pesantren;
- b. One Kelurahan One Hafidz, melalui pemberian beasiswa bagi siswa/santri hafidz Al-Quran;

Program One Kelurahan One Hafizh (OHAN Hafizh) adalah program yang ditujukan untuk mencetak kader hariz dan hafizah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya melalui pemberian beasiswa bagi siswa/santri. Peserta OHAN Hafizh adalah masyarakat/penduduk Kota Tasikmalaya baik yang sedang belajar di sekolah formal maupun yang sudah tidak bersekolah, serta memiliki kemampuan dalam membaca al-Qur'an sesuai dengan standar LPTQ, memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk mengikuti program.

Tahapan pelaksanaan program ini adalah:

- 1) Pembentukan tim penyusun regulasi pelaksanaan program;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program;
- 3) Perencanaan pelaksanaan program;
- 4) Rekrutmen peserta program;
- 5) Pelaksanaan program.

- c. Fasilitasi pendidikan diniyah;
- d. Perbaikan sarana dan prasarana keagamaan;
- e. Optimalisasi tata kelola zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf.

4) Program Tasik Pelak (Pembiakan Ekonomi Lokal Kewilayahan).

Program Tasik Pelak adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama dari sektor industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif berbasis potensi ekonomi lokal yang didukung oleh pelaku usaha dan koperasi yang sehat, perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang berkualitas dengan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, salah satu tujuan program ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Program Pelak ini diantaranya dilaksanakan dengan:

- a. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, melalui:
 - 1) Penyusunan regulasi;
 - 2) Pembentukan kelembagaan pengelola;
 - 3) Identifikasi potensi ekonomi lokal;
 - 4) Pelatihan, pemberdayaan, pengembangan, dan pendampingan usaha mikro;
 - 5) Pemanfaatan aset daerah;
 - 6) Fasilitasi legalitas usaha;
 - 7) Fasilitasi dukungan teknologi dan branding;
 - 8) Fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran;
 - 9) Fasilitasi akses permodalan.
- b. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi, melalui:
 - 1) Pelatihan, pemberdayaan, pengembangan, pendampingan, dan pengawasan koperasi;
 - 2) Fasilitasi bantuan permodalan;
 - 3) Fasilitasi usaha mikro peserta program PELAK.
- c. Pengembangan ekonomi kreatif, melalui:
 - 1) Optimalisasi Gedung Creative Center (GCC) dan Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK);
 - 2) Pengembangan komunitas kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal;
 - 3) Pekan ekonomi kreatif;
 - 4) Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan perguruan tinggi dalam



pengembangan ekonomi kreatif;

d. Investasi dan penciptaan lapangan kerja, melalui:

- 1) Pelatihan kompetensi tenaga kerja;
- 2) Bursa kerja;
- 3) Fasilitasi kerjasama perusahaan dengan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi;
- 4) Rintisan pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK);
- 5) Peningkatan iklim investasi daerah;
- 6) Promosi investasi daerah;
- 7) Penyusunan Peta Potensi Investasi.

5) Program Tasik Melayani.

Program Tasik Melayani merupakan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berorientasi kepuasan masyarakat, diantaranya dilaksanakan melalui:

- a. Penguatan manajemen ASN, melalui penerapan merit sistem;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, melalui:
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor;
 - 2) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Optimalisasi manajemen pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui teknologi informasi, dengan kegiatan utama antarlain:
 - 1) Pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Penyebarluasan informasi, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak serta retribusi daerah;
 - 3) Pengembangan sistem informasi PAD;
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD.

6) Program Tasik Nyaman.

Program Tasik Nyaman merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. Pemantapan infrastruktur di Kota Tasikmalaya diperlukan untuk menangani permasalahan yang terkait dengan infrastruktur, dan menjawab tantangan isu strategis yang ada. Selain itu, pemantapan infrastruktur merupakan pendukung pengimplementasian rencana pengembangan wilayah menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi dan sosial dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan diantaranya:

- a. Peningkatan infrastruktur jalan, melalui:
 - 1) Pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan kelengkapannya;
 - 2) Peningkatan infrastruktur perhubungan.
- b. Peningkatan infrastruktur air minum dan air limbah domestik, melalui:
 - 1) Pembangunan dan pengembangan SPAM;
 - 2) Pembangunan dan pengembangan SPALD;
 - 3) Peningkatan pelayanan SPAM dan SPALD.

7) Program Tasik Resik.

Program Tasik Resik dengan semangat untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya yang bersih, indah, hijau, dan layak huni, sehingga dapat menujung peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, maju dan kreatif, diantaranya:

- a. Peningkatan pengelolaan persampahan, melalui:
 - 1) Pengurangan sampah;
 - 2) Sosialisasi pengelolaan sampah;
 - 3) Optimalisasi dan pembentukan bank sampah;



- 4) Pengadaan lahan untuk TPS3R dan TPST;
- 5) Pembangunan TPS3R dan TPST.
- b. Penanganan Sampah
 - 1) Optimalisasi pengelolaan sampah di TPA Ciangir;
 - 2) Penyediaan armada pengangkut sampah, alat berat, dan alat pengolahan sampah;
 - 3) Pengadaan lahan untuk TPST;
 - 4) Penyediaan TPS;
 - 5) Penanganan sampah di sungai;
 - 6) Kerjasama pengelolaan persampahan.
- c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, melalui:
 - 1) Pemeliharaan taman kota;
 - 2) Pemeliharaan dan pembangunan taman warga;
 - 3) Pembangunan taman keanekaragaman hayati.
- d. Peningkatan kualitas lingkungan, melalui:
 - 1) Pembebasan gunung atau lahan sumber air;
 - 2) Penanganan pencemaran lingkungan;
 - 3) Reboisasi/penanaman pohon;
 - 4) Pengendalian pemanfaatan ruang.

Program prioritas daerah Kota Tasikmalaya disusun selain dalam rangka pencapaian Visi dan Misi daerah, namun juga untuk mendukung program prioritas provinsi Jawa Barat dan program prioritas nasional. Keselarasan program prioritas daerah dengan program provinsi Jawa Barat dan program prioritas nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11.
Keselarasan Program Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya
dengan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Program Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya	Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	Program Prioritas Nasional	Program Hasil Terbaik Cepat
Program Tasik Gemas (Gerakan Masyarakat Sehat)	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Menjamin tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kota/kabupaten
	Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional		Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
	Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup		
Program Tasik Pintar	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	Penguatan Pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kota/kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi
	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	
Program Tasik Religius	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Program Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya	Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	Program Prioritas Nasional	Program Hasil Terbaik Cepat
		Pencegahan dan pemberantasan narkoba	
	Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	
Program Tasik Pelak (Pembiakan Ekonomi Lokal Kewilayahan)	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pemberantasan kemiskinan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
	Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Menjamin pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya Karakteristik-Mandiri lainnya	-
	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	-
	Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	-
	Program Peningkatan dan Pemerataan Investasi	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	-
	Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan Pemberdayaan Kewirausahaan Daerah	-	-
	Program Stabilitas Ekonomi Makro Daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	-	-
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	-
Program Tasik Melayani	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	-	-
	Program Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	-
	Program Transformasi Birokrasi Berbasis Digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	-
Program Tasik Nyaman	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat
	Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan		
	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok rentan (Lansia dan Penyandang Disabilitas)		



Program Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya	Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	Program Prioritas Nasional	Program Hasil Terbaik Cepat
			Berpenghasilan Rendah (MBR)
Program Tasik Resik	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
	Program Pengurangan Risiko Bencana		-

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

4.2.8.2. Program Prioritas

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas merupakan program yang terseleksi berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.

Pemerintah Kota Tasikmalaya menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah, dengan 5 (lima) tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran serta 134 (seratus tiga puluh empat) program prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.12.
Program Prioritas Kota Tasikmalaya Tahun 2025 -2029

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
1.	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya	S.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya prevalensi stunting dan meningkatnya gizi serta derajat kesehatan masyarakat	IT1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	
					IS1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					IS2. Umur Harapan Hidup	Tahun	• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
					IS3. Prevalensi Stunting	%	• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			S2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	IS4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
					IS5. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	• Program Pengelolaan Pendidikan
							• Program Pengembangan Kurikulum
							• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					IS6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	• Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
							• Program Pembinaan Perpustakaan
			S.3. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	IS7. Tingkat Kemiskinan	%	• Program Pemberdayaan Sosial
							• Program Rehabilitasi Sosial
							• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
							• Program Penanganan Bencana



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
			S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Meningkatnya masyarakat yang religius dan berbudaya	IS8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pengembangan Kesenian Tradisional - Program Pembinaan Sejarah
					IS9. Indeks Kerukunan Beragama	Poin	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
					IS10. Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya	Poin	Program Pengelolaan Permuseuman
			S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya ketahanan keluarga serta prestasi pemuda dan olahraga	IS11. Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	- Program Pengendalian Penduduk - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
2.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan					- Program Perlindungan Khusus Anak - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
					IS12. Indeks Ketimpangan Gender	Poin	
					IS.13. Indeks Pembungaran Pemuda	Poin	
			S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Meningkatnya pengembangan usaha para pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif	IT2. Indeks Daya Saing Daerah	Poin	
					IT3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	
					IS14. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
					IS15. Indeks Gini	Poin	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
					IS16. Inflasi	%	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
					IS17. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
					IS18. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
					IS19. Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
							Program Pengembangan UMKM
							Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas
							(Permendagri 90/2019)
							• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
							• Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
							• Program Pengembangan Ekspor
							• Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
							• Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
							• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
							• Program Pengendalian Izin Usaha Industri
							• Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
							• Program Perizinan Usaha Pertanian
							• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
							• Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
							• Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
							• Program Penyuluhan Pertanian
							• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
							• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
							• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
							• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
							• Program Pemasaran Pariwisata
							• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
							• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
							• Program Perekonomian dan Pembangunan
			S7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	IS20. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	• Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
							• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
							• Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
			S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	IS21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	• Program Perencanaan Tenaga Kerja
					IS22. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi • Program Hubungan Industrial • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif			IT4. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	
			S.9. Meningkatnya tata kelola	Meningkatnya pelayanan publik dan optimalisasi	IS23. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	• Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
			pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	Pendapatan Asli Daerah berbasis digital	IS24. Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan • Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika, serta Budaya Politik • Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan • Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya • Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial • Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
							• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi • Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia • Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD • Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip • Program Pengelolaan Arsip • Program Perizinan Penggunaan Arsip • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset	Meningkatnya penerapan IPTEK, ekosistem Riset dan Inovasi daerah	IS25. Indeks Inovasi Daerah	Poin	• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
			dan Inovasi dalam pelayanan publik	dalam pelayanan publik			• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral • Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan • Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata	Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif			IT5. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	
			S.11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar daerah yang layak, aman dan nyaman	IS26. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Penatagunaan Tanah



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
							• Program Pengembangan Perumahan • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program Kawasan Permukiman • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh • Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
5.	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan			IT6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	
			S.12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengelolaan persampahan yang baik dan terpadu	IS27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
							dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
							• Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Persampahan
			S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim	Meningkatnya keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan	IS28. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	ton CO ² eq	• Program Penanggulangan Bencana
					IS29. Indeks Risiko Bencana	Poin	• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
							• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026



Tabel 4.13.

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 ke dalam Program Prioritas Daerah dan Program Prioritas

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
1.	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Tasik Gemas Program pembangunan daerah bidang kesehatan yang menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya: a. Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil, balita, dan remaja putri, melalui: 1) pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk, balita stunting, balita gizi kurang dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK); 2) Pemberian tablet penambah darah/vitamin bagi ibu hamil dan remaja putri. b. Peningkatan pelayanan kesehatan anak melalui pemberian kartu anak sehat bagi anak balita; c. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, melalui: 1) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan; 2) Pengembangan Puskesmas; 3) Peningkatan alat kesehatan dan alat penunjang kesehatan lainnya. e. Pemenuhan jaminan kesehatan nasional, terutama dalam penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kegiatan dilaksanakan melalui: 1) Verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS kesehatan; 2) Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; 3) Koordinasi dengan BPJS kesehatan dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	▪ Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata • Kecamatan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
		Program Tasik Pintar Program Pembangunan dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, diantaranya: a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, melalui; 1) Pembangunan ruang kelas baru; 2) Rehabilitasi ruang kelas; 3) Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan; 4) Pembangunan/rehabilitasi laboratorium; 5) Pembangunan/rehabilitasi utilitas sekolah; 6) Pengadaan sarana penunjang pendidikan; 7) Peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan. b. Bantuan Pendidikan, melalui: 1) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu; 2) Pemberian peralatan dan perlengkapan sekolah terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu. c. Peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olah raga, melalui: 1) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga; 2) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pemuda; 3) Pembinaan organisasi keolahragaan dan kepemudaan; 4) Pembinaan atlet.	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	▪ Dinas Pendidikan	• Dinas Perpustakaan dan Arsip • Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Tasik Religius Program Tasik Religius merupakan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan karakter masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, diantaranya: a. Fasilitasi pondok pesantren; b. One Kelurahan One Hafidz, melalui pemberian beasiswa bagi siswa/santri hafidz Al-Quran; Program One Kelurahan One Hafizh (OHAN Hafizh) adalah program yang ditujukan untuk mencetak kader hariz dan	• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Sekretariat Daerah	• Dinas Pendidikan • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Kecamatan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
		hafizah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya melalui pemberian beasiswa bagi siswa/santri. Peserta OHAN Hafizh adalah masyarakat/penduduk Kota Tasikmalaya baik yang sedang belajar di sekolah formal maupun yang sudah tidak bersekolah, serta memiliki kemampuan dalam membaca al-Qur'an sesuai dengan standar LPTQ, memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk mengikuti program. Tahapan pelaksanaan program ini adalah: 1) Pembentukan tim penyusun regulasi pelaksanaan program; 2) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program; 3) Perencanaan pelaksanaan program; 4) Rekrutmen peserta program; 5) Pelaksanaan program. c. Fasilitasi pendidikan diniyah; d. Perbaikan sarana dan prasarana keagamaan; e. Optimalisasi tata kelola zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf.			



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
		Program Tasik Pelak Program Tasik Pelak adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama dari sektor industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif berbasis potensi ekonomi lokal yang didukung oleh pelaku usaha dan koperasi yang sehat, perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang berkualitas dengan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, salah satu tujuan program ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Program Pelak ini diantaranya dilaksanakan dengan: a. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, melalui: 1) Penyusunan regulasi; 2) Pembentukan kelembagaan pengelola; 3) Identifikasi potensi ekonomi lokal; 4) Pelatihan, pemberdayaan, pengembangan, dan pendampingan usaha mikro; 5) Pemanfaatan aset daerah; 6) Fasilitasi legalitas usaha; 7) Fasilitasi dukungan teknologi dan branding; 8) Fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran; 9) Fasilitasi akses permodalan. b. Penciptaan lapangan kerja, melalui: 1) Pelatihan kompetensi tenaga kerja; 2) Bursa kerja;	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian • Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Ketenagakerjaan • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
		Program Tasik Nyaman Program Tasik Nyaman merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. Pemantapan infrastruktur di Kota Tasikmalaya diperlukan untuk menangani permasalahan yang terkait dengan infrastruktur, dan menjawab tantangan isu strategis yang ada. Selain itu, pemantapan infrastruktur merupakan pendukung pengimplementasian rencana pengembangan wilayah menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi dan sosial dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan diantaranya: a. Peningkatan infrastruktur jalan, melalui: 1) Pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan kelengkapannya; 2) Peningkatan infrastruktur perhubungan. b. Peningkatan infrastruktur air minum dan air limbah domestik, melalui: 1) Pembangunan dan pengembangan SPAM 2) Pembangunan dan pengembangan SPALD 3) Peningkatan pelayanan SPAM dan SPALD	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penyelenggaraan Jalan	• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	• Dinas Perhubungan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
2.	P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Tasik Pelak Program Tasik Pelak adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama dari sektor industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif berbasis potensi ekonomi lokal yang didukung oleh pelaku usaha dan koperasi yang sehat, perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang berkualitas dengan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, salah satu tujuan program ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Program Pelak ini diantaranya dilaksanakan dengan: a. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, melalui: 1) Penyusunan regulasi; 2) Pembentukan kelembagaan pengelola; 3) Identifikasi potensi ekonomi lokal; 4) Pelatihan, pemberdayaan, pengembangan, dan pendampingan usaha mikro; 5) Pemanfaatan aset daerah; 6) Fasilitasi legalitas usaha; 7) Fasilitasi dukungan teknologi dan branding; 8) Fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran; 9) Fasilitasi akses permodalan. b. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi, melalui: 1) Pelatihan, pemberdayaan, pengembangan, pendampingan, dan pengawasan koperasi; 2) Fasilitasi bantuan permodalan; 3) Fasilitasi usaha mikro peserta program PELAK. c. Pengembangan ekonomi kreatif, melalui: 1) Optimalisasi Gedung <i>Creative Center</i> (GCC) dan Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK); 2) Pengembangan komunitas kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal; 3) Pekan ekonomi kreatif;	• Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi • Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program Pengembangan Ekspor • Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri • Program Pengendalian Izin Usaha Industri • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting • Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
		4) Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif; d. Investasi dan penciptaan lapangan kerja, melalui: 1) Pelatihan kompetensi tenaga kerja; 2) Bursa kerja; 3) Fasilitasi kerjasama perusahaan dengan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi; 4) Rintisan pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK); 5) Peningkatan iklim investasi daerah; 6) Promosi investasi daerah; 7) Penyusunan Peta Potensi Investasi.	• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	• Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
			• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial	• Dinas Ketenagakerjaan	
			• Program Perekonomian dan Pembangunan	• Sekretariat Daerah	
			• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	• Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.	P.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program Tasik Melayani Program Tasik Melayani merupakan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berorientasi kepuasan masyarakat, diantaranya dilaksanakan melalui: a. Penguatan manajemen ASN, melalui penerapan merit sistem; b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, melalui: 1) Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor; 2) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan; c. Optimalisasi manajemen pengelolaan Pendapatan Asli daerah	• Program Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			• Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan	• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
		(PAD) melalui teknologi informasi, dengan kegiatan utama antara lain: 1) Pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah; 2) Penyebarluasan informasi, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak serta retribusi daerah; 3) Pengembangan sistem informasi PAD; 4) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD.	• Program Informasi dan Komunikasi/Publik • Program Aplikasi Informatika • Program Penyelenggaraan Statistik Sektor • Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	• Dinas Komunikasi dan Informatika	
			• Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	• Badan Pendapatan Daerah	
			• Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
			• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	• Kecamatan	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
4.	P.4. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	Program Tasik Nyaman Program Tasik Nyaman merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. Pemantapan infrastruktur di Kota Tasikmalaya diperlukan untuk menangani permasalahan yang terkait dengan infrastruktur, dan menjawab tantangan isu strategis yang ada. Selain itu, pemantapan infrastruktur merupakan pendukung pengimplementasian rencana pengembangan wilayah menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi dan sosial dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan diantaranya: a. Peningkatan infrastruktur jalan, melalui: 1) Pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan kelengkapannya; 2) Peningkatan infrastruktur perhubungan. b. Peningkatan infrastruktur air minum dan air limbah domestik, melalui: 1) Pembangunan dan pengembangan SPAM 2) Pembangunan dan pengembangan SPALD 3) Peningkatan pelayanan SPAM dan SPALD	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penyelenggaraan Jalan	• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	• Dinas Perhubungan
5.	P.5. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Program Tasik Resik Program Tasik Resik dengan semangat untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya yang bersih, indah, hijau, dan layak huni, sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, maju dan kreatif, diantaranya: a. Peningkatan pengelolaan persampahan, melalui: 1) Pengurangan sampah; 2) Sosialisasi pengelolaan sampah; 3) Optimalisasi dan pembentukan bank sampah; 4) Pengadaan lahan untuk TPS3R dan TPST; 5) Pembangunan TPS3R dan TPST. b. Penanganan Sampah 1) Optimalisasi pengelolaan sampah di TPA Ciangir;	• Program Pengelolaan Persampahan • Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	• Dinas Lingkungan Hidup	• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kecamatan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
		2) Penyediaan armada pengangkut sampah, alat berat, dan alat pengolahan sampah; 3) Pengadaan lahan untuk TPST; 4) Penyediaan TPS; 5) Penanganan sampah di sungai; 6) Kerjasama pengelolaan persampahan. c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, melalui: 1) Pemeliharaan taman kota; 2) Pemeliharaan dan pembangunan taman warga; 3) Pembangunan taman keanekaragaman hayati. d. Peningkatan kualitas lingkungan, melalui: 1) Pembebasan gunung atau lahan sumber air; 2) Penanganan pencemaran lingkungan; 3) Reboisasi/penanaman pohon; 4) Pengendalian pemanfaatan ruang.			

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2026.



Dalam upaya mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027 maka disusun prioritas dan sasaran pembangunan, program prioritas dan perangkat daerah penanggung jawab sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.14.
Prioritas Pembangunan, Sasaran, Program Prioritas dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
dalam Rangka Pencapaian Sasaran Pembangunan Tahun 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya	S.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya prevalensi stunting dan meningkatnya gizi serta derajat kesehatan masyarakat	IS1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,17	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
				IS2. Umur Harapan Hidup	Tahun	75,81	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
				IS3. Prevalensi Stunting	%	15,73	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
				IS4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	100,0	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		S2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	IS5. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,87	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				IS6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,60	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
							Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
							Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
							Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		S.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	IS7. Tingkat Kemiskinan	%	7,52 - 8,27	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Meningkatnya masyarakat yang religius dan berbudaya	IS8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	97,96	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				IS9. Indeks Kerukunan Beragama	Poin	70,74	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya ketahanan keluarga serta prestasi pemuda dan olahraga	IS10. Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya	Poin	38,33	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
							Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
				IS11. Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	62,61	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
				IS12. Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,249	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
				IS.13. Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	62,96	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan	S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Meningkatnya pengembangan usaha para pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif	IS14. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,04 - 6,77	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
				IS15. Indeks Gini	Poin	0,338 - 0,381	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
				IS16. Inflasi	%	1,00-3,00	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
				IS17. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	36,65	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
							Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				IS18. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	79,50	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
				IS19. Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	37,54	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
							Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
							Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
							Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
							Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perdagangan dan Perindustrian
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
							Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
							Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
							Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		S7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	IS20. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,24	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH **KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027**

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	IS21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	32,92	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				IS22. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,76 - 6,2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
							Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan
							Program Hubungan Industrial	Dinas Ketenagakerjaan
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	S.9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	Meningkatnya pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah berbasis digital	IS23. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	89,09	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
				IS24. Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	5,82	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika, serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
							Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
							Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
							Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
							Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD
		S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik	Meningkatnya penerapan IPTEK, ekosistem Riset dan Inovasi daerah dalam pelayanan publik	IS25. Indeks Inovasi Daerah	Poin	54,00	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata	S.11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar daerah yang layak, aman dan nyaman	IS26. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	62,02	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
5.	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	S.12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengelolaan persampahan yang baik dan terpadu	IS27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	61,96	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2,56	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim	Meningkatnya keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan	IS28. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	ton CO ² eq	86,58	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				IS29. Indeks Risiko Bencana	Poin		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah Tahun 2026.



Tabel 4.15.
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita
dengan Program RKPD Tahun 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengawasan Penanaman Modal
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
					Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
			Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
					Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
					Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
					Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
					Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
					Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan Transmigrasi
13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
					Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
					Penyediaan Akses Internet Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
17.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
					Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha
					Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM
20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
					Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
					Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual
21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
					Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
					Pemanfaatan Cagar Budaya
22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota
25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
					Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota
					Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
					Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
					Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
					Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
			Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

Guna menciptakan fondasi yang kuat bagi keberhasilan pembangunan nasional, kegiatan prioritas, dan Proyek Strategis Nasional, pemerintah menetapkan 17 (tujuh belas) program prioritas presiden. Program lintas sektor ini mengedepankan langkah taktis berupa program hasil terbaik cepat (*quick wins*) yang diformulasikan secara terukur, cepat, dan tepat untuk menyelesaikan



berbagai tantangan serta permasalahan utama yang ada. Dukungan Kota Tasikmalaya tahun 2027 terhadap ketercapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.16
Dukungan Kota Tasikmalaya terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

PHTC	KONTRIBUSI
1	2
	1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
2.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
	2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
	3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
4	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
5	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
6	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
7	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
8	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
9	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
	4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi



PHTC	KONTRIBUSI
1	2
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
7	Pembangunan Laboratorium
5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	
1	Penyediaan Permakanan
2	Penyediaan Permakanan (PMKS)
3	Penyediaan Sandang
4	Penyediaan Alat Bantu
5	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (PMKS)
6) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
4	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
7	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
10	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
11	Penanganan sampah melalui pengangkutan
12	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
13	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (69 Kelurahan)

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

Dalam mendukung sinergitas pembangunan antara program pusat dan daerah, pemerintah daerah wajib melaksanakan Program Strategis Nasional (ProSN) dan Tematik Nasional dengan mencantumkan dalam dokumen perencanaan serta mendukung dengan mengalokasikan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Dukungan program prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya terhadap ProSN dan Tematik Nasional Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.17.
Dukungan Program dan Prioritas Pembangunan Daerah terhadap
Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2027

No.	ProSN	Proyek / Kegiatan / Tematik	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1.	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pembangunan Tiga Juta Rumah	P.4. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
2.	Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	P.4. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	ProSN	Proyek / Kegiatan / Tematik	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
3.		Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
	Kesehatan Untuk Semua	Makan Bergizi Gratis	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
			P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
			P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			P.4. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	P.1. Mewujudkan Sumber Daya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	ProSN	Proyek / Kegiatan / Tematik	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	
			P.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
			P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			P.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			P.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
		Digitalisasi Pembelajaran	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial	Program Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	ProSN	Proyek / Kegiatan / Tematik	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Masyarakat yang Religius dan Berbudaya		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
5.	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
6.	-	Ekonomi Syariah	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah
7.	-	Penanggulangan Bencana	P.5. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	ProSN	Proyek / Kegiatan / Tematik	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
8.	-	Pengarusutamaan Gender	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
			P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9.	-	Perlindungan Anak	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			P.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.



Untuk melihat tingkat dukungan prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, tabel di bawah ini menyajikan dukungan Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.18.
Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya		Program Pembangunan Daerah
P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Pengelolaan Pendidikan 6. Program Pengembangan Kurikulum 7. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 9. Program Pembinaan Perpustakaan 10. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 11. Program Pemberdayaan Sosial 12. Program Rehabilitasi Sosial 13. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 14. Program Penanganan Bencana 15. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 16. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 17. Program Pengembangan Kebudayaan 18. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 19. Program Pembinaan Sejarah 20. Program Pengendalian Penduduk 21. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 22. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 23. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 24. Program Perlindungan Perempuan 25. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 26. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 27. Program Perlindungan Khusus Anak 28. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 29. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya		Program Pembangunan Daerah
P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif	P 2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM 7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 9. Program Pengembangan Ekspor 10. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 14. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 15. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 16. Program Pemasaran Pariwisata 17. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual 18. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 19. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 20. Program Penanganan Kerawanan Pangan 21. Program Pengawasan Keamanan Pangan 22. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 23. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 24. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 25. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 26. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 27. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 28. Program Penyuluhan Pertanian 29. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 30. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 31. Program Perencanaan Tenaga Kerja 32. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 33. Program Penempatan Tenaga Kerja 34. Program Hubungan Industrial 35. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 36. Program Promosi Penanaman Modal 37. Program Pelayanan Penanaman Modal



Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya		Program Pembangunan Daerah
				38. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 39. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		P 5	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 9. Program Pengelolaan Persampahan 10. Program Penanggulangan Bencana



Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya		Program Pembangunan Daerah
P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P 2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	11. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		P 4	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Program Pengembangan Ekspor 4. Program Perekonomian dan Pembangunan 5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
P 4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i> .	P 3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Program Penyelenggaraan Jalan 4. Program Penataan Bangunan Gedung 5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 8. Program Penatagunaan Tanah 9. Program Pengembangan Perumahan 10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 11. Program Kawasan Permukiman 12. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 13. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 14. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika, serta Budaya Politik 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 7. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 8. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 11. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 12. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 13. Program Perekonomian dan Pembangunan 14. Program Penyelenggaraan Pengawasan



Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya	Program Pembangunan Daerah
			15. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 16. Program Kepegawaian Daerah 17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 18. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 19. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 20. Program Pengelolaan Arsip 21. Program Perizinan Penggunaan Arsip 22. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 23. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 24. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 25. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 26. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 27. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 28. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor 29. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 30. Program Pendaftaran Penduduk 31. Program Pencatatan Sipil 32. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 33. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 34. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tematik terdapat program Pembangunan yang bersifat lintas sektoral (*cross cutting*). Beberapa program lintas sektoral antara lain sebagai berikut.

1. **Crosscutting Pengentasan Kemiskinan**

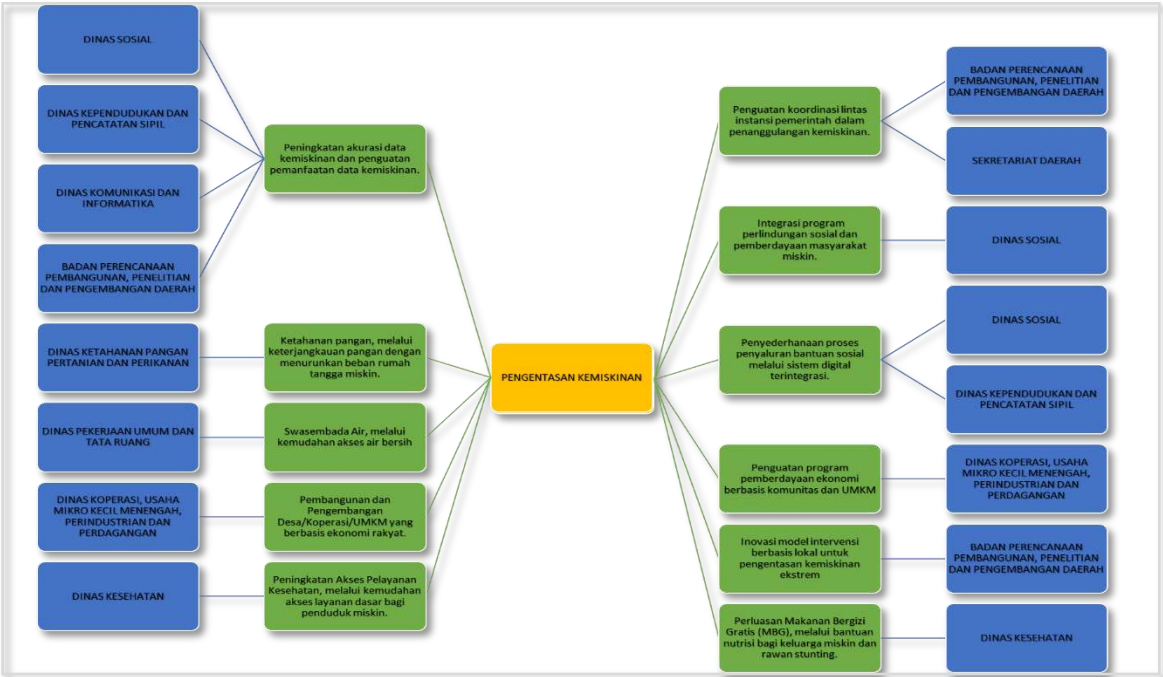
Pengentasan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Secara umum strategi pengentasan kemiskinan terdiri dari: pengurangan beban masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Salah satu prioritas utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah pengentasan kemiskinan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, dimana pada tahun 2029 Pemerintah menetapkan target yang cukup tinggi untuk menurunkan angka kemiskinan umum hingga 4,5 persen dan menghapus kemiskinan ekstrem sepenuhnya.

Pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan kolaborasi yang bersinergi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Program pengentasan kemiskinan merupakan program yang

bersifat lintas sektor dan melibatkan beberapa perangkat daerah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 4.5.
Cross Cutting Pengentasan Kemiskinan



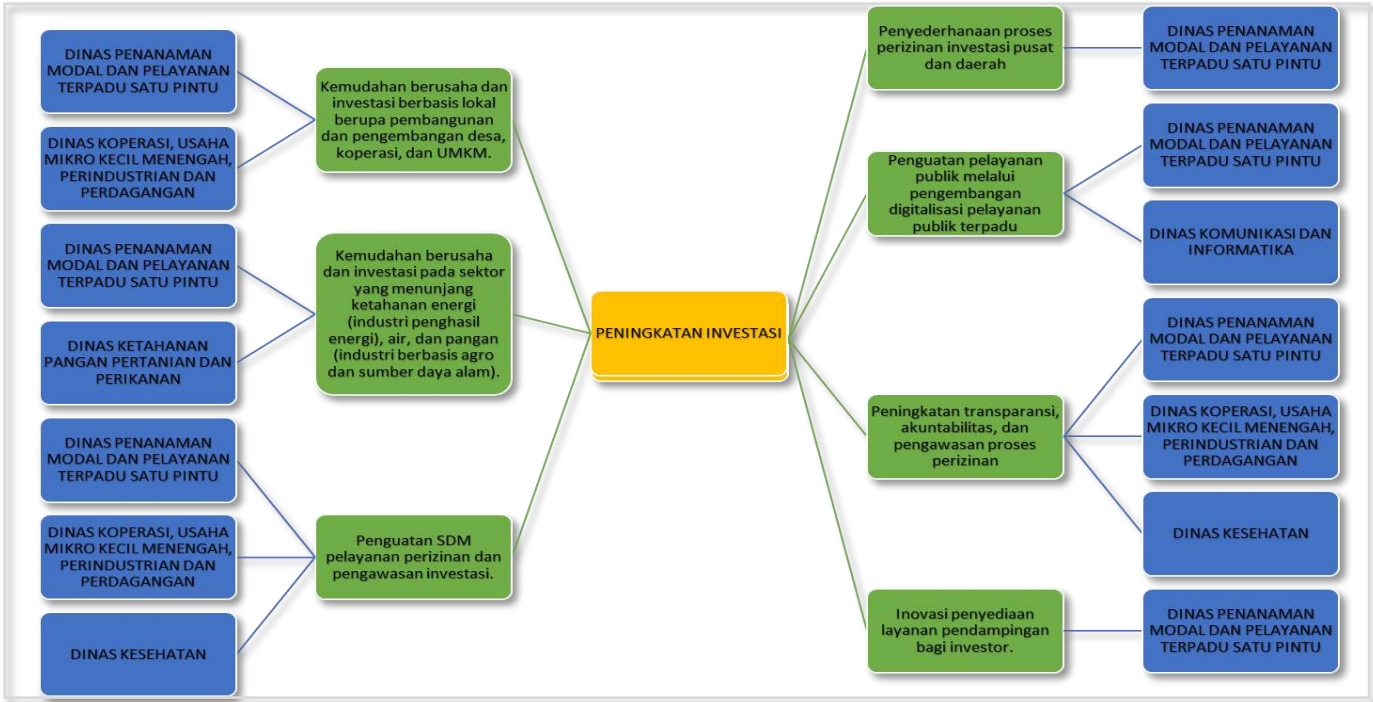
Sumber: RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

2. Crosscutting Peningkatan Investasi

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, peningkatan investasi menjadi salah satu strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Investasi memiliki peran penting yang strategis dalam rangka mewujudkan visi Kota Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa dan perdagangan yang religius, inovatif, maju dan berkelanjutan. Peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan sektor produktif, meningkatkan daya saing ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas produksi. Untuk mendukung peningkatan investasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Adapun secara lebih rinci, skema program lintas sektoral peningkatan investasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.6.
Cross Cutting Peningkatan Investasi



Sumber: RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

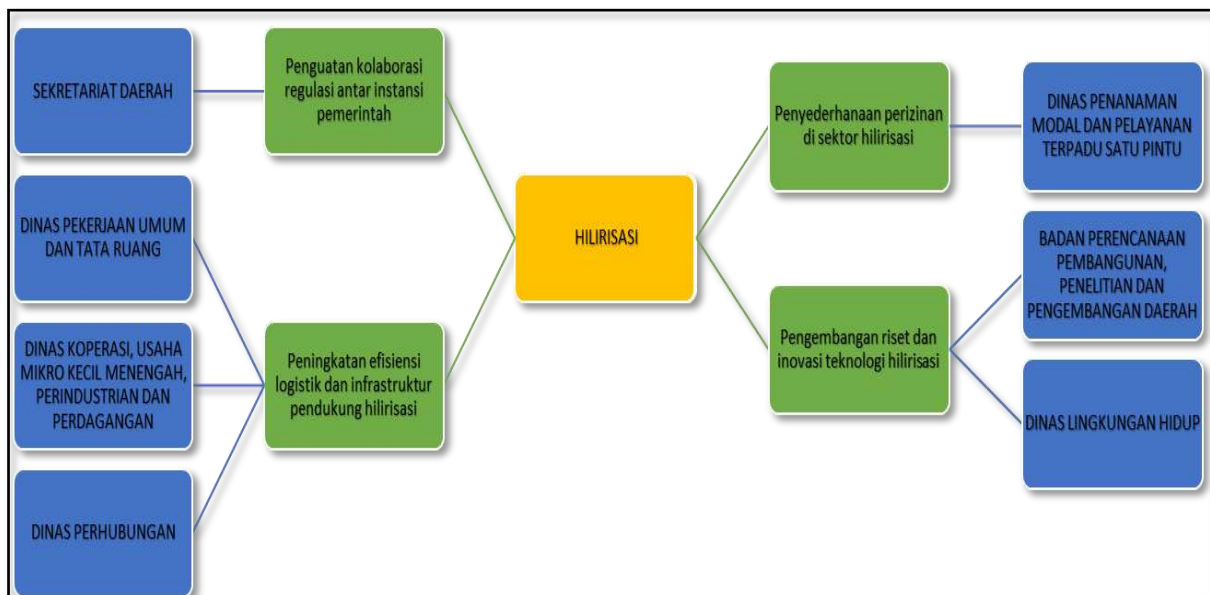
3. Crosscutting Hilirisasi

Hilirisasi dalam RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan salah satu strategi utama pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri dalam negeri, dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi.

Dalam konteks Kota Tasikmalaya, hilirisasi menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat sektor unggulan, seperti UMKM, pariwisata, dan industri kreatif. Dalam rangka mewujudkan hilirisasi melibatkan berbagai pihak yang terlibat sehingga terjadi sinergitas program guna mewujudkannya.

Program untuk mendukung Hilirisasi ini dapat dilihat dari gambar *cross cutting* berikut ini.

Gambar 4.7.
Cross Cutting Hilirisasi



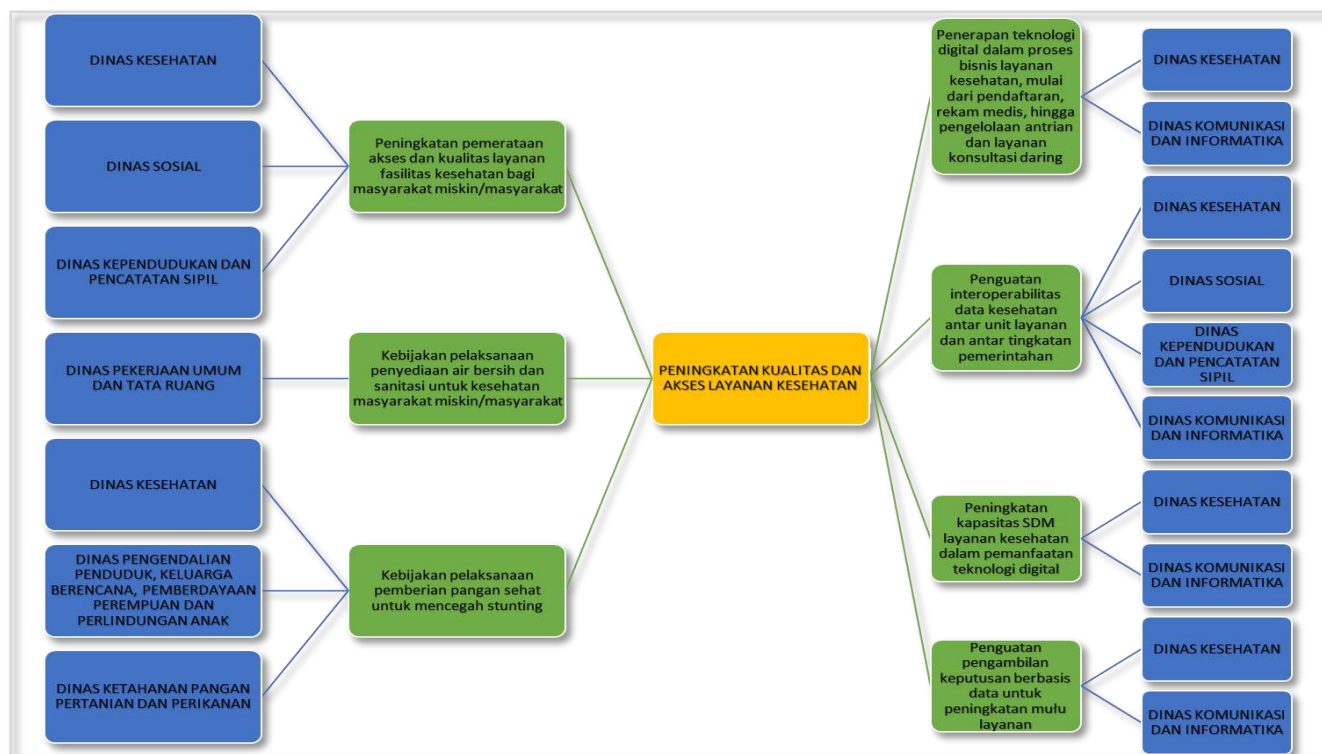
Sumber: RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

4. *Crosscutting* Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan misi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan dan strategis yang diambil pemerintah antara lain: pemerataan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, pencegahan dan promosi kesehatan, integrasi layanan kesehatan jiwa dan lanjut usia, serta ketahanan sistem kesehatan.

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan di Kota Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang religius, inovatif, maju, dan berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Pembangunan sektor kesehatan tidak dapat hanya dilaksanakan oleh satu perangkat daerah namun harus melibatkan beberapa perangkat daerah lainnya, bahkan keterlibatan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Berikut ini *cross cutting* peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.

Gambar 4.8.
Cross Cutting Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan



Sumber: RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

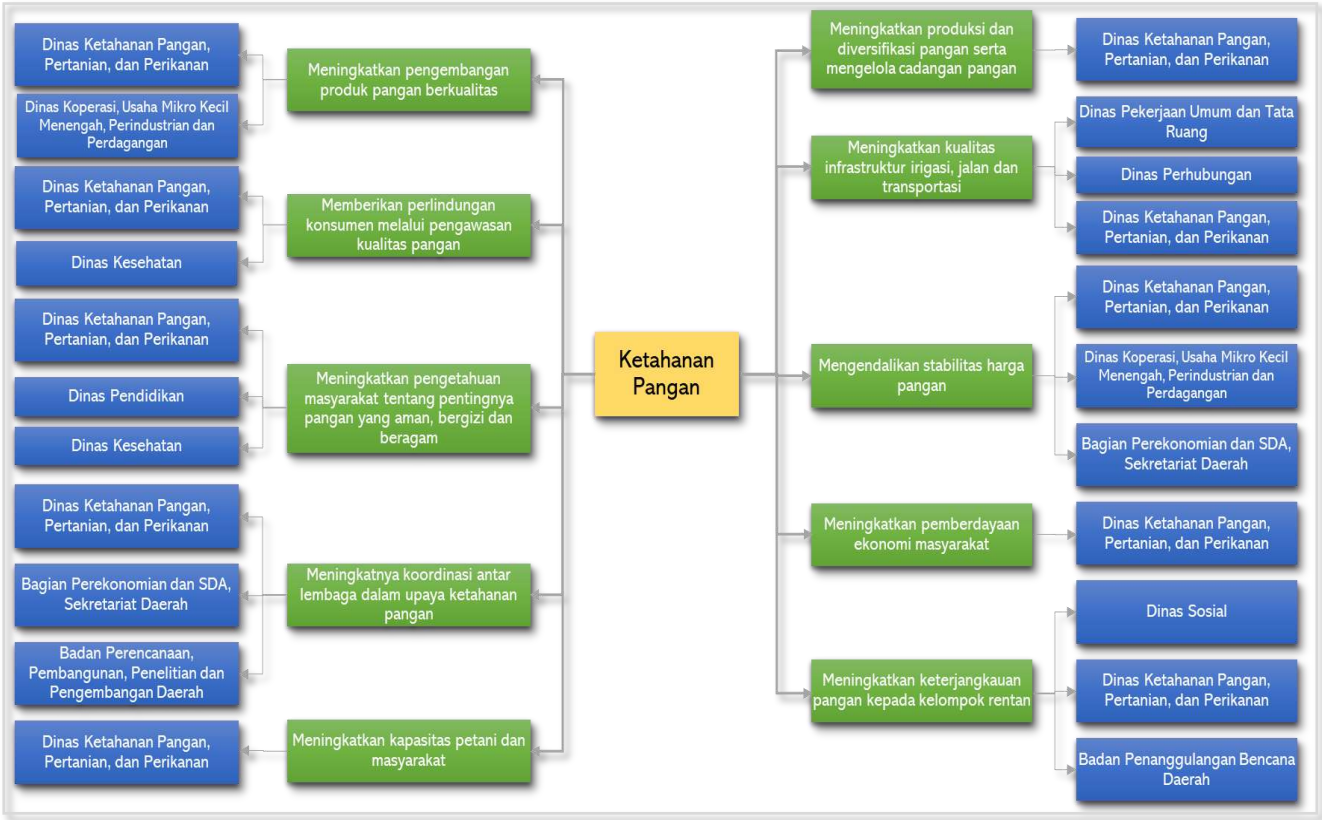
5. Crosscutting Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan atau (keter)jaminan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (self-sufficiency) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko.

World Health Organization mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. FAO menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang Panjang.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan diperlukan program lintas sektor, berikut gambaran *cross cutting* ketahanan pangan.

Gambar 4.9.
Cross Cutting Ketahanan Pangan



Sumber: RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

6. Crosscutting Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia guna membangun generasi emas Indonesia tahun 2045. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Pemerintah menekankan bahwa pendidikan yang inklusif dan berkualitas adalah fondasi bagi sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global. Kebijakan ini meliputi peningkatan akses yang merata, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta integrasi teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan program peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan diperlukan program lintas sektor, sebagaimana gambaran berikut ini.



Gambar 4.10.
Cross Cutting Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan



Sumber: RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029



BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Usulan rencana kebutuhan pembangunan untuk tahun 2027 yang tertuang dalam program dan kegiatan disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota serta sumber lainnya. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, politik, atas bawah (*top down*), bawah atas (*bottom up*) dan partisipatif melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional, kemudian diverifikasi dan disepakati sebagai usulan prioritas program dan kegiatan untuk tahun 2027. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 sebanyak 182 program, 554 kegiatan dan 1.923 sub kegiatan dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.1.501.834.349.572,27. Rekapitulasi rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif berdasarkan Perangkat Daerah/ Urusan/Bidang Urusan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
serta Pendanaan Indikatif Tahun 2027

No	Perangkat Daerah / Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5	16	99	451.157.029.536,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	16	99	451.157.029.536,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5	16	99	451.157.029.536,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	7	29	111	415.988.231.437,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	25	101	409.905.295.437,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	25	101	409.905.295.437,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	10	6.082.936.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	4	10	6.082.936.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	31	91	64.055.532.963,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	29	88	64.040.636.963,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	21	74	56.469.636.963,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	8	14	7.571.000.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No	Perangkat Daerah / Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	3	14.896.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2	2	3	14.896.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	51	13.279.951.732,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	10	51	13.279.951.732,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	10	51	13.279.951.732,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	16	60	8.191.551.005,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	16	60	8.191.551.005,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	16	60	8.191.551.005,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	21	76	22.245.384.916,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	15	70	21.145.210.900,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	15	70	21.145.210.900,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	6	6	1.100.174.016,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	6	6	1.100.174.016,00
7	Dinas Ketenagakerjaan	5	15	49	6.072.681.855,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	1	15.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	15.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	14	48	6.057.681.855,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	14	48	6.057.681.855,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	12	26	70	18.684.704.053,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	13	27	9.385.976.101,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	5	9	2.969.405.020,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	8	18	6.416.571.081,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	13	43	9.298.727.952,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	13	43	9.298.727.952,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No	Perangkat Daerah / Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
9	Dinas Lingkungan Hidup	9	17	58	49.053.865.336,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	17	58	49.053.865.336,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9	17	58	49.053.865.336,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	38	8.254.074.532,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	14	38	8.254.074.532,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14	38	8.254.074.532,00
11	Dinas Perhubungan	2	14	32	45.355.827.140,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	14	32	45.355.827.140,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	14	32	45.355.827.140,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	13	54	12.010.866.028,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	13	54	12.010.866.028,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	11	46	11.915.866.028,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	3	45.005.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	5	49.995.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	15	24	66	18.397.641.976,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	9	19	6.697.607.816,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	6	13	5.951.709.316,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	6	745.898.500,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	15	47	11.700.034.160,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7	15	47	11.700.034.160,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	12	36	6.191.645.756,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	12	36	6.191.645.756,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	12	36	6.191.645.756,00
15	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	11	27	73	17.637.208.352,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No	Perangkat Daerah / Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	7	12	1.900.911.592,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	7	12	1.900.911.592,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	20	61	15.736.296.760,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	6	11	1.145.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	14	50	14.591.296.760,00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4	13	44	5.863.061.705,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	13	44	5.863.061.705,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1	3	4	343.400.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	10	40	5.519.661.705,00
17	Sekretariat Daerah	3	19	81	69.301.774.042,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3	19	81	69.301.774.042,00
	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	81	69.301.774.042,00
18	Sekretariat DPRD	2	17	70	54.875.217.100,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	17	70	54.875.217.100,00
	SEKRETARIAT DPRD	2	17	70	54.875.217.100,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4	17	73	10.554.093.044,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	17	73	10.554.093.044,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	4	8	400.000.000,00
	PERENCANAAN	3	13	65	10.154.093.044,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	13	79	25.058.272.198,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	13	79	25.058.272.198,00
	KEUANGAN	3	13	79	25.058.272.198,00
21	Badan Pendapatan Daerah	2	9	46	25.028.433.848,27
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	9	46	25.028.433.848,27
	KEUANGAN	2	9	46	25.028.433.848,27
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	14	60	14.308.944.436,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	14	60	14.308.944.436,00
	KEPEGAWAIAN	2	12	57	14.008.944.436,00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	2	3	300.000.000,00
23	Inspektorat Daerah	3	11	37	13.458.912.046,00
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	11	37	13.458.912.046,00
	INSPEKTORAT DAERAH	3	11	37	13.458.912.046,00
24	Kecamatan Cihideung	4	16	45	11.106.031.600,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	16	45	11.106.031.600,00
	KECAMATAN	4	16	45	11.106.031.600,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No	Perangkat Daerah / Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
25	Kecamatan Cipedes	4	14	43	8.398.999.300,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	14	43	8.398.999.300,00
	KECAMATAN	4	14	43	8.398.999.300,00
26	Kecamatan Tawang	4	15	44	9.342.869.900,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	15	44	9.342.869.900,00
	KECAMATAN	4	15	44	9.342.869.900,00
27	Kecamatan Indihiang	4	13	37	9.897.349.900,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	13	37	9.897.349.900,00
	KECAMATAN	4	13	37	9.897.349.900,00
28	Kecamatan Kawalu	4	15	47	15.409.178.400,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	15	47	15.409.178.400,00
	KECAMATAN	4	15	47	15.409.178.400,00
29	Kecamatan Cibeureum	4	11	32	14.085.231.800,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	11	32	14.085.231.800,00
	KECAMATAN	4	11	32	14.085.231.800,00
30	Kecamatan Tamansari	4	15	50	11.083.759.600,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	15	50	11.083.759.600,00
	KECAMATAN	4	15	50	11.083.759.600,00
31	Kecamatan Mangkubumi	4	15	42	13.909.405.904,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	15	42	13.909.405.904,00
	KECAMATAN	4	15	42	13.909.405.904,00
32	Kecamatan Bungursari	4	15	43	11.419.535.300,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	15	43	11.419.535.300,00
	KECAMATAN	4	15	43	11.419.535.300,00
33	Kecamatan Purbaratu	4	14	36	9.412.899.200,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	14	36	9.412.899.200,00
	KECAMATAN	4	14	36	9.412.899.200,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	50	12.744.183.632,00
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	13	50	12.744.183.632,00
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	13	50	12.744.183.632,00
		182	554	1.923	1,501,834,349,572.27

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Pagu indikatif sebagaimana tertuang pada tabel diatas, telah memuat Belanja Pegawai, belanja *fixed cost*, prioritas perangkat daerah, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja prioritas lainnya. Sedangkan untuk rincian program, kegiatan, dan subkegiatan pada setiap Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya beserta pagu pendanaannya dijabarkan pada matriks Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2027 secara terperinci disajikan dalam **Lampiran**.

Penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas disusun dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan melalui prioritas dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027. Selain itu penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana telah dijelaskan pada bab IV dan pencapaian prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2027.



Pada tahun 2027, Kota Tasikmalaya melaksanakan 7 Program Prioritas Daerah, yang terdiri dari beberapa Kegiatan Prioritas sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 5.2.
Program Prioritas Daerah
Kota Tasikmalaya dan Alokasi Pagu Indikatif Tahun 2027

Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp.)	Perangkat Daerah
TASIK GEMAS	60.252.741.909,00	▪ Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana ▪ Kecamatan
TASIK PINTAR	131.151.050.005,00	▪ Dinas Pendidikan ▪ Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ▪ Dinas Perpustakaan dan Arsip ▪ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ▪ Kecamatan
TASIK RELIGIUS	25.939.890.600,00	▪ Sekretariat Daerah ▪ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ▪ Kecamatan
TASIK PELAK	8.251.145.647,00	▪ Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian ▪ Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ▪ Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ▪ Dinas Ketenagakerjaan ▪ Sekretariat Daerah ▪ Kecamatan
TASIK MELAYANI	58.704.075.981,00	▪ Badan Pendapatan Daerah ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ▪ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perpustakaan dan Arsip ▪ Kecamatan
TASIK NYAMAN	70.006.771.165,00	▪ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan ▪ Kecamatan
TASIK RESIK	24.254.993.993,00	▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Kecamatan

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026.



Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan dan komitmen terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat, tabel berikut memuat alokasi pendanaan untuk menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh urusan wajib pelayanan dasar.

Tabel 5.3.
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tasikmalaya
dan Alokasi Pagu Indikatif Tahun 2027

Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pagu Indikatif (Rp)
SPM Bidang Kesehatan	7.104.092.999,00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.724.194.100,00
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.225.420.000,00
SPM Bidang Pendidikan	20.699.037.000,00
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.215.000.000,00
SPM Bidang Sosial	761.000.200,00
Total	33.728.744.299,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026

Untuk mencapai tema pembangunan pada tahun 2027, indikator-indikator pembangunan didukung oleh program dan anggaran sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2027 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 5,76 - 6,2 persen. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.
Program dan Pagu Indikatif terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Tasikmalaya Tahun 2027

No.	Program	Pagu Indikatif (Rp)
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	393.000.000,00
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	556.886.927,00
3	Program Hubungan Industrial	719.561.000,00
	Total	1.669.447.927,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada tahun 2027 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 6,04 - 6,77 persen. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.



Tabel 5.5.
Program dan Pagu Indikatif terkait Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kota Tasikmalaya Tahun 2027

No	Program	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.000.000,00
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	15.000.000,00
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	117.000.000,00
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	506.200.000,00
5	Program Pengembangan UMKM	105.000.000,00
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	193.800.000,00
7	Program Pengembangan Ekspor	903.000.000,00
8	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5.000.000,00
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	700.898.500,00
10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	15.000.000,00
11	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	30.000.000,00
12	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	422.084.016,00
13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.427.825.300,00
14	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	260.000.000,00
15	Program Pelayanan Penanaman Modal	120.000.000,00
16	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50.000.000,00
17	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	340.911.592,00
18	Program Pemasaran Pariwisata	470.000.000,00
19	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.015.000.000,00
20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.086.092.008,00
21	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	878.313.012,00
	Total	12.676.124.428,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026

3. Kemiskinan

Pada tahun 2027 angka kemiskinan Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 7,52 - 8,27 persen. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 5.6.
Program dan Pagu Indikatif terkait Kemiskinan/Kemiskinan Ekstreem
Kota Tasikmalaya Tahun 2027

No	Program	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	29.992.990.552,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No	Program	Pagu Indikatif (Rp.)
	(Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)	
2	Program Pemberdayaan Sosial	642.500.000,00
3	Program Rehabilitasi Sosial	12.279.780.760,00
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.695.000.000,00
5	Program Penanganan Bencana	435.000.200,00
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	120.000.000,00
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.086.092.008,00
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.728.429.073,00
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.040.000.000,00
10	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.015.000.000,00
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.144.450.000,00
12	Program Kawasan Permukiman	1.903.800.000,00
13	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.320.000.000,00
	Total	64.403.042.593,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026

4. Indeks Gini

Pada tahun 2027 Indeks Gini Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 0,338 - 0,381 poin. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 5.7.
Program dan Pagu Indikatif terkait Indeks Gini
Kota Tasikmalaya Tahun 2027

No	Program	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.000.000,00
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	15.000.000,00
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	117.000.000,00
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	506.200.000,00
5	Program Pengembangan UMKM	105.000.000,00
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.427.825.300,00
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	193.800.000,00
8	Program Pengembangan Ekspor	903.000.000,00
9	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5.000.000,00
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	700.898.500,00
11	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	15.000.000,00
12	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	30.000.000,00
13	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	422.084.016,00
14	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.427.825.300,00
15	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	260.000.000,00
16	Program Pelayanan Penanaman Modal	120.000.000,00
17	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50.000.000,00



No	Program	Pagu Indikatif (Rp.)
18	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	340.911.592,00
19	Program Pemasaran Pariwisata	470.000.000,00
20	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.015.000.000,00
21	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.086.092.008,00
22	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	878.313.012,00
Total		17.103.949.728,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2027 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 77,17 poin. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 5.8.
Program dan Pagu Indikatif terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Tasikmalaya Tahun 2027

No	Program	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	114.920.180.000,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	5.000.000,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.156.612.000,00
4	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	71.782.000,00
5	Program Pembinaan Perpustakaan	939.182.805,00
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	70.142.813.623,00
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	707.714.016,00
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.593.024.200,00
9	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	120.000.000,00
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.086.092.008,00
11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	878.313.012,00
12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.400.000.000,00
Total		205.020.713.664,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026

6. Prevalensi Stunting

Pada tahun 2027 Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 15,73 persen. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.



Tabel 5.9.
Program dan Pagu Indikatif terkait Prevalensi Stunting
Kota Tasikmalaya Tahun 2027

No	Program	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	70.142.813.623,00
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.105.525.000,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.195.420.000,00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.790.000.000,00
Total		78.233.758.623,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah 2026.

Dalam upaya mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027 maka disusun prioritas dan sasaran pembangunan, program prioritas, pagu indikatif serta perangkat daerah penanggung jawab sebagaimana tabel berikut:



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Tabel 5.10.

Prioritas Pembangunan, Sasaran, Program Prioritas, Pagu Indikatif dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab dalam Rangka Pencapaian Sasaran Pembangunan Tahun 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya	S.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya prevalensi stunting dan meningkatnya gizi serta derajat kesehatan masyarakat	IS1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,17	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	70.142.813.623,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
				IS2. Umur Harapan Hidup	Tahun	75,81	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	707.714.016,00	
				IS3. Prevalensi Stunting	%	15,73	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	834.236.500,00	
				IS4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	100,0	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.593.024.200,00	
		S.2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	IS5. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,87	Program Pengelolaan Pendidikan	114.920.180.000,00	Dinas Pendidikan
				IS6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,60	Program Pengembangan Kurikulum	5.000.000,00	
							Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.156.612.000,00	
							Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	71.782.000,00	
							Program Pembinaan Perpustakaan	939.182.805,00	
							Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	92.000.000,00	
		S.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	IS7. Tingkat Kemiskinan	%	7,52 - 8,27	Program Pemberdayaan Sosial	642.500.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Rehabilitasi Sosial	12.279.780.760,00	
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.695.000.000,00	
							Program Penanganan Bencana	435.000.200,00	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	97.500.000,00	
		S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Meningkatnya masyarakat yang religius dan berbudaya	IS8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	98,25	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	28.268.790.600,00	Sekretariat Daerah
				IS9. Indeks Kerukunan Beragama	Poin	70,74	Program Pengembangan Kebudayaan	365.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				IS10. Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya	Poin	44,79	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	660.000.000,00	
							Program Pembinaan Sejarah	50.000.000,00	
							Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	70.000.000,00	
		S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya ketahanan keluarga serta prestasi pemuda dan olahraga	IS11. Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	62,61	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.977.411.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
				IS12. Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,249	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.105.525.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				IS.13. Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	62,96	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	74.090.000,00	
							Program Perlindungan Perempuan	100.000.000,00	
							Program Peningkatan Kualitas Keluarga	280.000.000,00	
							Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	355.000.000,00	
							Program Perlindungan Khusus Anak	291.084.016,00	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan	S.6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Meningkatnya pengembangan usaha para pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif	IS14. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,04 - 6,77	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.400.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.068.072.128,00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				IS15. Indeks Gini	Poin	0,338 - 0,381	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
				IS16. Inflasi	%	1,00-3,00	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	15.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
				IS17. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	36,65	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	120.000.000,00	
				IS18. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	79,50	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	117.000.000,00	
				IS19. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	79,50	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	506.200.000,00	
				IS19. Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	37,54	Program Pengembangan UMKM	105.000.000,00	
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.427.825.300,00	
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	193.800.000,00	
							Program Pengembangan Ekspor	903.000.000,00	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	422.084.016,00	
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5.000.000,00	
							Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	700.898.500,00	
							Program Pengendalian Izin Usaha Industri	15.000.000,00	
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	30.000.000,00	
							Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	408.142.008,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.040.000.000,00	
							Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	220.000.000,00	
							Program Penyuluhan Pertanian	20.000.000,00	
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.086.092.008,00	
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	878.313.012,00	
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	
							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	340.911.592,00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
							Program Pemasaran Pariwisata	470.000.000,00	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.015.000.000,00	Sekretariat Daerah
							Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	75.000.000,00	
							Program Perekonomian dan Pembangunan	1.181.099.558,00	
		S7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	IS20. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,00	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.339.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	695.000.000,00	
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	50.000.000,00	
							Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.728.429.073,00	
		S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	IS21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	32,92	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	393.000.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
							Program Penempatan Tenaga Kerja	556.886.927,00	
				IS22. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,76 - 6,20	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Program Hubungan Industrial	719.561.000,00	
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	260.000.000,00	
							Program Promosi Penanaman Modal	110.000.000,00	
							Program Pelayanan Penanaman Modal	120.000.000,00	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50.000.000,00	
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	S.9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	Meningkatnya pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah berbasis digital	IS23. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	89,09	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.933.992.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				IS24. Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	5,82	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	865.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.776.530.000,00	
							Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.810.000.000,00	
							Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	125.000.000,00	
							Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.870.000.000,00	
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	737.917.690,00	
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.993.958.454,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.275.705.000,00	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.287.410.500,00	Badan Pendapatan Daerah
							Program Penyelenggaraan Pengawasan	556.146.286,00	Inspektorat Daerah
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	303.895.000,00	
							Program Kepegawaian Daerah	629.908.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	300.000.000,00	
							Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11.815.458.192,00	Sekretariat DPRD
							Program Pengelolaan Arsip	343.400.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.402.500.000,00	Seluruh Kecamatan
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.021.054.600,00	
							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	335.050.000,00	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	999.872.350.471,27	Seluruh SKPD
		S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik	Meningkatnya penerapan IPTEK, ekosistem Riset dan Inovasi daerah dalam pelayanan publik	IS25. Indeks Inovasi Daerah	Poin	54,00	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	920.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.464.771.700,00	
							Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49.995.000,00	
							Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	45.005.000,00	
							Program Pendaftaran Penduduk	43.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata	S.11. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar daerah yang layak, aman dan nyaman	IS26. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	64,83	Program Pencatatan Sipil	137.200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	46.000.000,00	
							Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.000.000,00	
							Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	400.000.000,00	
							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.976.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.877.400.000,00	
							Program Penyelenggaraan Jalan	20.807.130.500,00	
							Program Penataan Bangunan Gedung	5.305.804.271,00	
							Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.195.420.000,00	
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.790.000.000,00	
							Program Penatagunaan Tanah	4.896.000,00	
							Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	10.000.000,00	
							Program Pengembangan Perumahan	1.450.000.000,00	
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	897.200.000,00	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	S.12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengelolaan persampahan yang baik dan terpadu	IS27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	61,96	Program Kawasan Permukiman	1.903.800.000,00	Dinas Perhubungan
							Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.320.000.000,00	
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	35.877.722.840,00	
							Program Perencanaan Lingkungan Hidup	414.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.104.632.000,00	
							Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.313.920.000,00	
							Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	70.000.000,00	
							Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	35.000.000,00	
							Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	175.000.000,00	
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	230.000.000,00	
							Program Pengelolaan Persampahan	26.598.809.526,00	
		S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan	Meningkatnya keselamatan masyarakat dan	IS28. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	ton CO ² eq	2,56	Program Penanggulangan Bencana	748.750.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Program Prioritas	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		perubahan iklim	keberlanjutan lingkungan	IS29. Indeks Risiko Bencana	Poin	86,58	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	771.769.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	750.104.000,00	

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah Tahun 2026.



Guna menciptakan fondasi yang kuat bagi keberhasilan pembangunan nasional, kegiatan prioritas, dan Proyek Strategis Nasional, pemerintah menetapkan 17 (tujuh belas) program prioritas presiden. Program lintas sektor ini mengedepankan langkah taktis berupa program hasil terbaik cepat (*quick wins*) yang diformulasikan secara terukur, cepat, dan tepat untuk menyelesaikan berbagai tantangan serta permasalahan utama yang ada. Dukungan Kota Tasikmalaya tahun 2027 terhadap ketercapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 5.11.
Dukungan Kota Tasikmalaya terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

PHTC	KONTRIBUSI	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil		
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.555.314.000,00
2.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	655.000.000,00
2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten		
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	15.314.000,00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	15.519.000,00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.917.160,00
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.385.697.800,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	74.921.940,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	994.638.400,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.447.418.400,00
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15.440.000,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.970.510.000,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	59.273.949,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	679.380.000,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	53.105.500,00
3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional		
1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	180.000.000,00
2	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40.000.000,00
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	120.000.000,00
4	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	2.500.000,00
5	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.235.000.000,00
6	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	213.429.073,00
7	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	35.000.000,00
8	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.856.200.000,00
9	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	485.000.000,00
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	635.000.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

PHTC	KONTRIBUSI	PAGU INDIKATIF
1	2	3
4)	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.100.000.000,00
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.085.000.000,00
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.995.000.000,00
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	635.000.000,00
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	200.000.000,00
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	350.000.000,00
7	Pembangunan Laboratorium	15.000.000,00
5)	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	
1	Penyediaan Permakanan	200.000.000,00
2	Penyediaan Permakanan (PMKS)	380.000.000,00
3	Penyediaan Sandang	120.000.000,00
4	Penyediaan Alat Bantu	150.000.000,00
5	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.992.990.552,00
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.835.000.000,00
6)	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.050.000.000,00
4	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	578.800.000,00
5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.725.420.000,00
6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	500.000.000,00
7	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.260.000.000,00
8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	180.000.000,00
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.529.450.000,00
10	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	5.448.123.000,00
11	Penanganan sampah melalui pengangkutan	5.538.227.500,00
12	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	425.000.000,00
13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (69 Kelurahan)	12.207.460.788,00

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

Dalam mendukung sinergitas pembangunan antara progam pusat dan daerah, pemerintah daerah wajib melaksanakan Program Strategis Nasional (ProSN) dan Tematik Nasional dengan mencantumkan dalam dokumen perencanaan serta mendukung dengan mengalokasikan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Dukungan program prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya terhadap ProSN dan Tematik Nasional Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

Tabel 5.12.
Dukungan Program dan Prioritas Pembangunan Daerah terhadap
Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2027

No.	ProSN	Proyek / Kegiatan / Tematik	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah
1.	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	445.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.000.000.000,00	
		Sekolah Rakyat	P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	690.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	
		Pembangunan Tiga Juta Rumah	P.4. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	240.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	160.000.000,00	
2.	Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	P.4. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.320.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.856.200.000,00	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	ProSN	Proyek / Kegiatan / Tematik	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah
3.		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	10.000.000,00	
		Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	2.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	2.500.000,00	
	Kesehatan Untuk Semua	Makan Bergizi Gratis	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	70.000.000,00	Dinas Pendidikan
			P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	65.290.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	14.775.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	710.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.555.314.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	300.080.700,00	
			P.4. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.725.420.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	ProSN	Proyek / Kegiatan / Tematik	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	825.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.992.990.552,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	906.958.500,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	956.635.500,00	
			P.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.992.990.552,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
			P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			P.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.970.510.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15.440.000,00	
			P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.000.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			P.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	ProSN	Proyek / Kegiatan / Tematik	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah
4.	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000,00	Dinas Pendidikan
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000,00	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000,00	
		Digitalisasi Pembelajaran	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.000.000,00	Dinas Pendidikan
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30.000.000,00	
5.	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2.500.000,00	
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	43.800.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6.	-	Ekonomi Syariah	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	445.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	10.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	ProSN	Proyek / Kegiatan / Tematik	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	293.560.800,00	Sekretariat Daerah
7.	-	Penanggulangan Bencana	P.5. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	48.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	-	Pengarusutamaan Gender	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30.000.000,00	Dinas Pendidikan
			P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	300.080.700,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	324.386.927,00	Dinas Ketenagakerjaan
			P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	5.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9.	-	Perlindungan Anak	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.800.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

No.	ProSN	Proyek / Kegiatan / Tematik	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	11.000.000,00	
			P.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	129.382.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.

Tabel 5.13.

Tingkat Dukungan Anggaran Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-Masing Prioritas Nasional Tahun 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengawasan Penanaman Modal	50,000,000.00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	43,800,000.00
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	1.000.000,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.000.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	645.898.500,00
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00
					Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	5.000.000,00
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	5.000.000,00
			Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	320.000.000,00
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	500.000.000,00
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	30.000.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan	5.150.370.500,00
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	10.000.000,00
					Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	8.000.000,00
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.698.130.800,00
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	29.952.000,00
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	825.000.000,00
					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	200.000.000,00
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	690.000.000,00
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	5.000.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00
					Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	2.500.000,00
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	2.500.000,00
					Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	2.500.000,00
8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	213.429.073,00
					Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	5.000.000,00
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	2.500.000,00
					Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	2.500.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	7.300.400,00
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10.008.000,00
10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30.000.000,00
					Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	100.000.000,00
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50.000.000,00
11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.050.000.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	550.000.000,00
12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan Transmigrasi	15.000.000,00
13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	491.000.000,00
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.000.000.000,00
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	378.000.000,00
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	7.000.000,00
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	374.357.100,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	11.857.200,00
					Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	12.170.000,00
16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	720.000.000,00
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	4.000.000,00
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Penyediaan Akses Internet	2.336.401.700,00
					Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	533.206.700,00
17.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60.000.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	590.000.000,00
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300.000.000,00
18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5.000.000,00
					Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	5.000.000,00
19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	70.000.000,00
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	410.000.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
					Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	20.000.000,00
20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000,00
					Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	420.000.000,00
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	50.000.000,00
					Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	15.000.000,00
21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	10.000.000,00
					Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	10.000.000,00
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	15.000.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
					Pemanfaatan Cagar Budaya	20.000.000,00
22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.000.000,00
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.000.000,00
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.000.000,00
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	405.000.000,00
23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1,000,000,000.00
24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	1.000.000.000,00
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	291.084.016,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	23.000.000,00
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.000.000,00
					Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	27.200.000,00
26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	90.000.000,00
					Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	80.000.000,00
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	50.000.000,00
					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	50.000.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	113.000.000,00
					Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	4.000.000,00
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	92.000.000,00
28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	50.000.000,00
					Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,00
					Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	50.000.000,00
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5.000.000,00
			Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat,	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	8.400.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
			dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar			
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	236.711.200,00
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	371.769.500,00
					Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	250.000.000,00
29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00
					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	27.700.000,00

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.



Untuk melihat tingkat dukungan prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, tabel di bawah ini menyajikan dukungan alokasi anggaran Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 5.14.
Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya		Pagu Indikatif (Rp)
P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Rp. 262.677.298.848,00
P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif	P 2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Rp. 17.539.813.921,00
		P 5	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Rp. 33.212.585.026,00
P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P 2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Rp. 6.812.829.073,00
		P 4	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	Rp. 83.515.573.611,00
P 4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i> .	P 3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Rp. 1.098.076.249.093,27

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2026.



BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi. IKD merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci (IKK). Sedangkan IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama
Kota Tasikmalaya Tahun 2027

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2025)	Target	
					2026 ⁽¹⁾	2027
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	76,59	76,99	77,17
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	Umur Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	75,66	75,63	75,81
3	Prevalensi Stunting	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100, Data Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)	N/A	17,02	15,73
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	102,3	100,00	100,00
5	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	Rata-Rata lama sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,64	9,79	9,87
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,51	13,56	13,60
7	Tingkat Kemiskinan	%	Persentase penduduk miskin yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	10,84	9,47	7,52-8,27
8	Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	Jumlah murid SD/SMP yang bisa membaca Al Quran/Jumlah seluruh murid SD/SMP yang beragama islam x 100	98,21	97,84	98,25
9	Indeks Kerukunan Beragama	Poin	Indeks Kerukunan beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI	84,72	70,37	70,74
10	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Poin	Nilai Dimensi pelestarian kebudayaan	43,55	34,17	44,79



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2025)	Target	
					2026 ⁽¹⁾	2027
	Kota Tasikmalaya					
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	Indeks Pembangunan Keluarga yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	N/A	61,91	62,61
12	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	Indeks Ketimpangan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,203	0,284	0,249
13	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	Instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda, dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	N/A	29,11	62,96
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,39	5,45	6,04 - 6,77
15	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	0,355	0,350	0,338 - 0,381
16	Inflasi	%	Persentase inflasi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	2,67	1,00-3,00	1,00-3,00
17	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada Pilar Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat	36,49	35,23	36,65
18	Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	Distribusi persentase PDRB kategori Industri, Jasa dan Perdagangan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	79,77	79,45	79,50
19	Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	(Jumlah Lembaga Keuangan Syariah Per Jumlah Total Lembaga Keuangan Dikali 100%) ditambah (jumlah produk ikm bersertifikat halal per jumlah produk ikm dikali 100%) ditambah (jumlah hotel menerapkan prinsip Syariah per jumlah hotel dikali 100%)/3	35,46	36,84	37,54
20	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	4,24	4,44	4,00
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	30,28	32,85	32,92
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Penangguran terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	6,43	6,34	5,76 - 6,20
23	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	88,62	87,88	89,09
24	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	Hasil penilaian Kemendagri berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu	5,80	5,82	5,82
25	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah berdasarkan penilaian Kementrian Dalam Negeri	52,57	51,00	54,00
26	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	Hasil analisis Tim Penyusun Tingkat Daerah	60,42	61,19	64,83
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	Gambaran kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)	69,50	61,79	61,96



NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2025)	Target	
					2026 ⁽¹⁾	2027
28	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihitung melalui aplikasi Aksara Bappenas	1,87	2,36	2,56
29	Indeks Risiko Bencana	Poin	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	90,78	90,10	86,58

Sumber: (1) RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026, Hasil Analisa Bappelitbangda, 2026.

Untuk mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya, perlu dipastikan bahwa IKU bukan hanya sekadar target kuantitatif tetapi cerminan dari intervensi strategis yang inovatif dan efisien. Pencapaian IKU harus didukung oleh pemantauan secara berkala dengan menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaporan. Pada intinya, keberhasilan kinerja IKU diukur dari dampak nyata (*outcome*) program dalam meningkatkan kesejahteraan, mengurangi disparitas, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.

Tabel 6.2 berikut menyajikan Proyeksi Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2027, yang merupakan tolok ukur fundamental untuk mengevaluasi dampak kumulatif program dan kegiatan pembangunan daerah pada RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027.

Tabel 6.2.
Proyeksi Capaian Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2027

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2025)	TAHUN	
				2026	2027
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,59	76,99	77,17
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,64	9,79	9,87
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,51	13,56	13,60
	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,66	75,63	75,81
	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	11,849	11,745	12,014
2.	PDRB Perkapita	Juta Rp	42,13	43,00	45,24 – 46,99
3.	PDRB ADH Berlaku	Triliyun Rp	31,99	32,96	34,61 – 35,13
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,45	6,04 - 6,77
5.	Inflasi	%	2,67	1,00-3,00	1,00 – 3.00
6.	Indeks gini	Poin	0,355	0,350	0,338 - 0,381
7.	Tingkat Kemiskinan	%	10,84	9,47	7,52 - 8,27
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,43	6,34	5,76 - 6,20
9.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar	1,87	2,36	2,56

Sumber: RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah, oleh karena itu seluruh OPD bertanggung jawab penuh untuk memastikan setiap IKD dicapai dengan dampak nyata dan akuntabel bagi kesejahteraan masyarakat, target kinerja IKD Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 6.3.
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	Indeks Ketahanan Pangan Publikasi Bapanas	78,097	75,00	76,00	78,2
2	Prevelensi Ketidacukupan konsumsi Pangan	%	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	4,24	4,44	4,24	4,00
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kwh/ Kapita	Pengukuran yang digunakan untuk mengukur penggunaan energi listrik oleh populasi	N/A	0,890	0,984	0,984
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	(Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum perpipaan dibagi total jumlah rumah tangga) x 100%	17,63	25,93	26,43	17,67
5	Indeks Kualitas lingkungan Hidup Daerah	Poin	Gambaran kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	69,5	61,79	61,96	61,96
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	(Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap SPALD-T + Jumlah Rumah Tangga dengan Akses terhadap Tangki Septic yang disedot setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam IPLT) / (Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya) x 100%	3,61	14,05	19,42	3,94
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihitung melalui aplikasi Aksara Bappenas	1,87	2,36	2,56	2,56
8	Indeks Risiko Bencana	Nilai	Tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunannya, yaitu bahaya, keterpaparan dan kapasitas pemerintah, serta komunitas dalam menghadapi bencana dan dikeluarkan oleh BNPB	90,78	90,10	86,58	86,58
9	Indeks Ketahanan daerah	%	Kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi	0,62	0,56	0,58	0,69
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu	1,24	1,27	1,3	1,3
11	Rasio Penduduk	%	Perbandingan jumlah penduduk dalam kelompok tertentu, misalnya perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan, atau perbandingan jumlah penduduk usia muda dengan penduduk usia tua	102,28	102,09	101,9	101,9



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
12	Kepadatan Penduduk	Orang per Km2	Banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah	4.146	4.299	4.348	4.348
13	Kapasitas Air Baku	(m3/detik)	Total Kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan domestik, perkotaan, industri dan lain lain disetiap sumber air (mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber lainnya)	0,9	1,08	1,09	0,92
14	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/ Hari	Sampah yang terkumpul dikurangi jumlah sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) ditambah residu dari fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari)	54,82	81,71	82,68	82,68
15	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) *	%	Jumlah rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah / Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan x 100	55,97	73,73	74,7	74,7
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,39	5,45	5,46-6,19	6,04 - 6,77
2	Tingkat Kemiskinan	%	Persentase penduduk miskin yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	10,84	9,47	7,52-8,49	7,52 - 8,27
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	PDRB Per Kapita berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	42,13	43,00	45,24-46,99	45,24-46,99
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	6,43	6,34	5,49-5,89	5,76 - 6,20
5	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	0,355	0,350	0,346-0,403	0,338 - 0,381
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	76,59	76,99	77,51	77,17
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	Usia Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	75,66	75,63	75,81	75,81
8	Prevalensi Stunting	%	Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)	N/A	17,02	15,73	15,73
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,64	9,79	9,87	9,87
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,51	13,56	13,6	13,60
11	Nilai Rapor Pendidikan	Poin	Kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah	71,42	78,92	78,94	71,62
12	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi						



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
	minimum pada asesmen tingkat nasional untuk* (SD/SMP):						
	Literasi SD	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	75,18	70	72,70	75,38
	Numerasi SD	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	69,70	64	66,66	69,70
	Literasi SMP	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	87,71	77,2	77,20	87,91
	Numerasi SMP	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	81,42	68,69	68,69	81,62
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	Nilai yang diperoleh dari Perpustakaan RI/Swasta	17,64	77,01	77,50	17,75
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	102,3	100,00	100,00	100
15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	Indeks Ketimpangan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,203	0,284	0,249	0,249
16	Indeks Pembangunan Gender	Poin	(Indeks Pembangunan Manusia Perempuan) / (Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki) * 100. Dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	93,41	93	93,03	93,03
Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pendidikan						
1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,64	9,79	9,87	9,87
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	6,87	5,32	4,97	4,97
2.2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	84,71	84,83	63,1	63,1
2.3	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan Kesehatan	%	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	100	100	100	100
2.4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100, Data Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)	N/A	17,02	15,73	15,73
2.5.	Penanganan Tuberkulosis:						
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	Jumlah kasus TB yang diobati (ditemukan dan memulai pengobatan) dibagi Estimasi jumlah seluruh kasus TB di populasi kali seratus	147	100	100	100
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	Jumlah pasien TB yang sembuh ditambah jumlah pasien TB yang menyelesaikan pengobatan terhadap seluruh	85	90	91	91



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
			pasien TB baru yang tercatat memulai pengobatan pada periode tertentu kali seratus				
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Angka Ketergantungan	%	Angka Ketergantungan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	45,58	45,5	45,6	45,45
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Distribusi persentase PDRB kategori industri pengolahan terhadap PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	12,94	12,95	12,87	12,87
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	Distribusi persentase PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	6,32	6,47	6,65	6,65
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	Σ PDRB 17 sektor ekonomi kreatif regional/PDRB x 100% yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,66*	1,71	1,73	1,73
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	66,31	69,92	70,42	70,42
6	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri	52,57	51,00	52,00	54,00
7	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Nilai	Indeks Ekonomi Hiiu pilar ekonomi yang dihitung dan dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi	36,49	35,23	36,65	36,65
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	Distribusi persentase PMTB berdasarkan PDRB pengeluaran hasil penghitungan dikeluarkan oleh BPS	30,38	32,85	32,92	32,92
9	Ekspor Barang dan Jasa	%	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) = total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB sisi pengeluaran (Milyar Rupiah) / PDRB ADHB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	-14,39	-13,71	-13,31	-13,31
10	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	Penjumlahan dari (0,67 x Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) ditambah (0,25 x Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan) ditambah (0,08 x Rasio Konektivitas)	60,42	61,19	62,02	64,83
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan berdasarkan hasil perhitungan dan dikeluarkan oleh BPS	51,22	53,04	54,25	54,25
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	Indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian daerah (Penerimaan Pajak Daerah / PDRB) x 100%	0,73	0,61	0,62	0,62
13	Tingkat Inflasi	%	Tingkat Inflasi yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	2,67	1,00 -3,00	1,00 -3,00	1,00 -3,00
14	Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%	Distribusi persentase PDRB kategori Pertanian dan Perikanan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	5,23	5	5	5,3
15	Rasio kewirausahaan	%	Berusaha dibantu buruh tetap daerah / total angkatan kerja daerah x 100%	5,54	5,26	5,42	5,96
16	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	919	723	729	937
17	Jumlah Kerjasama Internasional	Buah	Jumlah Kerjasama Internasional	-	-	N/A	-



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Hasil Penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum Republik Indonesia	97,78	97,88	97,93	97,93
2	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	4,18	-	-	-
3	Indeks Pemerintah Digital	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pemerintah Digital berdasarkan Penilaian dari Menpan RB	N/A	2	2,1	2,1
4	Indek Pelayanan Publik	Nilai	IPP hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KemenpanRB	4,5	4,36	4,42	4,52
5	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	jumlah perda dan perkara yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan perda dan perkara yang memuat sanksi dikali 100	100	100	100	100
6	Tingkat Partisipasi Memilih	%	Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya yang menggunakan hak pilihnya/ Jumlah masyarakat yang terdaftar x 100%	-	N/A	-	-
7	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka	(T x Pn) T = Total jawaban Respon Pn = Pilihan angka Skor likert	62,81	69,00	70,00	70
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat kabupaten/kota untuk merefleksikan tingkat produktivitas daerah, dikeluarkan oleh BRIN	4,05	3,98	3,99	4,09
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	88,62	87,88	89,09	89,09
10	Indeks Masyarakat Digital	Poin	Penilaian dari Kementrian Komunikasi dan Digital RI	56,24	48,08	48,34	48,34
INDIKATOR KINERJA KUNCI							
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan						
1.1	Nilai Rapor Pendidikan	Poin	Kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah	71,42	78,93	78,94	71,62
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (PAUD)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (PAUD)	92,22	80,51	80,58	92,42
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (SD)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (SD)	99,22	97,45	97,54	99,23
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (SMP)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (SMP)	99,22	97,51	97,57	99,23
1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	15,16	20,00	22,25	22,25



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
1.6	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	(Total Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal / Total Satuan Pendidikan) *100%	100	100	100	100
1.7	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	(Total Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik / Total Guru) * 100%	47,41	47,42	47,43	47,43
1.8	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	(Total prestasi yang diraih dalam O2SN / Jumlah Peserta O2SN Tingkat Provinsi) * 100%	19,74	25,2	25,25	25,25
2	Kesehatan						
2.1	Prevalensi Stunting	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	N/A	17,02	15,73	15,73
2.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	6,87	5,32	4,97	4,97
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	84,71	84,83	63,1	63,1
2.4	Persentase Masyarakat Miskin mendapat Jaminan Kesehatan	%	(Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat Jaminan Kesehatan / Jumlah Masyarakat Miskin) x100%	102,3	100	100	100
2.5	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan Masyarakat	Poin	Rata-rata nilai capaian SPM Kesehatan masyarakat	100	99	99,2	100
2.6	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	73	81	76	76
2.7	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	9	13	11	11
2.8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	Jumlah pasien TB yang sembuh ditambah jumlah pasien TB yang menyelesaikan pengobatan terhadap seluruh pasien TB baru yang tercatat memulai pengobatan pada periode tertentu kali seratus	85	90	91	91
2.9	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	Jumlah kasus TB yang diobati (ditemukan dan memulai pengobatan) dibagi Estimasi jumlah seluruh kasus TB di populasi kali seratus	147	100	100	100
2.10	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah bayi usia < 1 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap terhadap Jumlah sasaran bayi (< 1 tahun) kali seratus	91,1	100	100	100
2.11	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi/registrasi terhadap Jumlah seluruh tenaga kesehatan kali seratus	N/A	75	80	80
2.12	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	Persentase sarana kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman yang diperiksa	82,12	78	79	79,00
2.13	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat	%	Jumlah TPP yang memenuhi syarat higiene-sanitasi (hasil pemeriksaan) terhadap Jumlah TPP yang diperiksa pada periode laporan kali seratus	70,5	75	80	80,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
2.14	Persentase Pangan Olahan Siap Saji (POSS) memenuhi syarat	%	Jumlah sampel POSS yang memenuhi syarat uji mutu dan keamanan terhadap Jumlah sampel diperiksa kali seratus	100	75	80	80,00
2.15	Persentase Peningkatan upaya promkes, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, persentase penumbuhan kesadaran dalam peningkatan derajat keluarga dan lingkungan dalam penerapan PHBS	%	Jumlah kegiatan/promosi/advokasi/kemitraan yang terlaksana ditambah Jumlah rumah tangga/individu/lingkungan yang menerapkan PHBS terhadap Jumlah kegiatan yang direncanakan ditambah jumlah rumah tangga/individu/lingkungan yang menjadi sasaran kali seratus	N/A	51	52	52
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	Dihitung dari Hasil Survey Parameter Kemantapan Jalan yang Sesuai dengan SNI	80,75	92,13	92,40	82,00
3.2	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terdampak Oleh Irigasi	%	(Luas Sawah yang Terdampak Irigasi (Ha)/Total Luas Sawah dalam Kewenangan Kota (1749 Ha)) x 100%	27,91	46,35	47,4	47,4
3.3	Persentase Infrastruktur Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	Jumlah Infrastruktur yang Ditingkatkan Kualitasnya / Total Jumlah Infrastruktur di Luar Kawasan Permukiman Kumuh) x 100%	75,86	58,34	60,23	60,23
3.4	Capaian Rumah Tangga Yang Terlayani Akses SPAM Dan SPALD	%	(Persentase Capaian Rumah Tangga Berakses SPAM + Persentase Capaian Kk Berakses SPALD)/2	70,925	66,56	66,86	70,965
3.5	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda yang Memenuhi Ketentuan Bangunan	%	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/Lingkungan yang Ditingkatkan sesuai dengan RTBL nya (10%) + Persentase Jumlah Penyedia Jasa yang Mendapatkan Pembinaan (20%)	19,82	22,47	26,75	26,75
3.6	Persentase Luas Lahan yang Sesuai dengan Rencana Pola Ruang	%	(Luas Lahan yang Dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Pola Ruang / Luas Lahan yang Diberikan KKPR) x 100%	92,7	99,5	99,5	99,5
3.7	Persentase Peningkatan Jaringan Drainase Jalan Kota	%	(jumlah panjang saluran drainase kota yang dibangun dan direhab pada tahun berjalan / panjang jalan kota) x 100	0,76	0,83	0,83	0,83
3.8	Persentase Panjang Jaringan Sungai Yang Berfungsi Optimal	%	Panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal / Panjang jaringan sungai*100%	27,72	29,15	31,1	-
3.9	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	(panjang jaringan irigasi kondisi baik km/ panjang total jaringan irigasi kewenangan kota 332,53 km) x 100%	41,06	38,78	39,36	41,65
3.10	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda Yang Sesuai Standar Teknis	%	(Jumlah bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani PUTR yang memenuhi standar teknis / Jumlah bangunan gedung pemda yang ditangani PUTR) x 100%	N/A	49,92	51,22	51,22
3.11	Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%	(Panjang Jalan dalam Kondisi Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Luar Kawasan Permukiman Kumuh) x 100%	68,86	51,88	54,93	54,93
3.12	Persentase Infrastruktur Drainase Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%	(Jumlah Unit Drainase yang Berfungsi Baik / Total Jumlah Unit Drainase) x 100% atau (Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi Baik / Total Panjang Saluran Drainase) x 100%	64,3	64,79	65,54	65,54



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
3.13	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota	%	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota/Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Tasikmalaya * 100%	72,5	70,43	70,93	72,56
3.14	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap SPALD Berupa Akses Layak, Dan Akses Aman	%	(Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Layanan SPALD Berupa Akses Layak dan Aman / Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya) x 100%	69,35	62,69	62,79	69,37
3.15	IKM Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Nilai	Nilai IKM UPTD SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik)	84,09	84,00	84,00	84,09
3.16	Persentase Peningkatan Jaringan Jalan	%	Panjang jalan yang dibangun dan dipelihara / Total panjang jalan kota *100%	4,3	4,84	4,84	4,84
3.17	Persentase Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat Jasa Konstruksi	%	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat / jumlah tenaga kerja jasa konstruksi keseluruhan*100%	37,71	41,34	47,39	47,39
3.18	Persentase Luas Lahan Yang Dimanfaatkan Pemohon Pasca KKPR Terbit	%	Luas area pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen KKPR terhadap seluruh luas lahan yang diberikan KKPR *100%	N/A	99	99	99
4	Perumahan Dan Kawasan Permukiman						
4.1	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	(Total RTLH-Penanganan RTLH)/Total rumah di Kota Tasikmalaya x 100	43,15	42,82	42,6	42,60
4.2	Persentase Perumahan yang Layak dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	((30% x Target SPM) + (35% x Target penanganan kawasan kumuh) + (35% x Target pengelolaan PSU))	50,18	54,89	56,26	56,26
4.3	Persentase Perumahan yang Layak dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	Realisasi penyediaan rumahbagi korban bencana/Target penyediaan rumah bagi korban bencana x 100	100	100	100	100
4.4	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	Realisasi penyediaan rumah bagi korban relokasi/Target penyediaan rumah x 100	100	100	100	100
4.5	Persentase Perumahan yang Sesuai dengan Standar Bangunan dan Perumahan	%	Realisasi perumahan yang sesuai standar/Target perumahan yang sesuai standar x 100	100	100	100	100
4.6	Persentase Penanganan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	%	Luas penanganan kawasan kumuh kewenangan kota/Total kawasan kumuh kewenangan kota x 100	19,63	23,15	26,78	26,78
4.7	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kawasan Permukiman Kumuh	%	(Total RTLH di kawasan kumuh-Penanganan RTLH)/Total RTLH di Kota Tasikmalaya x 100	42,38	42,12	41,91	41,91
4.8	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak	%	(Total RTLH di luar kawasan kumuh-Penanganan RTLH)/Total RTLH di Kota Tasikmalaya x 100	57,34	57,26	57,15	57,15



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
	Huni) di Luar Kawasan Permukiman Kumuh						
4.9	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Jumlah unit rumah di perumahan yang tersedia PSU/Total unit rumah di perumahan x 100	38,04	47,95	48,25	48,25
4.10	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU	%	Realisasi Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU dibagi target pelayanan X 100	100	100	100	100
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
5.1	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada tahun n-1 dikurangi Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada Tahun n) dibagi Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada tahun n-1 dikali 100 %	3,66	4,00	4,50	4,5
5.2	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggar Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi	%	Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikurangi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n) dibagi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikali 100%	5,6	6,00	6,50	6,5
5.3	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	jumlah pelanggaran Perda dan Perkada dibagi Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	100	100	100	100
5.4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	Jumlah Gangguan Trantibum yang diselesaikan dibagi jumlah Laporan Gangguan Trantibum dikali 100 %	100	100	100	100
5.5	Persentase Anggota Linmas aktif	%	Jumlah anggota linmas yang melaksanakan tugas dibagi jumlah anggota linmas aktif dikali 100%	51	50	51	51
5.6	Indeks Ketahanan Daerah	%	Kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi	0,62	0,56	0,58	0,69
5.7	Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan yang Sesuai Respon Time	%	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang Sesuai Respon Time / Jumlah Layanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan x 100%	73,91	100	100	100
5.8	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan / Jumlah Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran X 100%	100	100	100	100
5.9	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	%	Jumlah (Si), untuk i =n 1 sampai 165 / 165	0,49	0,51	0,56	0,56



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
6	Sosial						
6.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	%	Jumlah Aduan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani / Jumlah Aduan PPKS Yang diterima X 100%	100	100	100	100
6.2	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang terlayani/jumlah PPKS yg membutuhkan layanan rehabilitasi sosial x 100%	95,54	100	100	100
6.3	Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran	%	Jumlah Masyarakat miskin penerima bantuan / Jumlah masyarakat miskin terdata x 100 %	116	100	100	100
6.4	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang diberi bantuan / jumlah korban bencana alam dan sosial yang diusulkan kelurahan X 100%	100,83	100	100	100
6.5	Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis	%	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan & mendapat pembinaan / Jumlah PSKS Aktif dan Terdaftar X 100%	100	100	100	100
6.6	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	%	Jumlah Makam yang terpelihara sesuai standar pada Taman Makam Pahlawan / Jumlah Makam di TMP Kusuma Bangsa X 100%	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
7	Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
7.1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta Rupiah/ Tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)/Jumlah penduduk yang bekerja	88,62	58,7	61,4	92,62
7.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	Jumlah angkatan kerja perempuan/ Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas x 100%	51,18	58,35	64,15	64,15
7.3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/Kota x 100%	-	-	N/A	-
7.4	Persentase peserta pelatihan yang lulus pelatihan berbasis kompetensi	%	Lulusan pelatihan yang lulus uji kompetensi BNSP/ jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi x 100%	100	100	100	100
7.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	Jumlah pencaker yang bekerja di dalam negeri/ jumlah pencaker yang terdaftar x 100 %	50,5	40,0	40	54,5
7.6	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	orang	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak dasar pekerja dan dialog sosial di perusahaan diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyusunan struktur dan skala upah, atau menjadi peserta pada program jaminan social ketenagakerjaan, atau pembentukan Lembaga Kerjasama bipartit. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online.	28.655	10.000	10.500	28.855



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
7.7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	Jumlah pekerja yang memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja x 100%	37,18	32,29	37,29	39,18
7.8	Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal/ Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas x 100%	1	1	1	1
7.9	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	Calon transmigran yang dibina dan diberdayakan dibagi calon transmigran yang mendaftar dikali 100%	N/A	100	100	100
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	(Indeks Pembangunan Manusia Perempuan) / (Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki) * 100. Dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	93,41	93	93,03	93,03
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Persentase Keterlibatan di Parlemen + Perempuan sebagai Tenaga Profesional + Sumbangan Pendapatan Perempuan	Belum Rilis	70	70,02	70,02
8.3	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	%	(Total Kasus Kekerasan terhadap Perempuan / Total Penduduk Perempuan) * 100%	0,014	0,021	0,02	0,020
8.4	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	%	(Total Kasus Kekerasan terhadap Anak / Total Penduduk usia Anak) * 100%	0,25	0,17	0,16	0,16
8.5	Persentase perangkat daerah yang menerapkan program PUG	%	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan ARG/jumlah perangkat daerah X 100	100	100	100	100
8.6	Persentase kasus yang tertangani	%	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti / jumlah laporan/pengaduan yang masuk X 100	100	100	100	100
8.7	Persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender	%	Jumlah keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender/jumlah keluarga x 100	100	100	100	100
8.8	Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang aktif	%	Jumlah lembaga yang melakukan melaksanakan pemenuhan hak anak/jumlah lembaga yg ada X 100	100	100	100	100
8.9	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	%	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan adalah bentuk layanan yang diberikan oleh petugas unit pelayanan terpadu dalam merespon aduan atau pelaporan oleh masyarakat dan/atau lembaga lain. Jika pelapor adalah bukan korban, maka petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan yang harus tetap dijaga	100	100	100	100
8.10	Persentase Data Terpilah yang Dimanfaatkan	%	(Total Data Gender dan Anak Terpilah yang dimanfaatkan / Total Data Gender dan Anak) x 100%	N/A	100	100	100
9	Ketahanan Pangan						
9.1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	Indeks Ketahanan pangan yang diitung dan dikeluarkan oleh Bapanas	78,097	75	76	78,2
9.2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	Jumlah CPP kab/kota / jumlah target CPP kab/kota yang ditetapkan	78,71	100	100	100
9.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dikali dengan bobot setiap kelompok pangan	95,9	95,2	95,3	96,1



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
			yang telah ditetapkan. Hasil perkalian ini kemudian dijumlahkan untuk setiap kelompok pangan				
9.4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	Jumlah daerah rentan rawan pangan/Jumlah Kelurahan x 100%	4,35	4,35	2,9	2,9
9.5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Jumlah pangan yang disampel x 100%	70,59	100	100	100
10	Pertanahan						
10.1	Persentase PKKPR tanah aset pemkot untuk pembangunan fasilitas umum fasilitas sosial	%	Jumlah tanah aset pemkot yang sesuai dengan peruntukan ruang / luas tanah aset pemkot yang diberikan PKKPR*100%	100	100	100	100
10.2	Persentase Kesesuaian Luas Tanah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum fasilitas sosial dengan rencana tata ruang	%	Luas tanah aset pemkot untuk pembangunan fasum fasos yang sesuai PKKPR / Luas tanah ases pemkot yang diperlukan untuk pembangunan fasum fasos	100	100	100	100
11	Lingkungan Hidup						
11.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	Hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah, yang dihitung dan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup	47,4	67,92	67,95	67,95
11.2	Indeks Kualitas Udara	Poin	$IKU = 100 - (50 / 0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$	79,44	63,84	64,04	64,04
11.3	Indeks Kualitas Air	Poin	$IKA = \sum_{(i=1)}^n W_i \times I_i$ W= Bobot Parameter i I = Nilai dari Parameter i	67,15	65,29	65,49	65,49
11.4	Indeks Kualitas Lahan	Poin	$DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ $IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL / LW) - DKK) \times 100)) 50 / 54,3)$	55,37	51,98	52,05	52,05
11.5	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Persentase Pengurangan Sampah + Persentase Penanganan Sampah	86,13	100	100	100
11.6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi total rekomendasi kajian lingkungan hidup yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan dikali 100	100	100	100	100
11.7	Persentase Penurunan Pencemaran	%	Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Berjalan dikurangi Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Sebelumnya (Persentase penurunan adalah Nilai Indeks Kualitas yang diperoleh dibagi dengan nilai indeks kualitas kategori baik (70) dikali 100)	3,94	0,2	0,2	0,2
11.8	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	%	Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola milik Pemerintah dibagi total luas Ruang Terbuka Hijau eksisting milik pemerintah dikali 100	100	100	100	100
11.9	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	Jumlah LB3 yg dikelola pihak ketiga berizin pada tahun berjalan dibagi jumlah LB3 yang dihasilkan dan dilaporkan pada tahun berjalan dikali 100	N/A	55	60	60



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
11.10	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH	%	Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang taat Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH dibagi Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi pada tahun berjalan dikali 100	10	10	10	10
11.11	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	Jumlah penyuluh yang melaksanakan peningkatan kompetensi dibagi total penyuluh aktif dikali 100	100	100	100	100
11.12	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan hidup dibagi jumlah target partisipasi masyarakat dibagi 100	100	100	100	100
11.13	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	%	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan pada tahun berjalan dibagi Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang teregistrasi pada tahun berjalan dikali 100	100	100	100	100
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
12.1	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Jumlah skor yang diperoleh/Jumlah maksimal skor x 100	83,89	85	86	86
12.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	Jumlah Kepemilikan KIA/Jumlah penduduk yang wajib memiliki KIA x100	51,94	48,70	49	49,00
12.3	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	Jumlah Pemanfaatan IKD/ Jumlah penduduk wajib KTP El yang sudah rekam x100 %	7,33	7,5	7,65	7,65
12.4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	%	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-4 thn)/Jumlah Penduduk Usia 0-4 thn x 100%	95,77	94,9	95,1	95,10
12.5	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	%	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan)/Jumlah Penduduk Berstatus Kawin x 100	87,93	87,8	87,95	87,95
12.6	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai	%	(Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian)/Jumlah Penduduk Berstatus Bercerai x 100%	87,61	69,8	70,25	70,25
12.7	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	(Jumlah Kepemilikan Akta Kematian/Jumlah Pelaporan Akta Kematian) x 100%	100	100	100	100
12.8	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan) /Jumlah target) x 100%	100	100	100	100
12.9	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Yang Dicetak sesuai Permendagri / Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga x 100%	100	100	100	100
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
13.1	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama tahun n dibagi jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada tahun n	Belum Rilis	2	2	2



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
13.2	Persentase rencana aksi pengendalian penduduk yang diterapkan	%	Laporan hasil pemutakhiran data keluarga	100	100	100	100
13.3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	Jumlah perempuan usia 15an-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern / jumlah total perempuan usia 15an-49 tahun yang sudah menikah atau sedang berhubungan x 100	65,28	68,5	69	69
13.4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Un Met Need)	%	Jumlah perempuan usia 15an-49 tahun yang ingin menunda atau tidak ingin ber-KB / jumlah total perempuan usia 15an-49 tahun yang menikah atau sedang berhubungan x 100	5,02	12,40	12,30	12,30
13.5	Persentase keluarga yang memenuhi delapan fungsi keluarga	%	Jumlah keluarga yang dilatih orientasi ketahanan keluarga / jumlah keluarga x 100	100	100	100	100
14	Perhubungan						
14.1	Rasio Konektivitas Kabupaten/kota	%	(Jumlah Trayek yg dilayani x Bobot Trayek)/jumlah Kebutuhan Trayek	63,19	66,48	68,13	68,13
14.2	V/C Rasio	poin	Volume Lalu Lintas / Kapasitas Jalan	0,340	0,340	0,334	0,334
14.3	Tingkat Keselamatan Transportasi	%	(Persentase Kendaraan Wajib Uji + Persentase Angkutan Umum Laik Jalan + Persentase Penyediaan Faslalin)/3	64,81	66,72	68,820	68,82
14.4	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	Fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia / Fasilitas Perlengkapan Jalan yang dibutuhkan	51,96	53,4	57,13	57,13
14.5	Konektivitas Darat	km	Jumlah Trayek yang Tersedia + Rencana Trayek Yang Akan Dilayani	451	487	504	504
15	Komunikasi dan Informatika						
15.1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	4,18	-	N/A	-
15.2	Indeks Pemerintah Digital	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pemerintah Digital berdasarkan Penilaian dari Menpan RB	N/A	2	2,1	2,1
15.3	Persentase Pemenuhan Dokumen Evidence Penilaian SPBE	%	Realisasi Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang terpenuhi/Jumlah Total Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang harus dipenuhi x 100	100	-	N/A	-
15.4	Peningkatan Kematangan Penerapan Pemerintah Digital	%	Persentase Perbandingan Hasil pengurangan Nilai Kematangan Penerapan SPBE tahun berjalan dengan Nilai Kematangan Penerapan SPBE tahun sebelumnya terrhadap Nilai Kematangan Penerapan SPBE tahun sebelumnya (Nilai Akhir - Nilai Awal)/Nilai Awal*100	N/A	1,2	1,2	1,2
15.5	Peningkatan Implementasi Smart City	%	Persentase Perbandingan Hasil pengurangan Nilai Implementasi Smart City tahun berjalan dengan Nilai Implementasi Smart City tahun sebelumnya terrhadap Nilai Implementasi Smart City tahun sebelumnya (Nilai Akhir - Nilai Awal)/Nilai Awal*100	N/A	1,6	1,6	1,6



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
15.6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi	78	94,5	95	95
15.7	Nilai pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Poin	Nilai yang dihasilkan pada indikator penilaian indeks keterbukaan informasi publik	78	-	N/A	-
15.8	Nilai Kualitas Informasi	%	Hasil Nilai Kualitas Informasi pada LHE Capaian Keterbukaan Informasi	N/A	100	100	100
15.9	Nilai Pelayanan Informasi	%	Hasil Nilai Pelayanan Informasi pada LHE Capaian Keterbukaan Informasi	N/A	100	100	100
16	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
16.1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	Volume usaha koperasi /PDRB atas dasar harga berlaku x 100	0,82	1,47	1,57	1,57
16.2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	(Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan) x100%	97,83	82,76	83,26	97,97
16.3	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	Volume usaha koperasi tahun n - (n-1)/Volume Usaha Koperasi Tahun n	2,22	1	2	3,21
16.4	Persentase Koperasi Aktif	%	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100%	54,61	57,6	59,4	59,4
16.5	Persentase koperasi sehat	%	Jumlah KSP/USP sehat dibagi Jumlah total KSP/USP x 100%	27,59	28,33	29,23	29,23
16.6	Persentase koperasi yang bersertifikat uji kompetensi	%	Jumlah koperasi yang bersertifikat kompetensi/ jumlah total koperasi x 100%	12,99	13,66	16,39	16,39
16.7	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (berdasarkan RAT, volume usaha dan aset) dibagi jumlah seluruh koperasi aktif	37,72	45,59	49,59	49,59
16.8	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	Jumlah usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal dibagi total usaha mikro	N/A	3,5	5,2	5,2
16.9	Pertumbuhan Wirausaha	%	(Jumlah wirausaha tahun n - jumlah wirausaha tahun n-1 dibagi jumlah wirausaha tahun n-1) x 100%	12,84	11,08	12,17	14,63
17	Penanaman Modal						
17.1	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	Jumlah investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	649,113	440	445	700
17.2	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	Persentase capaian pelayanan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	100	100	100	100
17.3	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	Realiasi RUPM/Jumlah tahapan dalam RUPM x 100%	N/A	2	5	5
17.4	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	Jumlah investor tahun n - jumlah investor n-1 dibagi Jumlah jumlah investor n-1 x 100%	N/A	10	10	10
17.5	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	(Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha) x100%	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
17.6	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor x 100%	-	10	5	5
17.7	Persentase data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	%	Jumlah Data dan Informasi yang dimanfaatkan / Jumlah Total Data dan Informasi yang tersedia x100	N/A	100	100	100
18	Kepemudaan dan Olahraga						
18.1	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	%	Rata-rata Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	42,73	57,67	57,78	42,83
18.2	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	(Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi di Tingkat Provinsi / Jumlah Cabang Olahraga yang Berpartisipasi) x 100%	48,28	55,55	51,11	51,11
18.3	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	(Jumlah pemuda berwirausaha/ jumlah pemuda di Kota Tasikmalaya) x 100	8,65	38,65	38,76	8,75
18.4	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	%	(Jumlah pemuda aktif di organisasi/ jumlah pemuda di Kota Tasikmalaya) x 100	76,81	76,69	76,81	76,91
18.5	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%	(Jumlah intervensi sarpras olahraga/ Target intervensi terhadap sarpras olahraga) x 100	30	20	40	40
18.6	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga	%	(Jumlah cabang olahraga yang dibina / jumlah cabang olahraga) x 100	52,73	44,44	48,89	53,13
18.7	Persentase cabang olahraga masyarakat yang dibina	%	(Jumlah induk olahraga masyarakat atau [INORGA] yang dibina / Jumlah INORGA) x 100	16,13	19,23	19,23	19,23
19	Statistik						
19.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berdasarkan Penilaian dari Badan Pusat Statistik	3,01	3,2	3,1	3,1
19.2	Persentase Peningkatan pengunjung web open data	%	Jumlah Pengunjung Tahun Sekarang-Jumlah Pengunjung Tahun Kemarin/Jumlah Pengunjung Tahun KemarinTahun Kemarin x 100	25,53	-	N/A	-
19.3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dlm penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah/Jumlah OPD yang ada di Pemerintah Kota*100	N/A	100	100	100
20	Persandian						
20.1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	%	Laporan Hasil Evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 270001 (Nilai Hasil Indeks KAMI/Jumlah Total Nilai Indeks KAMI x 100)	58,61	-	N/A	-
20.2	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 270001	N/A	400	450	450
20.3	Nilai kelengkapan pengamanan informasi	Poin	Nilai yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	538	-	N/A	-
20.4	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	Poin	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	N/A	140	160	160



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
20.5	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM)	Poin	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM) yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	N/A	260	290	290
21	Kebudayaan						
21.1	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan sejarah Daerah	%	Rata-rata persentase capaian program urusan kebudayaan	17,88	16,32	16,33	31,27
21.2	Persentase Intervensi Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	%	(Rata-rata Persentase Capaian Pengembangan Kebudayaan)	37,36	53,47	37,67	41,76
21.3	Persentase Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	(Jumlah Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan tahun N - Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan tahun N-1)/Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan tahun N-1) x 100%	6,29	6,67	13,33	13,33
21.4	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	(Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan / target pelestarian) x 100	10	20	30	30
21.5	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya) x 100	0	20	20	40
21.6	Persentase Museum yang Dilestarikan	%	(Jumlah Museum yang Dilestarikan / Jumlah Museum) x 100	0	100	100	0
22	Perpustakaan						
22.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin	Nilai yang diperoleh dari Perpustakaan RI/Swasta	17,64	77,01	77,5	17,75
22.2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	Ukuran perbandingan antara jumlah koleksi yang tergolong sebagai Koleksi Nasional dan/atau Naskah Kuno dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan yang tercatat	N/A	20	40	40
22.3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah ukuran yang menunjukkan intensitas, frekuensi, durasi, dan jenis aktivitas membaca yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui bahan bacaan cetak maupun digital, yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk perpustakaan, toko buku, maupun media daring	63,36	82,4	82,4	82,4
23	Kearsipan						
23.1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal	Nilai	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal dari Provinsi Jawa Barat, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	76,39	65,00	65,25	76,45
23.2	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal	Nilai	Rata-rata Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah, dengan kategori:	62,21	64,00	64,50	64,50



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
			a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)				
23.3	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	Persentase jumlah arsip dinamis, statis, dan sikh/jikn yang sudah dibuatkan daftar dibagi dengan jumlah keseluruhan arsip dinamis, statis, dan sikh/jikn	100,00	100,00	100,00	100,00
23.4	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	nilai capaian aspek PAS + PAI dibagi nilai standar dalam LAKE x 100 %	61,33	61,58	61,83	61,83
23.5	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup yang terselesaikan(dipenuhi)/ jumlah permohonan kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan						
1.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Angka produksi perikanan budidaya	10.048,60	10.000	10.050	10.100,00
1.2	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/Tahun	Jumlah Ikan yang dikonsumsi dibagi jumlah penduduk	15,13	44,00	44,25	15,25
1.3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Angka produksi perikanan tangkap	100,35	102	103	103,00
2	Pariwisata						
2.1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	667.484	668.521	645.105	669.558
2.2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	Distribusi persentase PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	6,32	6,47	6,65	6,65
2.3	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	%	(Jumlah destinasi pariwisata yang diintervensi / Jumlah destinasi pariwisata pada Ripparkot) x 100	46,15	42,86	44,90	50,77
2.4	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Daerah	%	(Jumlah pelaksanaan pemasaran dalam dan luar daerah / Jenis pemasaran) x 100	66,67	40,00	60,00	66,67
2.5	Persentase Jenis Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	(Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan / Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif) x 100	-	-	23,53	23,53
2.6	Persentase Usaha Pariwisata dan Subsektor ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	(Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekraf yang dikembangkan / jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekraf) x 100	33,33	23,33	26,67	55,56
3	Pertanian						
3.1	Produksi Komoditas Peternakan	Ton	Angka produksi Peternakan	16.609,27	13.150,00	13.200,00	16.800,00
3.2	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Angka produksi tanaman pangan	62.241,75	61.500,00	62.000,00	62.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
3.3	Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	Angka produksi hortikultura dan perkebunan	3.372,42	5.900,00	6.000,00	6.000,00
3.4	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	Perda LP2B	1.351	1.351	1.351	1.351
3.5	Tingkat Pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	Persentase penanganan kejadian kasus penyakit hewan menular	100	100	100	100
3.6	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol veteriner)	%	(Jumlah Unit Usaha dengan Sertifikat Pra NKV atau NKV / Total Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan) x 100%	N/A	1	1	1
3.7	Persentase penanganan bencana pertanian	%	Jumlah areal terdampak bencana yang ditanggulangi / Jumlah total areal terdampak bencana x 100	100	75	75	75
3.8	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	(Jumlah Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim yang Dilakukan / Total Jumlah Kegiatan yang Direncanakan) x 100%	100	75	75	75
3.9	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	%	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan perizinan	100	100	100	100
3.10	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	Jumlah kelompok naik kelas / Jumlah kelompok x 100%	100	5,7	5,8	5,8
3.11	Persentase kelembagaan tani yang dibentuk dan beroperasi	%	Persentase kelembagaan tani yang aktif beroperasi dari total kelembagaan tani yang terbentuk.	100	60	60	100
4	Perdagangan						
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	Distribusi persentase PDRB kategori perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	20,69	20,75	20,51	20,51
4.2	Persentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	(Jumlah Ijin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi / Total Jumlah Permohonan Ijin Usaha Perdagangan) x 100%	100	100	100	100
4.3	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	(Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya / Total Jumlah Sarana Perdagangan yang Direncanakan untuk Ditingkatkan) x 100%	30	60	70	70
4.4	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	Persentase = (Jumlah Hari dengan Harga Stabil / Total Jumlah Hari dalam Periode Tertentu) x 100%	69,39	40,82	42,86	69,39
4.5	Nilai ekspor barang	(Juta)US\$	Jumlah Barang yang Diekspor x Harga Barang per Unit atau Total Nilai FOB (Free On Board) dari Barang yang Diekspor	19,14	21,80	22,80	22,80
4.6	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang	100	100	100	100
4.7	Persentase peningkatan omset pelaku usaha yang difasilitasi promosi	%	((Omset Setelah Promosi - Omset Sebelum Promosi) / Omset Sebelum Promosi) x 100%	N/A	36,57	37,57	37,57
5	Perindustrian						



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
5.1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Distribusi persentase PDRB kategori industri pengolahan terhadap PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	12,94	12,95	12,87	12,87
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	%	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100	100	100	100
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri yang dikeluarkan	%	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan	5,47	17,60	18,30	18,30
5.4	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	1) Informasi Industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (0%). 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%). Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	100	100	100	100
	Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan						
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
1.1	Nilai Komposit Kelembagaan	Nilai	Nilai Komposit Kelembagaan Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	84,37	83,25	83,75	85,25
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	Nilai	Nilai IKM pemerintah Daerah hasil penilaian Evaluator Tim Kota	89,05	88,15	88,35	89,10
1.3	Nilai Dimensi Pelaporan Kinerja dalam Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja yang Dinilai Oleh Kemenpan-RB	10,97	10,9	11,2	11,20
1.4	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Hasil Penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum Republik Indonesia	96,6	97,88	97,93	100,00
1.5	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	IPP hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KemenpanRB	4,5	4,36	4,42	4,52
1.6	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	Indeks Kualitas Kebijakan Hasil Penilaian Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)	86,10	71,70	71,80	86,12
1.7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	Indeks Tata Kelola Pengadaan Hasil Penilaian LKPP	71,21	71,71	74,64	74,64



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
1.8	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	Nilai	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	43,75	44	44,25	44,25
1.9	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Proses	Nilai	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Proses Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	39,00	39,25	39,5	39,50
1.10	Rata-rata Indeks pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	Jumlah IPP Perangkat Daerah/Jumlah PD (hasil FEKPPP Mandiri)	3,25	3,55	3,6	4,00
1.11	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM kategori "Sangat Baik" (88,31 - 100)	%	(Jumlah PD dengan Nilai IKM "Sangat Baik"/Jumlah PD) x 100%	46	47	50	50,00
1.12	Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	Jumlah Nilai Indeks Reformasi Birokrasi seluruh Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah	71,86	75,00	78,50	79,00
1.13	Rata-rata Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Nilai	Jumlah Nilai Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah	57,78	33,50	33,80	60,01
1.14	Persentase Pemenuhan Eviden Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam SILPPD	%	(Jumlah Eviden IKK yang Terpenuhi / Jumlah Eviden IKK yang Harus Dipenuhi) X 100%	100	100	100	100
1.15	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan	63,99	71,70	71,80	77,40
1.16	Indeks Zakat Nasional (IZN)	poin	Nilai Indeks Zakat Nasional yang dikeluarkan oleh BAZNAS Pusat	0,59	0,63	0,65	1
1.17	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat	77,34	71,70	71,80	77,40
1.18	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	46,92	71,70	71,80	77,40
1.19	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Administrasi Pembangunan / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Administrasi Pembangunan	76,21	71,70	71,80	77,40
1.20	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	%	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan yang Dilaksanakan / Jumlah Saran Tindak Lanjut) X 100%	100	100	100	100
1.21	Persentase Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	((Nilai ITKP Tahun n - Nilai ITKP Tahun n-1) / Nilai ITKP Tahun n-1) x 100%	3,99	1,41	4,09	4,00
1.22	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Target fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD/Realisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD x 100%	86,09	87,00	88	88,00
1.23	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	(Jumlah Hari Penetapan Perda APBD yang Tepat Waktu / Jumlah Hari yang Ditentukan) x 100%	100	100	100	100
1.24	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	Jumlah Ranperda yang Ditetapkan / Jumlah Ranperda yang Direncanakan) x 100%	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
1.25	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	(Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Efektif / Total Jumlah Kegiatan Pengawasan) x 100% atau (Jumlah Rekomendasi yang Dilaksanakan / Total Jumlah Rekomendasi) x 100%	100	100	100	100
2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
2.1	Perencanaan Pembangunan						
2.1.1	Nilai Pencapaian Komponen Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Poin Pencapaian Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP Kota dari Kementerian PANRB	24,30	24,15	24,25	24,76
2.1.2	Nilai Pencapaian Komponen Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Poin Pencapaian Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Kota dari Kementerian PANRB	19,88	20,24	20,34	20,34
2.1.3	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah) / (Jumlah Perangkat Daerah)	26,32	25,81	25,91	26,82
2.1.4	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah	24,59	24,18	24,28	24,99
2.1.5	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM)	26,60	25,73	25,83	27,10
2.1.6	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	(Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM)	24,53	24,09	24,19	25,02
2.1.7	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK)	25,25	26,09	26,19	26,19
2.1.8	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan	Poin	(Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK)	24,80	24,51	24,61	25,27
2.2	Keuangan						
2.2.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	Opini dari BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.2	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/Target Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah) x 100	100	100	100	100
2.2.3	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/Target Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah) x 100	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
2.2.4	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/Target Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah) x 100	100	100	100	100
2.2.5	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar/Target Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah) x 100	100	100	100	100
2.2.6	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	(Total PAD Tahun Ini – Total PAD Tahun Lalu) / (Total PAD Tahun Lalu) x 100%	20,96	14,6	17,82	17,82
2.2.7	Persentase Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah yang tersedia	%	(Jumlah Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah yang tersedia / Jumlah dokumen Target PAD) * 100%	100	100	100	100
2.2.8	Persentase penerapan kebijakan teknis	%	(Jumlah kebijakan teknis yang diterapkan / Jumlah kebijakan teknis) * 100%	100	100	100	100
2.2.9	Persentase pengelolaan penerimaan pajak yang sesuai standar	%	(Jumlah dokumen pengelolaan penerimaan pajak yang sesuai ketentuan / Jumlah dokumen pengelolaan penerimaan pajak) * 100%	100	100	100	100
2.2.10	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pendapatan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pendapatan) * 100%	100	100	100	100
2.2.11	Persentase Layanan yang memanfaatkan teknologi informasi	%	(Jumlah layanan yang memanfaatkan teknologi informasi / Jumlah layanan) * 100%	100	100	100	100
2.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
2.3.1	Indeks Sistem Merit	Nilai	Penilaian mandiri sistem merit yang diverifikasi dan ditetapkan oleh KASN, meliputi aspek: a. perencanaan kebutuhan; b. pengadaan; c. pengembangan karier; d. promosi dan mutasi; e. manajemen kinerja; f. penggajian, penghargaan dan disiplin; g. perlindungan dan pelayanan; dan h. sistem informasi. (Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah)	335	339	344	344
2.3.2	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Nilai	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN	37,5	37,5	37,5	37,5
2.3.3	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN	Nilai	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN	36	38	38	38
2.3.4	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	Nilai	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	12	12	12	12
2.3.5	Nilai kriteria kualitas sistem informasi	Nilai	Nilai kriteria kualitas sistem informasi	22	24	24	24



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
2.3.6	Nilai kriteria kualitas evaluasi kinerja	Nilai	Nilai kriteria kualitas evaluasi	67,5	67,5	67,5	67,5
2.3.7	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	35	35	37,5	37,5
2.3.8	Nilai kriteria kualitas pengelolaan promosi dan mutasi	Nilai	Nilai kriteria kualitas kualitas pengelolaan promosi dan mutasi	35	35	35	35
2.3.9	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	Nilai	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	60	60	60	60
2.3.10	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi pengembangan kompetensi	Nilai	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi pengembangan kompetensi	30	30	32,5	32,5
2.4	Penelitian dan Pengembangan						
2.4.1	Persentase hasil riset/kajian yang dimanfaatkan	%	(Hasil riset/kajian yang dipublikasikan / Total target Seluruh Hasil Riset/Kajian) x 100%	N/A	13,04	21,74	21,74
2.4.2	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Perangkat Daerah minimal berkategori inovatif	%	(Jumlah PD yang IIPD minimal berkategori inovatif/Jumlah PD) X 100%	N/A	13,89	16,67	16,67
2.4.3	Persentase hasil riset/kajian yang sesuai standar	%	(Hasil riset/kajian yang disusun / Total target Seluruh Hasil Riset/Kajian) x 100%	N/A	19,35	22,58	22,58
2.4.4	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang terverifikasi nasional	%	((Total inovasi di IGA tahun ini) - (Total inovasi di IGA tahun sebelumnya)) / (Total inovasi di IGA tahun sebelumnya) x 100%	38,75	50,00	62,50	62,50
2.4.5	Persentase pencapaian fasilitasi HAKI	%	(Jumlah Karya/Inovasi yang difasilitasi HAKI dan telah terdaftar / Jumlah Target Karya/Inovasi yang difasilitasi HAKI) x 100 %	N/A	17,65	17,65	17,65
3	Unsur Pengawasan Pemerintahan						
3.1	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level (Poin)	Level Kapabilitas APIP yang telah dilakukan Penilaian oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
				-3,06	-3,1	-3,15	-3,15
3.2	Nilai Komponen Evaluasi Internal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	Nilai Unsur Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Tingkat Kota yang dikeluarkan oleh evaluator PAN RB	17,15	17,50	17,55	17,55
3.3	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	Level Maturitas SPIP Tingkat Kota hasil evaluasi BPKP	3,144	3,164	3,174	3,174
3.4	Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja strategis pemerintah daerah yang sesuai dengan standar	%	Jumlah Pengawasan kinerja Strategis Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dibandingkan jumlah seluruh kinerja strategis pemerintah daerah	100	100	100	100
3.5	Persentase kesesuaian Indikator kinerja kunci Laporan kinerja Pemerintah Daerah (LPPD)	%	Jumlah Indikator Kinerja Kunci yang terverifikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Indikator Kinerja Kunci	100	100	100	100
3.6	Persentase Laporan hasil revidi atas LKPD yang sesuai SAP	%	kesesuaian laporan keuangan yang disusun dibandingkan dengan unsur laporan keuangan	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
3.7	Persentase capaian penyelesaian TLHP	%	Akumulasi jumlah rekomendasi APIP yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh rekomendasi yang di terbitkan	N/A	82,5	83	83
3.8	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	%	jumlah pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dibandingkan dengan jumlah PDTT dalam PKPT	100	100	100	100
3.9	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%	Capaian penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP terhadap total rekomendasi hasil pengawasan APIP yang diterbitkan	100	100	100	100
3.10	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	%	jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	87,31	87,35	87,37	87,37
3.11	Persentase kesesuaian antara peraturan / kebijakan terkait pengawasan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	%	Jumlah kebijakan yang sesuai antara peraturan/kebijakan terkait pengawasan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dibandingkan dengan jumlah aturan yang harus disesuaikan	N/A	100	100	100
3.12	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi	%	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah rencana pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada PKPT	N/A	100	100	100
3.13	Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP hasil Penjaminan Kualitas	Skor	Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP hasil Penjaminan Kualitas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pembantu IV	3,221	3,241	3,251	3,251
3.14	Persentase cakupan pengawasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi	%	Persentase jumlah perangkat daerah yang terevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasinya dibandingkan dengan jumlah total perangkat daerah yang harus dievaluasi	100	100	100	100
3.15	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	%	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi adalah Indeks yang menggambarkan efektifitas pencegahan korupsi dalam kerangka maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi oleh BPKP	2,49	2,495	2,500	2,500
3.16	Predikat SPI	Predikat	Predikat yang didapat berdasarkan Skor SPI hasil survey yang dilakukan oleh KPK terhadap risiko-risiko korupsi di lingkungan pemerintah kota tasikmalaya	Rentan (0-72,9)	Waspada (73-77,9)	Waspada (73-77,9)	Waspada (73-77,9)
4	Unsur Kewilayahan						
4.1	Persentase permohonan administratif Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administrasi Bidang Kesra yang terlayani/ Target permohonan administrasi Bidang Kesra yang terlayani) x 100	100	100	100	100
4.2	Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	%	(Realisasi sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan/ Target sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan) x 100	100	100	100	100
4.3	Persentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	%	(Realisasi data dan informasi kecamatan yang dilaporkan/Target data dan informasi kecamatan yang dilaporkan) x 100	100	100	100	100
4.4	Persentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administrasi Bidang Pemerintahan yang terlayani/ Target permohonan administrasi Bidang Pemerintahan yang terlayani) x 100	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
4.5	Persentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	%	(Realisasi Peningkatan Kelurahan berprestasi/Target Peningkatan Kelurahan berprestasi) x 100	100	100	100	100
4.6	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	%	(Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum/Target Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum) x 100	100	100	100	100
4.7	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar/Target permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar) x 100	100	100	100	100
4.8	Persentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar	%	(Realisasi bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar/Target bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar) x 100	100	100	100	100
4.9	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	%	(Realisasi infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan/Target infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan) x 100	100	100	100	100
4.10	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang	%	(Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Ekbang/Target Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Ekbang) x 100	100	100	100	100
4.11	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administrasi Bidang Ekbang yang terlayani/ Target permohonan administrasi Bidang Ekbang yang terlayani) x 100	100	100	100	100
4.12	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	%	(Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Kesra/Target Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Kesra) x 100	100	100	100	100
4.13	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	%	(Realisasi penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum/Target penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum) x 100	100	100	100	100
5	Urusan Pemerintahan Umum						
5.1	Persentase Masyarakat Terbina Kesatuan Bangsa dan Politik	%	Jumlah masyarakat terbina kesatuan bangsa dan politik / jumlah masyarakat kota tasikmalaya usia produktif x 100%	6,06	8	10	10
5.2	Tingkat Partisipasi Pemilih	%	Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya yang menggunakan hak pilihnya/ Jumlah masyarakat yang terdaftar x 100%	-	N/A	N/A	-
5.3	Persentase Penurunan Potensi Konflik	%	Jumlah potensi konflik (thn n-1) - jumlah potensi konflik (n)/ jumlah potensi konflik (thn n-1) x 100%	20	20	20	20
5.4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	Jumlah masyarakat terbina bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan / jml masyarakat terbina yang ditargetkan x 100%	100	100	100	100
5.5	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	Jumlah masyarakat terbina di bidang Pendidikan Politik/ jml masyarakat yang ditargetkan x 100%	100	100	100	100
5.6	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	Jumlah Ormas yang aktif / Jumlah Ormas x 100%	65	65	65	65



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2027

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	Capaian 2025	TARGET KINERJA		
					RKPD 2026	Target RPJMD Untuk Tahun 2027	RKPD 2027
5.7	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	Jumlah kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan / jumlah kebijakan yang ditargetkan x 100%	100	100	100	100
5.8	Persentase Intensitas Koordinasi antarumat Beragama	%	Jumlah realisasi intensitas koordinasi antar umat beragama/ Jumlah intensitas koordinasi antar umat beragama yang ditargetkan x 100%	100	100	100	100
5.9	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	Jumlah potensi konflik yang diselesaikan/ jumlah potensi konflik x 100%	100	100	100	100

Sumber: RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026, Hasil Analisa Bappelitbangda, diolah 2026



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2027 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi Jawa Barat.

Dalam mengawal RKPD, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam mengelola risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam pencapaian sasaran RKPD.

Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas dan sasaran daerah serta untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tasikmalaya, melaksanakan RKPD Tahun 2027 secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
2. RKPD Tahun 2027 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 dan RAPBD Tahun Anggaran 2027;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota/APBD Provinsi/APBN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang RKPD Tahun 2027;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara proporsional;
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, potensi sumber daya dari masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2027, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Wali Kota melalui Kepala Bappelitbangda;
7. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian, evaluasi dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2027. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2027 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan dalam RKPD tahun 2027, pencapaian visi-misi Wali Kota Tasikmalaya yang tercantum di dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029, pencapaian visi-misi Gubernur Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan sungguh-



sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk menjaga konsistensi arah pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi.

RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2027. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap asumsi, target, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN